

ISBN 978-623-6879-11-5



Kumpulan Tulisan

BUNGA RAMPAI

TANTANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI

Tim Editor:

Avi Budi Setiawan

Andryan Setyadharma

Annis Nurfitriana Nihayah

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

BUNGA RAMPAI

**TANTANGAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI**

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

ISBN 978-623-6879-11-5



Perumahan Teknik UGM No. 3 Seturan,
Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 485512

DINAMIKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Ditengah Pandemi

Editor

Avi Budi Setiawan

Andryan Setyadharma

Annis Nurfitriana Nihayah

**BETA OFFSET
Yogyakarta**

DINAMIKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Ditengah Pandemi

Editor

Avi Budi Setiawan
Andryan Setyadharma
Annis Nurfitriana Nihayah

Ed. 1. Cet. 1. Nopember, 2021
xiv + 418 hal; 17 x 24.5 cm.
ISBN 978-623-6879-11-5

Cetakan pertama, Nopember 2021
Hak Cipta © 2020 ada pada Penulis
Hak penerbitan ada pada Beta Offset

Dicetak dan diterbitkan Oleh:
Beta Offset Kavling Madukismo 28,
Seturan Caturtunggal Depok Sleman - Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 485512
E-mail: betaoffsetyk@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karuni-Nya sehingga Buku Dinamika Pembangunan Berkelanjutan, Kumpulan Tulisan Bunga Rampai ini berhasil diselesaikan dan disajikan sebagai literatur yang memperkaya pemikiran di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan.

Buku ini merupakan salah satu Buku Seri Kajian Ekonomi Pembangunan dan Sosial yang diinisiasi oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang. Artikel ilmiah pada Buku Bunga Rampai ini merupakan hasil kerja penulis akademisi dari berbagai Universitas di Indonesia, yang dihasilkan dari kegiatan Online Workshop Penulisan Ilmiah Populer Bidang Sosial, Ekonomi dan Pendidikan. Buku ini merupakan salah satu aktualisasi dari berbagai kegiatan Tri Dharma yang dilakukan oleh penulis di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Penulis yang melahirkan ide gagasan untuk dituangkan dalam buku ini.

Harapan kami, pembaca dapat menikmati dan memperoleh secuil manfaat setelah membaca buku ini. Kekurangan dan ketidaksempurnaan adalah sifat alamiah manusia, demikian pula kami menyadari bahwa dalam menyusun buku ini masih terdapat kekurangan, dan bahkan kesalahan. Saran, kritik dan masukan dari pembaca, sangat kami harapkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat, Terima kasih

Semarang, Agustus 2021
Tim Editor:

Avi Budi Setiawan
Andryan Setyadharma
Annis Nurfitriana Nihayah

E P I L O G

PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam gerak maju perekonomian, kapitalisme dipandang sebagai obat mujarab bagi pertumbuhan ekonomi. Ukuran keberhasilan perekonomian juga dilihat dari rangkaian angka yang menunjukkan volume produksi dan produktivitas. Sehingga para pemangku kebijakan berlomba-lomba untuk mengundang investasi, teknologi, kapital, mendorong pasar yang bersaing sempurna. Tujuannya adalah untuk mencapai cita-cita kapitalisme, yakni efisiensi dan produktivitas.

Pandangan ini mendapat kritik tajam dari ekonom yang berhaluan sosialis dan institusionalis. Amartya Sen pernah mengatakan bahwa ekonomi ini bukan hanya deretan angka, namun lebih daripada itu. Ekonomi adalah rangkaian upaya untuk mendorong kesejahteraan kolektif. Untuk apa pertumbuhan ekonomi besar jika masih terdapat ketimpangan yang lebar antara golongan kapitalis pemilik faktor produksi dan kelompok marginal.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemberdayaan dan perlindungan bagi kelompok yang tidak berdaya secara ekonomi. Pada kelompok pinggiran inilah masalah sosial biasanya timbul karena ketidak merataan kue pembangunan. Ide ini membawa kita pada padangan tentang kolektivitas seperti yang sudah didengungkan oleh ekonom berhaluan sosialisme pada pasca revolusi industri.

Pemberdayaan masyarakat melalui dukungan akses, kebijakan dan lain sebagainya ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah untuk lebih pemeratakan manfaat pembangunan. Semua harus mendapatkan manfaat, seperti cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yaitu mewujudkan kesejahteraan umum.

Akan tetapi, di tengah sistem ekonomi yang mulai mendekati bentuk pasar persaingan dan individualisme. Implementasi pemberdayaan masyarakat tentu bukanlah hal mudah. Namun sejatinya secara alamiah hal itu bisa dicapai. Simon Kuznet berhipotesa bahwa seiring berjalannya waktu maka ketimpangan yang awalnya tinggi sebagai buah dari pertumbuhan ekonomi yang melaju akan semakin konvergen. Artinya ketimpangan akan semakin rendah. Menurut Sritua Arief, fase ini adalah era kapitalisme matang.

Namun kita tentu saja tidak berharap kondisi ini akan muncul secara alamiah, mengingat untuk menuju *catching up* membutuhkan banyak prasya-

rat. Pemberdayaan masyarakat dan kelompok mikro ekonomi perlu untuk disentuh mulai dari sekarang. Harapannya kelompok ini akan bisa naik level kehidupannya.

Terakhir, mengutip yang dikatakan RH Tawney, orang miskin ini ibarat berdiri di sebuah danau, mereka terendam air hingga leher. Ada gelombang sedikit saja sudah cukup untuk menenggelamkan mereka. Hal ini merepresentasikan kerentanan kelompok marginal. Sehingga perlindungan kepada mereka mutlak harus dilaksanakan. Sebagai bentuk kehadiran pemerintah.

Tim Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
EPILOG	vii
DAFTAR ISI	ix

■ BAB I

1. <i>WOMEN EMPOWERMENT</i> SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEREKONOMIAN Retnoningrum Hidayah, Sukirman, Dhini Suryandari, <i>Trisni Suryarini, Rita Rahayu</i>	1
2. MODEL PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN AGROWISATA HILIRISASI DURIAN DI KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS <i>Sodik Dwi Purnomo, Minadi Wijaya</i>	11
3. PENDAMPINGAN BAGI PENGRAJIN JAMU DALAM PENGUATAN PASAR PRODUK HERBAL UNTUK MERAH PELUANG BISNIS DI MASA PANDEMI <i>Erni Panca Kurniasih, Erna Listiana, Metasari Kartika</i>	21
4. PERSPEKTIF HARGA DAN KEUNTUNGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP PUKAT CINCIN MINI SEBAGAI ALTERNATIF PENYERAP TENAGA KERJA <i>Dian Ayunita N.N. Dewi, F. X. Sugiyanto, Deden D. Iskandar</i>	33
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF <i>Lilis Siti Badriah</i>	45
6. PENAMBAHAN TULANG IKAN BANDENG (<i>CHANOS CHANOS</i>) DALAM PENGOLAHAN SEREAL <i>Widya Pangestika, David Indra Widiyanto, Farakh Fadila Windiarti</i>	57
7. STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) BORDIR DI KABUPATEN KUDUS <i>Saifudin Zuhri</i>	71
8. DEVELOPMENT OF PERFORMANCE IMPROVEMENT OF MSMES IN LOYOK VILLAGE SIKUR DISTRICT EAST LOMBOK REGENCY BASED ON SWOT ANALYSIS <i>Triana Lidona Aprilani, Fathurrahman, Laely Hurriati</i>	83

9. PEMANFAATAN TINTA CUMI-CUMI (<i>Loligo sp.</i>) PADA PEMBUATAN MIE KERING IKAN <i>Kusuma Arumsari, Syifa Anwariyah, Widya Pangestika</i>	97
10. RELIGIUSITAS BAURAN PEMASARAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PERSEPSI NASABAH <i>Sugeng Nugroho Hadi</i>	108
11. UPAYA MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA TANGERANG MELALUI OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SEKTOR POTENSIAL <i>Erida Pratiwik, Yudha Dwi Kurniawan, Shinta Aulia Rani, Grace Natalia M</i>	122
12. PEMBERDAYAAN PETANI SAYUR DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MELALUI DIVERSIFIKASI PRODUK <i>Fafurida, Shanty Oktavilia, Dyah Maya Nihayah, Yozi Aulia Rahman...</i>	136
13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUS DALAM MENYUSUN STRATEGI <i>GREEN TRANSPORTATION</i> <i>Amin Pujiati, Sri Handayani, Dyah Maya Nihayah, Mashuri</i>	145
14. PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN <i>Asep Ferry Bastian, Faisal Tomi Saputra, Khusaini Khusaini</i>	153
15. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES DENGAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA <i>Karsinah, Amin Pujiati, Fafurida, Annis Nurfitriana Nihayah, Tania Wicaksana Yuneldi</i>	166

▪ BAB II

16. TRANSFER INFORMASI PENGETAHUAN DAN ADAPTASI KERJA DOSEN PADA MASA PANDEMI COVID 19 <i>Mahmud Yunus, Qristin Violinda, Suwarno Widodo, R. Istiyaningsih, Rahmat Robi Waliyansyah</i>	175
17. PENINGKATAN SENSITIVITAS MASYARAKAT SEBAGAI DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK <i>Sri Wahyuni</i>	180
18. DISTINGSI PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN UMKM DI NEGARA TERDAMPAK COVID 19 <i>Nina Farliana</i>	190

19. KEBIJAKAN PANGAN & GELIAT PASAR TRADISIONAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA <i>Rr. Retno Sugiharti, Jihad Lukis Panjawa, Fandi Ahmad Alfian</i>	202
20. BUDAYA ORGANISASI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI UNIVERSITAS PADA SAAT PANDEMI COVID -19 <i>Qristin Violinda, Mahmud Yunus, Suwarno Widodo R Istiyaningsih, Rahmad Robi Waliansyah</i>	214
21. BELANJA TIDAK TERDUGA AKIBAT COVID-19 DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMERINTAH DAERAH SRAGEN <i>Kusmuriyanto, Saringatun Mudrikah, Wulan Suci Rachmadani, Kardiyem, Widodo</i>	223
22. OPTIMALISASI MARKET SHARE KnK KOFFEE RESOURCES DI TENGAH PANDEMI COVID 19 <i>Maylia Pramono Sari, Surya Raharja, Afta Serti Mardita</i>	233
23. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID -19 (STUDI KASUS KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN) <i>Novi Theresia Kiak, Clarce Sarliana Maak, Maria Prudensiana Leda Muga.....</i>	251
24. <i>SPACE AWARENESS</i> DAN <i>SPACE EDUCATION</i> MELALUI LAYANAN ANTARIKSA SELAMA PANDEMI COVID 19 <i>Intan Perwitasari.....</i>	266
25. UPAYA PENINGKATAN PENGGUNAAN KARTU TANI (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN WONOSOBO) <i>Prasetyo Ari Bowo; Avi Budi Setiawan</i>	274
26. PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN <i>Asep Ferry Bastian, Faisal Tomi Saputra, Khusaini Khusaini</i>	281
27. ANALISIS KEBERLANJUTAN UTANG UNTUK MENDORONG AKSELERASI EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA <i>Yozi Aulia Rahman, Dwi Rahmayani, Bayu Bagas Hapsoro</i>	293
28. PAKUNCEN BUDAYA (PAKUDAYA) CULINARY: PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELUARGA SASARAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 <i>Sri Wahyuni, Puspita Wulandari.....</i>	305

29. ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI PADA UMKM DI BANDUNGAN KOTA SEMARANG <i>Phany Ineke Putri, Karsinah, Nurjannah Rahayu K</i>	318
30. PEKERJA PEREMPUAN DI TENGAH PANDEMI: MASALAH DAN SOLUSI <i>Nury Ariani W, Rudatin W</i>	324
31. PENDAMPINGAN USAHA KECIL MIKRO DI KOTA SEMARANG MENJADI BANKABLE GUNA MEMPERMUDAH AKSES KREDIT DI LEMBAGA KEUANGAN <i>Nurjannah Rahayu Kistanti, Andryan Setyadharma, Yozi Aulia Rahman, Phany Ineke Putri</i>	335

▪ **BAB III**

32. PEMBERDAYAAN GURU PESANTREN MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS <i>FLIPPED CLASSROOM</i> UNTUK MENGEMBANGKAN PROFESIONALITAS GURU <i>Suci Nurpratiwi</i>	347
33. PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EYL TEACHERS IN 21 st CENTURY <i>Iwan Wijaya</i>	363
34. BEST-PRACTICES PEMBELAJARAN SIFAT KOLIGATIF LARUTAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN JET (JELAS <i>ENTENG full TRIK</i>) DI SMA NEGERI 1 PATIKRAJA <i>Sujatno</i>	372
35. <i>COMMUNITY BASED TOURISM</i> BERBASIS MEDIA DIGITAL SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI DESA DITENGAH PANDEMI COVID 19 <i>Prima Yustitia Nurul Islami</i>	383
36. THE EMPOWEREMENT OF WRITING ABILITY THROUGH GRAPHIC ORGANIZERS <i>Mega Mulianing Maharani, Rima Zahrotul Muniroh, Ambar Asyhari ...</i>	396
37. BUDAYA LITERASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN <i>SOFTSKILL</i> GENERASI MUDA <i>Dyah Maya Nihayah, Amin Pujiati, Fafurida, Avi Budi Setyawan</i>	407

■ BAB IV

38. KAJIAN DAMPAK EKSTERNALITAS GALIAN LIAR TAMBANG C TERHADAP LINGKUNGAN: STUDI KASUS DESA GOMBANG, KECAMATAN BOGOREJO, KABUPATEN BLORA <i>Mochamad Syaiful Anwar, Dwi Rahmayani, Rizka Yuliani, Aristawidya Dwi Putri, Hilmy Yunus Firmansyah</i>	417
39. DAMPAK SAMPAH PADA HASIL TANGKAPAN NELAYAN (STUDI KASUS NELAYAN JARING ARAD PANTAI PENGARADAN, BANTEN) <i>Hastarini Dwi Atmanti, Evi Yulia Purwanti</i>	425
40. PASAR JATEN PINGGIR KALI SEBAGAI POTENSI EKOWISATA DI SEMARANG <i>Dewi Isma Aryani</i>	435
41. MODEL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA GUNUNG LURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS <i>Sodik Dwi Purnomo, Minadi Wijaya, Ady Achadi</i>	448
42. DESAIN DERMAGA APUNG BERBASIS <i>ECOBRIK</i> DI KAWASAN PANTAI BULAKSETRA PANGANDARAN <i>Anas Noor Firdaus, Yuni Ari Wibowo, Arif Baswantara, Ahmad Maulana</i>	457
43. PENGARUH PEMBERIAN MAGOT SEBAGAI PAKAN ALAMI TERHADAP PERTUMBUHAN IKAN NILA (<i>Oreochromis niloticus</i>) <i>Wahyu Puji Astiyani, Ega Aditya Prama, Khairunnisa Makbul</i>	466
BIDODATA PENULIS	475

WOMEN EMPOWERMENT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEREKONOMIAN

**Retnoningrum Hidayah, Sukirman, Dhini Suryandari,
Trisni Suryarini, Rita Rahayu**

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 bahwa sumber-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Oleh karena itu negara wajib menjamin kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Namun apabila dilihat dari sudut pandang realistik menunjukkan bahwa perlu adanya uluran dari pihak lain, artinya kita tidak bisa bergantung hanya pada pemerintah. Masyarakat harus mampu berdiri sendiri berusaha mandiri dan mensejahterakan kehidupannya. Sehingga negara berperan sebagai pendukung kesejahteraan sedangkan modal utama ada di semangat juang masyarakat itu sendiri.

Keluarga menjadi faktor utama di dalam pencapaian peningkatan sumberdaya manusia yang handal. Hal ini selaras dengan Telaumbanua dan Nugraheni (2018) yang menyatakan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Banyak pemikiran yang menganggap bahwa wanita merupakan kunci kesuksesan keluarga. Lebih lanjut, Harriet (2014) juga meyakini bahwa peran wanita sangat penting di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik buruknya suatu keluarga sering dicerminkan dari perjuangan sosok ibu di rumah tangga tersebut. Selanjutnya, kemampuan ibu rumah tangga yang tak diragukan lagi mulai dari kemampuan *softskill* memahami hati perasaan anak dan suami, hingga pada kemampuan *multitalent* di mana mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga yang mana dalam waktu bersama bisa melakukan mencuci sembari meninngkan anak dan menggoreng tempe. Ini suatu gambaran yang luar biasa. Betapa wanita mampu menguasai beberapa hal dan melakukan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan sempurna. Berdasarkan hal tersebut nampak jelas apabila melakukan perubahan pada tatanan masyarakat dapat dimulai dari ibu rumah tangga. Kondisi ini mematahkan anggapan paham patrilineal yang memandang sebelah mata kepada para ibu rumah tangga. Djabu, *et al.* (2013) menyatakan sistem kebudayaan patrilineal menyebabkan rendahnya peran wanita dalam aspek perekonomian. Lebih

lanjut, paham patrilineal memandang lelaki lebih berkuasa dan berperan dalam keluarga terutama aspek ekonomi.

Hal serupa pun sering dilontarkan oleh para lelaki selaku kepala keluarga. Para suami menganggap seluruh pekerjaan rumah adalah tanggungjawab wanita, sedangkan mencari nafkah adalah pekerjaan lelaki. Namun pada suatu titik di mana suami ternyata tak mampu mencukupi kebutuhan keluarga menjadi bumerang bagi wanita itu sendiri. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering sekali muncul akibat kesulitan ekonomi. Kaum lelaki menganggap sang wanita tak mampu mengelola uang dan cenderung menghamburkan uang, padahal kenyataannya kebutuhan hidup memang terus merangkak naik. Disinilah muncul kesenjangan yang sangat tinggi. Sang lelaki yang semula beranggapan mampu menafkahi dan melarang istri bekerja, sekarang telah mulai berpaling. Suami menyadari bahwa penghasilannya tak cukup lagi, namun sudah terlambat bagi sang istri untuk melamar pekerjaan dikarenakan pembatasan usia pekerja serta *skill* yang sangat jauh dibandingkan para *freshgraduate*.

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu adanya tindakan pemberdayaan para wanita agar mampu meningkatkan kemampuan dan bersaing di era globalisasi yang semakin maju ini. Era globalisasi telah merubah Banyak hal yang bisa dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat mulai dari pemberdayaan wanita dalam hal peningkatan kepercayaan diri, peningkatan kemampuan ekonomi, kesehatan hingga pada pemasaran. Para akademisi hendaknya mampu ikut serta merubah tatanan stigma masyarakat yang menganggap wanita lemah dan hanya dibutuhkan pada urusan *masak, macak, manak*. Lebih dari itu, wanita memiliki peran dalam pembangunan bangsa. Generasi penerus yang cerdas bergantung pada wanita yang mendidiknya.

PEMBAHASAN

1. Keluarga

Undang-undang No. 10 Tahun 1992 jo PP No. 21 Tahun 1994 menyatakan bahwa terdapat tujuh fungsi yang diemban oleh keluarga. Pertama fungsi keagamaan, keluarga harus mampu mengajarkan ajaran agama yang digunakan sebagai landasan hidup sehari-hari. Kedua, fungsi budaya yaitu keluarga sebagai tempat belajar norma, etika dan budaya luhur bangsa sehingga mampu menangkal segala pengaruh negatif dari budaya luar. Ketiga, fungsi cinta kasih yaitu keluarga memberikan kesadaran akan pentingnya kasih sayang terhadap sesama dan membina sikap saling mengasihi. Keempat fungsi perlindungan yaitu memberikan rasa aman secara jasmani dan rohani kepada seluruh anggota keluarga dari segala bentuk ancaman serta rasa khawatir. Kelima, fungsi reproduksi yaitu keluarag sebagai tempat untuk

meningkatkan keturunan dan menerapkan kaidah reproduksi yang sehat. Keenam, fungsi sosialisasi yaitu sebagai tempat untuk mencari solusi dan menciptakan suasana musyawarah yang bermakna bagi seluruh anggota keluarga. Terakhir fungsi pelestarian lingkungan artinya keluarga ikut andil di dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan asri bagi tumbuh kembang anak.

Seiring berjalannya waktu terdapat pergeseran fungsi keluarga. Peran keluarga mulai tergeser oleh *gadget*, bahkan oleh tatanan sosial masyarakat yang lebih mempercayakan pengasuhan anak pada *babysitter*. Lebih lanjut, pemenuhan kebutuhan anak pada masa sekarang tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Sebagai contoh anak yang hidup di keluarga beruntung makan akan mampu mengakses *wifi* untuk mengikuti sekolah daring dan mengikuti les privat mata pelajaran melalui ruang guru atau kursus *online* lainnya. Sedangkan, anak yang berasal dari keluarga kurang beruntung maka akan sulit untuk mendapatkan akses internet sehingga hanya menggantungkan datang ke sekolah dan mengerjakan tugas secara manual. Lalu bagaimana dengan akses les mata pelajaran tambahan? Tentu saja jauh dari kata cukup. Jangankan les tambahan, untuk membeli kuota internet mengikuti sekolah daring rutin saja tak mampu. Hal ini selaras dengan penelitian Sebataraja, *et al.* (2014) bahwa kebutuhan anak dapat terpenuhi berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu keluarga menjadi kunci sukses insan manusia di masa depan. Kemampuan sosial, agama serta kuatnya karakter manusia dipupuk sejak berada di lingkungan keluarga.

2. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga

Pemberdayaan ibu rumah tangga menjadi hal yang penting di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan Fajar, *et al.* (2011) bahwa sumber daya manusia sangat penting di dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi. Lebih lanjut, Rahayu (2009) meyakini sumber daya manusia adalah kunci pembangunan. *Women empowerment* berujung pada meningkatkan kemampuan wirausaha ibu rumah tangga. Wirausaha merupakan solusi bagi himpitan ekonomi dan kerasnya pola pikir kaum lelaki yang menuntut para istri harus di rumah saja. Lebih lanjut, para ibu rumah tangga tetap mampu menjalankan rutinitas sehari-hari merawat anak dan suami dan memiliki penghasilan tambahan. Terlebih lagi usaha mikro kecil telah didukung oleh masyarakat luas tanpa adanya *barrier*. Hal ini selaras dengan Fritsch dan Storey (2014) bahwa usaha mikro dan kecil mendominasi 90% perusahaan di seluruh kawasan dunia.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka menerapkan pemberdayaan ibu rumah tangga. Pertama, memberikan wawasan tentang pentingnya kemandirian bagi wanita. Lebih lanjut, Rahmanawati (2001) menyatakan

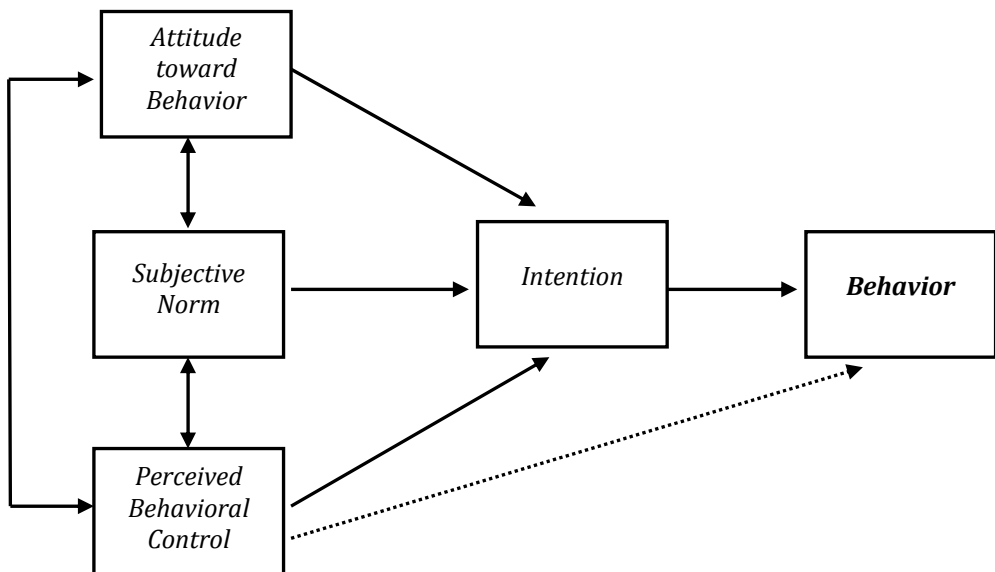
bahwa wanita mandiri dengan pola pikir kesetaraan gender akan mampu mengangkat derajatnya sendiri. Seorang wanita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada sosok lelaki. Hal ini disebabkan apabila terjadi sesuatu terhadap lelaki tersebut maka kecenderungannya wanita akan ikut merana. Lebih lanjut, kemandirian yang wajib dimiliki seorang wanita agar mampu bertahan dalam kehidupan adalah kemampuan sosial dan kemampuan ekonomi (Basukiyatno, 2003). Kemampuan sosial meliputi bagaimana wanita tersebut berinteraksi dengan dunia sekitar dan lingkungannya. Adanya hubungan baik dengan lingkungannya, adanya rasa nyaman dan aman untuk berinteraksi di sekitarnya terbukti mampu untuk meningkatkan kemampuan sosialisasi wanita serta meningkatkan kemampuannya di dalam memahami pangsa pasar. Kedua, kemampuan ekonomi yang mana harus terus diasah dan harus ditekuni selama prosesnya. Wanita yang mandiri secara ekonomi akan sanggup membesarkan buah hatinya secara utuh dan sukses. Oleh karena itu para wanita dituntut harus mampu berdagang dengan menyesuaikan pangsa pasar yang mampu ia raih sebagai hasil dari kemampuan sosialnya dalam menganalisis pasar.

Selanjutnya, pengenalan materi terkait membuat barang yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Adanya pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini memang memberikan dampak buruk kepada semua aspek. Namun apabila kita melihat lebih jauh maka terdapat peluang usaha. Pertama, usaha pembuatan masker. Masker menjadi kebutuhan utama masyarakat sehingga para ibu yang mampu menjahit dapat mulai memproduksi masker dari kain-kain perca yang ia miliki lalu dijual. Hal ini dapat dilakukan di sela-sela waktu mengurus rumah tangga. Kedua, membuat konektor masker dan menjualnya. Kebutuhan masker meningkat tentunya memunculkan kebutuhan konektor masker untuk mengaitkan masker agar tidak menyakitkan di telinga apabila terlalu lama. Berbagai macam bentuk manik-manik dapat dibuat dan dirangkai. Kebutuhan akan barang mentah yang simpel seperti manik/manik, senar dan tang. Pembuatan konektor ini pun dapat dilakukan kapan saja, saat jeda menanti masakan matang, jeda rehat setelah setrika dan lain-lain. Kegiatan membuat konektor tidak membutuhkan waktu beruntun dan lama. Artinya jika ibu rumah tangga sudah lelah maka dikerjakan besok saja. Pembuatan konektor masker cenderung fleksibel. Ketiga, membuat makanan kecil dan lauk pauk. Pandemi memaksa orang untuk lebih sering berada di rumah dan mengurangi aktivitas outdoor. Oleh karena itu kondisi ini menjadi peluang bagi ibu rumah tangga untuk membuat camilan dan aneka lauk lalu dipasarkan. Pada saat membuat camilan/lauk pauk maka ibu rumah tangga menyelesaikan dua pekerjaan sekaligus yaitu membuat makanan untuk keluarga dan membuat makanan untuk berdagang. Hal ini menunjukkan bahwa wirausaha justru mampu meringankan beban

para ibu rumah tangga dan tidak membebaninya. Lebih lanjut, Partin (2004) menjelaskan adanya *women empowerment* mampu memberikan perubahan pola interaksi di dalam keluarga yang lebih baik.

3. Minat dan Perilaku

Merubah tatanan masyarakat jawa yang meyakini bahwa tugas wanita adalah masak, macak, manak adalah hal yang tidak mudah. Pemikiran kuno yang dijadikan alasan kaum pria untuk menekan kaum wanita menjadi kunci kegagalan hakiki. Mayoritas lelaki merasa tak ingin disaingi oleh wanita dan berambisi untuk memegang penuh kendali. Selain itu faktor lainnya yang mampu mempengaruhi sikap wanita berwirausaha yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norm*, *perceived bahavioral control*, dan intensi. Menurut Ajzen (1991), dalam *plan behaviour theory* menjelaskan bahwa sikap mempengaruhi perilaku. Norma subyektif merupakan penilaian subyektif terhadap suatu perilaku wirausaha. Selanjutnya *perceived behavioral control* merupakan persepsi wanita tentang mudah atau sulitnya berwirausaha. Lebih lanjut, *perceived behavioral control* secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perilaku. Ketiga faktor tersebut akan berimbis pada niat wanita berwirausaha sehingga memunculkan perilaku yang mengarah pada pencapaian *women empowerment*. Hubungan antara niat, norma subyektif, control persepsian dan sikap dapat dilihat pada gambar 1. Di bawah ini



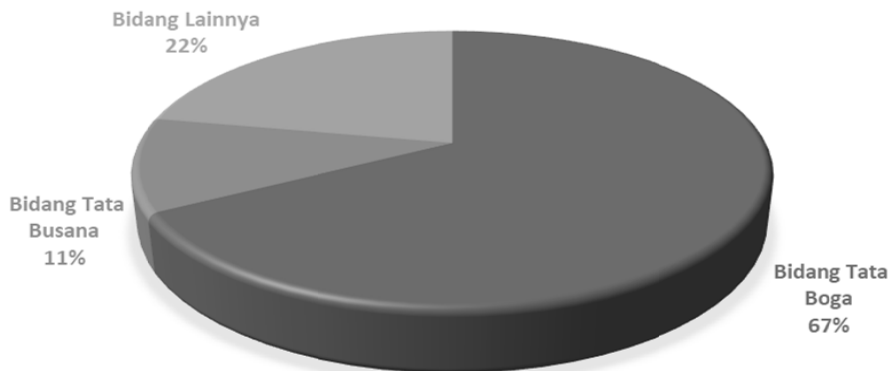
Gambar 1. *Planned Behavior Theory* (Ajzen, 1991)

Selanjutnya dilakukanlah pemetaan terhadap minat dan bakat wanita yang nantinya akan menentukan perilaku wirausaha. Berdasarkan pemetaan

yang dilakukan pada Tabel 1 maka terdapat tiga kelompok bidang minat para wanita diantaranya:

- Bidang Tata Boga: 12: 18 (67%)
- Bidang Tata Busana: 2: 18 (11%)
- Bidang Lainnya: 4: 18 (22%)

Berdasarkan persentase di atas maka dilakukanlah penyusunan diagram *Pie* sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

Gambar 2. Persentase Bidang Bakat

Tabel 1. Pemetaan Minat dan Bakat

NO	NAMA	USIA	MINAT	BAKAT
1	Siti Amanah	55 tahun	Berdagang	Memasak
2	Retnowati Inayah	36 tahun	Berdagang	<i>Reseller</i>
3	Tri Mulyati	36 tahun	Berdagang	Memasak
4	Sofiatun	43 tahun	Urusan Rumah Tangga	Memijat
5	Wuri Rosanti	60 tahun	Urusan Rumah Tangga	Menjahit
6	Nasian	50 tahun	Urusan Rumah Tangga	Menjahit
7	Fitri	30 tahun	Berdagang	Memasak
8	Dayat	33 tahun	Berdagang	Memasak
9	Yuni	45 tahun	Urusan Rumah Tangga	Memasak
10	Sri Lestari	50 tahun	Urusan Rumah Tangga	Memasak
11	Salim	55 tahun	Urusan Rumah Tangga	Berdagang
12	Siti Mahmudah	36 tahun	Berdagang	Memasak
13	Trimo	50 tahun	Urusan Rumah Tangga	Memasak
14	Nur	36 tahun	Berdagang	Memasak
15	Mita	38 tahun	Berdagang	Memasak
16	Sri Wur Yani	40 tahun	Urusan Rumah Tangga	Memasak
17	Dewi	33 tahun	Urusan Rumah Tangga	Berdagang
18	Aseh	36 tahun	Berdagang	Memasak

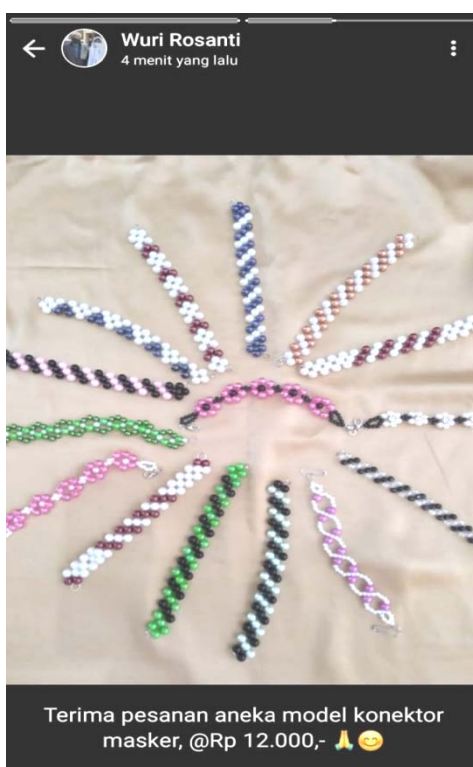
Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan Gambar 2 Persentase Bidang Bakat di atas menunjukkan bahwa potensi minat terbesar ibu rumah tangga yaitu di bidang tata boga. Oleh karena untuk menyalurkan potensi tersebut maka para ibu rumah tangga menjual hasil masakannya melalui berbagai sosial media yang mereka miliki. Sarana platform sosial media yang paling mudah adalah melalui WhatsApp. Trisnani (2017) meyakini bahwa WhatsApp merupakan sosial media yang dominan digunakan oleh masyarakat. Selain itu, sosial media merupakan sarana yang tepat untuk menarik para pelanggan, ditambah lagi kondisi pandemi yang memaksa konsumen tak bisa keluar rumah (Widayati & Augustinah, 2019).

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa apapun kondisinya selama masih ada niat yang baik akan memunculkan perilaku yang selaras pula. Belajar dari status WhatsApp masakan Ibu Siti Amanah menunjukkan bahwa ibu rumah tangga tetap mampu berkarya, mengisi waktu luang sebaik mungkin dan meningkatkan ekonomi kerakyatan.



Gambar 3. Berjualan Hasil Masakan Lauk Melalui Status WhatsApp



Gambar 4. Berjualan Hasil Kerajinan Tangan Melalui Status Whatsapp

Selanjutnya, Gambar 4 menunjukkan bahwa kemampuan kerajinan tangan yang kita miliki dapat menghasilkan pundi uang. Belajar dari Ibu Wuri Rosanti yang mengisi hari tua dengan membuat kerajinan tangan konektor masker aneka kreasi. Meskipun bakat beliau pada bidang tata busana namun semangat belajar tinggi mampu menghantarkannya menguasai seni kerajinan tangan meronce manik menjadi konektor masker aneka kreasi, Kondisi ini menunjukkan bahwa umur bukan penghalang untuk mandiri secara ekonomi dan sosial. Setua apapun kita apabila mau belajar dan berusaha tentunya akan bermanfaat. Lebih lanjut, kemapanaan perekonomian memang harus dimulai dari adanya kesadaran wanita akan pentingnya mengelola kemampuan dan kehidupan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *woman empowerment* merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Manfaat *woman empowerment* bukan hanya dirasakan oleh sang pelaku tersebut. Namun lebih jauh lagi, para suami, anak dan lingkungan sekitar akan merasakan dampak

positif. Secara global pun akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berujung naiknya persentase kebangkitan ekonomi kerakyatan berskala nasional. Untuk selanjutnya, diharapkan lebih banyak para akademisi yang rela meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengabdikan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Jangan lagi berfokus jauh-jauh keluar daerah namun hiduplah lingkungan sekitarmu. Akan menjadi suatu gelombang positif yang dahsyat apabila setiap akademisi mampu menghidupkan ekonomi kerakyatan di lingkungan sekitarnya. Gelombang *woman empowerment* ini akan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Lebih lanjut, *women empowerment* akan mampu meningkatkan tata kelola perekonomian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djabu, O., Goni, J. H., & Tumiwa, J. (2013). Peranan Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Acta Diurna*, 2(3).
- Fritsch, D.J. & Storey, M. (2014). Entrepreneurship in a Regional Context: Historical Roots, Recent Developments and Future Challenges. *Regional Studies*, 48(6), 939-954.
<https://doi.org/10.1080/00343404.2014.892574>
- Harriet. T., Opoku, N. A., Asare., & Anin, E. K. (2014). The Role of Women in Reducing Household Poverty in the Bongo District of the Upper East Region, Ghana. *Journal of Arts and Humanities*, 3(4), 99-110.
- Miclethwait, John & Wooldridge, Andrian. (2000). *A Future Perfect, The Challenge and Hidden Promise of Globalization*. New York: Random House, Inc.
- Partini, P. (2004). Potret Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3), 315-334.
<https://doi.org/10.22146/jsp.11063>
- Rahminawati, N. (2001). Isu Kesenjangan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender). *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 17(3), 273-283.
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v17i3>
- Sebataraja, L. R., Oenzil, F. dan Asterina. (2014). "Hubungan Status Gizi dengan Status Ekonomi Keluarga Murid Sekolah Dasar di Daerah Pusat dan Pinggiran Kota Padang". *Jurnal Kesehatan Andalas*, 3(2), 182-187. doi: 10.25077/jka.v3i2.81
- Telaumbanua, M.M., & Nugraheni, M. (2018). Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Sosio Informa*, 4(2), 418-436. doi:<https://doi.org/10.33007/inf.v4i2.1474>.
- Trisnani. (2014). Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi Dan Kepuasan Dalam Penyampaian Pesan Dikalangan Tokoh Masyarakat.

Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, 6 (3), 1-12.
<http://dx.doi.org/10.31504/komunika.v6i3.1227>.

Widayati, W, & Augustinah, F. (2019). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Makanan Ringan Kripik Singkong di Kabupaten Sampang. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 4(2), 1-20. <http://www.ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/345>.

MODEL PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN AGROWISATA HILIRISASI DURIAN DI KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Sodik Dwi Purnomo, Minadi Wijaya

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam yang menjadikan Indonesia memiliki keunggulan di berbagai sektor salah satunya adalah sektor pertanian. Indonesia yang memiliki kekayaan sumberdaya alam dan potensi sumberdaya manusia yang secara turun temurun mengelola bidang pertanian memungkinkan keunggulan tersebut (Ardytia, *et al.*, 2020). Ardytia, *et al.*, (2020) menambahkan pertanian merupakan sektor penting dengan serapan tenaga kerja paling besar dan pertanian berkontribusi bagi pendapatan rumah tangga masyarakat Indonesia. Kawasan pertanian berfungsi menyerap bahan organik, memberi kenyamanan, nilai-nilai tradisi dan sosial budaya pedesaan, agrowisata pedesaan, menyerap tenaga kerja, pilar ketahanan pangan, dan sarana pendidikan lingkungan hidup. Akan tetapi, Indonesia yang merupakan negara agraris tidak semua kondisi dan hasil pembangunan pertanian seperti yang dicita-citakan. Hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan terkait kesejahteraan terutama bagi pelaku bidang pertanian.

Pengembangan kawasan pedesaan berbasis pertanian semakin digalakkan di berbagai wilayah. Kegiatan ini untuk mengembangkan potensi di wilayah pedesaan, yang selama kurun waktu sebelumnya telah mengalami ketimpangan wilayah pembangunan. Pada saat lalu pembangunan banyak diprioritaskan untuk wilayah perkotaan, sehingga wilayah pedesaan mengalami ketertinggalan di segala sektor, khususnya untuk sektor pertanian. Padahal sektor pertanian sangat dominan untuk wilayah pedesaan. Untuk mengantisipasi dan mengembangkan wilayah pedesaan, pemerintah sekarang sedang menggiatkan pembangunan pada sektor pertanian yang bersinergi dengan sektor pariwisata.

Pembangunan pertanian dan pedesaan ke depan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan yang bermuara pada pengembangan ekonomi lokal, hal ini karena meningkatnya produksi pertanian selama ini belum disertai dengan peningkatan pendapatan petani (Sutarto, *et al.*, 2010). Meskipun sektor pariwisata sangat pesat, ternyata

sektor pertanian masih merupakan bidang strategis yang pembangunannya diusahakan untuk seiring dengan laju perkembangan pembangunan di sektor pariwisata sehingga keduanya dapat saling bersinergi (Suryawan, *et al.*, 2018). Kemajuan di sektor ekonomi pariwisata seharusnya dapat mendorong terpeliharanya budaya agraris dan kelestarian alam serta produk-produk pertanian mampu memenuhi kebutuhan pariwisata di daerah tersebut. Operasional pembangunan pertanian harus dikaitkan dengan pembangunan di sektor pariwisata dalam rangka mempercepat pertumbuhan wilayah dan pembangunan perdesaan serta mendorong tumbuhnya investasi di bidang pertanian (Anonim, 2011).

Dalam upaya proses pembangunan pertanian pastinya ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendala utama wilayah pedesaan untuk pengembangan sektor pertanian skala besar adalah kondisi kepemilikan lahan bagi sebagian besar petani sudah sangat sempit dan sebagian besar petani miskin (Arifin, *et al.*, 2007). Selain itu Ardytia, *et al.*, (2020) menjabarkan beberapa tantangan lain yakni laju perubahan lahan pertanian (konversi) menjadi non-pertanian yang masih tinggi, apresiasi di bidang pertanian masih rendah, nilai tukar produk pertanian masih rendah, pembangunan pedesaan dan perkotaan yang tidak berimbang, rendahnya minat generasi muda di bidang pertanian, rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang menggeluti bidang pertanian. Di samping itu ternyata wilayah pedesaan menyimpan potensi yang sangat menarik untuk dikembangkan dengan agrowisata melalui potensi agroekosistem, terutama yang menyangkut keaslian alam, beragamnya komoditas pertanian, kekhasan adat istiadat, seni dan budaya. Sebuah terobosan besar dalam konsep pengembangan pertanian adalah dengan konsep agribisnis dan konsep agrowisata yang diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat pedesaan.

Pengembangan agribisnis pedesaan dimaksudkan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk pertanian sehingga dapat diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Salah satu pedesaan yang memiliki produk pertanian dan dipertimbangkan untuk dilakukannya pengembangan desa yaitu pedesaan yang terletak di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Kecamatan Kemranjen merupakan salah satu penghasil sentra buah Durian unggul di Indonesia. Di kecamatan ini terdapat varietas buah Durian unggul lokal yang tak kalah dari Durian monthong atau Durian cani. Dengan adanya permintaan Durian yang terbilang tinggi memungkinkan penerapan adanya agribisnis Durian agar produksi yang dihasilkan cukup tinggi sehingga mampu memenuhi permintaan. Namun pada kenyataannya disersifikasi terhadap Durian masih terbilang relatif rendah. Hal ini perlu adanya peningkatan agribisnis di kawasan pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Durian.

Agrowisata merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan sumber daya alam suatu daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian untuk dijadikan kawasan wisata. Potensi yang terkandung tersebut harus dilihat dari segi lingkungan alam, letak geografis, jenis produk atau komoditas pertanian yang dihasilkan, serta sarana dan prasarannya (Sumarwoto, 1990). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sudiasa (2005) agrowisata adalah berwisata ke daerah pertanian dalam arti luas mencakup pertanian rakyat, perkebunan, peternakan dan perikanan. Menurut Suyastri (2012), pelaksanaan konsep agrowisata akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, pelestarian lingkungan alam dan menghambat niat petani untuk melakukan alih fungsi lahan. Pengembangan agrowisata pada hakekatnya merupakan upaya terhadap pemanfaatan potensi atraksi wisata pertanian. Fasilitas pendukung wisatawan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, namun tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada (Mardaweni & Aprianto, 2018).

Berdasarkan surat keputusan (SK) bersama para antara Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Pertanian No. KM.47/PW.DOW/MPPT-89 dan No. 204/KPTS/HK050/4/1989 agrowisata sebagai objek wisata, diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian. Agrowisata diberi batasan sebagai wisata yang memanfaatkan objek-objek pertanian (Tirtawinata & Fachruddin, 1996). Secara garis besar agrowisata di Kecamatan Kemranjen ini sangat menarik untuk dikembangkan karena menyimpan berbagai potensi yang dapat dijual kepada wisatawan. Karena konsep agrowisata ini menawarkan konsep pariwisata berbasis pendidikan mengenai pertanian, selain itu juga dipadukan dengan suasana perdesaan yang ada di kecamatan tersebut dengan suasana alam yang menyegarkan. Agrowisata ini meliputi hal yang berkaitan dengan Durian baik bibit, buah, dan juga olahannya. Oleh sebab itu pengembangan agrowisata harus dilakukan secara optimal agar *multiplier effect* yang dihasilkan dapat dinikmati oleh para petani maupun masyarakat setempat.

Dengan adanya potensi di atas maka perlu dikaji lebih mendalam tentang kondisi wilayah, terutama yang menggambarkan kelebihan dan kekurangannya untuk mendukung konsep agribisnis serta agrowisata produk unggulan dari Kecamatan Kemranjen yakni Durian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA) untuk mendapatkan data atau informasi dan penilaian (*assesment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Dengan demikian pengkajian ini dapat dirumuskan tujuannya yaitu sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi potensi usaha tani Durian dapat dikembangkan menjadi agribisnis dan agrowisata; (2) Meng-

identifikasi faktor yang menghambat dan mendorong di dalam pengembangan agribisnis dan agrowisata hilirisasi Durian; (3) Mengidentifikasi *stakeholders* yang mendukung pengembangan agribisnis dan agrowisata hilirisasi Durian; (4) Membentuk model pengembangan agribisnis dan agrowisata hilirisasi yang berbasis Durian sebagai produk unggulan suatu daerah.

PEMBAHASAN

1. RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

Memahami masyarakat desa akan memberikan sebuah gambaran tentang adanya perkembangan kelompok pendekatan dan metode yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut ambil bagian dalam menambah dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka menyusun perencanaan dan aksi serta tindakan (Mardiana, *et al*, 2020). Menurut Chamber (1992), partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan memberikan kontribusi kepada penelitian partisipatif radikal, analisis agroekosistem, antropologi terapan, penelitian lapangan tentang sistem dan memahami desa secara cepat melalui *Rapid Rural Appraisal* yang selanjutnya akan disebut RRA. Hal mendasar dalam penerapan RRA adalah informasi lebih banyak diperoleh dan diambil oleh orang luar (*outsider*).

Yang melatarbelakangi munculnya RRA adalah kurang berhasilnya pendekatan penelitian yang digunakan dalam menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat. Umumnya sebelum RRA, masyarakat hanya sebagai pihak yang tidak tahu menahu mengenai suatu program ataupun penerapan kebijakan. Sebagai akibatnya tidak ada perubahan yang berarti setelah dilaksanakan penelitian ataupun penerapan kebijakan. Dengan adanya RRA yang kemudian berkembang pula PRA, maka diharapkan akan memungkinkan masyarakat desa secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan yang nantinya sangat diperlukan dalam perumusan perencanaan dan kebijakan oleh pihak yang berwenang.

Adapun keunggulan dari metode RRA antara lain, (1) Memudahkan orang luar memperoleh data dan pandangan masyarakat desa tentang berbagai hal; (2) Melakukannya dengan dana yang minim dalam waktu yang relatif singkat; (3) Menyeimbangkan bias; (4) Penelitian bisa mencakup daerah yang lebih luas dalam waktu relatif singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum; (5) Pengumpulan informasi dan data dilakukan secara fleksibel, tidak terikat secara kaku dengan kuesioner (Abdullah, *et al*, 2012). Meskipun demikian menurut Chambers (1992), RRA juga memiliki beberapa kelemahan, seperti (1) kemungkinan fadisme; (2) terlalu cepat mengambil kesimpulan; (3) termolisme; (4) kebiasaan; dan (5) penolakan.

2. Potensi Tani Usaha Durian yang dapat Dikembangkan menjadi Agribisnis dan Agrowisata

Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas memiliki banyak potensi yang menjadi keunggulan daerahnya yaitu disebut sebagai daerah penghasil Durian dengan kualitas yang terbilang sangat baik. Banyaknya petani Durian yang memiliki perkebunan dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan menjadi agribisnis dan agrowisata di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Tentu saja hal ini tidak hanya tentang jual-menjual buah Durian melainkan juga menjadikan ini sebagai agrowisata. Mulai dari mempelajari pohon maupun hasil Duriannya di perkebunan Durian sampai dengan diversifikasi olahan Durian. Buah Durian musim pada bulan Oktober sampai dengan Desember, namun tak memungkiri juga buah Durian ada selain di bulan tersebut dikarenakan pertumbuhannya yang beragam, sehingga agrowisata dapat terus berjalan meskipun bukan pada musim Duriannya.

3. Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pengembangan Agribisnis dan Agrowisata Hilirisasi Durian

Dalam pengembangan agribisnis dan agrowisata hilirisasi Durian banyak sekali faktor yang menghambat serta faktor yang mendorongnya. Faktor penghambat dalam pengembangannya adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya kemampuan masyarakat dalam mendisversifikasi olahan Durian. Faktor ini menjadi salah satu faktor penghambatnya pengembangan agribisnis dan agrowisata hilirisasi Durian di Kecamatan Kemranjen. Hal tersebut dikarenakan usaha tani maupun masyarakat yang turut serta menjadi penjual Durian hanya mendistribusikan dalam bentuk buah Durian utuh tanpa adanya olahan Durian. Hanya petani Durian yang mampu mengolahnya menjadi olahan Durian, namun pengolahannya dalam jumlah yang terbilang cukup sedikit.
- b. Belum saling terintegrasi antar usaha tani. Di dalam menjalankan usaha tani Durian, petani masih menjalankan usahanya secara mandiri tanpa membentuk kelompok tani yang sebenarnya dapat membantu dan memudahkan kerjasama dalam ekspor ke luar daerah.

Selain adanya faktor penghambat, faktor pendukung dapat juga memudahkan di dalam pengembangan agribisnis dan agrowisata di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Infrastruktur jalan yang baik, memudahkan para wisatawan untuk datang ke lokasi agrowisata walau terletak di daerah pegunungan.
- b. Varietas Durian yang banyak, hasil produksi buah Durian dengan berbagai varietas yang memiliki ciri khas dan daya tarik masing-masing buah, sehingga pilihan yang ditawarkan tidak hanya satu jenis saja.

- c. Pangsa pasar buah Durian yang cukup luas, di mana hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menyukai buah Durian yang dapat meningkatkan penjualan serta menambah pendapatan.

4. Stakeholders yang Dibutuhkan di dalam Pengembangan Agribisnis dan Agrowisata Hilirisasi Durian

a. Pemerintah Daerah

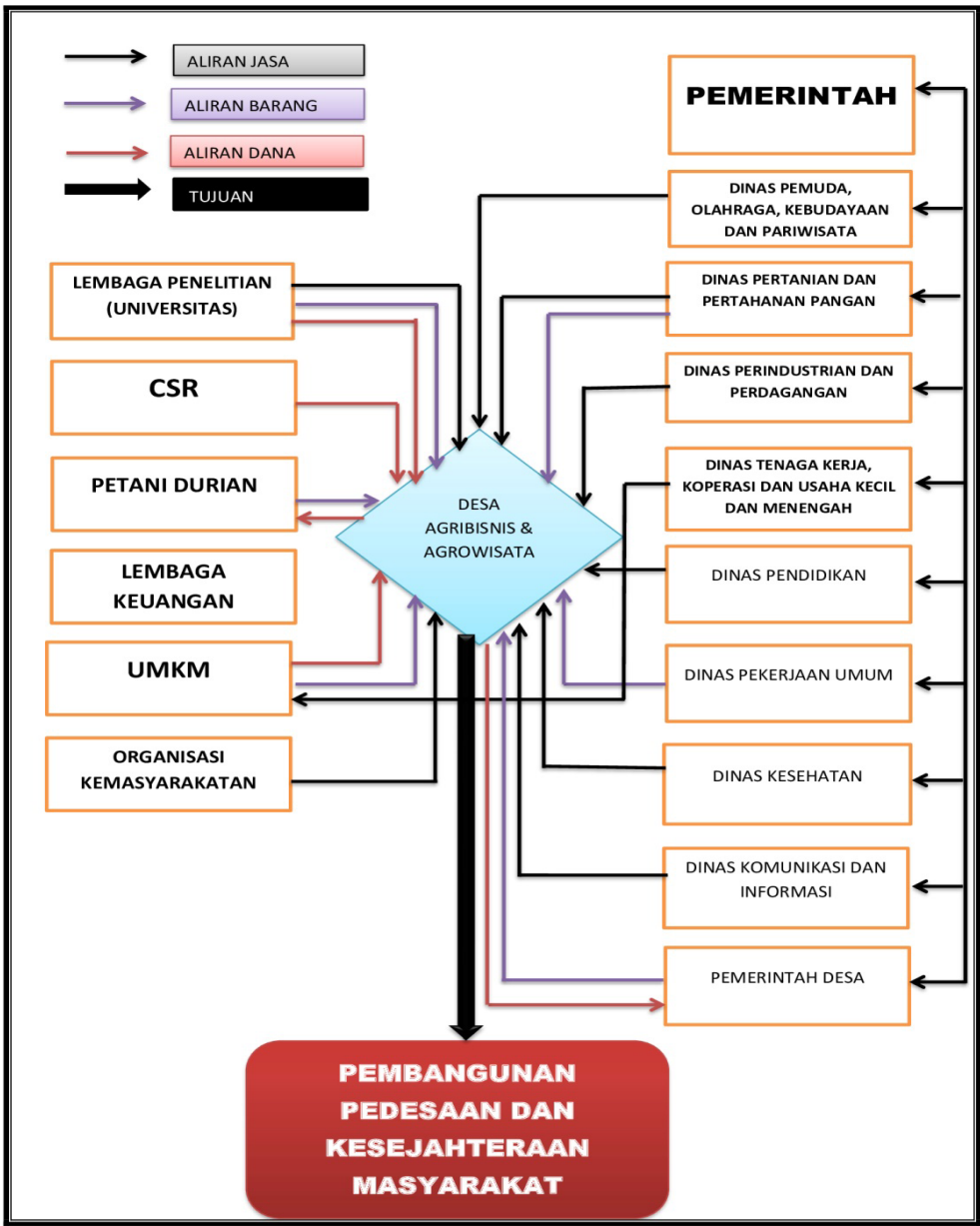
Di dalam pengembangan agribisnis dan agrowisata hilirisasi Durian pemerintah yang ikut andil dengan mengkoordinasi dinas-dinas terkait demi kelancaran pengembangan agribisnis dan agrowisata :

- i. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dapat memberikan kontribusi dengan memberikan jasanya dalam pembuatan iklan mengenai desa agribisnis dan agrowisata melalui sosial media DISPORABUDPAR. Dengan mengandalkan hal tersebut maka masyarakat sekitar bisa mengetahui adanya desa tersebut sebagaimana sesuai dengan pasal 33 Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Akomodasi, Jasa dan Usaha Pariwisata, Pemasaran dan Promosi Pariwisata, Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- ii. Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan memberikan kontribusi pelatihan dalam pembuatan makanan atau olahan dari Durian bisa meningkatkan penghasilan para petani dan penjual Durian di sekitar Kemranjen. Dinas Pertanian juga memiliki peran untuk membantu petani Durian di dalam pengembangan produksi hasil buah Durian dengan membantu menyediakan lahan kosong untuk penanaman bibit baru dalam jumlah banyak, sehingga hasil tanam dapat meningkat yang nantinya diharapkan dapat bisa melakukan ekspor dengan jumlah yang besar.
- iii. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkontribusi dalam pelayanan untuk memberikan izin untuk mendirikan pabrik atau tempat untuk mengolah hasil Durian tersebut untuk diperjualbelikan.
- iv. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah dapat berkontribusi memberikan pelatihan pada pengelola organisasi masyarakat yang mengelola agribisnis dan agrowisata, agar memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mengelola kegiatan usaha tani.
- v. Dinas Pendidikan berkontribusi dengan cara memberikan pembelajaran seperti *study tour* melakukan kerjasama dengan pemerintah desa

- atau Kecamatan Kemranjen untuk melakukan pembelajaran dalam mengenalkan Durian di daerah Kemranjen.
- vi. Dinas Pekerjaan Umum memiliki kontribusi aliran barang dengan penyediaan infrastruktur fasilitas penunjang menuju lokasi seperti pembangunan jalan dalam hal ini di perkebunan Durian.
 - vii. Dinas Kesehatan berkontribusi dalam memberikan pengertian mengenai gizi yang terkandung dalam buah Durian dan olahan-olahan Durian serta pemberian SPP-IRT yang merupakan jaminan tertulis yang diberikan Bupati atau Walikota terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan di dalam rangka peredaran pangan.
 - viii. Dinas Komunikasi dan Informasi berkontribusi dalam aliran jasa yang turut serta membantu di dalam pemasaran serta menyebarkan informasi mengenai desa agribisnis dan agrowisata.
 - ix. Pemerintah Desa dapat berkontribusi dalam memberikan wadah atau alat untuk mendukung masyarakat setempat untuk berkreasi dalam mengolah Durian. Hal ini untuk menarik pelanggan dari luar. Selain itu pemerintah juga berperan juga di dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa. Dari agribisnis dan agrowisata tersendiri memberikan kontribusi kepada desa dengan wujud meningkatkan pendapatan asli desa. Karena masyarakatnya memperoleh pendapatan dari agrowisata tersebut.
- b. Universitas memberikan kontribusi berupa jasa seperti penyuluhan. Jika dalam bentuk barang dapat memberikan alat sebagai hibah. Dan dana dengan cara memberikan bantuan berupa uang untuk modal usaha. Serta memberikan bantuan pembuatan proposal untuk memperoleh dana dari suatu instansi.
 - c. Perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara dapat memberikan bantuan berupa dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) memberikan kontribusi kepada agrowisata dan agrobisnis memberikan berupa dana.
 - d. Lembaga keuangan, seperti bank dan pihak swasta memberikan bantuan berupa penawaran pinjaman untuk modal para petani dan warga setempat yang ingin membuka usaha.
 - e. UMKM dari pihak petani dapat berkontribusi dengan membuat perkumpulan UMKM untuk memulai usahanya.
 - f. Organisasi kemasyarakatan yang berupa karang taruna, PKK dapat memberikan bantuan untuk memasarkan hasil olahan dari Durian.

5. Model Pengembangan

Berdasarkan hasil obsevasi dan proses pembahasan yang begitu mendalam mengenai potensi Durian maka dapat dirumuskan sebuah model agribisnis dan agrowisata hilirisasi Durian. Gambar 1 yang menunjukkan model pengembangan agribisnis dan agrowisata hilirisasi Durian di Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas.



Gambar 1. Model Pengembangan Agribisnis dan Agrowisata Hilirisasi Durian

Keunggulan dari model pengembangan agribisnis dan agrowisata hilirisasi Durian adalah tim peneliti mengidentifikasi *stakeholders* secara kompleks dan menyeluruh dalam merumuskan model pengembangan agribisnis dan agrowisata hilirisasi Durian. Semakin banyak *stakeholders* yang berkontribusi dalam merumuskan sebuah kebijakan dalam mensukseskan pengembangan agribisnis dan agrowisata, sehingga diharapkan hal tersebut dapat terwujud sesuai dengan harapan. Jika di bandingkan dengan studi terdahulu seperti penelitian Ismawati *et al.*, (2017) yang hanya mengidentifikasi strategi pengembangan obyek wisata dengan metode SWOT, sehingga hanya mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Sementara itu, penelitian ini mampu mengidentifikasi *stakeholders* yang kompleks

PENUTUP

Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas memiliki potensi duarian yang sangat baik dan melimpah, namun sejauh ini belum adanya sebuah konsep dalam pembentukan agribisnis dan agrowisata berbasis Durian. Selain itu, sejauh ini olahan Durian di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas terbilang tidak variatif, sehingga perlu diversifikasi produk olahan Durian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) potensi usaha tani Durian dapat dikembangkan menjadi agribisnis dan agrowisata; 2) faktor penghambat dalam pengembangan agribisnis dan agrowisata hilirisasi Durian yaitu belum adanya kemampuan masyarakat dalam mendiversifikasi olahan Durian, dan belum saling terintergrasi antar usaha tani, sedangkan faktor pendorongnya yaitu infrastruktur jalan yang baik, varietas Durian yang banyak, dan pangsa pasar buah Durian cukup luas; 3) *stakeholders* yang mendukung pengembangan agribisnis dan agrowisata hilirisasi Durian meliputi petani Durian, Pemerintah Daerah kabupaten banyumas yang didelegasikan ke dinas-dinas yang terkait serta beberapa lembaga swasta seperti perusahaan, organisasi masyarakat, lembaga keuangan, perguruan tinggi; 4) terbentuknya model pengembangan agribisnis dan agrowisata hilirisasi yang berbasis Durian sebagai produk unggulan suatu daerah akan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan mendorong kesempatan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Y. H., Bakar, N. R., Sulehan, J., Awang, A. H. and Liu, O. P. (2012). Participatory Rural Appraisal (PRA): An Analysis of Experience in Darmareja Village, Sukabumi District, West Java, Indonesia. *Akademika*, 82(1): 15–19.

- Anonim. 2011. *Masterplan Agrowisata Gianyar Utara*. Gianyar: Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Gianyar dan LP2M Universitas Warmadewa.
- Ardytia, W., Soetijono, I. K., & Mulyanto, R. (2020). Model Pengembangan Agrowisata Berbasis Kawasan Perkebunan Kopi Rakyat Di Kampung Kopi Lego (Lerek Gombongsari) Banyuwangi. In *Seminar Nasional Konsorsium Untag Se Indonesia*, 2,(1), 231-238.
- Arifin, M., Sulastiyah, A., Yekti, A., & Wartapa, A. (2020). Model pengembangan agrowisata dalam rangka pemberdayaan Kelompok Tani Tawangrejo Asri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 3(2), 8. doi: 10.36626/jiip.v3i2.314
- Chamber, R. (1992). *Rural Appraisal: Rapid, Rilex and Participatory*. Brighton: Institute of Developmnet Studies.
- Ismawati, I., Fitrianti, S., Sillia, N., & Fauzi, N. (2017). Strategi Pengembangan Taman Wisata Lembah Harau-Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal: Tungku Tigo Sajaringan. *Agriekonomika*, 6 (2), 151-163.
<https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v6i2.1830.g2417>
- Mardaweni, R., & Aprianto, M. C. (2018). Pengembangan Pariwisata Desa Berbasis Lingkungan Keberlanjutan: Studi Kasus di Situ Binong, Hegar Mukti, Cikarang, Jawa Barat. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (1), 625-631.
- Mardiana, T., Warsiki, A. Y. N., & Heriningsih, S. (2020). Menciptakan Peluang Usaha Ecoprint Berbasis Potensi Desa Dengan Metode RRA Dan PRA. *KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional*, 2(1), 282-288.
- Sriyadi, S. (2018). Model Pengembangan Agrowisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul DIY). *Jurnal Riset Agribisnis dan Peternakan*, 3(1), 1-13. doi: 10.18196/agr.2236
- Sudiasa, S. (2005). Definisi Agrowisata, Pariwisata dan Teknologi.
- Sumarwoto, J. (1990). *Pengembangan Agrowisata: Potensi dan Prospek*. *Seminar Nasional: Pembangunan Pertanian & Pedesaan Sumatera*. Berastagi, 5-8 Maret.
- Suryawan, I. W. D., Windia, I. W., & Sarjana, I. M. (2018). Model Partisipasi Petani Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 7(3), 415-423.
- Suyastri, N. M. Y. P. (2012). Pemberdayaan Subak Melalui “Green Tourism” Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Pertanian di Bali. *Jurnal SEPA (Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis)*, 8(2): 168-173.
- Tirtawinata, M. R., & Fachruddin, L. (1996). *Daya tarik dan Pengelolaan Agrowisata*. Jakarta: Penebar Swadaya.

PENDAMPINGAN BAGI PENGRAJIN JAMU DALAM PENGUATAN PASAR PRODUK HERBAL UNTUK MERAIH PELUANG BISNIS DI MASA PANDEMI

Erni Panca Kurniasih, Erna Listiana, Metasari Kartika

PENDAHULUAN

Jamu sebagai salah satu warisan budaya yang memiliki bermacam-macam khasiat harus tetap dilestarikan dengan cara menjadikannya sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Penelitian Wicaksono (2018) menemukan bahwa desa Nguter Kabupaten Sukoharjo setelah ditetapkan sebagai kampung jamu pada tahun 2012 silam oleh pemerintah pusat, kesejahteraan masyarakat mulai meningkat. Hal ini terbukti dengan aktivitas volume penjualan dalam kurun tahun 2012 hingga 2017 mengalami peningkatan. Jumlah penyerapan tenaga kerja terus meningkat dan produktifitas pekerja rata-rata juga meningkat karena mereka semakin terampil. Untuk aktivitas pemasaran, jangkauan wilayahnya sudah merambah ke luar Kabupaten Sukoharjo hingga ke luar Pulau Jawa bahkan ke pasar nasional.

Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan citra serta nilai jual jamu sebagai minuman tradisional agar menjadi suatu inovasi bisnis yang menguntungkan dan bagaimana memasarkan produk jamu tersebut agar digemari masyarakat. Untuk itu, perlu diciptakan suatu produk inovasi dari minuman jamu yang dapat meningkatkan citra serta nilai jual jamu itu sendiri di masyarakat. Ada beberapa jenis ramuan jamu tradisional yang umum ditemukan di lingkungan masyarakat, misalnya jamu beras kencur untuk menambah nafsu makan dan membuat tubuh lebih bugar, jamu kunyit asam untuk meredakan panas dalam dan menurunkan berat badan, dan jamu kunci sirih yang sangat baik diminum ibu yang habis melahirkan, mengkencangkan perut dan menghilangkan bau badan.

Pelaku usaha jamu (pengrajin jamu) yang sering kita jumpai adalah perempuan. Hal ini didasari karena awal keterlibatan perempuan sebagai pengrajin jamu adalah sebagai upaya memperoleh tambahan pendapatan keluarga. Penelitian Torri (2016) menjelaskan bagaimana peran perempuan dalam upaya mendapatkan penghasilan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan menjual jamu tradisional. Selain dijual jamu

yang mereka produksi juga mereka gunakan sendiri, sehingga ketergantungan keluarga terhadap akses kesehatan modern juga berkurang ketika salah satu anggota keluarga sakit maka biasanya mereka akan meminum jamu yang mereka buat sendiri.

Ternyata keterlibatan perempuan sebagai pengrajin jamu yang semula bertujuan untuk menambah pendapatan keluarga, ternyata justru menjadikan usaha jamu tersebut sebagai sumber pendapatan utama keluarga. Hasil penelitian Sugiarti dan Arifiyanti (2018) menemukan bahwa usaha kecil jamu di Pulau Madura mempunyai peran besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran, akan tetapi usaha kecil jamu kurang berkembang dikarenakan kurangnya kompetensi kewirausahaan dari para pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu kompetensi mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai macam pelatihan dan pendampingan kewirausahaan sebagai upaya peningkatan kompetensi kewirausahaan bagi para pelaku usaha kecil jamu guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Penjual jamu tradisional saat ini sudah mulai bermetamorfosis tidak lagi sebagai jamu gendong (bakulan jamu), tetapi sudah banyak yang menggunakan kendaraan bermotor dan masih ada yang menggunakan sepeda. Bahkan sekarang jamu dijual secara *online*. Apapun cara penjualannya, namun produk jamu tradisional nyaris tak bergeser keragaman dan keberadaannya. Pada masa pandemic Covid-19 saat ini produk herbal semakin meningkat permintaannya karena diyakini mampu meningkatkan stamina dan imunitas tubuh serta kebugaran. Ini sebenarnya adalah peluang bisnis yang besar, namun nyatanya tidak semua pengrajin jamu mampu menangkap peluang bisnis ini. Alasan yang paling sering diungkapkan mereka adalah kurangnya modal, padahal jika ditelusur lebih dalam justru bukan itu masalah utama yang mereka hadapi. Mereka sendiri belum pernah melakukan evaluasi diri terhadap produk mereka, bahkan belum menjadikan jamu sebagai bisnis utama mereka.

Berdasarkan potensi pasar produk jamu yang belum tersentuh dan belum terbangunnya orientasi bisnis yang mapan maka para pengrajin jamu ini perlu didampingi dan diberikan pembinaan. Oleh karena itu tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura berupaya memberikan kontribusi sehingga para pengrajin jamu binaan dapat mengokohkan perannya sebagai pelaku usaha dan produknya dapat berdaya saing di pasaran.

Kegiatan pengabdian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu melakukan analisis situasi yang dihadapi pengrajin jamu binaan, menentukan strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi pengrajin jamu binaan, mensosialisasikan tata cara proses pengajuan perijinan UMKM dan penentuan standar kesehatan produk herbal, dan memfasilitasi pembuatan

desain merek berupa stiker untuk produk yang dihasilkan pengrajin jamu binaan.

Gambaran Umum Masyarakat Sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian adalah para pengrajin jamu binaan pengurus organisasi perempuan PD Salimah Kota Pontianak. Pengrajin jamu dipilih karena pada saat pandemi permintaan produk herbal kesehatan mengalami peningkatan karena fungsinya diyakini sebagai penambah stamina, pencegahan penyakit serta mampu meningkatkan imunitas tubuh. Pengrajin jamu binaan ini jumlahnya tidak banyak, dari enam pengrajin jamu binaan PD Salimah Kota yang tertarik dan bersedia untuk menjadi mitra binaan tim PKM FEB hanya 3 mitra.

Masalah yang dihadapi mitra adalah tentang ketidaktahuan mereka secara menyeluruh mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh pengrajin jamu seperti mereka jika ingin meraih pasar yang lebih luas serta perijinan yang harus mereka miliki karena produk yang mereka jual adalah produk herbal kesehatan yang tentu saja membutuhkan perijinan yang berbeda dengan produk umum lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang diutarakan para pengrajin jamu maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Setelah diadakan koordinasi yang diinginkan mitra adalah mendapatkan pengetahuan menyeluruh tentang strategi pemasaran khusus untuk produk herbal kesehatan serta informasi tentang perijinan bagi usaha produk herbal kesehatan. Besarnya potensi dan peluang pasar produk mitra, maka Tim PKM FEB UNTAN mencoba memfasilitasi kegiatan *workshop* yang bertujuan untuk meningkatkannya pengetahuan mitra mengenai peluang pasar dan strategi pemasaran serta pengurusan perijinan khusus bagi produk herbal Kesehatan.

Tahap awal yang dilakukan oleh Tim PKM adalah berkoordinasi dengan pengurus PD Salimah Kubu Raya untuk mendapatkan data binaan, bertemu binaan dan berkoordinasi. Tim melakukan survei melalui Google *Form* untuk mengetahui kondisi, dan mengumpulkan data serta informasi terkait permasalahan, agar dapat memberikan solusi yang tepat kepada mitra PKM. Tim dengan mitra PKM melakukan diskusi secara daring untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan mitra dan mengatasi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan informasi yang didapat Tim PKM menyiapkan materi untuk kegiatan *workshop* melalui webinar.

Tahap kedua, Tim PKM melaksanakan *webinar workshop* tahap 1, yang berisi tentang tantangan dan strategi pemasaran produk di masa pandemi. Dalam *workshop* ini mitra juga akan diberi semacam angket untuk mengevaluasi

luasi diri yang hasilnya nanti akan dibuat dalam analisis situasi. Pengembangan usaha di saat pandemi memang sangat sulit, namun hal yang terpenting yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan diri dalam era baru pemasaran. Dalam pemasaran perlu adanya strategi yang tepat dalam usaha mempromosikan produk klien. Melakukan identifikasi untuk merumuskan strategi yang tepat. Dalam perencanaan berikutnya akan disusun sebuah media komunikasi visual yang menyampaikan identitas produk secara lengkap. Tahapan ini berfungsi dalam menanamkan *image* produk di kalangan konsumennya, sehingga *audience* diharapkan mampu mengingat produk dengan segala identitasnya dan membeli produk yang dijual. Pendekatan-pendekatan teknis terhadap target sasaran disusun dalam bentuk rencana kerja yang bertahap sehingga mitra mampu mengakomodasi kegiatan jual beli yang dilaksanakan. Mitra diberikan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam memasarkan produk secara *offline* maupun *online*. Pemasaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi sosial media.

Tahap ke tiga, tim PKM kembali melaksanakan *webinar workshop* tahap 2 yang membahas tentang hasil evaluasi diri dan analisis situasi yang dihadapi oleh mitra. Pada tahap ini para pengrajin jamu juga mendapat bantuan paket bahan baku pembuatan jamu. Tahap keempat, akan diadakan pertemuan tatap muka dan dialog interaktif antara peserta para pengrajin jamu binaan, tim PKM serta narasumber pengrajin jamu yang sudah ekspansif. Pada tahapan ini juga para pengrajin jamu akan mendapat satu set stiker hasil desain tim PKM dan dokumen hasil analisis situasi yang dilakukan oleh tim PKM sekaligus rekomendasi strategi yang sesuai dengan kondisi pengrajin jamu. Tahap 5 tim PKM akan melakukan evaluasi dan tindak lanjut agar dalam kegiatan berikutnya para pengrajin jamu ini dapat dilibatkan kembali. Kedepannya jika mitra pengrajin jamu binaan jumlahnya bertambah maka akan dibuat komunitas pengrajin jamu agar lebih mempermudah proses pembinaan.

Narasumber *workshop* kegiatan pengabdian ini adalah Dr. Erna Listiana, akademisi dengan kepakaran pemasaran. Narasumber lain adalah Farina, SH pengusaha jamu dengan brand Herbasyifa yang telah memperluas pasar produknya hingga ke luar Kota Pontianak. Tempat pelaksanaan kegiatan adalah di Kota Pontianak, dua pertemuan bersifat daring dan pertemuan terakhir berupa dialog iinteraktif di Pegasus Café. Titik kumpul tim pelaksana PKM adalah di RT 002/RW 004 Kelurahan Bangka Belitung Darat.

PEMBAHASAN

Karakteristik Usaha Mitra Binaan

Pada pertemuan pertama tim PKM telah menyebarkan kuesioner untuk pengrajin jamu binaan. Hasil kuesioner kemudian diolah oleh tim untuk mengetahui karakteristik mitra serta mengidentifikasi permasalahan mitra. Jumlah pengrajin jamu binaan dalam kegiatan ini adalah tiga orang. Berdasarkan usia, para mitra binaan ini termasuk kelompok umur produktif yaitu antara usia 30-40 tahun. Mereka adalah ibu rumah tangga yang awalnya tidak melakukan kegiatan lain selain kegiatan domestik. Seiring dengan bertambahnya usia anak yang diasuh maka mereka memiliki waktu luang yang lebih banyak. Terdorong keadaan untuk menambah pendapatan keluarga akhirnya mencoba menjadi pengrajin jamu.

Ada beberapa alasan mengapa mereka memilih jamu sebagai produk bisnis. Semua mitra tidak ada yang mendapatkan bakat turunan sebagai peracik jamu dari keluarga mereka. Awalnya karena mereka sendiri sudah sejak lama gemar minum jamu, kemudian mereka mulai mencoba meracik sendiri untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian mereka uji coba ke keluarga terdekat dan ternyata respon keluarga sangat menggemari jamu racikan mereka, dan mulai ada yang memesan. Mereka mendapat ilmu meracik jamu semuanya secara otodidak, melalui YouTube. Kemudian mereka mulai berani bereksperimen dengan berbagai komposisi. Menurut mereka seandainya tidak ada yang membeli, mereka akan mengkonsumsi sendiri jamu tersebut. Mereka bekerja meracik jamu jika hanya ada pesanan, dan tidak melakukan penyimpanan berupa stok. Usaha jamu ini mereka yang menjadi peracik, pekerja sekaligus sebagai pemasar. Tentu bukan kerja yang ringan. Seringkali pesanan jamu sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Oleh karena itu sembari menekuni bisnis jamu, mereka juga punya produk bisnis lainnya. Ada yang menjual kue, makanan dan bahkan menjadi sales berbagai produk.

Mereka memproses pembuatan jamu sangat sederhana dan dengan peralatan yang seadanya. Oleh karena itu semua mitra ini belum ada yang memiliki perijinan usaha/produk mengingat dalam mengajukan perizinan dituntut syarat-syarat yang cukup ketat baik proses produksi maupun pasca produksi. Bisnis jamu yang mereka lakukan sebenarnya tergolong cukup lama. Jamu Lestari sudah memulai bisnis ini sejak tahun 2010, Jamu Omera sudah memulai bisnis ini sejak 2012, hanya Jamu Rikha yang baru saja memulai bisnis ini awal tahun 2020, dikarenakan banting setir dari usaha sebelumnya yang kurang berhasil. Setidaknya dari dua pengrajin jamu pertama sudah mempunyai jam terbang yang memadai tentang seluk beluk bisnis ini. Berikut adalah hasil analisis situasi tentang pengrajin jamu tersebut.

Tabel 1. Analisis Situasi Pengrajin Jamu: Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal:	
Peluang / Potensi:	Ancaman / Tantangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya musim kemarau mengakibatkan kesulitan mendapatkan bahan baku. 2. Potensi permintaan tinggi, karena: <ol style="list-style-type: none"> a. Semakin tingginya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap arti penting hidup sehat. b. Telah membudayanya tradisi minum jamu di kalangan sebagian masyarakat. c. Adanya respon positif atas manfaat mengkonsumsi minuman herbal yang bebas dari zat kimia. d. Sudah memiliki pembeli yang loyal. 3. Pertumbuhan ekonomi membaik mendorong terjadinya pendapatan masyarakat yang semakin membaik. 4. Kemajuan teknologi berdampak pada semakin mempermudah pengelolaan internal, baik dalam kegiatan produksi, pemasaran (pengelolaan produk, distribusi & promosi), keuangan, dan kegiatan internal lainnya. 5. Adanya aturan dan penegakan hukum bagi legalitas produk (produk teregistrasi, larangan penggunaan zat berbahaya bagi kesehatan, 6. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan usaha bisnis UMKM. 7. Mewabahnya penyakit pada kurun waktu tertentu, sehingga menuntut masyarakat memiliki daya tahan tubuh yang baik. 8. Jumlah pemasok banyak, sehingga lebih leluasa mendapatkan alternatif membeli dari beragam pemasok. 9. Ketersediaan perantara banyak 10. Tersedia komunitas bagi pelaku UMKM untuk pengembangan usaha, baik yang difasilitasi pemerintah maupun LSM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi bahwa jamu minuman tradisional kuno oleh sebagian masyarakat kalangan muda. 2. Terjadinya kenaikan harga bahan pasokan rempah-rempah pada waktu-waktu tertentu. 3. Distribusi pendapatan masyarakat tidak merata, sehingga daya beli berbeda-beda. 4. Terjadinya perubahan tingkat pendapatan masyarakat yang semakin menurun 5. Penegakan hukum yang kurang tegas atas praktek bisnis tidak beretika. 6. Beberapa karakteristik pembelian menuntut pengrajin jamu semakin responsif: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembeli peka terhadap harga. b. Perilaku pembeli mudah berpindah (<i>switcher buyer</i>) a. Perilaku pembelian adalah mencari variasi. 7. Potensi persaingan tinggi, hal ini dikarenakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pesaing banyak, baik dari sesama penjual jamu yang ada saat ini, dari pendatang baru & dari produk substitusi. b. Karakteristik pesaing yang dihadapi banyak yang memiliki sumber daya kuat dan agresif. 8. Harga bahan pasokan tidak stabil

Tabel 2. Analisis Situasi Pengrajin Jamu: Analisis Lingkungan Internal

Analisis Lingkungan Internal:	
<p style="text-align: center;"><u>Kekuatan :</u></p> <p>Produksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi dilakukan secara rutin (kontinyu) karena pemesanan hingga saat ini selalu ada. <p>Pemasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Packaging</i> dari botol kaca, lebih aman bagi kesehatan. 3. Kualitas : jamu yang dihasilkan memiliki originalitas tinggi, baik dari aspek aroma, rasa, komposisi kandungan bahan, tanpa pengawet dan pewarna. 4. Penetapan harga yang sudah sesuai dengan kualitas dan daya beli konsumen sasaran. <p>Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kemampuan menghasilkan laba / potensi keuntungan semakin meningkat. <p>tenaga Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Memiliki pengetahuan dan keterampilan pengolahan jamu tradisional. 7. Komitmen / Motivasi bagi pengembangan usaha: Motivasi meningkat tatkala ada pesanan dalam jumlah yang banyak 	<p style="text-align: center;"><u>Kelemahan :</u></p> <p>Produksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses produksi masih manual 2. Alat produksi masih sangat sederhana <p>Pemasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Merek belum banyak dikenal khalayak 4. <i>Labelling</i> (informasi terkait produk yang tercantum pada kemasan) masih minim. 5. Produk tidak tahan lama. 6. Promosi masih terbatas. 7. Distribusi masih terbatas. <p>Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Modal terbatas 9. Pencatatan keuangan usaha masih terbatas. 10. Pengelolaan keuangan usaha masih bercampur dengan keuangan pribadi / keluarga. <p>Tenaga Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Masih terbatas pada lingkungan keluarga sendiri, pemilik sebagai tenaga kerja utama. 12. Komitmen / motivasi bagi pengembangan usaha : Motivasi kurang kuat karena ada bisnis lain yang ditekuni bersamaan

Rekomendasi Strategi:

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan, maka rekomendasi prioritas strategi induk yang efektif diterapkan oleh responden pengrajin jamu adalah:

1. Strategi Bidang Fungsional

Penerapan strategi bidang fungsional dapat dilakukan dengan penggunaan peralatan produksi utama menggunakan mesin, sehingga proses produksi dapat lebih cepat dan praktis. Melakukan kontrol kualitas secara rutin berkelanjutan baik dalam aspek bahan baku, proses produksi, tahap pengeemasan dan pendistribusian, hingga produk jamu diterima konsumen. Selain itu, pengrajin juga harus mengelola ketersediaan persediaan bahan pasokan

yang disesuaikan dengan trend perilaku pembelian konsumen sasaran. Misal, di awal bulan cenderung permintaan tinggi, maka stok bahan pasokan lebih banyak untuk produksi di awal bulan. Hasil penelitian Nurmayasari, *et al.* (2017) menemukan tentang upaya yang dilakukan oleh penjual jamu untuk mengembangkan usaha jamu di Jawa Timur adalah dengan melakukan efisiensi bahan baku. Upaya tersebut dilakukan dengan cara membeli bahan baku tidak dari satu pemasok bahan baku saja melainkan membeli dari berbagai pemasok bahan baku atau sering disebut *multiple suppliers*.

2. Strategi Pemasaran

Berdasarkan analisis situasi, strategi pemasaran yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan *brand Awareness*. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat konsumen sasaran terhadap nama merek dapat dilakukan misalnya dengan cara memviralkan nama jamu di berbagai sumber media komunikasi (WA, IG, FB, testimoni pengalaman konsumen, dan lain-lain). Kegiatan mendiferensiasikan yang tak terdiferensiasi, dilakukan dengan strategi *Labelling* yakni mencantumkan informasi penting terkait produk: komposisi kandungan, informasi manfaat/khasiat, informasi halal, bebas pengawet & pewarna, informasi masa kadaluarsa, identitas produsen termasuk nomor WhatsApp, dan lainnya yang menginformasikan keunggulan & pembeda produk kita dari produk pesaing). *Labelling* mampu menggiring persepsi positif konsumen sasaran, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan terhadap produk, sehingga mendorong terjadinya pembelian ulang berkelanjutan. Pengrajin jamu juga harus menjaga konsistensi kualitas produk jadi jamu sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Misal: ketika membuat ramuan, jangan dikira-kira atau sesuai perasaan, usahakan semua bahan-bahan yang digunakan dalam produksi dapat dikuantifikasikan, buat catatan resep. Selain itu, pengrajin jamu harus meningkatkan intensitas dan efektivitas promosi, dilakukan dengan cara promosi melalui periklanan (bahasa dan disain iklan menarik, mudah dipahami, relevan dengan kenyataan), promosi penjualan (dapat menerapkan potongan harga, hadiah loyalitas, bonus, dan lainnya), Tenaga penjual (pilih tenaga penjual yang dapat dipercaya/ jujur, bertanggungjawab, memiliki komunikasi yang baik, sikap empati pada pembeli, dan karakter positif lainnya).

Media promosi yang digunakan dapat berupa media elektronik melalui internet (WA, IG, FB, dan lainnya), media pajangan misalnya menggunakan *standing banner*, *spanduk*, *poster* yang diletakkan di lokasi strategis dan media cetak seperti brosur. Pesan promosi, isi pesan mengandung unsur kalimat dan kata-kata yang efektif (singkat, jelas, mudah dipahami), *believability* (dapat dipercaya), *desirability* (memuat hal-hal yang diinginkan konsumen sasaran), dan *uniqueness* (unik, berbeda dari yang lain, sehingga mudah diingat).

Strategi pemasaran lain yang dapat dilakukan pengrajin jamu adalah dengan mengintensifkan kegiatan distribusi baik distribusi secara langsung (pembeli menghubungi penjual, penjual jemput bola /mengajukan penawaran kepada pembeli) maupun distribusi secara tidak langsung, menggunakan perantara (berapa jumlah perantara, karakter perantara, biaya yang dikeluarkan untuk menjalin bisnis dengan perantara).

3. Strategi Tenaga Kerja

Pengrajin jamu juga dapat melakukan strategi terkait tenaga kerja. Pada tahap awal, menggunakan tenaga kerja paruh waktu (misalnya dipekerjakan pada waktu tertentu saja, hanya 2 hari dalam satu minggu, hanya 3 jam dalam satu hari, atau saat permintaan sedang tinggi). Selain itu, pemberian kompensasi juga dapat didesain untuk mengoptimalkan fungsi tenaga kerja, misalnya dengan membedakan antara upah pokok dengan bonus. Upah pokok diberikan tetap, dan bonus diberikan proposional sesuai penjualan yang terealisasi.

4. Strategi Keuangan

Dalam hal strategi keuangan, pencatatan keuangan dilakukan secara rutin, disiplin dan tertib. Kegiatan memisahkan pengelolaan keuangan usaha dari keuangan pribadi/keluarga harus dilakukan. Pengrajin juga harus menyisihkan sebagian pendapatan usaha untuk modal kerja bagi pengembangan usaha. Jika segala keterbatasan internal sudah bisa diatasi, menambah modal usaha melalui pinjaman pihak luar. Sebelum pengembangan usaha dilakukan, terlebih dulu membuat rencana target penjualan, target pendapatan, dan target laba, agar lebih dapat mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di masa mendatang.

Faktor Pendorong dan Penghambat Kegiatan

Menurut Widodo (2016: 3) terdapat beberapa faktor yang membuat usaha jamu rumah tangga kurang berkembang yaitu manajemen usaha yang dilakukan masih sangat sederhana, proses pemasaran yang dilakukan masih sangat sederhana seperti menunggu pesanan, menitipkan hasil produksi ke warung-warung, dan berkeliling desa menjajakan produknya dan belum menggunakan teknologi, belum adanya pemisahan antara uang usaha atau modal dengan uang pribadi, produksi masih dilakukan dengan cara manual, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, serta kemasan yang masih sangat sederhana. Paul, *et al.* (2014) dalam penelitian di Malaysia menemukan bahwa usaha jamu di Malaysia memiliki potensi yang cukup potensial dikembangkan akan tetapi karena kurangnya jiwa kewirausahaan dan juga tidak adanya jaringan sosial di sana membuat pengembangan usaha jamu di Malaysia kurang begitu berkembang.

Beberapa faktor yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan ini adalah adanya koordinasi dari tim pelaksana dengan para narasumber dan juga pengrajin jamu binaan yang sangat bersemangat untuk mengetahui informasi sekaligus pengetahuan yang berguna dalam pengembangan produk jamu mereka agar dapat masuk ke pasar yang lebih luas dan memiliki nilai jual tinggi dan berdaya saing.

Faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah anggapan tentang sulitnya mengurus perijinan karena kurangnya informasi terhadap hal tersebut. Keterbatasan waktu juga merupakan kendala dalam mengumpulkan tim dan mitra binaan dalam satu waktu yang panjang untuk membahas bisnis mereka. Selain itu, rentang waktu yang sangat pendek untuk pengabdian ini (satu bulan) sehingga langkah pembinaan yang berkelanjutan terpaksa terhenti sementara, namun akan dilanjutkan pada program kerjasama yang lain.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman pengrajin sebelum dan sesudah kegiatan. Keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari beberapa indikator. Berdasarkan tingkat partisipasi, partisipasi peserta terhadap workshop yang diselenggarakan sangat baik, dilihat dari kehadiran mereka dalam kegiatan walaupun untuk menentukan waktu secara bersama tidak mudah. Berdasarkan tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan, peserta aktif bertanya tentang hal yang tidak mereka ketahui dan menyampaikan kendala yang ada dalam usaha mereka, sekaligus meminta saran dari narasumber tentang aspek pemasaran dan masalah pengurusan perijinan seperti perijinan BPPOM dan label halal. Agar kemanfaatan kegiatan ini tidak terputus maka tim pelaksana berinisiatif membentuk komunitas untuk peserta agar mereka memiliki saluran jika menghadapi masalah terkait pemasaran dan perijinan serta menguatkan ikatan emosional sesama pelaku usaha yang sama.

PENUTUP

Karakteristik dari pengrajin jamu binaan ini dalam melakukan bisnis jamu ini masih bersifat sambilan dan mengisi waktu luang, walaupun dari beberapa mitra sudah ada yang masuk ke usaha bisnis yang sesungguhnya. Mereka juga mempunyai bisnis lain yang ditekuni sehingga tidak fokus pada bisnis jamu saja. Hal ini menyebabkan motivasi mereka kurang kuat dalam mengembangkan bisnis jamu secara serius meski potensi pasarnya masih luas. Pola produksi dan pemasaran mereka juga sangat sederhana dan sangat

berciri khas industri rumah tangga. Meski demikian jika dilihat dari lamanya waktu mereka menekuni bisnis ini, setidaknya menunjukkan komitmen mereka tetap ada untuk bisnis ini meski perjalanannya tersendat-sendat. Ke depan, kekuatan komitmen ini menjadi faktor penentu utama jika bisnis ini ingin dikembangkan secara serius. Disinilah letak peranan penting komunitas untuk saling menguatkan dan mencari solusi bersama serta saling mendukung dan bukan saling meniadakan.

Dari kegiatan pendampingan yang dilakukan, diperlukan komunikasi yang intensif di antara para pengrajin jamu itu sendiri untuk lebih menguatkan posisi tawar mereka sebagai pelaku pasar serta mencari solusi secara kolektif tentang masalah yang mereka hadapi. Agar komunikasi tersebut terjalin dengan baik dan bermanfaat, maka perlu dibentuk komunitas yang keanggotaannya terstruktur. Tim PKM akan memfasilitasi pembentukan komunitas pengrajin jamu tersebut sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini. Adanya komunitas ini, nantinya akan mempermudah komunikasi dan koordinasi sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berlanjut pada waktu yang lain. Sebagai langkah awal pembentukan komunitas, telah terbentuk grup WhatsApp, selanjutnya pertemuan berkala para anggota komunitas dalam grup. Tim PKM akan memfasilitasi dengan pembuatan stempel komunitas. Komunitas tersebut diberi nama KOMUNAL (Komunitas Pengrajin Jamu Milenial).

Di tengah pandemi Covid-19, peran komunitas bisa menjadi media ampuh dalam strategi pemasaran, gunanya untuk melibatkan anggotanya secara aktif. Ajakan yang dilakukan pun tidak memaksa, informasi yang diberikan lebih bermanfaat, baik bagi pelaku usaha, konsumen, maupun pasar. Melalui komunitas, komunikasi antar anggota jadi makin mudah dan membantu usaha agar bisa mendapatkan input berharga dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan. Termasuk juga dalam kepentingan berbisnis. Komunitas bisnis ini seringkali menjadi wadah bagi mereka untuk bertemu dan bertukar pikiran demi kemajuan bisnis masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurmayasari, dkk. 2017. Upaya Pengembangan Agrousa Jamu Di Jawa Timur. Jurnal Teknologi & Usaha Hasil Pertanian. Vol. 23 No.2. Hal 1-8
- Paul, dkk. 2014. *Value of Sosial Network for Development of Rural Malay Herbal Entrepreneurship in Malaysia*. Procedia - Sosial and Behavioral Sciences 130. Hal 1- 6
- Sugiarti, dan Nurul Arifiyanti. 2018. Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan Terhadap Daya Saing Pelaku Usaha Jamu Madura (Studi Umkm Jamu

Kabupaten Pamekasan Madura). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL 5th FP*. Hal 1-6

- Torri, Maria C. 2013. Traditional jamu versus usaha jamu: perceptions and beliefs of consumers in the city of Yogyakarta: what future for traditional herbal medicine in urban Indonesia? *Int.J.Entrepreneurship and Small Business*.Vol. 19, No. 1, 2013. Hal 9
- Torri, Maria C. 2016. Linking Small-Scale Commercial Activities and Women's Health: The Jamu System in Urban Areas of Java, Indonesia. *Journal of Small Business Management* 2016 54(1). Hal 1-15
- Wicaksono, Bagus dkk. 2018.Persepsi Pelaku Usaha terhadap Program Pengembangan Sentra Usaha Jamu di Desa Nguter Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Prencanaan partisipatif*. Vol. 13, No.2.
- Widodo, R dkk. 2016. Kajian Peningkatan Usaha Rumah Tangga Jamu Herbal Instan Di Desa Galengdowo, Wonosalam Jombang. *Jurnal Pengabdian LPPM Untag Surabaya*. Vol. 02, No. 01. Hlm 3

PERSPEKTIF HARGA DAN KEUNTUNGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP PUKAT CINCIN MINI SEBAGAI ALTERNATIF PENYERAP TENAGA KERJA

Dian Ayunita N.N. Dewi, F. X. Sugiyanto, Deden D. Iskandar

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang menghantam dunia selama hampir dua tahun belakangan ini sangat memukul kondisi ekonomi dunia. Puluhan juta pekerja terpaksa harus dirumahkan atau bahkan diberhentikan dari pekerjaan mereka. Tak terkecuali di Indonesia, yang hingga saat ini masih berjuang untuk mengatasi gelombang kedua tekanan pandemi yang belum dapat dikendalikan. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang juga terdampak. Namun, aktivitas penangkapan masih tetap berjalan di tengah kecamuk pandemi. Mengutip dari pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan pada harian Republika tanggal 28 Mei 2020, industri perikanan masih menawarkan 300 ribu lapangan kerja. Angka 300 ribu tenaga kerja yang dimaksud disini adalah kebutuhan pekerja sebagai anak buah kapal (ABK). Kapasitas produksi perikanan laut nasional yang mencapai 12,5 juta ton per tahun belum sepenuhnya dieksplorasi. Kemampuan produksi saat ini hanya sebesar 7,9 juta ton/tahun. Potensi laut yang boleh diekstraksi sebesar 80 persen dari total kapasitas produksi yaitu 10,5 juta ton per tahun. Maknanya masih 2,5 juta ton potensi yang belum dimanfaatkan. “Seandainya 1 juta ton bisa dieksplorasi oleh satu kapal berukuran 100 Gross Ton (GT) maka membutuhkan 10 ribu kapal. Apabila per kapal membutuhkan 30 ABK, maka peluang lowongan pekerja ABK adalah 300 ribu orang.” pernyataan dari Menteri KKP pada saat itu. Tentunya ini adalah peluang yang perlu untuk dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki potensi perikanan laut cukup besar. Perikanan tangkap menyumbang total volume produksi sebesar 274.469 ton dengan nilai Rp 8,75 triliun yang menduduki posisi ke-8 secara nasional (Notohamijoyo, 2019). Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sentra kegiatan industri perikanan. Kota ini terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah dan memiliki Pelabuhan Perikanan sebagai sentra pendaratan ikan hasil tangkapan. Pelabuhan Perikanan di kota Pekalongan yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan yang disahkan berdasarkan Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26.I/Men/2001 tanggal 1 Juni 2001 yang berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, 2019). PPN Pekalongan termasuk Pelabuhan Perikanan tipe B yang menjadi "*fishing base*" dari armada penangkapan purse seine. Alat tangkap *purse seine* atau pukat cincin adalah alat tangkap dominan kedua yaitu sebesar 84% dari total jumlah alat tangkap di PPN Pekalongan. Termasuk di dalamnya adalah jenis yang lebih kecil yang disebut *mini purse seine* atau pukat cincin mini (PPN Pekalongan, 2015 dalam Dewi, et al., 2018). Pengamatan dilakukan pada armada penangkapan pukat cincin mini di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dengan kapasitas armada 10-30 Gross Ton (GT). Usaha penangkapan ini memiliki jangkauan daerah penangkapan antara 2 mil hingga 12 mil laut di area sekitar pesisir pantai ke arah laut lepas. Usaha penangkapan dengan alat tangkap *mini purse seine* ini membutuhkan banyak tenaga untuk membantu proses kegiatan penangkapan ikan di laut. Satu armada penangkapan membutuhkan minimal 10 orang anak buah kapal (ABK) hingga 25 orang ABK. Tentunya ini menyerap banyak tenaga kerja dari segala level pendidikan yang tidak membutuhkan persyaratan khusus. Namun, khusus untuk tenaga nahkoda kapal penangkap ikan perlu diregenerasi karena kemampuan nahkoda menentukan daerah penangkapan tidak dipelajari pada pendidikan formal. Selama ini, pekerjaan ini sangat tergantung dengan garis kekerabatan antar keluarga yang menjadi tenaga nahkoda kapal penangkapan ikan. Selama ini pemilik usaha penangkapan ikan juga sangat berhubungan dengan kekerabatan antar keluarga.

Pada kajian studi ini dilakukan analisis harga ikan target tangkapan utama dan keuntungan usaha penangkapan armada *mini purse seine* di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Pengamatan dari sisi harga dan keuntungan dapat memberikan deskripsi mengenai kondisi dari usaha penangkapan *mini purse seine* yang memiliki kecenderungan berkurang selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019). Analisis harga menggunakan harga riil dari hasil pengamatan dan data sekunder hasil pencatatan pihak administrasi PPN Pekalongan. Sedangkan pendapatan, biaya dan keuntungan berdasarkan hasil wawancara dengan responden di daerah penelitian. Analisis keuntungan menggunakan dasar *benefit cost ratio* atau rasio keuntungan biaya, pendapatan dan biaya total per tahun dari usaha penangkapan *mini purse seine*. Dan analisis *Break Even Point* (BEP) digunakan untuk menentukan berapa volume produksi yang diperlukan oleh armada penangkap ikan untuk menghasilkan kondisi titik impas.

PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

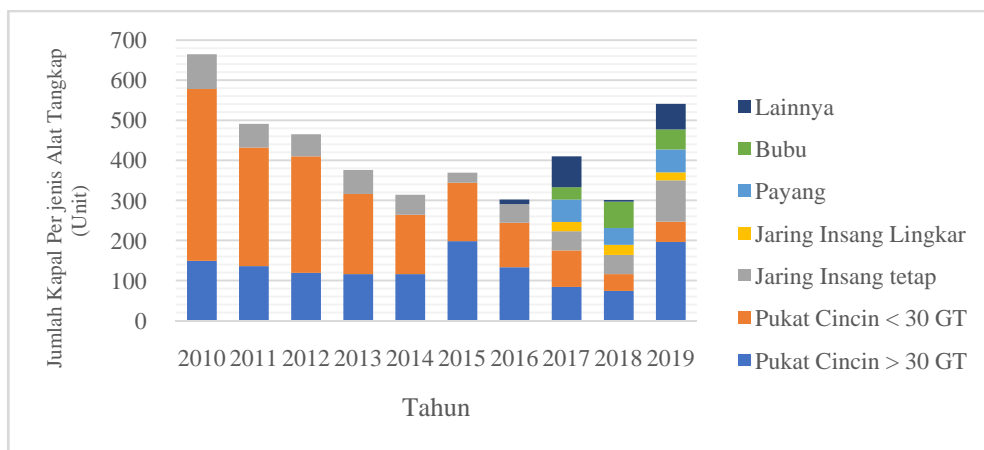
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan merupakan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, 2019). Penelitian difokuskan pada pengelompokan ukuran kapal *mini purse seine* 10-30 GT yang melakukan lelang hasil tangkapannya di PPN Pekalongan. Dengan selisih ukuran kapal tersebut, ternyata daerah penangkapan armada tersebut masih berada pada area yang sama yaitu pada jalur penangkapan II (pada jarak 2 hingga 12 mil laut ke arah laut lepas). Berada di perairan Kota dan Kabupaten Pekalongan yang terletak di Wilayah Pengelolaan Perikanan 712 atau Laut Jawa. Ikan yang menjadi sasaran penangkapan adalah ikan pelagis kecil yaitu ikan layang, tembang, kembung, tenggiri, tongkol, bawal hitam dan lain-lain.

B. Armada Penangkapan, Produksi, Nilai Tangkapan dan Harga Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

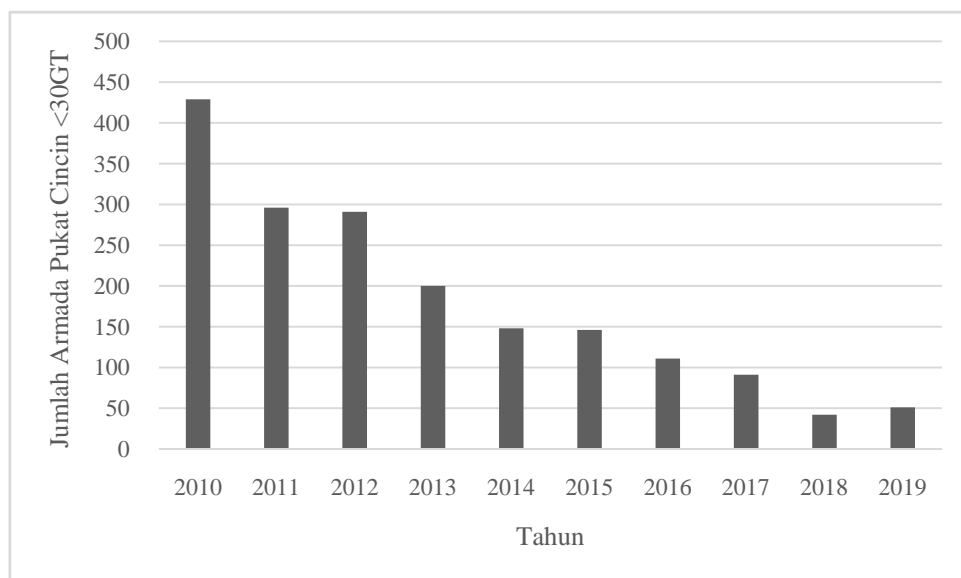
1. Jumlah Armada Penangkapan

Armada penangkapan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan seluruhnya berupa kapal motor. Tahun 2010, armada penangkapan yang ada didominasi oleh kapal *mini purse seine* (>30 GT) yaitu sebanyak 429 unit, diikuti kapal *purse seine* sebanyak 149 unit, dan kapal *gill net* sebanyak 87 unit. Informasi mengenai armada dan alat tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan selama sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2 berikut ini.

Alat tangkap yang tercatat di PPN Pekalongan terdiri dari pukat cincin atau *purse seine* < 30 GT atau disebut dengan *mini purse seine*, pukat cincin > 30 GT, jaring insang lingkaran, jaring insang tetap, payang, bubu dan lainnya. Dalam jangka waktu tahun 2010-2019 kapal *mini purse seine* mengalami penurunan dari 429 unit pada tahun 2010 dan menurun 133 unit menjadi 296 unit pada tahun 2011. Jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2010. Penurunan jumlah armada terus terjadi pada tahun 2011 hingga 2018 dengan rata-rata penurunan 18% per tahun dan jumlah paling sedikit 42 unit yaitu tahun 2018. Penurunan jumlah unit armada disebabkan oleh banyak kapal yang dijual karena alasan umur ekonomis, mencari daerah lain yang harga jual ikan lebih tinggi dan daerah penangkapan di area perairan lain. Kapal tersebut tidak melakukan penangkapan sepanjang bulan.



Gambar 1. Jumlah Armada Penangkapan Menurut Jenis Alat Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Tahun 2010-2019



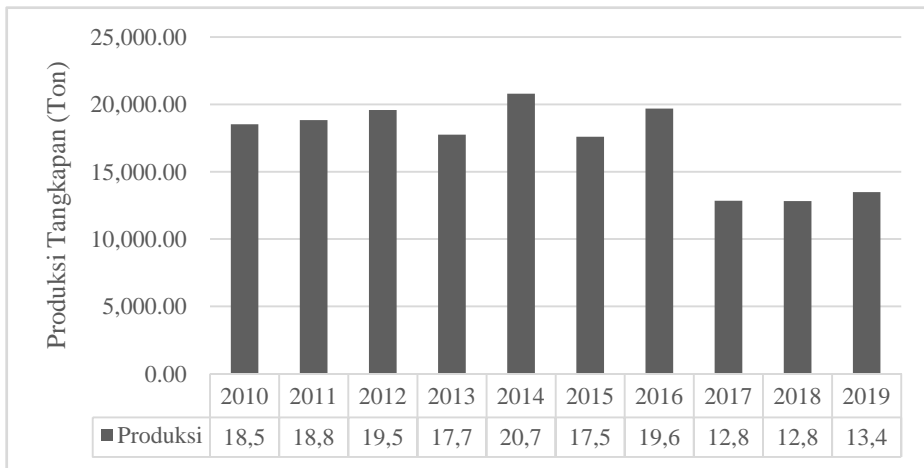
Gambar 2. Jumlah Armada Penangkapan Pukat Cincin Mini di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Tahun 2010-2019

2. Produksi dan Nilai Tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

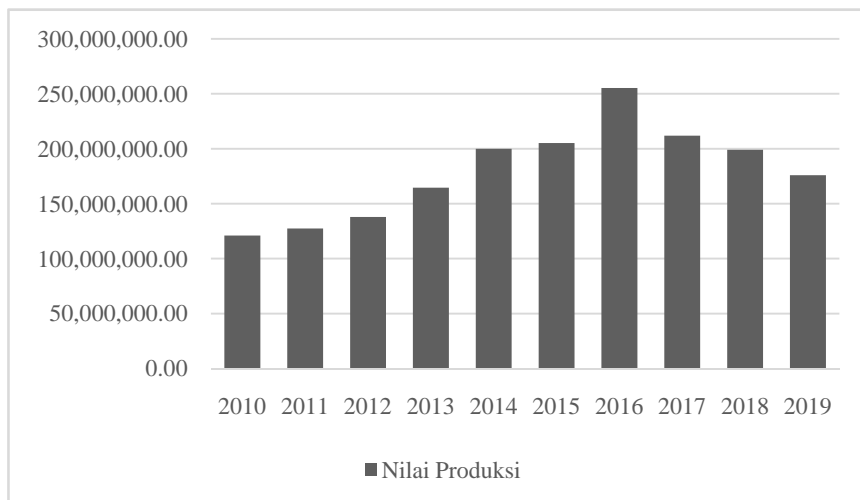
Produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Pekalongan terdiri dari beragam jenis ikan pelagis (ikan yang hidup di permukaan perairan) dan demersal (ikan yang hidup di dasar perairan). Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebagian besar adalah jenis ikan pelagis kecil, seperti ikan tembang, kembung, layang, selar, tenggiri, tongkol,

bawal, talang-talang, swanggi, layur dan lain-lain. Selain ikan, hasil tangkapan juga ada yaitu, cumi-cumi dan udang.

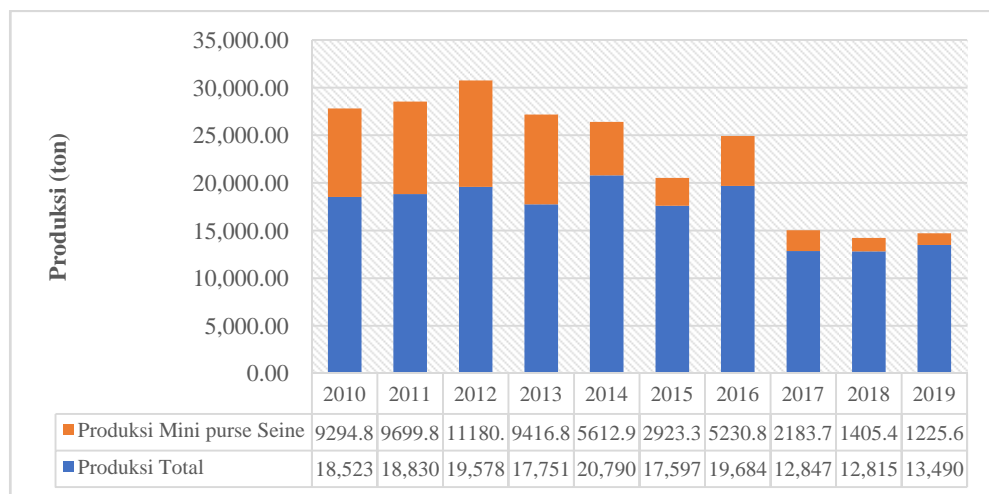
Hasil tangkapan dalam kurun waktu 10 tahun (2010-2019) cenderung mengalami penurunan. Tercatat bahwa total produksi tangkapan tertinggi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2018. Jumlah produksi mengalami penurunan rata-rata 2% per tahun. Sebaliknya untuk nilai produksi hasil tangkapan menunjukkan kenaikan dalam kurun waktu 2010 hingga tahun 2016. Hal ini dikarenakan ikan yang didaratkan adalah jenis ikan yang mendapatkan harga yang tinggi. Sedangkan pada tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan penurunan nilai produksi sesuai dengan penurunan jumlah produksi tangkapan.



Gambar 3. Produksi Hasil Tangkapan di PPN Pekalongan Tahun 2010-2019



Gambar 4. Nilai Produksi Hasil Tangkapan di PPN Pekalongan Tahun 2010-2019



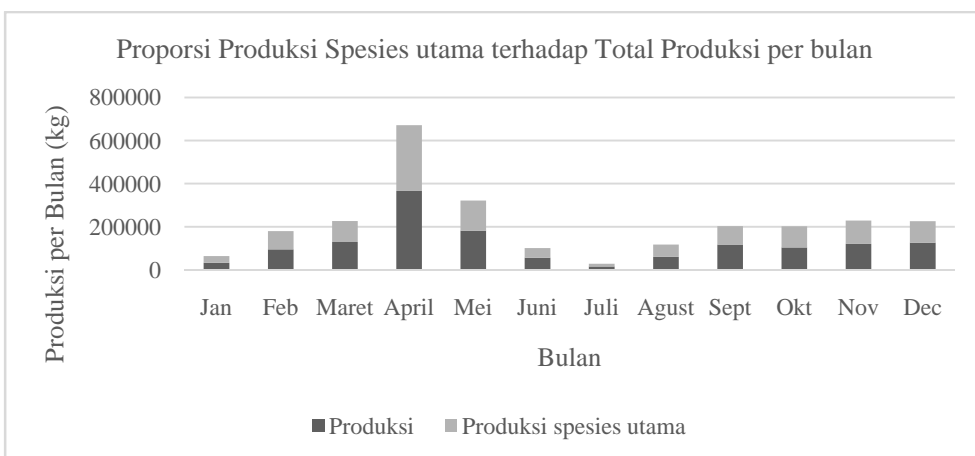
Gambar 5. Proporsi Produksi *Mini Purse Seine* terhadap Produksi Total

Produksi armada penangkapan *mini purse seine* terhadap produksi total menunjukkan proporsi yang semakin kecil dari tahun 2010 hingga 2019. Ini diakibatkan oleh menurunnya jumlah armada penangkapan yang berangkat dan melakukan lelang hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Selain itu juga karena kecenderungan perubahan kondisi cuaca yang cukup ekstrem selama kurun waktu lima tahun terakhir.

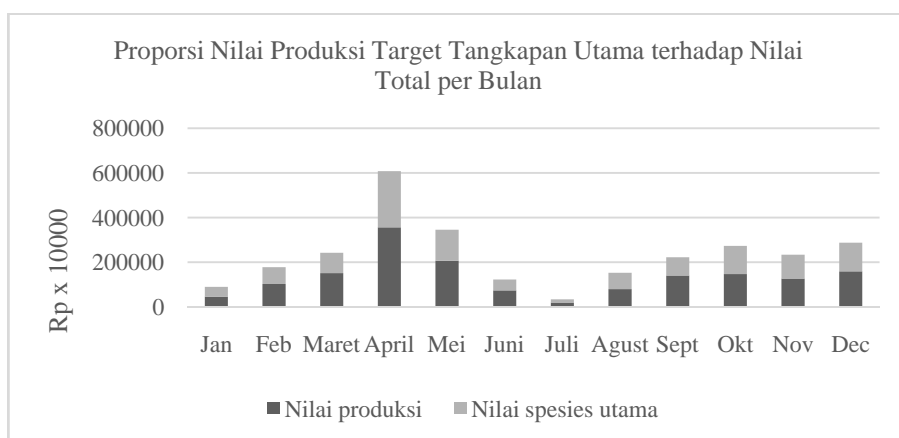
3. Ikan Hasil Tangkapan dan Harga Ikan

Jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebesar 97,07% adalah ikan pelagis dan sisanya 2,93% adalah ikan demersal. Dari total ikan pelagis meliputi, lemuru Jawa, ikan tembang, ikan layang dan ikan kembung. Ikan pelagis besar seperti ikan setuhuk, tongkol dan sejenisnya. Sedangkan jenis ikan demersal yang tertangkap umumnya jenis ikan kakap merah, Hiu, ikan sebelah (PPN Pekalongan, 2020).

Hasil tangkapan dari alat tangkap *mini purse seine* komposisinya beragam. Ada 7 (tujuh) spesies yang menjadi hasil tangkapan utama yaitu tembang (*Sardinella* sp), layang (*Decapterus* sp), kembung (*Rastrelliger kanagurta*), selar/bentong (*Selaroides leptolepis*), tenggiri (*Scomberomorus* sp.), tongkol (*Auxis rochei*), dan bawal (*Parastromateus niger*).



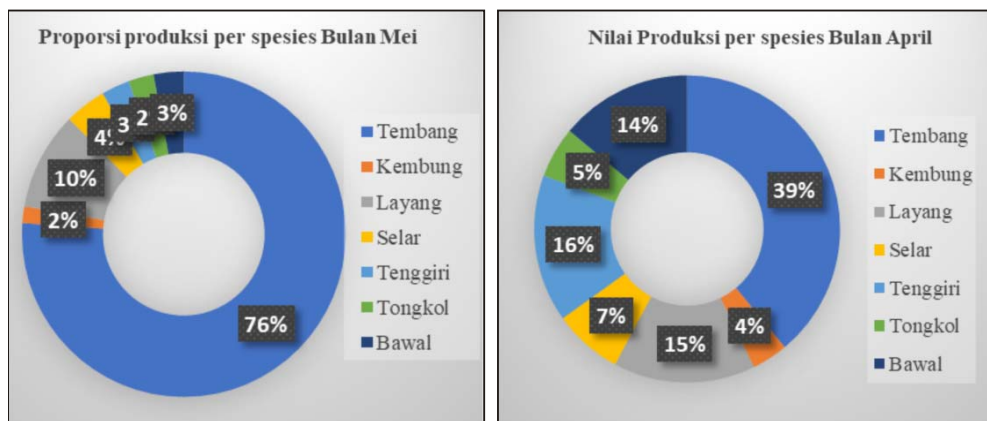
Gambar 6. Proporsi Produksi Spesies Utama *mini purse seine* terhadap total produksi per bulan



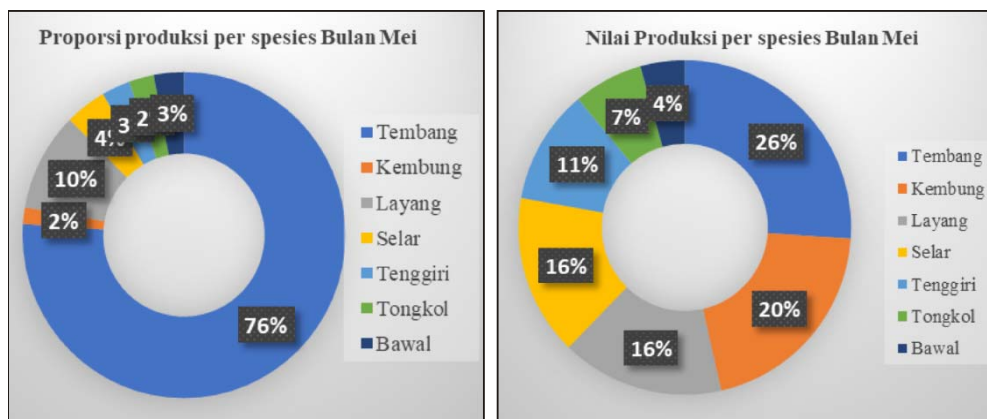
Gambar 7. Proporsi nilai produksi target tangkapan utama *mini purse seine* terhadap nilai total per bulan

Proporsi nilai dari tangkapan utama terhadap nilai total per bulan menunjukkan bahwa tangkapan utama memberikan porsi yang cukup besar yaitu antara 73 hingga 95%. Namun proporsi jumlah tangkapan ini tidak selaras dengan proporsi nilai produksinya. Sebagai gambaran, pada produksi musim puncak penangkapan yaitu bulan April dan Mei ikan yang dominan tertangkap adalah ikan tembang. Ikan tembang tercatat 76% dan 65% menjadi ikan dominan yang tertangkap pada bulan April dan Mei. Akan tetapi proporsi nilai produksi dari ikan ini hanya 39% dan 26% terhadap nilai produksi total pada bulan tersebut. Hal ini disebabkan harga dari ikan tembang yang sangat rendah yaitu antara Rp 3.000,00 hingga Rp 6.000,00 per kg. Sehingga menyumbang porsi kecil terhadap pendapatan dari armada *mini purse seine*. Sebaliknya jenis ikan lain yang jumlah tangkapannya lebih sedikit memberikan

porsi pendapatan yang lebih besar. Ikan layang yang tertangkap sebesar 10% dari total produksi bulan April memberikan porsi tambahan nilai sebesar 15% dan 16% pada bulan Mei untuk porsi nilai pendapatan. Sedangkan ikan tenggiri yang hanya memberikan porsi 3% dari total tangkapan bulan April memiliki persentase sebesar 16% untuk nilai produksi dan 11% pada bulan Mei. Begitu pula ikan lain seperti bawal yang proporsi produksi bulan April hanya 3% ternyata memberikan sumbangan pendapatan cukup besar, yaitu 14% dari total porsi pendapatan (Gambar 8 dan Gambar 9.). Hal ini menunjukkan bahwa harga ikan sangat menentukan nilai dari ikan yang tertangkap. Ikan tenggiri memiliki harga jual Rp 30.000,00 hingga Rp 56.000,00 per kg. Ikan layang Rp 7.000,00 hingga Rp 30.000,00/kg dan bawal per kg tercatat terjual dengan kisaran harga Rp 15.000,00 hingga Rp 65.000,00. Kisaran harga ikan target utama dirangkum pada Tabel 1.



Gambar 8. Proporsi produksi dan Nilai Produksi per spesies pada musim puncak (Bulan April) tahun 2018



Gambar 9. Proporsi produksi dan Nilai Produksi per spesies pada musim puncak (Bulan Mei) tahun 2018

Tabel 1. Harga Ikan Target Tangkapan Utama

No	Jenis Ikan	Harga rata-rata per kg				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tembang	Rp 3.796	Rp 6.397	Rp 4.409	Rp 4.260	Rp 3.667
2.	Kembung	Rp 17.129	Rp 13.842	Rp 16.574	Rp 19.862	Rp 19.152
3.	Layang	Rp 10.292	Rp 7.992	Rp 14.857	Rp 14.402	Rp 10.838
4.	Selar	Rp 13.398	Rp 7.032	Rp 12.618	Rp 16.592	Rp 10.716
5.	Tenggiri	Rp 31.841	Rp 35.592	Rp 37.535	Rp 49.491	Rp 56.198
6.	Tongkol	Rp 11.928	Rp 8.845	Rp 16.291	Rp 17.769	Rp 16.853
7.	Bawal	Rp 32.881	Rp 66.533	Rp 29.638	Rp 38.519	Rp 41.675

Sumber: Hasil Penelitian yang diolah (2020)

C. Analisis Pendapatan, Biaya dan Keuntungan Usaha Penangkapan

Pendapatan usaha penangkapan armada *mini purse seine* sebagian besar didapatkan dari target tangkapan ikan utama yaitu ikan pelagis kecil. Perhitungan pendapatan usaha penangkapan berbeda dengan usaha di darat. Pada usaha penangkapan ikan dikenal istilah trip penangkapan yang biasanya berkisar antara 1 hingga 14 hari penangkapan di laut untuk kapal *mini purse seine*. Lama hari penangkapan ini tergantung pada masing-masing pemilik kapal dan nahkoda kapal selaku pengambil keputusan untuk operasi penangkapan. Setelah melakukan satu kali trip penangkapan biasanya armada kapal akan merapat ke Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan dan membongkar hasil tangkapan untuk kemudian dijual dengan sistem lelang. Di sini pendapatan dari hasil lelang bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu hasil lelang sebelum dipotong biaya retribusi yang disebut raman kotor dan hasil pendapatan lelang yang sudah dipotong biaya retribusi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang disebut raman bersih. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.27 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan besarnya retribusi hasil lelang ikan di PPN Pekalongan sebesar 1,5 persen.

Pendapatan usaha yang dihitung dan digunakan pada studi ini adalah pendapatan per tahun. Pendapatan per tahun diperoleh dari penghitungan total trip penangkapan selama satu tahun dan dikalikan dengan nilai rata-rata produksi tangkapan per trip. Pendapatan rata-rata usaha penangkapan *mini purse seine* per tahun Rp 47.926.925,00.

Biaya usaha penangkapan ikan terdiri atas biaya perbekalan, biaya retribusi lelang, biaya tambat labuh, biaya ABK, biaya perawatan, biaya perbaikan, biaya perijinan, biaya penyusutan. Biaya ini bisa dibedakan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel meliputi biaya perbekalan melaut, biaya retribusi lelang, biaya tambah labuh, biaya perbaikan dan biaya ABK. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dengan jumlah yang sama

berapapun jumlah trip yang dijalankan. Pengeluaran yang tergolong biaya tetap adalah biaya perijinan, biaya perawatan dan penyusutan kapal, mesin dan alat tangkap. Karena kerusakan kapal, mesin maupun alat tangkap memerlukan biaya yang besar maka pemilik usaha melakukan penyusutan untuk keperluan pembelian baru. Perbedaan biaya perbaikan dan perawatan adalah biaya perbaikan dikeluarkan pada waktu yang tidak ditentukan karena kerusakan mendadak, seperti kerusakan jaring saat penangkapan. Sedangkan biaya perawatan dikeluarkan secara berkala dengan kurun waktu tertentu, misalnya pada saat mesin harus dirawat setiap bulan. Biaya total merupakan gabungan antara biaya yang berpola tetap (biaya tetap) dan berpola variabel (biaya variabel). Biaya total per tahun untuk usaha penangkapan *mini purse seine* adalah Rp 249.012.131,00.

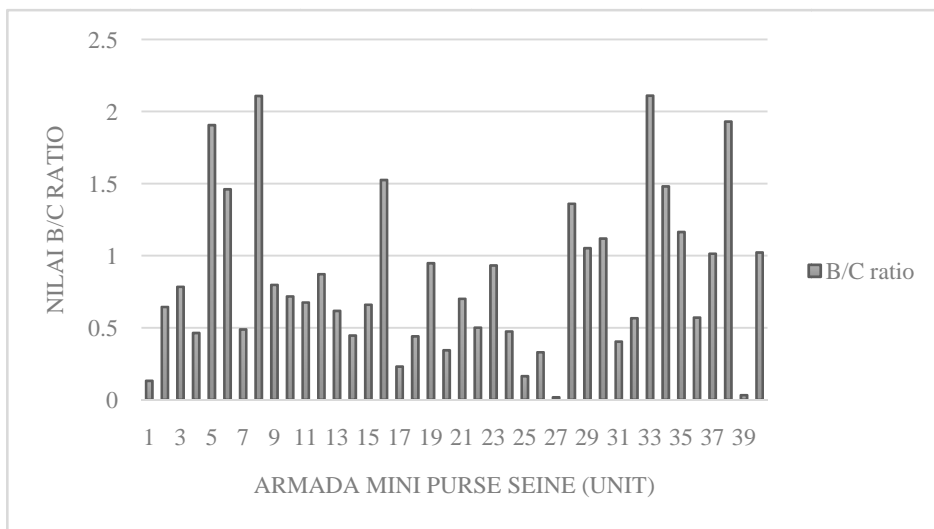
Keuntungan (laba) atau rugi suatu usaha akan diketahui setelah penerimaan hasil penjualan produk dikurangi dengan biaya total. Laba ini masih disebut laba kotor. Laba bersih baru didapat setelah dikurangi biaya di luar usaha (misalnya pajak atau retribusi). Keuntungan usaha penangkapan ikan didapatkan setelah hasil raman bersih dikurangi dengan biaya total dari kegiatan ekspedisi penangkapan dan biaya lainnya. Keuntungan usaha per tahun adalah Rp 219.572.864,00.

B/C ratio atau rasio keuntungan dan biaya adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. Suatu usaha dikatakan layak dan memberikan manfaat apabila nilai $B/C > 0$. Semakin besar nilai B/C semakin besar pula manfaat yang akan diperoleh dari usaha tersebut. B/C ratio usaha penangkapan pada nilai 0,5 sampai 1 sebanyak 45% dari total sampel yang diambil dan sebanyak 25% berada pada rentang nilai B/C ratio 0-0,4. Ini menunjukkan bahwa rasio keuntungan dan biaya dari usaha penangkapan masih berada pada kondisi yang menguntungkan. Namun kondisi ini sangat tergantung dengan harga ikan hasil tangkapan yang didapatkan oleh kapal penangkapan. Sedangkan untuk Analisis Titik Impas atau Break Even Point (BEP) volume produksi kapal *mini purse seine* adalah 47743,1 kg atau 47 ton per kapal per trip.

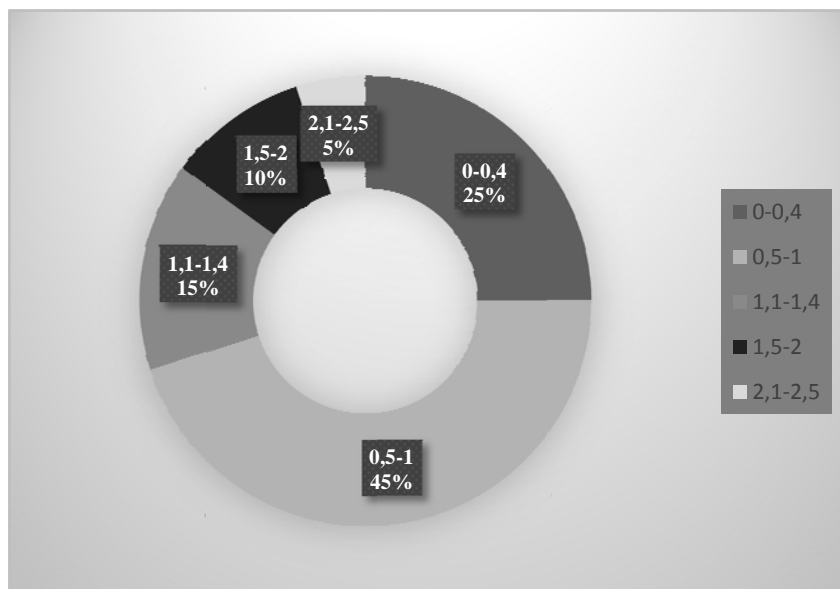
Tabel 2. Nilai Unsur Ekonomi Usaha Penangkapan Mini Purse Seine

No	Unsur Ekonomi Usaha	Nilai rata-rata	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
1.	Pendapatan per tahun	Rp 47.926.925	Rp 24.971.160	Rp 1.368.346.264
2.	Trip rata-rata per tahun	11 trip	1 trip	35 trip
3.	Biaya variabel per tahun	Rp 204.856.631	Rp 4.851.367	Rp 501.788.667
4.	Biaya tetap per tahun	Rp 44.155.500	Rp 6.800.000	Rp 116.200.000
5.	Biaya total per tahun	Rp 249.012.131	Rp 24.531.367	Rp 555.988.667
6.	Keuntungan per tahun	Rp 219.572.864	Rp 439.793	Rp 812.357.598
7.	B/C ratio rata-rata	0,83	0,02	2,11
8.	BEP Produksi rata-rata	47743,1 kg	4219,2 kg	91234 kg

Sumber: Hasil Penelitian yang diolah (2020)



Gambar 10. Nilai B/C ratio dari Sampel Usaha Penangkapan *Mini Purse Seine* di PPN Pekalongan



Gambar 11. Persentase Rentang Nilai B/C ratio dari Sampel Usaha Penangkapan *Mini Purse Seine* di PPN Pekalongan

PENUTUP

Usaha penangkapan ikan dengan alat *mini purse seine* masih memberikan keuntungan kepada pemilik usaha. Nilai *B/C ratio* yang dihitung dari perbandingan keuntungan dan biaya usaha menunjukkan nilai rata-rata 0,83 yang bermakna usaha ini layak untuk dikembangkan. Kegiatan usaha

penangkapan ini bisa menjadi alternatif penyerapan tenaga kerja karena membutuhkan anak buah kapal yang jumlahnya antara 10-25 orang untuk satu armada penangkapan. Namun yang menjadi perhatian adalah harga ikan hasil tangkapan utama yang masih berada pada nilai yang cukup rendah Rp 3.000,00 hingga Rp 6.000,00. Sehingga perlu diberikan informasi harga pasar yang menjadi acuan agar harga ikan tangkapan ini bisa lebih layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, D. A. N. N., B. A. Wibowo, dan I. A. Husni. 2018. "Keberlanjutan Usaha Penangkapan Purse Seine di Pekalongan ditinjau dari Aspek Efisiensi Usaha". *Jurnal Akuatik Sumberdaya Perairan* Vol. 12, No.1, hal 7-13.
- Harian Republika. Kamis 28 May 2020. Industri Perikanan tawarkan 300 ribu lapangan kerja retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/qb1imt383/industri-perikanan-tawarkan-300-ribu-lapangan-kerja> diakses tanggal 29 Juli 2021.
- Notohamijoyo, A. 17 Juni 2019. Membangun Jawa Tengah Sebagai Raksasa Perikanan retrieved from <https://kkp.go.id/artikel/11315-membangun-jawa-tengah-sebagai-raksasa-perikanan> diakses tanggal 29 Juli 2021.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. 2015. Jumlah Kapal Perikanan Menurut Jenis Alat Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. PPN Pekalongan.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, 2020. Publikasi Data Hasil Tangkapan Ikan yang didaratkan di PPN Pekalongan tahun 2010-2019. PPN Pekalongan.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.27 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. 2019. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. available at <http://www.pipp.djpt.kkp.go.id>. diakses tanggal 23 Desember 2019.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF

Lilis Siti Badriah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses peningkatan pendapatan per kapita pada suatu tahun tertentu melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Untuk mencapai hal tersebut, maka perkembangan GDP dan GNP yang terjadi perlu dibarengi dengan perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (Todaro & Smith, 2012). Sasaran yang ingin dicapai melalui pembangunan ekonomi adalah meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok, meningkatkan taraf hidup, dan memperluas pilihan ekonomi dan sosial. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka hendaknya dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Paradigma pembangunan modern lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam paradigma pembangunan modern, bertujuan lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan keadilan bagi semua warganya, mereka dapat menikmati hasil pembangunan sesuai dengan kontribusi dalam keterlibatannya dalam proses pembangunan tersebut. Paradigma ini sesuai dengan yang disebut dengan pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang berusaha untuk melibatkan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat pinggiran sekalipun. Tujuan pembangunan inklusif ini adalah mencapai kehidupan yang lebih baik, secara fisik maupun mental, melalui kombinasi proses sosial, ekonomi, dan lembaga (Tambunan, 2016).

Tujuan pembangunan inklusif dapat dicapai antara lain melalui program pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), di mana melalui program ini masyarakat diarahkan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Keterlibatan aktif masyarakat ini akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk akses sumberdaya pembangunan, sekalipun mereka memiliki berbagai keterbatasan. Hal ini selanjutnya akan memberikan peluang kepada mereka untuk memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Paradigma pembangunan inklusif ini juga yang menjadi salah satu hakekat tujuan dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka sistem perancangannya bersifat *bottom-up*, tidak lagi *top-down*. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah masing-masing, yang tentu saja bervariasi antardaerah. Kebijakan otonomi daerah menginginkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan sehingga diharapkan dapat tercipta pemerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Salah satu kebijakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat adalah melalui program pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk dibahas dan dikaji, bagaimana program pemberdayaan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan inklusif?

PEMBAHASAN

a. Pembangunan Inklusif dan Pemerataan

Ide pembangunan ekonomi inklusif pertama kali muncul setelah diperkenalkan dalam *Millenium Developments Goals* (MDGs). Ide ini dimotivasi oleh banyak fakta bahwa sejumlah negara di dunia yang sudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan masyarakat per kapita yang tinggi, dan mengalami perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri, namun banyak dari negara-negara tersebut masih menghadapi masalah yang serius terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Tambunan, 2016). Menurut Sachs (2004), strategi pembangunan ekonomi yang inklusif harus memiliki tiga komponen paling penting, yaitu menjamin hak-hak politik, sosial, dan kewarganegaraan; semua warganegara harus memiliki akses yang sama ke semua program kesejahteraan; dan semua penduduk harus mendapatkan peluang yang sama terhadap akses pelayanan-pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Pembangunan ekonomi inklusif didefinisikan sebagai pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan

mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah (<http://smeru.or.id/>). Tujuannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, serta memperluas akses dan kesempatan kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup, yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus dapat menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja. Semangat dasar dari pembangunan ekonomi inklusif ini adalah *society empowerment* (pemberdayaan masyarakat).

Kebijakan pembangunan inklusif menjadi kebijakan pembangunan yang dilakukan diberbagai negara, terutama di negara-negara sedang berkembang. (NSB). Melalui kebijakan ini, NSB diharapkan agar tidak memusatkan pada pengejaran pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya tetapi harus memperhatikan juga bagaimana pelaksanaan distribusi pertumbuhan tersebut. Hal ini yang disebut dengan *growth with equality*, yaitu pertumbuhan dengan memberikan perhatian terhadap peningkatan kesempatan kerja, peningkatan investasi modal manusia, optimalisasi modal sosial, memberikan perhatian pada petani kecil, sektor informal dan pengusaha kecil. Untuk mendukung terwujudnya *growth with equality*, salah satunya adalah melalui disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang tersebut ada upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Melalui investasi ini diharapkan dapat menciptakan *trickle down effect* yang dapat mendorong terciptanya keadilan (*equity*) dan pemerataan (*equality*).

b. Paradigma Pembangunan dengan Pendekatan Kapabilitas

Terkait dengan hal pembangunan inklusif dan pemerataan, Amartya Sen (dalam Todaro & Smith, 2012) mengemukakan paradigma pembangunan dengan pendekatan “kapabilitas”. Menurutny, bahwa kapabilitas untuk berfungsi (*capability of function*) merupakan hal paling berperan dalam menentukan status miskin tidaknya seseorang. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan, namun pertumbuhan dan pembangunan harus memperhatikan upaya peningkatan kualitas hidup dan kebebasan yang dimiliki. Kemudian, menurut Amartya Sen, kemiskinan tidak hanya dapat diukur dengan pendapatan, tetapi yang lebih penting bukan diukur pada apa yang dimiliki melainkan dapat diukur dari menjadi apa dirinya dan apa yang dapat dilakukannya. Keberfungsian yaitu apa yang dapat dilakukan seseorang terhadap komoditas dengan karakteristik tertentu yang dimilikinya/ dikendalikannya. Kebebasan memilih atau kendali atas kehidupan pribadi, merupakan aspek penting dalam memahami kesejahteraan. Kesejahteraan tidak hanya diukur dengan jumlah komoditas yang dapat dikonsumsi seseorang, tetapi juga bagaimana manfaat dari konsumsi komoditas tersebut selanjutnya dapat

memberikan kemampuan seseorang untuk memberikan kemanfaatan sosialnya.

Amartya Sen juga menyoroti pentingnya kapabilitas eksternal (*external capacity*), yaitu kemampuan berfungsi sebagai hasil dari koneksi dan hubungan langsung dengan orang lain. Dalam kaitannya dengan hal ini, kesejahteraan berarti menjadi lebih baik dilihat dari utilitas individu dan mampu mengambil bagian dalam kehidupan sosial, memiliki kebebasan dalam memilih apa yang mungkin dilakukannya sesuai dengan kapasitasnya. Keberadaan seseorang dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, maka menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, inklusi sosial, pemberdayaan, dan sebagainya untuk mendukung terciptanya *growth with equality*.

Amartya Sen menyoroti pentingnya kebahagiaan sebagai bentuk dari hasil pembangunan. Kebahagiaan merupakan bagian dari kesejahteraan. Kebahagiaan yang lebih besar dapat meningkatkan kapabilitas manusia untuk berfungsi.

c. Modal Sosial

Kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan modal pembangunan yang dimiliki, baik berupa modal ekonomi (*economic/financial capital*), modal manusia (*human capital*), maupun modal sosial (*social capital*). Berbeda dengan modal yang lainnya, keberadaan modal sosial baru akan terlihat ketika ia berinteraksi dengan struktur sosial (Kuncoro, 2010).

Bourdieu (1980) dalam Kuncoro (2010) mendefinisikan modal sosial sebagai agregat sumberdaya aktual maupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet (*durable*) sehingga melembagakan hubungan persahabatan yang saling menguntungkan. Menurutnya, jaringan sosial terbentuk melalui strategi investasi yang berorientasi pada pelembagaan hubungan kelompok yang dapat dipakai sebagai sumber terpercaya untuk meraih keuntungan. Dengan demikian, terdapat 2 elemen modal sosial, yaitu hubungan sosial yang memungkinkan individu untuk akses sumber daya yang dimiliki oleh asosiasi mereka, dan jumlah/kualitas sumberdaya tersebut.

Putnam (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan. Keberadaan modal sosial sebagai sumberdaya yang melekat pada jaringan sosial dapat mempercepat pencapaian suatu tindakan, karena (Lin, *et al.*, 2001):

1. Ikatan sosial dalam posisi lokasi/hierarki memungkinkan individu untuk memperoleh aliran informasi berupa kesempatan dan pilihan-pilihan, yang tidak dapat diperoleh dalam pasar yang tidak sempurna.
2. Ikatan sosial dapat mempengaruhi pelaku yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan.
3. Ikatan sosial mungkin diberikan oleh organisasi atau pelakunya sebagai sertifikasi kepercayaan sosial individu, yang merefleksikan aksesibilitas individu terhadap sumber daya lewat jaringan yang ada.
4. Hubungan sosial diharapkan dapat memperkuat identitas dan pengakuan.

Terdapat 4 cara pandang terhadap modal sosial (Woolcock dan Narayan (2000), dalam Kuncoro, 2010), yaitu:

1. Pandangan komunitarian (*communitarian view*). Pandangan ini mengasumsikan komunitas sebagai entitas *homogeny* yang menyertakan seluruh anggotanya untuk meraih keuntungan. Cara pandang ini telah berkontribusi besar dalam analisis kemiskinan dengan menjadikan ikatan sosial sebagai salah satu sarana untuk membantu kaum miskin dalam mengelola risiko dan kerentanan.
2. Pandangan jaringan (*network view*). Pandangan ini menekankan pada pentingnya asosiasi vertikal dan horizontal di antara orang-orang dan relasinya dengan entitas organisasi lain. Dalam pandangan ini terdapat 2 karakter modal sosial, yaitu: *pertama*, modal sosial sebagai ikatan karena kekuatan hubungan di dalam komunitas dapat memberikan identitas dan tujuan bersama kepada setiap keluarga dan komunitas. *Kedua*, modal sosial sebagai jembatan karena dengan kekuatan hubungan antarkomunitas dapat meminimalisir dampak negatif dari adanya keragaman sosial.
3. Pandangan kelembagaan (*institutional view*). Menurut pandangan ini, kapasitas kelompok sosial untuk melakukan aksi menurut kepentingan kolektifnya tergantung kepada kualitas kelembagaan formal di mana kelompok tersebut berada.
4. Pandangan sinergi (*synergy view*). Pandangan ini berusaha mensinergikan antara jaringan (*network*) dengan kelembagaan (*institutional*). Menurut pandangan ini, sinergi antara pemerintah dan masyarakat didasarkan pada prinsip komplementaritas dan kelekatan. Komplementaritas merujuk pada hubungan yang saling menguntungkan antara aktor publik dengan swasta dan diwujudkan dalam kerangka kerja yang legal yang melindungi hak-hak asosiasi. Kelekatan merujuk pada sifat dan luas ikatan yang dapat menghubungkan warga negara dengan pejabat publik.

Seluruh definisi tersebut berujung dalam satu hal yaitu bahwa modal sosial baru terasa bila telah terjadi interaksi dengan orang lain yang dipandu oleh struktur sosial. Modal sosial berupa kearifan lokal yang terkandung dalam

persepsi, semangat, harapan dan interaksi antar manusia merupakan salah satu motor penggerak untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mencapai tujuan individu dan kelompok atau komunitas.

Modal sosial tersebut dapat dilihat dari sistem kerja, hubungan sosial, dan aktivitas sosial lainnya. Menurut Fukuyama (1995) modal sosial merupakan kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam sebuah komunitas. Outhwaite (2008) dalam Abdullah (2013) menjelaskan bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang tinggal dalam suatu area geografi tertentu yang berinteraksi dalam institusi bersama dan memiliki rasa interdependensi dan rasa perasaan solidaritas.

Modal sosial memiliki tiga tipologi, sekaligus merupakan wujud dari *energy* atau kekuatan yang dapat mengoptimalkan potensi modal lainnya. Tipologi modal sosial tersebut meliputi modal sosial sebagai perekat/pengikat (*bonding Sosial*), modal sosial sebagai penyambung/menjembatani (*bridging sosial*), dan modal sosial sebagai koneksi atau akses (*linking sosial*). Dalam konteks pemberdayaan modal sosial menjadi modal dasar yang mengefektifkan modal lain (Abdullah, 2013).

d. Pentingnya Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat

Paradigma pembangunan dalam era otonomi daerah lebih menekankan pada pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang berusaha untuk melibatkan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat pinggiran sekalipun. Tujuan pembangunan inklusif ini adalah mencapai kehidupan yang lebih baik, secara fisik maupun mental, melalui kombinasi proses sosial, ekonomi, dan lembaga. Tujuan pembangunan inklusif dapat dicapai antara lain melalui program pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Konsep pemberdayaan muncul karena adanya dikotomi menguasai dan dikuasai yang terjadi dalam proses pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Suharto (2005) menyatakan pemberdayaan memiliki tujuan utama untuk menguatkan kekuasaan masyarakat yang tidak berdaya yang disebabkan oleh persepsi mereka sendiri (kondisi internal) atau tertindas ketidakadilan dalam struktur sosial (kondisi eksternal). Menurut Anwas (2014), untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.

Dalam proses pemberdayaan diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah, lembaga sosial, Perguruan tinggi, dan atau pemerhati sebagai fasilitator. Hasil penelitian Rahajuni, *et al.* (2018) menunjukkan program pemberdayaan masyarakat miskin dapat memberikan dampak positif melalui pendampingan untuk dapat terus memberikan motivasi dan bimbingan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Badriah, *et al.* (2013). Aktivitas pemberdayaan memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam

perumusan program pembangunan sehingga mereka merasa ikut memiliki program tersebut, bertanggungjawab bagi keberhasilannya, dan memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap selanjutnya (Fetterman, 2007).

Menurut Usman (2003), partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan. Dengan proses pemberdayaan ini diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat. Partisipasi yang lemah dapat disebabkan oleh kekurangan kapasitas dalam masyarakat tersebut, sehingga peningkatan kapasitas perlu dilakukan (Rokhman, 2008; Nugroho, 2009).

Namun demikian, berdasarkan pengalaman evaluasi terhadap program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah pernah ada, seringkali dampak yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini seperti ditunjukkan dalam hasil penelitian Rahajuni dan Badriah (2011) yang menemukan hanya sekitar 50% peminjam pinjaman bergulir pada program PNPM – Mandiri Perkotaan yang memanfaatkan pinjaman untuk kegiatan ekonomi produktif. Kemudian penelitian Rahajuni, *et al.* (2018), menunjukkan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup pada beberapa kelompok sasaran mampu mengurangi kekumuhan lingkungan dan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Sedangkan pada beberapa kelompok lainnya program pemberdayaan tersebut masih kurang memberikan dampak nyata, antara lain karena karakteristik kelompok yang bersangkutan dan kurangnya motivasi.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kurang efektifnya suatu program pemberdayaan masyarakat, antara lain kurangnya perhatian terhadap potensi modal sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Selama ini, perhatian dari semua *stakeholders* lebih kepada modal finansial dan modal manusia. Padahal ada modal sosial yang tidak kalah penting ikut berperan dalam menentukan keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi Rahajuni, *et al.* (2018), keberhasilan kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan dari aktivitas pemberdayaan masyarakat adalah karena mereka memiliki modal sosial yang cukup kuat, dalam bentuk ketersediaan aturan (*norm*) yang mengikat mereka dalam suatu kelompok, adanya saling percaya antaranggota kelompok (*trust*), dan adanya jalinan relasi kerja sama (*networking*) yang relatif baik dengan dukungan kemampuan kepemimpinan kelompok yang lebih memadai dalam menggerakkan aktivitas kelompoknya. Sedangkan kelompok yang kurang berhasil dalam mencapai tujuannya adalah karena modal sosial mereka yang relatif lemah. Dengan demikian, maka modal sosial menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam melakukan suatu aktivitas selain modal manusia dan modal finansial.

e. Pembangunan Berkelanjutan

Logika sederhana dari pembangunan berkelanjutan adalah bahwa sekarang membangun sama dengan besok membangun. Besok membangun

sama dengan lusa membangun. Lusa membangun sama dengan upaya membangun secara terus menerus. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk terus membangun sampai generasi-generasi selanjutnya dapat terus ikut membangun dan memberikan manfaat pembangunan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Keberlanjutan pembangunan ekonomi dibangun dengan memperhatikan tiga komponen, yaitu apa yang dibangun (ketersediaan sumberdaya alam dan modal), siapa yang membangun (ketersediaan sumberdaya manusia), dan hasil pembangunan. Untuk menikmati hasil pembangunan secara layak dan berkelanjutan, maka perlu memperhatikan kesinambungan dalam ketersediaan sumberdaya alam dan adanya pelibatan semua sumberdaya manusia dalam proses pembangunan tersebut (pemberdayaan masyarakat). Oleh karena itu dalam paradigma pembangunan berkelanjutan terdapat yang disebut sebagai ekonomi hijau (*green economy*), yaitu pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam *green economy*, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus yang ingin dicapai secara beriringan dengan memperhatikan terpeliharanya lingkungan dan lebih mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan, maka proses perencanaan yang matang menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Terkadang perencanaan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena terkait beberapa kendala, seperti: tidak terkaitnya perencanaan dengan pelaksanaan, aparat pelaksana tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan untuk berpartisipasi sehingga tidak mendukung, konsep perencanaan yang berbasis pada paradigma yang tidak tepat dengan situasi dan kondisi yang ada. Perencanaan yang ideal seharusnya berbasis pada prinsip-prinsip partisipatif, kesinambungan, holistik (mencakup berbagai aspek/sektor dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan), terbuka, dan demokratis. Dengan demikian, apabila diperhatikan secara lebih seksama, maka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan perlu melibatkan partisipasi masyarakat sejak dari proses perencanaan sehingga apa yang direncanakan dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dalam pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid 19 yang menjadi wabah penyakit di seluruh dunia dan di Indonesia baru dirasakan mulai terjangkit sejak Februari 2020, telah membawa perubahan yang sangat signifikan pada berbagai sendi kehidupan masyarakat. Pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, dan mengalami peningkatan kembali sejak Mei 2021, telah menyebabkan pemerintah

mengambil kebijakan pengendalian kegiatan masyarakat melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan secara bertahap, dan PPKM terbaru ditentukan dalam periode 3 Agustus – 9 Agustus 2021. Tentu saja hal ini berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia memprediksi tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 akan berada pada kisaran 7,15-7,35 persen atau 9,9 juta-10,27 juta orang. Angka tersebut diprediksi lebih tinggi daripada TPT Agustus tahun 2020 yaitu sebesar 7,07% (9,76 juta orang) dan TPT Februari 2021, yaitu 6,26 persen (8,75 juta orang) (Kompas, Rabu, 28 Juli 2021). Hal ini juga berdampak pada melambatnya laju pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam laporan *World Economic Outlook* Edisi Juli 2021, IMF merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 dari 4,3 persen menjadi 3,9 persen secara tahunan (Kompas, Kamis, 29 Juli 2021).

Untuk mengatasi dampak negatif dari pandemic Covid-19, berbagai strategi terus dilakukan pemerintah dengan fokus terus melakukan pengendalian pandemi, melindungi kesejahteraan masyarakat, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta terus meningkatkan daya saing.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sisi permintaan antara lain dengan memberikan subsidi upah dan memberikan bantuan langsung tunai. Sedangkan untuk meningkatkan sisi penawaran, antara lain pemerintah memberikan berbagai kebijakan relaksasi, diantaranya berupa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit dari OJK.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut, maka dalam implementasinya, dunia usaha perlu melakukan berbagai penyesuaian terhadap perkembangan kondisi yang terjadi sehingga kegiatan usaha masih tetap dapat dilakukan. Salah satu yang terdampak besar dari kebijakan PPKM adalah UMKM dan usaha-usaha informal lainnya. Agar mereka masih tetap bisa bertahan dalam melakukan usahanya, maka sudah seharusnya mereka mau untuk melakukan berbagai penyesuaian, misalnya dalam hal perluasan jangkauan pasar, sekalipun dalam kondisi adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan literasi mengenai digital ekonomi, apalagi saat ini dunia berada pada era industri 4.0 yang mengarah pada industri 5.0.

Dalam era digital ekonomi, UMKM dan koperasi sebagai salah satu pelaku usaha mau tidak mau harus siap dan mengantisipasi perkembangan ini. Dalam konteks ini, kemitraan menjadi penting. Ketika bicara perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi para konsumen dan memengaruhi pola hidup masyarakat maka sangat relevan jika fokus yang dilakukan adalah untuk memantapkan kerja sama (*sharing* ekonomi) dan bukan lagi persaingan.

Ada tiga komponen utama yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan. Pertama, masing-masing pihak yang bermitra memiliki kesamaan visi dan misi, adanya *trust* (kepercayaan) dan adanya komitmen kuat dari masing-masing pihak yang bermitra (Nuryanto, 2018). Menurut Ngakan (2018), Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelaku UMKM dengan membangun *platform e-commerce*. Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital. Langkah prioritas nasional yang sedang diakselerasi adalah memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hampir 70 persen pelaku usaha Indonesia berada di sektor UMKM.

Kementerian Perdagangan dan Perindustrian melibatkan para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) nasional supaya ikut serta dalam program *e-Smart IKM*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan perluasan pasar bagi produk IKM lokal hingga mampu menembus pasar ekspor melalui pemanfaatan *platform digital*.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dapat memperpendek jalur distribusi sehingga lebih efisien sehingga dampak selanjutnya adalah bahwa produsen, distributor, pengecer dan konsumen memungkinkan dapat harga terbaik. Dengan berkembangnya era digital ekonomi melalui revolusi industri 4.0 telah mempertegas pentingnya peran teknologi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka perlu pemanfaatan secara optimal potensi ekonomi digital yang berkembang saat ini. Ide utama ekonomi digital adalah meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan teknologi. Sehingga fungsi GDP dirumuskan sebagai berikut (Ichwan, 2019):

$$GDPT = Z_t F(K_t, L_t)$$

Z = Technology, K = Kapital, L = Tenaga kerja

PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud dari paradigma pembangunan inklusif dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan secara berkeadilan melalui keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dengan tetap mengedepankan proses pembangunan yang ramah lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat maka perlu memperhatikan aspek-aspek penting, antara lain kualitas sumberdaya manusia, optimalisasi modal sosial dan modal finansial, kesiapan seluruh *stakeholders* untuk mendukung dan mendampingi berbagai program pember-

dayaan masyarakat dengan beragam kapabilitas yang dimiliki masyarakat, melalui berbagai penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika sosial ekonomi yang terjadi, seperti halnya dalam peningkatan literasi masyarakat UKM terhadap digitalisasi ekonomi dalam upaya memperluas pangsa pasar sehingga tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2013). Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu Komunitas. *Socius*, XII(1), 15 -21.
- Alisjahbana, A.A. dan Murniningtyas, E. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi. Bandung: UNPAD Press.
- Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Badriah, L.S., Rahajuni, D., Suprpto. (2013). Model Peningkatan Pendapatan Melalui Pengembangan kemampuan Kewirausahaan Barbasis masyarakat Miskin Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas, Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed, Purwoketo.
- Fetterman, D., & Wandersman, A. (2007). Empowerment Evaluation: Yesterday, Today, and Tomorrow. *American Journal of Evaluation* 2007;28; 179
- Fukuyama (1995). *Trust: The Sosial Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Ichwan, N (2019). *Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*, Materi Kuliah Umum, Purwokerto, 22 Maret 2019.
- Kompas, Kamis 29 Juli 2021. Laju Pemulihan Ekonomi Melambat
- Kompas, Rabu 28 Juli 2021. Pengangguran diprediksi bertambah
- Kuncoro (2010). *Ekonomi Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Lin, N, Cook, S. K., & Burt, R.S. (2001). *Sosial Capital: Theory and Research*. New York: Aldine de Gruyter.
- Ngakan, 2018. *Implementasi Industri 4.0 Sebagai Strategi Wujudkan Ekonomi Pancasila*. Siaran pers Kementerian Perindustrian RI.
<http://www.kemenperin.go.id/artikel/19287/Implementasi-Industri-4.0-Sebagai-Strategi-Wujudkan-Ekonomi-Pancasila>. Diakses 22 April 2019
- Nugroho, A. E. (2009). The Pro-Poor Policy of Microfinance in Indonesia, *Gajah Mada International Journal of Business*, Vol. 11. No. 3, September-December 2009. Pp317-340.

- Nuryanto, R (2018). Revolusi Industri 4.0, Era Ekonomi Berbagi, Workshop & Temu Bisnis Nasional UMKM bertema “Mewujudkan Sinergi Kemitraan UMKM Menuju Usaha Kecil Yang Tangguh dan Berdaya Saing di Era Revolusi Industri 4.0”, 31 Oktober 2018.
<https://ugm.ac.id/id/berita/17335-revolusi.industri.40.era.ekonomi.berbagi>. Diakses 20 April 2019
- Putnam, R.D. (1995). Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Sosial Capital in America. *Political Science and Politics*, Vol. 28, No. 4 (Dec., 1995), pp. 664- 683
- Rahajuni, D. & Badriah, L.S. (2011). Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Pada PNPM Mandiri Perkotaan). Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan, Purwokerto.
- Rahajuni, D., Suprpto; Badriah, L.S., Lestari, S., Rafinda, A. (2018). Welfare Beneficiary Level Mandiri National Program for Community Empowerment, Post Program. *International Journal of Economic Research*, Vol. 15, No.2 (2018): 239-245.
- Rokhman, N. (2008). Dampak Pemberdayaan UMKM Melalui Program Pendampingan (Studi Kasus Pendampingan di Sentra Aluminium Yogyakarta), *Telaah Bisnis*, Vol. 9. Nomor 2, Desember 2008. Hal. 145-165
- Sachs, I. (2004). Inclusive Development Strategy In An Era Of Globalization, *working paper* no. 35. Mei. Geneva: Policy Integration World Commission On The Sosial Dimension Of Globalization, International Labor Office
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Tambunan, T. (2016). *Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, M.P dan Smith, S. C. (2012). *Economic Development*. 11th Edition. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Usman, S. (2003). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PENAMBAHAN TULANG IKAN BANDENG (*CHANOS CHANOS*) DALAM PENGOLAHAN SEREAL

Widya Pangestika, David Indra Widiyanto, Farakh Fadila Windiarti

PENDAHULUAN

Ikan bandeng merupakan salah satu ikan budidaya yang digemari oleh masyarakat Indonesia sehingga, ikan bandeng sering dikembangkan sebagai bahan baku berbagai produk olahan ikan, seperti: otak-otak, siomay ikan, kaki naga, dan produk lainnya. Ikan bandeng dapat hidup di dua lingkungan, yaitu: di air tawar dan di air laut, sehingga ikan bandeng biasanya disebut dengan ikan air payau (Susanto, 2010).

Banyak industri pengolahan ikan bandeng yang berdiri di Indonesia. Pada industri pengolahan ini, beberapa bagian ikan dibuang dan menjadi limbah, diantaranya: kepala, kulit, sisik, jeroan dan tulang ikan. Pada CV. Fania Food, salah satu industri pengolahan ikan bandeng yang terletak di Yogyakarta, setiap pengolahan 1 kg ikan bandeng akan menghasilkan 540 gram daging ikan dan memperoleh limbah sebanyak 460 gram dengan jumlah limbah tulang ikan sebanyak 60 gram. Menurut Ramdany (2006), apabila limbah ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, limbah tulang ikan masih memiliki nilai gizi yang cukup besar (Bakhtiar, *et al.*, 2009), sehingga masih dapat dimanfaatkan apabila diolah kembali ke dalam bentuk makanan lainnya. Limbah tulang ikan bandeng memiliki kandungan kalsium terbanyak di antara bagian tubuh ikan yang lain (Imra, *et al.*, 2019). Sari (2013) juga berpendapat bahwa limbah yang terdapat pada tulang ikan mengandung kalsium, sehingga dapat diolah kembali untuk memberikan tambahan nilai gizi terhadap makanan yang diolah. Selain kalsium, limbah tulang ikan juga mengandung mineral fosfor dan senyawa karbonat (Trilaksani, *et al.*, 2006).

Dibutuhkan cara yang tepat dalam menangani masalah limbah ini tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu besar atau dapat menjadikan pemasukan tersendiri sehingga dapat menghindari terjadinya pencemaran lingkungan, selain itu limbah tulang ikan juga masih dapat diolah kembali menjadi bentuk makanan yang lain. Dalam penelitian ini, akan dikembangkan produk olahan, berupa sereal, yang ditambahkan dengan tepung tulang ikan.

Sereal merupakan makanan sarapan yang memiliki ciri-ciri berbentuk bulat, pipih dan tipis yang umumnya dikonsumsi dengan penambahan susu cair. Sereal biasanya dikonsumsi pada pagi hari sehingga sering disebut juga sereal sarapan. Sereal merupakan salah satu contoh alternatif sarapan yang mudah, cepat dan praktis. Pada awalnya sereal dibuat dari biji jagung utuh yang dikenal dengan nama *corn flakes*. *Corn flakes* terbuat dari tepung jagung yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak yang cukup tinggi (Hadi, *et al.*, 2017). Sereal yang beredar kalangan masyarakat biasanya berbahan dasar dari gandum sehingga nilai proteinnya dan kalsium yang masih rendah, untuk meningkatkan nilai protein dan kalsium dari produk sereal maka perlu ditambahkan suatu bahan yang mempunyai nilai protein dan kalsium yang tinggi adalah dengan menambahkan tepung ikan bandeng.

Pada penelitian ini akan dibahas terkait proses pengolahan sereal dengan penambahan tepung tulang ikan bandeng (*Chanos chanos*), rendemen tepung tulang ikan bandeng yang dihasilkan melalui teknik penepungan, dan hasil analisis proksimat pada sereal tulang ikan bandeng.

PEMBAHASAN

Tulang Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

Seiring dengan meningkatnya jumlah industri pengolahan hasil perikanan, maka jumlah limbah yang dihasilkan tentunya juga akan semakin meningkat. Limbah tersebut apabila dibiarkan dalam waktu singkat akan menghasilkan senyawa sederhana seperti H_2S , CO_2 , NH_3 , CH_4 , dan lain-lain, sehingga menghasilkan bau yang tidak enak dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Sebagian besar industri perikanan, hanya mengubur dan membuang hasil limbah perikanan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, perlu ada pengelolaan lebih lanjut agar limbah tulang ikan tidak menjadi sampah yang dapat mencemari lingkungan, limbah tulang ikan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai tepung tulang ikan untuk bahan pangan (Mulia, 2004).

Tulang ikan bandeng yang digunakan pada proses pengolahan sereal dalam artikel ini adalah tulang ikan bandeng yang dihasilkan sebagai limbah pada proses pengolahan produk di CV Fania Food, Yogyakarta. CV. Fania Food mengolah ikan bandeng dalam sebanyak 357 kg dalam satu bulan, dengan berat bersih daging ikan dalam 1 kg sebesar 54% dan limbah padat seperti sisik 5%, jeroan 10%, kulit 15%, kepala 10% dan tulang 6%. Biasanya, limbah kulit ikan, sisik, jeroan dan kepala diberikan kepada masyarakat sekitar untuk dijadikan sebagai pakan ikan atau pakan ternak, sedangkan limbah tulang ikan akan diolah kembali menjadi stik ikan, namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19, maka tidak ada pihak yang berminat untuk melakukan pengolahan limbah dari tulang ikan tersebut.

Tulang ikan yang telah dikeringkan kemudian digiling dan diayak, untuk menghasilkan tepung tulang ikan. Produk tepung tulang ikan mempunyai kandungan kalsium yang cukup tinggi, yaitu 113480 mg/kg (Imra, *et al.*, 2019). Hal ini berbeda dengan penelitian Darmawangsyah, *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa kandungan kalsium dalam tepung tulang ikan bandeng adalah 141600 mg/kg.

Kandungan proksimat serta beberapa mineral, yaitu: kalsium dan fosfor, di dalam tepung tulang ikan bandeng dapat dilihat pada Tabel 1 (Bakhtiar, *et al.*, 2019),

Tabel 1. Kandungan Gizi Tepung Tulang Ikan Bandeng

Komponen Gizi	Jumlah (%)
Kadar Air	3,2
Kadar Abu	18,85
Kadar Protein	38
Kadar Lemak	0,06
Kadar Kalsium	5,24
Kadar Fosfor	2,36

Sumber: Bakhtiar *et al.* (2019)

Rendemen Tepung Tulang Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

Nilai ekonomis dan efektivitas suatu proses produk atau bahan dapat diketahui melalui suatu parameter, yang disebut dengan rendemen (Amiarso, 2003). Menurut Cucikodana, *et al.* (2012), perhitungan rendemen dilakukan dengan cara membandingkan antara berat akhir dengan berat awal proses dalam bentuk persentase. Semakin besar rendemennya, maka akan semakin tinggi pula nilai ekonomis produk.

Pada penelitian ini, rendemen dari tepung tulang ikan bandeng adalah sebesar 36,5% dari 1 kg bahan baku tulang ikan bandeng kering. Nilai rendemen ini cukup tinggi apabila dibandingkan dengan nilai rendemen tepung tulang ikan bandeng yang dihasilkan dengan metode presto oleh Imra, *et al.* (2019), yaitu sebesar 34%. Nilai rendemen tersebut dipengaruhi pada proses pengolahan tulang ikan, seperti: perebusan dan pemrestoan akibat adanya sisa tulang yang terbuang.

Sereal

Sereal adalah produk pangan dengan menggunakan bahan baku serealiala seperti beras, jagung, gandum dan umbi-umbian, contohnya seperti kentang, ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain (Marsetio, 2006). Flakes merupakan salah satu bentuk sereal dalam bentuk serpihan (Rakhmawati, *et al.*, 2014). Dikalangan masyarakat sereal biasanya dikenal dengan sereal biji-bijian atau *corn flakes*.

Istilah sereal juga biasa dikenal dengan hidangan siap saji sebagai hidangan di berbagai negara. Akan tetapi produk sereal yang beredar di masyarakat masih menggunakan bahan baku gandum dan jagung.

Menurut Tribelhorn (1991), sereal sarapan secara umum pada saat ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

1. Sereal tradisional yang memerlukan pemasakan adalah sereal yang dijual di pasaran dalam bentuk bahan mentah yang telah diproses, biasanya dalam bentuk sereal yang dikonsumsi dalam keadaan panas.
2. Sereal panas instan tradisional yaitu sereal yang dijual dalam bentuk biji-bijian atau serbuk yang telah dimasak dan hanya memerlukan air mendidih dalam penyajiannya.
3. Sereal siap santap yaitu produk yang telah diolah dan direkayasa menurut jenis atau bentuk diantaranya *faked*, *puffed*, dan *shredded*.
4. *Ready-to-eat cereals mixer* yaitu produk sereal yang telah diolah bersama biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering.
5. Berbagai produk sereal sarapan yang tidak dikategorikan dalam keempat jenis produk tersebut karena proses khusus dan atau kegunaan akhirnya. Contohnya dari jenis ini sereal adalah makanan bayi.

Pada penelitian ini, jenis sereal yang akan dibuat adalah sereal siap santap. Menurut SNI 01-4270-1996, persyaratan mutu sereal apabila dilihat dari keadaan fisik dan nilai proksimatnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Syarat Mutu Sereal Menurut SNI 01-4270-1996

No	Kriteria Uji	Satuan	Spesifikasi
1.	Keadaan		
	1.1. Bau	-	Normal
	1.2. Rasa	-	Normal
	1.3. Warna	-	Normal
2.	Air	% b/b	Maks. 3
3.	Abu	% b/b	Maks. 4
4.	Protein	% b/b	Min. 5
5.	Lemak	% b/b	Min. 7
6.	Serat Kasar	% b/b	Maks. 0,7

Proses Pengolahan Sereal Tulang Ikan Bandeng

Pelaksanaan penelitian terdiri dari atas 3 tahap yaitu pembuatan tepung tulang ikan bandeng, pembuatan fish flakes, dan pembuatan sereal.

1. Pembuatan Tepung Tulang Ikan Bandeng

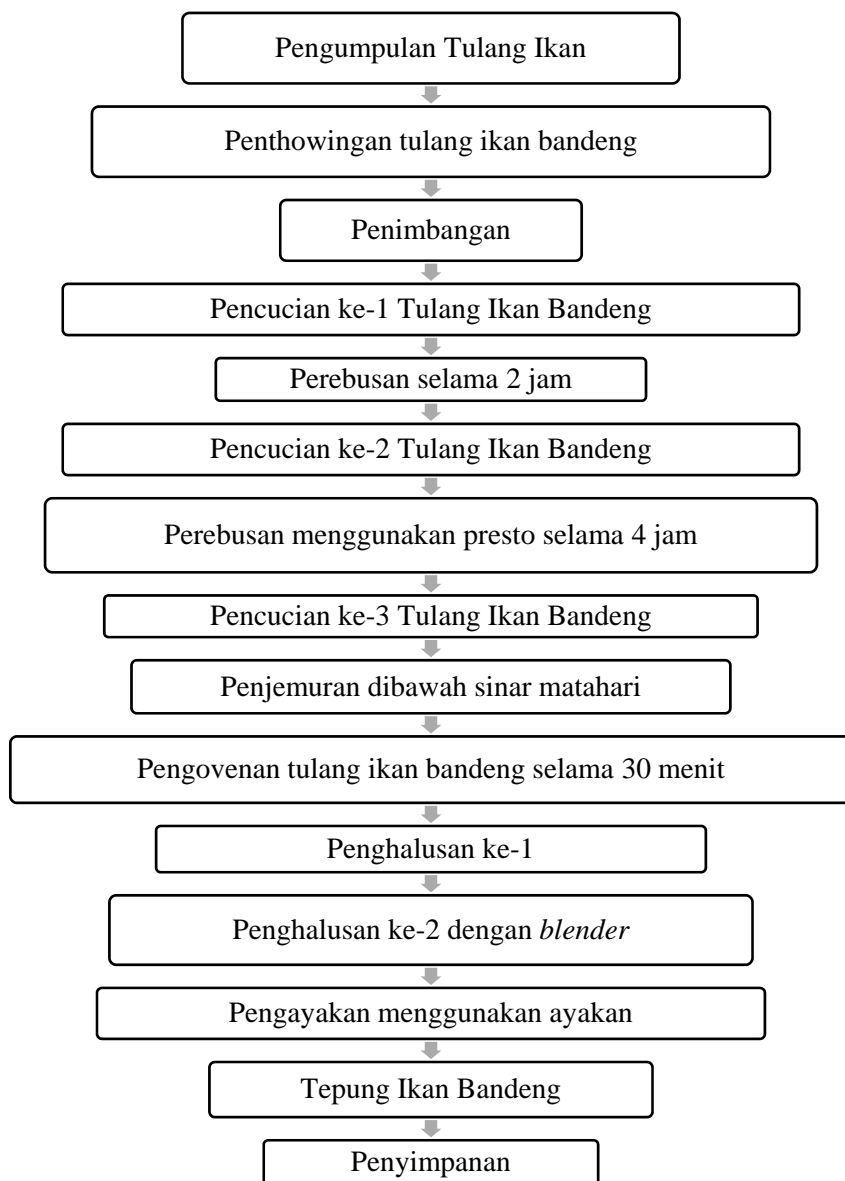
Tahapan pembuatan tepung tulang ikan bandeng diawali dengan menyiapkan bahan baku tulang ikan bandeng. Bahan baku yang digunakan adalah tulang ikan bandeng. Bahan baku tersebut didapatkan dari hasil limbah pengolahan di CV. Fania Food dalam keadaan bersih sudah dicuci dan kemudian disimpan di dalam *freezer*. Ikan bandeng diperoleh dari hasil budidaya di Kota Semarang yang dikirim dalam keadaan segar menggunakan drum yang berisi es batu.

Proses penambahan es batu pada ikan bandeng bertujuan agar menjaga kesegaran ikan bandeng selama perjalanan. Ikan langsung dicuci kembali menggunakan air mengalir lalu ikan dilakukan penyiangan dengan membuang isi perut ikan. Proses penyiangan ikan bandeng dilakukan secara manual dengan memasukan kedua jari ke dalam insang menuju ke dalam bagian perut dan menarik jeroan yang ada di dalam perut ikan. Pencucian kembali tubuh ikan yang sudah disiangi, Selanjutnya proses pemisahan daging ikan bandeng dengan tulang, kulit dan kepala dengan cara memijatkan tubuh ikan bandeng dari ujung ekor menuju ke kepala ikan kemudian ikan dibalik dengan cara mendorong ekor ikan bandeng ke dalam dan tarik tulang ikan agar terpisah dengan kulit, ekor serta kepala ikan.

Proses pemisahan daging ikan dengan tulang ikan bandeng dengan cara pengerokan menggunakan sendok makan yang telah dicuci. Proses selanjutnya pencucian tulang ikan bandeng menggunakan air mengalir dan disimpan ke dalam *freezer*. Proses *penhawing* tulang ikan bandeng selama 1 jam, selanjutnya proses penimbangan berat awal tulang ikan bandeng. Proses pencucian pertama dilakukan menggunakan air mengalir tujuannya menghilangkan kotoran yang menempel pada tulang ikan bandeng. Proses perebusan selama 2 jam menggunakan panci rebus yang tujuannya untuk merontokkan sisa daging yang masih menempel pada tulang ikan bandeng. Proses pencucian kedua dilakukan menggunakan air mengalir yang tujuannya untuk menghilangkan daging yang menempel pada tulang ikan bandeng.

Proses pemrestoan selama 4 jam menggunakan panci presto yang tujuannya untuk menggempukan dan menghilangkan lemak pada tulang ikan bandeng. Proses pencucian ketiga dilakukan menggunakan air mengalir tujuannya agar lemak yang menempel pada tulang hilang. Proses penjemuran selama 8 jam tujuannya agar kadar air pada tulang ikan bandeng hilang dan mempercepat proses pengeringan pada saat menggunakan oven. Proses Pengovenan selama 30 menit menggunakan oven kompor yang tujuannya untuk mengeringkan tulang ikan bandeng, Selanjutnya proses penghalusan yang pertama dilakukan menggunakan lumbang batu kemudian dihaluskan menggunakan *blender* hingga halus. Proses pengayakan tepung tulang ikan bandeng tujuannya agar menghasilkan tepung yang tidak kasar. Tepung yang

telah dihaluskan disimpan ke dalam toples sementara yang tujuannya untuk menghindari tepung dari serangga atau benda lainnya.



Gambar 1. Alur proses pembuatan tepung tulang ikan menurut Darmawangsyah et al., (2016) yang telah dimodifikasi peneliti

2. Pembuatan *Fish Flakes*

Pengayakan semua tepung yang digunakan dalam pembuatan *fish flakes* seperti tepung sorgum, tepung maizena, tepung beras, tepung ikan dan gula

halus. Bahan-bahan yang diayak tujuannya agar menghasilkan bahan yang halus dan tidak kasar.

Pencampuran semua bahan pembuatan *fish flakes* dengan menambahkan bahan sedikit demi sedikit dan diaduk hingga merata dan tidak menggengerjel. Adonan yang sudah rata diaduk kemudian dicetak.

Pencetakan dilakukan tujuannya untuk menghasilkan bentuk adonan yang diinginkan. Pencetakan dilakukan dengan menuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah dilapisi dengan mentega kemudian dipipihkan menggunakan spatula dan kuas plastik agar mendapatkan adonan yang tipis.

Pemanggangan menggunakan *oven* kompor yang tujuannya untuk mengeringkan dan mematangkan *fish flakes* selama 10 menit dengan besar kompor api sedang. Adonan yang telah dicetak di dalam loyang selanjutnya dimasukkan ke dalam *oven* dan setelah *matang fish flakes* dipindahkan ke dalam wadah lain untuk didinginkan serta dilakukan pengecilan ukuran menggunakan spatula plastik.

Formulasi pembuatan *fish flakes* yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

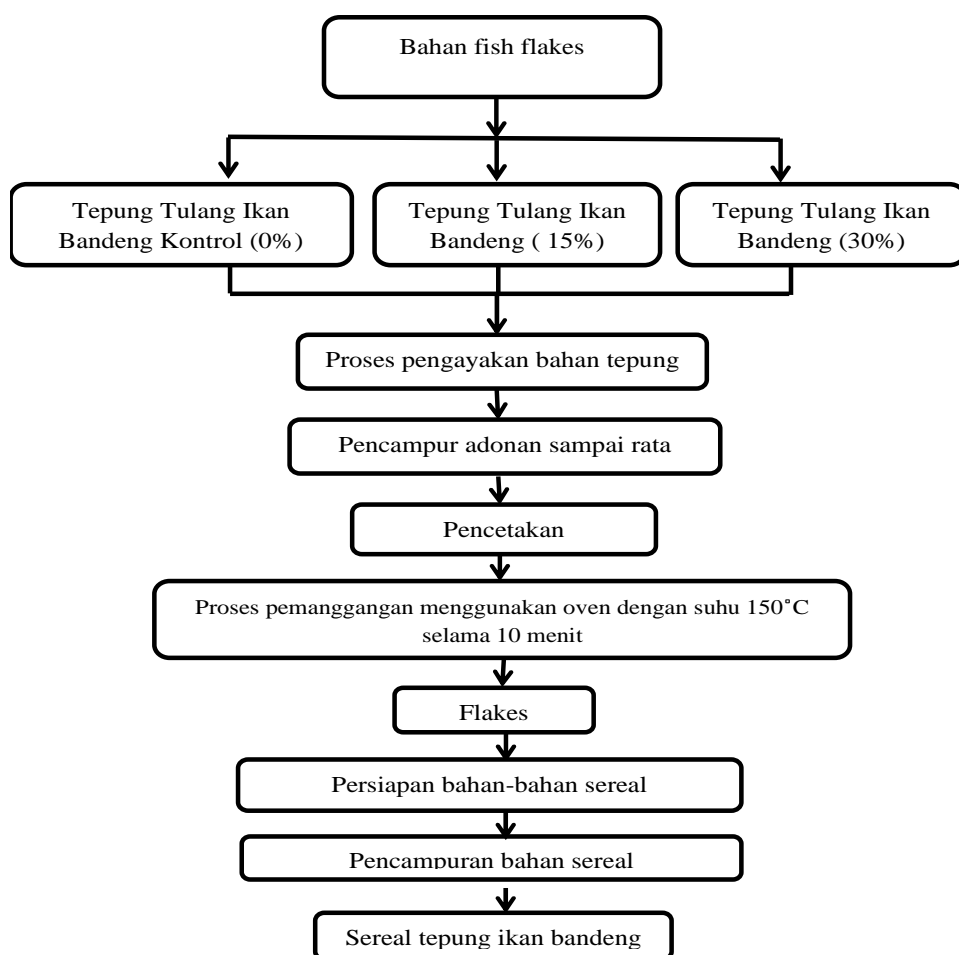
Tabel 3. Penambahan Tepung Tulang Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) dalam Pengolahan Sereal

No	Bahan	Formulasi Pembuatan <i>Fish Flakes</i>		
		Kontrol	15%	30%
1.	Tepung Sorgum	125 gr	125 gr	125 gr
2.	Tepung Beras	60 gr	60 gr	60 gr
3.	Tepung Maizena	45 gr	45 gr	45 gr
4.	Gula Halus	17 gr	17 gr	17 gr
5.	Garam	3 gr	3 gr	3 gr
6.	Air	250 mL	250 mL	250 mL
7.	Tepung Tulang Ikan	-	75 gr	150 gr

Sumber: BBP2HP (2015)

3. Pembuatan Sereal

Pencampuran semua bahan pembuat sereal seperti krimer nabati, susu bubuk, gula halus, dan garam sampai rata kemudian masukan *fish flakes* lalu diaduk sampai rata menggunakan spatula plastik. Alur proses pembuatan sereal dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Proses Pembuatan Sereal menurut Iriawan (2012) yang telah dimodifikasi oleh peneliti

Hasil Uji Proksimat

Kandungan zat yang ada dalam makanan atau suatu bahan pangan dapat diidentifikasi menggunakan metode analisis proksimat. Sebagian besar unsur pokok dalam bahan pangan terdiri dari beberapa kategori, yaitu: air, abu, lemak, dan protein. Unsur tersebut dibutuhkan dalam fungsi pertumbuhan, perkembangan, produksi, reproduksi, serta kehidupan pokok manusia. Analisis proksimat bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan yang ada di dalam makanan atau suatu bahan pangan yang belum diketahui sebelumnya. Selain itu, analisis proksimat juga merupakan dasar dari analisis lanjutan lainnya (Arista, 2011).

Kandungan gizi pada sereal diuji dengan melakukan analisis proksimat yaitu kadar air, kadar abu, kadar protein, dan kadar lemak. Penambahan

tepung tulang ikan bandeng pada sereal memberikan pengaruh ke dalam kandungan sereal yang dihasilkan. Hasil analisis proksimat penambahan tepung tulang ikan bandeng (*Chanos chanos*) dalam pengolahan sereal dapat dilihat pada Tabel 4.

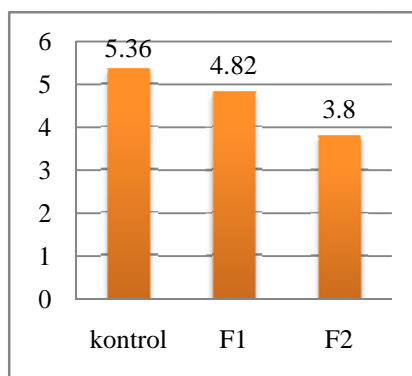
Tabel 4. Hasil Analisis Proksimat Sereal

Parameter	Perlakuan				Syarat SNI
	Satuan	Kontrol	F1	F2	
Kadar air	%	5,36	4,82	3,8	Maks. 3%
Kadar abu	%	2,1	7,48	9,63	Maks. 4%
Kadar protein	%	8,11	11,59	14,25	Min. 5%
Kadar lemak	%	10,46	9,67	11,98	Min. 7%
Serat Kasar	%	3,59	6,11	5,58	Maks. 0,7%

Dari tabel tersebut bahwa pada penilaian analisis proksimat sereal yang telah memenuhi syarat SNI akan tetapi pada uji kadar air pada perlakuan kontrol, perlakuan F1 (15%) serta kadar abu perlakuan F1 (15%) dan F2 (30%) dan pada serat kasar tidak memenuhi syarat mutu sereal pada SNI 01-4270-1996.

Kadar Air

Tren pada Gambar 3 menunjukkan adanya penurunan kadar air seiring dengan bertambahnya jumlah tepung ikan yang dimasukkan ke dalam sereal. Nilai kadar air pada semua perlakuan belum memenuhi syarat mutu sereal SNI-4270-1996, yaitu maksimum 3%. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan suhu pemanggangan yang menyebabkan perbedaan terhadap kedua nilai kadar air pada sereal yang berbeda. Kadar air yang dihasilkan akan semakin rendah apabila semakin tinggi suhu pemanggangan yang digunakan. Menurut Winarno (2004), suhu pemanasan dapat menyebabkan kadar air dalam makanan berkurang.

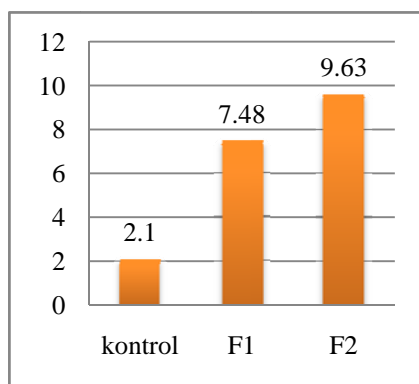


Gambar 3. Kadar Air pada Sereal

Kadar Abu

Kadar abu menunjukkan banyaknya kandungan mineral di dalam suatu produk makanan. Hasil analisis kadar abu pada sereal dengan setiap perlakuan penambahan tepung tulang ikan bandeng didapatkan nilai 2,10% – 9,53% (dapat dilihat pada Gambar 4). Menurut SNI 01-4270-1996, kadar abu F1 dan F2 belum memenuhi standar syarat mutu sereal, namun untuk perlakuan kontrol sudah memenuhi standar syarat mutu yang ada, yaitu maksimal 4%.

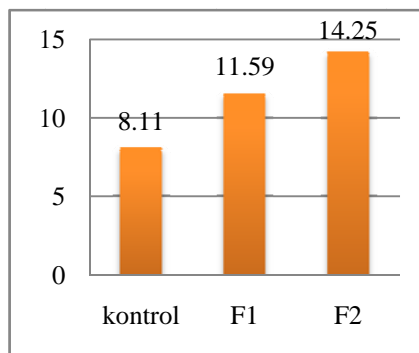
Kadar abu sereal mengalami peningkatan pada setiap perlakuannya. Semakin banyak penambahan tepung tulang ikan bandeng pada sereal maka kadar abu semakin tinggi. Hal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian Darmawangsyah, *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa, sereal yang ditambahkan dengan tepung tulang ikan bandeng menunjukkan peningkatan kadar abu. Peningkatan kadar abu ini mungkin disebabkan kandungan mineral yang dimiliki oleh tepung tulang ikan yang tinggi, seperti: kalsium, dan mineral yang lain (Artama, 2003). Apabila jumlah tepung tulang ikan yang dimasukkan ke dalam sereal semakin banyak, maka jumlah mineral di dalam sereal juga akan semakin bertambah.



Gambar 4. Kadar Abu pada Sereal

Kadar Protein

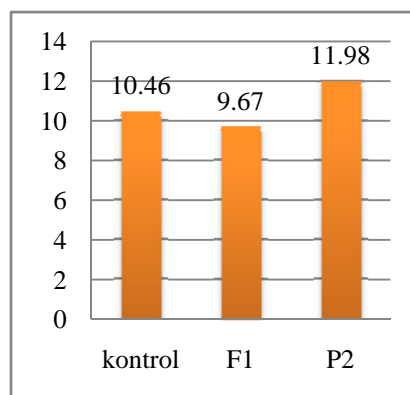
Berdasarkan analisis kadar protein yang diperoleh seluruh perlakuan telah memenuhi standar protein yang ditetapkan oleh syarat mutu sereal SNI-4270-1996 yaitu kadar protein minimal 5%. Dari Gambar 5 dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi tepung tulang ikan bandeng, maka kadar protein sereal semakin meningkat. Peningkatan nilai kadar protein memiliki persamaan dengan Mulia (2004), bahwa kandungan protein tepung tulang ikan tinggi mencapai 34,2%. Kandungan protein tepung tulang ikan yang tinggi ini akan semakin meningkatkan kandungan protein dalam sereal.



Gambar 5. Kadar Protein pada Sereal

Kadar Lemak

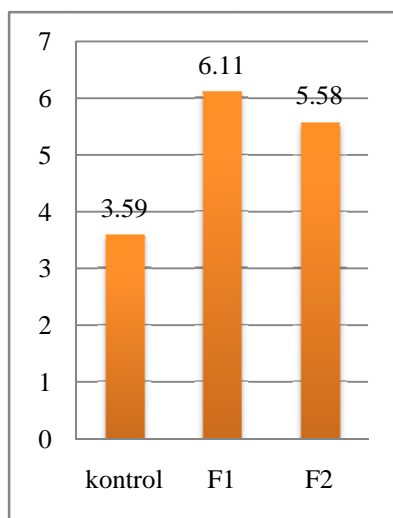
Kandungan lemak pada setiap perlakuan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh SNI 01-4270-1996, yaitu minimal sebesar 7%. Kandungan lemak pada setiap perlakuan sereal dapat terlihat pada Gambar 6, di mana kandungan lemak untuk perlakuan kontrol yaitu 10,46%, perlakuan F1 (15%) yaitu 9,67% dan perlakuan F2 (30%) sebesar 11,98%.



Gambar 6. Kadar Lemak pada Sereal

Serat Kasar

Hasil analisis kadar serat kasar menunjukkan nilai yang berbeda-beda hal ini diduga bahwa adanya perlakuan yang berbeda pada tiap sereal yang menghasilkan nilai yang berbeda. Dari Gambar 7 diketahui bahwa, seluruh perlakuan tidak memenuhi standar serat kasar yang ditetapkan oleh syarat mutu sereal SNI-4270-1996 yaitu kadar serat kasar maksimal 0,7%.



Gambar 7. Kandungan Serat Kasar pada Sereal

PENUTUP

Proses pengolahan sereal dilakukan dengan penambahan tepung tulang ikan bandeng. Pembuatan tepung tulang ikan bandeng dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: pengumpulan tulang ikan bandeng, penthawingan, pencucian ke-1, perebusan, pencucian ke-2, pemprestoan, pencucian ke-3, penjemuran di bawah sinar matahari, pengovenan, penghalusan ke-1 menggunakan lumping, penghalusan ke-2 menggunakan *blender*, pengayakan, penyimpanan sementara dan alur proses kedua pembuatan sereal tulang ikan bandeng diawali dengan pengayakan semua tepung, penimbangan, pencampuran bahan *flakes*, pencetakan, pengovenan, pengecilan ukuran, penyimpanan sementara. Setelah *flakes* jadi dilakukan pencampuran bahan sereal dengan ditambahkan *flakes* dan dikemas.

Berdasarkan uji proksimat pada sereal ini diperoleh nilai kadar air, kadar abu dan kadar serat kasar pada sereal belum memenuhi standar SNI 01-4270-1996 sedangkan kadar protein, dan kadar lemak pada sereal sudah memenuhi standar syarat mutu sereal yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiarso. (2003). *Pengaruh Penambahan Daging Ikan Kambing-Kambing (Abalistes steilatus) terhadap Mutu Kerupuk Gemblong Khas Kuningan Jawa Barat* [Skripsi]. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB.
- Arista, D. (2011). *Pengaruh Tekanan dan Waktu Terhadap Kualitas Bandeng Presto dengan Menggunakan LTHPC (Low Temperature High Pressure Cooker)* [Skripsi]. Semarang: Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang.

- Artama, T. (2003). Pembuatan crackers dengan penambahan tepung ikan lemuru (*Sardinella longiceps*). *Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi*, 4(1), 13-23.
- Badan Standar Nasional Indonesia. (1996). SNI 01-4270-1996. *Syarat Mutu Sereal*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Bakhtiar, Rohaya, S., & Ayunda, H. M. (2019). Penambahan Tepung Tulang Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) sebagai Sumber Kalsium dan Fosfor pada Pembuatan Donat Panggang. *Jurnal Teknologi dan Industri Pertanian Indonesia*, 11 (1), 38-45, DOI: <https://doi.org/10.17969/jtipi.v11i1.13439>
- Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan. (2015). *Uji Terapan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Fortifikasi Hidrolisat Protein Ikan (HPI) Tambahan Untuk Produk Sereal*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Cucikodana, Y., Supriadi, A., & Purwanto, B. (2012). Pengaruh Perbedaan Suhu Perebusan dan Konsentrasi NaOH terhadap Kualitas Bubuk Tulang Ikan Gabus (*Channa striata*). *Fishtech*, 1 (1), 91-101.
- Darmawangsyah, Jamaluddin, P., & Kadirman. (2016). Fortifikasi Tepung Tulang Ikan Bandeng (*Chanos-Chanos*) dalam Pembuatan Kue Kering. *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, 2 (2). Hal: 149-156, DOI: <https://doi.org/10.26858/jptp.v2i2.5170>
- Hadi, N., Yusmarini, & Efendi, R. (2017). Pemanfaatan Tepung Biji Nangka dan Tepung Jagung dalam Pembuatan Flakes. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau*, 4 (2), 1-12.
- Imra, Akhmadi, M. F., Abdiani, I. M., & Irawati, H. (2019). Karakteristik Tepung Tulang Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) dari Limbah Industri Baduri Kota Tarakan. *Jurnal Techno-Fish*, 3 (2), 60-69.
- Iriawan. (2012). *Pembuatan Fish Flakes Dari Ikan Lele (Clarias sp) Sebagai Makanan Siap Saji* [Skripsi]. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB.
- Marsetio, M., Herudiyanto, & Herlina, S. (2006). *Pengaruh Jumlah Air dan Lama Pengukusan Terhadap Beberapa Karakteristik Flakes Ubi Kayu, Di dalam: Prosiding Rekayasa dan Teknologi Pengolahan: Yogyakarta 2-3 Agustus 2006*, Yogyakarta: Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, hal 301-309.
- Mulia. (2004). *Kajian Potensi Limbah Tulang Ikan Patin (Pangsius sp.) sebagai Alternatif Sumber Kalsium dalam Produk Mi Kering* [Skripsi]. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, IPB.
- Rakhmawati, N., Amanto, B. S., & Praseptiangga, D. (2014). Formulasi dan Evaluasi Sifat Sensoris dan Fisikokimia Produk Flakes Komposit Berbahan Dasar Tepung Tapioka, Tepung Kacang Merah (*Phaseolus*

- vulgaris* L) dan Tepung Konjak (*Amorphophallus oncophillus*). *Jurnal Teknosains Pangan*, 3 (1), 2302-0733.
- Ramdany, G., Kusumaningrum, I., & Pamungkas, B. F. (2014). Karakteristik Kimiawi Kerupuk Tulang Ikan Belida (*Chitala sp*). *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis*, 19 (2), 68-74.
- Sari, E. N. (2013). *Pembuatan Krupuk Ikan Bandeng dengan Substitusi Duri Ikan Bandeng*. [Skripsi]. Semarang: Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang.
- Tribelhorn, R. E. (1991). *Breakfast Cereals, Handbook of Cereal Science and Tecnology*. Edited by: Lorenz, K. J. & Kulp, K. New York: Marcel Dekker, Inc.
- Trilaksani, W., Salamah, E. & Muhammad. (2006). Pemanfaatan Limbah Ikan Tuna (*Thunnus sp.*) sebagai Sumber Kalsium dengan Metode Hidrolisis Protein. *Buletin Teknologi Hasil Perikanan*, 9 (2), 34-45.
- Winarno, F. G. (2004). *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) BORDIR DI KABUPATEN KUDUS

Saifudin Zuhri

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami transformasi struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju industri dimulai tahun 1970-an. Transformasi menuju industrialisasi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan Usaha Besar (UB), tetapi juga Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jika dilihat, pertumbuhan UB lebih cepat dibanding UKM yang relatif tersendat-sendat. Di sisi lain, keberadaan UKM ini mampu menyerap mayoritas tenaga kerja dalam perusahaan dan menopang pendapatan rumah tangga (Kuncoro, 2007). Eksistensi UKM perlu dijaga karena kontribusi terhadap perekonomian sangat penting bagi Indonesia. Bukti pentingnya UKM ini disebutkan oleh Tambunan (2001) yang menyatakan UKM lebih berperan dalam pengurangan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan dibandingkan berkontribusi dalam ekspor maupun investasi di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan temuan Purwaningsih dan Kusuma (2015) dan Sukmawati dan Sumertajaya (2015) yang menyatakan bahwa UKM di Indonesia merupakan sektor yang mampu mempercepat distribusi pertumbuhan ekonomi dilihat dari penyerapan tenaga kerja, jumlah unit usaha, peningkatan pendapatan dan berkontribusi pada peningkatan ekspor serta memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dipta (2009) menyatakan UKM selain mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usaha, juga memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Keberadaan UKM dalam perekonomian nasional juga banyak berperan sebagai pendistribusi barang dan jasa ke seluruh penjuru nusantara. Selain itu, berbagai pengalaman terjadinya krisis ekonomi di Indonesia seperti krisis moneter yang berdampak krisis multidimensi, UKM mampu menjadi katup pengaman perekonomian. Banyak UKM yang mampu bertahan dalam situasi krisis dan bahkan mampu menggerakkan ekonomi di Indonesia pasca terjadinya krisis. Oleh karena itu, sudah seharusnya UKM harus mendapatkan prioritas pengembangan agar semakin memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Pemberdayaan merupakan upaya yang potensial dan strategis untuk meningkatkan peran ekonomi, sosial dan transformasi budaya dalam sebuah entitas. Tingkat keberdayaan (*power*) masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan usaha mereka ke arah yang mandiri dapat dilihat dari aspek kekuatan ekonomi seperti akses teknologi, informasi pasar dan fasilitas usaha; pengambilan keputusan dalam produksi, distribusi dan pemasaran hasil usaha. Aspek non ekonomi (akses politik dan sosial budaya) direpresentasikan responden dalam kemampuannya melakukan lobi dan mempresentasikan diri dan/atau kelompoknya (Susilowati, *et al.*, 2004).

Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang menempatkan sektor industri sebagai *leading sector* untuk menggerakkan ekonomi di daerahnya. Walaupun ketika ditinjau dari segi luas wilayah, Kabupaten Kudus ini tidak memiliki wilayah yang luas, tetapi peran sektor industri di Kudus ini menempati 3 besar industri di Jawa Tengah. Berdasarkan catatan Statistik Daerah Kabupaten Kudus, tahun 2018 kontribusi sektor industri Kabupaten Kudus terhadap PDRBnya mencapai 78,76%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor industri memiliki peran penting dan strategis dalam menopang perekonomian di Kabupaten Kudus.

Kerajinan bordir merupakan komoditas unggulan UKM Kabupaten Kudus. kontribusi terhadap jumlah unit usaha sebanyak 1.381 unit usaha dengan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 15.232 orang. Kerajinan bordir di Kudus berkembang pesat dan menjadi industri rumah tangga. Semula bordir di Kudus dikerjakan secara tradisional atau dikerjakan dengan mengandalkan keterampilan tangan, tetapi seiring dengan perjalanan waktu kerajinan bordir kudus mulai mengadopsi teknologi mesin. Gema Industri Kecil (2007) menyatakan tumbuh dan berkembangnya bordir tidak terlepas dari peran sentra bordir yang terdapat di daerah seluruh Indonesia terutama Tasikmalaya, Sidoarjo, Kudus, Yogyakarta, Bukittinggi, Lampung, Palembang, Gorontalo, Jakarta dan Aceh.

Menurut hasil *Focus Group Discussion* (FGD) terdapat kendala yang dihadapi oleh pengusaha kecil bordir Kabupaten Kudus yaitu bahan baku, modal dan pemasaran. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2012) yang menyatakan permasalahan yang dihadapi industri bordir terkait dengan tenaga kerja dan bahan baku serta hambatan berupa pemasaran dan teknologi. Bahan baku sangat penting bagi keberlangsungan usaha bordir, bahan baku bordir diperoleh pelaku usaha dengan harga relatif mahal. Kondisi ini diindikasikan bahan baku didatangkan dari Bandung, sedangkan kemampuan mereka tidak mampu untuk membeli langsung ke Bandung. Sehingga mereka membeli bahan baku di Kudus yang berarti ada tambahan rantai distribusi sehingga menambah biaya yang menyebabkan bahan baku menjadi mahal

Kendala yang dihadapi pengusaha bordir di Kabupaten Kudus sebenarnya hampir sama dengan mayoritas kendala yang dihadapi oleh pelaku UKM yang lain. Kendala yang paling fundamental adalah persoalan modal dan pemasaran. Anggraeni, *et al.* (2013) menyatakan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh UKM adalah SDM yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, permodalan, sarana prasarana, dan pemasaran. Kendala pemasaran yang dialami para pengusaha bordir adalah level daya tawar lebih rendah terhadap calon pembeli yang dalam hal ini adalah pedagang pasar yang menjadi tujuan pemasaran, sehingga mereka cenderung menjadi *price taker* (tidak punya keleluasaan) dalam menetapkan harga jual produk bordirnya. Dari segi kendala permodalan, pelaku usaha UKM bordir tidak bisa menghimpun modal secara cepat, karena pengeluaran untuk biaya dilakukan secara tunai, baik untuk pembelian bahan baku maupun pembayaran tenaga kerja. Sementara itu, hasil penjualan produk bordir baru dibayarkan oleh pelanggan setelah satu bulan dari produksi. Dari penggunaan teknologi, mereka menggunakan mesin Industri kerajinan bordir umumnya menggunakan mesin tua yang dioperasikan secara manual sehingga kurang produktif, sehingga mereka sulit bersaing dengan perusahaan yang menggunakan mesin bordir komputer. Dalam hal manajemen, mereka masih menggunakan manajemen yang sederhana, belum ada pembukuan terpisah antara keuangan perusahaan dan keuangan pribadi (Kantor Bank Indonesia Semarang, 2009).

Keberadaan pengusaha bordir relatif kurang berdaya (*powerless*) untuk memperoleh akses dalam aspek kekuatan ekonomi dan non ekonomi. Hasil pra survei yang dilakukan peneliti tentang permodalan dan bantuan peralatan. Dari 10 responden yang disurvei menunjukkan bahwa 60% dari pengusaha bordir yang disurvei menyatakan bahwa permodalan mereka berasal dari pribadi, kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap permodalan ke pihak lain masih rendah. Sedangkan survei tentang bantuan peralatan yang pernah mereka peroleh, semua responden belum ada yang pernah mendapatkan bantuan peralatan, hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberdayaan mereka masih lemah.

Pemberdayaan menurut Susilowati dan Kirana (2008) adalah suatu usaha yang dilakukan dalam keadaan penuh kesadaran, disengaja, direncanakan dan memiliki kesinambungan melaksanakan perubahan dengan kejelasan target dari tingkat keberdayaan lemah menjadi keberdayaan kuat, tidak mampu (*powerless*) menjadi mampu (*power*), dari kondisi tidak punya *skill* menjadi punya *skill*, dari semula dibantu jadi membantu. Oleh karena itu, pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya untuk membuat sebuah entitas mempunyai kemandirian dalam melakukan sesuatu.

Berdasarkan uraian tersebut dijelaskan bahwa terdapat permasalahan dalam industri kecil bordir yaitu bagaimana merumuskan strategi pember-

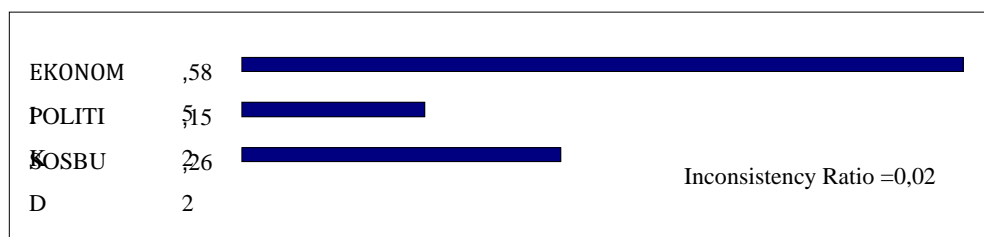
dayaan UKM bordir di Kabupaten Kudus sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pengusaha industri kecil bordir.

PEMBAHASAN

Strategi pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah pada bordir di Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan dengan menggunakan *Analysis of Hierarchy Process* (AHP). AHP digunakan untuk menentukan prioritas pengembangan usaha kecil bordir sesuai studi empirik strategi pemberdayaan. Hasil pra survei dan diskusi mendalam dengan *keypersons* berkompeten, diperoleh rumusan kriteria yaitu:

1. Peningkatan tingkat keberdayaan dilihat dari aspek ekonomi.
2. Peningkatan tingkat keberdayaan dilihat dari aspek Politik.
3. Peningkatan tingkat keberdayaan dilihat dari aspek Sosial dan Budaya

Selanjutnya, setelah diverifikasi menggunakan AHP maka hasilnya relatif sinkron. Hasil AHP menunjukkan bahwa aspek ekonomi menjadi prioritas dalam pemberdayaan industri kecil yaitu dengan bobot 0,585, diikuti aspek sosial budaya dengan 0,262 dan aspek politik dengan bobot 0,152. Nilai *inconsistency ratio* adalah 0,02 artinya hasil analisis dapat diterima karena tidak melebihi 0,1.



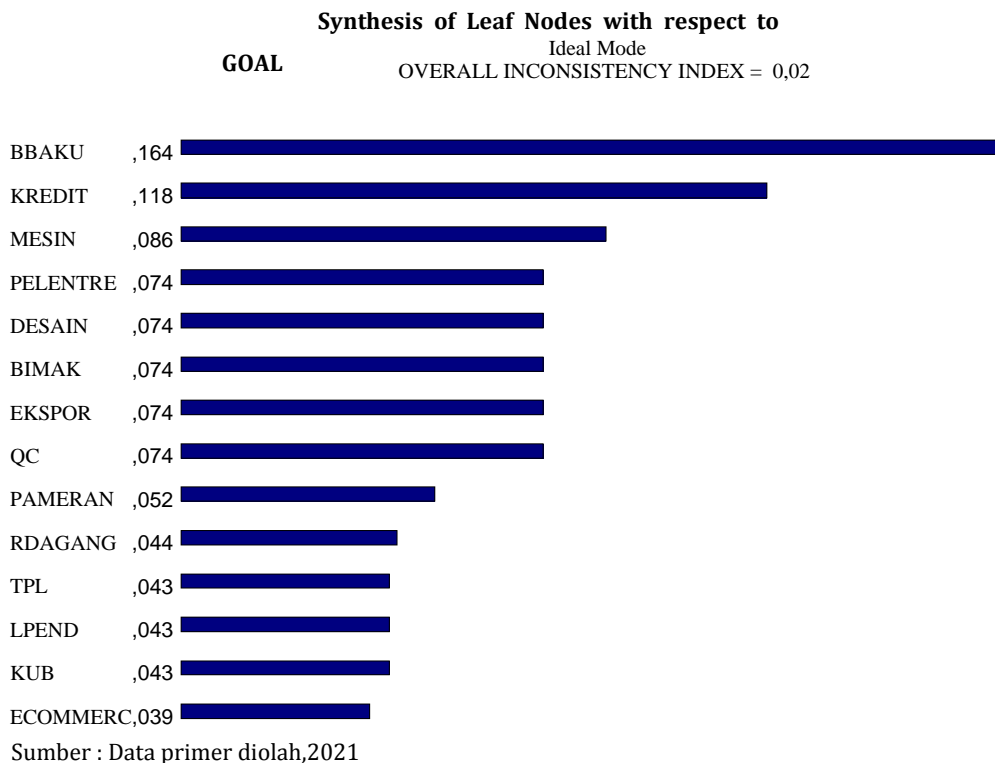
Keterangan: EKONOMI = Ekonomi
 POLITIK = Politik
 SOSBUD = Sosial dan Budaya

Sumber: Data primer diolah, 2021

Gambar 1. Kriteria Pengembangan UKM Bordir di Kabupaten Kudus

Aspek kriteria pengembangan industri kecil ini tidak jauh beda dengan yang dikembangkan Susilowati, *et al.* (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan model pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten/Kota Pekalongan. Hasilnya menyatakan pengolahan ikan (skala usaha mikro/kecil di Kabupaten Pekalongan dan skala menengah di Kota Pekalongan) kebanyakan usaha mereka kurang berdaya (*powerless*) dalam memperoleh akses/ kemudahan atas kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya.

Hasil analisis secara keseluruhan (*overall*) skala prioritas kriteria dan alternatif pengelolaan usaha kecil bordir dengan AHP dapat dilihat seperti berikut ini.



Gambar 2. Alternatif Pengembangan Usaha Bordir Kabupaten Kudus

Ket: BBAKU	=Mempermudah pengadaan bahan baku (E1)
KREDIT	=Pemberian kredit lunak (E2)
RDAGANG	=Pembuatan rumah dagang (E3)
MESIN	=Bantuan mesin bordir (E4)
PAMERAN	=Fasilitasi pameran produk bordir (E5)
ECOMMERC	=Fasilitasi <i>e commerce</i> (E6)
TPL	=Menyediakan tenaga penyuluh lapangan (TPL) untuk bordir (P1)
LPEND	=Membuka lembaga pendidikan bordir (P2)
KUB	=Pembentukan atau pengaktifan kembali Kelompok Usaha Bersama (P3)
PELENTRE	=Pelatihan kewirausahaan (SB1)
DESAIN	= <i>Workshop</i> inovasi desain (SB2)
BIMAK	=Bimbingan manajemen dan administrasi keuangan (SB3)
EKSPOR	=Pelatihan ekspor (SB4)
QC	=Pelatihan <i>Total Quality Control</i> (SB5)

Tiga prioritas dalam pengembangan usaha kecil bordir untuk penyusunan strategi pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mempermudah pengadaan bahan baku (0,164)
- b. Pemberian kredit lunak (0,118)
- c. Bantuan mesin bordir (0,086)
- d. Nilai *Overall inconsistency ratio* adalah 0,02 berarti cukup konsisten, yang berarti hasil ini bisa diterima dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan model pemberdayaan.

Ketersediaan bahan baku merupakan hal penting dalam kelancaran proses produksi, oleh karena itu butuh peranan semua *stakeholders* untuk menjamin ketersediaan bahan baku, kemudahan dalam mengakses dan menjaga stabilitas harga bahan baku. Pemberian kredit lunak dengan prosedur yang tidak rumit akan membantu segi pembiayaan usaha bordir, mengingat dalam usaha bordir harus memiliki modal dua kali lebih besar karena sistem pembayaran yang diterima pengusaha tidak tunai, sedangkan untuk membayar biaya produksi harus tunai. Bantuan mesin bordir yang lebih modern bisa membantu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi.

Pemberdayaan Usaha Bordir Skala Kecil

Efisiensi dan tingkat keberdayaan (akses usaha, informasi pasar, akses teknologi, akses lobi, peran *stakeholders*) masih rendah. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan keberdayaan industri kecil bordir sehingga bisa mampu mandiri dan usahanya bisa lebih bersaing. Strategi pemberdayaan usaha kecil bordir menuntut partisipasi dari seluruh *stakeholders* yang meliputi pengusaha/pengrajin sendiri, pemerintah, swasta, akademisi, LSM, lembaga keuangan dan masyarakat. Hasil dari rekonstruksi, temuan-temuan dan fenomena di lapangan dijadikan dasar perumusan strategi pemberdayaan usaha kecil bordir di Kabupaten Kudus.

Dari hasil FGD diperoleh tiga kriteria untuk meningkatkan keberdayaan pengusaha bordir yaitu dengan menggunakan tiga aspek yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal ini sesuai dengan penelitian Widayati (2008) yang merumuskan strategi pemberdayaan pengelola tempat pelelangan ikan di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah dengan menggunakan aspek ekonomi dan non ekonomi.

Strategi Pemberdayaan Usaha Bordir Skala Kecil Berdasarkan Aspek Ekonomi

Pemberdayaan usaha bordir dapat dilakukan berdasarkan aspek ekonomi. Berdasarkan analisis efisiensi produksi diketahui bahwa penggunaan

faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, bahan baku, bahan penolong, listrik, mesin, dan peralatan tidak efisien (Zuhri & Zamzami, 2018). Hasil penelitian tentang tingkat keberdayaan dilihat dari aspek ekonomi yang meliputi akses usaha (kredit/modal), akses pasar (pemasaran), dan akses teknologi menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan industri kecil bordir rendah. Menindak lanjuti masalah tersebut, maka diusulkan strategi pemberdayaan industri kecil bordir berdasarkan aspek ekonomi seperti berikut:

Mempermudah pengadaan bahan baku

Perlu menjamin keberlangsungan dan menyediakan bahan baku dengan harga yang murah. Hal ini bisa dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah, koperasi dan perusahaan/distributor penyedia bahan baku secara langsung sehingga bisa memotong rantai distribusi untuk menekan harga. Koperasi bertugas mengidentifikasi kebutuhan anggotanya sekaligus menyalurkan kebutuhan bahan baku dari perusahaan/distributor ke pelaku usaha.

Pemberian kredit lunak

Pemberian kredit lunak perlu dilakukan untuk membantu permodalan pelaku usaha dengan bunga yang murah. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memfasilitasi akses kredit lunak dari penyedia program kepada pelaku usaha, upaya fasilitasi ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku usaha dengan penyedia program, membantu kelengkapan syarat, dan pengawalan sampai pencairan. Pelaksana program kredit lunak bisa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) perusahaan swasta, maupun kredit lunak yang disediakan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pembuatan rumah dagang

Pembuatan rumah dagang bordir perlu dibangun sebagai tempat pemasaran bersama. Rumah dagang bordir ini harus dibuat dilokasi strategis dengan akses menuju lokasi yang mudah. Sehingga bisa menarik pengunjung baik dari lokal maupun luar.

Bantuan mesin bordir

Perlu upaya perubahan teknologi dengan bantuan mesin bordir, hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi produksi dan produktifitas usaha bordir karena selama ini mereka menggunakan mesin sederhana yang dilakukan secara turun temurun.

Fasilitasi pameran produk bordir

Fasilitasi pameran ini dilakukan untuk memperluas pemasaran, diharapkan setelah pameran meningkatkan permintaan bordir. Fasilitasi pameran dilaksanakan dengan mengikutsertakan pelaku industri bordir untuk mengikuti pameran baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Fasilitasi e-Commerce

Fasilitasi *e-commerce* ini dilakukan untuk menangkap peluang pasar melalui dunia maya. Operasional *e-commerce* ini dikoordinasi oleh koperasi sehingga jika ada permintaan bisa ditindak lanjuti ke pelaku usaha. Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan kerjasama bidang-bidang terkait seperti pemerintah (dinas perindustrian, koperasi dan UMKM), lembaga keuangan (bank umum, bank daerah, koperasi simpan pinjam, BUMN), swasta dan masyarakat.

Strategi Pemberdayaan Usaha Bordir Skala Kecil Berdasarkan Aspek Politik

Tingkat keberdayaan industri kecil bordir dilihat dari akses politik masih rendah yaitu 14%. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan tingkat keberdayaan dilihat dari aspek politik. Alternatif strategi pemberdayaan untuk memperkuat dari aspek politik yang dapat dilakukan adalah :

a. Menyediakan tenaga penyuluh lapangan (TPL) untuk pengusaha kecil bordir

Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) perlu dibentuk untuk menjembatani pelaku usaha bordir dengan *stakeholders* dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi selama menjalankan usahanya. Selain itu, TPL juga akan memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada pengrajin bordir baik dari *up grade* pengetahuan, pemecahan masalah dan motivasi untuk berusaha secara konsisten sehingga usaha mereka bisa meningkat.

b. Membuka Lembaga Pendidikan Bordir

Lembaga pendidikan bordir ini diperlukan untuk menghasilkan pengusaha dan tenaga kerja baru berkualitas dalam industri bordir. Dalam lembaga pendidikan bordir tersebut selain diajarkan dalam hal teknik bordir yang berkualitas juga diajarkan faktor non teknis dalam industri bordir seperti kemampuan dalam mengakses peluang. Materi teknis yang dipelajari dalam Lembaga Pendidikan bordir ini berupa anatomi bahan baku, teknik menjahit manual dan mesin, pembuatan pola, dan *finishing*. Materi non teknis yang dipelajari meliputi studi kelayakan usaha, teknik pemasaran, dan pembukuan.

c. Pembentukan dan pengaktifan kembali Kelompok Usaha Bersama

Kelompok Usaha Bersama (KUB) ini desain untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesama pelaku usaha dan sebagai media untuk menyalurkan aspirasi dari pelaku usaha bordir untuk meningkatkan usahanya. KUB ini diharapkan menjadi jembatan bagi pelaku usaha bordir untuk saling berkomunikasi dan berjejaring. Selain itu, dengan adanya KUB ini akan muncul pertukaran informasi terkait usaha bordir dan pemecahan masalah pada usaha mereka. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut diperlukan kerjasama dari antar *stakeholders* yang meliputi pihak eksekutif (pemerintah), pihak legislatif (DPRD), pengusaha bordir, LSM, akademisi, Tokoh masyarakat dan pihak swasta.

Strategi Pemberdayaan Usaha Bordir Skala Kecil Berdasarkan Aspek Sosbud

Berdasarkan hasil penelitian tingkat keberdayaan usaha bordir dari aspek sosial budaya masih rendah yaitu 37%. Pendekatan dengan aspek sosial budaya perlu dilakukan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha menjadi kultur kehidupan mereka. Perlu diperhatikan bahwa kultur masyarakat Kudus adalah santri yang mandiri dan religius. Sehingga perumusan aspek sosial lingkup aspek sosial budaya harus mempertimbangkan faktor keagamaan meliputi :

a. Pelatihan kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan ini untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi pelaku usaha sehingga motivasi untuk mengembangkan usaha akan terus terjaga. Pelatihan kewirausahaan ini perlu mendatangkan pelaku usaha yang sukses sehingga dapat pelaku usaha bordir dapat mengikuti cara-cara mendapatkan kesuksesan.

Spirit berwirausaha masyarakat kudus, tidak terkecuali pelaku usaha bordir sebenarnya sudah ada. Selain ngaji, jargon yang sudah membudaya pada masyarakat Kudus adalah berdagang. Kultur ini perlu terus dipupuk dan diperkuat perkembangan dunia wirausaha yang sangat dinamis.

b. *Workshop* inovasi desain

Workshop inovasi desain untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan teknik mendesain bordir, meningkatkan kreativitas dari pelaku usaha untuk menciptakan produk baru yang inovatif. Selama ini pelaku usaha bordir meniru produk yang ada di pasar. Perlu kita ketahui salah satu persoalan pelaku usaha bordir adalah persoalan perkembangan dunia fashion yang begitu cepat. Oleh karena itu, *workshop* inovasi desain ini jadi penting untuk memberikan perspektif baru dalam dunia bordir tanpa mengabaikan fondasi warisan nenek moyang.

c. Bimbingan manajemen dan administrasi keuangan

Bimbingan manajemen dan administrasi keuangan ini mengajarkan kepada pelaku usaha kecil untuk membuat laporan keuangan dengan tertib, sehingga dapat mengetahui perkembangan keuangan secara tepat serta dapat mengidentifikasi permasalahan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi. Kurikulum manajemen harus menyesuaikan perkembangan zaman mengingat sekarang sudah memasuki era Industrial Revolution 4.0.

d. Pelatihan ekspor

Pelatihan ekspor ini untuk memberikan pengetahuan bagi pelaku usaha bordir yang akan memperluas pemasaran produknya ke luar negeri. Mereka tidak mengetahui prosedur tentang tata cara melakukan ekspor produk. Pelatihan Ekspor ini didesain untuk memberikan pengetahuan tentang tata cara melakukan ekspor barang ke luar negeri.

e. Pelatihan *Total Quality Control*

Dalam melakukan usahanya pelaku usaha bordir tidak memperhatikan standar produk, sehingga produk yang dihasilkan tidak memiliki standarisasi yang jelas. Pelatihan *Total Quality Control* diperlukan untuk memberi pengetahuan secara teoritis maupun praktis sehingga pelaku usaha untuk menjaga standar dari produknya agar kualitas produk tetap terjaga.

Pelaksanaan alternatif-alternatif peningkatan keberdayaan dari aspek sosial budaya dapat dilakukan dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, Perusahaan swasta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dengan sasaran sama.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis efisiensi teknis dan strategi pemberdayaan usaha kecil bordir di Kabupaten Kudus yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengembangan industri bordir dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu: a) Aspek Ekonomi: Mempermudah pengadaan bahan baku, pemberian kredit lunak, bantuan mesin bordir, fasilitasi pameran produk bordir dan fasilitasi *e-commerce*. b) Aspek politik: Menyediakan tenaga penyuluh lapangan (TPL) untuk pengusaha kecil bordir, membuka lembaga pendidikan bordir, dan pembentukan dan pengaktifan kembali kelompok usaha bersama. c) Aspek Sosial dan Budaya: pelatihan kewirausahaan, *workshop* inovasi desain, bimbingan manajemen dan administrasi keuangan, Pelatihan ekspor dan pelatihan *Total Quality Control*

Prioritas pengembangan usaha kecil bordir dilakukan dengan mempermudah pengadaan bahan baku, pemberian kredit lunak, dan pemberian bantuan mesin. Pemberdayaan usaha kecil bordir secara sinergis harus

dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha bordir, LSM, akademisi, swasta, dan lembaga keuangan serta tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F.D., Hardjanto, I., & Hayat, H. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* (1)6
- Dipta, I.W. (2009). Kebijakan Pemberdayaan UMKM Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. *Infokop*. (17) 2
- Gema Industri Kecil (2007). *Sentra Kesentra: Bordir dan Sulaman Bisa Jadi Komoditas Unggulan*. Edisi XX/Desember 2007 (44)3
- Kantor Bank Indonesia Semarang (2009). *Buku Panduan Launching Desa Produktif Klaster Bordir dan Konveksi Padurenan Kudus Melalui Diamond Claster*. Semarang: Kantor Bank Indonesia Semarang
- Kuncoro, M. (2007). *Ekonomika Industri Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Purwaningsih, R. & Kusuma P.D. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Metode Structural Equation Modeling*. Prosiding SNST Fakultas Teknik. Volume 1 No.1
- Sudantoko, D. (2010). *Model Pemberdayaan Industri Batik Skala Kecil di Jawa Tengah. Studi Kasus di Pekalongan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Undip
- Sukmawati, E.A. & Sumertawijaya, I.M. (2015). Perancangan Balance Scorecard untuk Mengembangkan Modal Insani dan Meningkatkan Kinerja pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Volume 13 No.3
- Susilowati, I., & Kirana, M. (2008). *Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Mikro Kecil di Sektor Perikanan. Buku Ajar Berbasis Riset*. Semarang: Penerbit Undip
- Susilowati, I., Sudaryono, A., Winarni, T.A. (2004). Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi-UMKM) dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten/Kota Pekalongan, Jawa Tengah. *Lemlit Undip*, Semarang
- Tambunan, T. (2001). *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang, Kasus Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Trisnawati, A. (2012). Analisis Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Bordir di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. *EDAJ* Volume 1 No.2

- Widayati, T. (2008). Analisis Efisiensi Teknis Tempat Pelelangan Ikan dan Tingkat Keberdayaan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan serta Strategi Pemberdayaannya di Wilayah pantai Utara Jawa Tengah. *Tesis*. Tidak dipublikasikan
- Zuhri, S. & Zamzami, R.M. (2018). Analysis of Efficiency of Production at Small Emboidery Industry in Regency of Kudus. *Economics and Accounting Journal* (10)1

DEVELOPMENT OF PERFORMANCE IMPROVEMENT OF MSMES IN LOYOK VILLAGE SIKUR DISTRICT EAST LOMBOK REGENCY BASED ON SWOT ANALYSIS

Triana Lidona Aprilani, Fathurrahman, Laely Hurriati

INTRODUCTION

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are business units that contribute greatly to development, especially in the form of employment and foreign exchange earners. MSMEs function as the foundation of the Indonesian economy that affects the economy, so the existence of MSMEs must be supported by various programs aimed at developing them, both from the government and the private sector (Bismala, 2014). Small businesses and the informal sector have shown their participation in the national economy in various contributions both in terms of macro and micro (Winarni, 2009). MSMEs have an important role in economic development and growth, not only in developing countries such as Indonesia, but also in developed countries such as Japan, the United States and European countries (Mulyanisman, 2012).

MSMEs need attention from the government, because MSMEs are expected to be able to absorb a lot of energy and have a very large number of business units, with the ability to absorb a large and dominant workforce in this business unit, enabling MSMEs to intensively use local natural resources. The existence of MSMEs, which are generally scattered in rural areas, is expected to have a positive impact on employment in rural areas, equity, income distribution, which can indirectly help the government in alleviating poverty in rural communities and reducing the movement of people from rural to urban areas which in the end does not directly help the government improve the welfare of rural communities and reduce urban slums. The problems of MSMEs in West Nusa Tenggara (NTB) Province in general are not much different from the problems experienced by MSMEs in Indonesia, namely: low managerial ability (in terms of production, raw materials, administration, and finance), low commitment in fulfilling customer orders, (in product design and quality, instability in supply and prices of raw materials or other supporting materials) and low access to financing sources. The government has handled this problem through various empowerment

programs for MSMEs, in the form of funding, partnerships, training, mentoring, and others, but empirical facts show that MSMEs in Bali have not developed optimally (Wimba, 2015).

The existence of MSMEs in NTB Province as one of the supporters of the tourism sector is preferred in increasing regional income. The role of MSMEs in this case is to provide added value to increase tourism attractiveness, assist the government in providing tourism facilities and infrastructure, which in turn also contributes to increasing tourism in domestic and foreign tourism. In general, most MSMEs produce products in the form of souvenirs and food for tourists visiting NTB. The development of MSMEs in NTB Province in 2018, is presented in Table 1 below.

Table 1. Development of MSMEs in NTB Province in 2018

No	District/City	Business Classification				Total
		Micro	Small	Medium	Large	
1	Mataram	46,328	11,007	632	179	58,146
2	Lombok Barat	110,322	10,286	461	34	121,103
3	Lombok Utara	7,037	369	2		7,408
4	Lombok Tengah	121,636	7,445	321	28	129,430
5	Lombok Timur	144,029	16,266	904	62	161,261
6	Sumbawa Barat	14,898	1,651	84	19	16,652
7	Sumbawa	40,620	6,666	231	40	47,552
8	Dompu	26,558	2,019	69	11	28,657
9	Bima	48,952	4,535	107	17	25,611
10	Kota Bima	22,267	2,713	163	24	25,167
Jumlah		582,647	62,952	2,974	414	648,987

Source: BPJS Provinsi NTB (2019)

The data in Table 1 shows that the number of business classifications, whether micro, small, medium, and large, continues to increase. But the absorption of labor, the value of investment, and the value of production decreased. This shows that in general the performance of MSMEs in NTB Province has decreased, so it needs to be critically examined with anticipatory steps so as not to cause more serious problems. The following is the number of Workers in Micro and Small Industrial Enterprises/Companies according to the Standard Classification Code of Indonesian Business Fields, Gender, and Age Group of Workers, 2019 in Table 2.

Table 2. Number of Workers in Micro and Small Industrial Enterprises/Companies according to the Standard Classification Code of

Indonesian Business Fields, Gender, and Age Group of Workers, in 2019

Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*)	Laki-Laki				Perempuan				Jumlah			
	Kelompok Umur Pekerja				Kelompok Umur Pekerja				Kelompok Umur Pekerja			
	< 15 Tahun	15 - 49 Tahun	50 - 64 Tahun	≥ 65 Tahun	< 15 Tahun	15 - 49 Tahun	50 - 64 Tahun	≥ 65 Tahun	< 15 Tahun	15 - 49 Tahun	50 - 64 Tahun	≥ 65 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	-	11 927	3 816	133	171	22 670	5 151	689	171	34 597	8 967	822
11	-	1 145	123	5	-	149	-	58	-	1 294	123	63
12	19	36 005	5 303	483	585	42 473	8 894	417	604	78 478	14 197	900
13	-	414	45	16	-	7 690	2 713	34	-	8 104	2 758	50
14	-	993	255	102	-	3 698	997	410	-	4 691	1 252	512
15	-	10	2	1	-	6	-	-	-	16	2	1
16	2	22 532	7 423	235	19	23 513	10 259	1 887	21	46 045	17 682	2 122
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	736	8	-	-	26	-	-	-	762	8	-
20	-	30	37	7	-	15	22	7	-	45	59	14
21	-	363	-	-	-	598	24	21	-	961	24	21
22	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
23	433	10 628	4 047	217	126	9 075	2 547	135	559	19 703	6 594	352
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1	3 588	171	231	-	63	12	-	1	3 651	183	231
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	16	6	-	-	-	-	-	-	16	6	-
31	60	2 253	738	123	-	133	4	-	60	2 386	742	123
32	13	486	85	62	-	324	243	81	13	810	328	143
33	-	219	-	-	-	-	-	-	-	219	-	-
Jumlah	528	91 354	22 059	1 615	901	110 433	30 866	3 739	1 429	201 787	52 925	5 354

Keterangan: *) Uraian kode dapat dilihat pada Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Source: East Lombok Regency BPJS, Year 2019

Table 2 shows that IMK businesses in NTB Province absorb as many as 261,495 workers and more than 60 percent are female workers. If you look at the distribution of the number of workers, IMK workers on the island of Lombok are 223,086 people (85.31 percent) and the remaining 38,409 people (14.69 percent) are on the island of Sumbawa. This is reasonable because more than 80 percent of the number of IMKs are on the island of Lombok so that the number of workers is also greater. An in-depth analysis of the low performance of MSMEs in Loyok Village, Sikur District is important to do, to find out the weaknesses and opportunities available to improve performance in the following year. One of the analytical tools that can be used to analyze the existence of MSMEs in Loyok Village, Sikur District, East Lombok Regency is a SWOT analysis.

MSMEs in East Lombok Regency consist of 55 types of businesses, grouped into: (1) Craftsmen group consisting of woven craftsmen (eating, bamboo), coconut shell craftsmen, wood carvings, silver crafts, mini jukung craftsmen, and wooden sculptures, (2) Business groups building materials consist of concrete brick industry, brick, padas, taro and trellis/iron fence, (3) food and beverage group consisting of dodol food industry, Balinese snacks, crackers, salt, brown sugar, peanuts, chips, fermented soybean cake, cassava cakes, rice flour, fish processing, coconut oil, packaged drinks, palm wine

processing and food stalls, (4) Textile group consisting of embroidery, screen printing, weaving of garbage bags, convection/tailor and clothing, and (5) Other industries consisting of pillows, kites, paintings, knives and photo copies.

The results of interviews with industry employees and the trade office of Loyok Village, Sikur Subdistrict, show that the craftsman industry group most often receives assistance and support from the government, because this group produces tourism supporting products in the district and absorbs relatively more workers. This condition encourages the SWOT analysis of MSMEs in Loyok Village, Sikur District to focus on groups of craftsmen, weaving, woven bamboo, coconut shells and wood carvings.

Research question:

1. What are the results of the SWOT analysis on SMEs in Loyok Village, Sikur District, East Lombok Regency?
2. What is the strategy to improve the performance of MSMEs based on a SWOT analysis in Loyok Village, Sikur District, East Lombok Regency?

Research purposes:

1. Conduct a SWOT analysis of MSMEs in Loyok Village, Sikur District, East Lombok Regency.
2. Develop a strategy to improve the performance of MSMEs based on a SWOT analysis in Loyok Village, Sikur District, East Lombok Regency.

LITERATURE REVIEW

A. UMKM

The definition of MSMEs set by BPS (Central Statistics Agency) is based on the number of workers, for small businesses there are five to nineteen people, while for medium-sized businesses it ranges from twenty to ninety-nine workers (Rahmana, 2009). The definition of MSME above is in accordance with the MSME definition applied to the Asian Development Bank (ADB) (Larasati, 2011). MSMEs have special characteristics that distinguish them from other types of large businesses, including characteristics that distinguish micro-enterprises, small-scale businesses, and medium-sized businesses themselves. More than a third of MSMEs in Indonesia (34.5 percent) are managed by workers aged over 45 years, and only about 5.2 percent of MSME entrepreneurs are under 25 years old (Tambunan, 2009). The workforce needed by small industries does not require high formal education. Most of the workforce needed by industry is based on experience (learning by doing) related to historical factors (path dependence) (Sulistyastuti, 2004). The

entrepreneurial structure according to formal education level shows that there is a positive relationship between the average entrepreneurial education level and business scale, which means that the larger the business scale, which is generally positively related to the level of business complexity that requires high skills and broader business insight, more and more entrepreneurs with tertiary formal education (Tambunan, 2009). Most MSME entrepreneurs reveal the reasons for their business activities having an economic background, meaning that this business is carried out as an effort to increase income and or is a strategy to survive, this condition is caused by the low level of entrepreneurial education.

The MSME business is carried out on the grounds that there is no other type of work that can be done with a relatively low level of formal education (Tambunan, 2009). Some entrepreneurs run their business considering the future prospects of the business, such as the existence of a secure and large opportunity and market share, however, others reveal a hereditary background, which means continuing the family heritage business. Indonesia has many MSMEs, but not all of these MSMEs are legal entities, most of the existing MSMEs, which is about 95.1 percent of the number of business units that are not legal entities, this condition is acceptable on the grounds that most MSMEs have minimal capital and adequate regulations. complicated to get services in business development. The characteristics of SMEs are the use of local raw materials. The existence of MSMEs is often associated with the high intensity of use of local raw materials, for example MSMEs crafted Jepara carving furniture typical of batik from Pekalongan and various other superior local commodities that are used as raw materials in business (Sulistiyastuti, 2004).

B. Performance

Performance can be in the form of individual performances or group work. The performance description involves three important components, namely: objectives, measures and assessments. Determining the goals of each organizational unit is a strategy to improve performance. This goal will provide direction and influence on how work behavior should be expected by the organization for each personnel. Even so, goal setting is not enough, because it requires a measure of whether a person has achieved the expected performance. Factors that affect performance are abbreviated to Achieve which means Ability (ability that can be developed), Capacity (defined/limited abilities), Assistance (assistance for performance realization), Incentives (material and non-material incentives), Environment (employee work environment), Validity (guidelines/instructions and job descriptions) and Evaluation (work feedback) (Notoatmodjo, 2009). Performance is a contextual concept related to the phenomenon being studied, so the measures used to

represent performance are selected based on the observed state of the company. Performance appraisal is an important activity for the company as a process of evaluating all its activities. Performance appraisal is often a problem because performance appraisal is only intended to evaluate and exclude other goals such as the goal of developing competence and individual goals in carrying out tasks and other goals.

C. SWOT Analysis

SWOT analysis is an analytical technique that identifies various factors systematically to formulate strategies. This analysis is based on logic that can maximize strengths and opportunities but at the same time minimize weaknesses and threats (Lestari, 2014). SWOT analysis is generally used to evaluate opportunities and challenges in the company's internal and business environment (Rahmana et al. 2017). The construction of a SWOT matrix is needed to facilitate the implementation of a SWOT analysis, by combining the factors of strength, weakness, opportunities and threats: The SWOT matrix consists of analysis of: (a) SO (Strength-Opportunities) is to use internal strengths to take advantage of external opportunities, (b) WO (Weakness-Opportunities) which aims to improve internal weaknesses by taking advantage of external opportunities, (c) ST (Strength-Threats) by using internal strength to avoid or reduce the influence of external threats, (d) WT (Weaknesses-Threats) is a defensive strategy directed at reducing internal weaknesses and avoiding internal threats. The preparation of the SWOT matrix consists of eight steps that must be carried out, namely: (a) writing external opportunities, (b) writing external threats, (c) writing internal strengths, (d) writing internal weaknesses, (e) match internal strengths with external opportunities and record SO strategies in the specified cells, (f) match internal weaknesses with external opportunities and record WO strategies in the specified cells, (g) match internal strengths with external threats and record ST strategies in the specified cells, (h) matched internal weaknesses with external threats and recorded WT strategies in defined cells (Amalia et al. 2017). The SWOT matrix is presented in Table 3.

There are four strategies that can be identified from the SWOT analysis matrix presented in Table 3, namely: the first SO strategy which is a strategy to use all the strengths you have to take advantage of opportunities. Second, the WO strategy is a strategy to overcome all weaknesses by taking advantage of existing opportunities. Third, the ST strategy, which is a strategy to use all strengths to avoid threats. Fourth, the WT strategy is a strategy to suppress all weaknesses and prevent all threats.

Tabel 3. Matrix of SWOT Analysis

Internal Factor External Factor	Strengths (S) (List All Of Strengths)	Weakness (W) (List All Of Weakness)
Opportunities (O) (List All Of Opportunities)	Strategi SO (Growth)	Strategi WO (Stability)
Threats (T) (List All Of Threats)	Strategi ST (Diversification)	Strategi WT (Defend)

Rahmana, et al (2017)

RESEARCH METHOD

This research is descriptive research, namely research to determine the value of independent variables, either one or more variables (independent) without making comparisons, or connecting with other variables (Sugiyono, 2009). This type of research is descriptive which describes the strengths, weaknesses, opportunities and threats faced by SMEs in Loyok Village, Sikur District. The types of data used in this study consisted of: primary data, namely data on the strengths, weaknesses, opportunities and threats faced by MSMEs in Loyok Village, Sikur District and information about the groups of Craftsmen who most often received training/guidance from the Industry and Trade District Office. Karangasem. Secondary data is data on MSMEs in NTB Province obtained from the NTB Provincial Industry and Trade Office, data on MSMEs in Loyok Village, Sikur District obtained from the East Lombok Regency Industry and Trade Office.

The data collection techniques used in this study are: documentation, the data obtained by the documentation method in this study is the data of MSMEs in NTB Province and in Loyok Village, Sikur District. Interviews in this study were conducted with the head of the MSME data collection section in Loyok Village, Sikur District. Types of interviews conducted: in-depth interviews, researchers conducted in-depth interviews through semi-formal interviews with research informants, they were owners of MSMEs, especially craftsmen of weaving, woven bamboo, coconut shells and wood carvings. The population is all woven craftsmen, woven bamboo, coconut shell craftsmen and wood carving craftsmen in Loyok Village, Sikur District. Determination of the sample is done by proportional random sampling, which is a sampling method based on the representation of the population distribution in each sub-group, then selecting at the next stage the sample members are randomly selected. Determination of the sample using probability sampling, especially proportional random sampling, using the Slovin formula, the calculation of the number of samples in this study is as follows.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Notes:

- N = Total population
- n = Number of samples
- e = fault tolerance

Data from the Department of Industry and Trade of East Lombok Regency shows that the number of woven, woven bamboo, coconut skin and wood carving craftsmen in Loyok Village, Sikur District is 1,415 business units, then using the Slovin formula with an error rate of 10 percent, the number of samples becomes:

$$n = \frac{1.415}{1 + 1.415(0.1)^2} \quad n = 93$$

The results of the calculation show that the sample size is 93 units of woven food craftsmen, woven bamboo, coconut shells and wood carvings, using proportional random sampling clusters, proportional sample distribution in each cluster or area, names of sub-districts and groups of craftsmen in Sikur District are presented in Table 4 and Table 5 below.

Table 4. Distribution of Population and Sample in Each District and Each Craft Group in Sikur District

Name Of District		Type of craftsmen (unit)		Number Of Population	Number Of sampel	
		Ate Plaiting	Bamboo Plaiting		Coconut Shell	Wood Carving
Semaya	1	24	151	11	187	5
Montong	53	493	26	101	673	19
Sikur	0	2	0	12	14	0
Loyok	1.308	55	3	19	1.385	39
Kotaraja	134	567	0	26	727	21
Tetebatu	72	47	0	25	144	4
Kembang Kuning	0	185	0	13	198	6
Gelora	68	6	1	12	87	3
Total	1.636	1.379	181	219	3.415	97

Source: East Lombok Regency Industry and Trade Office, 2018 (data processed)

The distribution of samples for each type of industry in each sub-district is presented in Table 5.

Table 5. Sample distribution for each type of industry in each Sikur District

Name Of Regency	Type Of Craftmen (unit)				Total
	Ate Plaiting	Bamboo Plaiting	Coconut Shell	Wood Carving	
Semaya	0	1	4	0	5
Montong	1	14	1	3	19
Sikur	0	0	0	0	0
Loyok	37	2	0	1	39
Kotaraja	4	16	0	1	21
Tetebatu	2	1	0	1	4
Kembang	0	6	0	0	6
Kuning					
Gelora	2	0	0	0	3
Total	46	40	5	6	97

Source: Data in Table 4

Distribution of samples in each village and each craftsman proportionally based on the area and type of business with the consideration of providing opportunities for all craftsmen in all districts. The data analysis techniques used in this research are: (1) Descriptive analysis technique with a qualitative approach, namely by providing an overview of data or events based on the facts that arise in the situation and object being investigated, the research process is carried out through measurements with a standard tool is a matrix SWOT, (2) The SWOT matrix analyzes the strengths, weaknesses, opportunities and threats faced by craftsmen, (3) The results of the SWOT analysis are used as the basis for developing models to improve the performance of craftsmen.

RESULTS AND DISCUSSION

A. SWOT Analysis on MSME Performance

MSMEs in Sikur District consist of various types of industrial groups, one of which is a group of craftsmen. The group of craftsmen who most often receive assistance and support from the East Lombok Regency Industry and Trade Office for the reason to produce more products that support tourism and absorb more workers is eating woven craftsmen, woven bamboo, coconut shells and wood carvings. The craftsmen who were the samples of this research were 93 craftsmen consisting of 43 food craftsmen, 40 woven bamboo, 5 coconut shell craftsmen and 5 wood carving craftsmen spread over eight (8) villages in Sikur District. Referring to the steps in preparing the SWOT matrix by Amalia, et al (2017) and based on the results of interviews and in-

depth interviews with respondents, the SWOT analysis of artisans in Sikur District is as follows:

- a) Write down external opportunities.
External opportunities faced by craftsmen in running their business are:
 - 1) Get capital assistance in the form of soft loans from Village Owned Enterprises.
 - 2) A lot of attention from the government in the form of training and mentoring programs.
- b) Write down external threats.
The external threats faced by craftsmen in running their business are:
 - 1) Tough competition
 - 2) Low economic conditions
- c) Write down internal strength.
- d) The internal strengths of craftsmen in running their business are:
 - 1) Abundant raw materials at relatively low prices.
 - 2) Labor is always available at relatively low prices.
 - 3) Good product quality.
- e) Write down internal weaknesses.
The internal weaknesses of craftsmen in running their business are:
 - 1) The number of qualified workers is still low.
 - 2) Product design is less innovative and tends to be monotonous.
 - 3) Information about the market is still limited.
- f) Match internal strengths with external opportunities and record SO strategy in the specified cell.
- g) Match internal weaknesses with external opportunities and record the WO strategy in the specified cells.
- h) Match internal strength with external threat and record ST strategy in the specified cell.
- i) Match internal weaknesses with external threats and record the WT strategy in the specified cells.

The SWOT matrix for MSME craftsmen prepared based on the steps referred to by Amalia, *et al.* (2017) is presented in Table 6.

Table 6. MSME Matrix SWOT Split in Sikur District

INTERNAL FACTOR	Strength (S) a) Raw materials with relatively cheap prices b) Continue to work at a relatively low price c) Good product quality	Weakness (W) a) The number of qualified workforce is still low, b) Product design is less innovative c) Limited market information
OUTSIDE FACTOR	SO STRATEGY Utilizing Village Owned Enterprise funds and optimizing the availability of manpower to develop business Maintaining good quality pf products by utilizing government training and mentoring programs	WO STRATEGY Participate in training and guidance programs conducted by the government to improve the quality of the workforce and increase product innovation and creativity kreativitas Develop an online marketing program by optimizing soft loans from Village Owned Enterprise
Opportunity (O) a) get capital assistance in the form of soft loans from Village-Owned Enterprises b) Attention from the government, especially training and mentoring programs. b) Attention from the government, especially training and mentoring programs		WT STRATEGY Increase creativity and product innovation. Looking for new market share
Threat (T) a) Fierce competition b) Decline in Economic Conditions	ST STRATEGY Win the competition by producing more quality products than competitors. Optimizing the use of relatively cheap raw materials and labor to survive in low economic conditions.	

Source: Interview Results with Craftsmen

B. MSME Performance Improvement Strategy Based on SWOT Analysis

SWOT analysis is used as a basis for developing models to improve MSME performance. SWOT analysis is generally used to evaluate opportunities and challenges in the business environment and in the company's internal environment (Kuncoro, 2005). MSME craftsmen in Loyok Village, Sikur District are one of the business units experiencing low performance problems, although compared to other MSMEs, craftsmen are MSMEs that receive the most attention from the local government.

The results of the SWOT analysis of the craftsmen are used as the basis for developing performance improvement strategies. Referring to the results of the SWOT analysis that has been carried out, there are four strategies that can be taken to improve the performance of MSME craftsmen in Loyok Village, Sikur District, namely:

- a) SO Strategy (Strength-Opportunity)
This strategy seeks to optimize the internal strengths of the business to be able to achieve available external opportunities. The efforts made in this strategy are:
 - 1) Utilizing Village Owned Enterprise funds and optimizing the availability of manpower to develop business.

- 2) Maintaining good quality of products by utilizing government training programs.

b) WO (Weakness-Opportunities) Strategy.

This strategy seeks to improve internal weaknesses to achieve external opportunities. The actions taken in this strategy are:

- 1) Participate in training and guidance programs conducted by the government to improve the quality of the workforce and increase product innovation and creativity.
- 2) Develop online marketing programs by optimizing soft loans from Village Owned Enterprises.

c) ST Strategy (Strength-Threat).

This strategy optimizes internal strengths to deal with external threats. The actions taken in this strategy are:

- 1) Win the competition by producing more quality products than competitors.
- 2) Optimizing the use of relatively cheap raw materials and labor to survive in low economic conditions.

d) WT (Weakness-Threat) Strategy.

This strategy minimizes internal weaknesses to deal with external threats. The actions taken in this strategy are:

- 1) Increase creativity and product innovation.
- 2) Looking for new market share.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

The conclusions of the study refer to the results and discussions: (1) the results of the SWOT analysis show the strengths (S) of the craftsman group are: they have raw materials at relatively low prices, labor is always available at relatively low prices, good product quality. Weaknesses of craftsmen are still low in the quality of labor, less innovative product designs and market information is still limited. The available opportunities are to get capital assistance in the form of soft loans from Village-Owned Enterprises, attention from the government in training and mentoring programs. The threats faced by craftsmen are intense competition and low economic conditions. Weaknesses and threats faced by craftsmen motivate craftsmen to keep running their business because on the other hand, craftsmen have the advantage of abundant raw materials at relatively low prices, labor is always available at relatively low prices and good product quality. Another motivator is external opportunities, they are capital assistance funds in the form of soft loans from Village-Owned Enterprises and attention from the government in the form of training and mentoring programs, (2) The results of the SWOT analysis are used as a basis for developing strategies to improve the

performance of craftsmen, they are SO strategies to maintain product quality by utilizing Village Owned Enterprises assistance and training from the government, WO strategies to create online marketing programs and increase product design innovation and creativity, ST strategy to optimize the availability of raw materials and relatively cheap labor to win the competition and WT strategy to increase product design creativity and seek new market share.

Research recommendations are addressed to: (1) Craftsmen must make efforts to improve the quality of the workforce by including them in product innovation training and create online marketing programs, and (2) The government is expected to continue to carry out training and mentoring programs, training should not focus on the production sector but also in the marketing sector by collaborating with other parties such as universities, Village Owned Enterprises are also expected to continue to fund the craftsman business to promote economic growth in the village.

REFERENCE

- Amalia Alfi, Hidayat Wahyu dan Budiarno Agung. 2017. *Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pada UKM Batik Semarang Di Kota Semarang*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Bisnis. Diponogoro University Semarang.
- Bismala, Lila dan Handayani, Susi. 2014. Model Manajemen MSMEs Berbasis Analisis SWOT. *Naskah Lengkap Seminar Nasional PB3I ITM*. Muhamadiyah University Sumatera Utara.
- Cochran, W. G. 1993. *Sampling Techniques*. Second Edition, John Wiley & Sons, Inc. New York, Library Of Congress Catalog Card Number: 63-7553.
- Cooper, D. Dan Emory C. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Kelima. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Dawson, Catherine. 2002. *A Practical Guide to Research Methods, How To Content*. Oxford.
- Kuncoro, M. 2005. *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?*, Jakarta: Erlangga.
- Larasati, Bio Hafsari. 2011. *Analisis Hubungan Komunikasi Pemasaran Dengan Kualitas Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (MSMEs) (Studi pada MSMEs Mitra Binaan IPB)*. Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.
- Lestari Ni Putu Nina Eka. 2014. *Strategi Pembedrdayaan Industri Kecil Kerajinan Ukiran Kayu di Kabupaten Gianyar Bali*. Disertasi. Program Doktor. Program Studi Ilmu Ekonomi. Program Pasca Sarjana. Denpasar: Universitas Udayana.

- Mulyanisman. 2012. *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Perusahaan Menengah Bidang Perdagangan*. Artikel. Download from: www.google.com.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Kesehatan Masyarakat "Seni dan Ilmu"*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rahmana Arief, Iriani Yani dan Oktarina Rienna. 2017. *Strategi Pengembangan Usaha Kecil menengah Sektor Industri Pengolahan*. Artikel. Di akses dari. www.Google cendekia. Download in 21 Mei 2018.
- Sugiyono. 2009. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistiyastuti. Dyah Ratih 2004. 'Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001', Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 9, Number 2 Desember 2004, page 143-164, <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEP/article/view/617/543> download in 26 Juni 2018.
- Tambunan, Tulus T.H. 2012, *UMKM di Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta
- Wimba I Gusti Ayu. 2015. *Pengaruh Modal Sosial Terhadap Orientasi Kewirausahaan dan Biaya Transaksi untuk Meningkatkan Kinerja Usaha Pada UKM Kerajinan Kayu di Provinsi Bali*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udayana University.Denpasar.
- Winarni, Sri. 2009. *Menerapkan Penggunaan Laporan laba/rugi Pada Usaha Kecil dan Menengah*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Volume I No. 2.

PEMANFAATAN TINTA CUMI-CUMI (*Loligo sp.*) PADA PEMBUATAN MIE KERING IKAN

Kusuma Arumsari, Syifa Anwariyah, Widya Pangestika

PENDAHULUAN

Mie merupakan salah satu makanan yang digemari masyarakat Indonesia sehingga Indonesia tercatat sebagai konsumen mie terbesar kedua di dunia setelah China. Mie kering adalah suatu produk makanan kering yang terbuat dari tepung terigu dengan penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan, berbentuk khas mie (BSN, 1996), serta mengandung kadar air sebesar 8-10%. Meskipun demikian, mie di Indonesia bukan dianggap makanan yang istimewa karena mayoritas komponennya merupakan karbohidrat dan sedikit protein yang berasal dari telur. Penambahan tepung ikan sebagai bahan campuran membuat mie sangat prospektif untuk dikembangkan karena ikan merupakan bahan pangan berprotein tinggi, terlebih bila diambil dari ikan rucah yang ekonomisnya masih rendah.

Di Indonesia pemanfaatan tinta cumi-cumi belum begitu banyak, akan tetapi di Jepang tinta cumi-cumi sudah dimanfaatkan sebagai pengawet dalam makanan dan berfungsi sebagai flavoring pada cumi asin (Astawan, 2010). Menurut Agusandi, *et al.*, (2013) penambahan tinta cumi-cumi dalam produk mie dengan pemberian konsentrasi yang berbeda akan didapatkan hasil yang terbaik pada mie yang diproduksi. Kandungan yang terdapat dalam tinta cumi-cumi yaitu butir-butir melanin atau pigmen hitam. Melanin alami merupakan melanoprotein yang mengandung 10-15% protein, sehingga akan menghasilkan sumber protein yang sama baiknya dengan kandungan protein yang terdapat dalam daging cumi-cumi tersebut (Astawan, 2008). Kantong tinta cumi-cumi (*Loligo sp.*) yang berwarna hitam digunakan sebagai peningkatan *flavor* dan cita rasa dalam sebuah produk yang terbuat dari tinta cumi-cumi, selain itu warna hitam yang dihasilkan dari pigmen yang dapat meningkatkan manfaat pada bahan pangan. Setiap warna yang terdapat pada bahan makanan mampu menunjukkan bahwa adanya senyawa fitokimia tertentu yang memiliki khasiat untuk mencegah berbagai penyakit yang terjadi pada manusia dengan cara mengkonsumsi produk yang terbuat dari bahan yang mengandung pigmen hitam dari tinta cumi-cumi (Astawan, 2008).

Pembuatan mie kering dengan substitusi tepung ikan yang ditambahkan tinta cumi merupakan salah satu diversifikasi hasil perikanan yang diharapkan mampu menjadi salah satu produk yang dapat dikembangkan di masyarakat. Uji kesukaan, *cooking loss*, daya rehidrasi, dan analisis usaha dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui kelayakan usaha pembuatan mie kering ikan dengan tambahan tinta cumi ini. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menghasilkan produk baru dengan nilai gizi dan nilai jual tinggi yang dapat diterima masyarakat.

PEMBAHASAN

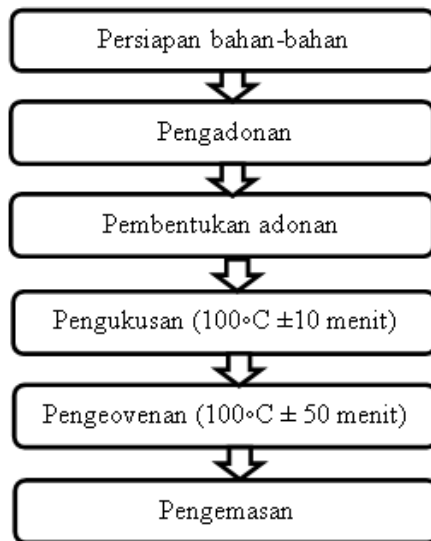
1. Pembuatan Mie Kering

Selama ini mie kering yang populer di pasaran menggunakan bahan baku dari tepung terigu yang masih harus impor dari negara lain. Pemanfaatan pangan lokal perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat impor Indonesia, salah satunya dengan upaya substitusi tepung mocaf pada komposisi terigu yang digunakan. Tepung mocaf adalah produk tepung dari ubi kayu yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel ubi kayu secara fermentasi. Tepung mocaf merupakan tepung yang mempunyai protein cukup rendah tetapi kandungan gizi pada tepung mocaf hampir sama dengan tepung terigu sehingga dapat digunakan sebagai pengganti tepung terigu. Kandungan karbohidrat mocaf lebih tinggi dan serat pada mocaf juga tinggi sehingga konsumsi mie dengan bahan baku tepung mocaf ini baik jika dikonsumsi oleh orang yang sedang menjalankan diet. Penambahan tepung ikan dalam pembuatan mie kering bertujuan untuk meningkatkan kandungan protein yang ada pada mie tersebut, karena tepung ikan banyak mengandung protein dan banyak mengandung profil asam amino yang sangat baik kemudian palatabilitas dan nilai gizi yang tinggi. Formulasi pembuatan mie kering ikan dengan penambahan tinta cumi pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Formulasi bahan-bahan pembuatan mie kering

No	Bahan	P0 (g)	P1 (g)	P2 (g)	P3 (g)
1.	Terigu	85	85	85	85
2.	Mocaf	12	12	12	12
3.	Tepung Ikan	3	3	3	3
4.	Tinta Cumi-cumi	0	1	1,5	2
5.	Air	26	26	26	26
6.	Garam	2	2	2	2
7.	Putih Telur	30	30	30	30
8.	Soda Kue	1	1	1	1
9.	Kaldu Jamur	1	1	1	1
10.	Bawang Putih Bubuk	2	2	2	2

Tahap pembuatan mie kering ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur pembuatan mie kering

Bahan-bahan yang telah disiapkan dilakukan pencampuran secara manual. Tahap pertama dalam pengadonan yaitu dengan cara menambahkan tepung terigu kemudian ditambahkan air sedikit demi sedikit. Menurut Koswara (2009), tepung terigu dicampur dengan air dengan cara pengadukan menggunakan alat atau pengulenan, tujuannya untuk menghidrasi tepung dengan air dan membuat campuran merata dengan baik. Membuat adonan mie pada prinsipnya untuk membentuk gluten dengan cara meremas-remas. Adonan yang telah tercampur kemudian ditambahkan bahan lainnya seperti telur, garam tepung ikan dan tepung mocaf hingga homogen dan diamkan selama 30 menit. Menurut Astawan (2002) dalam Kartika (2010), waktu pengadukan terbaik adalah 15 menit. Waktu pengadukan yang kurang dari 15 menit akan menyebabkan adonan menjadi lunak dan lengket, sedangkan jika lebih dari 15 menit adonan menjadi keras, rapuh dan kering. Tahap selanjutnya adalah pembentukan adonan menjadi bentuk lembaran. Pembentukan ini menggunakan alat pencetak mie yang telah dilengkapi dengan *roll press*. Lembaran yang telah terbentuk kemudian sebelum dicetak dalam bentuk cetakan mie dilakukan terlebih dahulu penipisan secara berkali-kali pada *roll press*. Hal ini juga dikatakan Koswara (2009), dalam proses pembentukan lembaran, adonan dimasukkan ke dalam *roll press*, dengan tujuan untuk menghaluskan serat-serat gluten. Dalam *roll press* serat-serat gluten yang tidak beraturan segera ditarik memanjang dan searah oleh tekanan antara dua *roller*. Penipisan adonan dilakukan hingga menggunakan ukuran ketebalan menjadi 2 mm dengan panjang masing-masing lembaran sebesar 10 cm. Adonan yang telah membentuk lembaran kemudian dicetak dibentuk dalam

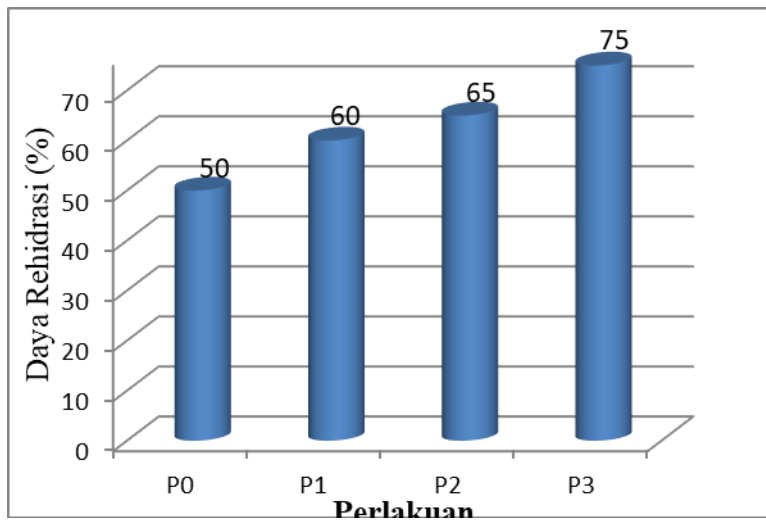
cetakan pembentuk mie, pada saat pencetakan adonan mie ditaburi dengan tepung terigu agar tidak menempel satu sama lain.

Adonan yang sudah dalam bentuk lembaran memanjang seperti mie selanjutnya dilakukan pengukusan selama 10 menit pada suhu 100°C. Menurut Maryati (2000), pengukusan ini bertujuan untuk membuat bahan makanan menjadi masak dengan metode uap air mendidih. Pengukusan ini dilakukan dengan hati-hati agar adonan mie matang merata dan tidak mengalami pengukusan yang berlebih. Pengukusan pada bahan mie mentah apabila dilakukan berlebih akan mengakibatkan bahan mie menjadi hancur sulit untuk dikeringkan karena terlalu banyak uap air yang keluar saat pengukusan. Tahap pengolahan selanjutnya adalah pengeringan mie. Pengeringan dilakukan setelah mie dikukus dan ditiriskan hingga dingin, dengan pengovenan selama \pm 50 menit dengan suhu 100°C. Menurut Anonim (2008), pengeringan dilakukan dengan suhu 60°C selama 7 jam, pengeringan dilakukan dengan suhu 60°C agar protein pada mie tidak rusak. Protein yang mengalami denaturasi akan menurunkan aktivitas biologi protein dan berkurangnya kelarutan protein, sehingga protein mudah mengendap. Proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada mie, sehingga masa simpan mie tersebut lebih lama. Pengeringan menggunakan oven ini dilakukan dengan cara hati-hati agar adonan mie matang merata dan tidak mengalami *over cooked* yang menyebabkan tekstur dan penampakan pada mie berubah. Tahap proses terakhir adalah pengemasan yang dilakukan untuk melindungi produk, memberikan identitas produk, dan memperpanjang masa simpannya.

Pengujian Produk

a. Uji Daya Rehidrasi

Daya rehidrasi yaitu kemampuan bahan pangan untuk menyerap air setelah proses gelatinisasi (Romlah dan Haryadi, 1997). Hasil analisis dari uji rehidrasi menunjukkan bahwa mie kering yang terbuat dari penambahan tinta cumi-cumi berpengaruh terhadap daya rehidrasi mie kering yang dihasilkan. Semakin banyak penambahan tinta cumi-cumi pada pembuatan mie kering, maka daya rehidrasinya semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena mie kering yang dihasilkan mengandung protein dari tepung ikan serta tinta cumi yang bersifat mengikat air, sehingga dapat meningkatkan daya serap air pada mie kering. Grafik uji daya rehidrasi produk mie kering ikan yang ditambahkan tinta cumi ditunjukkan pada Gambar 2.

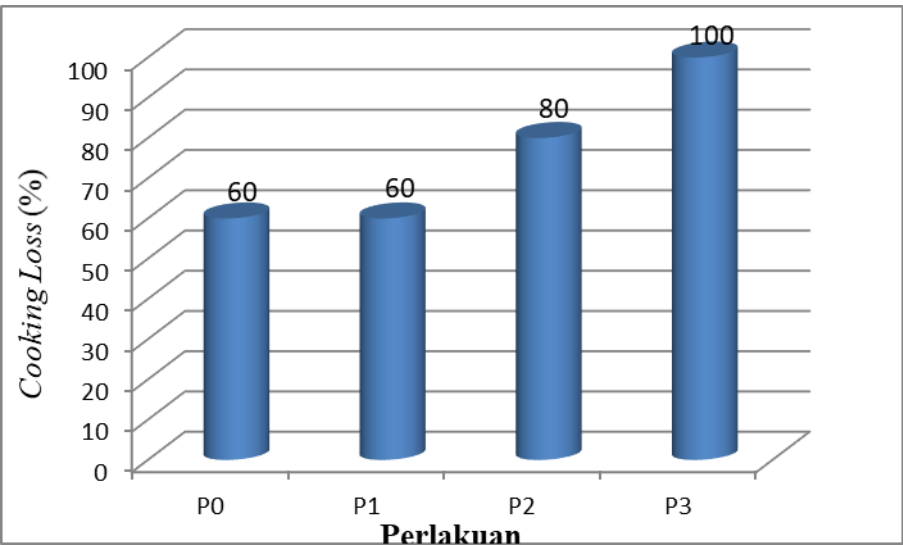


Gambar 2. Uji Daya Rehidrasi Mie Kering Tinta Cumi

Tepung terigu mengandung pati $\pm 70\%$ yang terdiri dari fraksi amilosa 19-26% dan amilopektin 74-81% (Puspita, 2005). Semakin tinggi kandungan pati pada bahan, maka akan mempercepat proses gelatinisasi pati dan penyerapan air. Semakin banyak gugus hidroksil pada pati daya rehidrasi semakin meningkat. Penambahan telur dapat meningkatkan daya rehidrasi mie kering karena telur juga mengandung protein tinggi yang bersifat mengikat air, sehingga dapat meningkatkan daya serap air pada mie kering. Hasil uji daya rehidrasi pada mie kering yang ditambahkan warna dari tinta cumi-cumi paling tinggi daya rehidrasi yaitu pada perlakuan P3 yaitu penambahan tinta cumi-cumi 2 Gram dengan jumlah daya rehidrasi 75%.

b. Uji Cooking Loss

Menurut Puspita (2010) dalam Tethool (2011), pengujian *cooking loss* yaitu uji kehilangan padatan akibat pemasakan. Menurut Rayas-Duarte (1996) dalam Utiya Listy Biyumna (2017), *cooking loss* mie kering meningkat apabila kandungan gluten dalam mie kering berkurang. Bila kandungan gluten mie kering semakin berkurang, maka banyak partikel-partikel dari bahan yang terlepas dan hilang selama proses pemasakan, sehingga menyebabkan keseluruhan struktur mie melemah. Grafik uji *cooking loss* produk mie kering ikan yang ditambahkan tinta cumi ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Uji Cooking Loss Mie Kering Tinta Cumi

Hasil analisis data uji *cooking loss* menunjukkan bahwa mie kering yang terbuat dari tambahan pewarna tinta cumi-cumi tidak berpengaruh nyata terhadap *cooking loss* yang dihasilkan. Semakin banyak penambahan warna dari tinta cumi-cumi *cooking loss* pada mie kering menurun. Hal ini disebabkan karena pembuatan mie kering yang berbahan dasar tepung terigu, dan tambahan tepung ikan yang mengandung protein tinggi, tidak mempengaruhi terhadap daya serap air yang ada pada mie kering.

c. Uji Masa Simpan

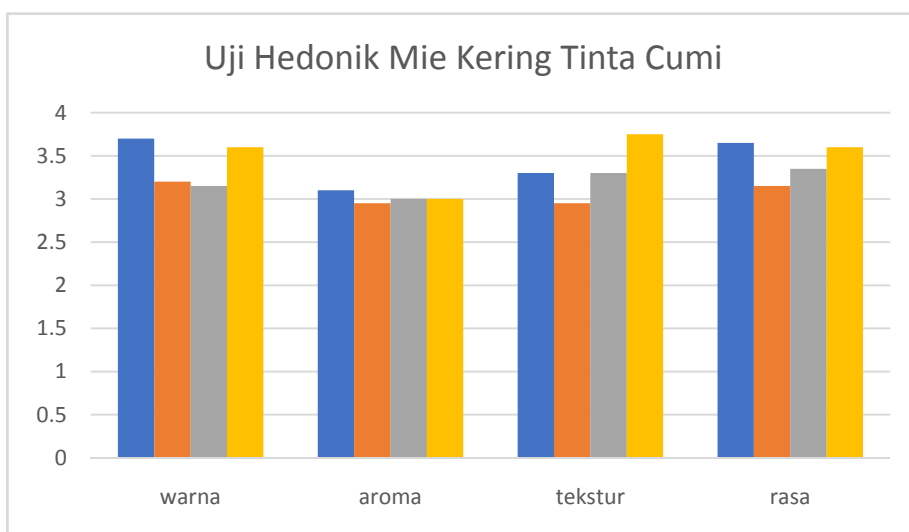
Penyimpanan mie kering yang terbuat dari bahan baku tepung terigu, tepung ikan dan tepung mocaf disimpan pada suhu ruang dalam plastik yang *disealer* masih bertahan selama 55 hari tanpa adanya perubahan fisik dari mie kering tersebut. Hasil pengamatan mie kering setiap 5 hari sekali terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengamatan Masa Simpan Mie Kering

Hari	Sensoris	P0	P1	P2	P3
H 0	Pertumbuhan kapang negatif (-) bau mie kering ikan, warna coklat dan hitam mengkilat.	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan
H 5	Pertumbuhan kapang negatif (-) bau mie kering ikan, warna coklat dan hitam mengkilat	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan
H 10	Pertumbuhan kapang negatif (-) bau mie kering ikan, warna coklat dan hitam mengkilat	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan
H 15	Pertumbuhan kapang negatif (-) bau mie kering ikan, warna coklat dan hitam mengkilat	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan
H 20	Pertumbuhan kapang negatif (-) bau mie kering ikan, warna coklat dan hitam mengkilat	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan
H 25	Pertumbuhan kapang negatif (-) bau mie kering ikan, warna coklat dan hitam mengkilat	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan
H 30	Pertumbuhan kapang negatif (-) bau mie kering ikan, warna coklat dan hitam mengkilat	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan
H 35	Pertumbuhan kapang negatif (-) bau mie kering ikan, warna coklat dan hitam mengkilat	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan
H 40	Pertumbuhan kapang negatif (-) bau mie kering ikan, warna coklat dan hitam mengkilat	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan
H 45	Pertumbuhan kapang negatif (-) bau mie kering ikan, warna coklat dan hitam mengkilat	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan
H 50	Pertumbuhan kapang negatif (-) bau mie kering ikan, warna coklat dan hitam mengkilat	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan
H 55	Pertumbuhan kapang negatif (-) bau mie kering ikan agak menyengat, warna coklat dan hitam mengkilat	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan	Spesifik Mie ikan

d. Uji Kesukaan

Pada uji kesukaan atau uji hedonik dilakukan kepada setiap panelis untuk diminta tanggapan dari dirinya pribadi tentang suka atau tidak sukanya terhadap produk yang dibuat. Selain untuk menilai panelis juga diminta untuk mengemukakan pendapatnya terhadap tingkat kesukaannya. Menurut Setyaningsih, *et al.* (2010), penggunaan skala hedonik dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan, sehingga uji hedonik sering digunakan untuk menilai secara organoleptik, produk pengembangan ataupun produk akhir. Pada penelitian ini menggunakan skala hedonik 1-5 dengan keterangan 1 untuk sangat tidak suka, 2 untuk tidak suka, 3 untuk netral, 4 untuk suka, dan 5 untuk sangat suka. Pengujian dilakukan kepada panelis tidak terlatih sebanyak 20 orang. Grafik hasil uji kesukaan ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Uji Hedonik Mie Kering Ikan Tinta Cumi

e. Analisis Usaha

Menurut Afiati (2017), keuntungan atau pendapatan bersih dalam usaha merupakan besarnya penerimaan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi baik biaya tetap maupun biaya tidak tetap. Laba adalah informasi potensial yang terdapat di dalam laporan keuangan yang sifatnya sangat penting untuk pihak internal atau eksternal perusahaan. Menurut Mulyadi (2005), biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk untuk menghitung biaya produk yang pada akhir periode akuntansi masih dalam proses. Dalam kegiatan produksi terdapat pengeluaran biaya-biaya diantaranya:

- *Biaya Tetap (Fixed Cost)*

Menurut Cahyadi (2009), biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap, tidak tergantung pada perubahan tingkat kegiatan dalam menghasilkan produk dalam interval tertentu. Biaya tetap yang dikeluarkan dalam produksi pembuatan mi kering yaitu Rp. 565.348,00.-. Biaya tetap dalam penggunaannya tidak habis dalam satu masa produksi, antara lain: biaya penyusutan, tenaga kerja, sewa mesin dan lain-lain.

- *Biaya Tidak Tetap (Variable Cost)*

Menurut Cahyadi (2009), biaya tidak tetap merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat produksi. Biaya tidak tetap dalam pengeluarannya habis dalam satu kali produksi. Titik berat dari biaya tidak tetap adalah jumlah dari biaya tidak tetap tersebut. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan dalam produksi pembuatan mie kering yaitu Rp. 1.671.360,00.

- *Total Pendapatan*

Total pendapatan merupakan keseluruhan biaya yang harus didapatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu modal usaha. Total biaya pendapatan dalam usaha pembuatan mie kering ikan selama satu bulan yaitu sebesar Rp. 3.360.000,00.

- *Payback Period*

Menurut Cahyadi (2009), *payback period* adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa waktu pengembalian modal usaha atau periode untuk menutup kembali pengeluaran investasi yaitu selama kurang lebih 1 bulan 13 hari.

- *B/C Ratio*

Menurut Nurhasanah (2008) perhitungan B/C Ratio untuk menentukan kelayakan suatu usaha. Usaha belum dikatakan untung apabila nilainya 1, sehingga perlu dilakukan pembenahan, karena semakin kecil hasil perhitungan B/C Ratio maka perusahaan akan semakin menderita kerugian. Analisis B/C Ratio pada pembuatan mie kering dengan penambahan warna dari tinta cumi-cumi lebih dari 1, sehingga dapat dikatakan usaha pembuatan mi kering ini layak untuk diteruskan.

- *Break Event Point (BEP)*

Menurut Wijaya (2008), *Break Event Point* adalah analisis untuk menghitung hubungan antara biaya tetap, biaya *variable*, keuntungan dan biaya produksi. Perhitungan BEP ini digunakan untuk menentukan batas minimum volume penjualan agar suatu perusahaan tidak rugi. BEP dapat

dihitung ketika sudah diketahui jumlah total biaya tetap, biaya variabel per unit atau total *variable* hasil penjualan total atau harga per unit. BEP akan meningkat, dan akan menurun bila biaya tetap juga turun, begitu juga pada perubahan biaya variabel per unit. Harga jual per unit dinaikkan dapat menurunkan tingkat BEP dan sebaliknya. Menurut Hansen dan Mowen (2005), titik impas multi produk dalam unit akan tercapai dengan nilai titik impas dalam rupiah dengan harga jual gabungan masing-masing jenis produk. Dalam artian titik impas multi produk akan tercapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemanfaatan tinta cumi-cumi (*Loligo sp.*) sebagai pewarna alami pada pembuatan mie kering dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Konsentrasi penambahan tinta cumi-cumi dalam pembuatan mie kering yang paling disukai panelis yaitu dengan penambahan konsentrasi tinta cumi-cumi 2 gr. Tingkat kesukaan panelis P0=3,43 (netral), P1=3,12 (netral), P2=3,13 (netral), dan P3=3,56 (agak suka).
- 2) Daya rehidrasi pada mie kering yang ditambahkan warna dari tinta cumi-cumi berpengaruh nyata, sedangkan *cooking loss* pada mie kering ini tidak berpengaruh nyata.
- 3) Analisis usaha dari pembuatan mie kering ini sudah layak untuk dilanjutkan, karena dalam suatu usaha apabila B/C ratio sudah 1 atau lebih dari 1 usaha tersebut layak untuk dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, S. 2017. *Dalam Jurnal Primyastanto dan Istikharah Proses Pembuatan Otak-Otak Ikan Swanggi di UKM Fania Food*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Anonim. 2008. *Teknologi Pembuatan Mie Skala Industri Rumah Tangga*. Dalam Jurnal Murniyati Pengolahan Mie Yang Difortifikasi Dengan Ikan Dan Rumput Laut Sebagai Sumber Protein, Serat Kasar, Dan Iodium. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2009.
- Astawan, M. 2008. *Khaksiat Warna-Warni Makanan*. Dalam Jurnal Agusandi (2013). Pengaruh Penambahan Tinta Cumi-Cumi (*Loligo sp.*) Terhadap Kualitas Nutrisi Dan Penerimaan Sensoris Mi Basah.
- Astawan, M. 2010. *Membuat Mie dan Bihun*. Dalam Jurnal Kajian Pemanfaatan Limbah Tinta Cumi-Cumi Sebagai Pewarna Alami Mie Basah Dengan Bahan Pengikat Berbeda Terhadap Penerimaan Konsumen. Penebar Swadaya. Jakarta.

- Cahyadi, E. 2009. *Analisis Kelayakan Usaha Penangkapan Ikan Cakalang Ditinjau Dari Aspek Teknis Dan Finansial Dengan Huhate (Pole and Line) Pada Km. Flotim 21 Di Unit Plasma PT. Okhisin Larantuka NTT*. Karya Ilmiah Praktik Akhir. Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan. Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.
- Hansen D.R., Maryanne M. Mowen. 2005. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta.
- Mukholik. 1995 Dalam Jurnal Agusandi (2013). *Pengaruh larutan tinta cumi - cumi dan suhu perebusan terhadap air rebusan cumi-cumi*. Pengaruh Penambahan Tinta Cumi-Cumi (*Loligo sp*) Terhadap Kualitas Nutrisi Dan Penerimaan Sensoris Mi Basah. Skripsi S1. Institut Pertanian Bogor. (tidak dipublikasikan).
- Mulyadi. 2005. *Akuntansi Biaya*. Edisi Kelima. Yogyakarta : UPPAMP YKPN Universitas Gajah Mada.
- Nurhasanah. 2008. *Kelayakan Usaha Pengolahan Krupuk Cumi Di UD. Pelangi Sari, Banyuwangi, Jawa Timur*. KIPA TPHP. STP Jakarta.
- Romlah. Haryadi. 1997. Dalam Jurnal Agroteknologi (2017). *Pengujian Daya Rehidrasi*. Karakteristik Mie Kering Terbuat dari Tepung Sukun. Vol. 11 No. 01.
- Setyaningsih, D.,P. Mayadan A.Anton. 2010. *Analisis Sensori untuk Industri Pangan dan Agro*. IPB Press. Bogor.
- Utiya, L.B. 2017. Karakteristik Mie Kering Terbuat Daritepung Sukun (*Artocarpus Altilis*) Dan Penambahan Telur. Jurnal Agroteknologi Vol. 11.
- Wijaya, P. 2008. *Pengolahan Permen Rumput Laut Serta Analisis Finansial Dan Strategi Pengembangan Usaha Di UD. Rukyaiyah, Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Karya Ilmiah Praktik Akhir. Jurusan TPHP STP Jakarta.

RELIGIUSITAS BAURAN PEMASARAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PERSEPSI NASABAH

Sugeng Nugroho Hadi

PENDAHULUAN

Sebuah produk (*product*) baik barang maupun jasa memerlukan beberapa aspek lain untuk bisa dipasarkan dan dijual ke pasar. Di mana pasar (*market*) adalah titik kumpul semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan (*need*) dan keinginan (*wants*) tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu. Adapun aspek atau alat yang diperlukan untuk memasuki pasar, selain produk adalah harga (*price*), distribusi (*place*), dan promosi (*promotion*). Selanjutnya kombinasi keempat alat pemasaran (*marketing tools*) tersebut lebih dikenal dengan istilah bauran pemasaran (*marketing mix*). Artinya, ketika sebuah produk ditawarkan ke pasar memerlukan informasi harga (*price*), di mana bisa dibeli atau diperoleh (*place*), dan sosialisasi produk (*promotion*).

Koter dan Keller (2007) menyatakan penting dan strategisnya fungsi pemasaran. Dalam perusahaan, keberhasilan keuangan tergantung pada kemampuan pemasaran. Operasi keuangan, akunting, dan fungsi bisnis lain sesungguhnya tidak berarti jika tidak ada permintaan akan produk sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba. Perusahaan yang paling berisiko adalah perusahaan yang gagal memantau secara cermat pelanggan dan pesaing mereka, dan terus-menerus memperbaiki tawaran nilai mereka. Oleh sebab pemasaran merupakan proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan *need* dan *wants* dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

Secara akademik, Magil (1993), Glock & Stark (1969), dan Dister (1982) memberi pengertian religiusitas dengan intensitas cara seseorang untuk menjadi seorang beragama atau keterikatan seseorang terhadap agamanya, atau seseorang yang sudah bertingkah laku sesuai dengan agamanya menunjukkan adanya unsur internalisasi agama dalam diri seseorang. Berdasarkan pengertian religiusitas di atas, maka religiusitas pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah seberapa besar sebuah LKS memiliki komitmen untuk melakukan internalisasi nilai-nilai Islam dalam seluruh

aspek operasionalnya. Sehingga sebuah LKS itu Islami dalam manajemen sumber daya manusia, Islami dalam manajemen operasi, Islami dalam manajemen keuangan, dan Islami dalam manajemen pemasaran.

Bagi perusahaan ketika membuat produk, menetapkan harga, memilih saluran distribusi serta menawarkan produknya ke pasar tentunya tidak bisa meninggalkan nilai-nilai etik (etika), yaitu seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Dalam Islam, istilah yang berdekatan dengan makna etika adalah *khuluq*. Qur'an menggunakan sejumlah istilah untuk menggambarkan konsep tentang kebenaran: *khayr* (kebaikan), *birr* (keebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut *sayyi'at*. (Beekun, 2004).

Dalam pandangan Taha Jabir al-Alwani (2005:4) etika adalah “model perilaku yang hendaknya diikuti untuk mengharmonisasikan hubungan manusia, meminimalkan penyimpangan, dan berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat.” Bagi seorang Muslim, etika atau *akhlaq* itu merupakan aspek religiusitas pada tataran *habluminannas*, sedang ibadah adalah aspek religiusitas pada tataran *habluminallah*.

KSPPS BMT Binamas adalah “BMT pertama dan terbesar di Purworejo” demikian *tageline* yang mereka gunakan dalam iklan di Radio Binamas FM. Sebagai LKS mikro, KSPPS BMT Binamas memiliki komitmen tinggi untuk membangun kelembagaannya menjadi lembaga bisnis Islam yang sebenarnya dan berkemajuan. Maka program Mabit (**M**alam **B**ina **I**man dan **T**aqwa) bagi karyawannya diselenggarakan setiap bulan dan semua karyawan wajib ikut. Manajemen akan mengenakan sanksi-sanksi tertentu bagi karyawan yang bolos Mabit dengan tanpa alasan syar'i. Dari kepribadian karyawan yang utuh Islami diharapkan semua operasional kelembagaan juga Islami. Termasuk aspek pemasaran (*marketing*) yang dilakukan.

Sulaiman Wahab (2013) dalam penelitian dengan judul: “Marketing dan Religi Terhadap Minat Masyarakat” menemukan bahwa Religi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah, di samping faktor bauran pemasaran 4-P. Sementara Fajri, Arifin, dan Wilopo dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Menabung (Survei Pada Nasabah Bank Muamalat Cabang Malang) menemukan bahwa bauran pemasaran secara simultan berpengaruh terhadap keputusan menabung. Sementara dari aspek-P yang paling dominan mempengaruhi keputusan menabung adalah *Product*.

Kedua penelitian di atas merupakan penelitian kausalitas atau dampak *marketing mix* 4-P maupun 7-P terhadap minat masyarakat menjadi nasabah

dan atau menabung di bank syariah. Sementara penelitian ini mengukur terhadap religiusitas atau kesyariahan aspek *marketing mix* 4-P dalam persepsi nasabah. Apakah dalam penilaian nasabah aspek *product, price, place, dan promotion* pada BMT Binamas telah memenuhi kepatuhan syariah (*shariah compliance*)?

Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan impresi sensorisnya supaya dapat memberikan arti kepada lingkungan sekitarnya (Robin, 1993). Ada beberapa contoh perbedaan persepsi antar pihak. Misal, seringkali para manajer menganggap bahwa bawahan itu selalu ingin dipromosikan. Kenyataannya, banyak bawahan merasa dipaksa untuk menerima promosi yang kurang tepat (Muchlas, 2012:111). Penelitian ini dilakukan untuk melihat persepsi nasabah terhadap aspek religiusitas *marketing mix* pada BMT Binamas Purworejo. Kuat dugaan, manajemen merasa *marketing mix* mereka telah berada di jalur syariah, namun ternyata dalam persepsi nasabah justru tidak syar'i. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap religiusitas bauran pemasaran: produk, harga, lokasi dan layout kantor, dan promosi pada KSPPS BMT Binamas Purworejo. Sudah memenuhi kepatuhan aspek syariahkah?

PEMBAHASAN

Metode Penelitian

Artikel ini dirilis dari laporan penelitian penulis dengan judul: "Persepsi Nasabah Terhadap Religiusitas bauran Pemasaran Pada KSPPS BMT Binamas Purworejo." Di mana dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, sementara jenis penelitiannya adalah *field study* yang didukung dengan data survei. Adapun sifat penelitiannya adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan sifat keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan melalui pemeriksaan sebab-sebab gejala tersebut. Dalam hal ini adalah persepsi nasabah KSPPS BMT Binamas Purworejo terhadap gejala-gejala religiusitas bauran pemasaran mereka.

Populasi penelitian adalah nasabah KSPPS BMT Binamas Purworejo. Oleh karena jumlah populasi yang terlalu besar, maka dalam penelitian ini ditetapkan sample sejumlah 100 nasabah yang dihitung berdasarkan rumus Isaac Michel dengan menganggap jumlah sampel tak terduga. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah *nonprobability accidental sampling*. Meringat penelitian ini adalah penelitian kuantitatif maka data utama dikumpulkan dengan menggunakan angket atau kuesioner, dengan memberikan pilihan jawaban dalam lima skala Likert.

Ada empat variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, yaitu aspek religiusitas pada model bauran pemasaran pada KSPPS BMT Binamas, yaitu: Produk, Harga, Lokasi dan *layout*, dan Promosi. Oleh sebab penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka tidak ada pengukuran hubungan antar variabel, akan tetapi pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah ukuran kesyariahan (religiusitas) pada produk, harga, lokasi dan layout, dan promosi.

Adapun operasional variabel-variabel dalam penelitian ini dijabarkan dalam definisi dan konstrak sebagaimana berikut:

1. Produk (X_1) adalah anggapan nasabah tentang kesyariahan produk, yakni atribut jasa keuangan KSPPS BMT yang disukai berdasarkan kepuasan yang diperoleh, di mana pengukuran kesyariahan produk berdasar nama, transaksional (akad), dan kemanfaatan produk (tabungan dan pembiayaan).
2. Harga (X_2) adalah anggapan nasabah tentang kesyariahan harga, yakni ukuran harga jasa di KSPPS BMT Binamas Purworejo terkait tingkat nisbah dan imbal kesejahteraan anggota.
3. Lokasi dan *layout* (X_3) adalah anggapan nasabah tentang kesyariahan lokasi dan *layout* perkantoran KSPPS BMT Binamas Purworejo terkait arsitektur gedung, keamanan perkantoran, ketersediaan tempat ibadah, dan ketersediaan toilet bersih dan nyaman.
4. Promosi (X_4) adalah anggapan nasabah tentang kesyariahan aspek promosi KSPPS BMT Binamas Purworejo terkait kejujuran iklan, tingkat bonafiditas, publisitas, dan kemampuan mempengaruhi atau meyakinkan nasabah.

Ada dua kriteria analisis dalam penelitian ini. Ke satu, analisis deskriptif untuk mengolah data karakteristik responden dan nilai *range* skoring kuesioner. Nilai *range* dihitung menggunakan skala Likert dengan bobot tinggi pada setiap pertanyaan adalah 5 (lima) dan bobot terendah adalah 1 (satu). Selanjutnya akan diperoleh *range* skor: Sangat rendah dengan skor 100-180; Rendah dengan skor 181-260; Cukup dengan skor 261-340; Tinggi dengan skor 341-420; Sangat tinggi dengan skor 421-500.

Kedua, analisis Uji Hipotesis. Hipotesis merupakan kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. Pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis dimaksud dengan data di lapangan. Dalam penelitian kuantitatif hipotesa yang diuji adalah Hipotesis nol (H_0) atau sering disebut hipotesis statistik. Oleh karenanya pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian statistik sehingga relatif mendekati suatu kebenaran yang diharapkan. H_0 merupakan salah satu format rumusan hipotesis untuk memberikan kemungkinan tidak adanya perbedaan antara ekspektasi peneliti

dengan fenomena yang diteliti. Kemungkinan sebaliknya: ada perbedaan antara ekspektasi peneliti dengan data yang dikumpulkan, dirumuskan dalam format hipotesis alternatif (H_1).

Chi kuadrat (χ^2) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas, data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Yang dimaksud hipotesis deskriptif disini bisa merupakan estimasi/dugaan terhadap ada tidaknya perbedaan frekuensi antara kategori satu dan kategori lain dalam sebuah sampel tentang sesuatu hal. Dalam penelitian ini Uji Chi Square (χ^2) dilakukan untuk mendapatkan taraf signifikansi dari persepsi nasabah terhadap religiusitas aspek bauran pemasaran KSPPS BMT Binamas Purworejo. Untuk selanjutnya hasil penghitungan tersebut akan dibandingkan dengan taraf signifikansi ketepatan untuk membuat keputusan diterima tidaknya hipotesis penelitian.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS *for Windows* Versi 23. Untuk analisis karakteristik responden diolah secara manual, sementara taraf signifikansi variabel dianalisis dengan program *nonparametric statistic Chi Square*.

Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian mendapatkan data yang valid dan reliabel merupakan kunci masuk analisis data untuk mendapatkan hasil penelitian secara sah. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu instrumen penelitian mengukur dengan benar apa yang akan diukur. Validitas atau kesahihan data dinyatakan dengan membanding nilai koefisien *product moment* hitung dengan nilai koefisien *product moment* tabel (0,195). Jika koefisien *product moment* hitung lebih besar dari koefisien *product moment* tabel maka data dinyatakan valid.

Hasil uji validitas terhadap 15 instrumen penelitian yang terdiri dari tiga instrumen untuk mengukur religiusitas variabel produk, empat instrumen untuk mengukur religiusitas variabel harga, empat instrumen untuk mengukur religiusitas variabel lokasi dan *layout*, dan empat instrumen untuk mengukur religiusitas variabel promosi; diperoleh hasil nilai *product moment* hitung terendah adalah sebesar 0,619 pada instrumen keempat variabel harga, dan tertinggi adalah 0,847 pada instrumen ketiga variabel promosi. Oleh karena nilai seluruh koefisien *product moment* lebih besar dari 0,195 maka data penelitian dinyatakan valid.

Reliabilitas menunjukkan tingkat keterandalan tertentu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kemantapan atau kekonsistenan suatu instrumen suatu instrumen penelitian mengukur apa yang hendak diukur. Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan nilai *Cronbach Alpha* (α), di mana

instrumen dinyatakan reliabel jika nilai α lebih besar dari 0,6. Uji reliabilitas memperoleh α masing-masing: produk (0,706), harga (0,608), lokasi dan *layout* (0,605), dan promosi (0,758). Dengan demikian, instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel.

Selanjutnya untuk meyakini kualitas hasil penelitian bisa dilihat dari profil atau karakteristik responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah anggota atau Nasabah KSPPS BMT Binamas Purworejo sebanyak 100 responden. Terdapat lima karakteristik responden penelitian, yaitu jenis kelamin, pendidikan, usia, penghasilan, masa keanggotaan. Melalui analisis deskriptif dari sejumlah 100 responden yang terdiri dari 56% Pria dan 44% Wanita diperoleh karakteristik responden sebagai berikut:

1. Sejumlah 16% nasabah berpendidikan SD; 13% SMP; 49% SMA; 3% Diploma; dan 14% Sarjana.
2. Sejumlah 7% nasabah dengan lama keanggotaan 1 s/d 3 tahun; 12% nasabah selama 3 s/d 6 tahun; 30% nasabah selama 6 s/d 9 tahun; dan 39% selama lebih dari 9 tahun.
3. Sejumlah 12% nasabah berpenghasilan <Rp. 1.000.000,-; 39% berpenghasilan Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.500.000,-; 16% berpenghasilan Rp 2.500.000,- s/d Rp 4.000.000,-; dan % nasabah berpenghasilan lebih dari Rp 4.000.000,-
4. Sejumlah 15% nasabah berusia kurang dari 20 tahun; 30% berusia 20 s/d 30 tahun; 29% nasabah berusia 30 s/d 40 tahun; dan 26% nasabah berusia lebih dari 40 tahun.

Sementara bagaimana karakteristik kesyariahan bauran pemasaran pada KSPPS BMT Binamas Purworejo dapat dilihat dari persepsi nasabah melalui pilihan-pilihan jawaban pada kuesioner penelitian. Pertama, hasil analisis persepsi nasabah terhadap religiusitas aspek bauran pemasaran produk memperoleh *range* skor sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Skor *Range* Instrumen Variabel Produk (X₁)

Kode Pertanyaan/Indikator		Skor					Nilai Indeks	Ket
		SS	S	KS	TS	STS		
		5	4	3	2	1		
X ₁₁	Produk-produk KSPPS BMT Binamas diberinama sesuai dengan akad syariahnya	6 30	79 316	4 8	- -	- -	387	Tinggi
X ₁₂	Saya yakin akad-akad produk KSPPS BMT Binamas sesuai syariah Islam	4 20	92 368	4 12	- -	- -	400	Tinggi
X ₁₃	Transaksional produk KSPPS BMT Binamas sesuai akadnya	7 35	88 352	4 12	1 2	- -	489	Tinggi

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2019

Skor *range* untuk tiga instrumen pengukuran pada variabel produk sebagaimana Tabel 1 di atas. Terlihat skor tertinggi diperoleh instrumen X_{13} dengan skor 489 (tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa dalam persepsi nasabah “Transaksional produk BMT Binamas sesuai akadnya” merupakan sesuatu yang *syar’iyah* atau religiusitas, sebab transaksional produk pada lembaga keuangan syariah didasarkan pada akad muamalahnya.

Kedua, hasil analisis persepsi nasabah terhadap religiusitas aspek bauran pemasaran harga (X_2) diperoleh *range* skor sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Skor *Range* Instrumen Variabel Harga (X_2)

Kode Pertanyaan/Indikator		Skor					Nilai Index	Ket
		SS	S	KS	TS	STS		
		5	4	3	2	1		
X_{21}	Tingkat bagi hasil dalam produk tabungan KSPPS BMT Binamas cukup membanggakan	4 20	52 204	23 69	21 42	- -	335	Tinggi
X_{22}	Angsuran dan atau margin pada produk pembiayaan BMT Binamas tidak memberatkan	6 30	82 328	8 24	4 8	- -	390	Tinggi
X_{23}	Nominal biaya administrasi pembiayaan pada KSPPS BMT Binamas wajar-wajar saja	9 45	87 348	4 12	- -	- -	405	Tinggi
X_{24}	KSPPS BMT Binamas meminjamkan mobil Ambulance secara gratis kepada Anggota dan Masyarakat yang membutuhkan	10 50	83 332	6 18	1 2	- -	402	Tinggi

Skor *range* pengukuran untuk empat instrumen variabel produk dalam penelitian sebagaimana Tabel 2 di atas. Terlihat skor tertinggi diperoleh instrumen X_{23} dengan skor 405 (tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa dalam persepsi nasabah adanya “Nominal biaya administrasi pembiayaan pada BMT Binamas wajar-wajar saja” merupakan sesuatu yang *syar’iyah* atau religius, sebab salah satu prinsip utama dalam bisnis Islam adalah adil, tidak memberatkan.

Ketiga, hasil analisis persepsi nasabah terhadap religiusitas aspek bauran pemasaran lokasi dan *layout* (X_3) diperoleh *range* skor sebagaimana tabel 3.

Terlihat bahwa untuk empat instrumen pengukuran variabel Lokasi dan *layout* sebagaimana Tabel 3 di bawah, skor tertinggi diperoleh instrumen X_{33} dengan skor 401 (tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa dalam persepsi nasabah adanya “Perkantoran BMT Binamas memiliki fasilitas ibadah yang cukup bersih dan baik” merupakan sesuatu yang *syar’iyah* atau religius, sebab sebuah lembaga keuangan syariah harus tersedia fasilitas ibadah yang dalam hal ini adalah mushola atau masjid sehingga memberikan ketenteraman nasabah untuk dapat menunaikan sholat tepat waktu.

Tabel 3. Skor *Range* Instrumen Variabel Lokasi dan *Layout* (X_3)

Kode Pertanyaan/Indikator		Skor					Nilai Indeks	Ket
		SS	S	KS	TS	STS		
		5	4	3	2	1		
X ₃₁	Lokasi perkantoran BMT Binamas mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi	4 20	54 216	23 69	19 38	- -	343	Tinggi
X ₃₂	Bangunan kantor BMT Binamas berarsitektur Islami	6 30	81 324	10 30	3 6	- -	390	Tinggi
X ₃₃	Kantor BMT Binamas memiliki fasilitas ibadah yang cukup bersih dan baik	9 45	84 336	6 18	1 2	- -	401	Tinggi
X ₃₄	Karyawan BMT Binamas menyambut nasabah (tamu) dengan senyum dan sapa ssalamu'aikum	8 40	84 336	7 21	1 2	- -	399	Tinggi

Keempat, hasil analisis persepsi nasabah terhadap religiusitas aspek bauran pemasaran promosi (X_4) diperoleh *range* skor sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Skor *Range* Instrumen Variabel Promosi (X_4)

Kode Pertanyaan/Indikator		Skor					Nilai Indeks	Ket
		SS	S	KS	TS	STS		
		5	4	3	2	1		
X ₄₁	Bahasa iklan BMT Binamas jujur, mudah dimengerti, dipahami, dan dilakukan	8 40	91 364	1 3	- -	- -	407	Tinggi
X ₄₂	Musik dan lagu yang menjadi latar belakang iklan di Radio Binamas FM Islami	6 30	89 356	5 15	- -	- -	401	Tinggi
X ₄₃	Iklan radio dan iklan lain KSPPS BMT Binamas sangat meyakinkan dan memotivasi untuk bertransaksi	4 20	80 320	14 42	2 4	- -	386	Tinggi
X ₄₄	KSPPS BMT Binamas adalah BMT pertama dan terbesar di Purworejo	5 25	78 312	15 45	2 4	- -	386	Tinggi

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2020

Demikian juga halnya dengan religiusitas promosi KSPPS BMT Binamas yang diukur dengan menggunakan instrumen variabel X_4 . Instrumen X_{41} dengan pernyataan “Bahasa iklan KSPPS BMT Binamas jujur, mudah dimengerti, dipahami, dan dilakukan” memperoleh skor 407 (tinggi) merupakan skor *range* tertinggi di antara tiga instrumen lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa bahasa iklan atau promosi KSPPS BMT Binamas bersifat jujur dan komunikatif sehingga mudah dimengerti, dipahami, dan dilakukan. Sementara kejujuran merupakan salah satu dimensi religiusitas Islam.

Persepsi dalam penelitian ini adalah penilaian nasabah KSPPS BMT Binamas Purworejo terhadap religiusitas bauran pemasaran 4P, yaitu produk (*product*), harga (*price*), lokasi dan layout (*place*), dan promosi (*promotion*). Uji *Chi Square* dalam analisis ini digunakan untuk mengambil keputusan terhadap hipotesis penelitian. Jika signifikansi hitung lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, namun jika lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Uji *Chi Square* dilakukan berdasarkan persepsi jawaban nasabah: Sangat setuju (SS), Setuju (S), Kurang setuju (KS), Tidak setuju (TS), dan Sangat tidak setuju (STS); yang dalam proses analisis manualnya akan dibandingkan antara nilai observasi dan nilai ekspektasi dari persepsi nasabah. Dalam penelitian ini analisis *Chi Square* dilakukan dengan menggunakan software SPSS *for Windows* versi 23 di mana hasil analisis akan mendapatkan nilai koefisien *Chi Square* dan nilai signifikansi. Uji hipotesis dilakukan berdasarkan nilai signifikansi. Adapun data skoring persepsi nasabah yang diambil dari pilihan jawaban kuesioner penelitian, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Persepsi Religiusitas Bauran Pemasaran 4P

No	Variabel	Skor Persepsi dari Observasi				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Produk	85	1036	58	10	0
2	Harga/Price	145	1212	123	52	0
3	Lokasi dan Layout/Place	135	1212	139	48	0
4	Promosi	115	1352	105	8	0

Uji Hipotesis persepsi religiusitas produk pada KSPPS BMT Binamas dilakukan berdasarkan nilai observasi SS (85), S (1036), KS (58), dan TS (10). Sementara nilai ekspektasinya adalah 297,3. Selanjutnya Uji *Chi Square* memperoleh koefisien religiusitas produk sebesar 2457.712 dengan signifikansi 0.000. Hal ini menyatakan bahwa uji hipotesis menerima H_1 dan menolak H_0 , artinya “Nasabah berpersepsi Produk BMT Binamas religius atau sesuai syariah”.

Uji Hipotesis persepsi religiusitas harga pada KSPPS BMT Binamas dilakukan berdasarkan perolehan nilai observasi SS (145), S (1212), KS (123), dan TS (52). Sedangkan nilai ekspektasi nasabah sebesar 383,3. Melalui perhitungan statistika diperoleh koefisien *Chi Square* sebesar 2404.820 dengan signifikansi 0.000. Hal ini menyatakan bahwa frekuensi observasi persepsi nasabah terhadap religiusitas Harga BMT lebih besar dari frekuensi ekspektasi. Dengan demikian maka hasil ini mendukung dalam pengambilan keputusan untuk menerima H_1 dan menolak H_0 ; artinya: “Nasabah berpersepsi Harga BMT Binamas Purworejo religius atau sesuai syariah”.

Uji Hipotesis persepsi religiusitas lokasi dan *layout* pada KSPPS BMT Binamas dilakukan berdasarkan perolehan data ekspektasi nasabah sebesar 383,5 dengan nilai observasi SS (135), S (1212), KS (139), dan TS (48). Selanjutnya analisis *Chi Square* memperoleh koefisien sebesar 2400.274 dengan signifikansi 0.000. Hal ini menyatakan bahwa frekuensi observasi persepsi nasabah terhadap religiusitas lokasi dan *layout* BMT Binamas yang memiliki nilai lebih besar dari frekuensi ekspektasi. Hasil ini mendukung dalam pengambilan keputusan untuk menerima H_1 dan menolak H_0 , artinya: "Nasabah berpersepsi Lokasi dan *layout* kantor BMT Binamas Purworejo religius atau sesuai syariah".

Uji Hipotesis religiusitas promosi pada KSPPS BMT Binamas dilakukan berdasarkan perolehan angka ekspektasi sebesar 395.5. Sementara nilai observasinya SS (115), S (1352), KS (105), dan TS (8). Selanjutnya analisis *Chi Square* memperoleh koefisiensi sebesar 3109.159 dengan signifikansi 0.000. Hal ini mengindikasikan bahwa frekuensi observasi persepsi nasabah terhadap religiusitas BMT Binamas memperoleh nilai lebih besar dari frekuensi ekspektasi. Hasil ini mendukung dalam pengambilan keputusan untuk menerima H_1 dan menolak H_0 penelitian ini, artinya: "Nasabah berpersepsi Promosi BMT Binamas Purworejo adalah religius atau sesuai syariah".

Studi terkait aspek religiusitas bauran pemasaran, dari sisi referensi teori masih kurang atau bahkan belum ada. Aspek religiusitas pemasaran sebagaimana ditulis oleh Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula dalam bukunya *Syariah Marketing* lebih cenderung menyatakan dengan etika pemasaran syariah. Dalam buku tersebut keduanya memberi referensi baku tentang etika pemasaran syariah sebagai menggabungkan prinsip maksimisasi nilai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai kesejahteraan semesta dalam etika pemasaran tersebut ada empat. *Ke satu*, Ketuhanan (*rabbaniyyah*), bahwa pemasaran dinyatakan mematuhi aspek syariah manakala bersifat religius, yakni satu keyakinan bahwa hukum-hukum syari'at merupakan hukum yang paling adil dan paling sempurna, dan perasaan bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Aqidah (tauhid) menjadi kontrol perilaku manajemen dalam bisnis.

Ke dua, Etis (*akhlaqiyyah*), bahwa pemasaran dinyatakan memiliki kepatuhan syariah manakala perilaku pemasaran bisnis mengedepankan nilai-nilai akhlak (moral dan etika) dalam seluruh aspek kegaitannya. *Ketiga*, Realistis (*al-waqi'iyah*), bahwa pemasaran dinyatakan memenuhi aspek kepatuhan syariah manakala perilaku pemasaran bisnis memenuhi nilai-nilai yang fleksibel dalam koridor syariah, tidak eksklusif, tidak fanatis, anti modernitas, dan kaku. Mengingat nilai-nilai Islam bersifat *ya'lu walayu'la 'alaih* dan Allah memastikan untuk memenangkan terhadap semua paham terlepas dari sikap suka tidak sukanya orang-orang kafir. *Keempat*, Humanistis

(*insaniyyah*), bahwa pemasaran dinyatakan memenuhi aspek kepatuhan syariah manakala bersifat humanistik universal.

Keempat nilai-nilai tersebut di atas ditambah dengan referensi etika bauran pemasaran syariah yang digagas Herry Sutanto dan Khaerul Uman, dalam penelitian ini digunakan untuk membuat desain instrumen penelitian. Adapun aspek-aspek etika bauran pemasaran syariah dalam produk.

Penelitian ini memperoleh temuan bahwa religiusitas bauran pemasaran 4P pada BMT binamas dalam persepsi nasabah atau anggota/mitra adalah “religius” atau sesuai syariah Islam. Artinya keempat faktor bauran pemasaran: *product*, *price*, *place*, dan *promotion* diimplementasikan secara nyata pada aspek pemasaran BMT Binamas Purworejo. Temuan ini direkomendasikan oleh angka signifikansi uji hipotesis pada keempat variabel penelitian tersebut yang menunjukkan angka 0.000 atau sangat signifikan serta angka koefisien *Chi Square* yang lebih besar dari *Chi Square* tabel. Nilai *Chi Square* tabel dengan $df = 3$ dan $\alpha = 0.05$ adalah 7.815.

Temuan aspek religiusitas pada bauran pemasaran BMT Binamas Purworejo dalam penelitian ini semakin meyakinkan bahwa BMT sebagai lembaga keuangan syariah telah menjalankan misinya dengan benar. Hal ini merupakan perwujudan riil dari teori BMT yang dikemukakan oleh Suarsono (2003:96) sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Penelitian ini memang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi religiusitas atau nilai-nilai syariah menjiwai aspek bauran pemasaran pada lembaga keuangan syariah, khususnya pada BMT Binamas Purworejo. Sehubungan dengan itu maka hasil penelitian ini menjadi bukti riil atas teori bisnis Islamnya Ismail Yusanto dan Widjajakusuma (2002:18) yang menyatakan bahwa bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk *profitnya*, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Artinya, pada aspek produk, harga, lokasi dan *layout*, dan promosi BMT Binamas Purworejo telah menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syariah Islam. Dengan demikian maka hasil bisnis BMT Purworejo dalam segala aspeknya menjadi halal.

Jika menggunakan referensi etika bisnis Majid Fakhry (1996:12-13) yang menyoroti “etika” dari beberapa nomenklatur yang diisyaratkan oleh Al-Qur’an, yakni *khair* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qisth* (persamaan), *haqq* (kebenaran), dan *taqwa* (ketaqwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *shalihat* dan tindakan tercela disebut *sayyi’at*. Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini maka aspek bauran pemasaran 4P BMT Binamas Purworejo dari

persepsi nasabah adalah *shalihat*. Artinya prinsip-prinsip bauran pemasaran BMT Binamas Purworejo, selama periode penelitian ini, dalam persepsi nasabah bersifat *on the track*. Atau ketika dipotret dari aspek *moral hazard* dalam bisnis Islam maka temuan ini akan merekomendasikan bahwa tidak terjadi *moral hazard* (tindakan asusila) pada aspek bauran pemasaran BMT Binamas Purworejo.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang cenderung meneliti pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan menabung dan loyalitas nasabah. Detha Alfrian Fari, dkk (2013), dalam penelitiannya menemukan bahwa bauran pemasaran 7P berpengaruh terhadap keputusan menabung nasabah di Bank Muamalat Malang. Di mana produk merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh. Sulaiman Wahab (2013), meneliti aspek bauran pemasaran 4P dan religiusitas terhadap minat masyarakat menjadi nasabah di BNI Syariah Cabang Malang juga menemukan bahwa aspek produk, harga, lokasi, promosi, dan religi berpengaruh terhadap minat masyarakat menjadi nasabah. Di mana aspek religi menjadi variabel paling dominan yang mendorong minat masyarakat menjadi nasabah.

Jika hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut dikaitkan dengan temuan dalam penelitian ini maka akan menjadi peluang besar bagi KSPPS BMT Binamas akan terjadinya, (1) penguatan loyalitas nasabah terhadap lembaganya, dan (2) peningkatan jumlah nasabah oleh sebab keminatan masyarakat, setelah mengetahui bahwa aspek produk, harga, lokasi dan *layout*, dan promosinya telah religius atau sesuai dengan syariah Islam. Dengan demikian masyarakat akan merasa lebih tenang bertransaksi dan menjadi nasabah BMT Binamas Purworejo.

PENUTUP

Nasabah berpersepsi bahwa bauran pemasaran yang dilakukan oleh lembaga keuangannya, yaitu KSPPS BMT BMT Binamas Purworejo telah memenuhi aspek kepatuhan syariah atau religius baik dari segi produk, harga, lokasi dan *layout*, maupun promosi. Atas temuan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa manajemen pemasaran KSPPS BMT Binamas Purworejo telah *on the track* sehingga perolehan keuntungan dalam seluruh usahanya bersifat halal. Namun demikian manajemen KSPPS BMT Binamas Purworejo perlu terus menjaga nilai-nilai religiusitas atau kesyariahan pada aspek bauran pemasarannya, yakni aspek produk, aspek harga, aspek lokasi dan *layout*, aspek promosi. Ke depan perlu diteliti dan diuji ulang aspek religiusitas bauran pemasaran 4P dengan dimensi yang lebih luas, serta perlu dan penting pula dilakukan penelitian dengan obyek bauran pemasaran 7P.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, Nur Rianto. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta
- Arifin, Zainul. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ascarya. (2007). *Aqad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Beekun, Rafik Issa. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Alih bahasa oleh Muhammad, M.Ag. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswell, John W. (2015). *Research Deign Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Edisi Ketiga.
- Hasan, (Ali. 2009). *Marketing*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Husein, Umar. (2004). *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kasmir. (2008). *Pemasaran Bank*. Edisi Revisi. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kotler, Philip dan Kevin Keller. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kedua Belas. Jilid 1. Indonesia: PT Indeks.
- Kuat Ismanto & Nalim. (2019). Empirical Study of Community Interest to Islamic Insurance. TIFBR (Tazkia Islamic Finance and Business Review). Volume 13(2), 2019.
- Kuncoro, Mundrajad. (2008). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moh. Nasuka. (2019). *Konsep Marketing Mix Dalam Perspektif Islam: Suatu Pendekatan Maksimalisasi Nilai*. BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam. <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei>. Volume 05, Nomor 01, Juni 2020.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Rachman, Maman. (2015). *5 Pendekatan Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. Yogyakarta: Penerbit Magnum Pustaka Utama.
- Sudarsono, Heri. (2007). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia FE UII

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen, Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta,
- Suryani dan Hendryadi. (2016). *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Sutanto, Herry dan Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia.
- Buchari, Alma. (2005). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: CV Alfabeta. Jurnal
- Detha Alfrian Fari, Zainul Arifin, dan Wilopo. *Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Menabung (Survei Pada Nasabah Bank Muamalat Cabang Malang)*. Jurnal Administrasi dan Biaya (JAB), Vol. 6, No. 2, Desember 2013
- Sulaiman Wahab. *Marketing Dan Religi Terhadap Minat Masyarakat (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Malang)*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 1, No. 2, Agustus 2013
- Ratna Yulia Wijayanti dan Kertati Sumekar. *Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Loyalitas Anggota Pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Cabang Kudus*. Jurnal Analisis Manajemen, Vol. 3, No. 2, Juli 2009

UPAYA MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA TANGERANG MELALUI OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SEKTOR POTENSIAL

Erida Pratiwik, Yudha Dwi Kurniawan, Shinta Aulia Rani, Grace Natalia M

PENDAHULUAN

Pengangguran adalah merupakan sebutan untuk orang yang tidak berpnghasilan, karena tidak melakukan suatu pekerjaan, entah karena terpaksa ataupun disengaja. Penyebab terciptanya pengangguran normalnya karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan total pencari kerja, atau angkatan kerja terlalu besar. Tingginya angka pengangguran suatu negara akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan dampak sosial yang negatif. Contohnya tingkat kriminalitas yang meningkat. Ketika tingkat kriminalitas meningkat akan membuat iklim investasi di suatu negara menjadi buruk sehingga investor tidak berani berinvestasi di negara tersebut, Investasi mempunyai peranan penting dalam mengatasi masalah pengangguran.

Salah satu kota yang penganggurannya meningkat dari tahun 2015-2020 adalah Kota Tangerang. Kota yang terletak di sebelah barat DKI Jakarta ini mengalami peningkatan jumlah pengangguran tertinggi pada saat pandemi COVID-19. Hal itu terjadi karena banyaknya perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawan. Perekonomian di kota ini disokong oleh 16 sektor, mulai dari pertanian hingga jasa lainnya. Kontribusi sektor tersebut pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tentunya berbeda-beda. Tidak semua sektor memiliki kontribusi yang signifikan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diidentifikasi sektor-sektor yang tergolong unggulan, potensial, maupun terbelakang. Adanya identifikasi tersebut memungkinkan terlahir rumusan kebijakan yang tepat sasaran sehingga investasi atau alokasi dana tidak mengalami pemborosan. Jika masing-masing sektor dapat dikelola secara optimal sesuai porsinya, maka juga akan berdampak pada menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil dengan tujuan tertentu. Kebijakan terbagai menjadi banyak jenis sesuai dengan konteks yang dibahas, salah satunya kebijakan publik. Menurut Santosa dalam Faturahman (2017) menyatakan bahwa definisi dari kebijakan publik yaitu kebijakan yang sumber

daya utamanya adalah publik, dan diperuntukkan sepenuhnya bagi kepentingan publik. Dalam proses penetapan kebijakannya dilakukan pertimbangan pada banyak aspek, seperti pendapat publik, partai politik, lembaga peradilan, media massa, dan lainnya.

Sesuatu yang mencapai titik tertinggi atau kegunaan penuh dapat disebut sebagai optimal. Titik puncak atau optimal dari suatu objek dapat dicapai melalui suatu proses yang dinamakan optimalisasi. Poerdwadarminta dalam Rusmala (2020) mengartikan optimalisasi sebagai pencapaian hasil secara optimal melalui cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya, optimalisasi pengelolaan sektor perekonomian harus dilakukan melalui perencanaan yang strategis dan tepat sasaran agar tercapai kontribusi yang optimal sehingga target pencapaian dapat terpenuhi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan konsep pengangguran sebagai sekelompok angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau seseorang yang sukarela menganggur demi memperoleh pekerjaan lain yang relatif lebih baik atau seseorang yang sudah ingin bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja meruapakan sebutan bagi penduduk yang tergolong pada usia produktif, yaitu umur 15 – 65 tahun. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pengangguran struktural, friksional, siklis, maupun terselubung. Untuk menunjukkan ukuran pengangguran, secara statistik digunakanlah istilah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Setyawan, *et al.* (2018) mendeskripsikan kata potensial sebagai kekuatan, kemampuan, dan upaya entah yang belum dilakukan maupun yang telah terwujud, tetapi masih belum maksimal. Potensial adalah suatu kondisi yang berada di antara terbelakang dan unggulan. Artinya, sesuatu dapat dikatakan potensial apabila telah mulai berjalan dan mendapatkan hasil tetapi belum sebaik yang lainnya. Dalam sudut pandang ekonomi regional, potensial digunakan sebagai label untuk kata sektor. Maka dari itu sektor potensial dapat diuraikan sebagai sektor yang memiliki kontribusi positif terhadap ukuran produksi (misalnya PDRB) tetapi masih memiliki beberapa kelemahan yang harus ditangani.

Penelitian Terdahulu

a. Muchammad Yusuf (2018)

Melalui alat analisis LQ dan SS metode klasik dengan data sekunder periode 2013 – 2016, didapatkan 4 sektor yang tergolong dalam sektor unggulan (basis). Selanjutnya, *National Share* pada semua sektor menunjukkan rata-rata alokasi yang positif. Sektor yang paling berkontribusi pada PDRB di kota Tangerang periode tersebut adalah industri pengolahan.

b. Lestari Agusalim (2016)

Dengan judul “*Potensi dan Proyeksi Ekonomi Makro Kota Tangerang*” penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat 4 sektor yang masuk dalam kategori unggulan. Data yang digunakan adalah tahun 2014, dengan proses olah data menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ). Penelitian tersebut juga memprediksi bahwa hingga tahun 2018, berdasarkan harga yang berlaku, pertumbuhan PDRB akan selalu positif.

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sekunder, diperoleh dari *website* pemerintah kota Tangerang hingga Provinsi Banten. Sumber kajian pustaka berasal dari berbagai artikel ilmiah dan opini jurnalistik yang relevan. Pendekatan penelitian yang diambil adalah campuran, yaitu kuantitatif-kualitatif. Pendekatan atau metode kuantitatif diaplikasikan pada proses pengolahan data. Metode kualitatif diimplementasikan pada proses interpretasi dan analisis lanjutan.

Alat analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan guna mendeteksi spesialisasi yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu sektor basis (unggulan) dan sektor non basis. Menurut Wiwiek Ananda dalam Negara, *et al.* (2020), LQ juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat potensial sebuah sektor dalam suatu wilayah terhadap sektor yang sama pada regional yang lebih luas (di atasnya). Dalam hal ini, LQ digunakan untuk mengetahui kondisi spesialisasi sektoral dari kota Tangerang dengan wilayah pembandingnya adalah provinsi Banten. Sehingga rumus matematisnya menjadi:

$$LQ = \frac{X_{it}/Y_{it}}{X_{ib}/Y_b}$$

Di mana:

- X_{it} : Besaran Kontribusi Sektor i terhadap PDRB Kota Tangerang
- Y_{it} : PDRB Kota Tangerang
- X_{ib} : Angka Kontribusi Sektor i terhadap PDRB Provinsi Banten
- Y_b : PDRB Provinsi Banten

Klasifikasi nilai LQ menurut Putra dalam Negara (2020) selanjutnya dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

- Jika $LQ > 1$, artinya sektor yang bersangkutan termasuk pada kategori sektor basis (unggulan). Tingkat produktivitasnya telah cukup untuk memenuhi permintaan domestik, sehingga telah terjadi ekspansi melalui ekspor.
- Apabila $LQ < 1$, artinya sektor yang dihitung termasuk dalam sektor non basis. Produktivitasnya belum berhasil memenuhi kebutuhan domestik ataupun ekspor.

- Ketika $LQ = 1$, artinya tingkat hasil produksi sektor tersebut hanya mampu atau sudah habis untuk memenuhi permintaan domestik, sehingga belum cukup untuk dilakukan ekspor.

Shift Share (SS)

a. Klasik

Pada dasarnya *Shift Share* (SS) digunakan dengan tujuan mengidentifikasi status kepemilikan keunggulan kompetitif pada suatu sektor ketika dibandingkan dengan nilai tambah atau pendapatan dalam suatu daerah. Tidak hanya itu, SS juga digunakan untuk mengetahui pergeseran perilaku ekonomi di suatu daerah yang dihitung berdasarkan nilai absolut dan persentasenya. Dalam analisis SS Klasik, pada penelitian kali ini digunakan sebagai alat untuk melihat sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di kota Tangerang. Rumus matematis yang digunakan adalah:

$$Cij = Eit (rt - rb)$$

Di mana:

Cij : nilai keunggulan kompetitif

Eit : tingkat kesempatan kerja nyata pada sektor i di Kota Tangerang

rt : efek pertumbuhan ekonomi bagi Kota Tangerang

rb : efek pertumbuhan ekonomi bagi Provinsi Banten

Selanjutnya, klasifikasi hasil olah data dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- Apabila nilai Cij menunjukkan angka lebih dari 0 (+) berarti sektor tersebut mempunyai keunggulan kompetitif.
- Apabila nilai Cij berada pada angka negatif (-) dapat disimpulkan bahwa keunggulan kompetitif tidak dimiliki oleh sektor yang bersangkutan.

b. Modifikasi Arcelus

Tidak cukup hanya dengan metode klasik, analisis SS juga bisa dilanjutkan dengan modifikasi Arcelus untuk mengetahui lebih dalam terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Untuk menghitungnya harus memasukkan komponen bauran industri terlebih dahulu, kemudian dihasilkan *regional growth effect*. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Rij = Eit (rt - rb) + (Eit - Eib)(rt - rb)$$

$$RIij = Eit \{(rit - rt) - (rib - rb)\} + (Eit - Eib)\{(rit - rt) - (rib - rb)\}$$

Di mana:

Rij : Pertumbuhan Regional Kota Tangerang

$RIij$: Komponen Lainnya (pengaruh bauran industri regional)

Eib : Kesempatan kerja nyata pada sektor i di Provinsi Banten

rit : efek pertumbuhan sektor i bagi Kota Tangerang

rib : efek pertumbuhan sektor i bagi Provinsi Banten

Klassen Typology (KT)

Setelah mendapatkan hasil dari LQ dan SS, kedua alat analisis tersebut belum dapat menggambarkan posisi masing-masing sektor secara umum berdasarkan kombinasi kenggulan yang dimilikinya. Maka dari itu digunakanlah alat analisis *Klassen Typology*. Kategori dalam *Klassen Typology* dibagi menjadi 4 yang dinyatakan dalam kwadran sebagai berikut:

	LQ > 1	LQ < 1
	SEKTOR UNGGULAN	SEKTOR POTENSIAL BERKEMBANG
SS (Cij +)		
	SEKTOR POTENSIAL	SEKTOR TERBELAKANG
SS (Cij -)		

Gambar 1. Klasifikasi Hasil *Klassen Typology*

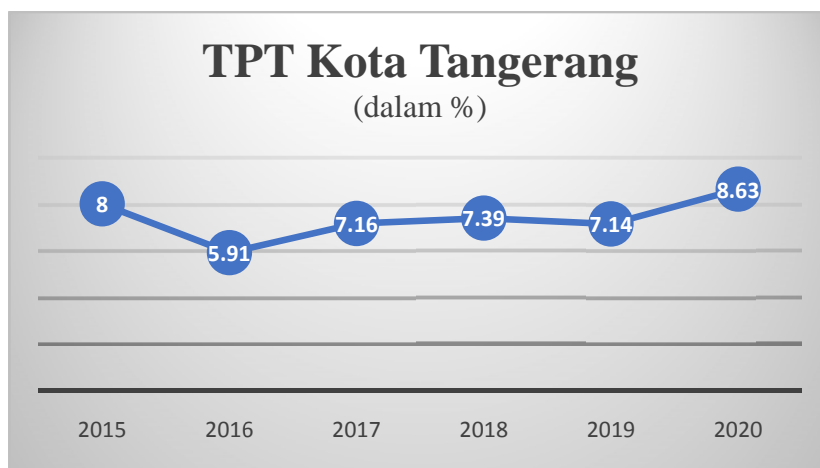
Sumber: ilustrasi penulis, 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pengangguran Saat Ini

(1) Tren Perkembangan TPT

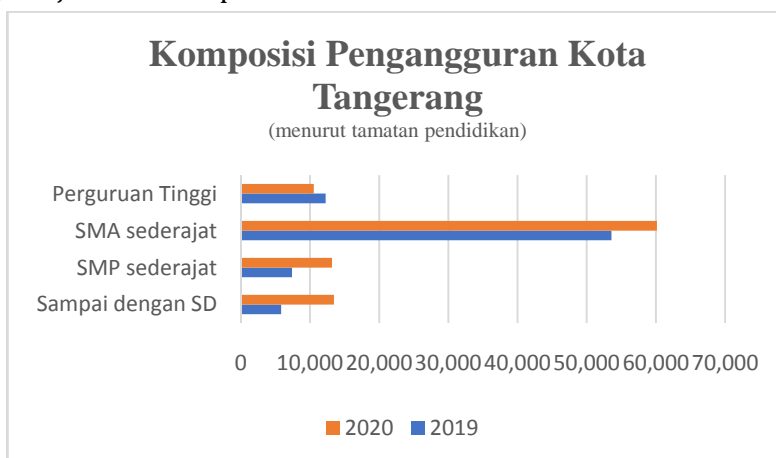
Setelah lebih dari setahun diterpa pandemi, tentunya hampir seluruh wilayah baik provinsi, maupun kabupaten atau kota mengalami peningkatan angka pengangguran. Begitupun dengan kota Tangerang, terjadi peningkatan signifikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu sebesar 1,49% pada 2019 – 2020 (BPS, 2021). Bahkan, hingga Triwulan I tahun 2021, angka TPT di kota ini mencapai lebih dari 97 ribu penduduk.



Gambar 2. Grafik TPT Kota Tangerang
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

(2) Komposisi Pengangguran Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

Pada kondisi tingkat pengangguran yang memiliki tren cenderung naik, maka perlu diketahui juga komposisi pengangguran tersebut didominasi oleh golongan apa. Statistik yang diambil dari BPS menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan komposisi pada tahun 2019 dan 2020. Meskipun secara keseluruhan jumlah penyumbang pengangguran tertinggi didominasi oleh lulusan SMA sederajat, namun lulusan Perguruan Tinggi juga patut menjadi perhatian. Jika diperhatikan pada grafik di bawah ini, hampir semua tamatan pendidikan mengalami peningkatan kontribusi pada pengangguran, kecuali lulusan Perguruan Tinggi yang justru mengalami penurunan. Artinya, penduduk pada kategori tersebut lebih dapat bersaing dan bertahan pada iklim ketenagakerjaan di masa pandemi.



Gambar 3. Grafik Komposisi Pengangguran Kota Tangerang
Sumber: BPS Kota Tangerang (diolah)

Sektor-sektor Potensial di Kota Tangerang

(1) Hasil Analisis *Location Quotient*

Berikut ini merupakan hasil pengolahan data PDRB Kota Tangerang dengan Provinsi Banten yang diproses menggunakan *Location Quotient* (LQ).

Tabel 1. Hasil Olah Data LQ

No.	NAMA SEKTOR	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,25	0,25	0,26	0,27	0,29	0,30
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,16	0,17	0,16	0,18	0,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,83	0,83	0,83	0,84	0,86	0,91
6	Konstruksi	0,77	0,77	0,75	0,74	0,74	0,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,98	0,97	0,96	0,95	0,97	1,03
8	Transportasi dan Pergudangan	2,46	2,46	2,46	2,46	2,36	1,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,66
10	Informasi dan Komunikasi	1,37	1,37	1,38	1,38	1,40	1,46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,96	0,95	0,95	0,96	0,97	1,02
12	Real Estate	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78	0,85
13	Jasa Perusahaan	1,02	1,02	1,01	1,02	1,03	1,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,66
15	Jasa Pendidikan	0,72	0,72	0,72	0,73	0,74	0,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,76	0,76	0,76	0,77	0,80
17	Jasa Lainnya	0,91	0,90	0,90	0,91	0,91	0,97
TOTAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: olah data penulis, 2021

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Unggulan (Basis)
 Tanpa Warna: LQ < 1 : Sektor Non Basis

Merujuk pada tabel 1 terlihat bahwa dari tahun 2015 hingga 2020, terdapat 6 sektor di Tangerang yang tergolong pada sektor basis. Dua diantaranya baru muncul di tahun 2020. Empat sektor yang terlebih dahulu masuk pada sektor basis yaitu industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan. Sedangkan 2 sektor lain yang menyusul adalah sektor PB dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta

sektor jasa keuangan dan asuransi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diartikan bahwa 11 sektor yang lain mempunyai nilai LQ kurang dari 1, atau termasuk dalam sektor non basis (tingkat spesialisasi rendah). Jika dianalisis, dari 6 sektor dengan nilai LQ lebih dari 1, tiga diantaranya identik dengan sektor formal, dan 3 sisanya identik dengan aktivitas non formal.

(2) Hasil Analisis *Shift Share* modifikasi Arcelus

Identifikasi sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan tingkat penyerapan tenaga kerjanya digunakan alat analisis *shift share* dengan modifikasi Arcelus. Dari hasil olah data didapatkan 11 sektor memiliki nilai Cij positif dan 6 sektor lainnya memiliki nilai Cij negatif. Sedangkan untuk modifikasi Arcelus, hasil analisis *shift share* pada 17 sektor di kota Tangerang menunjukkan hasil bahwa pengaruh pertumbuhan wilayah (Rij) berada di angka negatif untuk semua sektor. Hal ini berarti, korelasi atau hubungan keterkaitan antar sektor di kota Tangerang adalah lemah, atau tingkat *demand* terhadap produk-produk hasil industri laju pertumbuhannya lambat. Kemudian, hasil analisis menggunakan alat tersebut menunjukkan bahwa bauran industri regional (RIij) mencatatkan adanya hubungan yang positif untuk semua sektor kecuali sektor Transportasi dan Pergudangan. (Lihat Tabel 2).

(3) Hasil Analisis *Klassen Typology*

Hasil analisis *Klassen Typology* (KT) yang menggabungkan hasil dua alat analisis sebelumnya, yaitu *Location Quotien* (LQ), dan *Shift Share* menunjukkan hasil yang berbeda pada periode 2015 – 2019 dan periode 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan nilai LQ pada periode 2015 – 2019 dan 2020 untuk beberapa sektor. Sektor potensial yang terletak pada kwadran II dan III berdasarkan analisis KT menunjukkan hasil bahwa terdapat terdapat 9 sektor yang berada pada kategori potensial berkembang, serta 2 sektor lagi berada pada status potensial. Artinya, secara keseluruhan, pada periode tersebut terdapat 11 sektor potensial (lihat tabel 3).

Berikutnya adalah periode 2020, menggunakan alat analisis yang sama, jumlah sektor potensial pada tahun ini menunjukkan adanya perubahan. Sektor Jasa keuangan dan Asuransi yang awalnya berada pada status potensial berkembang, telah bergeser memasuki sektor unggulan. Selanjutnya, sektor PBE dan Reparasi Mobil yang awalnya berada pada kategori terbelakang, telah bergeser pada sektor potensial. Artinya, terdapat 8 sektor di kwadran II, dan 3 sektor di kwadran III, sehingga diperoleh total 11 sektor potensial. Meskipun jumlahnya sama dengan periode sebelumnya, namun rincian nama-nama sektornya terdapat perbedaan. Yang akan digunakan sebagai dasar dari perumusan dan optimalisasi kebijakan adalah hasil analisis *Klassen Typology* pada periode 2020 (lihat Tabel 4).

Tabel 2. Hasil Olah Data *Shift Share* Arcelus

No.	Nama Sektor	Rij	RIj	Cij
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	-8.296,65	25.578,10	17.281,45
2	Pertambangan dan penggalian	-	-	-
3	Industri pengolahan	-225.417,60	209.170,64	-16.246,96
4	Pengadaan listrik dan gas	-1.010,26	5.344,89	4.334,63
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	-453,26	860,87	407,61
6	Konstruksi	-41.521,14	16.408,91	-25.112,22
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	-76.673,75	68.653,70	-8.020,06
8	Transportasi dan Pergudangan	-90.875,79	-263.915,71	-354.791,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8.323,29	11.348,19	3.024,90
10	Informasi dan Komunikasi	-42.873,81	55.009,14	12.135,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-15.494,90	16.619,16	1.124,26
12	Real Estate	-36.115,80	72.134,56	36.018,77
13	Jasa Perusahaan	-5.856,52	8.006,13	2.149,61
14	Adm.Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	- 6.329,30	6.488,42	159,12
15	Jasa Pendidikan	-12.161,88	20.215,24	8.053,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5.124,69	4.584,82	-539,87
17	Jasa Lainnya	-7.484,16	10.071,06	2.586,90

Keterangan:

	Cij + = memiliki keunggulan kompetitif
Tanpa Warna:	Cij - = tidak memiliki keunggulan kompetitif
Rij	Pertumbuhan Regional Kota Tangerang
RIj	Komponen Lainnya (pengaruh bauran industri regional)
Cij	Keunggulan Kompetitif

Sumber: olah data penulis, 2021

Tabel 3. Hasil Olah Data *Klassen Typology* Periode 2015 – 2019

LQ> 1		LQ <1	
SEKTOR UNGGULAN		SEKTOR POTENSIAL BERKEMBANG	
S S (Cij +)	Informasi dan Komunikasi Jasa Perusahaan	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	
		Pengadaan Listrik dan Gas	
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
		Jasa Keuangan dan Asuransi	
		Real Estate	
		Administrasi Pemerintahan	
		Jasa Pendidikan	
Jasa Lainnya			
SEKTOR POTENSIAL		SEKTOR TERBELAKANG	
S-S (Cij -)	Industri Pengolahan Transportasi dan pergudangan	Pertambangan dan penggalian	
		Konstruksi	
		Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi mobil	
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	

Sumber: olah data penulis, 2021

Tabel 4 Hasil Olah Data *Klassen Typologi* Periode 2020

LQ > 1		LQ < 1	
SEKTOR UNGGULAN		SEKTOR POTENSIAL BERKEMBANG	
SS (Cij +)	Infokom	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	
	Jasa Keuangan dan asuransi	Pengadaan Listrik dan gas	
	Jasa Perusahaan	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah	
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
		Real Estate	
		Adm pemerintahan	
		Jasa pendidikan	
		Jasa lainnya	
SEKTOR POTENSIAL		SEKTOR TERBELAKANG	
SS (Cij -)	Industri Pengolahan	pertambangan dan Penggalian	
	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil	Konstruksi	
	Transportasi dan Pergudangan	Jasa Kesehatan	

Sumber: olah data penulis, 2021

Rekomendasi Kebijakan Minimalisasi Pengangguran melalui Optimalisasi Sektor Potensial

- Hasil Kajian Pustaka

Setelah menelusuri beberapa sumber literatur untuk melihat variabel apa saja yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

a. Upah Minimum Provinsi

Dengan menggunakan alat analisis regresi, penelitian yang dilakukan oleh Syurifto Prawiro tahun 2018 menunjukkan hasil bahwa UMP menghasilkan probabilitas signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT), koefisien yang dihasilkan adalah negatif, artinya saat UMP naik, maka jumlah pengangguran akan turun. Data yang digunakan adalah statistik UMP dan TPT negara Indonesia pada tahun 2011 – 2015.

b. Tingkat Pendidikan

Susanto, *et al.* (2017) menggunakan analisis path untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran. Hasil olah data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki *direct causal effect* terhadap tingkat pengangguran sebesar 2,095.

c. Pertumbuhan Penduduk

Menggunakan data sekunder tahun 1986 – 2017 untuk melihat pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap TPT, Astuti, *et al.* (2019) menghasilkan temuan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan. Dengan koefisien positif, artinya semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi tingkat pengangguran, atau sebaliknya.

A. Rekomendasi Rumusan Kebijakan

Setelah mengetahui macam-macam variabel yang menghasilkan pengaruh signifikan terhadap TPT, maka dapat dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Rekomendasi Kebijakan

Pokok Permasalahan	Target Utama	Solusi
Upah Minimum Provinsi	Meningkatkan UMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan UMP di atas keseimbangan pasar tenaga kerja. 2. Mendukung peningkatan kemampuan perusahaan untuk memberikan upah yang layak. 3. Memperkecil harga faktor produksi selain tenaga kerja agar dana dapat dialokasikan pada tingkat upah.
Pendidikan	Inklusivitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan biaya pendidikan yang murah. 2. Mengurangi adanya deskriminasi secara sosial maupun kultural. 3. Dukungan penuh terhadap program wajib belajar 12 tahun.

Pertumbuhan Penduduk	Menjaga kestabilan pertumbuhan penduduk	1. Memperketat program KB. 2. Menekan angka pernikahan dini. 3. Menekan angka kelahiran tidak terencana.
----------------------	---	--

Sumber: ilustrasi penulis, 2021

(1) Strategi Optimalisasi

Rekomendasi kebijakan di atas tidak akan terwujud tanpa adanya roda penggerak dari sektor ekonomi. Dengan menggunakan dasar pada hasil analisis *Klassen Typology*, maka 9 rekomendasi kebijakan di atas dapat diwujudkan pada optimalisasi 11 sektor potensial yang terbagi atas 3 kategori, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier.

Tabel 6. Strategi Optimalisasi

Kategori Sektor	Nama Sektor	Strategi Optimalisasi	Target Capaian
Primer	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	Modernisasi pertanian, optimalisasi fungsi lahan, peningkatan produktivitas kehutanan, budidaya perikanan.	Meningkatnya UMP, tercapainya Inklusivitas Pendidikan, dan Stabilitnya angka Pertumbuhan Penduduk. ↓ Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Sekunder	Pengadaan listrik dan Gas	Perluasan skala produksi dan distribusi	
	Pengadaan Air, pengelolaan sampah, Limbah		
	Industri Pengolahan		
Tersier	Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi mobil	Perluasan pangsa pasar, dan optimalisasi faktor input.	
	Transportasi dan Pergudangan		
	Penyediaan akomodasi dan Makan minum	Perbaikan kualitas layanan dan penggunaan alokasi dana yang tepat, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala.	
	Real estate		
	Administrasi Pemerintahan		
	Jasa pendidikan		
	Jasa lainnya		

Sumber: ilustrasi penulis, 2021

Untuk merealisasikan strategi optimalisasi dan rekomendasi kebijakan, tidak cukup hanya dengan peran pemerintah saja. Mulai dari Masyarakat, Pihak Swasta, Akademisi, hingga Media harus turut serta berperan aktif agar

optimalisasi sektor potensial untuk menurunkan TPT di kota Tangerang dapat terwujud.

PENUTUP

Observasi pada data sekunder tahun 2015 – 2020 menunjukkan bahwa kota Tangerang memiliki TPT dengan tren cenderung naik. Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) menunjukan bahwa tahun 2015 -2019 kota ini memiliki 4 sektor basis. Pada tahun 2020 muncul 2 sektor basis baru, sehingga total sektor basis sekarang berjumlah 6. Hal tersebut menandakan adanya perkembangan yang baik selama periode 2015-2020. Hasil *Shift Share* memperlihatkan terdapat 11 sektor dengan kepemilikan keunggulan kompetitif di Kota Tangerang. Modifikasi Arcelus menunjukkan bahwa hubungan keterkaitan antar sektor di kota Tangerang adalah lemah, tetapi bauran industri regional mencatatkan adanya hubungan yang positif untuk semua sektor kecuali sektor Transportasi dan Pergudangan. Dari *Klassen Typology* tahun 2020 terlihat bahwa 9 sektor berada pada kwadran II dan III (Potensial berkembang dan potensial). Sektor-sektor tersebut diantaranya adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, Jasa Lainnya, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan. Dengan hasil tersebut berarti Kota Tangerang memiliki 53% sektor potensial sehingga masuk dalam tipologi cepat berkembang. Rumusan rekomendasi kebijakan ditujukan untuk menysasar aspek UMP, Pendidikan, dan Pertumbuhan Penduduk melalui optimalisasi sektor potensial yang terbagi dalam kategori primer, sekunder, dan tersier dengan melibatkan berbagai pihak untuk berpartisipasi.

Adapun rekomendasi dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Kota Tangerang butuh mengambil kebijakan pembangunan dengan memprioritaskan sektor potensial-berkembang dengan turut serta memberikan fokus perhatian pada sektor non basis secara proporsional agar pengangguran terbuka bisa ditekan.
- (2) Perlu melakukan peninjauan ulang untuk sektor-sektor yang memiliki angka LQ >1 kemudian revitalisasi pada sektor yang memiliki nilai LQ < 1, serta mendorong produktivitas dan profesionalitas dalam mengurus sektor potensial-berkembang supaya bisa menjadi sektor unggulan.
- (3) Bagi investor yang ingin berinvestasi di Kota Tangerang bisa dijadikan salah satu acuan dalam prioritas pembangunan yang di mana peran investor sangat vital dalam mengatasi pengangguran dan tentunya bekerja sama dengan pemerintah agar kebijakan selalu sinkron di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L. (2016). Potensi dan Proyeksi Ekonomi Makro Kota Tangerang. *Jurnal Media Tren*. Vol. 11 (2). Hlm: 99 – 116.
- Astuti, I Y. Istiyani, N. et al. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*. Vol 18 (1). Hlm: 52 – 62.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2021). Fitur Tabel Dinamis: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen), 2015 – 2020. URL <https://banten.bps.go.id/indicator/6/157/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html> Diakses pada 6 Juni 2021.
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. (2021). Fitur Tabel Dinamis: Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Tangerang, 2019 – 2020. URL <https://tangerangkota.bps.go.id/subject/6/tenagakerja.html#subjekViewTab3> Diakses pada 6 Juni 2021.
- Faturahman, B M. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol: 7 (2). Hlm: 43 – 62.
- Jarniati, S D. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*. Universitas Negeri Medan.
- Negara, A K K. Putri, A K. (2020). Analisis Sektor Unggulan Kecamatan Toboali dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. *Jurnal Ekonomi Equity*. Vol. 8 (1). Hlm: 24 – 36.
- Prawira, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Jurnal Economics Generation*. Vol. 1 (1). Hlm: 162 – 168.
- Setyawan, D. Nugraha, A L. et al. (2018). Analisis Potensi Desa Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*. Vol: 7 (4). Hlm: 1 -7.
- Susanto, E. Rochaida, E. et al. (2017). Pengaruh Inflasi dan Pendidikan terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*. Vol. 13 (1). Hlm: 19 – 27.
- Yusuf, M. (2018). Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Periode 2013 – 2016. *Skripsi*. Universitas Jember.

PEMBERDAYAAN PETANI SAYUR DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MELALUI DIVERSIFIKASI PRODUK

Fafurida, Shanty Oktavilia, Dyah Maya Nihayah, Yozi Aulia Rahman

PENDAHULUAN

Produk pertanian yang memiliki potensi untuk dikembangkan ke arah skala industri adalah buah dan sayur. Buah dan sayuran merupakan produk yang tidak tahan lama dan memiliki harga yang relatif rendah. Selama ini, banyak petani hanya menjual produk buah dan sayur dalam bentuk produk mentah tanpa adanya diversifikasi produk. Petani juga hanya menjadi *price taker*, dimana mereka tidak memiliki kekuatan dalam penentuan harga. Hal tersebut menyebabkan petani terkadang dipermainkan oleh tengkulak, terutama saat panen melimpah. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha dan inovasi untuk mengolah sayuran agar memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Inovasi penganekaragaman produk saat ini tersedia dalam berbagai macam bentuk, salah satunya adalah dengan mengolah sayuran menjadi keripik sayur. Metode ini merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang rekayasa produk. Usaha perekayasaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari sayuran dan memecahkan masalah produk sayuran yang tidak mampu bertahan lama.

Salah satu daerah penghasil sayur di Jawa Tengah adalah Desa Sidomukti yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Sebagian besar penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama dari daerah ini adalah sayuran, selain dari padi dan palawija. Sayuran yang banyak ditemui di daerah ini adalah terong. Hampir disetiap lahan pertanian kita jumpai komoditas tersebut. Saat panen raya produksi terong di desa ini sangat melimpah. Produktivitas terong di desa ini mencapai 2000 ton per tahun. Hal tersebut menyebabkan harga sayur tersebut sangat rendah. Harga terong bisa mencapai hanya Rp 400,00 per kilogramnya. Biasanya petani hanya menjual produk tersebut dalam bentuk terong segar tanpa olahan. Mengingat sayuran tidak bisa bertahan lama, petani tidak punya

pilihan lain untuk menjual produk yang dihasilkan saat itu juga. Sehingga harga yang didapatkan sangatlah rendah.

Ketergantungan petani terhadap tengkulak juga sangatlah tinggi. Hampir sebagian besar petani menjual produk sayurnya kepada para tengkulak. Melihat fenomena tersebut diperlukan suatu upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan diversifikasi produk seperti keripik agar sayuran yang dihasilkan dapat bertahan lama dan memiliki nilai jual tinggi. Harga jual kripik terong bisa mencapai Rp.80.000,00 per kilogramnya. Untuk mendapatkan 1kg keripik buah dan sayur rata-rata memerlukan sayur sebanyak 4 kg. Selain itu keripik sayur juga memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk kesehatan sehingga layak untuk dikembangkan. Dengan usaha tersebut diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan perekonomian petani sayur.

PEMBAHASAN

Dalam kajian ekonomi pertanian merupakan implementasi dari kombinasi ilmu ekonomi dengan ilmu pertanian, sebagai suatu ilmu yang mempelajari, membahas, serta menganalisis pertanian secara ekonomi, atau ilmu ekonomi yang diterapkan pada pertanian (Moehar Daniel, 2002). Lebih lanjut, Moehar Daniel menjelaskan bahwa ditinjau dari segi keberadaan dan fungsinya, ekonomi pertanian diharapkan dapat berperan aktif dan sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan pertanian. Hubungan sinergis antara sektor pertanian dengan sektor-sektor yang lainnya memerlukan analisis dan pertimbangan tidak hanya dari segi teknis saja, tetapi juga harus mencakup sosial dan ekonominya.

Hingga saat ini tampaknya sektor pertanian masih merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi Nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan lebih dari separuh penduduk tersebut menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kontribusi utama sektor pertanian terhadap pembangunan nasional telah berhasil secara nyata meningkatkan penyediaan bahan pangan, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menunjang sektor nonpertanian melalui penyediaan bahan baku untuk industri pengolahan. Pembangunan pertanian dihadapkan pada kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis pada liberalisasi perdagangan internasional dan investasi. Menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut, serta untuk memanfaatkan peluang yang ditimbulkannya, maka pembangunan pertanian lebih difokuskan pada komoditas-komoditas unggulan yang dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Untuk memberdayakan keunggulan Indonesia sebagai negara agraris dan maritim, maka Departemen Pertanian beserta departemen terkait mempromosikan pembangunan sistem dan usaha agrobis-

nis yang berdaya sing, berkarakter, berkelanjutan dan terdesentralisasi. (Daniel, 2002)

Di sisi lain, pengembangan dunia usaha merupakan komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi, atau daya perekonomian yang sehat. Beberapa alat untuk mengembangkan dunia usaha diantaranya adalah:

- a. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan.
- b. Pembangunan pusat informasi terpaut yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha untuk berhubungan dengan aparatur pemerintahan daerah untuk segala macam kepentingan terutama mengenai masalah perijinan, rencana pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah, ketersediaan lahan dan sebagainya.
- c. Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil.
- d. Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk-produk impor.

Dalam pengembangan dunia usaha baik usaha di bidang pertanian maupun lainnya, sumber daya manusia merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pelatihan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemberi kerja, penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan daerah. dan informasi tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di suatu daerah.

Dalam bidang pertanian istilah pasca panen diartikan sebagai berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Istilah tersebut secara keilmuan lebih tepat disebut Pasca produksi (*post production*) yang dapat dibagi dalam dua bagian atau tahapan, yaitu pasca panen (*post harvest*) dan pengolahan (*processing*). Penanganan pasca panen (*post harvest*) sering disebut juga sebagai pengolahan primer (*primary processing*) merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi “segar” atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. Umumnya perlakuan tersebut tidak mengubah bentuk penampilan atau penampakan, kedalamnya termasuk berbagai aspek dari pemasaran dan distribusi. Pengolahan (*secondary processing*) merupakan tindakan yang mengubah hasil tanaman ke kondisi lain atau bentuk lain dengan tujuan dapat tahan lebih lama (pengawetan), mencegah perubahan yang tidak dikehendaki atau untuk penggunaan lain. Kedalamnya termasuk pengolahan pangan dan pengolahan industri.

Penanganan pasca panen bertujuan agar hasil tanaman tersebut dalam kondisi baik dan sesuai/tepat untuk dapat segera dikonsumsi atau untuk bahan baku pengolahan. Prosedur/perlakuan dari penanganan pasca panen berbeda untuk berbagai bidang kajian antara lain:

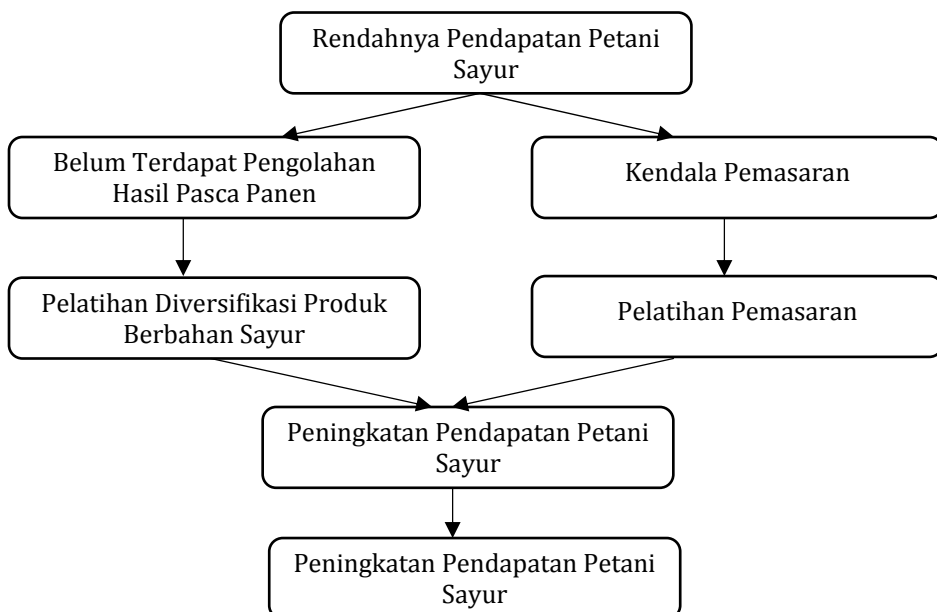
1. Penanganan pasca panen pada komoditas perkebunan yang ditanam dalam skala luas seperti kopi, teh, tembakau dll., sering disebut pengolahan primer, bertujuan menyiapkan hasil tanaman untuk industri pengolahan, perlakuannya bisa berupa pelayuan, penjemuran, pengupasan, pencucian, fermentasi dll.
2. Penanganan pasca panen pada produksi benih bertujuan mendapatkan benih yang baik dan mempertahankan daya kecambah benih dan vigornya sampai waktu penanaman. Teknologi benih meliputi pemilihan buah, pengambil biji, pembersihan, penjemuran, sortasi, pengemasan, penyimpanan, dll.

Asosiasi Pemasaran Amerika (*The American Marketing Association*) dalam dalam buku *Marketing Management* (Kotler, 2002) mengemukakan definisi pemasaran (*marketing*) yaitu proses perencanaan (*planning*) dan pelaksanaan (*executing*) konsep harga (*pricing*), promosi (*promotion*), dan distribusi (*distribution*) gagasan (*ideas*), barang (*goods*), dan jasa (*services*) untuk menciptakan pertukaran (*exchanges*) yang memuaskan (*satisfy*) tujuan individu dan organisasi. Stanton (1978) mengemukakan teknik pemasaran yaitu suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli, termasuk pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Definisi pemasaran (*marketing*) oleh Kotler (2002) dan Stanton (1978) di atas menunjukkan bahwa inti kegiatan pemasaran adalah bauran pemasaran (*marketing mix*).

Sedangkan bauran pemasaran (*marketing mix*) ialah kombinasi empat kegiatan yang merupakan inti kegiatan pemasaran yakni produk (*product*), harga (*price*), distribusi (*distribution/place*) dan promosi (*promotion*). Bauran pemasaran (*marketing mix*) ini sering disebut empat P yaitu *product*, *price*, *place*, dan *promotion*. Berdasarkan definisi pemasaran (*marketing*) oleh Kotler (2002) dan Stanton (1978) di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah inti kegiatan pemasaran adalah masalah bauran pemasaran (*marketing mix phenomena*). Masalah bauran pemasaran (*marketing mix phenomena*) ialah kombinasi empat masalah kegiatan yang merupakan masalah inti kegiatan pemasaran yakni masalah produk (*product phenomena*), masalah harga (*price phenomena*), masalah distribusi (*distribution/place phenomena*) dan masalah promosi (*promotion phenomena*). Masalah bauran pemasaran (*marketing mix phenomena*) ini sering disebut masalah empat P yaitu *product phenomena*, *price phenomena*, *place phenomena*, dan *promotion phenomena*. Dengan

demikian ada empat masalah teknik pemasaran (*marketing management phenomena*) yaitu masalah produk (*product phenomena*), masalah harga (*price phenomena*), masalah distribusi (*distribution/place phenomena*) dan masalah promosi (*promotion phenomena*). Pertama, masalah produk (*product phenomena*). Produk (*product*) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler, 2002) termasuk kemasan, merek, label, warna, prestise perusahaan, prestise pengencer, pelayanan perusahaan dan pelayanan pengencer. Produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Kedua, masalah harga (*price phenomena*). Swastha (1981) dalam bukunya Azas-azas Marketing mengemukakan bahwa harga (*price*) adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta pelayanannya. Contohnya, 1 kg kerupuk labu berharga Rp. 60.000,-. Ketiga, masalah distribusi (*distribution/place phenomena*). Swastha (1981) dalam buku Azas-Azas Marketing mengemukakan bahwa distribusi (*distribution*) adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Keempat, masalah promosi (*promotion phenomena*). Swastha (1981) dalam buku dan Azas-Azas Marketing mengemukakan bahwa promosi (*promotion*) adalah arus informasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan konsumen untuk membeli.

Berikut ini disampaikan konsep pemecahan masalah dari rendahnya pendapatan petani sayur yang dapat dilakukan melalui difersivikasi produk.



Gambar 1. Model Pemecahan Masalah

Model pemecahan masalah dilakukan dengan cara memberikan pelatihan diversifikasi produk, dan pelatihan pemasaran. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan memberikan pelatihan dan pengarahan pentingnya diversifikasi produk berbahan sayuran dan pelatihan pemasaran produk berbahan sayuran.

Penggunaan teknologi tepat guna merupakan hal yang harus dilakukan untuk peningkatan hasil produksi. Hal ini dilakukan untuk dapat menjaga kualitas produk tetap dalam kondisi bagus. Tampilan kemasan juga sangat penting, seorang konsumen akan mudah tertarik pada produk yang memiliki kemasan yang bagus. Jadi dalam program ini tim pengabdian akan melakukan upaya-upaya membuat inovasi dalam produksi produk berbahan sayur dan teknik pemasaran yang tepat sehingga nantinya akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat petani sayur. Adapun tiga kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah:

1. Pelatihan inovasi produk berbahan sayur

Pemberian pelatihan pengolahan produk berbahan terong kepada para petani diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis dan nilai jual dari produk sayur (terong). Terong tidak hanya dijual dalam bentuk buah, tetapi juga dalam bentuk diversifikasi produk berbahan terong, yaitu berupa keripik terong.

2. Pelatihan Pemasaran

Selama ini petani terong hanya menjual terong kepada tengkulak atau pengepul dan terkadang dijual langsung oleh petani di pasar. Usaha pemasaran seperti ini ternyata belum maksimal. Oleh karena itu diperlukan suatu terobosan sistem pemasaran yang lebih tepat. Selanjutnya diharapkan kedepannya hasil pemasaran dari produk terong akan semakin meningkat dan mampu memberikan efek peningkatan pendapatan kepada petani sayur terong di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan.

Dalam pelatihan pemasaran ini, diberikan pengetahuan teknik pemasaran produk keripik terong melalui berbagai cara diantaranya strategi pemasaran yang akan digunakan dalam usaha kripik terong ini menggunakan analisis *Marketing Mix* (bauran pemasaran) 4P yaitu mengenai kebijakan produk, harga, promosi dan distribusi.

- Kebijakan Produk

Jenis produk ini yaitu kripik sayuran terong. Terong merupakan sayuran yang kaya akan kandungan gizi. Kandungan gizi dalam terong antara lain: air, protein, lemak, karbohidrat, kalori, serat kasar, kalsium, besi, fosfor, karotin, vitamin B1, B2, C dan vitamin P, asam nikotinat, dan lain-lain.

Pengolahan dimulai dari bahan baku sayuran terong segar diolah menjadi camilan yaitu mejadi kripik. Kripik terong merupakan usaha diversifikasi sayuran terong yang biasanya dibuat hanya menjadi sayur untuk lauk makanan. Kripik terong mempunyai keunggulan dibandingkan jika hanya diolah menjadi sayur lauk yakni kripik terong mampu bertahan sampai lebih dari 6 bulan. Pengembangan produk kripik terong yakni dengan membuat variasi rasa seperti rasa keju, balado dan manis.

- Kebijakan Harga

Kebijakan penetapan harga atau *Pricing* menurut Raymond Corey (1995) adalah ekspresi nilai yang menyangkut kegunaan dan kualitas produk, citra yang terbentuk melalui iklan dan promosi, ketersediaan produk melalui jaringan distribusi, dan layanan yang menyertainya. Harga yang diberikan kepada pelanggan yaitu sebesar **XX** harga tersebut sudah melawan pesaing yang sebagian besar menjual dengan harga **XX**. Tentunya dengan kebijakan harga yang ditawarkan produk terong ini sudah mempunyai keunggulan kompratif dibandingkan dengan pesaing.

- Kebijakan Promosi

Untuk meningkatkan hasil penjualan Kripik Terong ini maka perlu dilakukan promosi. Bentuk promosi ini diantaranya yaitu dengan menggunakan pamflet, leaflet, spanduk, dan media promosi lainnya seperti media sosial internet. Di samping itu, akan dijual dengan sistem promosi *door to door*, serta berjualan pada saat acara *car free day* hari minggu di kawasan simpang lima. Media promosi yang paling pertama dilakukan adalah membranding logo dan melakukan promosi langsung ke konsumen, dimana konsumen diminta untuk mencoba memakannya dengan harapan mereka akan selalu ingat akan rasa dan produk dari kripik terong dan diharapkan dapat menjadi media untuk mempromosikan kepada orang lain. Promosi penting dilakukan pada produk yang baru memasuki pasar. Untuk produk kripik terong ini sasaran promosi yakni masyarakat pada umumnya. Tidak terbatas pada usia maupun jenis kelamin. Makanan ringan kripik umumnya diminati oleh berbagai kalangan dari mulai anak-anak sampai orang dewasa karena digunakan sebagai makanan cemilan.

- Kebijakan Tempat

Saluran distribusi yang tepat merupakan salah satu kunci kesuksesan pemasaran produk.. Kemudian distribusi hasil produksi kepada para konsumen dilakukan secara langsung menawarkan kepada pelanggan atau *direct selling*. Penjualan langsung kripik dapat berbentuk *delivery* di mana penjualan melalui pesan antar sampai di konsumen. Selain distribusi langsung, penjualan dapat dilakukan secara tidak langsung. Bentuknya

seperti kripik terong dititipkan ke pedagang kaki lima, kantin-kantin, toko-toko penjual camilan dan membuka kerjasama dengan katering-katering. Selain itu penjualan tidak langsung melalui saluran distribusi berupa toko pusat oleh-oleh. Toko pusat oleh-oleh sudah memiliki citra yang kuat sebagai tempat membeli aneka makanan ringan untuk oleh-oleh atau dikonsumsi sendiri

3. Pendampingan

Setelah pemberian pelatihan kepada petani sayur dalam pembuatan keripik terong, pendampingan dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap pelatihan, praktek pembuatan produk diversifikasi berbahan terong, praktek pengemasan, pemasaran dan evaluasi. Dari hasil pendampingan tersebut diketahui, sebagian besar masyarakat petani dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah diberikan oleh tim pengabdian pada saat pelatihan. Perlu adanya alat-alat pendukung untuk mensupport kegiatan produksi oleh petani sayur terong yang diantaranya adalah alat-alat untuk memasak produk berbahan terong, alat pengemasan dan alat komunikasi yang dapat membantu kelancaran usaha pemasaran produk.

PENUTUP

Dalam upaya peningkatan pendapatan khususnya petani sayur, memerlukan beberapa upaya. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah melalui diversifikasi produk berbahan sayur. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya yaitu memberikan berbagai pelatihan seperti inovasi produk, pemasaran serta pendampingan usaha. Pelatihan inovasi produk berbahan sayur dapat dilakukan melalui pengolahan sayur terong menjadi kripik terong, dimana proses produksi ditunjang dengan adanya peralatan yang dibutuhkan. Pelatihan teknik pemasaran memberikan pengetahuan kepada para petani dalam pemasaran produk kripik terong. Selain kegiatan pelatihan, upaya peningkatan kemampuan inovasi produk dari petani dalam pengolahan sayur dalam berbagai variasi, pemasaran dan pengelolaan usaha masih sangat diperlukan. Selain kegiatan pelatihan, diperlukan juga kegiatan pendampingan usaha, agar output dari pelatihan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan baik, usaha pertanian dapat berjalan mandiri nantinya dan tujuan peningkatan pendapatan petani sayur dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN

- Daniel, Moehar. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta : PT Bumi Angkasa.
- Drucker Peter dan Corey Ray, 1995, *Manajemen Pemasaran Dalam Philip Kotler*, Penerbit Salemba Empat
- Kotler, Philip. 2002. *Teknik Pemasaran. Edisi Millenium*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Swastha, Basu DH. 1981. *Azas-Azas Marketing. Edisi Kedua Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Liberty
- Swasta, Basu DH dan Irawan. 1983. *Teknik Pemasaran Modern*. Yogyakarta : Penerbit Liberty
- William J. Stanton, (1978), *Fundamental of Marketing* . New York: McGraw Hill Book Company Inc.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUS DALAM MENYUSUN STRATEGI *GREEN TRANSPORTATION*

Amin Pujiati, Sri Handayani, Dyah Maya Nihayah, Mashuri

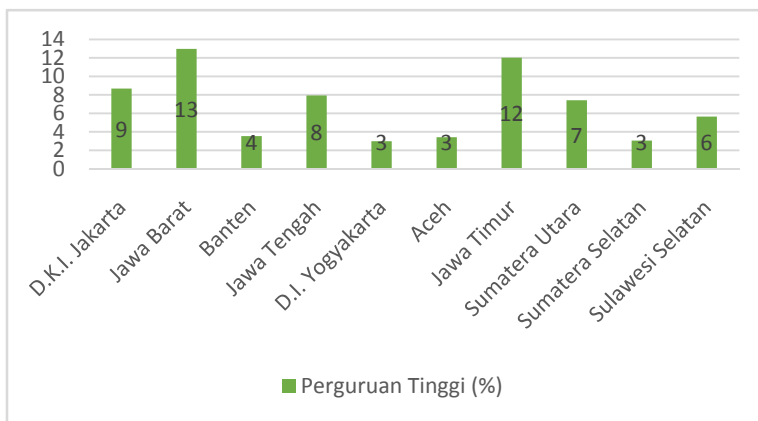
PENDAHULUAN

Pilihan transportasi di lingkungan kampus umumnya cukup standar yaitu pilihan untuk menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi umum. Kendaraan pribadi dapat lebih leluasa menjangkau gedung ke gedung lebih mudah dan tidak memakan waktu lama karena tidak perlu menunggu penumpang seperti yang dilakukan transportasi umum. Namun, di beberapa perguruan tinggi di Indonesia membatasi warga kampus untuk menggunakan kendaraan bermotor di lingkungan kampus kecuali dalam keadaan mendesak. Hal ini dilakukan dalam mendukung *green campus* khususnya *green transportation*. Implementasi *green transportation* mengharuskan warga kampus untuk menggunakan moda transportasi lain selain kendaraan pribadi yang dapat mengurangi polusi seperti memanfaatkan jalur pedestrian untuk berjalan kaki, memanfaatkan sepeda sewa di area kampus, dan menggunakan sarana transportasi bus umum/kampus. Seluruh pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bersifat subjektif tergantung bagaimana kondisi masyarakat kampus yang menggunakan.

Dari semua opsi pilihan transportasi pribadi, pilihan yang paling mudah dan cepat jatuh pada bus kampus atau transportasi umum intra kampus. Selain relatif lebih nyaman karena tidak perlu mengayuh sepeda atau berjalan kaki, transportasi umum kampus lebih diminati karena bisa lebih banyak mengangkut penumpang daripada opsi lainnya dengan waktu tempuh yang cepat. Namun, ketepatan waktu, jumlah armada, dan emisi buang dari transportasi umum terkadang menjadi polemik tersendiri bagi pengguna kendaraan ini. Kelemahan penggunaan transportasi umum kampus perlu ada penanganan agar *green campus* terwujud. Masyarakat kampus dapat berperan melakukan perubahan dengan cara menjadi *key person* dalam penyusunan strategi pengembangan *green transportation*. Pemberdayaan masyarakat kampus memiliki peran penting untuk mengatasi kelemahan *green transportation* agar dapat menjadi transportasi yang dapat diandalkan masyarakat.

Salah satu cara untuk menilai implementasi *green transportation* di kampus adalah membandingkan antara implementasi yang sudah berjalan dengan standar penilaian *green campus*. Penilaian *green campus* yang sudah dilakukan di Indonesia menggunakan *Standar Green Metric*, yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dan telah menjadi standar internasional *green campus*. Tujuan utama *Standar Green Metric* adalah untuk memetakan program dan kebijakan kampus dalam kegiatan lingkungan yang berkelanjutan. Perkembangan penggunaan standar internasional *Green Metric* di dunia dimulai pada tahun 2010 dengan jumlah partisipasi sebanyak 95 kampus dan di tahun 2019 menjadi 778 kampus di dunia. UI *Green Metric* memiliki 6 rubrik penilaian yakni: Penataan dan Infrastruktur, Energi dan Perubahan Iklim, Limbah, Air, Transportasi, Pendidikan dan Penelitian. Hal ini mendukung tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi serta lima dimensi konsep berkelanjutan yaitu ekologi, sosial, ekonomi, budaya, dan spasial (Elizabete et al., 2005; Mahayudin et al., 2015; Newman, 2006; Wheeler & Beatley, 2004).

Salah satu rubrik penilaian dalam UI *Green Metric* adalah di bidang transportasi. Transportasi dalam UI *Green Metric* memiliki bobot sebesar 18 persen dari seluruh rubrik penilaian. Indikator pada segi transportasi yaitu rasio seluruh kendaraan (mobil dan sepeda motor) dibagi seluruh populasi kampus, jumlah layanan *shuttle* di kampus, kebijakan kendaraan dengan emisi nol di kampus, rasio kendaraan emisi nol dibagi total populasi kampus, rasio area parkir di kampus dan total area kampus, program transportasi yang didesain untuk membatasi atau mengurangi area parkir kampus, jumlah inisiatif pembangunan transportasi publik untuk mengurangi kendaraan pribadi di lingkungan kampus, dan kebijakan pejalan kaki di kampus. Masing-masing indikator penilai memiliki ukuran nilai antara 150-300 poin. Apabila semua indikator terpenuhi maka akan semakin tinggi persentase yang dapat diperoleh oleh kampus. Gambar 1 menunjukkan sebaran Perguruan Tinggi di beberapa Provinsi di Indonesia yang terlibat dalam penilaian UI *Green Metric*. Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah Perguruan Tinggi ke-3 di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Ada 3 Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Jawa Tengah yang dari tahun ke tahun masuk 10 besar yaitu Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Universitas Sebelas Maret (UNS).



Sumber: (Statistik Pendidikan Tinggi, 2019)

Gambar 1. Jumlah Perguruan Tinggi di Beberapa Provinsi di Indonesia

Dengan adanya penilaian *Green Metric* dan penilaian-penilaian lainnya pada perguruan tinggi di Indonesia, semakin meningkatkan kebutuhan akan fasilitas kampus yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini mendorong masyarakat kampus untuk semakin peduli dengan keadaan fasilitas publik di area kampus. Dalam dunia yang kompetitif saat ini, salah satu alat utama untuk membuat perubahan dalam organisasi adalah manusia (Ghafuri et al., 2014). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat kampus sebagai pengguna jasa transportasi antar kampus dalam merancang kebijakan dan strategi transportasi yang berkelanjutan sangatlah penting. Karena salah satu cara paling efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam situasi saat ini adalah penggunaan karyawan yang lebih efisien dalam organisasi (Ghafuri et al., 2014).

PEMBAHASAN

Kampus perguruan tinggi merupakan wadah yang unik yang menampung berbagai hal seperti pemanfaatan lahan untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya adalah area khusus transportasi yang menghubungkan antara fakultas dan gedung-gedung. Keberadaan gedung parkir, sarana transportasi antar gedung, dan jalur pedestrian yang aman dapat menunjang kegiatan perkuliahan dan meningkatkan poin *Green Metric*. Walaupun peran penting transportasi dalam kampus cukup penting, namun masih sedikit riset yang dilakukan dalam segi transportasi kampus yang ramah lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, rencana lingkungan dan iklim telah mendorong kampus untuk lebih mempertimbangkan peran transportasi dalam emisi gas rumah kaca dan polusi udara (Alshuwaikhat & Abubakar, 2008; Balsas, 2003; Putri et al., 2020). Untuk melakukannya, diperlukan pendekatan

pengelolaan lingkungan yang sistematis untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dengan fokus khusus pada transportasi (Alshuwaikhat & Abubakar, 2008; Emanuel & Adams, 2011). Tarif parkir adalah salah satu kebijakan kuat yang sering digunakan oleh kampus (Bond & Steiner, 2006). Universitas jarang menyediakan parkir gratis. Selain itu, beberapa universitas mengembangkan program *cash out* parkir. Misalnya, Stanford melalui program "*Clean Air Cash*" membayar 2.500 karyawan yang tidak memiliki izin parkir sepanjang tahun (Balsas, 2003). Demikian juga, University of Colorado, Boulder menggunakan armada bus kecil dengan "Ecopass", di mana pemberi kerja membeli tiket untuk karyawan mereka dan pemegang tiket naik bus secara gratis dengan ID yang valid. Setelah kebijakan ini diberlakukan di kota Boulder dan Universitas Colorado, total penggunaan transit dalam 5 tahun terakhir telah meningkat 400% (Toor & Havlick, 2004). University of California, Berkeley's Class Pass memiliki kesuksesan serupa, memberikan diskon besar kepada siswa dengan imbalan tumpangan transit gratis tanpa batas (Nuworsoo, 2005).

Terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di area kampus merupakan hal yang tidak dapat diwujudkan apabila tidak terjalin hubungan yang baik antar masyarakat kampus. Mahasiswa, dosen, dan pemangku kebijakan di kampus memiliki andil dan hak yang sama dalam menerima moda transportasi yang berkelanjutan di kampus. Seluruh komponen yang ada dalam kampus memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh sarana transportasi yang aman dan ramah lingkungan. Hal tersebut ditunjukkan pada masing-masing universitas yang masuk sepuluh besar UI *Green Metric*. Universitas Negeri Semarang dan Universitas Diponegoro dalam mengatasi kelemahan green transportation yang telah diimplementasikan dan menyusun strategi *green transpostation* di kampus, telah memberdayakan masyarakat kampus. Pemberdayaan masyarakat kampus diwujudkan dengan partisipasi mahasiswa, dosen, tendik, pimpinan sebagai pengambil kebijakan sebagai *key person*.

Universitas Negeri Semarang dan Universitas Diponegoro menempati posisi ke enam dan ke empat dalam ranking UI *Green Metric* tahun 2019. Masing-masing universitas memiliki kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang No. 27 tahun 2012. Universitas Diponegoro berkomitmen dalam mendukung *green city* Kota Semarang melalui program *green campus*.

Universitas Negeri Semarang dan Universitas Diponegoro telah mencaangkan beberapa program yang berkaitan dengan transportasi internal kampus. Universitas Negeri Semarang mengembangkan pelayanan transpor-

tasi internal, jalur pedestrian dan jalur sepeda, pengaturan parkir, pengembangan rambu-rambu dan penyediaan transit kendaraan umum. Walaupun masih belum berjalan secara optimal karena disebabkan oleh fasilitas yang belum lengkap serta jumlah transportasi internal kampus yang tersedia masih terbatas (Prihanto, 2017; Satriyadi & Bambang, 2016). Hal ini kemudian juga didorong adanya wabah covid-19 yang menyebabkan semua mahasiswa belajar di rumah dan Sebagian besar pegawai dan dosen yang bekerja di UNNES bekerja di rumah sehingga transportasi kampus berhenti. Kemudian di lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang jalur pedestrian belum terhubung secara penuh dan belum memiliki performa yang optimal baik. Baik dari segi kenyamanan maupun keramahan terhadap penyandang disabilitas. Universitas Diponegoro juga mengembangkan transportasi internal melalui program Zero Emission Vehicle (ZEV). Program tersebut dilakukan melalui pengadaan fasilitas transportasi internal kampus dan sepeda gratis, ruang bebas kendaraan. kemudian bekerja sama dengan pemerintah dalam pengadaan transportasi umum dan penyediaan fasilitas jalur pedestrian (Universitas Diponegoro, 2021)

Namun secara realita program tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini karena di beberapa titik kampus jalur pedestrian maupun jalur sepeda belum terealisasi secara baik. Masalah lainnya adalah penyediaan transportasi internal seperti bus kampus, fasilitas sepeda dan tempat parkir sepeda yang belum optimal. Kemudian penggunaan kendaraan di lingkungan kampus masih cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui dari jumlah mobil pribadi yang masuk di wilayah kampus rata-rata 350 mobil/hari. sehingga menyebabkan kemacetan di jam-jam tertentu (Hapsari et al., 2014).

Realita implementasi *green campus* di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Diponegoro masih belum sejalan dengan kebutuhan sebagian masyarakat kampus khususnya penyandang disabilitas. Masyarakat kampus harus dapat memastikan kemudahan dan kenyamanan untuk semua pengguna transportasi kampus, khususnya untuk fasilitas penunjang disabilitas yang terkadang terlupakan dan menjadi hambatan untuk penyandang disabilitas untuk dapat beraktivitas secara mandiri (McMahon et al., 2015; Mechling & Savidge, 2011; Mechling & Seid, 2011; Stock et al., 2013). Meskipun banyak hambatan fisik dihilangkan dalam sistem rute tetap, hambatan signifikan terhadap akses keseluruhan ke sistem angkutan umum masih terjadi. Laporan terbaru dari NCD (2015) memberikan informasi dari kota-kota tertentu mengenai masalah dan hambatan publik transportasi bagi penyandang disabilitas. Menurut Bezyak et al (2017) permasalahan berikut kerap muncul dengan transportasi umum seperti lift yang terlalu landai sehingga berbahaya bagi pengguna kursi roda, bus yang tidak berhenti pada penyandang disabilitas, hambatan sikap di antara pengemudi, lereng curam untuk penggunaan

jalan, kegagalan untuk membersihkan zona keamanan kursi roda untuk penyandang cacat, kegagalan untuk menyediakan rute pemberhentian, dan kegagalan untuk memberikan identifikasi rute.

Selain memastikan bahwa tidak ada hambatan untuk semua pengguna transportasi kampus, mahasiswa dan dosen dapat berkolaborasi untuk meningkatkan layanan transportasi di dalam kampus. Layanan dibuat untuk mempermudah masyarakat kampus untuk mendapatkan informasi penting mengenai jadwal dan kegiatan yang berkaitan dengan transportasi area kampus. Kolaborasi yang dilakukan dapat berupa membuat aplikasi yang dapat membantu perencanaan rute, penjadwalan dan log perjalanan, pengaturan dan informasi tambahan, dan informasi parkir sepeda (Bopp et al., 2017). Deskripsi tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan kampus dan dimodifikasi dengan indikator penilaian *Green Metric* agar lebih mudah disesuaikan apabila di kemudian hari dilakukan monitoring dan evaluasi.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan *green transportation* yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kampus sangat tergantung dengan kebijakan. Kebijakan yang menjadi prioritas utama adalah peningkatan kualitas lingkungan dengan alternatif kebijakan pengelolaan tata sirkulasi transportasi kampus, pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda, penyediaan transportasi umum massal/bus kampus yang nyaman dan tarif terjangkau, penyediaan fasilitas pendukung yang aman dan nyaman, gerakan menanam pohon dan kampanye lingkungan di sosmed, pengalihan moda transportasi pribadi kepada transportasi umum, Standar Operasional Prosedur (SOP) mutu pengelolaan transportasi internal kampus, penerapan *car free day* di kampus untuk mengurangi asap kendaraan bermotor, berjalan kaki dan/atau bersepeda dalam melakukan kegiatan di lingkungan kampus, menggunakan moda transportasi yang ramah lingkungan di sekitar kampus, penyediaan fasilitas titik-titik parkir, peningkatan jumlah penelitian terkait transportasi berkelanjutan.

PENUTUP

Belum optimalnya implementasi *green transportation* di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Diponegoro disebabkan beberapa kendala. Kendala tersebut seperti fasilitas yang belum terbangun secara menyeluruh, fasilitas yang belum memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna fasilitas terutama kaum disabilitas serta keintegrasian antar fasilitas yang belum maksimal. Oleh karena itu kesadaran pentingnya *green transportation* dan ramah lingkungan sangat penting. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan, kerja sama dari masyarakat kampus sangat diperlukan untuk menciptakan *green campus*. Kampus berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana yang baik dan masyarakat kampus sebagai pengguna manfaat harus

saling bekerja sama untuk mencapai implementasi *green transportation* di lingkungan kampus. Dengan dikembangkannya fasilitas dan teknologi yang dapat memudahkan dan membantu masyarakat kampus dalam memanfaatkan *green transportation*, maka perlu adanya kelanjutan dan apabila ada hal yang perlu dikoreksi dan dibenahi sebaiknya segera diperbaiki guna memastikan terwujudnya *green campus*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshuwaikhat, H. M., & Abubakar, I. (2008). An Integrated Approach to Achieving Campus Sustainability: Assessment of the Current Campus Environmental Management Practices. *Journal of Cleaner Production*, 16(16), 1777–1785.
- Balsas, C. J. (2003). Sustainable Transportation Planning on College Campuses. *Transport Policy*, 10(1), 35–49.
- Bezyak, J. L., Sabella, S. A., & Gattis, R. H. (2017). *Public Transportation : An Investigation of Barriers for People With Disabilities*. <https://doi.org/10.1177/1044207317702070>
- Bond, A., & Steiner, R. (2006). Sustainable Campus Transportation Through Transit Partnership and Transportation Demand Management: A Case Study from the University of Florida. *Berkeley Planning Journal*, 19(1), 125–142.
- Bopp, M., Sims, D., Matthews, S. A., Rovniak, L. S., Poole, E., & Colgan, J. (2017). *Development , Implementation , and Evaluation of Active Lions : A Campaign to Promote Active Travel to a University Campus*. <https://doi.org/10.1177/0890117117694287>
- Elizabete, M., Seifferta, B., & Loch, C. (2005). Systemic thinking in environmental management support for sustainable development. *Journal of Cleaner Production*, 13(1), 197–202.
- Emanuel, R., & Adams, J. (2011). College Students' Perceptions of Campus Sustainability. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 12(1), 79–92.
- Ghafuri, P., Farhadi, A., & Mansouri, A. (2014). Relationship between intellectual capital and organizational agility with mediatory role of employee empowering in service sector (Case Study: Karafarin Insurance Company) (In Persian). *International Journal of Economy, Management and Social Sciences*, 3(12), 11–15.
- Hapsari, I. D., Sumarjiyanto, N., & Purwanti, E. Y. (2014). Perencanaan Dan Penganggaran Kampus Berkelanjutan: Green Campus Universitas Diponegoro. *Teknik*, 35(2), 86–93. <https://doi.org/10.14710v35i2.7196>
- Mahayudin, R. M., Yunos, M., Yazid, M., Mydin, M. A. O., & Osman, M. T. (2015). Developing a sustainable campus landscape criteria: an evaluation

- Universiti Pendidikan Sultan Idris as a Green Campus. *Advances in Environmental Biology*, 9(4), 201–204.
- McMahon, D. D., Smith, C. C., Cihak, D. F., Wright, R., & Gibbons, M. M. (2015). Effects of digital navigation aids on adults with intellectual disabilities: comparison of paper map, Google maps, and augmented reality. *Journal of Special Education Technology*, 30, 157–165.
- Mechling, L. C., & Savidge, E. J. (2011). Using a personal digital assistant to increase completion of novel tasks and independent transitioning by participants with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 41, 687–704.
- Mechling, L. C., & Seid, N. H. (2011). Use of a hand-held personal digital assistant (PDA) to self-prompt pedestrian travel by young adults with moderate intellectual disabilities. *Education and Training in Autism and Developmental Disabilities*, 46, 220–237.
- Newman, L. (2006). Change, uncertainty, and futures of sustainable development. *Futures*, 38(5m), 633–637.
- Nuworsoo, C. (2005). Deep Discount Group Pass Programs: Innovative Transit Finance. *Berkeley Planning Journal*, 18(1), 151–165.
- Prihanto, T. (2017). *Strategi dan Program Pengembangan Konservasi di Kampus Hijau Universitas Negeri Semarang (UNNES)*. Universitas Negeri Semarang.
- Putri, N. T., Amrina, E., & Nurnaeni, S. (2020). ScienceDirect ScienceDirect Students ' Perceptions of the Implementation of Sustainable Campus Development Based on Landscape Concepts at Andalas University Students ' Perceptions of Implementation of Sustainable Campus Development Based on Landscape Conc. *Procedia Manufacturing*, 43(2019), 255–262. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.150>
- Satriyadi, L., & Bambang, H. (2016). *PRASARANA PEDESTRIAN DI LINGKUNGAN KAMPUS : 024*. Universitas Negeri Semarang.
- Statistik Pendidikan Tinggi. (2019). *Statistik Pendidikan Tinggi | Higher Education Statistics 2019*.
- Stock, S. E., Davis, D. K., Hoelzel, L. A., & Mullen, R. J. (2013). Independent, Evaluation of a GPS-based system for supporting Disability., use of public transportation by adults with intellectual. *Inc*, 1, 133–144.
- Toor, W., & Havlick, S. (2004). *Transportation and Sustainable Campus Communities: Issues, Examples, Solutions*. Island Press.
- Universitas Diponegoro. (2021). *Sustainability Report*. Universitas Diponegoro.
- Wheeler, S. M., & Beatley, T. (2004). *Sustainable Urban Developmnt Reader*. Routledge.

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN

Asep Ferry Bastian, Faisal Tomi Saputra, Khusaini Khusaini

PENDAHULUAN

Upaya pemberdayaan UMKM merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang menyatakan bahwa UMKM merupakan integrasi pembangunan ekonomi nasional yang diharapkan mampu meningkatkan dan melaksanakan pemerataan pendapatan serta menciptakan lapangan kerja. Ini dapat diartikan bahwa keberadaan UMKM diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Budiyanto & Effendy, 2020). Mengingat UMKM memiliki kemampuan daya serap tenaga kerja yang cukup besar, memiliki etos kerja, penyumbang ekspor produk non migas, serta potensi yang besar untuk dikembangkan (Mulyono, 2010; Munandar, 2016; Nuraini et al., 2016; Oseifuah et al., 2018; Prasetyo, 2009), serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi global dan benteng tangguh perekonomian (Cosenz & Noto, 2015; Peter et al., 2020; Rapih et al., 2015). Kontribusi UMKM terhadap pemerataan ekonomi Indonesia ditunjukkan dengan kontribusi terhadap PDB yang mencapai 56% (Layyinaturrobaniyah & Muizu, 2017).

UMKM sebagai salah satu mesin perekonomian Nasional. Bagi daerah, eksistensi UMKM juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah, yakni upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan pendapatan di daerah (Blakely & Leigh, 2013). Pemerintah Kota Tangerang berekepentingan untuk menjaga agar perekonomian daerah tetap tumbuh dan berkembang dengan kontribusi UMKM yang ada.

Peran pemerintah dibutuhkan karena saat ini UMKM Kota Tangerang menghadapi berbagai permasalahan akibat Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, yakni menyebabkan UMKM di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian (OECD, 2020). Bahkan hasil survey terhadap pelaku UMKM di Kota Tangerang pada akhir tahun 2020 menunjukkan bahwa pelaku UMKM tidak dapat melakukan pembayaran angsuran mencapai 54.5%, hanya membayar pokok pinjaman sebanyak 9.1%, hanya membayar beban bunga sebanyak 6.1%, dan menjadwalkan ulang selama 6 bulan sebanyak 9.1%.

Sedangkan sebanyak 21.2% pelaku UMKM tidak mengalami kendala dengan kredit yang dialaminya. Permasalahan lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kurang lebih 45% pelaku UMKM di Kota Tangerang terkendala dengan penggunaan teknologi komputer dalam memproduksi barang dan distribusi barang (Bastian & Khusaini, 2020).

Bentuk nyata yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM saat selain pemberian dana stimulan, yakni program pemberdayaan oleh pemerintah daerah. Program pemberdayaan UMKM merupakan program yang berkesinambungan untuk disediakan oleh pemerintah daerah berupa pelatihan dan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan dapat meningkatkan omset penjualan dan kesejahteraan masyarakat (Budiyanto & Effendy, 2020; Jamaluddin, 2019). Studi lain juga menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui pendampingan dapat meningkatkan pemahaman, dan nilai tambah sehingga meningkatkan pendapatan (Handayani et al., 2020). Dari aspek teknologi informasi, pelaku UMKM diberikan pendampingan tentang pemasaran secara online. Hasil studi menunjukkan bahwa program pendampingan ini sangat penting dalam meningkatkan penjualan pada masa pandemic Covid-19 (Muzdalifah et al., 2020). Penggunaan pemasaran online tidaklah cukup untuk mengdongkrak penjualan hasil produksi UMKM, namun dibutuhkan juga dibutuhkan pemahaman digitilaisasi hukum dan ekonomi (Arrizal & Sofyantoro, 2020).

Program pemberdayaan UMKM melalui pendampingan sangat dibutuhkan pada masa sulit, keterbatasan aktivitas, serta penurunan pendapatan masyarakat. Hal ini ditujukan, agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kompetensi dan kapasitas dalam menghadapi ketatnya persaingan, krisis, dan kondisi pandemi. Disamping itu, pelaku UMKM diharapkan mampu menguasai dan memperluas pasar. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka dibutuhkan program pemberdayaan UMKM, berupa pendampingan yang efektif, tepat sasaran, dan integratif. Program tersebut dapat berjalan dengan baik, jika ada keterlibatan pemangku kepentingan, yakni pemerintah, perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya. Karena, kegiatan pendampingan UMKM berupa pelatihan yang kurang tepat sasaran terbukti kuat tidak optimal dalam meningkatkan pendapatannya (Sari, et al., 2019).

Studi ini berfokus pada identifikasi kebutuhan personel pendamping dan model pemberdayaan melalui program pendampingan UMKM di Kota Tangerang oleh pemerintah daerah. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan kebijakan pemerintah Kota Tangerang tentang pentingnya program pendampingan bagi UMKM selama masa pandemic Covid-19, sehingga pelaku usaha UMKM dapat bertahan dan meningkatkan produktivitasnya. Peneliti menggunakan studi kepustakaan (dokumentasi) berupa hasil publikasi jurnal, dokumen yang dipublikasikan oleh pemangku

kepentingan, dan dokumen lainnya. Rancangan penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menafsirkan makna data sehingga peneliti memperoleh gambaran yang holistik tentang kondisi yang apa adanya (Sugiyono, 2017).

PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan pemingkatan peran aktif dari masyarakat dalam sebuah aktivitas (Mustikarini & Santi, 2020). Pemberdayaan juga didefinisikan sebagai proses dimana individu memiliki keinginan kuat untuk berpartisipasi kontrol, peristiwa, pengaruh, serta instistusi yang mengubah kehidupannya (Mardikanto & Soebiato, 2017; Sholeh, 2014). Dalam pemberdayaan, sorang individu, kelompok, dan atau masyarakat berupaya untuk mengendalikan kehidupannya dan bekerja untuk kepentingan masa depannya (Faisal, 2020). Pendapat lain dinyatakan oleh (Zubaedi, 2007) yang menyatakan bahwa kemampuan penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan melalui paritisipasi dalam kehidupan guna menentukan masa depannya juga disebut sebagai pemebrdayaan.

Bertitik tolak pada pendapat tersebut, maka pemberdayaan dapat dikatakan sebagai bentuk keterlibatan seseorang atau kelompok masyarakat dalam sebuah kegiatan untuk meningkatkan manfaat yang diperoleh guna menentukan masa depan yang lebih baik. Pemberdayaan dibutuhkan semua elemen masyarakat sesuai dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing dalam kehidupannya. Pemberdayaan mengidikasikan pada otonomi pengambilan keputusan oleh individu atau sekelompok masyarakat yang berdasar pada aspek demokrasi. Isu-isu lokal dapat diangkat sebagai fokus pemberdayaan, jika masyarakat telah siap (Bebbington, 2000). Dimensi pemberdayaan meliputi peciptaan masyarakat untuk berkembang, memperkuat potensi masyarakat, serta membentengi diri dari kekuatan yang melemahkan.

Pranarka et al. (1996) menyatakan bahwa proses pemberdayaan harus memlalui tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap partisipasi, dan tahap pembebasan. Pada tahap awal, semua proses pemberdayaan bersumber dari pemerintah, diinisiasi oleh pemerintah, dan menghadapi masyarakat. Pada tahap partisipasi, proses pemberdayaan bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Sedangkan pada tahap pembebasan, proses pemberdayaan bermuara dari masyarakat/komunitas yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan untuk membangun kemandirian. Masyarakat telah menemukan potensi dan kekuatan sendiri sehingga dapat mewujudkan pembahuruan realisasi diri. Keberhasilan proses pemberdayaan tersebut harus mempedomani prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, serta berkelanjutan (Fitriani, 2021).

2. Pendampingan

Pendampingan merupakan aktivitas membberikan konsultasi terhadap pihak yang didampingi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gunarsa (2009) yang menyatakan bahwa pendampingan sebagai kegiatan konsultasi. Orientasi dari pendampingan diarahkan pada hubungan antara seorang ahli dengan yang tidak ahli. Orang yang didampingi dianggap/ diasumsikan sebagai pihak kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan, serta memiliki potensi untuk berkembang. Sedangkan pendamping mempunyai keahlian dalam memahami seluk beluk permasalahan dan memecahkannya. Tujuan dari pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan, mengembangkan kemampuan, kekuatan, potensi, dan sumber daya agar dapat memperkuat dirinya sendiri. (Wiryasaputra, 2006) menyatakan bahwa fungsi pendampingan adalah penyembuhan, penompang, pembimbing, penjaga hubungan, dan pemberdayaan.

Terkait dengan UMKM, tujuan program pendampingan adalah agar pelaku UMKM mampu mengelola usaha lebih baik lagi dengan meminimalisasi permasalahan yang dialaminya. Artinya, pelaku usaha mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikannya dengan baik. Sedangkan pendampingan UMKM harus terintegrasi yang lebih menekankan pada peningkatan sistem kelembagaan dan aspek manajerial. Kegiatan pendampingan dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan melibatkan konsultan ahli yang profesional (Wahyudi, 2009). Konsultan ahli ini memberikan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan operasionalisasi usaha. Keunggulan pendampingan UMKM terpadu lainnya adalah menggunakan pendekatan yang lebih proaktif dan intensif, serta pendekatan yang lebih personal. Namun model pendampingan integratif memiliki kelemahan, yaitu (1) banyak lembaga belum tersedia konsultan ahli; dan (2) kegiatan pendampingan lebih bersifat proyek (Wahyudi, 2009).

Sedangkan model pendampingan UMKM terpadu yang dapat dirumuskan dengan cara: (a) berfokus pada pembuatan produk sampai dengan pemasaran; (b) melakukan dokumentasi yang baik; (c) lembaga menyediakan tenaga ahli/konsultan guna memberikan edukasi. Terdapat indikator tahapan UMKM dalam setiap tahapan perkembangan pembangunan. Namun, rumusan indikator perkembangan UMKM masih belum tersedia, sehingga tidak memungkinkan untuk memahami tahapan dan kondisi UMKM yang membutuhkan perlakuan tertentu. Dengan *treatment* tersebut, UMKM mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan (Sari, 2019).

3. Keadaan UMKM di Kota Tangerang

UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang “Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

pasal 1 menyatakan bahwa “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil”. Besar kecilnya usaha UMKM ditentukan dengan jumlah kekayaan bersih dan jumlah karyawan yang dimilikinya. Semakin besar kekayaan bersih, maka kriteria usaha tersebut semakin naik kelas dari usaha mikro ke usaha kecil, dari usaha kecil ke usaha menengah dan usaha besar.

Menurut data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil dan menengah di Kota Tangerang adalah semakin meningkat, namun pertumbuhannya masih fluktuatif (Badan Pusat Statistik, 2020). Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Perkembangan Jumlah UKM di Kota Tangerang, 2016 - 2020

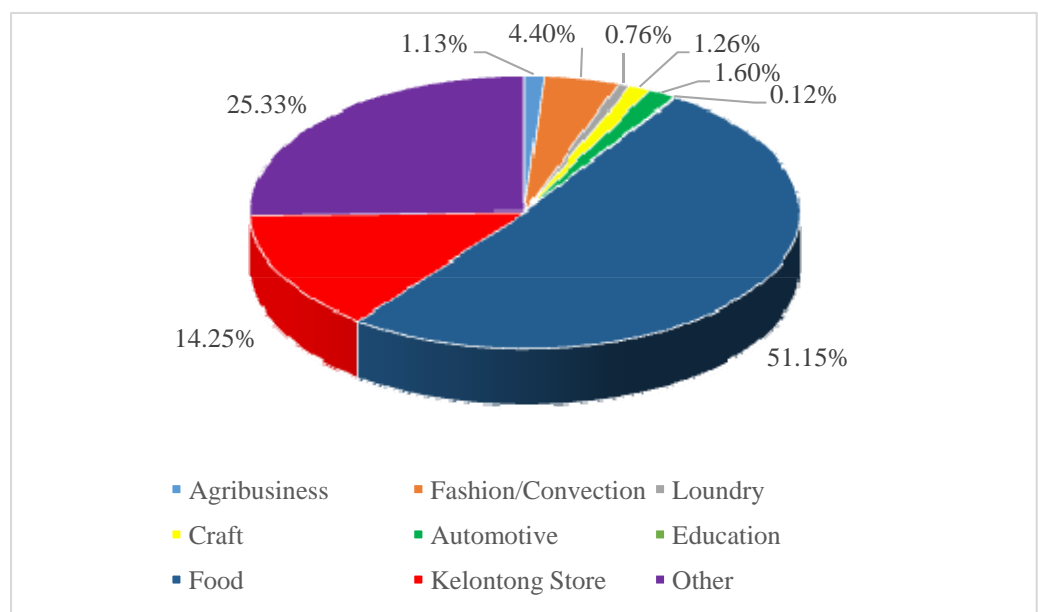
Tahun	Jumlah	Pertumbuhan
2016	10.533	-
2017	10.675	1.35%
2018	11.746	10.30%
2019	12.508	6.48%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Berdasarkan tabel 1 diatas, tahun 2016 jumlah UKM di Kota Tangerang sebanyak 10,533 unit, kemudian naik sebesar 1,35% menjadi 10,675 unit pada 2017. Pada 2018, tingkat peningkatannya cukup signifikan, yakni mencapai 10,03% atau sebanyak 11,746 unit. Peningkatan tersebut tak lepas dari upaya pemerintah daerah yang mendorong pengembangannya, diantaranya Tangerang LIVE, bahwa Kota Tangerang merupakan tempat yang layak investasi. Selanjutnya, pada 2019 jumlah UMKM meningkat lagi sebesar 6,48% sehingga menjadi 12,508 unit. Jadi dalam kurun waktu 4 tahun, tingkat peningkatannya mencapai 17,75%.

Sebuah sektor mengacu pada pembagian terperinci dari sistem struktur organisasi unit bisnis atau individu yang terlibat dalam produksi homogen dalam ekonomi nasional (Phan et al., 2015). Sektor UMKM di Kota Tangerang meliputi sub sektor agrobisnis, fashion konveksi, jasa laundry, kerajinan, otomotif, pangan (termasuk minuman), pendidikan, toko warung kelontong, dan lainnya sebanyak 62.248 unit UMKM. Dari ke 9 sub sektor tersebut, UMKM yang paling tinggi bergerak pada sub sektor makanan dan minuman, yakni

mencapai 51.16% atau sebanyak 31.287 unit UMKM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM (2020), data diolah
Gambar 1 Jumlah UMKM Kota Tangerang (Persentase), 2020

Dari gambar 1 juga menjelaskan bahwa jumlah UMKM yang bergerak pada subsektor jasa lainnya dan warung kelontong masing-masing sebanyak 25.29% atau 15.735 unit UMKM dan warung kelontong sebanyak 14.27% atau 8.879 unit UMKM. Adapun jumlah UMKM yang bergerak pada sub sektor jasa pendidikan dan jasa laundry adalah paling sedikit yakni masing-masing sebanyak 0.12% atau 77 unit UMKM dan 0.76% atau 473 unit UMKM.

Jumlah UMKM sebanyak 62.248 tersebar di seluruh kecamatan Kota Tangerang. Adapun jumlah UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2020, seperti terlihat pada tabel 2 berikut.

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang paling tinggi berlokasi di Kecamatan Pinang sebanyak 13.80% atau 8.592 unit UMKM dan di Kecamatan Karawaci yakni sebanyak 11.39%. Sedangkan yang paling sedikit UMKM berlokasi di Kecamatan Batuceper sebanyak 5.17% atau 3219 unit UMKM dan di Kecamatan Jatiuwung sebanyak 4.33% atau 2.693 unit UMKM.

Tabel 2 Jumlah UMKM per Kecamatan Berdasarkan 9 Sektor

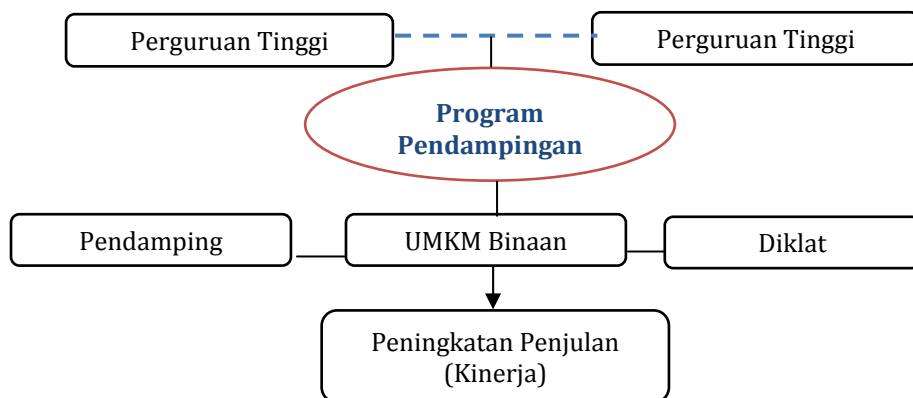
Kecamatan/ Jenis Usaha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah
Tangerang	24	153	30	41	88	3336	5	857	946	5480
Cipondoh	54	240	42	70	92	1865	12	695	1282	4352
Pinang	156	322	73	121	144	3188	8	1364	3216	8592
Larangan	36	722	39	71	67	1944	7	628	820	4334
Ciledug	111	278	82	48	94	2200	3	802	984	4602
Karang Tengah	159	179	31	60	49	1622	7	647	998	3752
Batuceper	8	78	13	32	42	1996	3	334	713	3219
Benda	43	82	32	71	67	1980	6	591	535	3407
Neglasari	16	56	21	42	84	2829	2	478	1723	5251
Periuk	29	225	59	64	87	2592	3	727	1728	5514
Jatiuwung	8	83	9	33	42	1652	0	426	440	2693
Cibodas	21	114	12	45	33	1983	5	572	1176	3961
Karawaci	38	210	30	86	107	4640	16	758	1206	7091
Jumlah	703	2742	473	784	996	31827	77	8879	15767	62248

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM (2020)

Catatan: (1) agrobisnis, (2) fashion konveksi, (3) jasa laundry, (4) kerajinan, (5) otomotif, (6) pangan (termasuk minuman), (7) pendidikan, (8) toko warung kelontong, (9) lainnya

4. Pendampingan UMKM di Kota Tangerang

UMKM berbeda dari usaha yang lebih besar karena rentang skala dan ruang lingkup dan sumber daya manusia yang lebih terbatas, sehingga membatasi jangkauan pengetahuan dan pengalaman khusus organisasi (Amankwah-Amoah et al., 2020), serta ada keterbatasan dalam hal kemampuan mengelola risiko dan mitigasi dari kesulitan. Oleh karena salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pendampingan UMKM, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19, agar UMKM tetap eksis. Dalam kajian ini, model pendampingan sebagai berikut:

**Gambar 2** Model Pendampingan UMKM

Gambar 2 diatas menjelaskan bahwa kerja sama antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah merupakan hal penting untuk melakukan program pemberdayaan UMKM berupa pendampingan. Bentuk kegiatan pendampingan UMKM berupa program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan yang berfokus pada pemahaman pengetahuan tentang entrepreneurship, pengelolaan karyawan, model pemasaran, pengelolaan keuangan, hukum, dan sebagainya. Dukungan dari pemerintah, seperti pendanaan, sarpras kerja pendampingan, fasilitas display galeri produk, dan pembiayaan. Keterlibatan dosen sebagai pendamping (konselor) dari ahli yang tersedia di perguruan tinggi Kota Tangerang sangat dibutuhkan serta didukung oleh pemangku kepentingan diantaranya Kadin, Konsultan, PT. Telekomunikasi Indonesia, dan sebagainya. Mereka melakukan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan panduan, kurikulum, kegiatan, dan instrumen evaluasinya agar tujuan peningkatan kinerja UMKM dapat tercapai. Bentuk metode kegiatan penadampingan yang disepakati oleh para pemangku kepentingan berupa konseling dan pelatihan.

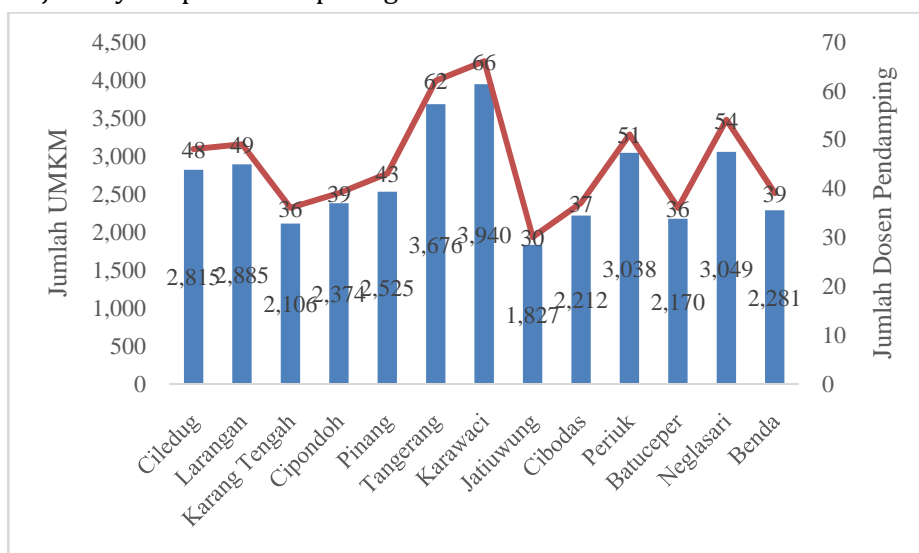
Kegiatan konseling dari dosen untuk mendiagnosis bisnis melalui *SWOT Analysis* yang digunakan dalam Studi Kelayakan Bisnis, sehingga dapat ditentukan solusi dan rekomendasinya. Kemudian dilakukan proses konseling berkaitan dengan permodalan, Sumber Daya Manusia, produksi, kemampuan teknologi informasi (TI) dan pasar serta manajerialnya yang menjadi rencana program pendampingan UMKM. Sedangkan metode pelatihan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola usaha baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Ada beberapa metode pendampingan yang bisa digunakan dalam program ini. Misalnya dengan menggunakan Metode Pelatihan CEFE (Competency Based Economies Through Formation of Enterprise) yang biasa digunakan dalam program kewirausahaan. Metode Pelatihan CEFE, metode yang dikembangkan oleh CTZ (Ekonomi Berbasis Kompetensi Melalui Pembentukan Wirausaha).

Pendekatan CEFE memiliki keunggulan dibandingkan metode lainnya, yaitu bahwa wirausahawan harus selalu sadar akan kemampuan yang dimilikinya dan kondisi lingkungannya, jika ingin sukses. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh pengusaha, seorang pelaku usaha mampu mengidentifikasi dan merefleksikan proyeknya sendiri jika telah dinyatakan layak, sehingga mampu mengoperionalkannya. Pengusaha harus belajar sendiri, harus menguji ide-ide mereka, mempertimbangkan kelayakan proyeknya dan menyiapkan rencana bisnis yang baik. Pengusaha dapat menentukan solusi permanen, berinovasi, mengurangi ketergangunagn, serta meningkatkan daya saing. Bagi pengusaha pemula, mereka memiliki kepercayaan diri tinggi dalam mengerjakan proyek yang didukung oleh keuangan dan bantuan lainnya. Sedangkan bagi calon pengusaha, pada awal hanya diberikan masukan saat kondisi tertentu, misalnya terkait dengan intruksi atau operasional kerja. Adapun wirausahawan

yang telah berhasil memiliki pengalaman wirausaha yang nyata. Perluasan dan pengembangan usaha telah sesuai dengan operasional yang seharusnya. Mereka mampu merencanakan dan mengelola pertumbuhan, ekspansi, dan diversifikasi bisnis mereka dengan lebih baik.

Salah satu elemen yang memiliki peran penting dalam program pemberdayaan masyarakat kolaboratif adalah universitas. Universitas memiliki laboratorium inkubasi bisnis, bertindak sebagai penasehat sekaligus pendamping bagi pelaku UMKM di Kota Tangerang. Untuk mengetahui jumlah rasio pendamping yang ideal dan jumlah UMKM yang perlu dibina berdasarkan kesesuaian disiplin ilmu yang dikuasai, maka dilakukan inventarisasi data dari sumber daya yang ada. Program studi yang dapat dilibatkan dalam program pendampingan ini antara lain: Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Komunikasi dan Bisnis Digital. Jumlah dosen pendamping yang tersedia di Kota Tangerang sebanyak 590 dosen dari 5 univesritas.

Sementara itu, jumlah UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang pada Tahun 2020 sebanyak 62.248 UMKM yang terdiri atas 9 sektor di antaranya: agrobisnis, *fashion* konveksi, jasa *laundry*, kerajinan, otomotif, pangan (termasuk minuman), pendidikan, toko warung kelontong, dan lainnya. Akan tetapi agar lebih fokus terhadap pelatihan pendampingan berkaitan tentang permodalan, SDM, produksi, kemampuan teknologi informasi (TI) dan pasar serta manajerial, maka ditentukan tujuh sektor yang diprioritaskan dalam pemberdayaan pendampingan UMKM di Kota Tangerang. Jumlah dosen pendamping dan jumlah UMKM yang ditetapkan memperoleh pendampingan terdistribusi pada setiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3 Perbandingan Antara Jumlah UMKM dan Dosen Pendamping

Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah UMKM dari tujuh sektor yang telah ditentukan sebanyak 34.898 dibagi dengan jumlah dosen (pendamping) sebanyak 590 orang, sehingga rasio yang dihasil adalah 1 : 59 yang berarti 1 dosen pendamping membina sebanyak 59 pelaku UMKM. Hasil ini dapat memberikan gambaran bahwa program pemberdayaan UMKM melalui program pendampingan sangat terbuka untuk dilaksanakan dengan melibatkan perguruan tinggi. Pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan pendampingan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Universitas juga mendukung dalam aspek penelitian, laboratorium inkubasi bisnis dan pendampingan UMKM. Pihak swasta yang memberikan dukungan dalam bentuk *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) ataupun pinjaman lunak bagi UMKM. Media massa, memeberikan informasi yang edukatif dalam sosialisasi program pendampingan UMKM. Serta peran aktif masyarakat yang juga membantu dalam partisipasi guna memberdayakan pelaku UMKM yang pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yakni peningkatan kinerja dan pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang.

Berbagai hasil studi empiris sebelumnya yang membuktikan bahwa kegiatan pemberdayaan UMKM pendampingan terbukti dapat meningkatkan kinerja atau pendapatan UMKM diantaranya oleh (Arrizal & Sofyantoro, 2020; Budiyanto & Effendy, 2020; Faisal, 2020; Jamaluddin, 2019; Muzdalifah et al., 2020). Progran pendampingan UMKM yang dilakukan adalah pelatihan pemasaran online, manajerial (pengelolaan karyawan dan keuangan), inovasi dan nilai tambah produksi. Oleh karena itu, model pendampingan berupa pelatihan ini perlu diadaptasi dan dilaksanakan di Kota Tangerang.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah pendapatan yang menurun, sulitnya akses permodalan, hambatan produksi, dan bahan baku yang mahal. Pelaksanaan pendampingan peningkatan produksi menjadi penting dalam mengembangkan usaha UMKM. Pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha agar mampu menggali dan mengolah potensi daerah, segingga menjadi produk unggulan, serta melakukan inovasi terhadap produk yang sudah ada. Pelaksanaan pendampingan peningkatan penjualan (marketing) produk UMKM, penyusunan laporan keuangan, manajemen dan mitigasi risiko, digitalisasi penjualan akan berdampak baik dalam meningkatkan penjualan di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka program pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu dilaksanakan dalam meningkatkan pengembangan UMKM terutama pada masa pandemi Covid-19 sehingga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat mendo-

rong keterlibatan melibatkan secara nyata universitas, bahkan swasta, media, dan masyarakat dalam menjalankan program pendampingan pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amankwah-Amoah, J., Khan, Z., & Wood, G. (2020). COVID-19 and Business Failures: The Paradoxes of Experience, Scale, and Scope for Theory and Practice. *European Management Journal*, 39(2), 179–184. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.09.002>
- Arrizal, N. Z., & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi. *Birokrasi Pancasila : Jurnal Pemerintahan, Pembangunan, Dan Inovasi Daerah*, 2(1), 39–48. <http://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp%0APemberdayaan>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Provinsi Banten Dalam Angka 2020* (Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (ed.)). BPS Provinsi Banten.
- Bastian, A. F., & Khusaini. (2020). Analisis Pengembangan UMKM dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Tangerang. *Bappeda Kota Tangerang*.
- Bebbington, A. (2000). Development is more than just growth. *Development Outreach*, 2(3), 7–10.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2013). *Planning local economic development*. Sage.
- Budiyanto, A., & Effendy, A. A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Mandiri*, 4(1), 80–93. <https://doi.org/10.33753/mandiri.v4i1.77>
- Cosenz, F., & Noto, L. (2015). Combining system dynamics modelling and management control systems to support strategic learning processes in SMEs: a Dynamic Performance Management approach. *Journal of Management Control*, 26(2), 225–248. <https://doi.org/10.1007/s00187-015-0208-z>
- Faisal, M. (2020). Empowerment Model for the Poor Communities in Urban Areas: A Study on Low-Income Households in Makassar. *Society*, 8(2), 517–528. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.180>
- Fitriani, L. (2021). *Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Gunarsa, S. D. (2009). *Konseling dan Psikoterapi* (8th ed.). BPK Gunung Mulia.
- Handayani, T., Rahmi, M., & Fathoni, A. (2020). Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Usaha Mikro Terdampak Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Jati Jakarta Selatan. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(2). <https://journals.upi->

- yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/975/765
- Jamaluddin, F. (2019). *Program Pemberdayaan Petani Landless Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petanu Landless: Essay* (pp. 1–5). IPB University.
- Layyinaturrobaniyah, & Muizu, W. O. Z. (2017). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikrodi Desa Purwadadi Barat dan Pasirbungur Kabupaten Subang. *Pekbis Jurnal*, 09(02), 91–103.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (4th ed.). Alfabeta.
- Mulyono, F. (2010). Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.26593/jab.v6i1.368>.
- Munandar, A. (2016). the Strategy Development and Competitive Advantages of Micro Small Medium Enterprise Business Institution Toward Regional Development. *AdBispreneur*, 1(2), 103–112. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v1i2.10233>
- Mustikarini, E. D., & Santi, R. (2020). The Empowerment Strategy of Newly Irrigated Rice Field Farmers through LEISA. *Society*, 8(1), 23–36. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.143>
- Muzdalifah, L., Novie, M., & Zaqiyah, S. (2020). Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju UMKM Go-Digital di Era Pandemi Covid 19 dan Era New Normal Bagi Pelaku UMKM Sidoarjo. *Seminar Nasional Sistem ...*, 2200–2208. <https://www.jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/296>
- Nuraini, E., Hermawan, A., Hubeis, A. V., & Panjaitan, N. K. (2016). Kajian Evaluasi Pelatihan Program Pengembangan Manajemen. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 14(2), 254–266. <https://doi.org/10.18202/jam23026332.14.2.07>
- OECD. (2020). *SME Policy Responses: Tackling Coronavirus (Covid-19) Contributing to A Global Effort*.
- Oseifuah, E., Gyekye, A., & Formadi, P. (2018). Financial literacy among undergraduate students: Empirical evidence from Ghana. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(6), 1–17.
- Peter, M. K., Kraft, C., & Lindeque, J. (2020). Strategic action fields of digital transformation. *Journal of Strategy and Management*, 13(1), 160–180. <https://doi.org/10.1108/JSMA-05-2019-0070>
- Phan, D. H. B., Sharma, S. S., & Narayan, P. K. (2015). Stock Return Forecasting: Some New Evidence. *International Review of Financial Analysis*, 40, 38–51. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.05.002>
- Pranarka, A. M. W., Priyono, O. S., & Studies, C. for S. and I. (Eds.). (1996). *Pemberdayaan : konsep, kebijakan, dan implementasi / Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka, penyunting*. Centre for Strategic and International

Studies.

- Prasetyo, P. E. (2009). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *Akmenika UPY*, 2, 2008.
- Rapih, S., Martono, T., & Riyanto, G. (2015). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Modal Sosial dan Modal Finansial terhadap Kinerja UMKM Bidang Garmen di Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan Insan Mandiri*, 1(2).
- Sari, Y. P. (2019). Model Pendampingan UMKM Pengolahan Hasil Laut dengan Metode Pendekatan Pendampingan Terintegrasi. *Jurnal Monex*, 8(1), 293–302.
- Sholeh, C. (2014). *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan* (1st ed.). Fokusmedia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyudi, I. (2009). *Program Pendampingan Terintegrasi Alternatif Solusi Kendala Non-Modal bagi UKM*.
- Wiryasaputra, T. (2006). *Ready to care: Pendampingan dan Konseling Psikologi* (1st ed.). GalangPress.
- Zubaedi. (2007). *Pemberdayaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES DENGAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA

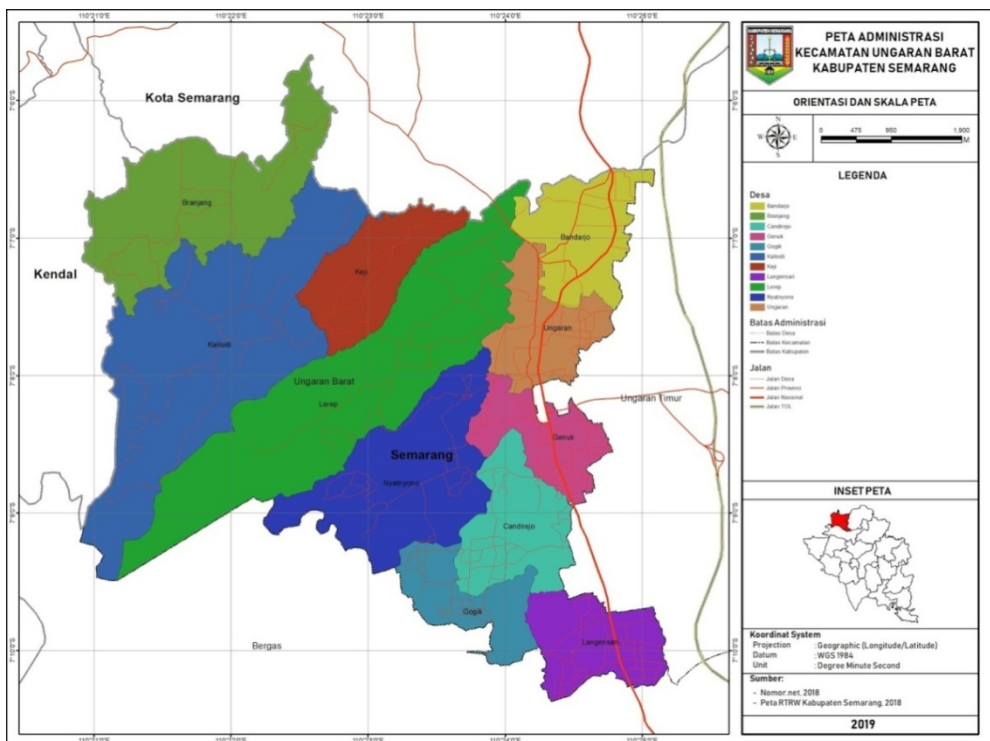
**Karsinah, Amin Pujiati, Fafurida, Annis Nurfitriana Nihayah, Tania
Wicaksana Yuneldi**

PENDAHULUAN

Desa Keji adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Desa Wisata Seni, adalah sapaan hangat untuk desa yang terbagi menjadi tiga dusun tersebut, yaitu Dusun Keji, Dusun Suruhan dan Dusun Setoyo. Menurut pemaparan dari narasumber, yaitu Mbah Rajak selaku sesepuh di Dusun Suruhan Desa Keji, penamaan ketiga dusun tersebut berdasarkan karakteristik lingkungan dan masyarakat masing-masing dusun. Pertama, bernama Dusun Keji, karena dahulu kala pemerintahan Desa Keji didominasi oleh masyarakat yang keji (kejam), karakteristik masyarakat Dusun Keji dahulu juga merupakan masyarakat yang individual, egois, kejam yang juga dikenal dengan masyarakat yang suka berkelahi dan sabung ayam. Masyarakat Dusun Keji akrab dikenal sebagai pemerintah. Kedua, bernama Dusun Suruhan, karena karakteristik Dusun Suruhan taat dan tunduk pada pemerintah desa (pesuruh/Dusun Keji) atau dalam hal ini masyarakat Dusun Suruhan sebagai aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Keji. Yang Ketiga, penamaan Desa Setoyo belum diketahui secara baik asal mulanya oleh narasumber namun dikenali karakteristik masyarakat Dusun Setoyo juga merupakan masyarakat yang manut dan pasif dalam hal pemerintahan.

Masyarakat Desa Keji yang sekarang mayoritas merupakan masyarakat pendatang yang bermukim karena sebuah pernikahan. Karena pada saat Mbah Rajak pertama kali datang dari Salatiga pada tahun 1971 masyarakat Desa Keji sangatlah sedikit. Desa keji merupakan salah satu desa dari 11 kelurahan atau desa yang terdapat di Kecamatan Ungaran Barat. Desa keji terletak di kaki gunung ungaran dan letak kantor desa terletak pada ketinggian 390 mdpl. Jarak antara keji ke pusat pemerintahan atau orbitasi yaitu kecamatan dan kantor bupati adalah sebagai berikut Jarak menuju kantor Kecamatan sejauh 2 km sedangkan jarak menuju Kantor Bupati adalah 3 km.

Desa Keji terbagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Keji sebagai Rukun Warga (RW) 1, Dusun Suruhan sebagai RW 2 dan Dusun Sitoyo sebagai RW 3. Masing-masing RW terbagi menjadi beberapa Rukun Tetangga (RT). RW 1 terbagi dalam 8 RT, RW 2 terbagi dalam 4 RT dan RW 3 terbagi dalam 4 RT. Luas wilayah Desa Keji adalah 182,67 Ha dengan penggunaan lahan sebagai sawah, tegalan atau perkebunan, hutan dan pemukiman. Gambaran Desa Keji ditunjukkan pada peta berikut.



Sumber: monograf Desa Keji, 2020

Gambar : Peta Desa Keji 2021

Adapun batas-batas wilayah Desa Keji adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sumurejo
 Sebelah Selatan : Desa Kalisidi
 Sebelah Barat : Desa Kalisidi
 Sebelah Utara : Desa Lerep

Desa Keji terkenal akan julukan desa wisata budaya. Julukan tersebut didapat karena masih kuatnya budaya-budaya asli Keji yang sampai saat ini masih dilestarikan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu potensi yang ada di Desa Keji adalah adanya peternakan sapi perah yang dikelola

oleh UMKM. Salah satu bentuk usaha yang dikelola desa adalah berupa Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut dengan BUMDes. Adapun BUMDes yang ada di Desa Keji diberi nama BUMDes Maju Makmur.

Potensi Desa Keji sangat banyak, akan tetapi belum dikelola dengan baik. Badan usaha yang kompeten untuk mengelola sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan desa adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes menjadi badan usaha yang diharapkan akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki desa untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes Maju Makmur yang dimiliki oleh Desa Keji ternyata belum dikelola dengan baik. Manajemen Sumber Daya Manusia yang belum tertata dan unit usaha yang belum berjalan, menjadi PR atau pekerjaan rumah bagi desa untuk terus dipikirkan.

Desa Keji memiliki potensi yang banyak sekali, akan tetapi belum bisa dikelola dengan baik. Kondisi perekonomian pada saat ini yang masih belum membaik dengan adanya covid 19 menjadikan semua kegiatan ekonomi menjadi terhambat dan menjadi melambat. Keberadaan BUMDes Maju Makmur, menjadi harapan bagi masyarakat Desa Keji untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa Keji. Potensi yang dimiliki oleh Desa Keji antara lain adalah sumber mata air, kesenian, peternakan sapi perah, dan produk-produk lain yang dihasilkan sebagai barang-barang yang menjadi ciri khasnya bagi Desa Keji. Akan tetapi semua itu belum dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kegiatan yang diharapkan dapat memetakan potensi desa yang ada dan memberikan solusi dan jalan keluar terbaik untuk bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Desa Keji berkaitan dengan kondisi BUMDes Maju Makmur yang ada di Desa Keji adalah sebagai berikut :

- a. BUMDes Maju Makmur belum dikelola dengan baik karena belum adanya sumber daya manusia yang mendukung.
- b. Belum ada pemetaan yang jelas mengenai potensi-potensi desa yang dapat dikembangkan.
- c. Pengelolaan potensi yang ada belum dimaksimalkan karena hambatan hambatan pengetahuan dan keahlian yang terbatas.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun dasar hukum Badan Usaha

Milik Desa adalah Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dasar hukum ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan tentang BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Indonesia, 2021). Badan Usaha milik Desa dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi yang ada di desa, selanjutnya BUMDes diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bagi pegebanan desa. Hasil akhir dari pengelolaan BUMDes adalah adanya pendapatan asli dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Dampak akhir yang diharapkan adalah adanya peningkatan jumlah pendapatan desa dan juga masyarakat serta, berkurangnya pengangguran yang ada di desa yang bersangkutan serta mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Oleh karena itu pemerintah pusat menetapkan BUMDes sebagai salah satu program untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi desa yang bersifat mandiri di desa guna memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Pendirian BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa, dengan modal berasal dari pemerintah desa dan masyarakat desa tersebut, semua itu dilakukan secara musyawarah untuk mufakat antara masyarakat dengan pihak pemerintah desa. Dalam pengelolaan BUMDes harus sesuai dengan tujuan awal dari pendiriannya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dalam pengelolaannya, Badan Usaha Milik Desa menerapkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga harus memenuhi dua fungsi yaitu sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial bagi masyarakat desa. Fungsi pengelolaan sebagai lembaga sosial adalah untuk menyediakan pelayanan sosial, sedangkan fungsi sebagai lembaga komersial adalah untuk mengembangkan sumber daya lokal guna memperoleh keuntungan bagi masyarakat desa. Jenis usaha dasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa meliputi bidang jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, hasil pertanian, atau industri kecil dan rumah tangga. Usaha dasar ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kemampuan desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang diterbitkan oleh menteri yang mengurus urusan pedesaan.

Penjelasan dalam Undang-Undang Desa pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa fungsi BUMDes adalah lembaga yang diharapkan mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain fungsi tersebut ada beberapa fungsi dari BUMDes pertama adalah sebagai Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa. Kedua BUMDes berfungsi sebagai Lembaga yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat desa dengan kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Fungsi BUMDes ketiga adalah berperan sebagai Lembaga komersial yang membuka ruang gerak lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan

penghasilan, dengan membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di desa. Keempat fungsi BUMDes adalah sebagai Lembaga yang mampu menggalang dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Fungsi BUMDes selanjutnya adalah bahwa BUMDes harus mampu menjalin Kerjasama dengan lembaga perekonomian lain yang ada di desa maupun diluar desanya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan potensi desa merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dengan didukung oleh masyarakat yang ada. Pengelolaan potensi desa selalu dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat guna mengembangkan potensi desa yang ada tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Pemberdayaan masyarakat biasanya diartikan sebagai suatu proses pembangunan, dimana masyarakat ikut berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Tanpa peran serta dari masyarakat maka kegiatan pemberdayaan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah yang ada dibantu dengan wakil-wakil yang ikut mendukung kegiatan pengelolaan potensi yang dimiliki. Adanya otonomi daerah maka tanggung jawab pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah harus dapat dikelola sendiri. Oleh karena itu diperperlukan suatu wakil-wakil dari masyarakat untuk bisa ikut serta dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Transparansi sangat diperlukan dalam kegiatan ini, apalagi menyangkut masalah pengelolaan keuangan. Transparansi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari program kegiatan. (Ahmad & Talib, 2015). Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai transfer ilmu pengetahuan maupun transfer modal yang akan dikelola Bersama. Pemberdayaan lebih kepada pembangunan ekonomi yang ada dimasyarakat dengan didasarkan pada nilai-nilai sosial yang ada.

PEMBAHASAN

Desa Keji memiliki berbagai keragaman sumber daya yang dimiliki dan berbagai potensi yang belum tergali dengan baik. Masyarakat dengan berbagai latar belakang baik dari Pendidikan, pekerjaan maupun daerah asal, akan memberikan sumbangsih bagi kemajuan desa. Bumdes Maju Makmur yang dimiliki Desa Keji ternyata belum bisa bekerja dengan optimal dan seringkali terlihat vakum dalam kegiatan. Apabila dilihat dari kelembagaan kemasyarakatan yang ada di Desa Keji sebenarnya sudah cukup banyak kelembagaan yang sudah dibuat selain BUMDes. Ada Kelembagaan yang bersifat umum meliputi Lembaga desa, Lembaga kemasyarakatan desa (LKMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karang taruna, pos pelayanan Keluarga Ber-

cana, Kesehatan terpadu, serta pembinaan kesejahteraan keluarga. Masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di desa.

Kelembagaan yang bersifat khusus di Desa Keji terdiri dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pusat Informasi Konseling (PIK), Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) "Sami Aji", Persatuan Sepak Bola "Garuda Muda". Kelembagaan khusus inilah yang sebenarnya merupakan potensi yang dapat dikembangkan di Desa Keji. Potensi yang dapat dikembangkan BUMDes Maju Makmur di Desa Keji sebenarnya cukup besar, akan tetapi karena banyaknya kendala, sehingga belum bisa berjalan dengan baik. Apabila dilihat permasalahan secara umum dari pengelolaan BUMDes adalah dari sumber daya manusia (SDM). Akan tetapi apabila kita lihat dari berbagai BUMDes yang ada khususnya di Jawa Tengah permasalahan tersebut antara lain :

1. Kepengurusan BUMDes

BUMDes berupa lembaga yang harus dikelola oleh sumber daya manusia yang benar-benar mau bekerja dengan ikhlas dan tidak menuntut gaji yang tinggi, kecuali BUMDes tersebut sudah berkembang dengan baik. Permasalahan organisasi biasanya muncul diawal pembentukan Lembaga tersebut. Ada kepengurusan yang tidak profesional, seringkali BUMDes berhenti ditengah jalan. Meskipun kepengurusan BUMDes sudah dibentuk seringkali ditengah jalan banyak pengurus yang mengundurkan diri. Oleh karena itu tidak sedikit BUMDes yang akhirnya tidak bisa berkembang karena kurangnya pengaturan dalam organisasi.

2. Bagaimana menemukan dan mengembangkan Potensi Desa

Setiap wilayah dalam hal ini desa, tentu memiliki potensi sendiri-sendiri. Baik potensi yang berasal atau sudah disdiakan oleh alam maupun potensi yang harus digali dan dikembangkan oleh masyarakatnya. Seringkali masyarakat disuatu wilayah kesulitan untuk bisa menemukan potensi yang ada. Bahkan ada juga masyarakat yang tidak bisa mengembangkan potensi yang sudah disdiakan oleh alam. Disinilah perlu adanya pengembangan sumber daya manusia, Pendidikan dan ketrampilan sangat diperlukan untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Kadang ada masyarakat yang berpandangan kolot, sehingga potensi yang ada akan dibiarkan dan dianggap sesuatu yang keramat. Diperlukan suatu pendekatan yang baik antara pihak-pihak pemerintah daerah setempat dengan masyarakat, khususnya pada tokoh-tokoh masyarakat yang ada.

3. Pemasaran hasil BUMDes

BUMDes yang sudah memiliki produk-produk dan pengembangan potensi yang ada seringkali menghadapi kendala, bagaimana memasarkan produk-produk yang sudah dihasilkan. Apalagi dijamin sekarang ini, pemasaran tidak bisa hanya mengandalkan konsumen yang datang, tapi bagaimana produsen bisa mendekat kepada konsumen. Pemasaran secara digital sudah semakin marak, oleh karena itu perlu adanya suatu pemahaman dan pengetahuan lebih apabila ingin maju dan bersaing dengan produk yang sama yang dihasilkan dari BUMDes lain.

4. Pengembangan dan Evaluasi

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kreatifitas anak-anak mudan dalam mengembangkan produk, maka BUMDes harus mengikuti Langkah-langkah yang ada. Oleh karena itu perlu adanya inovasi dan pengembangan produk-produk dan harus mampu mngikuti permintaan pasar. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi, terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan BUMDes, hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

Demikian pula dengan BUMDes Maju Makmur di Desa Keji, apabila mampu mngembangkan potensi yang ada maka hal itu akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Salah satu yang dapat dikembangkan yaitu potensi pengelolaan air bersih. Desa Keji memiliki sumber air yang sangat potensial untuk dapat dipasarkan. Saat ini pengelolaan air dilakukan oleh Badan Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) Sami aji. Badan Pengelola Sarana penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) "Sami Aji" merupakan organisasi desa yang menangani penyediaan air bersih di Desa Keji. Awal mula berdirinya BP-SPAMS dilatarbelakangi oleh belum adanya pengelolaan air bersih yang mumpuni padahal potensi di Desa Keji sendiri sangat baik untuk dilakukan pengelolaan guna pendapatan desa. BP-SPAMS berdiri pada tahun 2013 dan mengajukan bantuan kepada Pemerintahan Kabupaten Semarang sehingga di Desa Keji mendapatkan bantuan berupa PAMSIMAS untuk penggunaan air sehari-hari di Desa Keji. System di BP- SPAMS sama dengan system PDAM, yakni pemasangan pertama harus melakukan pendaftaran, lalu untuk tiap bulannya membayar pengeluaran air yang digunakan sesuai dengan besarnya sesuai dengan besarnya air yang dikeluarkan. Jaringan sumber air di Desa Keji terdiri dari sumber mata air Kemloso di Dusun Suruhan serta PAMSIMAS dari bantuan pemerintah yang dikelola oleh BP/SPAMS. Kedua jaringan air bersih tersebut berasal dari sumber mata air yang terdapat di Desa Keji sendiri. Penduduk Desa Keji yang memanfaatkan langsung sumber mata air dari Kemloso yang pendistribusiannya menggunakan pralon air

yang ditampung disebelah kantor Desa Keji lalu disalurkan ke tendon tiap RT namun keberadaannya sekarang hanya ada di RT 4,5 dan 6. Yang kemudian disalurkan langsung kerumah warga. Namun keberadaan tendon ini dalam kondisi terbuka sehingga kejernihan atau kualitas air tersebut kurang baik jika dibandingkan dengan air saluran dari PAMSIMAS. Penduduk di Dusun Suruhan dalam menggunakan air bersih bersumber dari sumber mata air Kemloso dan tanpa menggunakan air dari PAMSIMAS yang dikelola oleh BP/SPAMS. Sistem pendistribusiannya juga sama dengan Dusun Keji yakni memiliki tampungan besar di RT 2 kemudian disalurkan dimasing-masing penampungan tiap RT lalu disalurkan ke masing-masing rumah. Sumber air bersih yang digunakan di Desa Keji yang berasal dari PAMSIMAS yang dikelola oleh BP/SPAMS merupakan langkah pemerintah desa dalam pengelolaan sumber mata air melihat di Desa Keji terdapat potensi yang besar dalam bidang mata airnya. Selain potensi sumber air yang dimiliki, Desa Keji memiliki potensi berupa kesenian yang dapat dikembangkan. Potensi kesenian apabila terus dikembangkan maka dapat menjadikan Desa Keji sebagai Desa Wisata. Potensi yang ada antara lain berupa kesenian tari-tarian berupa Tari Pesisiran. Tari Pesisiran adalah kesenian tari yang menjadi ikon di Desa Keji. Tarian ini ditarikan dengan menggunakan kostum khusus dan jaran kepang. Tidak ada ritual khusus yang dilakukan saat akan menarikan tarian Kuda Pesisiran ini. Tarian ini ditarikan dengan diiringi oleh gamelan dan tembang jawa. Tarian ini dilakukan oleh anak-anak perempuan yang dilatih di sanggar sapuan. (Desa, 2014).





Sumber : Profil Desa Keji 2019

Gambar : Tari Pesisir dan Tari Kuda Lumping

PENUTUP

Peran BUMDes untuk mengembangkan potensi desa sangat diperlukan sekali, olehkarena itu perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Berbagai kendala yang dihadapi BUMDes dapat diselesaikan dengan baik apabila ada Kerjasama yang baik antara pengurus dengan masyarakat dan pemerintahan desa. Potensi Desa Keji sangat banyak, akan tetapi belum dikelola dengan baik. Badan usaha yang kompeten untuk mengelola sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan desa adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes menjadi badan usaha yang diharapkan akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki desa untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. S., & Talib, N. B. A. (2015). Empirical investigation of community empowerment and sustainable development: quantitatively improving qualitative model. *Quality and Quantity*, 49(2), 637–655.
<https://doi.org/10.1007/s11135-014-0014-y>
- Desa, P. (2014). *Buku Profil Desa*.
- Indonesia, P. R. (2021). Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, 0865, 1–71.
<https://blog.bumdes.id/2019/05/tantangan-dalam-pengelolaan-bumdes-apa-saja/>
<http://keji.sideka.id/gambaran-umum-wilayah-desa-keji/>
<https://sid.kemendes.go.id/home//bumdes/3322182003>

TRANSFER INFORMASI PENGETAHUAN DAN ADAPTASI KERJA DOSEN PADA MASA PANDEMI COVID 19

**Mahmud Yunus, Qristin Violinda, Suwarno Widodo, R. Istiyaningsih,
Rahmat Robi Waliyansyah**

PENDAHULUAN

Pandemi *covid 19* saat ini telah menyebar dunia (Asfahan, dkk, 2020). Kasus *Covid 19* yang pertama kali dilaporkan di Negara Wuhan China, lalu sangat cepat menyebar ke banyak negara lain (Liu, Yue, & Tchounwou, 2020). Pada tanggal 26 Juli 2021 *Covid 19* telah menyebar ke 222 Negara di dunia dengan 195,014, 643 kasus dan 4,178,779 kematian. Kasus *Covid 19* di Indonesia tercatat sebanyak 3,194,733, sementara 84,766 meninggal dunia.

Beberapa negara melakukan kebijakan untuk mengatasi penyebaran *Covid 19* (Alfano, 2020). Kebijakan *lockdown* telah dilakukan China (Lau, 2020) dilanjutkan di negara, Perancis (Busch, 2020), Spanyol (Mitjà, 2020), Italy (Alvarez, 2020) dan dilakukan oleh beberapa negara di Dunia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 (Telaumbanua, 2020). Pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan himbauan kepada masyarakat melakukan *Social Distancing* (Hilmatussa'diah, 2020). Kebijakan pemerintah dengan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah (Yunus, Setiawan & Wuryandini (2021).

Lal (2020) menjelaskan *Covid 19* berpengaruh tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi berdampak juga pada bidang sosial, ekonomi, politik dan bidang pendidikan. Perguruan tinggi merupakan salah satu yang terpengaruh dengan adanya pandemi *covid 19* (Siahaan, 2020). Dosen di perguruan tinggi harus mampu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menyesuaikan keadaan dimasa pandemi *Covid 19*. Tugas kerja dosen mulai dari kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian harus menggunakan standar protokol kesehatan agar dapat mencegah penularan covid 19.

Transfer informasi pengetahuan dan pelatihan yang diperlukan dalam beradaptasi kerja dosen pada masa pandemi sangat diperlukan (Gusty, dkk, 2020). Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan memiliki kewajiban melakukan sosialisasi dan transfer pengetahuan kepada dosen dalam menjalankan tugasnya agar aman dari penyebaran *Covid 19*. Perguruan tinggi yang menaungi dosen juga harus melakukan transfer pengetahuan

mengenai aplikasi atau program yang digunakan dalam menunjang tugas dosen dalam menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian.

PEMBAHASAN

1. Transfer Informasi Pengetahuan dan Adaptasi Kerja Dosen pada Bidang Pendidikan

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, yang salah satu isinya mengatur kebijakan untuk proses belajar mengajar dilakukan dari rumah. Melalui pembelajaran daring atau pembelajaran *online* dengan tidak bertemu secara langsung. Ini artinya proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa tidak lagi dilakukan secara langsung di kelas melainkan secara daring atau *online* dengan menggunakan perantara teknologi.

Pada awal diberlakukannya kebijakan pembelajaran secara daring atau *online*, di Universitas PGRI Semarang masih terdapat dosen yang belum maksimal menguasai teknologi yang digunakan dalam pembelajaran daring. Mahasiswa juga banyak yang belum menguasai aplikasi pembelajaran daring sehingga hanya mengikuti apa yang diterapkan dosen dalam pembelajaran. Kurang maksimalnya dosen dalam menjalankan aplikasi pembelajaran menjadi salah satu yang menghambat dan kurang maksimalnya proses pembelajaran.

Melihat fenomena kebingungan dosen dan mahasiswa diawal pemberlakuan kebijakan pembelajaran secara daring atau *online*, pihak Universitas PGRI Semarang melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik melaksanakan transfer informasi pengetahuan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan SPADA UPGRIS, melalui sistem ini perkuliahan di Universitas PGRI Semarang dapat dilakukan secara *daring*. Selain perkuliahan yang dapat dilaksanakan secara daring melalui sistem SPADA juga terdapat layanan pengumpulan tugas, UTS, UAS, forum dan dasilintas lainnya.

Pada tingkatan Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas PGRI Semarang dilaksanakan berbagai webinar yang bertemakan pembelajaran *online* pada masa pandemi. Webinar ini bertujuan untuk saling transfer informasi pengetahuan antara dosen dan mahasiswa terutama dalam menggunakan aplikasi pembelajaran yang tepat pada masa pandemi *Covid 19*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, aplikasi pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan *online* selain yang telah disediakan oleh Universitas PGRI Semarang (SPADA, SIP dan SIA) yaitu aplikasi *Google Meet*, *Clasroom*, *Zoom*, *Youtube*, *Slack*, *Schoology*, *Quizizz*, dan *Whatshap*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sering melakukan transfer informasi pengetahuan kepada dosen dalam menjalankan tugasnya dalam

pendidikan. Transfer informasi pengetahuan dilakukan melalui kegiatan webinar secara gratis untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan dosen dalam kegiatan pembelajaran menyesuaikan kondisi dan situasi pada masa pandemi *Covid 19*. Webinar dilaksanakan mengguakan aplikasi *zoom* dan disiarkan secara langsung melalui *channel youtube* resmi dari KEMENDIKBUD.

2. Transfer Informasi Pengetahuan dan Adaptasi Kerja Dosen pada Bidang Penelitian

Transfer informasi pengetahuan yang dilakukan oleh Universitas PGRI Semarang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) kepada dosen tentang penelitian telah dilaksanakan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Semarang membuat aplikasi SIMPELMAS Universitas PGRI Semarang untuk mempermudah dosen dalam mengajukan usulan proposal penelitian dimasa pandemi *Covid 19*. Usulan proposal, persetujuan sampai dengan laporan hasil penelitian dilakukan secara daring.

Fakultas dan Program Studi memberikan arahan kepada dosen yang akan melaksanakan penelitian diharapkan ketika mencari data dapat menggunakan *google form*, apabila dosen belum terlalu memahami penggunaan *google form* maka dosen diberikan transfer informasi pengetahuan penggunaan *google form* dalam proses mencari data. Pencarian data secara kualitatif diharapkan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting* atau *google meeting*, Fakultas dan Program Studi melakukan transfer informasi pengetahuan tentang penelitian melalui sosialisasi dan pelatihan kepada dosen secara *online*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan transfer informasi pengetahuan kepada dosen dalam bidang penelitian melalui kegiatan sosialisasi, webinar dan pelatihan dalam pembuatan proposal hibah penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Transfer informasi pengetahuan tentang penelitian dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting* dan saluran *youtube* yang dapat diakses dengan mudah oleh dosen.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan transfer informasi pengetahuan kepada dosen dalam bidang penelitian juga membuat buku panduan, diharapkan transfer informasi dan pengabdian dapat meningkatkan adaptasi dosen untuk melakukan penelitian dimasa pandemi *covid 19*.

3. Transfer Informasi Pengetahuan dan Adaptasi Kerja Dosen pada Bidang Pengabdian Masyarakat

Penerapan kebijakan penvegahan penyebaran Covid 19 yang dilakukan oleh pemerintah berdampak pada kegiatan pengabdian dosen kepada masya-

rakat. Sebelum adanya *Covid 19* dosen dalam menjalankan pengabdian hadir secara langsung ditengah masyarakat, berinteraksi secara erat dengan masyarakat. Adanya kebijakan pembatasan sosial seperti PSBB atau PPKM Darurat membuat beberapa dosen Universitas PGRI Semarang kebingungan untuk melaksanakan tugas pengabdian.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas PGRI Semarang melakukan transfer informasi pengetahuan melalui sosialisasi penggunaan aplikasi SIMPELMAS Universitas PGRI Semarang. Melalui SIMPELMAS dosen dapat mengajukan kegiatan pengabdian melalui usulan proposal, persetujuan sampai laporan kegiatan dilaksanakan secara *online*. Sehingga Dosen tidak perlu lagi datang ke Kantor Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas PGRI Semarang untuk mengajukan usulan kegiatan pengabdian atau melaporkan hasil kegiatan pengabdian.

Program studi dan fakultas di lingkungan Universitas PGRI Semarang memberikan transfer informasi pengetahuan kepada dosen, bahwa melakukan pengabdian tidak harus datang secara langsung ke lokasi pengabdian, tetapi bisa dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan aplikasi *google meeting*. Dosen dapat melakukan program pengabdian berupa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan secara daring memanfaatkan teknologi yang dapat digunakan seperti *zoom meeting* dan komunikasi melalui grup *whatsap*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sering melakukan transfer informasi pengetahuan kepada dosen dalam bidang pengabdian masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, webinar dan pelatihan pembuatan proposal hibah pengabdian kepada masyarakat dari program KEMENDIKBUD. Transfer informasi pengetahuan tentang pengabdian masyarakat dilaksanakan secara *online* melalui *zoom meeting* dan saluran *youtube*.

PENUTUP

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas PGRI Semarang, Fakultas dan Program Studi telah melakukan transfer informasi pengetahuan kepada dosen untuk beradaptasi dalam menjalankan tugas pekerjaannya pada masa pandemi *Covid 19*. Transfer informasi pengetahuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, webinar dan pelatihan yang bertema tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian dosen.

Diharapkan dosen dapat dengan antusias mengikuti kegiatan sosialisasi, webinar dan pelatihan yang sesuai dengan tugas kerja dosen agar dapat meningkatkan keterampilan dan agar dapat mudah beradaptasi pada masa pandemi *Covid 19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfano, V. &. (2020). Shut it down: a cross country panel analysis on the efficacy of lockdown measures. medRxiv.
- Asfahan, S., Shahul, A., Chawla, G., Dutt, N., Niwas, R., & Gupta, N. (2020). Early trends of socio-economic and health indicators influencing case fatality rate of COVID-19 pandemic. *Monaldi Archives for Chest Disease*, 90(3).
- Alvarez, F. E. (2020). A simple planning problem for covid-19 lockdown. National Bureau of Economic Research.
- Busch, C. L.-L. (2020). Emerging Evidence of a Silver Lining But Not of Effective Lockdowns. A Ridge Walk to Avoid an Economic Catastrophe in Italy and Spain.
- Gusty, S., Nurmiati, N., Muliana, M., Sulaiman, O. K., Ginantra, N. L. W. S. R., Manuhutu, M. A.,... & Warella, S. Y. (2020). *Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19*. Yayasan Kita Menulis.
- Hilmatussa'diah, H. (2020). Mengenal Makna Bela Negara di Masa Pandemi Virus Corona (Know the Meaning of Defending the Country in the Corona Virus Pandemic Period). Available at SSRN <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. Daiakses pada tanggal 26 Juli 2021, pukul 19.00 WIB.
- Lal, R. (2020). Soil science beyond COVID-19. *Journal of Soil and Water Conservation*, 75(4), 79A-81A.
- Lau, H. K. (2020). The positive impact of lockdown in Wuhan on containing the COVID-19 outbreak in China. *Journal of Travel Medicine*.
- Liu, W., Yue, X. G., & Tchounwou, P. B. (2020). Response to the COVID-19 epidemic: the Chinese experience and implications for other countries.
- Mitjà, O. A. (2020). Experts' request to the Spanish Government: move Spain towards complete lockdown. *Lancet* (London, England)
- Siahaan, M. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia pendidikan. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*, 20(2).
- Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19)
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 59-70.
- Yunus, M., Setiawan, D. F., & Wuryandini, E. (2021). Persepsi Mahasiswa terhadap Pembelajaran Online pada masa Pandemi COVID-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1196-1202.

PENINGKATAN SENSITIVITAS MASYARAKAT SEBAGAI DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK

Sri Wahyuni

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 membawa dampak perubahan yang sangat besar terhadap pola kehidupan sosial masyarakat. Di Indonesia perubahan yang terjadi bahkan hampir melingkupi semua aspek kehidupan mulai dari pendidikan, sosial dan ekonomi. Perubahan ini kemudian memaksa pemerintah untuk bertindak aktif menemukan berbagai solusi guna menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang diakibatkan oleh pandemik Covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, Joharudin menyatakan bahwa Covid-19 bisa dikatakan merupakan ancaman berskala global sehingga keputusan-keputusan efektif dari pemerintah sangat dibutuhkan guna mencegah perkembangan virus yang makin meluas (Joharudin et al., 2020). Oleh karenanya berbagai keputusan yang secara langsung diadopsi oleh pemerintah yang dikemas dalam berbagai desain dan konten kebijakan makin beragam dan makin gencar diterapkan.

Upaya mengatasi lonjakan kasus covid-19 mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar atau sering disebut dengan PSBB hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM merupakan salah satu upaya besar pemerintah yang dicanangkan dalam upaya mengatasi lonjakan kasus pandemik Covid-19. Aturan ini dilaksanakan mulai dari peraturan pemerintah dalam skala pusat dan daerah. Kegiatan berkerumun mulai diminimalisir keberadaanya. Oleh karenanya kegiatan secara offline seperti bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah mulai gencar-gencarnya dicanangkan. Namun disisi lain kegiatan ini berdampak pada pelemahan kehidupan sehari-hari yang memacu adanya kerugian pada sektor ekonomi akibat melemahnya kegiatan perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya. Bahkan pemerintah secara besar-besaran mengucurkan dana untuk mencukupi kebutuhan masyarakat serta melakukan rekonstruksi pada fasilitas kesehatan (Thorik, 2020).

Dari aturan yang ditetapkan pemerintah, terutama pada penekanan perubahan pola pelaksanaan kegiatan yang mulanya dilakukan secara *offline*

dan digantikan dengan cara *online*. Hal ini secara tidak langsung memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada perubahan interaksi sosial dalam masyarakat. Tidak dapat dihindari bahwa Covid-19 memberikan perubahan pada proses interaksi sosial di masyarakat. Masyarakat Indonesia menjadi lebih *over protektif* dan waspada pada lingkungan tempat tinggalnya. Akibatnya terjadi perubahan struktur yang kemudian menimbulkan pola baru dalam proses kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari adanya kebiasaan baru pada masyarakat serta munculnya pengelompokan dan pengkotakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Siti Rahma Harahap, 2020).

Wujud dari *over protektifitas* dalam masyarakat yakni munculnya kecurigaan yang berlebih dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Beberapa kasus yang memperlihatkan kondisi tersebut yakni banyaknya kasus penolakan jenazah di beberapa tempat di Indonesia (Mahyuddin et al., 2020). Situasi dan kondisi ini memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat telah berada pada puncak ketidakseimbangan sehingga terjadi banyak perubahan struktur sosial maupun norma dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya bias media sosial yang secara fokus serta sangat intens memberikan informasi mengenai Covid-19. Belum lagi jika dicermati, iklan-iklan layanan pemerintah mengenai covid-19 mampu memberikan efek 'ketakutan' dalam diri individu. Iklan-iklan layanan masyarakat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa terjangkit virus covid-19 akan membawa kepada kematian.

Hal tersebut secara langsung menyebabkan masyarakat menjadi kurang menjunjung norma dan tidak mengedepankan solidaritas antar umat manusia. Kondisi yang tergambar di atas sungguh tidak sejalan dengan konsep pemerintah yang mana secara garis besar dalam penanggulangan Covid-19 sudah diharuskan dan didasarkan pada kesadaran dan upaya penanggulangan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Perubahan sosial tersebut secara tidak langsung menggambarkan terjadinya perubahan dalam proses sosial dan peningkatan sensitivitas masyarakat Indonesia akibat merebaknya pandemi Covid-19. Oleh karenanya melalui teori interaksionisme simbolik ini penulis mencoba menggambarkan bagaimana perubahan simbol-simbol masyarakat pada masa pandemik secara langsung memberikan peningkatan sensitivitas masyarakat Indonesia dalam melakukan interaksi sosial.

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *literature review* atau tinjauan pustaka sebagai desain penelitian. Tinjauan pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2014). Proses pencarian sumber dan referensi yang terkait dengan penelitian dilakukan dengan menggunakan *search engine* dalam hal ini Google untuk data sekunder dan Google Scholar serta

garuda.ristekdikti.go.id untuk data primer berupa jurnal-jurnal penelitian. Data yang digunakan berada pada rentang tahun 2020 hingga 2021 untuk sumber data primer. Data penelitian kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

Sensitivitas Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti sensitivitas sebagai perihai cepat menerima rangsangan (KBBI, 2021). Arti lainnya dari sensitivitas adalah kepekaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, sensitivitas disini diartikan sebagai sikap kepekaan terhadap proses sosial dimana individu tinggal dan hidup berdampingan dengan individu lainnya di dalam lingkungan masyarakat. Ada sikap saling memahami dan toleransi dalam setiap proses sosial yang ada didalamnya. Dengan pemahaman cara pandang ini, maka sensitivitas merupakan salah satu dari pandangan yang wajib ada dan tumbuh dalam masyarakat, setidaknya agar proses sosial di dalam masyarakat berjalan dalam damai dan minus konflik.

Proses sosial sendiri merupakan hal yang bisa membuat individu mendapatkan pandangan yang dinamis terkait kehidupan bermasyarakat baik secara individu maupun kelompok. Bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial, maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan proses sosial itu sendiri. Interaksi sosial menjadi kunci dari semua kehidupan sosial, karenanya tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap sesama tentunya kita harus semakin mengenal masyarakat sekitar tempat tinggal kita. Proses pengenalan ini akan berjalan baik selama interaksi kita juga baik. Makin baik interaksi sosial, sensitivitas sosial dalam masyarakat juga semakin tinggi.

Sensitivitas sosial merupakan sikap positif dan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga integrasi sosial dalam masyarakat. Ada dua proses sosial yang mempengaruhi dinamika dalam masyarakat, yakni integrasi sosial dan diferensiasi sosial. Integrasi sosial merupakan suatu bentuk kecenderungan dalam untuk saling ketergantungan dan menyesuaikan diri dengan dinamika yang timbul di masyarakat. Sedangkan diferensiasi dijabarkan sebagai bentuk kecenderungan kearah perkembangan sosial yang bersifat perlawanan. Artinya jika tidak diimbangi dengan sensitivitas sosial yang tinggi bisa jadi diferensiasi justru menjadi faktor terjadinya disintegrasi dalam masyarakat.

Proses Sosial Dalam Teori Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme simbolik merupakan salah satu teori dalam sosiologi yang menganalisis dan memfokuskan pada proses pengamatan hubungan yang

terjadi secara alami antar individu dengan individu ataupun antara individu dengan kelompok dan lingkungannya di dalam masyarakat. Interaksi ini berkembang melalui simbol-simbol atau gambaran yang diciptakan oleh setiap individu yang bisa saja terbentuk melalui gerakan tubuh, suara atau vocal, ekspresi, bahasa tubuh yang dilakukan secara sadar dan kemudian membentuk suatu simbol yang kemudian dapat dimaknai dan sebagai sarana berkomunikasi (Derung, 2017). Dapat dipahami bahwa teori ini menekankan pada simbol-simbol yang mana simbol tersebut digunakan oleh setiap individu untuk berkomunikasi dan mendapatkan makna tertentu dalam setiap tindakannya.

Sebagai makhluk yang dinamis maka secara langsung simbol-simbol yang terbentuk dalam proses kehidupan manusia juga bersifat dinamis dan variatif. Perubahan pada simbol-simbol tersebut dapat terjadi sebagai bentuk akibat adanya perkembangan dan kepentingan yang selalu berubah pada setiap individu. Pada dasarnya setiap individu memiliki sifat yang selalu aktif, sehingga konsep diri pada individu menjadi suatu hal yang penting. Konsep diri ini meliputi emosi (afeksi), nilai, keyakinan, kebiasaan dan pertimbangan pada masa lalu dengan masa depan yang dihadapi oleh individu tersebut (Laksmi, 2018).

Dalam penerapannya interaksi simbolik memiliki ciri khas. Ciri khas dari interaksi simbolik yakni terletak dari adanya penekanan yang dilakukan oleh individu pada proses penerjemahan dan pendefinisian tindakan yang dilakukan. Stimulus respons tidak dilakukan secara langsung namun dilakukan dengan menggunakan dasar pemaknaan yang telah diberikan pada tindakan individu yang diwujudkan dalam simbol-simbol dan interpretasi atas simbol-simbol tersebut. Yang pada nantinya individu tersebut akan berusaha memahami dan memaknai, kemudian menciptakan kesepakatan bersama atas simbol-simbol tersebut (Siregar, 2016).

Pandemik covid-19 secara langsung memberikan perubahan terhadap kehidupan sosial pada masyarakat. Pembatasan interaksi sosial yang selalu digencar-gencarkan oleh pemerintah juga secara langsung berdampak pada perubahan pola interaksi dalam masyarakat. Berbagai media yang secara massif memberitakan informasi terkait pandemik covid-19 juga terkesan memberikan label adanya simbol-simbol baru yang perlu dipertimbangan oleh setiap masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan dan penjagaan dirinya. Hal tersebut kemudian meningkatkan sensitifitas masyarakat terutama dalam berinteraksi. Pola simbol yang berubah akibat pandemik covid-19 secara langsung meningkatkan sensitifitas masyarakat mulai dari masyarakat yang makin mudah menilai dan masyarakat yang makin mudah tersulut emosi. Kecepatan rangsangan ini secara langsung juga menimbulkan berbagai

dampak seperti perubahan struktur sosial kesenjangan sosial dan lain sebagainya.

Kebijakan Mengatasi Lonjakan Kasus Covid-19 Di Indonesia

Sejak awal merebaknya pandemik covid-19 masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengatasi lonjakan kasus covid-19 dengan berbagai istilah yang berganti-ganti. Kebijakan pembatasan sosial ini termasuk juga membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat. Disandingkan dengan istilah WFH atau *Work From Home* dan pembelajaran dalam jaringan (daring), upaya kebijakan pemerintah ini diharapkan mampu menekan lonjakan kasus positif covid-19 di Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah sejak awal munculnya virus covid-19 di Indonesia mulai dari Maret 2020 hingga juli 2021 penulis tampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kebijakan Pembatasan Sosial Covid-19

Kebijakan Pembatasan Sosial	Keterangan waktu pemberlakuan kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	10 April 2020
New Normal	16 Mei 2020
Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)	03 Juni 2020
Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK)	10 September 2020
PSBB Transisi	03 Juli 2020 – 03 Januari 2021
Pengetatan Terukur Terkendali	15 Desember 2020
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	11 Januari 2021
PPKM Mikro	20 April 2021
Penebalan PPKM Mikro	Mei 2021
PPKM Darurat	03 Juli – 20 Juli 2021
PPKM Level 4*	21 Juli-25 Juli 2021

Sumber: kompas.tv, Tahun 2021 (Zuhad, 2021) dan *viva.co.id, Tahun 2021 (Dusep Malik & Anwar Sadat, 2021).

Baik kebijakan dengan istilah PSBB maupun PPKM, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaannya. Persamaannya keduanya terletak pada tujuan yakni sebagai bentuk pembatasan sosial dan diringi dengan lonjakan kasus positif covid-19. Perbedaan antara PSBB dan PPKM dapat diamati pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbedaan Kebijakan PSBB dan PPKM

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Peliburan sekolah, kegiatan belajar mengajar 100% daring atau online	Kegiatan belajar mengajar secara daring atau online
Tempat kerja menerapkan WFH 100%	Perkantoran menerapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25%
Pembatasan kegiatan di rumah ibadah (ditutup)	Kapasitas rumah ibadah sebesar 50%
Pembatasan kegiatan di fasilitas umum	Pembatasan kegiatan di fasilitas umum
Pembatasan kegiatan sosial budaya	Pembatasan kegiatan sosial budaya
Pembatasan moda transportasi	Pembatasan moda transportasi
Sektor essensial dan kebutuhan pokok beroperasi 100%, jam operasional dan kapasitas restoran terbatas (<i>take away</i>)	Sektor essensial dan kebutuhan pokok beroperasi 100%, jam operasional dan kapasitas restoran terbatas (<i>take away</i>)

Sumber: indonesiabaik.id, Tahun 2021 (Nurhanisah, 2021)

PSBB dalam pelaksanaannya bersifat ketat dengan skala seluruh Indonesia, secara jelas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang merujuk ke Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan kriteria jumlah permasalahan ataupun jumlah kematian akibat penyakit bertambah dan terdapat kaitan epidemiologis dengan peristiwa seragam di daerah ataupun negara lain. Dari sisi regulasi, PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 kepada segala kepala wilayah di Jawa serta Bali. PPKM menyasar pada pembatasan aktivitas warga secara terbatas berbasis pada kota serta kabupaten (Nurhanisah, 2021).

Perubahan Sensitivitas Sosial Dalam Proses Sosial Sebagai Dampak Pandemi Covid-19

Sejak Maret 2020, pandemi covid-19 telah melanda di Indonesia. Pandemi ini telah berhasil merubah hampir semua tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya dari segi ekonomi saja, dari segi pendidikan, kesehatan, agama bahkan kehidupan sosial pun ikut terkena dampak dari adanya pandemi covid-19. Bidang sosial misalnya, Penulis mencermati perubahan sosial yang sangat kentara terlihat pada pola interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial diartikan sebagai proses suatu hubungan yang terjalin antara individu dengan individu lainnya ataupun antara individu dengan kelompok secara timbal balik. Interaksi sosial ini merupakan suatu hal yang wajar dan sering ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan sejalan dengan kodrat manusia yang merupakan makhluk sosial.

Namun pandemik covid-19 memberikan perubahan yang signifikan pada proses interaksi sosial di masyarakat. Maraknya berita dan informasi yang beredar di masyarakat terkait pandemik covid-19 secara langsung mengkonstruksi pola dan cara masyarakat dalam bertindak. Selain itu peraturan pemerintah yang terkesan memberikan penekanan yang sangat jelas terutama pada pembatasan interaksi sosial di masyarakat seperti pembatasan kegiatan melalui belajar dan bekerja di rumah secara tidak langsung membentuk cara baru setiap individu dalam berinteraksi dalam masyarakat.

Hal yang paling mendasar pada proses perubahan dalam interaksi sosial ini juga dipicu dari konstruksi sosial yang tanpa sadar ditanamkan melalui informasi-informasi yang banyak beredar melalui media sosial. Bias kognisi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat yang terjadi akibat adanya paparan informasi yang secara terus menerus didapatkan oleh individu. Paparan informasi yang sangat massif dan intens pada setiap individu terutama terkait informasi covid-19 kemudian menyebabkan individu hanya dipenuhi informasi seputar covid-19 saja. Hal tersebut kemudian memberikan perubahan pada pola pikir setiap individu. Perubahan ini yakni terkait cara individu menilai sesuatu hal secara cepat dan terkesan tanpa mengeluarkan usaha yang berarti (Agung, 2020).

Teori interaksionisme simbolik merupakan teori sosial yang menekankan perhatiannya pada analisa pada simbol-simbol pada hubungan antar individu dan lingkungannya yang kemudian memunculkan pemaknaan. Dalam interaksionisme simbolik terdapat teori yang dikenal dengan teori Mead. Teori ini menyatakan bahwa pikiran dan diri seseorang individu berasal dari masyarakat atau aksi sosial. Jika dianalisis maka perubahan pola interaksi di masyarakat akibat pandemik covid-19 terbentuk dari adanya respon masyarakat yang secara massif terpapar informasi yang kemudian penyerapan informasi tersebut membentuk pola perilaku masyarakat yang baru. Pada masa pandemik masyarakat sering dihadapkan dengan informasi bahwa pandemik Covid-19 merupakan situasi yang berbahaya. Kefokusan dari media sosial yang tak henti-hentinya memberitakan terkait covid-19 kemudian memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana perubahan masyarakat telah terjadi akibat pandemik.

Hal tersebut juga didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa pola interaksi semasa pandemik telah berubah dan perlu adanya kewaspadaan berlebih. Hal ini secara tidak langsung menciptakan pola berpikir baru dalam masyarakat. Yang mana hal tersebut kemudian membentuk dan meningkatkan sensitivitas masyarakat dalam berinteraksi sosial. Sensitivitas yang terbangung di masyarakat secara langsung menunjukkan bahwa masyarakat mulai menilai sesuatu hal

berdasarkan dengan insting kewaspadaanya yang telah terbentuk dari masifnya informasi terkait bahaya covid-19.

Selama pandemik covid-19 simbol-simbol yang terlihat seperti dilarang berkerumun, penggunaan masker secara intensif, dilarang berjabat tangan dan menjaga jarak menjadi suatu bentuk simbol baru dalam kehidupan masyarakat saat pandemik. Kondisi ini juga disusul dengan penggambaran peristiwa covid-19 yang sering diinformasikan sebagai penyakit yang berbahaya dan mematikan. Hubungan simbol-simbol yang beredar di masyarakat ini kemudian menimbulkan suatu kondisi kepanikan dalam masyarakat. Oleh karenanya masyarakat menjadi sensitif dalam berinteraksi. Sensitif sendiri adalah suatu kondisi dimana cepat menerima rangsangan dan emosi mudah terpancing.

Dari berbagai peraturan yang mendorong seseorang untuk menjadi memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi sehingga dalam berinteraksi masyarakat menjadi sangat sensitif. Kondisi ini dapat terlihat ketika suatu ketika salah satu orang batuk atau bersin ditempat umum maka masyarakat cenderung menganggap hal tersebut adalah sesuatu berbahaya dan patut dihindari. Kemudian apabila seseorang di suatu masyarakat dinyatakan positif covid-19 maka masyarakat akan cenderung membatasi berinteraksi pada pihak tersebut. Contoh lain yang sering ditemui adalah adanya penolakan jenazah korban covid-19. Dalam hal ini masyarakat cenderung sangat mudah merespon hal tersebut bahkan dalam beberapa kasus juga mudah tersulut emosinya. Hal ini kemudian menggambarkan bagaimana suatu simbol-simbol baru yang terbentuk di masyarakat kemudian secara langsung meningkatkan sensitivitas masyarakat dalam berinteraksi sosial, yang mana hal tersebut kemudian berdampak pada perubahan pola pemaknaan dan pemahaman pada suatu proses interaksi sosial.

PENUTUP

Interaksi sosial merupakan suatu proses kehidupan yang tidak bisa ditinggalkan oleh suatu individu. Hal tersebut dikarenakan manusia pada sejatinya adalah makhluk sosial yang memerlukan adanya interaksi antar sesamanya. Dalam pelaksanaan proses interaksi simbol-simbol seperti bahasa, gesture tubuh, tindakan, dan peristiwa sosial merupakan suatu nilai yang kemudian memiliki makna tertentu. Kesatuan pemaknaan tersebutlah yang secara langsung membangun suatu interaksi dalam masyarakat atau disebut interaksi simbolik. Pandemi covid-19 memaksa seluruh masyarakat untuk untuk memulai kehidupan sosial dengan cara baru. Hal tersebut kemudian memberikan perubahan yang sangat besar pada pola interaksi sosial masyarakat. selain itu media yang secara terus menerus dan massif memberikan informasi guna meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat secara tidak langsung menjadi suatu simbol tertentu pada masyarakat.

Penggambaran covid-19 di media massa maupun iklan-iklan layanan masyarakat yang dibuat secara resmi oleh pemerintah dengan sangat jelas memberikan kesan berbahaya kemudian meningkatkan sensitifitas masyarakat. Masyarakat mulai mudah terbawa dan mudah mengambil keputusan akibat simbol-simbol dan tindakan kewaspadaan yang diperlihatkan guna menjaga diri dari covid-19. Hal ini kemudian secara langsung berdampak pada kesenjangan sosial dan perubahan norma dan simbol-simbol masyarakat dalam proses interaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. M. (2020). Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 1(2), 68–84.
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Psikobuletin/article/view/9616/5058>
- Derung, T. N. (2017). Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Ber masyarakat. *Jurnal Karakteristik Dan Pastoral*, 2(1), 118–131. <https://ejournal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/33>
- Dusep Malik & Anwar Sadat. (2021). *Gonta-ganti Nama dari PSBB Hingga PPKM level 4, Apa Bedanya?* Viva.Co.Id.
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1389262-gonta-ganti-nama-dari-psbb-hingga-ppkm-level-4-apa-bedanya?page=all&utm_medium=all-page
- Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). Panic Syndrom Covid-19 : Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 44–53.
- KBBI. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kbbi.Web.Id.
<https://kbbi.web.id/sensitivitas>
- Laksmi, L. (2018). Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi. *Pustabiblia: Journal of Library and Information Science*, 1(2), 121.
<https://doi.org/10.18326/pustabiblia.v1i2.121-138>
- Mahyuddin, Ilham, & Rusdi, M. (2020). Horor Coronavirus Deseases dan Konflik Kekerasan Masyarakat: Tinjauan Sosiologis atas Penolakan Jenazah Pasien Covid-19. *Jurnal Commericum*, 3(1), 1–8.
- Mestika Zed. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (cetakan ke). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurhanisah, Y. (2021). *Beda PSBB vs PPKM*. Indonesiabaik.Id.
<http://indonesiabaik.id/infografis/beda-psbb-vs-ppkm>
- Siregar, N. S. S. (2016). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Perspektif*, 1(2), 100–110. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86>
- Siti Rahma Harahap. (2020). Proses Interaksi Sosial Di Tengah Pandemi Virus

- Covid 19. *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya*, 11(1), 45–53. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i1.1837>
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 115–120.
- Zuhad, A. (2021). *Beragam Istilah Pembatasan Sosial, dari PSBB, New Normal, Hingga PPKM Berlevel*. Kompas.Tv.
<https://www.kompas.tv/article/194796/beragam-istilah-pembatasan-sosial-dari-psbb-new-normal-hingga-ppkm-berlevel?page=all>

DISTINGSI PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN UMKM DI NEGARA TERDAMPAK COVID 19

Nina Farliana

PENDAHULUAN

Peningkatan negara yang terdampak virus Covid-19 di seluruh dunia membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Pada triwulan pertama 2020 ini pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif, seperti: Singapura sebesar 2,2, Hongkong 8,9, Uni Eropa sebesar 2,7 dan China mengalami penurunan sampai minus 6,8. Data OECD menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terwakili secara berlebihan di sektor-sektor yang paling terkena dampak, yaitu pariwisata, layanan ritel dan profesional, dan konstruksi dan transportasi, dimana mereka menyumbang tiga perempat dari semua pekerjaan (Thaha, 2020; Bahtiar & Saragih, 2020).

Pelaku UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Oleh sebab itu, jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 99 persen dari total jumlah sektor usaha yang ada, menjadikan UMKM sebagai salah satu wadah paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tinggi (Budiarto, et al, 2018). Menurut data yang diolah Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM telah menyerap 97 persen tenaga di Indonesia atau sebanyak 116,97 juta orang. Salah satu faktor yang mendukung peran UMKM terhadap perekonomian nasional adalah bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia.

Data BPS menunjukkan rasio kelompok usia produktif di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dari 67,4 persen pada tahun 2010 (Jumlah penduduk 237,6 juta) menjadi 69,7 persen pada tahun 2025. Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, Indonesia adalah rumah bagi 63,82 juta jiwa pemuda. Jumlah proporsi tersebut merupakan seperempat dari total penduduk atau berjumlah 24,15 persen dari total sekitar 265 juta jiwa penduduk Indonesia yang jika dikombinasikan dengan 64,19 juta unit Usaha Mikro, Kecil,

Menengah memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, peningkatan demografi ini tentunya akan diikuti oleh meningkatnya perkembangan sektor-sektor ekonomi seperti: teknologi, hiburan, pendidikan, konsumsi, perdagangan dan keuangan yang akan bertumbuh pesat.

Meningkatnya perkembangan sektor-sektor ekonomi tersebut diharapkan mampu mengurangi permasalahan tingkat pengangguran dan mampu menguatkan daya serap tenaga kerja di beberapa sektor industri. Kontribusi penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sebesar 97 persen memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah pengangguran. Pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai pelaku usaha merupakan komitmen pemerintah dalam pembangunan ekonomi saat ini. UMKM sebagai pondasi perekonomian nasional dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 bahwa kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,07 persen dan terhadap Ekspor Non Migas sebanyak 14,37 persen (Purba, et al, 2021).

Dalam situasi krisis seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara-negara di dunia. Tulisan ini mengkaji perbedaan pengelolaan dan perkembangan UMKM di beberapa negara terdampak Covid 19 melalui analisis permasalahan dan peran UMKM bagi perekonomian negara.

PEMBAHASAN

Pengelolaan UMKM di Indonesia

Pengelolaan UMKM di Indonesia dilakukan di bawah Kemenkop dan UKM. Jajaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 telah menyiapkan program-program strategis untuk memastikan terjadi percepatan pengembangan koperasi dan UMKM. Adapun tiga pilar strategi nasional Kementrian Koperasi dan UKM 2020-2024 adalah: 1) meningkatkan kapasitas dan kompetensi UKM, 2) membangun lembaga keuangan yang aman bagi UKM, dan 3) koordinasi lintas sektor. Melalui tiga pilar strategi nasional pengembangan KUMKM, disusun enam program strategis yakni, perluasan akses pasar, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas dan manajemen SDM usaha, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha dan koordinasi lintas sektor.

Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing,

investasi, ekspor, substitusi impor dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan. Selain itu, implementasi pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2020, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Sekretariat Kementerian menyusun Rencana Strategis Tahun 2020–2024 guna mewujudkan reformasi tata kelola pengembangan Koperasi dan UKM yang berorientasi layanan prima (Kebijakan Lintas Bidang) dengan strategi:

1. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Koperasi dan UKM, dengan operasionalisasi:
 - a. Penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja yang Selaras Rencana Pembangunan Nasional;
 - b. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Keuangan;
 - c. Penerapan Manajemen Kinerja yang Produktif dan Kompetitif;
 - d. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan KUKM secara Berkala.
2. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Kerjasama Pengembangan Koperasi dan UKM, dengan operasionalisasi:
 - a. Penerapan Regulasi Pengembangan KUKM yang Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif;
 - b. Penerapan Organisasi yang Tepat Fungsi serta Tata Laksana Yang Berorientasi Layanan Prima;
 - c. Penguatan Kerjasama Pengembangan KUKM dengan Stakeholder.
3. Meningkatkan Tata Kelola Umum Pengembangan Koperasi dan UKM, dengan operasionalisasi:
 - a. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tertib dan Akuntabel;
 - b. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan;
 - c. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pengembangan KUKM;
 - d. Penatausahaan dan Layanan Pimpinan yang Prima;
 - e. Keprotokolan yang Profesional dan Ramah.
4. Melakukan Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UKM, dengan operasionalisasi:
 - a. Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM KUKM;

b. Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur Pembina KUMKM

Dalam upaya mengimplementasikan strategi yang telah dirancang, Sekretariat Kementerian akan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Manajemen Strategi, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas pengelolaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Fungsi Manajemen Regulasi, Organisasi dan Kerja Sama, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang perumusan kebijakan, regulasi, hukum, organisasi dan kerjasama di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Fungsi Manajemen Komunikasi, Informasi Teknologi dan Penelitian dan Pengkajian, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang komunikasi, informasi dan teknologi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
4. Fungsi Umum, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang kerumahtanggaan, keprotokolan, penatausahaan pimpinan dan pembinaan serta pengelolaan pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Di samping berbagai strategi dan program-program yang dijalankan oleh Kemenkop dan UKM, beberapa lembaga lain di Indonesia juga melakukan usaha untuk membantu perkembangan UMKM. Sebagai contoh, Bank Indonesia memiliki kebijakan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan yang salah satunya bertujuan untuk membantu akses pendanaan bagi UMKM. Kebijakan ini tertuang baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/25/PBI/2004 dan SE Nomor 6/44/DPNP mengenai rencana bisnis bank umum dalam menyalurkan kredit pada UMKM bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komitmen bank dalam pemberian kredit bagi UMKM.

Di sisi permintaan, program Bank Indonesia difokuskan pada penguatan lembaga pendamping UMKM dalam bentuk kegiatan pelatihan dan penelitian. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135/PMK/.05/2008 mengeluarkan program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tujuannya mengembangkan UMKM dan koperasi secara berkesinambungan. Peraturan ini kemudian mengalami revisi dalam hal jangka waktu kredit, retstrukturisasi, dan plafon pinjaman dengan dikeluarkannya PMK No.10/PMK.05/2009. Contoh lainnya adalah keberadaan perusahaan penjaminan kredit seperti Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)

dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang bertujuan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap kredit dengan memberikan jasa penjaminan. Selain itu, saat ini sedang dalam pembahasan adalah pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD).

Pengelolaan UMKM di Negara Lain

Tidak seperti Indonesia yang memiliki kementerian yang khusus menangani masalah koperasi dan UMKM di bawah satu naungan Kemenkop dan UKM, beberapa negara tidak memiliki lembaga serupa khusus di bidang ini. Namun, pemerintah melalui departemen yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan memiliki peranan aktif dalam mengembangkan UMKM di negaranya. Berikut paparan laporan Bank Indonesia mengenai pengelolaan UMKM di berbagai negara, yang pada umumnya, negara-negara ini memiliki dan atau mengepalai komisi khusus yang menangani permasalahan UMKM di berbagai aspek. Negara-negara di Amerika Latin, seperti Brazil, El Salvador, Costa Rica, Ekuador, Kolombia, Argentina, dan Republik Dominika memiliki komisi semacam ini.

Negara Peru bahkan memiliki tiga komisi berkaitan dengan pengembangan UMKM, yaitu komisi promosi UMKM (PROMPYME), program pengembangan berbasis voucher bagi UMKM (BONOPYME), dan program inovasi teknologi manufaktur sepatu (CITE-Calzado). Lembaga khusus serupa juga dapat ditemukan di negara-negara benua Afrika, seperti Afrika Selatan, Maroko, dan Tunisia. Program voucher di sembilan kota di Peru telah dimulai sejak tahun 2000. Pada program yang dicanangkan oleh pemerintah ini, voucher yang ditujukan bagi UMKM dengan jumlah karyawan antara 2 – 20 orang ini dapat digunakan oleh pemegangnya untuk mengakses pelatihan manajerial dan teknis serta jasa konsultasi dari institusi swasta maupun organisasi nirlaba. Program ini memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, seperti terlihat pada penggunaan voucher yang telah mencapai 27.411 dalam waktu dua tahun sejak program pertama kali dijalankan. Dengan menggunakan voucher, para pelaku UMKM hanya membayar rata-rata 27% dari biaya pelatihan atau konsultasi.

Berdasarkan survei, 79% dari UMKM responden mengatakan bahwa pelatihan teknis yang diberikan pada program voucher ini menyelesaikan lebih dari 60% masalah produktivitas. Sementara itu, 50% dari perusahaan yang menggunakan fasilitas yang diperoleh dari program voucher ini mengalami perbaikan pada business skill competency, sementara 50% sisanya mengalami peningkatan pada tingkat penjualan atau produktivitas atau pengurangan pengeluaran (Miehlbradt dan McVay, 2002). Komisi-komisi tersebut biasanya juga tidak hanya dibawah oleh satu kementerian saja.

Lembaga yang dibentuk untuk mengembangkan UMKM di Brazil, yaitu Brazilian SME Support Service (SEBRAE), memiliki anggota dari 13 institusi, termasuk Kementerian Pembangunan, Industri, dan Perdagangan, Brazilian Association of Financial Institutions for Development, Bank of Brasil, dan Economic and Social Development National Bank. Sistem pengelolaan tidak harus tersentralisasi di pemerintah pusat. Sebagai contoh, Comision Nacional de la Micro y Pequena Empresa (CONAMPYME) di El Salvador merupakan lembaga yang terdesentralisasi dari pemerintah federal, walaupun tetap bergantung dan disupervisi oleh Kementerian Ekonomi. Pengembangan UMKM di negara-negara tersebut tidak hanya dilakukan oleh komisi di bawah pemerintah.

Beberapa organisasi lain juga turut pro-aktif dalam mengembangkan UMKM di negaranya, seperti yang dilakukan oleh Ntsika Enterprise Promotional Agency dan Khula Enterprise Finance di Afrika Selatan. Sebagaimana program pengembangan UMKM di Indonesia, program-program yang dikedepankan oleh lembaga-lembaga khusus ini kebanyakan mengedepankan isu operasional, pendanaan, dan promosi UMKM di negara masing-masing. Sebagai contoh, National Agency for the Promotion of Small and Medium Enterprise (ANPME) di Maroko memiliki program Imtiaz dan Moussanada, yang mencakup bantuan subsidi dan operasional untuk UMKM.

Di bidang pendanaan, beberapa negara yang tergabung dalam Association of South East Asian Nation (ASEAN) memiliki berbagai program untuk mendukung akses pendanaan bagi UMKM baik dari sisi penawaran maupun permintaan melalui berbagai lembaga. Sebagai contoh, dari sisi permintaan, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam memiliki skema pendanaan khusus bagi UMKM dan juga program penjaminan kredit. Selain itu, pemerintah beberapa negara, seperti Tanzania, Uganda, Kenya, Jepang, dan India, memfasilitasi pemeringkatan kredit bagi UMKM di negaranya dengan bekerja sama dengan beberapa pihak seperti World Bank dan lembaga pemeringkat kredit internasional.

Dari sisi penawaran, Thailand bahkan memiliki bank yang khusus melayani UMKM (RAM Consultancy, 2005). Beberapa negara yang dianggap sukses dalam mendorong akses pendanaan UMKM dengan berbagai programnya adalah Jepang, Taiwan, Jerman, dan Korea Selatan (Ram Consultancy, 2005). Berdasarkan data tahun 2005, UMKM yang beroperasi di Jepang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDB, yaitu di atas 50%. Perusahaan penjamin kredit di Jepang, yang didanai oleh pemerintah daerah, organisasi industri, dan lembaga keuangan, telah berfungsi dengan baik. Untuk memperkuat kredibilitas program penjaminan ini, Jepang memiliki sistem reasuransi untuk kreditkredit yang dijamin. Pemerintah Taiwan memiliki dua program pendanaan bagi UMKM, di mana salah satunya juga berfungsi untuk

menjamin kredit yang diberikan kepada UMKM. Jerman berusaha untuk memacu akses pendanaan UMKM dengan memberikan tingkat suku bunga yang rendah dan subsidi kredit.

Perkembangan UMKM Indonesia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan UMKM ini berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif serta kontribusinya dalam ekspor dan penciptaan modal tetap/ investasi.

Tabel 1. Perkembangan UMKM di Indonesia

Indikator	2015	2016	2017	2018
Jumlah UMKM (unit)	59.260.000	61.650.000	62.922.617	64.194.057
Tenaga kerja (orang)	123.230.000	112.890.000	116.431.224	116.978.631
PDB Konstan (Rp. Triliun)	1.655,43	5.171,06	5.445,56	5.721,14
PDB harga Berlaku (Rp. Triliun)	6.228,29	7.009,28	7.820,28	8.573,89
Ekspor non migas (Rp. Triliun)	185,98	255,13	301,62	293,84
Investasi Harga Berlaku (Rp. Triliun)	1.818,75	2.057,97	2.377,41	2.564,54
Produktivitas UMKM per unit usaha (unit)	27.930.000	83.880.000	86.220.000	124.300.000
Produktivitas UMKM per Tenaga Kerja (unit)	13.430.000	45.830.000	46.500.000	68.320.000

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2018

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 64,19 juta usaha atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha yang tersebar di seluruh negeri. Dari angka 64,19 juta tersebut, usaha mikro masih menjadi penyumbang terbesar, yakni 63,35 juta usaha (98,68%), disusul usaha kecil 783.132 usaha (1,22%), dan usaha menengah sebanyak 60.702 usaha (0,09%). Jumlah UMKM ini mengalami peningkatan dari sebesar 59,26 juta unit pada tahun 2015 menjadi sebesar 64,19 juta pada tahun 2018 dan diperkirakan akan bertumbuh hingga 68,60 juta pada tahun 2020.

Pada tahun 1997, jumlah tenaga kerja di sektor UMKM sebanyak 65,5 juta tenaga kerja. Lima belas tahun kemudian (2013), tenaga kerja di sektor UMKM tumbuh sebesar 74% menjadi 114,1 juta tenaga kerja. Data terakhir BPS tahun 2018, UMKM telah mampu menyerap sekitar 116,97 juta orang pekerja atau 97% dari total tenaga kerja sebanyak 120,598 juta orang tenaga kerja di Indonesia. Sisanya, sebanyak 3%, diserap korporasi. Kontribusi

lainnya dari UMKM dalam penopang perekonomian Indonesia adalah 61,07% dari pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan PDB Indonesia pada 2018 sebesar Rp 14.038 triliun, sumbangan UMKM sebesar Rp 8.573 triliun.

UMKM juga berkontribusi dalam ekspor komoditas nonmigas Indonesia. Dalam kurun waktu 1997–2013, nilai ekspor nonmigas dari sektor UMKM berfluktuasi, tetapi cenderung meningkat. Dalam kurun waktu 15 tahun itu, nilai ekspor nonmigas sektor UMKM meningkat sebesar 364%. Pada tahun 2018, UMKM menyumbang 14,37% dari sisi ekspor non migas dan 60,42% penciptaan modal tetap/investasi. Pasca krisis ekonomi, nilai investasi sektor UMKM terus meningkat. Pada tahun 1999, nilai investasi dari UMKM masih sebesar Rp 32,1 triliun. Kemudian, meningkat menjadi Rp 314,3 triliun pada tahun 2013. Dalam kurun waktu 14 tahun, nilai investasi dari sektor UMKM tumbuh sebesar 963%.

Data terakhir menunjukkan, UMKM menyumbang 58,18% dari total investasi pada tahun 2018. Kontribusi PDB UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 61,07% dan Rasio Kewirausahaan tahun 2018 sebesar 3,47%. Produktivitas sektor UMKM per unit usaha mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 27,93 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 86,22 juta pada tahun 2017 dan diperkirakan akan bertumbuh hingga 182,59 juta pada tahun 2020. Produktivitas per tenaga kerja meningkat dari Rp. 13,43 juta pada tahun 2015 menjadi Rp. 46,50 juta pada tahun 2017 dan diperkirakan akan bertumbuh hingga 101,39 juta pada tahun 2020.

Rendahnya produktivitas menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi yang semakin besar. Kondisi ini menyebabkan fenomena missing middle seperti yang ditulis dalam Dokumen World Bank dan dijelaskan lebih rinci oleh Chang-Tai Hsieh dan Benjamin A. Olken melalui jurnal ekonomi *The Missing “Missing Middle”* (2014) mengenai Usaha Kecil dan Menengah yang sebenarnya dibutuhkan untuk menopang industrialisasi dan ekspor.

Perkembangan UMKM Negara Lain

Melansir data dari <https://kompaspedia.kompas.id/> tanggal 16 September 2020 mengenai “Potret dan Tantangan UMKM di Indonesia”, UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi bagi Indonesia, melainkan juga penopang perekonomian di kawasan ASEAN dan negara-negara maju, seperti Jerman, Amerika Serikat, Jepang dan Korea selatan. Di kawasan Asia Tenggara, sekitar 88,8% hingga 99,9% bentuk usaha adalah UMKM. UMKM tersebut mampu menyerap 51,7 hingga 97,2 persen tenaga kerja di ASEAN. Sumbangan UMKM terhadap PDB di negara-negara ASEAN bervariasi mulai dari 24%

hingga 61%. Di negara tetangga, Singapura, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 45%. Disusul Thailand 37,4%, Filipina 36%, Malaysia 31,1%, dan Brunei Darussalam 24%.

UMKM juga berkontribusi terhadap ekspor nonmigas di negara-negara Asia Tenggara. Di Thailand, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional mencapai 29,5% dari total ekspor, Filipina 20%, Vietnam 20%, dan Malaysia 19%. UMKM juga menjadi tumpuan bagi sejumlah negara maju di dunia. Di Jepang, UMKM mencapai 99,7% dari total unit usaha dan menyerap tenaga kerja hingga 70,2% dari total orang yang bekerja. Kontribusi sektor UKM di Jepang mencapai 50% terhadap PDB Nasional dan 54% terhadap ekspor nasional.

Dalam rangka mengembangkan UKM, pemerintah Jepang berupaya mengurangi konflik yang terjadi antara pelaku usaha besar dan pelaku UKM serta menindak tegas setiap praktik persaingan tidak sehat yang dapat mematikan UKM. Pemerintah Jepang mendorong kerja sama antara perusahaan skala besar dengan UKM melalui skema *linkages*. Pemerintah Jepang melarang masuknya perusahaan besar untuk sektor usaha-sektor usaha yang dianggap lebih cocok untuk digarap UKM.

Di Korea Selatan, jumlah UKM mencapai 99,2% dari total unit usaha dan menyerap tenaga kerja hingga 87,5% dari total orang yang bekerja. Kontribusi sektor UKM mencapai 49% terhadap PDB Nasional dan 31% terhadap ekspor nasional. Jerman, sebagai negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia, juga sangat mengandalkan UMKM untuk menopang perekonomian negaranya. UMKM Jerman telah menyumbang 40% PDB, menciptakan 70% lapangan kerja, serta menyumbang 70% hingga 90% dari pangsa pasar UMKM di pasar dunia. Di Amerika Serikat, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor nasional mencapai 33,7% dari total ekspor nonmigas.

Peranan UMKM Bagi Perekonomian Negara

Menghadapi pandemi Covid 19, pelaku UMKM menjadi pihak yang dinilai paling terdampak, sehingga pada masa ini berbagai permasalahan muncul dalam pengelolaan UMKM yang berperan penting bagi perekonomian nasional.

1. Segi pasokan. Semenjak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) hampir di seluruh wilayah, banyak UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. PSBB membuat distribusi logistik juga terganggu yang membuat barang kiriman yang dipesan atau yang dibeli menjadi lama diterima.

2. Masalah cashflow. Banyak pelaku UMKM yang merasakan pendapatannya menurun akibat tidak adanya pelanggan yang membeli produk semenjak PSBB dan physical distancing diberlakukan.
3. Anjloknya permintaan. Ketidakpastian pasar membuat permintaan akan barang yang dijual oleh para UMKM menjadi berpengaruh. Semenjak ada pandemi Covid 19 membuat kebutuhan para konsumen berubah. Saat ini banyak masyarakat yang lebih membutuhkan produk-produk kesehatan seperti hand sanitizer dan masker dibandingkan kebutuhan lainnya.

Melansir hasil rapat terbatas Presiden Joko Widodo melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2020. Pemerintah menyiapkan lima skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor UMKM. Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro disiapkan dengan harapan agar pelaku UMKM dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19. Skema tersebut adalah sebagai berikut.

1. Skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja.
2. Skema kedua, yakni skema mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan. Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020.
3. Skema ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.
4. Skema keempat, Pemerintah juga memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM yakni berupa stimulus bantuan modal kerja yang telah disiapkan. Pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19. Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Sementara masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. Karena itu bagi UMKM

yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa melalui skema program lainnya.

5. Skema kelima, melalui kementerian, lembaga BUMN dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19. Contohnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga, Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM.

Dengan adanya kelima skema tersebut maka semua dukungan, langkah dan upaya yang dilakukan diharapkan pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi Covid 19 berakhir di Indonesia dan di semua negara, sehingga UMKM mampu mendukung roda perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional.

PENUTUP

Kesimpulan tulisan ini adalah berbagai permasalahan UMKM, mulai dari pendefinisian UMKM yang berbeda antara lembaga, kesulitan akses informasi, struktur pendirian dan pengoperasian usaha, sampai pada perkembangan teknologi, menyebabkan perbedaan pengelolaan dan perkembangan UMKM di berbagai negara, terutama di masa pandemi Covid 19. Pengelolaan UMKM di Indonesia dilakukan di bawah Kemenkop dan UKM, dengan tiga pilar strategi nasional tahun 2020-2024 yaitu: meningkatkan kapasitas dan kompetensi UKM, membangun lembaga keuangan yang aman bagi UKM, dan koordinasi lintas sektor. Sedangkan beberapa negara tidak memiliki lembaga serupa khusus di bidang UKM seperti Indonesia. Namun, pemerintah melalui departemen yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan memiliki peranan aktif dalam mengembangkan UMKM di masing-masing negaranya. Beberapa skema peningkatan peran UMKM bagi perekonomian negara, yaitu: bantuan sosial, insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan serta pemulihan dan konsolidasi pasca Covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2018.

Badan Pusat Statistik, 2020.

Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(6), 19-24.

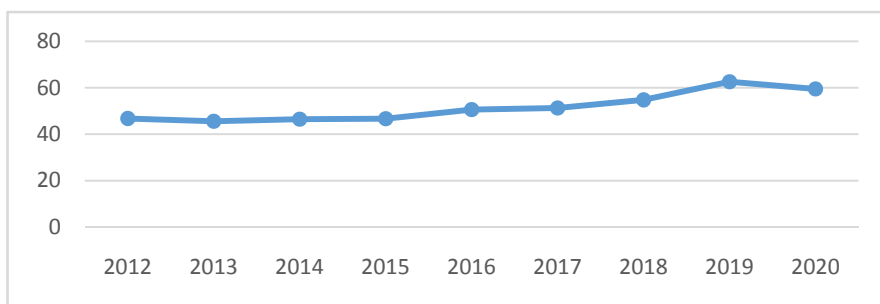
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. UGM PRESS.
- Haikal, S. (2012, June). Perusahaan Modal Ventura Di Indonesia Bukan Lembaga Keuangan! in *Seminar Nasional dan Call for Papers*. Fakultas Ekonomi UNISBANK.
- Hsieh, C. T., & Olken, B. A. (2014). The missing" missing middle". *Journal of Economic Perspectives*, 28(3), 89-108.
- Kementerian Koperasi dan UKM, 2018.
- Kementerian Koperasi dan UKM, 2020.
- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, S., Purba, P. B., ... & Simarmata, J. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yayasan Kita Menulis.
- Purwanto, Antonius. (2016). Potret dan Tantangan UMKM di Indonesia. <https://kompaspedia.kompas.id/> (Online).
- RAM Consultancy Services Sdn. Bhd. (2005). *SME access to financing: addressing the supply side of SME financing* (Vol. 1). Regional Economic Policy Support Facility, ASEAN-Australia Development Cooperation Program, ASEAN Secretariat.
- Taha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147-153.

KEBIJAKAN PANGAN & GELIAT PASAR TRADISIONAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Rr. Retno Sugiharti, Jihad Lukis Panjawa, Fandi Ahmad Alfian

PENDAHULUAN

Masalah tentang kesehatan dan turunnya daya beli masyarakat yang mempengaruhi perekonomian negara memang perlu penanganan yang tepat untuk kembali menjalankan roda perekonomian secara normal, seperti yang dialami Indonesia pada awal pandemi Covid-19. Tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 telah banyak memberikan dampak negatif di tiap sektor perekonomian, termasuk sektor pertanian. Pembahasan yang cukup menarik di masa pandemi Covid-19 ini adalah tentang kebijakan pangan, dimana hingga pandemi Covid-19 ini pun juga belum menunjukkan kondisi yang baik di Indonesia. Kebijakan pangan tentunya tidak terlepas dari pasokan pangan. Pasokan pangan menjadi isu sentral lainnya yang perlu penanganan sesegera mungkin. Pangan harus menjadi perhatian karena urusan ini merupakan kebutuhan paling dasar. Perlu penanganan yang tepat dan cepat untuk menjaga pasokan pangan tetap terukur dan terkendali dengan baik karena ketidak-tepatan kebijakan terkait pasokan pangan akan berdampak pada kestabilan perekonomian di Indonesia.



Sumber: FAO (2021)

Gambar 1. Grafik Ketahanan Pangan di Indonesia 2012-2020

Grafik 1 menampilkan dampak nyata dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Pada lima tahun ke belakang menunjukkan tren meningkat, akan tetapi pada periode 2019 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan tren yang menurun. Hal tersebut mengindikasikan akibat

kemunculan Covid-19 pertama kali pada bulan Desember 2019 di Wuhan, China, dan pada akhir bulan Januari 2020 adalah awal dimana Covid-19 di Indonesia. Saat pertama kali pandemi virus Covid-19 mulai menyebar di berbagai negara, pada saat itu juga jalur perdagangan internasional mulai terganggu, yang mana hampir semua negara termasuk Indonesia terkena dampak.

Sektor pangan bagi sebuah negara berkembang merupakan pembahasan yang cukup riskan. Krisis pangan dan gizi karena sistem pangan yang goyah, diperparah dengan bencana keikliman global yang terus berlangsung akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Lebih lanjut, lahan pertanian mulai beralih fungsi ke nonpertanian. Hal tersebut masih menjadi momok yang menakutkan bagi dunia pertanian, meskipun sudah ada aturan undang-undang nomor 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dilansir dari (Warta Pertanian, 2020) Warta Pertanian (2020) praktek alih fungsi lahan pertanian ke area nonpertanian sungguh memprihatinkan. Rata-rata luasan lahan baku sawah berkurang sebesar 650.000 hektar pertahun atau ekuivalen dengan 6,5 juta ton beras dengan asumsi produksi besar sebesar 10 ton pertahun.

Selain itu, kurangnya ketertarikan atau rendahnya minat masyarakat untuk terjun di sektor pertanian dikhawatirkan dapat berakibat fatal terhadap kondisi pangan di Indonesia di masa yang akan datang. Sedikitnya minat masyarakat untuk terjun ke dalam bidang pertanian dikarenakan bantuan pemerintah yang kurang intensif, seperti bantuan fasilitas yang kurang serta jaminan kesejahteraan petani masih mengambang. Bahkan beberapa kebijakan dari pemerintah terbilang meleset dalam masalah pertanian dan pangan. Sebagai contoh kebijakan harga eceran tertinggi, di satu sisi harga eceran tertinggi bersifat melindungi konsumen, namun di sisi lain bagi petani, penetapan harga eceran tertinggi dapat berimbas terhadap penurunan kesejahteraan petani akibat dari penetapan harga eceran tertinggi yang rendah (petani yang dimaksud di sini adalah petani yang hanya menjadi produsen atau penyedia barang). Contoh selanjutnya yaitu kebijakan alokasi dana bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19, yang alokasi dana tersebut belum secara rata sampai ke masyarakat yang membutuhkan serta beberapa kasus korupsi dana bantuan sosial yang sempat terjadi.

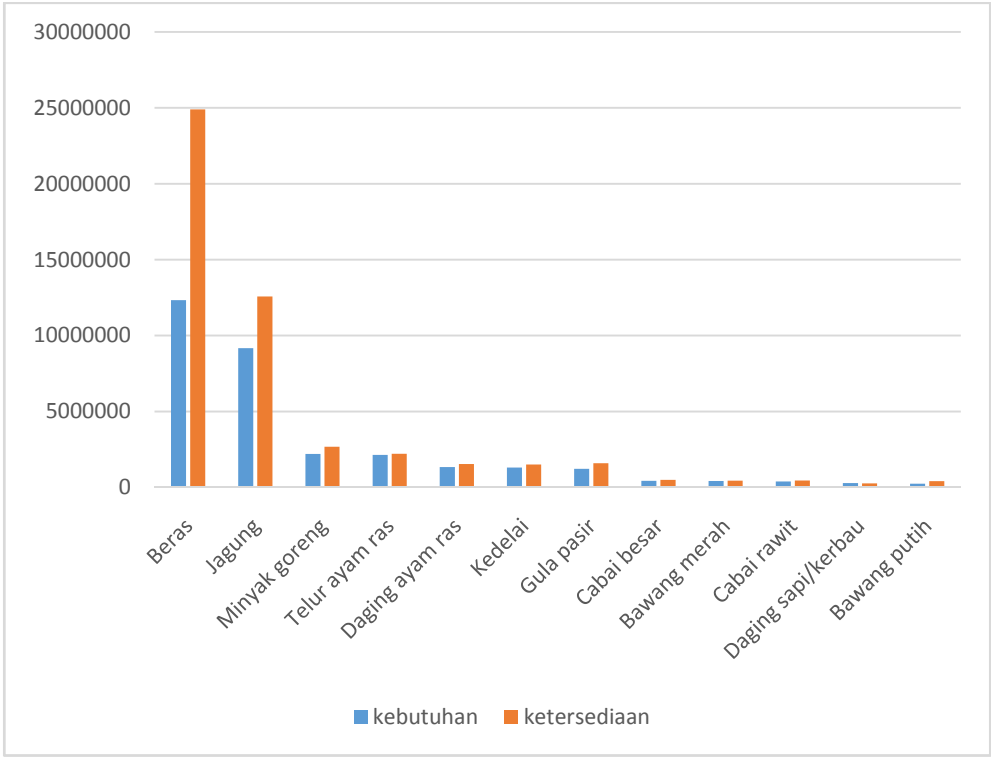
Kebutuhan pangan adalah kebutuhan dasar selain sandang, dan papan, oleh sebab itu kondisi pangan tidak bisa diabaikan keberadaan terlebih di masa pandemi ini. dengan menggunakan studi literatur, pembahasan dalam artikel ini akan membahas tentang bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan yang tepat tentang pangan dalam menjaga stok, stabilitas, keterjangkauan harga komoditi pangan di masa pandemi Covid-19, serta peran dan pemberdayaan pasar tradisional sebagai ujung tombak penyerapan hasil

pertanian dari petani, pembahasan akan mencakup dari lini produksi sampai dengan konsumsi.

PEMBAHASAN

Kondisi Kebutuhan Pangan dan Pola Rantai Pasokan Pangan Dalam Masa Pandemi

Kementerian Pertanian telah membuat data tentang perkiraan kebutuhan dan ketersediaan pangan nasional pada bulan Januari sampai dengan Mei 2021 sebagai berikut:



Sumber: Kementerian Pertanian, 18 Maret 2021
Gambar 2. Hasil Perkiraan Kebutuhan Dan Ketersediaan Pangan Nasional Pada Bulan Januari Sampai Dengan Mei 2021

Pada Gambar 1.1 di atas dapat diketahui hasil dari perkiraan kebutuhan dan ketersediaan pangan nasional pada bulan Januari sampai dengan Mei 2021 menunjukkan taraf aman pada masing-masing komoditas, dengan menunjukkan bahwa komoditas beras dan jagung tetap pada tingkat kebutuhan tertinggi daripada komoditas lainnya. Namun kenyataannya ketersediaan komoditas beras pada bulan Maret 2021 hanya menunjukkan diangka 6,8 juta ton, yang mana jumlah ketersediaan komoditas tersebut masih jauh dari hasil perkiraan

(Databoks, 2021c). Perkiraan ketersediaan komoditas beras per bulan dapat diketahui sekitar lima juta ton sedangkan kondisi aslinya menunjukkan ketersediaan komoditas beras per bulannya hanya di kisaran dua juta ton. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan mengingat kebutuhan akan komoditas tersebut juga meningkat per bulan-nya di kisaran dua juta (Databoks, 2021a). lebih lanjut hal ini merupakan penanda turunnya ketahanan pangan di Indonesia (Databoks, 2021b).

Saat ini pandemi Covid-19 saat ini, sudah memasuki era *new normal*. Kebijakan yang diterapkan pemerintah demi menekan penyebaran Covid-19 berupa melakukan pekerjaan dari rumah, menjaga jarak secara fisik, dan pembatasan sebuah kegiatan yang ada dalam keramaian termasuk tempat jual beli seperti pasar, yang menjadikan pola situasi yang berubah hampir di semua aspek, termasuk rantai pemasokan sektor pangan. Dari sisi produksi, sebagian petani dan produsen dalam bidang makanan mulai menghadapi perubahan sistem pasokan *input*, dimana penghimpunan input produksi kini juga lebih terfokuskan untuk ditujukan ke dalam pasar-pasar modern dan pasar dalam jaringan elektronik. Begitupula dengan pola transaksi dari segi konsumsi juga mengalami perubahan dikarenakan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghindari penyebaran virus Covid-19, dimana sebagian pola transaksi konsumsi kini diambil alih melalui jaringan elektronik, demi meminimalkan kontak fisik. Perubahan kondisi inilah yang terus memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan yang elastis dalam menghadapi penyesuaian dari perubahan pola hidup masyarakat di dalam lingkup pangan, yang dimaksudkan agar kondisi, ketersediaan, dan ketahanan pangan di Indonesia tetap dalam kondisi yang baik.

Peningkatan Fasilitas Dalam Segi Produksi dan Konsumsi Pada Sektor Pangan

Dalam sebuah rantai pasok pangan, petani sangat dibutuhkan keberadaannya di dalam sebuah rantai pasok pangan sebagai produsen. Hal ini dikarenakan jalur perdagangan internasional terganggu pada masa pandemi Covid-19 sudah mulai menyebar di tiap wilayah. Oleh karena itu, pada hampir semua negara di dunia, tidak hanya negara berkembang, namun negara maju pun juga berusaha sendiri dalam menjaga kebutuhan pangan di dalam negaranya, termasuk negara Indonesia. Permasalahan dalam hal pertanian adalah masih kurangnya dukungan dari pemerintah dalam penyediaan fasilitas produksi, seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, dan juga fasilitas pendukung produksi lainnya, mengingat negara Indonesia adalah negara agraris dan butuh pasokan lebih banyak dalam hal pangan seharusnya pemerintahan memprioritaskan fasilitas pertanian. Persoalan ini sangat penting untuk dibahas karena lahan pertanian di Indonesia memiliki luas

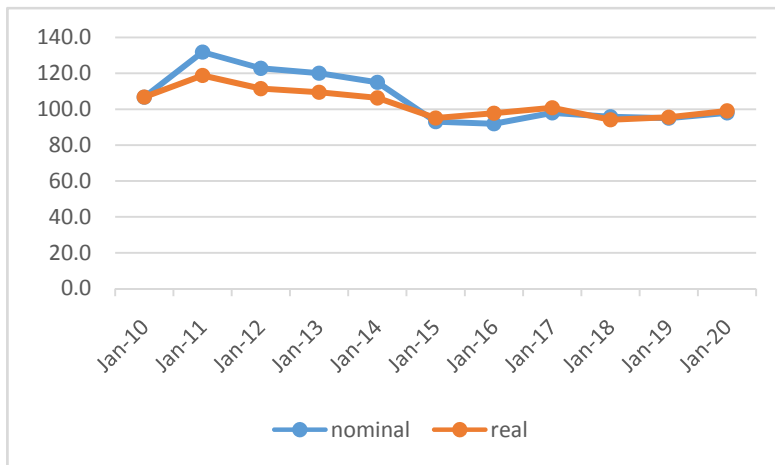
terkecil yaitu hanya di kisaran 60 juta hektar dibandingkan kota, tanah kosong, dan hutan yang masing-masing memiliki luas 200 juta hektar, 190 juta hektar, dan 95 juta hektar. Fasilitas dan bantuan sangat dibutuhkan agar petani terbantu dalam peningkatan proses dan kinerja produksinya.

Tidak hanya fasilitas dalam pertanian yang perlu dipertimbangkan, namun kehygienisan makanan juga perlu diperhatikan mengingat penyebaran virus Covid-19 (terlebih varian Delta) lebih mudah menular. Maka hal yang perlu dilakukan oleh pemerintahan adalah memberikan pengawasan dalam menjaga dan memperhatikan fasilitas, serta bantuan yang harus dilakukan dengan protokol produksi yang ketat agar aman dari penyebaran virus Covid-19. Tentunya hal ini akan dapat dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian (sebagai pelaksana kebijakan pertanian di daerah).

Pembahasan dalam segi *supply*, komoditas dalam hal pangan sangat diperlukan dalam sebuah negara, dari Gambar 2 dapat diketahui dalam perkiraan pemerintah komoditas beras dan jagung terlihat cukup aman, sedangkan dalam satu tahun terakhir komoditas pangan yang masih harus melakukan impor adalah komoditas bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula (CNBC Indonesia, 2021).

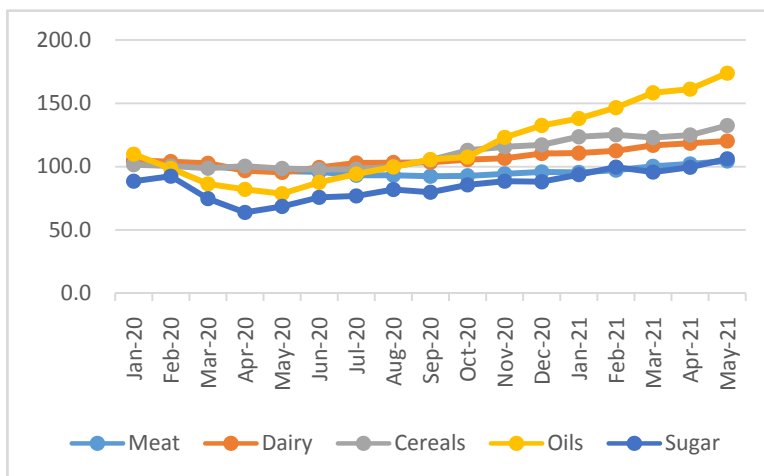
Jika harus melakukan kegiatan impor sebaiknya pemerintah segera memfasilitasi kegiatan impor dengan melakukan koordinasi terhadap Kementerian Pertanian dan Bulog, karena negara-negara asing yang saat ini melakukan kegiatan ekspor pangan dapat setiap saat melakukan pembatasan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Perlunya untuk segera melakukan impor dikarenakan harga pangan dunia secara keseluruhan pada empat tahun terakhir (Gambar 3) menunjukkan harga pangan yang cukup stabil dan tidak menunjukkan lonjakan harga yang tinggi. Sedangkan dari Gambar 4 dapat diketahui bahwa komoditas minyak terus mengalami kenaikan dari delapan bulan terakhir, namun komoditas lainnya seperti daging, susu, sereal, gula masih menunjukkan kestabilan harga.

Sedangkan dari sisi konsumsi, pemerintah saat ini telah memberikan suntikan dana untuk menjaga maupun meningkatkan daya beli masyarakat, suntikan dana ini ditargetkan kepada alokasi program keluarga harapan, diskon tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan juga 900 VA, kartu sumbangan dengan bentuk bantuan pangan non tunai, anggaran pendidikan, kartu pra kerja, dan masih banyak lagi. Selain digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat, bantuan dana ini juga dapat membantu masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, seperti masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 serta masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Namun bantuan ini harus sepenuhnya tepat sasaran agar masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 serta masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dapat benar-benar terbantu dan tujuan awal dari alokasi dana ini dapat tercapai.



Sumber: FAO, 2021

Gambar 3. FAO Food Price Indeks



Sumber: FAO, 2021

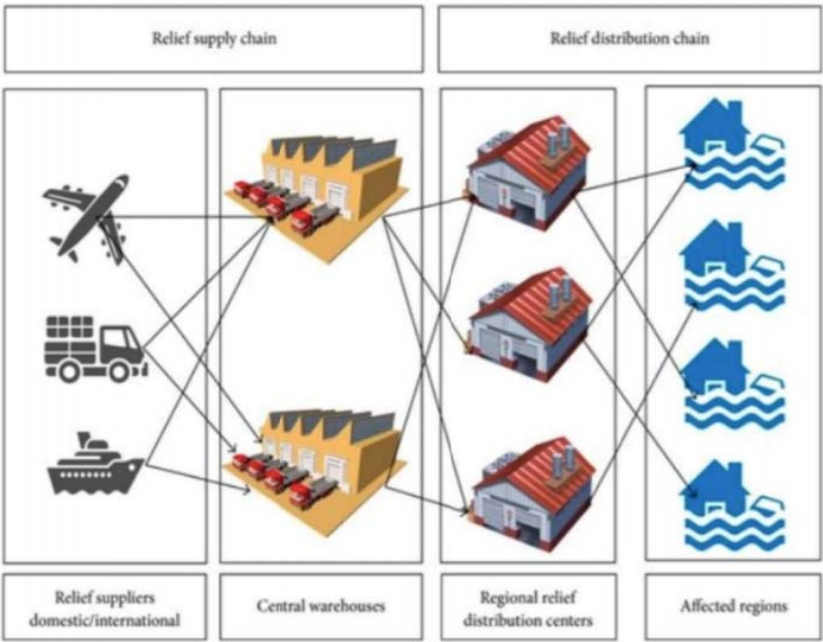
Gambar 4. FAO Monthly Real Food Price Indices

Protokol Logistik Dalam Distribusi Pangan

Protokol logistik dalam sebuah distribusi pangan haruslah diberikan perhatian khusus, karena hampir semua komoditas pangan sangat dibutuhkan dimasa pandemi virus Covid-19 ini. Protokol logistik dalam distribusi pangan segi bencana sebenarnya sudah menjadi dasar awal dalam protokol distribusi pangan, namun pandemi virus Covid-19 ini adalah kategori bencana tipe non alam sehingga membutuhkan penyesuaian kembali

Perlunya perhatian khusus tentu dalam melakukan distribusi logistik pangan sebelum komoditas yang di distribusikan mulai masuk ketiap titik

wilayah negara Indonesia, hal ini dikarenakan distribusi barang logistik pangan nantinya akan melalui jalur darat, laut dan udara.



Sumber: Hirawan & Verselita (2020)

Gambar 5. Kerangka Protokol Logistik Darurat Covid-19 di Indonesia

Pada Gambar 5 di atas dapat dilihat di dalam sebuah rantai pasokan bantuan (*relief supply chain*) terdapat pemasok bantuan domestik maupun internasional (*relief suppliers domestic/international*) yang terdiri dari udara, darat, dan laut yang masing-masing mengirim terlebih dahulu ke gudang pusat (*central warehouse*). Kemudian pada bagan rantai distribusi bantuan (*relief distribution chain*) terdapat pusat distribusi bantuan regional (*regional relief distribution centers*), pusat distribusi ini bertugas dalam menerima barang dari gudang pusat dan mendistribusikannya ke wilayah-wilayah yang terkena dampak pandemi virus Covid-19 (*affected region*) (Hirawan & Verselita, 2020).

Komoditas primer bahan pangan adalah komoditas yang harus diperhatikan karena daya tahan dan kesterilannya sangat mudah terpengaruh. Dengan menerapkan protokol logistik atau distribusi, seperti sterilisasi menggunakan disinfektan terhadap semua unsur yang ada dalam proses distribusi, seperti komoditas pangan, para pekerja, peralatan logistik, dan perlengkapan logistik. Sterilisasi tidak hanya dilakukan saat di proses awal distribusi namun juga pada proses-proses selanjutnya harus, seperti proses pengiriman ke gudang pusat, pengiriman ke pusat distribusi bantuan regional, sampai pengiriman ke wilayah yang terdampak pandemi virus Covid-19, hal ini

dilakukan untuk menjaga kesterilan komoditas pangan. Alat pelindung diri, seragam steril, sarung tangan, masker, dan *hand sanitizer*, harusnya juga tersedia dan digunakan untuk para pekerja logistik dalam menjaga kehygienisan komoditas pangan.

Maka dari itu, campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam membantu memfasilitasi sektor logistik agar kondisi logistik pangan dapat terjaga dengan baik. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka distribusi logistik pangan bisa saja menjadi jalan baru untuk penyebaran virus Covid-19.

Geliat Pasar Tradisional sebagai pintu utama logistik pangan

Dalam rantai logistic, pasar tradisional adalah ujung tombak saluran distribusi pangan. Pasar bertujuan untuk mawadahi pedagang Bagi konsumen, pasar tradisional memiliki tempat tersendiri di hati mereka. Jauh sebelum ada supermarket-supermartket modern, gerai-gerai swalayan, pasar tradisional adalah tumpuan sumber logistic. Nyatanya hingga saat ini pun, keberadaan pasar tradisional masih mendominasi jenis pasar di masyarakat.

Tabel 1. Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan Menurut Klasifikasi Tahun 2019

Provinsi	Pasar Tradisional	Pusat perbelanjaan	Toko swalayan	Total
Aceh	478	7	12	497
Sumatera Utara	858	23	18	899
Sumatera Barat	491	12	30	533
Riau	690	17	36	743
Jambi	378	8	21	407
Sumatera Selatan	833	13	17	863
Bengkulu	225	3	14	242
Lampung	639	11	37	687
Kep. Bangka Belitung	78	4	30	112
Kep. Riau	70	15	55	140
Dki Jakarta	213	88	17	318
Jawa Barat	817	121	173	1111
Jawa Tengah	1 910	56	193	2159
Di Yogyakarta	357	14	87	458
Jawa Timur	2 249	79	119	2447
Banten	213	37	30	280
Bali	415	21	24	460
Nusa Tenggara Barat	228	5	27	260
Nusa Tenggara Timur	528	4	37	569
Kalimantan Barat	219	8	35	262
Kalimantan Tengah	494	4	19	517
Kalimantan Selatan	468	5	9	482
Kalimantan Timur	246	20	80	346

Provinsi	Pasar Tradisional	Pusat perbelanjaan	Toko swalayan	Total
Kalimantan Utara	69	5	6	80
Sulawesi Utara	150	13	24	187
Sulawesi Tengah	429	6	13	448
Sulawesi Selatan	768	20	23	811
Sulawesi Tenggara	421	5	20	446
Gorontalo	129	5	11	145
Sulawesi Barat	184	1	11	196
Maluku	90	5	26	121
Maluku Utara	106	3	9	118
Papua Barat	73	3	2	78
Papua	141	9	14	164
Indonesia	15657	650	1279	17586

Sumber : BPS (2021)

Dari data pada Tabel 4, 89,03 persen jenis pasar di Indonesia di dominasi oleh pasar tradisional, 7,27 persen di sumbang oleh pasar swalayan dan 3.70 persen berupa pusat perbelanjaan. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional masih menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pusat perbelanjaan atau pasar swalayan modern mulai menggeser minat konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional. Dari data ini pula, diyakini bahwa pasar tradisional menjadi posisi utama dalam pemenuhan pangan, penyerapan distribusi pangan domestik dari petani dijual di pasar tradisional.

Meskipun kondisi pasar tradisional yang sebagian besar tidak mengutamakan kenyamanan, namun keberadaannya masih sangat diperlukan. Maka jika dihadapkan pada dua pilihan opsi untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional tentu lebih dipilih daripada mengorbankan nya untuk berganti menjadi pasar modern. Tentu, ada konsekuensi dari memilih opsi ini, antara lain peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar tradisional, merevitalisasi pasar tradisional yang lebih sehat dan bersih, memperhatikan harapan pelanggan dan mengikuti keinginan konsumen

Dinas pasar sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, selaku pengelola pasar wajib memahami strategi-strategi peningkatan layanan pasar tradisional. Strategi pengembangan pasar tradisional pun seharusnya mengedepankan *update* kondisi lingkungan. 2 strategi utama yang dapat dilakukan yaitu (1) Pengembangan pasar tradisional melalui promosi pasar tradisional kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, (2) Peningkatan pembinaan pedagang untuk merubah mindset dan mengenai promosi untuk menarik minat pengunjung/masyarakat.

Model Pemberdayaan Pedagang Pasar

Memang bukan hal yang mudah untuk mengubah kebiasaan di suatu kelompok masyarakat, terlebih bila hal yang ingin diubah merupakan sesuatu yang telah menjadi budaya. Sama hal nya dengan pola perdagangan di pasar tradisional yang selama ini secara tidak langsung sudah terpatok sebuah sistem konvensional. Tentu akan menjadi hambatan besar, bila individu pelaku usaha di pasar tradisional tidak mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan.

Secara mendasar, beberapa metode pemasaran efektif yang *kekinian*, dapat diterapkan terbagi dalam 3 dimensi yaitu:

1. Dimensi pemasaran efektif

Fokus pada sisi pemasaran produk dengan mengedepankan faktor teknologi untuk memasarkan produk. Beberapa Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memakai Akun Media Sosial
- b. Memanfaatkan Online Marketplace
- c. Iklan di Media Online
- d. Membuat E-Commerce

2. Dimensi hubungan dengan konsumen

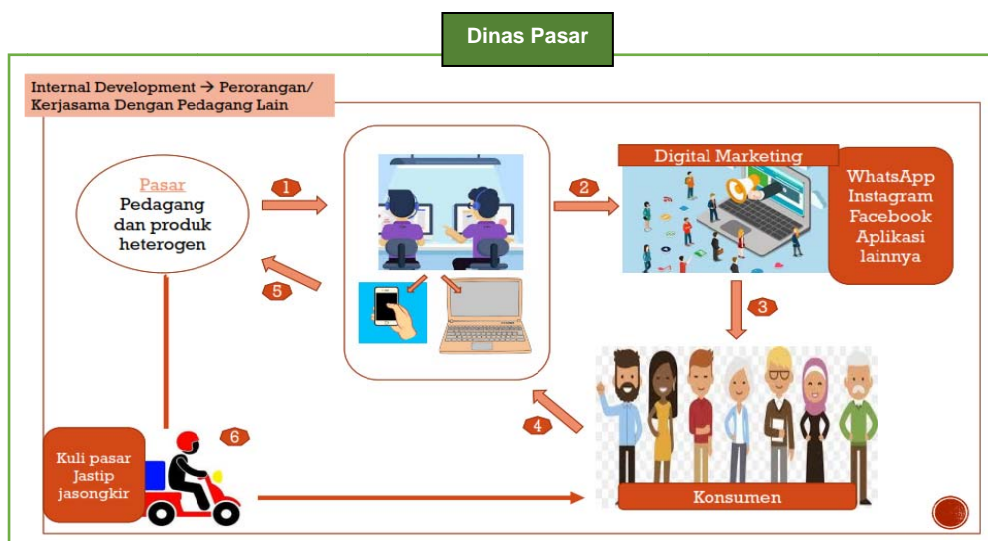
Pemasaran yang dilakukan tidak hanya berfokus pada produk, namun pada layanan konsumen. Dengan harapan, konsumen akan melakukan repeating buying. Beberapa faktor pendukung antara lain:

- a. Membuat Promo Menarik
- b. Mengembangkan Pola Membership/Keanggotaan
- c. Memberi insentif

3. Dimensi Regulasi

Regulasi sangat penting dilakukan untuk menjaga hubungan antar pedagang maupun antara pedagang dengan konsumen. Dalam hal ini, peran Dinas Pasar selaku pengelola pasar dan perpanjangan tangan dari pemerintah berkewajiban untuk menjaga kegiatan jual beli dipasar yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Gambar 6 menggambarkan Model Sinergitas antara pedagang, konsumen dan Dinas Pasar, dimana dalam hal ini Dinas Pasar berperan untuk memfasilitasi platform jual beli serta melakukan pengawasan atas alur jual beli yang dilakukan.



Gambar 6. Model Sinergitas Pemberdayaan Pedagang Pasar

PENUTUP

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kebijakan pangan yang tepat dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam masa pandemi virus Covid-19. Beberapa aspek seperti kondisi pangan, pola pasokan pangan, fasilitas produksi dan konsumsi pertanian, distribusi logistik pangan harus diberikan perhatian khusus. Hal ini untuk menghindari sebuah kondisi dimana bahan pangan mengalami kekurangan atau dikenal sebagai krisis pangan.

Dalam aspek perubahan pola pasokan pangan, pemerintah dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat produsen maupun konsumen untuk memanfaatkan teknologi dalam sistem produksi maupun transaksi konsumsi, hal ini untuk mengajak dan membantu masyarakat untuk menyesuaikan diri dari perubahan pola hidup dan tetap terjaga kondisi, ketersediaan, serta ketahanan pangan di negara Indonesia.

Dalam aspek fasilitas produksi dan konsumsi, melihat dari Gambar 1 menunjukkan bahwa komoditas selain beras dan jagung, menunjukkan kondisi yang cukup riskan, seperti komoditas bawang putih, daging sapi dan kerbau, serta komoditas gula. Dari hal ini, maka komoditas yang tidak aman harus segera dilakukan impor untuk menjaga ketersediaan pangan di Indonesia.

Dalam segi fasilitas konsumsi, pemerintah memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari pandemi Covid-19 dan masyarakat berpenghasilan rendah, serta dalam rangka menjaga daya beli masyarakat (Darma et al., 2020).

Dalam segi distribusi logistik pangan, pemerintah dapat memberikan bantuan dalam sterilisasi menggunakan disinfektan terhadap semua unsur yang ada dalam proses distribusi, seperti komoditas pangan, para pekerja, peralatan logistik, dan perlengkapan logistik. Sterilisasi tidak hanya dilakukan saat di proses awal distribusi namun juga pada proses-proses selanjutnya harus, seperti proses pengiriman ke gudang pusat, pengiriman ke pusat distribusi bantuan regional, sampai pengiriman ke wilayah yang terdampak pandemi virus Covid-19, hal ini dilakukan untuk menjaga kesterilan komoditas pangan. Alat pelindung diri, seragam steril, sarung tangan, masker, dan *hand sanitizer*, harusnya juga tersedia dan digunakan untuk para pekerja logistik dalam menjaga kehygienisan komoditas pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- CNBC Indonesia. (2021). *3 Bahan Pokok Ini RI Belum Merdeka dari Impor*. Cnbcindonesia.Com.
<https://www.cnbciindonesia.com/news/20200416125906-4-152379/3-bahan-pokok-ini-ri-belum-merdeka-dari-impor>
- Darma, S., Pusriadi, T., Syaharuddin, Y., & Darma, D. C. (2020). Indonesia Government's Strategy for Food Security: During the COVID-19 Period. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 10338–10348.
- Databoks. (2021a). *Beras Dominasi Kebutuhan Pangan Nasional hingga Mei 2021*. Databoks.Katadata.Co.Id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/19/beras-dominasi-kebutuhan-pangan-nasional-hingga-mei-2021#>
- Databoks. (2021b). *Ketahanan Pangan Indonesia Menurun pada 2020*. Databoks.Katadata.Co.Id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/26/ketahanan-pangan-indonesia-menurun-pada-2020#>
- Databoks. (2021c). *Stok Beras Capai 6,8 Juta Ton hingga Pertengahan Maret 2021*. Databoks.Katadata.Co.Id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/18/stok-beras-capai-68-juta-ton-hingga-pertengahan-maret-2021>
- FAO. (2021). *World Food Situation*. Fao.Org.
<http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>
- Hirawan, F. B., & Verselita, A. A. (2020). Kebijakan Pangan di Masa Pandemi Covid-19. In *CSIS Commentaries: Vol. april* (Issue CSIS Commentaries DMRU-048-ID).
- Warta Pertanian. (2020). *Alih Fungsi Lahan Pertanian kian Memprihatinkan*. [http://ppid.pertanian.go.id/doc/1/WartaPertanian/Rev_Preview_Majalah WARTA PERTANIAN Edisi JANUARI.pdf](http://ppid.pertanian.go.id/doc/1/WartaPertanian/Rev_Preview_Majalah_WARTA_PERTANIAN_Edisi_JANUARI.pdf)

BUDAYA ORGANISASI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI UNIVERSITAS PADA SAAT PANDEMI COVID -19

**Qristin Violinda, Mahmud Yunus, Suwarno Widodo R Istiyaningsih,
Rahmad Robi Waliansyah**

PENDAHULUAN

Kehidupan setiap organisasi tidak terlepas dari pengaruh budaya, karena organisasi sebagai suatu sistem selalu berinteraksi dengan budaya yang ada disekitarnya. Semua organisasi belajar, namun beberapa organisasi tidak dapat belajar cukup cepat untuk bertahan. Organisasi yang tidak responsif dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan yang kompleks dan penuh ketidakpastian sudah tentu tidak menguntungkan organisasi dalam menghadapi dunia persaingan yang semakin ketat apalagi saat Pandemi Covid-19 melanda, kemampuan organisasi untuk adaptif terhadap perubahan sangat diperlukan. Espejo et al. (1996) menyatakan “the competitive landscape is changing, and new models of competitiveness are needed to deal with challenges a head”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa organisasi dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya sehingga mampu memberikan produk dan jasa yang berkualitas kepada pelanggannya mengingat tingkat persaingan kian meningkat. Kemampuan organisasi untuk tetap memperbarui pengetahuannya melalui proses pembelajaran terasa lebih penting pada saat Pandemi Covid-19. Agar dapat bersaing organisasi sekarang dan akan datang diharapkan untuk lebih fleksibel. Kefleksibelan membutuhkan komitmen jangka panjang dalam membangun dan mengembangkan sumberdaya strategis. Dalam lingkungan yang serba dinamis, organisasi harus mampu mengadopsi perubahan yang terjadi dengan budaya organisasi yang ada. Demikian pula halnya dengan perguruan tinggi. Lingkungan persaingan baru telah terbentuk sebagai hasil dari perubahan demografi, teknologi, bentuk perguruan tinggi, dan ekonomi global yang serba kompleks (Blustain et al., 1999). Dengan terbentuknya lingkungan persaingan baru tersebut, berbagai tantangan baru juga muncul bagi perguruan tinggi antara lain pertanggungjawaban kepada masyarakat yang semakin besar, harapan yang lebih besar dalam meningkatkan akses kerjasama, perhatian yang lebih pada upaya peningkatan kualitas, serta masalah biaya pendidikan. Perguruan tinggi terus dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan

perubahan. Dalam hal ini, perubahan berkaitan dengan efektivitas proses belajar mengajar. Untuk menghadapi situasi tersebut, perguruan tinggi diharapkan mengadopsi proses-proses khusus agar dapat mendorong perbaikan proses belajar mengajar. Untuk itu, perguruan tinggi baik secara eksplisit maupun implisit harus membangun kesadaran akan pentingnya pembelajaran serta ide pembelajaran sebagai dasar dan pendorong pengembangan perguruan tinggi.

Strategi kebijakan yang dapat dilakukan Universitas saat pandemi Covid-19 adalah dapat berkarya secara optimal dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan memperhitungkan berbagai skenario Covid 19 termasuk budaya organisasi. Membangun budaya organisasi

Universitas yang tangguh dan relevan dengan kondisi saat ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemi sehingga Universitas memiliki kemampuan yang cukup. Harapannya tetap unggul dan mampu bersaing pada masa ketidakpastian yang tinggi. Budaya selalu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Budaya adalah cermin dari masyarakatnya termasuk pada komunitas paling kecil. Budaya merupakan “the way of life” bagi suatu masyarakat yang didefinisikan sebagai sistem nilai masyarakat yang mencirikan suatu nilai-nilai yang dianut dan diterima bersama dalam satu pemahaman dengan latar belakang anggota organisasi yang berbeda-beda serta digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Budaya yang ada di Universitas merupakan keinginan kelompok untuk berbuat sesuai harapan dan manifestasi kehidupan dalam mencapai nilai-nilai yang dianut organisasi. Membangun budaya organisasi yang efektif di masa pandemi saat ini, perlu adanya penyesuaian-penyesuaian, sehubungan dengan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi pada tatanan kehidupan, mulai dari kehidupan sosial dan juga dalam berorganisasi.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap kinerja Universitas

Kehidupan Masyarakat dan sebuah organisasi tidak terlepas dari ikatan budaya yang diciptakan. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam cara berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat anggota kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan keseragaman berperilaku dan bertindak. Siring dengan bergulirnya waktu, budaya pasti terbentuk dalam organisasi dan dapat pula dirasakan manfaatnya dalam member kontribusi bagi efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Gordon, 1991 dalam Erni R Ernawan menyatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung kepada keberhasilannya dalam menciptakan budaya organisasi yang khas sebagai budaya dari rencana strategik mereka. Selanjutnya dia mengatakan bahwa kesesuaian antara sikap dan perilaku karyawan dengan budaya organisasi memiliki efek pada kinerjanya. Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja (Job Performance) karyawannya. Oleh karena itu kinerja perusahaan dipengaruhi oleh kinerja dari karyawannya. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu (Byar, 1984). Pendapat lain mengatakan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan (Robbins, 1996).

Berbagai cara ditempuh untuk meningkatkan kinerja misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian kompensasi dan motivasi serta penciptaan lingkungan kerja yang baik. Penciptaan lingkungan kerja yang baik harus didukung oleh nilai – nilai yang tercermin dalam aktivitas individu dalam perusahaan. Sistem nilai yang dikembangkan oleh perusahaan untuk aturan atau pedoman dalam bertindak dan berpikir untuk mencapai tujuan dilakukan melalui budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan memacu perusahaan ke arah kemajuan yang lebih baik. Budaya organisasi yang kuat akan membantu perusahaan dalam memberikan kepastian kepada seluruh karyawan untuk berkembang bersama. Moeljono (2003) mengatakan bahwa dengan membakukan budaya organisasi, maka para karyawan secara tidak langsung akan terikat sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan visi dan misi serta strategi perusahaan. Proses pembentukan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan karyawan profesional yang mempunyai integritas yang tinggi yang membawa kemajuan bagi kinerja perusahaan.

Budaya organisasi merupakan (sumberdaya yang efektif didalam mengimplementasi strategi untuk mendorong kinerja karyawan) strategi yang penting, yang efektif bagi manajemen dan mendorong kinerja karyawan (Lawyer, 1985 dalam Denison, 1990). Kotler dan Heskett (1997) mengatakan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat menghasilkan efek yang sangat mempengaruhi individu dan kinerja perusahaan, bahkan dalam suatu lingkungan bersaing pengaruh tersebut dapat lebih besar daripada faktor – faktor lain seperti struktur organisasi, alat analisis keuangan, kepemimpinan, dll. Kemudian beberapa penelitian mengatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku dan sikap kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Walton dan Lauter dalam Denison (1990) menyimpulkan tentang budaya

organisasi ternyata merupakan strategi efektif bagi manajemen dalam mendorong kinerja karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Lado & Wilson (1994) menyatakan bahwa kinerja sumber daya manusia sebagai anggota organisasi perusahaan sangat potensial dalam membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitifnya. Aset sumber daya manusia merupakan kemampuan yang sulit ditiru, langka, tepat guna dan secara khusus member keunggulan kompetitif bagi karyawannya (Parake & Astuti, 2003). Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem sumber daya manusia didalam organisasi perusahaan yang dikembangkan dengan baik bisa menjadi asset tidak terlihat (intangible) dan mampu menciptakan nilai (value) apabila diterapkan dalam sistem operasional organisasi, sehingga memperendah imitabilitas (sulit ditiru) kemampuan perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan.

Tiga kekuatan penting dalam mempertahankan budaya organisasi adalah seleksi, tindakan manajemen puncak dan metode sosialisasi. Konsep budaya perusahaan saat ini sudah berkembang sangat jauh, bukan sekedar jati diri, slogan, lebih dari pada itu budaya perusahaan telah sampai pada paradigma baru yang menurut Susanto (2000) memiliki memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pengembangan usaha, pengembangan sumber daya manusia agar semakin berkualitas dan sebagai andalan daya saing. Pernyataan bahwa budaya organisasi berhubungan dengan kinerja dapat diterima karena budaya memainkan peranan penting dalam membangkitkan keunggulan bersaing (Scholz, 1987). Menurut penelitian Jill L Mckinnon (2003) bahwa indikator budaya organisasi yaitu orientasi hasil, agresifitas dan adaptif.

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian budaya organisasi menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, Osborn (2001), budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi dimana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri.
- b. Menurut Tosi, rizzo, Carroll seperti yang dikutip oleh Munandar (2001:263), budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi.
- c. Menurut Robbins (1996:289), budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu
- d. Menurut Schein (1992:12), budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk

anggota yang baru sebagai suatu acara yang benar dalam mengkaji, berpikir dan merasakan masalah yang dihadapi.

- e. Menurut Cushway dan Lodge (GE : 2000), budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara para karyawan berperilaku.

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi.

2. Langkah-langkah penyesuaian budaya dalam menghadapi tantangan Pandemi covid-19

Langkah apa yang harus diambil agar Universitas tetap survival di saat pandemi? Untuk mengatasinya, universitas harus mempersiapkan diri dalam menghadapi hal terburuk dengan kemampuan bertahan hidup (survival skill) dibawah karakteristik budaya organisasi Universitas sebagai pijakan. Ada Lima karakteristik budaya organisasi Universitas yang bisa digunakan untuk menganalisis agar perusahaan menjadi tegar menghadapi baik pada saat Covid-19 masih berlangsung maupun pasca-covid-19, diantaranya:

Pertama,

Adanya Inovasi dan Pengambilan Resiko. Berinovasi dan bereksperimen dalam bekerja serta berani mengambil resiko merupakan karakteristik pertama dari budaya organisasi di Universitas. Bersikap selalu inovatif dan bereksperimen dalam bekerja khususnya terutama pada penyelesaian masalah yang timbul di masa pandemik ini. Tujuannya, agar Universitas tetap berinovasi dalam menghasilkan dan mendistribusikan produk serta menata tatanan dalam berorganisasi dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan anggota-anggota organisasi atau karyawan, termasuk anggota keluarganya di rumah. Hal ini perlu diperhatikan karena inovasi tidak akan terbentuk jika dosen dan karyawan atau anggota organisasi masih khawatir dengan kesehatan dan keselamatan diri sendiri juga Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan anggota keluarganya.Selain itu dosen dan karyawan dituntut untuk berani dalam mengambil resiko dengan berdasarkan pada perhitungan kerja yang tepat dan matang.

Kedua,

Memperhatikan secara mendetail. Karakteristik budaya organisasi perusahaan menuntut agar anggota organisasi diminta fokus dan cermat dalam bekerja serta ketepatan dalam menganalisis hasil pekerjaan. Selain itu perhatian pada hal-hal yang rinci dengan selalu teliti dan mendetail dalam

menganalisis, baik produk, proses dan juga pelanggan, karena perilaku pelanggan akan berubah ketika muncul Covid-19. Perhatian secara mendetail ini, dalam masa pandemi diperluas tidak hanya fokus pada hal yang dikerjakan dan juga pelanggan tetapi memberi perhatian detail pada kesehatan dan keselamatan dosen serta karyawan dengan memberikan bentuk perhatian. Bentuk perhatian ini bisa berupa pemberian informasi dari sumber-sumber terpercaya sampai pada pemberian dukungan baik moral maupun materiil dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam situasi yang tidak pasti ini sehingga tidak terjadi kepanikan dan ketakutan. Hal ini dilakukan karena perlu juga membangun kesehatan mental dan emosional anggota organisasi, walaupun kerja dilakukan secara daring atau virtual.

Ketiga,

Berorientasi pada kebermanfaatan. Fokus pada kebermanfaatan berbagai pihak dengan fokus pada hasil akhir pekerjaan dengan harapan yang tinggi atas hasil akhir pekerjaan tersebut merupakan karakteristik budaya organisasi yang ketiga. Akan tetapi di masa pandemi Covid ini harapan yang tinggi tidak hanya fokus pada hasil akhir pekerjaan tetapi juga kesehatan dan keselamatan selama proses yang dilakukan. Untuk membantu hasil akhir yang tinggi, perlu adanya suatu teknologi yang dapat mendukung dengan memasukkan alat kerja digital yang bisa dilakukan dari jarak jauh, sehingga walaupun kebijakan WFH dilakukan, hasil akhir yang tinggi tetap tercapai.

Keempat

Berorientasi pada tim. Kegiatan kerja yang diorganisasikan dalam tim-tim bukan dalam individu-individu dengan melakukan kolaborasi merupakan karakteristik budaya organisasi Universitas yang strategis. Berorientasi pada tim dalam segala hal termasuk pada tiap keputusan yang diambil oleh organisasi harus melalui pertimbangan bahwa dampaknya harus positif terhadap anggota dalam organisasi. Dalam masa pandemi seperti ini dosen dan karyawan hendaknya diberikan kepercayaan yang lebih besar agar kemandirian karyawan terbangun. Selalu menjaga komunikasi dengan tim dan melakukan interaksi antar tim dengan menyediakan fasilitas komunikasi yang lebih efektif. Fungsi kontrol sosial dari budaya organisasi mampu mempengaruhi keputusan dan perilaku karyawan. Cara yang efektif mengarahkan dosen dan karyawan untuk mencapai tujuan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan atau sasaran organisasi sesuai dengan yang diharapkan yaitu dengan melakukan peninjauan ulang prioritas perusahaan ditengah kondisi pandemi ini. Selanjutnya pastikan bahwa sasaran dan yang menjadi prioritas utama tersebut tersosialisasikan dan dipahami oleh para karyawan hingga level yang paling bawah. Komunikasi yang sangat intens dan jelas atas inisiatif-inisiatif brilliant sangat dibutuhkan pada situasi seperti ini, sehingga dosen dan karyawan

disamping merasa diperhatikan, juga akan termotivasi dengan komunikasi intens seperti ini.

Kelima,

Bersifat agresif. Memiliki inisiatif dan adanya semangat berkompetisi dalam bekerja serta membuat anggota bertindak agresif merupakan karakteristik terakhir dari budaya organisasi. Dimasa pandemi Covid-19 ini tinjau kembali seluruh perspektif biaya, inventaris, pertumbuhan, rencana, dan strategi dari sudut pandang yang berbeda. Evaluasi serta rencana harus dapat menemukan hal-hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam menghadapi masa selama dan pasca pandemi. Terapkan strategi yang paling tepat dengan selalu menghormati dan memperkuat hubungan dengan pelanggan agar target pendapatan tetap tercapai dengan memberikan kepuasan pelanggan yang optimal. Tujuannya keuntungan yang maksimal dapat diperoleh dengan selalu mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan baik di tempat kerja, di jalan maupun di rumah yang tidak luput dari pantauan organisasi. Berdasarkan berbagai perubahan tatanan kehidupan baik personal maupun usaha, maka hendaknya dengan segera membentuk budaya organisasi baru yang sehat, bersih, nyaman, aman dan tetap menguntungkan. Dengan demikian di masa pandemi Covid-19 Universitas mampu bertahan hidup dan menyesuaikan diri dalam pola hidup yang dipedomani protokol kesehatan yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran sambil beraktivitas seperti biasa, sehingga keuntungan tetap diraih walaupun ditengah ketidakpastian yang cukup tinggi

PENUTUP

Strategi kebijakan yang dapat dilakukan Universitas saat pandemi Covid-19 adalah dapat berkarya secara optimal dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan memperhitungkan berbagai skenario Covid 19 termasuk budaya organisasi. Membangun budaya organisasi Universitas yang tangguh dan relevan dengan kondisi saat ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemi sehingga Universitas memiliki kemampuan yang cukup. Harapannya tetap unggul dan mampu bersaing pada masa ketidakpastian yang tinggi. Budaya selalu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Strategi yang bisa dilakukan didalam menghadapi tantangan perubahan saat pandemi Covid-19 diantaranya yaitu konsentrasi pada inovasi dan pengambilan resiko, focus dan cermat dalam bekerja, berorientasi pada kebermanfaatan dan TIM serta agresif dan memiliki inisiatif untuk berubah menyesuaikan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Argyris, C., & Schön, D. A. (1996). *Organizational learning II: Theory, method, and practice* (Vol. 1). Reading, MA: Addison-Wesley.
- Aswati, S., Mulyani, N., Siagian, Y., & Syah, A. Z. (2015). Peranan sistem informasi dalam perguruan tinggi. *Jurteksi Royal Edisi2*.
- Cleveland, J., & Plastrik, P. (1995). Learning, learning organizations, and TQM. *Total Quality Management--Implications for Higher Education", College and University Personnel Association,(Forthcoming 1994)*.
- Denison, D. R. (1990). *Corporate culture and organizational effectiveness*. John Wiley & Sons.
- Dill, D. D. (1999). Academic accountability and university adaptation: The architecture of an academic learning organization. *Higher education, 38*, 127-154.
- Kuncoro, E. A. (2011). Leadership Sebagai Primary Forces Dalam Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi. *Binus Business Review, 2*(1), 14-30.
- Gaffar, M. F. (2004). Membangun Kembali Pendidikan Nasional dengan Fokus: Pembaharuan Manajemen Perguruan Tinggi pada Era Globalisasi. *Makalah Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia V, Surabaya*.
- Garvin, D. A. (2003). *Learning in action: A guide to putting the learning organization to work*. Harvard Business Review Press.
- Hidayat, D. S. (2008). *Strategi membangun kompetensi organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Tengah* (program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- <https://politik.rmol.id/read/2020/05/03/433104/pemerintah-harus-turun-gunung-bantu-perguruan-tinggi-swasta-yang-terdampak-covid-19>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/05/berapa-jumlah-perguruan-tinggi-di-indonesia>
- <https://www.upgris.ac.id/sejarah-universitas-pgri-semarang/>
- <https://www.kompasiana.com/ailisoy/5729630fb27e6114053e8e37/kebijakan-ptbhm-n-apakah-sudah-cukup-bijak?page=all>
- Lado, A. A., & Wilson, M. C. (1994). Human resource systems and sustained competitive advantage: A competency-based perspective. *Academy of management review, 19*(4), 699-727.
- Luthans, F., Rubach, M. J., & Marsnik, P. (1995). Going beyond total quality: The characteristics, techniques, and measures of learning organizations. *The International Journal of Organizational Analysis*.
- Kotler, Jhon P & James A Heskett, (1997), *Corporate Culture & Performance*. PT. Prenhelido, The free pres.

- Mahesa, D., & Djastuti, I. (2010). *Analisis Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Lama Kerja sebagai Variabel Moderating (Studi pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia (Central Java) (Universitas Diponegoro).*
- McKinnon, J. L., Harrison, G. L., Chow, C. W., & Wu, A. (2003). Organizational culture: Association with commitment, job satisfaction, propensity to remain, and information sharing in Taiwan. *International journal of business studies*, 11(1).
- Mirfani, A. M., Sutarsih, C., & Rosalin, E. (2012). Strategi Dan Hasil Kompetisi Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 14(1), 182-197.
- Moeljono, D. (2003). *Budaya korporat dan keunggulan korporasi*. Elex Media Komputindo.
- O'Banion, T. U. (1997). *A learning college for the 21st century*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Örtenblad, A. (2001). On differences between organizational learning and learning organization. *The learning organization*.
- Purwaningsih, P. (2019). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia di SMA N 1 Kota Metro. *Jurnal Dewantara*, 7(01), 136-152.
- Rivai, V., & Sagala, J. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan dari Teori ke Praktik*.
- Schein, E. H. (1992). How can organizations learn faster?: the problem of entering the Green Room.
- Scholz, C. (1987). Corporate culture and strategy—The problem of strategic fit. *Long Range Planning*, 20(4), 78-87.
- Senge, P. (1994). Building learning organizations. *The training and development sourcebook*, 379.
- Sudaryo, Y., Aribowo, A., & Sofiati, N. A. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik*. Penerbit Andi.
- Taylor, J. R., & Van Every, E. J. (1999). *The emergent organization: Communication as its site and surface*. Routledge.
- Tsang, E. W. (1997). Organizational learning and the learning organization: a dichotomy between descriptive and prescriptive research. *Human relations*, 50(1), 73-89.
- Wheelen, T. L., Hunger, J. D., & Sánchez, M. Á. (2007). *Administración estratégica y política de negocios* (Vol. 10). Pearson Educación.
- Wood, W., & Zeffane, S. (2001). Hunt, & Osborn, "Historical foundations of organizational behavior.

BELANJA TIDAK TERDUGA AKIBAT COVID-19 DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMERINTAH DAERAH SRAGEN

Kusmuriyanto, Saringatun Mudrikah, Wulan Suci Rachmadani, Kardiyem, Widodo

PENDAHULUAN

Penanganan Covid-19 menyebabkan pemerintah melakukan gerak cepat sehingga anggaran dapat disalurkan tepat sasaran. Salah satu wadah penyaluran kejadian luar biasa atau bencana adalah dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tidak Terduga (BTT) ini diperuntukkan bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan keadaan darurat. Selain itu BTT juga diperuntukkan untuk keperluan yang mendesak, bencana sosial, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. Salah satu peruntukkan dari BTT berupa kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa yang dimaksud adalah timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah, terkena wabah penyakit menular, dan Covid-19 termasuk dalam kategori tersebut.

Terdapat beberapa masalah yang timbul dari penggunaan dana BTT diantaranya yaitu terkait masalah eksekusi belanja. Jumlah belanja yang dilakukan sangat besar dan terjadi dalam waktu yang sangat pendek dengan jenis belanja yang sangat bervariasi. Masalah kedua terkait BTT adalah alur pengadaan. Alur pengadaan BTT harus satu pintu kendali, yaitu alur satu pintu administrasi BTT (Belanja Tidak Terduga). Karena itu, anggaran menjadi kebencanaan terpusat di BTT. Permasalahan ketiga yang timbul adalah terkait dengan distribusi. Masalah yang muncul yaitu sasaran tidak detail secara nama dan alamat (*by name by address*), sehingga distribusi ini menjadi rawan. Besarnya anggaran BTT untuk penanggulangan bencana sosial Covid-19 yang cukup besar khususnya di Daerah Kabupaten Sragen menjadi menarik untuk

diteliti apakah proses penyaluran BTT, mekanisme implementasi penyaluran BTT serta bagaimana proses pertanggungjawabannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terjadi di lapangan. Penelitian ini memberikan keunikan terkait kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam penanganan bencana Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Belanja Tidak Terduga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Definisi Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Penggunaannya dapat dikategorikan untuk keadaan darurat atau keperluan lain yang mendesak. Dengan demikian keadaan darurat dan keperluan lain yang mendesak ini dapat dilaksanakan untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Keadaan Darurat sebagaimana dikarenakan Bencana memungkinkan keadaan darurat dibiayai dengan APBD, tahapan darurat ini berdasarkan pada Bagian Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Keadaan Darurat berdasarkan PP 21 / 2008 meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Secara administrasi proses keuangan dapat dilaksanakan pertanggungjawabannya sesuai dengan PP12/2019 terkait dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) ini dimulai dari Penetapan Status oleh Kepala Daerah, Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) pada PPKD dan dilanjutkan dengan pencairan kepada Bendahara dan penyampaian pertanggung jawaban oleh Kepala SKPD, dimana Bendahara mencatat pada buku Kas Umum tersendiri. Terkait Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati).

Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (2) PP12/2019 disebutkan bahwa tugas yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja oleh PA/KPA yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:

- 1) Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
- 4) Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa

Dengan demikian maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat tetap merujuk pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Proses keuangan dan proses pengadaan diharapkan dapat *in-line/* selaras, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen sebagai aktor pelaksana bersama PA/KPA berdasarkan PerLKPP 13/2018 hendaknya melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan proses peraturan perundangan di bidang keuangan. Dengan demikian maka peran PPK bersama PA/KPA tidak dapat dieliminasi, demikian juga tidak dapat dipersyaratkan permintaan dokumen sebagai syarat pertanggung-jawaban dengan melibatkan proses yang bukan termasuk dalam proses pengadaan darurat.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penanganan Keadaan Darurat merupakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbeda dengan proses Pengadaan dalam keadaan normal, sehingga pengadaan barang/jasa penanganan darurat ini dikategorikan dalam Pengadaan Khusus. Sebagai bagian dari pengadaan khusus maka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penanganan Keadaan Darurat tidak dapat disamakan dengan:

- 1) Pengadaan Langsung melalui Pejabat Pengadaan untuk nilai tertentu;
- 2) Tender/Seleksi melalui Kelompok Kerja Pemilihan untuk nilai tertentu;
- 3) Penunjukan Langsung melalui Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan untuk nilai dan kondisi tertentu;

Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengadaan Penanganan Keadaan Darurat dilakukan dengan merujuk pada PerLKPP13/2018 yang lebih intensif peran nya berada pada PA/KPA dan PPK dengan filosofis kecepatan melakukan penanganan keadaan darurat. Dengan demikian maka proses pengadaan barang/jasa tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dokumen kontrak merupakan keluaran dari proses pengadaan

barang/jasa pemerintah. Demikian proses dalam keuangan yang merupakan Bukti Penjualan adalah dokumen yang berbeda, dalam hal ini ketika tidak terdapat peran Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses keuangan bukan berarti lantas kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa tidak dilakukan.

Pengadaan penanganan keadaan darurat juga perlu menjadi perhatian, dalam keuangan daerah juga perlu dilakukan perhatian pada Peraturan Menteri Keuangan, karena selain melakukan proses penanganan keadaan darurat, terkait dengan perpajakan juga terdapat pengecualian dibidang perpajakan, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK/010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019(Covid19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
- 3) Dan lain-lainnya.

Kebijakan Pajak Daerah yang dilakukan dengan landasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan ranah Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan demikian pengecualian atas pembebasan Pajak Daerah harus dilakukan berdasarkan regulasi kebijakan Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah hendaknya dapat selaras dan tidak mengeliminasi atau menambah dari aspek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat maupun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdampak Keadaan Darurat maupun aturan Perpajakan.

Anggaran Belanja Tidak Terduga Akibat Bencana Covid-19

Penganggaran memiliki peran sentral dalam suatu organisasi sektor publik. Sebagian besar pendapatan suatu negara akan dikelola dan dialokasikan ke dalam anggaran publik. Secara lingkup khusus penganggaran telah menjadi proses dimana pemerintah dapat membuat keputusan untuk besaran belanja yang akan digunakan serta membatasi pengeluaran serta mencegah pengeluaran yang berlebihan, sedangkan dalam arti yang lebih luas penganggaran merupakan tanggung jawab manajerial, sehingga dapat menjalankan peran fungsi dari anggaran tersebut, serta dapat menjalankan akuntabilitas secara eksternal (Anessi-Pessina et al., 2020).

Dampak Covid-19 menyebabkan guncangan ekonomi dan krisis di seluruh dunia. Perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang harus menjadi sinergi yang seimbang dalam penanganan krisis akibat Covid-19 (Jallow et al., 2020). Pembangunan dalam bidang sosial ekonomi menjadi perhatian khusus, seperti upaya pemerintah dalam menstimulasi sektor kewirausahaan agar membentuk model bisnis yang berkelanjutan (Nicola et al., 2020). Pemerintah di seluruh dunia melakukan berbagai upaya seperti tindakan darurat, pembatasan dalam skala sosial serta paket ekonomi yang dinilai dapat meminimalkan dampak ekonomi yang merugikan (Ashraf, 2020). Pencegahan transmisi virus covid 19 dalam upaya penanganan kesehatan, mempengaruhi langkah masyarakat saat melakukan intervensi sosial dan ekonomi sehingga berdampak pada resesi ekonomi akibat pemutusan rantai makanan yang disebabkan pembatasan sosial dalam skala besar (Aldaco et al., 2020).

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 mengenai Refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020, antara lain: (a) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 (*refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran) dengan mengacu pada penanganan Covid-19 di Kementerian/Lembaga/Pemerintah dan rencana operasional percepatan penanganan Covid 19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19. (b) Mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri keuangan sesuai dengan kewenangannya. (c) Mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang. Sehingga Anggaran Bantuan Tidak langsung (BTT) menjadi wadah penting dalam penyaluran dana Covid-19.

Implementasi Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Daerah Sragen

Implementasi Belanja tidak terduga pada pemerintah daerah Sragen diuraikan dalam beberapa bagian meliputi kegiatan: Penganggaran, Prosedur Penyusunan Bantuan Tidak Terduga akibat dampak Covid-19, Pelaksanaan penyaluran Bantuan Tidak Terduga akibat Covid-19, Proses pelaporan dan pertanggungjawaban serta Pengawasan.

Pada kegiatan penganggaran, dana Bantuan Tidak Terduga antar daerah yang satu dengan yang lain mempunyai karakteristik strategis yang berbeda. Penganggaran dana khusus pada Bantuan Tidak Terduga terdapat perbedaan antara tahun 2020 dan 2021. Pada anggaran tahun 2021 Pemerintah Daerah

Kabupaten Sragen harus tunduk pada Permendagri No 20 dan Permendagri No 77. Sementara penganggaran untuk tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen berpedoman pada instruksi presiden yang didapatkan dari surat edaran. Terdapat satu hal yang membedakan Kabupaten Sragen dengan kabupaten lain yaitu adanya pengawasan berjenjang. Untuk penganggaran BTT covid-19 ini dilaksanakan oleh dinas BPBD. Dalam perencanaan anggaran setiap OPD harus menyusun Rencana Kebutuhan Barang (RKB). Anggaran kemudian di-review dan setelah disetujui diberikan kepada BUD untuk dicairkan. Setelah itu dana BTT dapat digunakan. Setelah digunakan, pengguna dana BTT melaporkan pertanggung jawabannya kepada inspektorat yang kemudian di-review bersama dengan pihak Kejaksaan kabupaten Sragen untuk dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kepada TU. Hal ini sebagai upaya bagi Pemerintah daerah Sragen untuk menjaga akuntabilitas.

Pemerintah daerah Kabupaten Sragen telah mengalokasikan dana Covid-19 pada APBD sebesar 10 Miliar rupiah. Setelah kita mengalokasikan anggaran Covid-19, beberapa bulan kemudian terbit Permendagri untuk mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih 120 Miliar. Untuk anggaran yang di *refocusing* akan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh Permendagri, adapun kegiatan yang sifatnya tidak terlalu mendesak tetap dapat di *refocusing*, kecuali kegiatan yang bersifat kontra sehingga tidak perlu dilakukan *refocusing*. Pada pelaksanaan penggunaan dana, anggaran dalam APBD yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar sekitar 1,2 Triliun rupiah, sementara kegiatan setiap agenda sekitar 300 Miliar rupiah, artinya alokasi dana yang telah dibuat tersebut melebihi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Anggaran sebesar 50%-60% dialokasikan untuk belanja gaji pegawai dan pengeluaran lain yang tidak bisa di *refocusing*. *Refocusing* anggaran 2020 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dialokasikan ke dalam rekening Belanja Tidak Terduga yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Sragen.

Pelaksanaan mekanisme anggaran pada tahun 2020 dan 2021 yang sangat berbeda, mengkhususkan Anggaran tahun 2020 pada rekening khusus Bantuan Tidak Terduga. Sementara pada tahun 2021, karena muncul Permendagri nomor 20 dan nomor 77 tahun 2020, maka terdapat dua jenis perlakuan, yakni pertama di mengkhususkan Bantuan Tidak Terduga pada rekening sendiri, dan kedua melalui pergeseran anggaran. Perbedaan yang mendasar pada dua jenis kegiatan tersebut adalah ketika Bantuan Tidak Terduga dianggarkan di tahun 2021, maka anggaran ini khusus untuk kegiatan yang sifatnya darurat dan tidak dapat diprediksi, misalnya untuk operasional rumah sakit tanggap darurat Covid-19. Selain itu, anggaran pada tahun 2021 adalah untuk memberikan jaminan hidup. Sedangkan untuk perlakuan Dana pergeseran, adalah untuk anggaran penanganan Covid-19 yang dapat

direncanakan seperti untuk operasional penanganan Covid-19 dan Program pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat Kabupaten Sragen.

Dalam pengajuan penata usaha dan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Sragen, pengajuan Bantuan Tidak Terduga di tahun 2020 yakni semua Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk dalam Penanganan Covid-19 harus mengajukan rencana kegiatan belanja, yang mana rencana tersebut memuat estimasi apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 yang selanjutnya di-review oleh Inspektorat lalu diajukan, apabila sesuai maka akan diterima dan dapat dianggarkan. Untuk penata usaha, dana penanganan Covid-19 telah disiapkan sesuai dengan peraturan Bupati dan disesuaikan dengan alur program atau sesuai dengan standar operasional prosedur. Anggaran tersebut ditetapkan secara terpisah dengan belanja lainnya, buku kas dilakukan secara terpisah serta laporan juga dilakukan secara terpisah.

Selanjutnya, terkait dengan pengajuan dana Covid-19 melalui pergeseran anggaran dilaksanakan tahun 2021. Perintah dalam hal ini adalah Kemendagri dan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa alokasi dana penanganan Covid-19 penggunaannya sudah sangat jelas. Organisasi Perangkat Daerah sebelumnya akan melakukan rapat untuk menentukan Organisasi Perangkat Daerah mana saja yang membutuhkan penanganan Covid-19 dalam rangka pergeseran anggaran. Apabila pergeseran anggaran berpedoman pada Permendagri 77, maka alokasi pergeseran anggaran dari kegiatan *refocusing* yang ada akan dilaksanakan penatausahaan Covid-19 yang ada. Setelah dilakukan pergeseran dana, maka Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan penatausahaan menurut permendagri nomor 77.

Proses pelaksanaan penatausahaan dana Bantuan Tidak Terduga Covid-19 Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan melalui beberapa mekanisme yang terkait. Mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Bantuan Tidak Terduga yang pertama yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memfasilitasi semua usulan dari perangkat daerah terkait yang terbentuk dari rencana kegiatan belanja, yang sebelumnya telah diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan membuat nota dinas untuk melakukan permohonan penganggaran kepada satgas Covid-19. Setelah adanya disposisi dari satgas Covid-19, selanjutnya menyusun RKB, kemudian akan di-review oleh Inspektorat. Apabila RKB telah di-review oleh tim pengawas Satgas Covid-19 (Inspektorat dan Kejaksaan), maka pejabat pengelola keuangan daerah selanjutnya akan menerbitkan Surat Persetujuan untuk Tambahan Uang Persediaan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, kemudian dana tersebut selanjutnya ditransfer kepada bendahara penanganan satgas Covid-19. Jadi rekening yang dimiliki akan terpisah, dan berbeda dengan rekening umum dan penggunaan dicatat tersendiri dalam buku kas umum.

Dalam penggunaan dana, BPBD ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam pelaksanaannya PPK dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari perangkat daerah dan pejabat teknis SKPD terkait yang ditetapkan oleh pengguna anggaran. Tim teknis tersebut bertanggung jawab dalam; 1) identifikasi anggaran melalui pengkajian cepat di lapangan dan persetujuan dari gugus tugas atau kebijakan pihak yang berwenang atas penanganan Covid, 2) Penyusunan anggaran spesifikasi teknis berupa Kerangka Acuan Kerja yang memadai, 3) Pemilihan dan penilaian penyedia barang dan jasa yang dianggap mampu, 4) Penyusunan rancangan surat pesanan, 5) Kewajaran barang oleh penyedia, 6) Pernyataan dari penyedia bahwa penawaran harga adalah wajar dan penyedia sanggup menanggung konsekuensi bila dikemudian hari ditemukan ketidakwajaran harga bukti pertanggungjawaban dan pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, pelaku pengadaan menandatangani pakta integritas, kemudian kegiatan identifikasi mengenai kebutuhannya serta menyusun dokumen spesifikasi teknis kerangka acuan kerja telah memadai yaitu terdapat dokumen hasil identifikasi kebutuhan, kemudian identifikasi kebutuhan dalam rangka penanganan darurat yang telah memenuhi unsur situasi terkini kebutuhan dasar atas penanganan barang yang dibutuhkan dan daftar pengguna barang, kemudian dokumen hasil identifikasi penjualan telah dibuat oleh PPK dan disetujui oleh pengguna anggaran (Dasar Inpres 2020, Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018, Dan SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020).

Penyaluran BTT Covid di Kabupaten Sragen saat ini mencakup aspek kesehatan, sosial dan ekonomi, dan penyerapan anggaran paling banyak adalah dari aspek kesehatan. Dari anggaran, masuk ke pengguna anggaran, Sekda, dan Bendahara umum untuk dicairkan. Selanjutnya masuk lagi ke bendahara untuk disalurkan. Disalurkan dalam hal ini melalui pengadaan baik di aspek belanja kesehatan maupun ekonomi. Dari beberapa program kesehatan, terdapat penanganan terhadap penanganan Covid-19, seperti pemenuhan alat-alat kesehatan, obat-obatan habis pakai dan insentif untuk tenaga kesehatan. Selain itu penyaluran dana juga untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit tanggap darurat. Selain disalurkan pada bidang Kesehatan, anggaran bantuan tidak terduga juga disalurkan untuk mengatasi dampak sosial yakni berupa pemberian bantuan tunai dan pemberian stimulus bantuan untuk UMKM yang terkena dampak Covid-19. Untuk anggaran Bantuan Tidak Terduga tahun 2020, dari total Bantuan Tidak Terduga sebesar Rp 104.000.000.000, terdapat usulan dari SKPD teknis sebesar Rp 73.816.994.995. Kemudian realisasi dari SPJ yang masuk sebesar Rp 39.703.885.059 yang terdiri dari bidang kesehatan Rp 24.728.314.239 termasuk operasional rumah sakit darurat, pengadaan PCR, ruang ICU, obat,

vaksinasi dan lain-lain. Sedangkan pada bidang sosial sebesar Rp 11.375.570.882, dan pada bidang ekonomi sebesar Rp 3.600.000.000 untuk memberikan stimulus UMKM yang terdapat di Kabupaten Sragen.

Terkait dengan prosedur pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat atau Bantuan Tidak Terduga, prosedur pertanggungjawaban penggunaan dana darurat dilaksanakan melalui mekanisme TU. Di dalam RKB yang telah disebutkan berbagai belanja dan barang yang dibutuhkan, sehingga setelah melalui proses dan prosedur maka dana akan dicairkan dan digunakan. Prosedur pertanggung jawaban Bantuan Tidak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu: RKB diajukan ke BU dan dicairkan ke rekening gugus tugas, kemudian surat pertanggung jawaban tambahan dan SPJ nihil diajukan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya status tanggap darurat. Pada bulan Desember membuat SPJ TU nihil dan dilampiri rekap penggunaan dana dan sisa pencairan setiap TU disetor kembali ke kas daerah. Kemudian, TU nihil diajukan per pengajuan TU berdasarkan pertanggung jawaban atas penggunaan BTT. Pihak SKPD fungsional bendahara pengeluaran PPKD menginput realisasi penggunaan RKB pada aplikasi SIMDA Keuangan Kabupaten Sragen. Selanjutnya, pertanggung jawaban atas penggunaan dan kebutuhan belanja disampaikan kepada SKPD yang secara fungsional yaitu pengusul RKB kepada PPKD yang dilampiri dengan SPJ mutlak. Dari SPJ tersebut, hanya beberapa yang akan dilakukan *review* di akhir tahun. Setelah SPJ dibayarkan, kemudian di-*review* oleh inspektorat selaku pendamping penganggaran BTT, sehingga tidak hanya PA dan PPK yang membuat pernyataan tanggung jawab mutlak, tetapi juga pengusul SKB, pengusul dari RKB, dan dari OPD.

Selain itu, perihal pelaporan pertanggungjawaban, dilakukan segera setelah kegiatan selesai dengan memberikan pertanggungjawaban kepada TU. Pertanggung jawaban dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah pandemic berakhir. Saat ini pandemi belum berakhir, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2020 membuat komitmen bahwa setelah kegiatan selesai akan segera memberikan pertanggungjawaban ke TU, sehingga sebelum tahun anggaran berakhir laporan pertanggungjawaban telah selesai disusun. Untuk monitoring dan evaluasi penggunaan dana BTT Covid-19 dilakukan oleh tim pengawas dari Inspektorat dan Kejaksaan Kabupaten Sragen. Selanjutnya terkait Prosedur monitoring dan evaluasi penggunaan dana BTT Covid-19 menggunakan sistem bertahap dan berjenjang, dari Inspektorat terdapat tim yang tugasnya khusus untuk mereview RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) untuk memonitor dan mengevaluasi penggunaan dana. Selain itu, auditor juga melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana. Tim auditor mereview dari sisi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan belanja, seperti dokumen pelaksanaannya seperti apa serta bagaimana

prosedurnya. Jadi terdapat dua tahap yang dilaksanakan. Secara eksternal kami juga diperiksa oleh BPKP dalam rangka pemeriksaan pelaksanaan RKB.

PENUTUP

Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Salah satu peruntukkan dari BTT berupa kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa yang dimaksud adalah timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah, terkena wabah penyakit menular, dan Covid-19 termasuk dalam kategori tersebut. Implementasi Belanja tidak terduga pada pemerintah daerah Sragen meliputi kegiatan Penganggaran, kegiatan prosedur penyusunan Bantuan Tidak Terduga akibat dampak Covid-19, kegiatan pelaksanaan penyaluran Bantuan Tidak Terduga akibat Covid-19, kegiatan pelaporan, kegiatan pertanggungjawaban serta kegiatan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldaco, R., Hoehn, D., Laso, J., Margallo, M., Ruiz-Salmón, J., Cristobal, J., Kahhat, R., Villanueva-Rey, P., Bala, A., Batlle-Bayer, L., Fullana-i-Palmer, P., Irabien, A., & Vazquez-Rowe, I. (2020). Food waste management during the COVID-19 outbreak: a holistic climate, economic and nutritional approach. *Science of the Total Environment*, 742, 140524.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140524>
- Anessi-Pessina, E., Barbera, C., Langella, C., Manes-Rossi, F., Sancino, A., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2020). Reconsidering public budgeting after the COVID-19 outbreak: key lessons and future challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 957–965.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0115>
- Ashraf, B. N. (2020). Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 27, 100371.
<https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371>
- Jallow, H., Renukappa, S., & Suresh, S. (2020). The impact of COVID-19 outbreak on United Kingdom infrastructure sector. *Smart and Sustainable Built Environment*.
<https://doi.org/10.1108/SASBE-05-2020-0068>
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. *International Journal of Surgery*, 78(April), 185–193.
<https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018>

OPTIMALISASI MARKET SHARE KnnK KOFFEE RESOURCES DI TENGAH PANDEMI COVID 19

Maylia Pramono Sari, Surya Raharja, Afta Serti Mardita

PENDAHULUAN

Kopi merupakan salah satu tanaman komoditas unggulan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi negara. Tanaman kopi termasuk ke dalam tanaman budidaya perkebunan tertua di Indonesia. Pada tahun 1699, Hindia Belanda pertama kali membawa kopi Arabika ke Indonesia. Pada tahun 1707, VOC mengembangkan kopi Arabika di daerah Priangan, Cirebon, dataran tinggi Tanah Toraja, Latimojong Sulawesi Selatan, dan daerah Tapanuli Selatan. Selanjutnya, Indonesia menjadi tempat perkebunan kopi pertama selain Ethiopia dan Arab pada tahun 1725, serta mampu memproduksi kopi hingga mencapai 26.600 ton/tahun pada tahun 1834.

Meskipun pada tahun 1900, hasil produksi kopi Arabika mengalami penurunan akibat penyakit karat menyerang daun kopi. Akan tetapi, pemerintah kolonial Belanda membawa jenis kopi lain yang dikenal dengan kopi Robusta pada tahun 1902 dan dianggap sebagai tanaman kopi tahan terhadap penyakit apabila dibandingkan dengan jenis tanaman kopi sebelumnya. Sehingga, pada tahun 1920 kegiatan perkebunan kopi baru dilakukan hingga saat ini Indonesia menjadi negara yang menduduki urutan keempat penghasil kopi di dunia setelah negara Brasil, Vietnam, dan Kolombia.

Lahan tanaman kopi sekitar 1,2 juta hektar yang tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Hingga tahun 2020, total produksi kopi di Indonesia mencapai 773.400 ton. Secara komersial, terdapat dua jenis tanaman kopi yang banyak dihasilkan di Indonesia yakni kopi arabika dan kopi robusta. Kedua jenis kopi ini dapat tumbuh dan berbuah optimal pada kondisi berbeda, di mana kopi arabika dapat tumbuh optimal pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, sedangkan kopi Robusta dapat tumbuh optimal pada ketinggian 400 – 800 meter di atas permukaan laut. Maka dari itu, proporsi produk kopi Arabika terbatas hanya sebesar 27% dibandingkan dengan kopi Robusta mencapai 72%, sisanya jenis kopi lain yakni kopi Liberika sebesar 1%. Hal ini disebabkan

sebagian besar lahan dengan ketinggian 1.000 meter merupakan hutan. Sehingga harga jenis kopi Arabika mencapai 2-3 kali lipat dari harga kopi Robusta.

Melihat perkembangan kopi dan *trend* menikmati kopi meningkat di Indonesia menjadi sebuah potensi besar, meskipun belum banyak petani kopi yang mengetahui bahwa pasar kopi di Indonesia sedang tumbuh. Terdapat banyak pemain industri pengolahan biji kopi yang digunakan oleh kedai-kedai kopi di seluruh Indonesia, salah satunya yang terbesar adalah produk kopi kemasan (Kopi Luwak). Bahkan beberapa daerah yang mempunyai indikasi geografis tertentu mulai mengenalkan kopi lokalnya pada masyarakat luas. Hal ini semakin dipacu dengan konsumsi kopi menjadi salah satu *trend* yang digemari masyarakat di Indonesia termasuk Kota Semarang.

Secara ekonomi, kopi Semarang punya pasar besar di Eropa. Ekspor kopi ke kawasan Eropa Tengah dan Timur berjalan cukup lama. Pada tahun 2013 mengekspor 40 peti kemas (\$1,48 juta), tahun 2014 mengekspor 40 peti kemas (\$1,62 juta), hingga Mei 2015 mengekspor 12 peti kemas senilai (\$520 ribu). Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi kopi terus meningkat hingga 1.2kg perkapita per tahunnya. Bertambahnya tingkat konsumsi kopi dapat menjadi *opportunity* pangsa pasar saat ini, termasuk industri kopi yang dirintis oleh pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya industri rumahan pengolahan biji kopi milik Agung Kurniawan yang dikenal sebagai KnK Koffe Resources yang telah berdiri sejak lima tahun lalu.

KnK Koffee Resources merupakan industri penyuplai 75% kedai kopi di Kota Semarang yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No 5, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. KnK Koffe Resources berdiri diawali dengan ketertarikan Agung Kurniawan dalam mengonsumsi dan mengolah kopi hingga membuka usaha kedai kopi. Saat ini, KnK Koffee Semarang telah memiliki 10 karyawan dengan omset rata-rata 100 juta per bulan serta membina petani kopi di daerah Bonjor, Tretop Temanggung dan daerah Wonokasihan, Gunung Kelir, Ambawara. Selain Coffe Shop (KnK Koffee Resources), Agung juga memiliki Kafe (Lost in Café) yang terletak di lokasi yang sama. Adapun profil KnK Koffee Resources disajikan pada tabel 1.

Hendrar Prihadi (Hendi) Walikota Semarang sangat mengapresiasi rasa kopi olahan Agung, serta usaha yang dirintisnya. KnK Koffee Resources ini merupakan hal yang menarik untuk menjadi contoh seorang anak muda Kota Semarang yang telah berhasil melakukan penetrasi bisnis keluar, tidak berkulat hanya di Kota Semarang saja. Hendi sendiri mengatakan bahwa jika kedatangannya ke KnK Koffee Resources untuk mendorong terjadinya ekosistem bisnis rintisan anak muda di Kota Semarang yang lebih baik (**Gambar 1 & 2**).

Tabel 1. Profil Mitra (KnK Koffee Resources)

No	Keterangan	Mitra
1	Nama Mitra	Knk Koffee Resources
2	Lokasi Mitra	Jl Dewi Sartika Raya No 5 Perum UNDIP
3	Jarak dari PT ke Lokasi	7 Km
4	Pemilik	Agung Kurniawan
5	Jumlah Karyawan	10 orang
6	Jenis Produk	Kopi dan peralatan kopi
7	Kapasitas Produksi	700-1000 kg / bulan
8	Omset per Bulan	100 juta
9	Daerah Pemasaran	Kota Semarang dan Kota di Jawa Tengah

Sumber: Knk Koffee Resources Data



Gambar 1. Walikota Semarang (Hendi) menyambangi KnK Koffee Resources



Gambar 2. Wali Kota Semarang (Hendi) belajarmemproses kopi hingga siap saji didampingi Agung Kurniawan (kiri) dan barista di KnK Koffee Resources

Peningkatan daya saing yang diharapkan termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lain yang sedang dirintis dapat dikembangkan, sehingga dapat memperluas market share. Meskipun, kondisi saat ini sedang

dihadapkan oleh pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah merajalela sejak awal tahun 2020. Di mana pandemi ini memberikan dampak yang begitu besar terutama pada pelaku usaha. Menurunnya jumlah penjualan yang mengakibatkan menurun pula omset, mengkhawatirkan pelaku bisnis, tidak terkecuali bisnis KnK Koffee Resources. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan mitra dan juga peningkatan kualitas KnK Koffee Resources. Sehingga, Program Pemberdayaan Masyarakat UKM ini dilakukan sebagai langkah awal bagi KnK Koffee Resources untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi pangsa pasar yang besar, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kegiatan Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat UKM yang bertujuan untuk memberikan penguatan kepada mitra program dengan memberikan fasilitas konsultasi tentang manajemen, pemasaran, produksi, maupun teknologi; membantu membuka akses pada pasar, sumber daya keuangan, serta membantu alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pangsa pasar di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan penelitian dan pengabdian serupa yang telah dilakukan diantaranya Malasari dkk (2017), Sari (2019), Yulianto (2018), Maftukhah dkk. (2019) dan Taufani (2017). Penelitian terdahulu serupa menjelaskan mengenai analisis situasi untuk mengenali bisnis. Analisis situasi atas mitra KnK Koffee Resources yang dilakukan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat UKM Indonesia Bangkit dirinci sebagai berikut:

1. Bahan baku

Adapun bahan baku terdiri dari suplai, mutu, alternatif sumber di uraikan sebagai berikut.

- a. Suplai kebutuhan bahan baku mitra telah memadai. Mitra membina petani kopi di dua daerah yaitu Desa Bonjor Tretep Temanggung dan Desa Wonokasih, Gunungkelir, Ambarawa.
- b. Mutu biji kopi belum optimal karena sistem sortir/grading yang kurang baik disebabkan oleh minimalnya alat sortir. Biji kopi yang tidak seragam ukurannya dapat menghambat dalam proses roasting karena matangnya tidak dapat sama. Biji kopi yang kecil akan banyak terdapat yang cacat dan terbang (inefisiensi).
- c. Alternatif sumber telah memadai karena mitra memiliki beberapa supplier di seluruh Indonesia.

2. Produksi

Adapun bahan baku terdiri dari peralatan, kapasitas, *in process control*, dan nilai investasi di uraikan sebagai berikut.

- a. Peralatan yang dimiliki oleh mitra maupun petani kopi masih belum memadai. Telah dilakukan identifikasi terkait beberapa peralatan yang

dibutuhkan oleh mitra maupun para petani kopi. Mitra membutuhkan peralatan sebagai berikut:

- Pengolahan Produk Cacat (grinder untuk mengolah produk cacat/inferior menjadi produk bernilai guna misalnya pakan ternak dll).
 - Pengemasan dan Penyimpanan (alat timbang, mesin filling powder (kopi bubuk), alat jahit karung goni terkait dengan pengemasan dan penyimpanan. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan oleh para petani kopi di desa wonokasih gunungkelir, ambarawa adalah:
 - Sortir/Grading biji kopi (alat ayakan biji kopi)
 - Pengeringan (dome)
 - Pengupasan (mesin pengupas)
- b. Terkait dengan kapasitas. Terdapat sebanyak 700-1000 kg kebutuhan kopi per bulannya.
- c. Terkait nilai investasi. Mitra memiliki tanah, bangunan, alat (mesin) milik pribadi sehingga kontinuitas usahanya baik.
- d. Mitra meletakkan beberapa alat/mesin roasting di dua daerah binaannya. Diharapkan para petani di daerah gunung kelir ambarawa ini memiliki nilai tambah tidak hanya menjual kopi mentah, namun bisa juga menjual kopi siap seduh karena telah digoreng menggunakan mesin roasting tersebut.

3. Proses (lay-out, jaminan mutu produk)

Adapun bahan baku terdiri dari lay-out, dan jaminan produk di uraikan sebagai berikut.

- a. Mitra memiliki lokasi yang sangat strategis dan bernuansa alam. KnK Koffee Resources menjual berbagai keperluan kafe (one stop service), berdampingan dengan Kafe (Lost in Café).
- b. Cita rasa kopi yang disajikan sangat khas, ditambah dengan aroma kopi yang begitu sedap saat dilakukan penggorengan (roasting) menjadi ciri unik usaha ini.
- c. Mutu produk dijaga dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pemisahan khusus tempat penyimpanan persediaan kopi agar tidak berbaur dengan bau bau dari produk yang lain seperti coklat, gula, sirup, madu dll.

4. Produk/jasa (Jenis, jumlah, spesifikasi, mutu)

Adapun bahan baku terdiri dari jenis, jumlah, spesifikasi, dan mutu di uraikan sebagai berikut.

- a. Jenis kopi yang dijual adalah Kopi Arabica (supply dari petani kopi di daerah Tretep Temanggung) dan Kopi Robusta (supply dari petani kopi di daerah Tretep Temanggung dan daerah Gunungkelir, Ambarawa). Selain itu ada jenis *blend* dan *specialty*.

- b. Jumlah kopi yang dijual mencapai 700-1000kg per bulannya dng omset 100jt/tahun.
- c. Jenis biji kopi yang digunakan adalah kopi dengan standar mutu yang baik (SNI).
- d. Terkait dengan mutu, Biji Kopi Gunungkelir ambarawa memiliki posisi ke 3 nasional terkait kualitasnya.

5. Distribusi

Adapun bahan baku terdiri dari distribusi produk/jasa hingga ke tangan konsumen di uraikan sebagai berikut.

- a. Distribusi produk mitra masih terbatas, hanya melayani pembelian personal untuk kantor dan rumahan, kontrak supply dengan 60 Coffee Shop (75%) di Semarang. Diperlukan inovasi berupa transformasi business online untuk meningkatkan daya saing terutama memperluas market share.
- b. Distribusi mayoritas di semarang (75% coffee shop) dan berbagai daerah di jawa tengah.

6. Manajemen

Adapun bahan baku terdiri dari *production planning, accounting/book keeping, auditing, perpajakan, pola manajemen, HKI, dan inventory* di uraikan sebagai berikut.

- a. Terkait dengan manajemen terutama accounting, mitra masih mengalami kendala pengelolaan keuangan. Sementara ini hanya menggunakan catatan sederhana (pembukuan manual). Diperlukan software akuntansi sebagai sarana penyusunan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan akurat.
- b. Belum dilakukannya audit.
- c. Telah membuat laporan pajak dan melakukan penyetoran pajak.
- d. Inventory telah ditempatkan ditempat khusus.
- e. Manajemen belum dapat mengoptimalkan fungsi dari laporan yang sudah dibuat sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

7. Pemasaran (Teknik pemasaran, harga jual produk, konsumen)

Adapun bahan baku terdiri dari teknik pemasaran, harga jual produk, dan konsumen di uraikan sebagai berikut.

- a. Pemasaran hanya menggunakan penjualan on the shop.
- b. Harga jual produk bersaing. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya customer yang di supply oleh mitra (supplier 60 Coffeshop di Semarang (75%)).
- c. Konsumen meliputi karyawan, mahasiswa, para pemiliki kadai kopi di Semarang yang datang langsung ke toko.

8. Sumber Daya Manusia (SDM) (Kualifikasi dan jumlah, peluang training)

Adapun bahan baku terdiri dari kualifikasi dan jumlah, serta peluang training di uraikan sebagai berikut.

- a. Karyawan berjumlah 10 orang.
- b. Karyawan administrasi yang menangani pembukuan dan bendahara bukan lulusan akuntansi dan perlu mendapatkan pelatihan terkait pemahaman akuntansi dan penggunaan software akuntansi.
- c. Karyawan operasional (teknis) beberapa kali mengikuti pelatihan barista. Pemilik dan karyawan melakukan studi banding dan berbagai event nasional maupun internasional terutama di Jerman, UK dan Asia.

9. Sarana Adapun bahan baku terdiri dari ruang administrasi, ruang produksi, ruang penyimpanan, showroom, akses ke jalan raya, listrik, dan telekomunikasi di uraikan sebagai berikut.

- a. Mitra memiliki alokasi tempat yang kurang memadai. Meskipun demikian telah dilakukan pemisahan lokasi antara ruang administrasi, ruang penyimpanan, showroom)
- b. Lokasi mitra masuk gang, namun posisi bangunan kedua dari jalan raya, sehingga aksesnya mudah dijangkau oleh para konsumen.
- c. Listrik mitra sangat memadai (2 x 4400 watt) karena alat yang digunakan sangat banyak seperti, mesin roasting, mesin grinder, freezer, kulkas, blender, juicer dll.
- d. Telekomunikasi mitra telah memadai, ada jaringan internet (wifi) yang free bagi pengunjung dan karyawan.

10. Finansial (Modal, cash-flow, IRR)

Adapun bahan baku terdiri dari modal, *cash-flow*, dan IRR di uraikan sebagai berikut.

- a. Terkait masalah finansial, harus dilakukan banyak pembenahan. Catatan keuangan yang digunakan hingga saat ini tidak mampu menunjukkan berapa modal, cashflow maupun IRR sebagai dasar mitra untuk mengambil keputusan.
- b. Diperlukan penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dengan berbantuan software akuntansi agar dapat dilakukan proses audit. Laporan keuangan yang telah di audit dapat digunakan oleh mitra untuk memperoleh tambahan modal usaha.

Berdasarkan latar belakang dan analisis situasi di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KnK Koffe Resources baik dari aspek produksi maupun aspek manajemen sebagai berikut.

1. Mutu bahan baku

Mutu biji kopi belum optimal karena system sortir/grading yang kurang baik disebabkan oleh minimalnya alat sortir. Biji kopi yang tidak seragam ukurannya, menghambat dalam proses roasting karena matangnya tidak dapat sama. Biji kopi yang kecil akan banyak produk cacat yang terbuang (inefisiensi).

2. Produksi

Peralatan yang dimiliki oleh mitra maupun petani kopi masih belum memadai. Pengolahan Produk Cacat (Grinder), Pengemasan dan Penyimpanan (alat timbang, mesin filling powder (kopi bubuk), alat jahit karung goni terkait dengan pengemasan dan penyimpanan.

3. Distribusi

Distribusi produk mitra masih terbatas, hanya melayani pembelian personal untuk kantor dan rumahan, kontrak supply dengan 60 Coffee Shop (75%) di Semarang. Diperlukan inovasi berupa transformasi business online untuk meningkatkan daya saing terutama memperluas market share.

4. Manajemen

Terkait dengan manajemen terutama accounting, mitra masih mengalami kendala pengelolaan keuangan. Sementara ini hanya menggunakan catatan sederhana (pembukuan manual). Diperlukan software akuntansi sebagai sarana penyusunan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan akurat.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Karyawan administrasi yang menangani pembukuan dan bendahara bukan lulusan akuntansi dan perlu mendapatkan pelatihan terkait pemahaman akuntansi dan penggunaan software akuntansi.

6. Finansial

Diperlukan penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dengan berbantuan software akuntansi agar dapat dilakukan proses audit. Laporan keuangan yang telah di audit dapat digunakan oleh mitra untuk memperoleh tambahan modal usaha.

Dari permasalahan yang telah di uraikan di atas, permasalahan prioritas yang dapat di atasi pada masa pandemi Covid-19 yakni aspek produksi dan aspek manajemen seperti yang telah disepakati bersama antara tim PPM dan mitra KnK Koffee Resouces pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Permasalahan Mitra

No	Permasalahan	Solusi
1.	Distribusi	Transformasi Business Online (Digital)
2.	Manajemen	Software Akuntansi
3.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Pelatihan Pembukuan dan Software Akuntansi
4.	Finansial	Laporan Keuangan teraudit untuk menambah permodalan
5.	Produksi	Peralatan (Grinder/Grading/Alat timbang/Alat Jahit)

Sumber: Knk Koffee Resources Data

PEMBAHASAN

A. Metode Pelaksanaan

Pihak Yang Terkait

Tim PPM Universitas Negeri Semarang berkolaborasi dengan anggota tim PPM Universitas Diponegoro melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat UKM Indonesia Bangkit dengan mitra KNK Koffee Resources.

Metode dan Tahapan PPM

Adapun metode dan tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan PPM antara lain sebagai berikut.

1. Memberi penyuluhan kepada UMKM KNK Koffee Resources mengenai pentingnya kemampuan manajerial dalam mengelola usaha serta profesionalitas. Tim akan memfasilitasi agar UMKM mitra memiliki SDM yang berkompeten.
2. Melakukan pelatihan manajemen dan kewirausahaan, yang mencakup: motivasi berwirausaha, manajemen produksi (*quality control*) inovasi dan kreativitas, pengelolaan keuangan dan manajemen pemasaran (konvensional dan e-commerce). Adanya pelatihan manajemen dan kewirausahaan ini diharapkan UMKM mitra dapat meningkat kemampun manajerialnya dalam mengelola usaha sehingga UMKM mitra dapat semakin berkembang dan mandiri.
3. Memfasilitasi pengadaan peralatan grading, grinder, alat timbang agar kualitas dan kuantitas produk semakin meningkat dan berdampak pada kenaikan omset UMKM mitra. Selain itu tim juga memfasilitasi media pemasaran secara online seperti: blog, website, tokopedia, shopee, facebook, instagram yang bagus dan menarik agar produk kopi KNK Koffee Resources bisa lebih dikenal oleh masyarakat secara luas.

4. Melakukan pendampingan usaha berupa ide kreatif dan inovatif ke dalam produk yang dihasilkan mitra. Pembuatan media promosi berbasis e-commerce dan sistem produksi yang efisien dan produktif. Tim pengabdian berperan sebagai pendamping/fasilitator yang memberikan arahan dan bimbingan secara teknis untuk melakukan pencatatan akuntansi berbasis software agar UMKM mitra memiliki pembukuan yang baik.
5. Mengajak dan mendorong Pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) untuk lebih memperhatikan UMKM KnK Koffee Resources.

Berdasarkan metode dan tahapan yang telah di uraikan di atas, Adapun deskripsi dari kegiatan PPM adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Deskripsi Kegiatan PPM

No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Output
1.	Temu Wicara dengan Pemilik KnK Koffee & Lost in Cafe	Kesepakatan Model Bantuan Dana, Pengetahuan, Teknologi maupun Alat
2.	Perumusan dan Penetapan Rencana Kegiatan PPM	Ditetapkannya Rencana Kegiatan PPM yang sesuai dengan potensi yang ada
3.	Sosialisasi Penggunaan Software Akuntansi dan transformasi business online	Menguatnya motivasi pemilik dan bagian pembukuan untuk meningkatkan diri dalam hal penyusunan laporan keuangan berbasis software akuntansi
4.	Pelatihan Penggunaan Software Akuntansi dan transformasi business online	SDM atau karyawan yang menangani pembukuan berbasis software akuntansi dan transformasi business online
5.	Memfasilitasi pendampingan selama 3 tahun dalam Penggunaan Software Akuntansi dan Transformasi business online	Tersusunnya laporan keuangan dengan software akuntansi, meningkatnya pendapatan, income dan kesejahteraan Mitra

Sumber: Knk Koffee Resources Data

B. Diskusi Dan Pembahasan

Solusi Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh KnK Koffee Resources terlebih di masa pandemi. Di mana adanya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) mengharuskan pemerintah Kota Semarang untuk memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Meskipun pemerintah telah memperbolehkan kegiatan ekonomi berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan, akan tetapi dampak bagi pelaku usaha berupa penurunan dratis penjualan menjadi hal yang mengkhawatirkan. Maka tim kegiatan Pemberdayaan Pengabdian Masyarakat (PKM) menawarkan solusi komprehensif. Salah satu contohnya adalah pelaku usaha dapat memulai transformasi terhadap saluran usaha atau bisnis melalui pendekatan

digital. Prosesnya tidak dengan mengganti semua model usaha dari manual menjadi digital, akan tetapi melihat peluang usaha yang dapat dilakukan dengan bantuan teknologi digital untuk mempertahankan pangsa pasar and membidik target pasar yang lebih luas.

Strategi usaha *offline to online* dapat dioptimalkan dengan memberikan akses pembelian *online* untuk kenyamanan dan keamanan kesehatan bagi para pembeli baik dari dalam maupun luar Kota Semarang dengan tetap mempunyai toko fisik. Transformasi saluran usaha tidak selalu identik akan menghabiskan biaya mahal berupa infrastruktur dan layanan aplikasi. Akan tetapi, para pelaku usaha dapat memasuki market place untuk memasarkan produknya secara online melalui media sosial seperti group whatsapp, facebook, Instagram, telegram dan media lainnya untuk menarik minat sekaligus mempermudah transaksi penjualan. Selain itu, pelatihan dan pendampingan terkait pengoperasionalan *software* akuntansi kepada para karyawan administrasi juga harus dilakukan.

Berdasarkan observasi awal, sitasi website serta review studi empiris sebelumnya, maka analisis situasi atas mitra (Knk Koffee Resources) dirinci pada berikut. Analisis Lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman.

Tabel 4. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Lingkungan Internal	
Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
+ Lokasi nyaman, menyatu dengan alam	- Kualitas biji kopi belum optimal
+ Keramahan staff kedai	- Peralatan belum lengkap
+ Rasa kopi unik	- Belum semua karyawan mendapatkan pelatihan
+ Varian kopi lengkap	- Karyawan pembukuan tidak memiliki background akuntansi
+ Harga terjangkau	- Pemilik belum memiliki manajemen strategi usaha
+ Lokasi Strategis	- Pemilik belum mampu menganalisis laporan keuangan
+ Tersedia Wifi	- Belum dilakukan proses audit
+ Supply bahan baku memadai	- Belum memiliki laporan arus kas
+ Alternatif sumber memadai	- Belum ada survey kepuasan pelanggan dan karyawan
+ Tanah bangunan milik sendiri	- Belum memiliki Standar Operating Prosedur (SOP) kerja
+ Konsumen heterogen	- Terdapat beberapa complain pelanggan
+ Jumlah karyawan memadai	
+ Laporan keuangan dan laporan pajak ada	
+ Telah memiliki website, media promosi dan terdaftar di marketplace	
+ Stockist 75% kedai kopi di Kota Semarang	

Lingkungan Eksternal	
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
+ Dapat meningkatkan jumlah pelanggan karena ada fasilitas wifi	- Banyak competitor
+ Sebagai supplier kopi untuk segmen yang lebih luas	- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas mutu
+ Membuat inovasi produk baru	- Perubahan preferensi konsumen
	- Belum terpenuhinya kebutuhan peralatan akan mempengaruhi produksi
	- Maintenance website dan marketplace
	- Pengambilan keputusan yang kurang tepat akibat belum adanya penilaian kinerja, laporan cash flow dan audit Laporan Keuangan
	- Kompetensi dan skill karyawan yang tidak up to date

Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi KnK Koffee Resources, maka tim PPM UMKM yang digagas oleh PPM Universitas Negeri Semarang (UNNES) memberikan solusi dan target luaran sebagai berikut.

Tabel 5. Solusi atas Permasalahan Mitra

No.	Waktu	Target Solusi
1.	Bulan keempat	Tim melakukan koordinasi dengan mitra untuk menentukan jenis pelatihan yang disepakati untuk menangani permasalahan prioritas yang akan ditangani
2.	Bulan ketujuh	Sudah dilakukan pelatihan manajemen dan kewirausahaan, yang mencakup: motivasi berwirausaha, inovasi dan kreativitas, pengelolaan keuangan dan manajemen pemasaran (konvensional dan e-commerce)
3.	Bulan kesepuluh	Telah menggunakan software akuntansi dan memiliki pembukuan keuangan yang lebih baik
4.	Bulan kesebelas	Telah melakukan pembuatan berbagai link pemasaran online dan teregister di market place.
5.	Bulan keduabelas	KNK Koffee Resources sudah lebih mandiri, market share lebih luas dan omset serta kesejahteraan pegawai meningkat

Sumber: Knk Koffee Resources Data

Evaluasi Kerja PPM

Adapun luaran dari kegiatan PPM ini antara lain:

1. Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak pada bidang ekonomi
2. Peningkatan kualitas & kuantitas produk
3. Peningkatan pemahaman & ketrampilan masyarakat

4. Peningkatan ketentraman / kesejahteraan masyarakat

Target luaran yang dicapai dari pengabdian masyarakat ini yaitu peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM yang ada di KnK Koffee Resources dalam hal pengelolaan keuangan serta penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan software akuntansi (aplikasi LAMikro). Berikut omset serta profit/loss yang diperoleh selama Pandemi Covid-19.

Tabel 6. Omset dan Profit/Loss KnK Koffee Resources

Tahun 2020	Omset	Profit/Loss
Januari	221.018.200	(18.988.958)
Februari	192.678.000	16.581.924
Maret	161.102.000	(38.500.365)
April	104.181.400	1.352.553
Mei	130.801.000	65.046.776
Juni	158.452.100	(6.709.467)
Juli	263.222.200	40.710.765
Agustus	279.232.100	(65.150.304)
Total		

Sumber: Knk Koffee Resources Data

Berikut materi terkait LAMIKRO yang akan disosialisasikan dan dilakukan pendampingan kepada UMKM KnK Koffee Resources. Lamikro, aplikasi pencatat keuangan digital bagi para pelaku usaha mikro (dok. Kemenkop UKM)



LAMIKRO
Laporan Akuntansi Usaha Mikro

Aplikasi Laporan Keuangan Sederhana untuk Usaha Mikro

Aplikasi LAMIKRO dapat diunduh di Playstore dan dapat diakses kapan dan dimana saja. Selain itu, dapat juga diakses melalui website : www.lamikro.com

depkop.go.id 1500 587 KemenkopUKM



MANFAAT LAMIKRO

- ✓ Memonitor Aktivitas Keuangan UKM
- ✓ Membuat Laporan Keuangan Lebih Cepat dan Efisien
- ✓ Menggantikan Metode Tradisional Pencatatan Manual
- ✓ Prosedur Penganggaran Lebih Modern

depkop.go.id 1500 587 KemenkopUKM

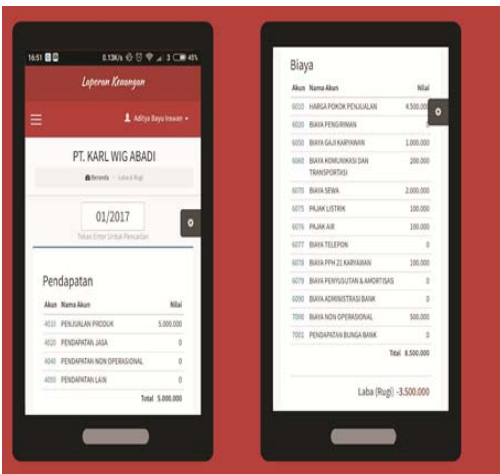
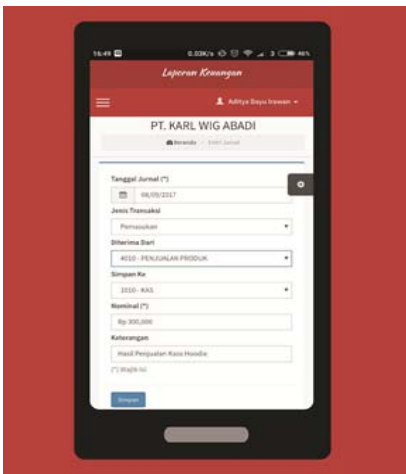
Lamikro

Manfaat Lamikro



Fitur-fitur Lamikro

Kontak Lamikro

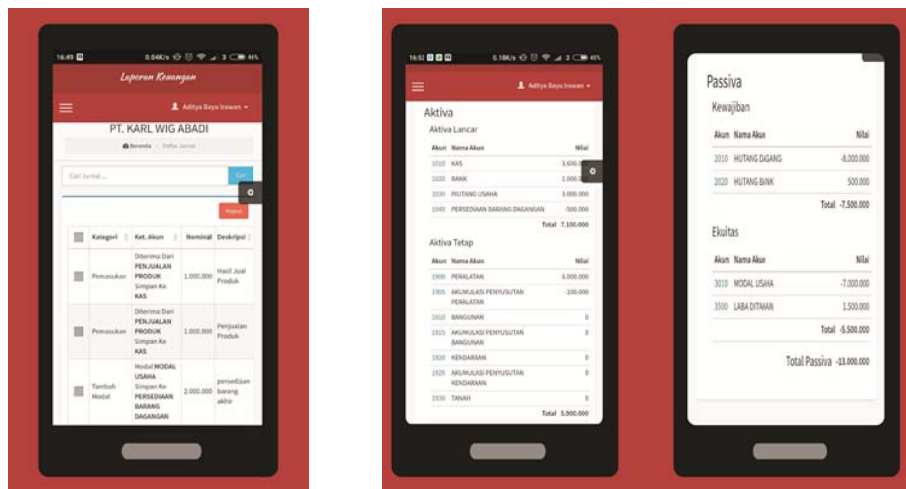


Entri Jurnal

Catatan untuk transaksi akuntansi berdasarkan urutan kronologis, yaitu pada saat transaksi itu terjadi. Semua transaksi akuntansi dicatat melalui jurnal entri yang menunjukkan nama akun, jumlah, dan apakah akun tersebut dicatat di sisi debit atau kredit rekening.

Laba & Rugi

Bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih.



Daftar Jurnal

Jurnal adalah rincian semua transaksi keuangan dan akun-akun yang mempengaruhi transaksi tersebut. Daftar semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan berdasarkan transaksi yang di input pada Entri Jurnal. Atau bisa disebut sebagai catatan transaksi keuangan yang dicatat dalam sebuah jurnal.

Neraca

Bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut.

CARA PENGGUNAAN LAMIKRO

- Aplikasi Lamikro dibuat dengan berbagai kemudahan dan fleksibilitas untuk digunakan pelaku usaha mikro. Berikut cara penggunaannya:
- Download aplikasi Lamikro melalui Google Playstore atau kunjungi website www.lamikro.com
- Pilih menu Lamikro web, lalu klik "Daftar"
- Isi kelengkapan data seperti nama lengkap, perusahaan, alamat, nomor izin usaha UKM, NPWP, e-mail, nomor telepon, nama akun, serta kata sandi.
- Setelah semua data terisi, Anda bisa mengklik "Daftar".

LABA RUGI

- Selanjutnya klik "Labarugi" pada sisi tab kiri aplikasi untuk mendapatkan perhitungan akuntansi pada tabel laba dan rugi. Tabel laba dan rugi akan secara otomatis tampil sesuai dengan situasi keuangan UKM sesuai dengan input pada jurnal atau transaksi harian tadi.

ENTRI JURNAL

- Klik "Entri Jurnal" pada sisi tab kiri aplikasi, lalu isi tanggal jurnal sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi.
- Pengisian jenis transaksi dapat Anda pilih dengan menu drop/list. Terdapat beberapa jenis transaksi yakni pengeluaran, utang, bayar hutang, piutang, tambah modal, dan lainnya.
- Lalu isi kolom "diterima dari", pilih pada panah drop/list.
- Selanjutnya isi kolom "Simpan ke", pilih juga pada panah drop/list.
- Setelah itu, isi besaran nominal uang yang dipakai dalam transaksi tersebut.
- Jika ada keterangan tambahan, silakan isi untuk memperdetail transaksi tersebut.
- Klik "Simpan"

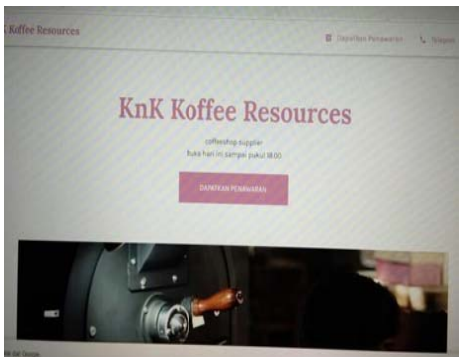
NERACA

- Klik "Neraca" pada sisi tab kiri aplikasi.
- Setelah itu perhitungan akuntansi pada tabel neraca akan tampil secara otomatis sesuai dengan keuangan UKM sesuai input pada jurnal atau transaksi harian.



CARA PENGGUNAAN LAMIKRO

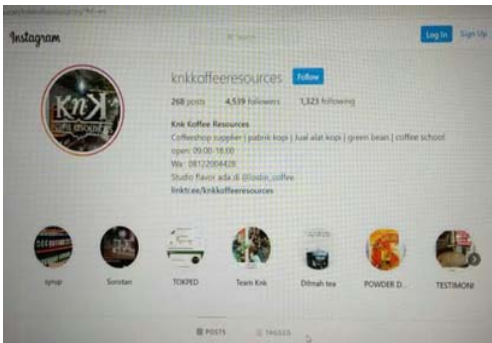
Selanjutnya, terkait dengan transformasi online, tim kegiatan PPM telah melakukan pendampingan dalam transformasi bisnis online. Saat ini, KnK Koffee Resources telah memiliki website serta melakukan penjualan dan promosi secara online, meliputi media youtube, facebook, instagram dan terdaftar di marketplace seperti shopee, tokopedia, bukalapak, foodyas dan coffeetime.



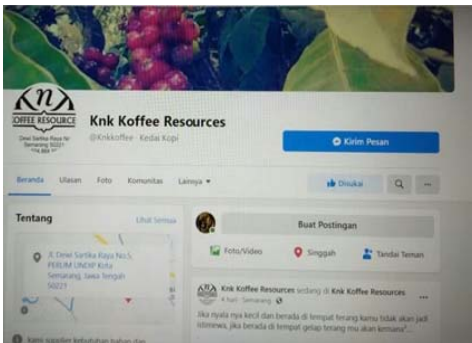
Gambar 3. Website KnK Koffee Resources



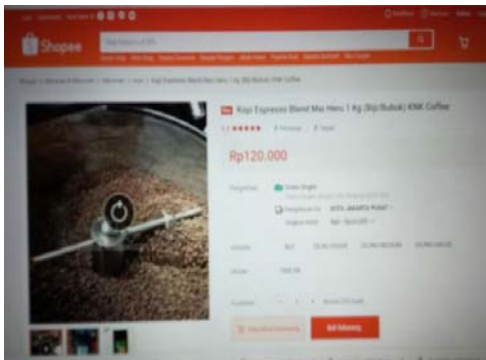
Gambar 4. YouTube



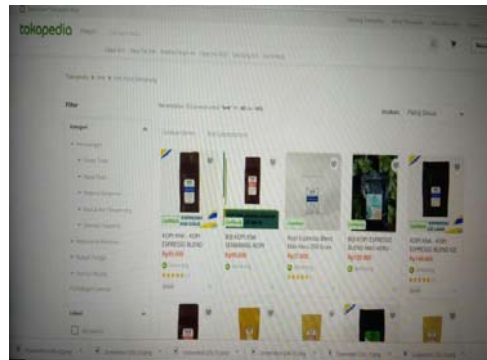
Gambar 5. Instagram



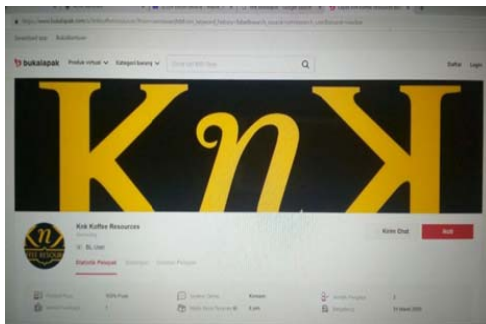
Gambar 6. Facebook



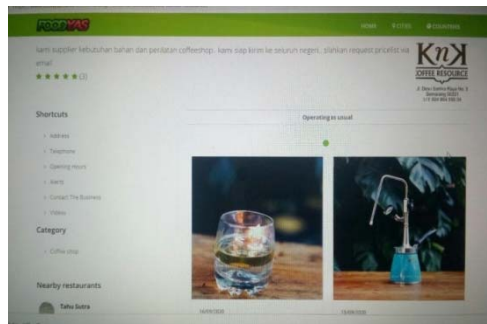
Gambar 7. Shopee



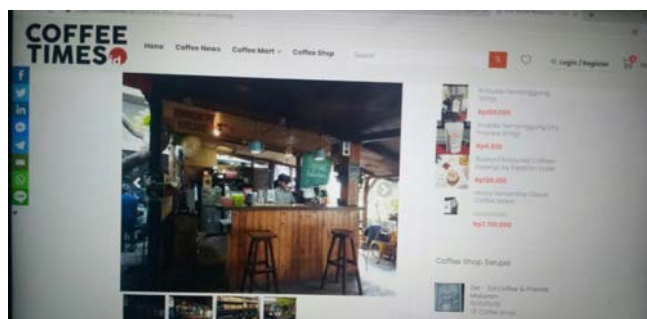
Gambar 8. Tokopedia



Gambar 9. Bukalapak



Gambar 10. Foodyas



Gambar 11. Coffee Times

PENUTUP

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) kepada KnK Koffee Resources, melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan mengenai improvisasi sistem laporan keuangan (Aplikasi LAMikro) dan transformasi bisnis online, pemilik UMKM KnK Koffee Resources menyatakan lebih mudah melakukan pembukuan serta penyusunan laporan keuangan. Hal ini sangat bermanfaat bagi kegiatan usahanya seperti peningkatan pengeta-

huan dan keterampilan pemilik dan karyawan administrasi. Peningkatan omset yang di alami KnK Koffee Resources serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa semakin besar usahanya maka akan semakin banyak merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Setelah dilakukan PPM ini, tim pengabdian menyarankan kepada para UMKM KnK Koffee Resources untuk terus meng-*update* pengetahuan dan ketrampilan terkait pengelolaan keuangan berupa pembukuan serta penyusunan laporan keuangan dengan konsisten menggunakan software akuntansi (Aplikasi LAMikro) dan transformasi bisnis online melalui berbagai media seperti website, youtube, instagram, facebook, dan berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Foodyas dan Cofee Time. Dengan demikian, adanya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan PPM UNNES dan UNDIP dalam improvisasi system pelaporan keuangan dan transformasi bisnis online terutama di masa Pandemi Covid-19 ini diharapkan industri rumahan pengolahan biji kopi KnK Koffee Resources ini akan memacu terjadinya ekosistem bisnis rintisan anak muda di Kota Semarang yang lebih baik dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Sehingga kegiatan ini juga akan lebih berkembang jika ada bantuan pemerintah dalam mensosialisasikan kegiatan serupa bagi UMKM lain dan melakukan pendampingan secara berkelanjutan juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Falgenti, Kursehi. 2011. Transformasi Ukm Ke Bisnis Online Dengan Internet Marketing Toolsjurnal Ilmiah Faktor Exacta Vol. 4 No. 1 Maret 2011
- Rahman, Arief. 2009. Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informas I 2009 (Sna Ti 2009) 1ssn: 1907-5022 Yogyakarta, 20 Juni 2009.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID -19 (STUDI KASUS KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN)

Novi Theresia Kiak, Clarce Sarliana Maak, Maria Prudensiana Leda Muga

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020, corona virus atau Covid-19 menjadi perbincangan hangat diberbagai belahan dunia. Corona virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Hubei Cina. Virus ini diduga berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia (Nopi, 2021). Penularan virus ini melalui droplet ketika pasien covid 19 batuk, bersin, maupun berbicara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan corona virus sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2021. Setelah jumlah yang terinfeksi mencapai lebih dari 121.000 orang (Kompas, 2020). Pandemi global ini diumumkan tidak hanya sebagai peringatan atas kesiapsiagaan medis melainkan kesiapsiagaan atas berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya aspek ekonomi Shofiana (2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak pandemi Covid 19. Daya beli masyarakat mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19. Banyak usaha yang mengalami penurunan omset diakibatkan penurunan daya beli masyarakat, berbagai pengendalian risiko sosial dilakukan oleh 34 provinsi di Indonesia baik itu begitu juga berbagai macam arah kebijakan dalam rangka pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dilakukan oleh berbagai provinsi, kabupaten dan kota. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif (Lapanda, 2013).

Pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial agar tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat tetap seimbang diantaranya program perlindungan sosial yaitu *conditional cash transfer* terutama untuk penanganan prasejahtera yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, Paket Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan untuk usaha mikro dan kecil. Pemberian bantuan sosial Covid19 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak Covid19. Pemerintah pusat

mengelontorkan bantuan untuk mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, untuk mengopasional program bantuan diantaranya BST, PKH yang dalam setahun lebih dari 4 (empat) kali, adapun BLT-DD merupakan program yang dimulai pada bulan april 2020 yang pembagiannya dilakukan 3 (tiga) kali dan dalam 2(dua) tahap.

Salah satu kabupaten yang turut serta melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak akibat Covid 19 adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Percepatan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten TTS adalah penanggulangan dampak sosial ekonomi masyarakat, pemberian bantuan langsung tunai dan meminimalisir kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul selama pencegahan dan penanganan Covid 19.

Kabupaten TTS terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten TTS merupakan kabupaten yang sangat strategis, karena letaknya berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi NTT. Kabupaten TTS termasuk kabupaten yang memiliki wilayah terluas setelah Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Kupang seluas 3.947 km². Jumlah penduduk di Kabupaten TTS paling tinggi di Provinsi NTT sebanyak 6.794 jiwa. Kabupaten ini memiliki jumlah kecamatan terbanyak di Provinsi NTT sebanyak 32 Kecamatan.

Kabupaten TTS memiliki potensi alam yang cocok sebagai daerah wisata, didukung dengan panorama yang indah, selain daripada itu Kabupaten ini terkenal sebagai salah satu penghasil ternak sapi di Provinsi NTT, namun seiring berjalannya waktu peternakan sapi di Kabupaten TTS mengalami penurunan dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk. Komoditas lainnya turut memberikan kontribusi dalam perekonomian di Kabupaten TTS adalah pertanian dan perkebunan terdiri dari kemiri, jeruk, jati, dan cendana, namun habitat cendana di kabupaten ini juga hampir punah. Keunggulan potensi alam dan sumber daya manusia Kabupaten TTS tidak dikelola dengan baik, akibatnya terjadi kemiskinan.

Kemiskinan mendorong meningkatnya kasus human *trafficking* (perdagangan manusia). Selama masa pandemi Covid-19 angka kemiskinan di Kabupaten TTS menurun sebesar 0,38% sedangkan presentase angka kemiskinan pada semester dua di Provinsi NTT, khususnya di daerah pedesaan meningkat sebesar 0,53%. Akibat gagal panen dan kelaparan. Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan di Indonesia selama masa pandemi mengalami peningkatan sebesar 5,09%. Dalam situasi dan kondisi seperti ini tentunya kebijakan pemerintah dianggap penting saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah bantuan yang cepat dan konkret yang dapat dimanfaatkan secara langsung jaring pengaman sosial tersebut.

Salah satunya kegiatan percepatan penyaluran bantuan sosial Covid 19 yang bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten TTS melibatkan 278 desa atau kelurahan sekabupaten TTS. Untuk menjamin akuntabilitas atas kebenaran data sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan sosial, maka sesuai dengan keputusan bupati TTS dilakukan perubahan *by name by addres* (BNBA). Bantuan sosial yang diberikan pemerintah diharapkan memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan harapan masyarakat atau tepat sasaran, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan baik buruknya pelayanan publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya dalam rangka mengukur dan mengetahui pelayanan publik yang sudah ada, sudah berjalan sebagaimana mestinya adalah dengan menggunakan survei sehingga tidak ditemukan ketidaksinkronan dalam fasilitas dan pelayanan yang diterima masyarakat akan dilakukan langkah – langkah perbaikan.

Keterlibatan *feedback* masyarakat dalam komponen penyelenggaraan nilai-nilai *good governance* yang melihat sudut pandang masyarakat sebagai penerima layanan sehingga pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan publik melalui pelayanan pemberian bantuan sosial. Selain untuk meningkatkan kualitas layanan, pemerintah dapat mengkaji lebih dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial Covid 19. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana dampak kualitas layanan bantuan sosial covid19 terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten TTS?
2. Bagaimana bentuk layanan bantuan sosial Covid19 di Kabupaten TTS?
3. Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten TTS melalui bantuan sosial Covid 19?

PEMBAHASAN

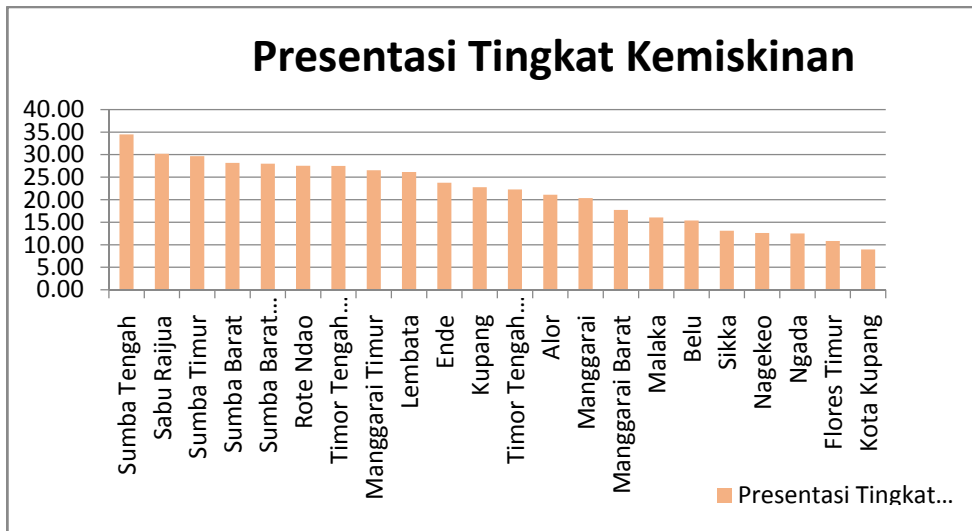
Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar kebutuhan minimum dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. Penduduk miskin adalah penduduk yang dibawah garis kemiskinan. Diberbagai negara kesejahteraan masyarakat diukur dari pendapatan perkapita, namun pada kenyataannya pendapatan perkapita suatu negara naik, namun tidak dinikmati sebagian kecil masyarakat yaitu masyarakat miskin. Umumnya suatu keadaan dikatakan miskin bila ditandai dengan kekurangan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Kebutuhan dasar itu berasal dari aspek primer dan sekunder. Aspek primer meliputi pendidikan dan keterampilan, aspek sekunder meliputi jaringan sosial, sumber keuangan, kekurangan gizi, dan mempunyai rumah yang tidak layak. Menurut Supriyatna (1997), kriteria kemiskinan dengan menggunakan rasio kebutuhan fisik minimum terdiri dari tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup empat sehat lima sempurna. Rasio kebutuhan fisik minimum formulasinya adalah miskin sekali, ukuran kemiskinan Kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Tingkat pendapatan minimum merupakan batas antara kondisi seseorang miskin atau tidak (Kuncoro, 2006).

Kemiskinan umumnya memiliki karakteristik spesifik di negara masing-masing salah satunya adalah kondisi geografis yang tingkat kemiskinan tertinggi umumnya berada di pedesaan dikarenakan cenderung mempunyai pendapatan yang rendah, konsumsi rendah, kurang gizi, buta huruf, kematian pada bayi dan standar perumahan yang rendah. (2) Kondisi demografis, rumah tangga miskin cenderung mempunyai anak yang banyak dan tanggungan yang banyak sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi anggota keluarga, terlebih rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan (3) karakteristik aset, dimana pendapatan seseorang berkaitan dengan aset yang dimiliki, seperti lahan dan juga kualitas sumber daya manusia. Rumah tangga miskin umumnya tidak memiliki lahan atau sumber daya manusia yang mampu mengelola lahan tersebut (Adelman, 1986). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), jumlah pengangguran terbuka dapat dilihat terdapat 308,04 ribu orang (7,84 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid -19 (6,19 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (4,08 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (19,94 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (277,83 orang).

Angka yang masih terbilang besar dan salah satu indeks yang menjadi tolak ukur adalah kemiskinan, dimana pengangguran selalu bersinggungan

dengan kemiskinan. Menurut BPS salah satu indikator kemiskinan adalah tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs approach*).



Grafik 1. Presentasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinis NTT

Bantuan Covid 19

Program Bantuan Sosial Covid 19 di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif (Lapanda, 2013). Tujuannya pemberian bantuan sosial Covid 19 di Kabupaten TTS:

1. Peningkatan ketahanan ekonomi keluarga terutama masyarakat miskin, rentan miskin dan masyarakat yang terdampak covid 19.
2. Pengendalian risiko sosial terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin.

Arah kebijakan pemberian bantuan langsung tunai dampak *corona virus disease* 2019 di Kabupaten TTS. Arah kebijakan ini sehubungan dengan semakin meluasnya penyebaran wabah Covid-19 yang ditetapkan sebagai pandemi global. Pemerintah Kabupaten TTS sebagai penyedia layanan publik dan penyelenggara pelayanan publik harus membuat langkah-langkah yang cepat, tepat, terpadu dan sinergi untuk menghadapi dampak Covid-19 yaitu menurunkan daya beli masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, diperlukan percepatan bantuan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak Covid 19. Langkah-langkah percepatan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten TTS adalah:

1. Penanggulangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin, rentan miskin dan masyarakat yang terdampak Covid-19.
2. Pemberian bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19.
3. Kehadiran pemerintah daerah ditengah masyarakat dalam rangka meminimalisir kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul selama pencegahan dan penanganan Covid-19.

Pendanaan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dilakukan dengan beberapa metode:

1. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran bantuan langsung tunai Rp 600.000,- selama 3 bulan, untuk maksimal 7.500 dari 278 desa atau kelurahan masyarakat penerima manfaat sekabupaten TTS.
2. Bentuk dan besaran nilai bantuan penerima BLT menerima bantuan uang tunai Rp 600.000,- selama 3 bulan.
3. Periode pertama September sampai dengan November 2020, sumber anggaran APBD Kabupaten TTS penyaluran bantuan uang tunai dilakukan tanpa membuka rekening oleh bank sesuai kesepakatan Dinas Sosial Kabupaten TTS.

Kartu Prakerja

Program Kartu Pra -kerja adalah implementasi dari pasal 27 Ayat (2) UUD NKRI tahun 1945 “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” termasuk jaminan yang diberikan pemerintah kepada para pekerja /buruh yang sudah di PHK, yang sedang mencari pekerjaan setelah pandemic Covid-19 ini berakhir. Kartu Pra-kerja ini merupakan salah satu jaring pengaman sosial dan merupakan bantuan yang konkret yang dikeluarkan ditengah wabah covid-19 ini, yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, dan mendorong masyarakat untuk mampu meningkatkan level diri hal ini sejalan dengan upaya untuk memaksimalkan potensi diri yang sudah dimiliki masyarakat, yaitu partisipasi dari internal masyarakat (Andreas, 2016).

Efektifitas dari program kartu pekerja dapat diukur dari beberapa aspek (Andreas 2016)

- (1) Masyarakat miskin atau lemah yang menjadi berdaya
- (2) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial
- (3) Mampu menyampaikan aspirasi
- (4) Mempunyai atau membangkitkan mata pencaharian

- (5) Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok (pelatihan, kursus, pertemuan, dsbnya)

Paket sembako Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang bentuknya dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya dengan mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan e-warung yang mempunyai tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dengan memenuhi sebagian kebutuhannya yaitu pangan, pemenuhan gizi yang seimbang, memberikan ketepatan sasaran dan bantuan bagi KPM memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Kemensos, 2017). Program ini keberlanjutan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

PermenDesa PDTT No.16 Tahun 2020:

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa:

Sasaran penerima bantuan adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

1. Kehilangan mata pencaharian;
2. Belum terdata (*exclution error*) dan
3. Mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis.

Mekanisme Pendataan :

1. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid19;
2. Pendataan berfokus mulai dari RT, RW dan Desa
3. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.
4. Legalitas dokumen hasil pendataan ditangani oleh kepala desa.
5. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal terima diterima kecamatan.

Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

1. Masa penyaluran BLT Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung april 2020
2. Besaran BLT Dana Desa per bulang Rp 600.000,00 per keluarga.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten TTS dengan melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan.

Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono (2005: 59), kualitas layanan adalah suatu tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi yang mempunyai hubungan seberapa jauh pihak penyedia jasa bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Pemerintah Kabupaten TTS sebagai penyedia jasa selama pandemi Covid-19 dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat/pelanggan.

Manfaat kualitas layanan (Tjiptono, 2005:15) menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat dari suatu organisasi atau perusahaan dengan adanya kualitas pelayanan diantaranya yaitu:

1. Kualitas berhubungan erat dengan kepuasan;
2. Organisasi atau perusahaan dapat meningkatkan pemenuhan kualitas berisifat *driven*;
3. Kualitas dapat mengurangi biaya.

Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat menurut Keputusan MENPAN No.25/KEP/25/M.PAN/2004 adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. Indeks yang

meliputi: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan saran dan masukan. Tujuan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat menurut Keputusan MENPAN No. 25/ KEP/25/ M. PAN/ 2004 adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan secara periodik dan bagi unit pelayanan di instansi pemerintah, hasil pengukuran dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Selain itu, fungsinya untuk masyarakat adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini bisa digunakan sebagai gambaran kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Pemberdayaan Masyarakat

Bentuk pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 pada pasal 6 ayat 4, pemberdayaan antara lain:

- 1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
- 2) Pelatihan tepat guna;
- 3) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan desa.
- 4) Peningkatan kapasitas masyarakat antara lain:
- 5) Kader pemberdayaan masyarakat desa;
- 6) Kelompok ekonomi produktif;
- 7) Kelompok perempuan;
- 8) Kelompok tani;
- 9) Kelompok masyarakat miskin;
- 10) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 11) Kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai dengan kondisi desa;

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Maleong, 2019). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner dan wawancara dengan penerima bantuan sosial Covid 19. Fokus penelitian ini adalah penerima bantuan sosial Covid-19. Metode pengolahan data berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017. Data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan studi literatur. Teknik pengam-

bilan sampel menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana:

S = jumlah sampel

λ^2 = Lamda (factor pengali) dengan dk= 1 taraf kesalahan bias 1%, 5%, 10%

N = Populasi

P (Populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

Kualitas layanan pemberian bantuan sosial covid 19 di Kabupaten TTS menggunakan metode survei menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 diperoleh 10 responden yang bersedia mengisi kuesioner secara daring. Rata-rata responden berdasarkan jenis kelamin sebanyak 50% laki dan 50% perempuan, dengan rentang tingkat pendidikan SMA/ sederajat sampai dengan Strata 1 dan usia 21 s/d 42 tahun. Survei ini kepuasan layanan penerima bantuan sosial Covid19 di Kabupaten TTS ini memiliki 9 pertanyaan terkait pelayanan. Hasil ini menunjukkan kualitas layanan pemberian bantuan sosial Covid19 di Kabupaten TTS. Pertanyaan yang diajukan bersifat umum karena digunakan diseluruh instansi pelayanan public. Tabel berikut ini menyajikan nilai yang dihasilkan setiap unsur pertanyaan.

Tabel 1. Indeks Setiap Pertanyaan Survei

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	2,40
U2	Prosedur	2,70
U3	Waktu Pelayanan	2,20
U4	Biaya/Tarif	3,20
U5	Produk Layanan	2,50
U6	Kompetensi Pelaksana	2,40
U7	Perilaku pelaksana	2,70
U8	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	2,10
U9	Sarana dan Prasarana	2,30

Data yang ditunjukkan pada tabel I Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan bantuan sosial Covid-19 sebesar 61,88. Nilai IKM ini terletak pada nilai interval konversi IKM sebesar 25,00-64,99 yang menggambarkan kinerja pelayanan bantuan sosial Covid-19 kinerja pelayanan tidak baik dengan kategori mutu pelayanan D. Apabila dilihat dari 9 unsur angka yang paling tertinggi adalah pada unsur biaya/tarif dengan nilai rata-rata 3,20, yang

artinya perubahan sistem pemberian bantuan melalui perbankan menekan tindakan penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19. Delapan unsur lainnya memiliki nilai dibawah 3,00 yang artinya mutu layanan bantuan Covid-19 kurang baik bahkan mendekati tidak baik, walaupun sudah terjadi perubahan sistem ke perubahan *by name by addres* (BNBA) agar data yang diverifikasi tidak tumpang tindih. Namun masih ada masyarakat yang sudah didata tetapi tidak menerima bantuan sosial Covid-19, dengan alasan tidak dapat dihubungi. Hal ini menunjukkan tingkat ketelitian dari yang mengumpulkan data masih rendah. Hampir 50% responden menjawab kesesuaian bantuan sosial Covid dengan persyaratan kurang sesuai. Unsur prosedur penerima bantuan sosial Covid 60% responden menjawab mudah dan ada yang menjawab sangat mudah. Jika dilihat dari unsur kecepatan penerimaan bantuan 60% responden menjawab kurang cepat. Unsur produk layanan hampir 60% responden menjawab sesuai. Unsur kompetensi pelaksana 50% responden menjawab kompeten. Unsur perilaku 80% responden menjawab perilaku petugas pelaksana ramah dan sopan, Unsur sarana dan prasarana 50% responden menjawab cukup, dan unsur pengaduan dan saran 70% responden menjawab ada namun tidak berfungsi dengan baik. Hasil ini menunjukkan ada persoalan tata kelola pelayanan bantuan covid 19, sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali. Evaluasi ini bisa dilakukan secara berkala baik setiap triwulan sekali atau tiap semester maupun tahunan untuk meningkatkan kualitas layanan. Permasalahan ketidakakurat data juga terjadi karena ada kelompok rentan baru yang terdampak secara ekonomi yang tidak termasuk dalam basis data penerima bansos,. Jawaban responden cenderung mengindikasikan bahwa regulasi dan mekanisme ini tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Jawaban responden cenderung negatif mengindikasikan bahwa regulasi ini tidak tepat sasaran.

Walaupun indeks kepuasan masyarakat sebesar 61,88, data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 menunjukkan ada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten TTS ditahun 2020 dapat dilihat pada dari table 3, jumlah penduduk miskin berkurang 1330 jiwa.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah penduduk miskin
2013	126.000
2014	122.490
2015	144.010
2016	138.430
2017	136.450
2018	130.630
2019	130.310
2020	128.980

Jumlah penduduk miskin ini mengalami penurunan berdasarkan pengamatan ini bukan disebabkan karena pengelolaan tatakelola, namun karena disebabkan faktor kucuran dana dari pemerintah dalam bentuk bantuan sosial Covid-19 untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kemiskinan tidak signifikan masih jauh dari harapan.

Sasaran pemberian bantuan Covid-19 di Kabupaten TTS:

1. Keluarga miskin dan rentan miskin yang tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kementerian jaring pengaman sosial Provinsi NTT dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
2. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kehilangan penghasilan/pendapatan, kehilangan akses berusaha, akibat dampak Covid 19 dalam hal ini yang layak dibantu.

Penentuan Sasaran Penerima Bantuan

Penentuan sasaran yang bisa menerima bantuan Covid-19 di Kabupaten TTS merupakan proses awal yang dilakukan mulai dari tingkat paling rendah yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan dusun. Adapun mekanisme yang dilakukan Pemerintah Kabupaten TTS:

1. Pemerintah daerah melakukan indentifikasi dan pendataan secara berjenjang dari tingkat RT, RW dan dusun.
2. Penerima bantuan langsung tunai ditetapkan dengan keputusan bupati.
3. Penerima bantuan langsung tunai dapat diusul oleh *stakeholders* terkait.
4. Data masyarakat penerima bantuan langsung tunai memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK)/*by name by addres* (BNBA).
5. BNBA penerima bantuan langsung tunai adalah masyarakat bukan penerima bantuan sosial yang meliputi bantuan sosial sembako, program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial, jaring pengaman sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).
6. Data –data usulan dari desa atau kelurahan selanjutnya oleh Dinas Sosial Daerah diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2020.

Pemberdayaan masyarakat

Dari jawaban respon dapat dilihat bantuan dana covid 19 selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, jika ditelusuri lebih dalam bantuan sosial ini hanya digunakan untuk konsumsi saja. Padahal kalau dilihat dari data responden penerima bantuan sosial Covid 19 rentang usia 21 s/d 42 tahun, yang merupakan usia produktif. Hal ini dapat membebani keuangan negara. Memang ada beberapa bantuan yang dikhususkan untuk pemberdayaan masyarakat. Misalnya kartu prakerja. Tetapi bantuan itu tidak sesuai dengan tujuan, berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan mereka memang diberikan pelatihan menggunakan platform-platform digital untuk memasarkan produk, tetapi setelah pelatihan tidak ada evaluasi secara berkala dari pemerintah. Apakah dana bantuan tersebut benar-benar digunakan menjalankan usaha guna untuk menopang perekonomian daerah pada khususnya atau digunakan untuk kebutuhan lainnya

PENUTUP

Bantuan jaringan pengaman social pada saat pandemic Covid-19 ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat, namun pada kenyataannya Menurut peneliti, sangat disayangkan apabila setiap gelombangnya tidak diisi oleh orang-orang yang tepat. Maksud dari orang-orang tepat disini adalah masyarakat yang tidak berdaya sama sekali, entah itu karena latar belakang ekonomi, pendidikan, maupun sebagai imbas dari COVID-19. Anggaran yang sudah dikeluarkan perlu diperhatikan dan dikaji ulang oleh pemerintah, supaya efektivitas dari realisasi program tersebut juga membawa pengaruh besar pada setiap sendi kehidupan di sektor-sektor masyarakat kecil dengan perbaikan prosedur tentunya.

Alangkah lebih baik sebelum diberikan bantuan masyarakat diberikan sosialisasi manfaat dari pemberian bantuan. Pada saat memberikan pelatihan kepada masyarakat harus disesuaikan dengan potensi daerah tersebut dan diberikan pelatihan berkelanjutan. Misalnya di Kabupaten TTS memiliki komoditas kemiri, masyarakat dilatih untuk mengolah kemiri menggunakan teknologi tepat guna, cara untuk mengemas, dan cara untuk memasarkan kemiri tersebut. Ini dapat mendorong roda perekonomian nasional tetap berjalan ditengah pandemi, melakukan evaluasi baik triwulan, semester maupun tahunan supaya tepat sasaran.

Menghidupkan kembali sektor ekonomi kreatif khususnya tenun ikat. Namun harus mempertimbangkan nilai filosofi budaya dari kain tenun tersebut bukan hanya faktor ekonomi saja dengan memproduksi secara besar-besaran. Misalnya motif yang seharusnya digunakan untuk acara kema-

tian, digunakan untuk ke pesta. Jika nilai ekonomi dipadukan dengan nilai filosofi, harga kain tenun tersebut jauh lebih tinggi.

Menanam kembali pohon cendana bukan untuk komoditas perdagangan tetapi agar tidak punah dan kelestarian alam dapat terjaga. Selain itu dapat meningkat perekonomian masyarakat melalui sector pariwisata dan kabupaten TTS dapat dijadikan pusat penelitian khusus tentang cendana. Bekerjasama dengan universitas-universitas yang ada di NTT khususnya untuk mengkaji sektor pertanian, perkebunan dan peternakan dan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan hukum.

Bagi pihak kampus, khususnya lebih gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Agar menumbuhkan minat masyarakat untuk belajar tentang pertanian, perkebunan dan peternakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. J., & MA, D. Moleong, Lexi J. (2019). "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung: Remaja Rosdakarya. *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana. 2003. Total Quality Management. Yogyakarta: Andi Offset. Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. 2005. Service, Quality & Satisfaction. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fandy, T., & Chandra, G. (2005). Service, Quality & Satisfaction. *Yogyakarta: Andi Offset*.
- Noorhayati, N. (2021). Program Bantuan Covid-19 Dan Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan (Studi Pada Masyarakat Penerima Bantuan Covid-19 Di Kecamatan Garum). *Otonomi*, 21(1), 128-132.
- Lapananda, Y. (2013). *Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD*. Sinar Grafika.
- Shofiana, A. (2020). Implementasi Program Afiliasi Berbasis Virtual Team Dalam Umkm Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Implementation Of Virtual Team-Based Affiliation Programs In Msmes As Efforts For Increasing The Economy In The Covid-19 Pandemic Period). *Available at SSRN 3590822*.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Schunk, D. H. (2012). *Learning theories an educational perspective* (E. Hamdiah & R. Fajar, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Original work published 2012).

Kemensos.go.id 2017

Kemensos.go.id 2021

Negeri, M. D. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. *Jakarta: Sekretaris Menteri Dalam Negeri*.

SPACE AWARENESS DAN SPACE EDUCATION MELALUI LAYANAN ANTARIKSA SELAMA PANDEMI COVID 19

Intan Perwitasari

PENDAHULUAN

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan keantariksaan termasuk kegiatan penelitian penerbangan dan antariksa. Sebagai institusi litbang, LAPAN memiliki komunitas jejaring dan program keantariksaan dalam bentuk pendidikan keantariksaan (*space education*) dan kepedulian antariksa (*space awareness*). *Space education* menurut Lang Kenneth (2004) adalah media pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan dan wadah untuk seseorang bekerja di lingkungan antariksa. Setiap unit di dalam organisasi LAPAN memiliki program layanan publik sebagaimana amanah dalam reformasi birokrasi. Kegiatan keantariksaan sendiri terdiri dari sains antariksa, teknologi antariksa, penginderaan jauh, peluncuran dan komersialisasi (Peraturan Presiden No. 45, 2017). Sejumlah produk dan informasi keantariksaan menjadi *tools* atau media alat layanan publik sebagai kontribusi riset terhadap pembangunan. Bentuk layanan publik LAPAN terwadahi dalam layanan satu pintu. Layanan tersebut sebagai media menumbuhkan *space awareness* dan *space education*.

Layanan publik ini memiliki fungsi pembentukan komunitas keantariksaan, yaitu LAPAN dan pengguna. Pengguna layanan tersebut terdiri dari pemerintah, lingkungan pendidikan, industri dan masyarakat. Ekosistem antariksa tidak akan terbentuk tanpa pelibatan partisipasi pemerintah, riset, institusi pendidikan, masyarakat dan media yang kemudian dikenal dengan penta helix. Sejumlah organisasi riset keantariksaan atau *space agency* bahkan organisasi internasional di bidang keantariksaan memiliki sejumlah program *space education* dan *space awareness* seperti UNOOSA (UNOOSA, 2021). Beberapa programnya seperti Program Beasiswa (*Fellowship Programme*), dan mendirikan *Regional Centre for Space Science and Technology Education* sebagai pembentukan kapasitas dalam sains antariksa dan teknologi di Asia Pasifik. Di Asia setidaknya terdapat 3 *Regional Centre* yaitu di India, China dan Jordan. Indonesia juga memanfaatkan program tersebut untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam negeri.

Pandemi COVID 19 merupakan bencana nasional dan sejumlah kebijakan ditempuh pemerintah dalam berbagai bentuk. Salah satu kebijakan pembatasan aktivitas dan kebijakan APBN untuk penanganan COVID telah berdampak pada program keantariksaan termasuk layanan publik. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menganalisis dampak layanan publik dan strategi yang perlu dibangun dalam menumbuhkan *space awareness* dan *space education* selama pandemi covid 19. Dalam pengukuran dampak ini digunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan berbagai sumber sekunder.

PEMBAHASAN

A. Layanan publik Keantariksaan

LAPAN merupakan salah satu pelaksana layanan publik keantariksaan di Indonesia. Layanan publik LAPAN terdiri dari layanan informasi atas hasil riset, program dan kegiatan dan Badan Layanan Umum (BLU) (LAPAN, 2021). Layanan ini di selenggarakan oleh masing-masing unit kerja baik teknis dan non-teknis mencakup kegiatan sains antariksa, penginderaan jauh, penguasaan teknologi, komersialisasi, kebijakan. Lingkup dan kegiatan layanan publik terkait dengan kegiatan *space education* dan *space awereness* terwadahi melalui media : seminar, diseminasi, pemagangan, kuliah kerja lapangan, permintaan narasumber dan lainnya.

Sains Antariksa. Kegiatan ini menjadi kegiatan di 2 unit yaitu Pusat Sains Antariksa dan Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer. Kedua unit tersebut memiliki sejumlah program yang dapat diakses publik sebagai media diseminasi hasil riset terkait dengan : (a) pemantauan benda jatuh; (b) pemantauan fenomena objek antariksa langit selatan melalui Observatorium Nasional Kupang; (c) pemodelan iklim; dan sebagainya.

Penginderaan Jauh. Kegiatan di bawah Kedeputan Teknologi Penginderaan ini memiliki sejumlah layanan yang dapat diakses melalui web dan layanan perkantoran (offline). Kedeputan ini memiliki peran strategis sebagai Bank Data Penginderaan Jauh Nasional. Untuk menjalankan fungsi Bank Data, LAPAN memiliki sejumlah layanan seperti: (a) pemantauan Sistem Pengamatan Bumi (website SPBP); (b) dukungan Lapan sebagai *Sustainable Development Goal (SDGs) Centre*, dll.

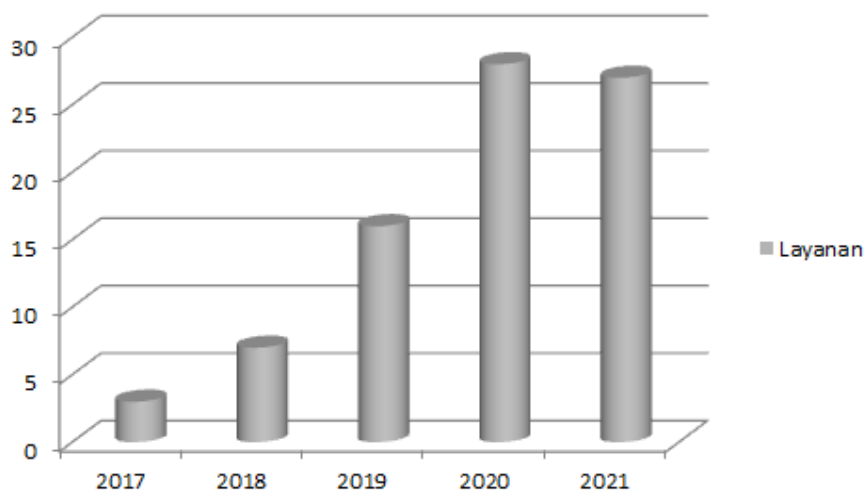
Penguasaan Teknologi. Layanan terkait penguasaan teknologi di laksanakan oleh Pusat Teknologi Roket, Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi Penerbangan. Pengguna layanan publik di ketiga unit tersebut terdiri dari industri, akademis, pemerintah (kementerian/non kementerian), media, dan masyarakat. Untuk memberikan layanan teknologi, sejumlah infrastruktur iptek dibangun seperti : (a) Stasiun Bumi Telemetri, Tracking and Command (TTC); (b) Bandar Antariksa (tahap perencanaan); (c) laboratorium

DO-160; (d) fasilitas AIT; dan lainnya. Salah satu produk roket LAPAN yang digunakan oleh industri untuk mendukung kebutuhan pertahanan nasional adalah Roket 122B, dan Roket 450. Teknologi satelit Tubsat, satelit LAPAN-A2 Orari, LAPAN A3 selain berperan menyuplai data dan informasi untuk kepentingan riset, respon kebencanaan juga memiliki nilai komersialisasi.

Kebijakan. Layanan kebijakan ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa. Selain memiliki sifat pelayanan internal di LAPAN, unit ini juga memiliki fungsi pelayanan eksternal. Sejumlah produk dan kajian dan produk hukum dihasilkan seperti Undang-Undang Keantariksaan, Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan, pedoman delegasi dalam forum internasional, dan rekomendasi kebijakan. Pelayanan terkait kebijakan di tuangkan dalam bentuk : narasumber, pemagangan, kuliah kerja lapangan, dan lainnya.

B. Dampak Layanan Publik

Layanan informasi publik terus dilakukan oleh LAPAN selama pandemi. Dampak pandemi terhadap layanan publik dapat dikategorikan bersifat positif dan negatif. Bersifat positif artinya pandemi memunculkan inovasi sehingga jumlah layanan meningkat. Hal tersebut terjadi untuk sejumlah layanan pemagangan di sejumlah unit seperti Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa. Layanan akademis selama pandemi meningkat pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini sejalan dengan meningkatnya *space awereness* dan *space education* terkait tema *space policy* dan *space economy*. Salah satu kebijakan yang mendukung dari peningkatan layanan tersebut adalah penyelenggaraan pemagangan atau layanan secara online/virtual.



Sumber: Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (6 Agustus, 2021), diolah

Gambar 1: Perkembangan Layanan Akademis Tahun 2017 hingga 2021 (Jan-Juni)

Dampak negatif terhadap layanan publik dicontohkan adalah penurunan jumlah kunjungan. Kunjungan ini seperti KKL, bimbingan teknis, yang bersifat pelayanan offline. Hal tersebut di sebabkan karena pemberlakuan sejumlah pembatasan dengan kebijakan *Working From Office* (WFO) dan *Working From Home* (WFH).

Dampak positif lain dengan pemanfaatan teknologi antariksa selama pandemi adalah dengan penyelenggaraan *tele-education* atau pendidikan jarak jauh menjadi populer pada masa pandemi covid. Media teknologi menjadi perangkat utama yang menghubungkan pendidik atau pemilik informasi dan siswa dalam ruang virtual, termasuk dalam hal kegiatan layanan publik di LAPAN. Selama pandemi, akses terhadap pendidikan menjadi hal yg krusial dan menurut UNOOSA (2021), teknologi satelit komunikasi sangat membantu dalam menjembatani kesenjangan akses. Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan pemanfaatan satelit LAPAN A2 untuk menjawab kebutuhan *e-learning* di lokasi –lokasi yang tidak terjamah oleh listrik dan internet. Pilot projek ini merupakan upaya yang di lakukan dalam Kegiatan Kuliah Nyata (KKN) dengan melakukan sosialisasi ke pendidik dan masyarakat di daerah (Orari, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi antariksa melalui satelit menjadi alat kunci utama untuk kegiatan *space education* di era *e learning* khususnya pandemi. LAPAN dalam menumbuhkan *space education* memiliki beberapa program berbasis virtual dan non virtual seperti kegiatan pemagangan, permintaan narasumber, *summer school*, dll. Strategi dalam memberikan layanan tersebut adalah dengan memaksimalkan media komunikasi seperti: zoom meeting, gogle meet, dll.

Bagaimana dengan upaya menumbuhkan *space awareness* melalui pemberdayaan masyarakat menjadi pekerjaan rumah bagi LAPAN. LAPAN memiliki beberapa infrastruktur iptek dimana beberapa lokasi memiliki karakteristik khusus terkait dengan zonasi karena kekhasan dari teknologi antariksa. Observatorium Nasional Kupang merupakan lokasi percontohan dimana pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan riset sains antariksa di Kupang. Untuk mewujudkan kelestarian lingkungan untuk kegiatan riset sains antariksa, masyarakat dan media dilibatkan dalam peningkatan kapasitas sdm lokal. Pemberdayaan Masyarakat Observatorium Kupang diupayakan melalui peningkatan literasi, perpustakaan umum, kegiatan pendampingan membaca dan menulis, untuk meningkatkan SDM lokal. Selain itu untuk memperkenalkan sains kepada masyarakat, Pusat Sains Tilong dalam perencanaannya di lengkapi infrastruktur publik seperti pusat pengembangan budaya daerah (Langit Selatan, 2017), hal tersebut untuk mendukung wisata antariksa terintegrasi. Manfaat wisata antariksa tidak hanya untuk industri atau operator sendiri, juga mendorong jasa lainnya dalam suatu paket wisata terhadap konsumen (Zakaria, et.all., 2011).

LAPAN juga memanfaatkan media (website, instagram, twitter) sebagai *clearing house* salah satunya terkait fenomena antariksa, untuk jenis layanan informasi bersifat rutin, periodik dan insidental. Wisata antariksa merupakan aspek pemberdayaan masyarakat yang diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendidikan (penyediaan teknologi keantariksaan untuk pendidikan) dan kesadaran melalui peningkatan *space awereness* terhadap antariksa.

C. Strategi

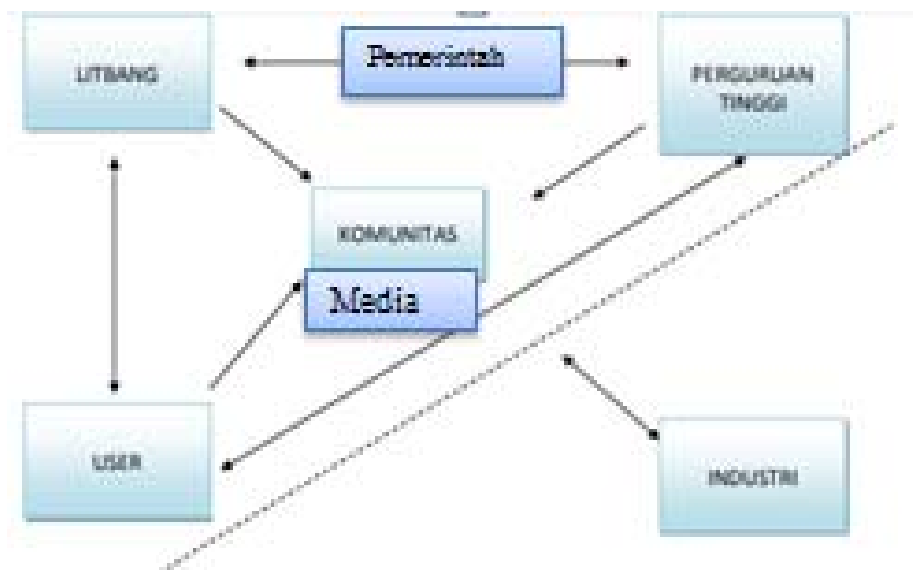
Perwitasari, I dan Agil S (2015) menyebutkan rendahnya minat bekerja di sektor keantariksaan menjadi problem strategis dalam isu Sumber Daya Manusia (SDM) keantariksaan nasional sampai dengan sekarang. Penyebab rendahnya minat tersebut adalah persepsi yang masih rendah dan industri keantariksaan yang belum terbentuk. Pandemi covid ini dengan era digitalisasi mendorong untuk perlunya disusun strategi untuk meningkatkan *space education*. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan *space education* dengan mengembangkan konsep Perwitasari, I dan Agil S. (2015) adalah dengan:

- a) Peningkatan insentif riset ;
- b) Program beasiswa, *intership*, pemagangan, seminar;
- c) Peningkatan Kolaborasi (pemerintah, industri, akademik, publik dan media) ;
- d) Penyusunan kurikulum bersama terkait *space education* antara industri-akademik dan riset;
- e) Penggunaan infrastruktur riset bersama; dan
- f) Mendorong keberadaan komunitas profesional, asosiasi industri, dan pendidikan

Kebijakan pemerintah tahun 2021, melalui Badan Inovasi Riset mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan pengadaan SDM keantariksaan melalui program ASN. Muncul permasalahan dimana, SDM yang dibutuhkan saat ini adalah minimum memiliki latar belakang S3. Dengan semakin tingginya tingkat kompetensi dan standart saat ini mendorong sejumlah strategi untuk dukungan *space education* dari level Sarjana loncatan menjadi gelar Doktor. Dukungan finansial dalam hal pendampingan pembiayaan melalui beasiswa ini menjadi hal yang krusial. Tentunya BRIN perlu berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, kebudayaan dan Ristek dan Perguruan Tinggi untuk menyediakan sdm keantariksaan nasional.

Strategi dalam peningkatan *space awereness* di era pandemi ini menjadi hal yang penting, dimana inovasi media menjadi tool yang strategis. Media komunikasi menjebatani informasi antara lembaga riset sebagai penyedia

informasi dengan pengguna informasi. Dalam penyelenggaraan keantariksaan partisipasi publik melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi riset antariksa menjadi hal penting dalam peningkatan perekonomian lokal. Pelibatan peran masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program keantariksaan selama pandemi dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan sosialisasi untuk sejumlah program seperti Bandar Antariksa di Biak melalui seminar online dan offline, penyelenggaraan event seperti Malam Langit Gelap di Observatorium Kupang (kerjasama LAPAN, Pemerintah Daerah, Media, akademisi), dll. Keberhasilan pembangunan termasuk pembentukan *space education* dan *space awareness* membutuhkan peran kolaborasi berbagai stakeholder. Saat ini peran Penta Helix dengan pelibatan media menjadi hal yang penting dalam kegiatan *space education* dan *space awareness* di Indonesia. Media menjembatani informasi dari kegiatan-kegiatan di litbang atau lembaga riset, pemerintah, akademik (perguruan tinggi), dan industri keantariksaan ke user (masyarakat).



Sumber: Perwitasari, I dan Agil S (2015) di kembangkan

Gambar 2: Konsep Pelibatan Stakeholder Pengembangan *Space Education* dan *Space Awareness*

PENUTUP

Kegiatan *space education* dan *space awareness* menjadi hal menarik di saat pandem covid19. Pemanfaatan teknologi antariksa untuk mendukung kegiatan *tele education* merupakan kontribusi teknologi bagi pembangunan. SDM keantariksaan yang berkualitas dan berkuantitas akan tersedia jika terdapat kolaborasi maksimal dari para pelaku atau stakeholder dan peran

media menjadi hal yang penting dalam menjembatani komunikasi antara litbang, akademik, pemerintah, industri dan user (masyarakat). Pemberdayaan masyarakat melalui wisata antariksa di beberapa lokasi riset antariksa merupakan strategi dalam peningkatan *space education* dan *space awareness* saat ini dan kedepannya. Dengan industri antariksa yang tumbuh kedepan melalui bandar antariksa di Biak melalui wisata antariksa akan mendorong ekonomi lokal. Hal yang sama dengan pengembangan wisata antariksa di Observatorium Kupang melalui wisata Langit Gelap. Layanan akademik merupakan salah satu upaya menumbuhkan *space education* dan *space awareness* di lingkungan akademik. Media menjembatani komunikasi informasi antara penyedia informasi kepada para stakeholder dalam komunitas keantariksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- UNOOSA. (05/08/2021). *Benefit of Space: Education*. Diakses 05 Agustus, 2021, dari <https://www.unoosa.org/oosa/en/benefits-of-space/education.html>
- Perwitasari, I., Nurul SF, dan Winarni (2012) Kebutuhan Kebijakan Pendidikan Keantariksaan di Indonesia: Pengaruh Lembaga Perguruan Tinggi dalam Mendukung Hubungan Space Research, Space Industry terhadap Minat Generasi Muda. *Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan*, Volume 9 No.1 Tahun 2012, download: http://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_ansi/article/view/1771/1606
- Perwitasari, I. dan Agil S (2015) Pengaruh Litbang, Industri dan Perguruan Tinggi Terhadap Minat Generasi Muda Bekerja di Sektor Keantariksaan dengan Pendekatan Triple Helix Network. *STI Policy and Management Journal*, Vol 13 No 1 (2015) DOI: <http://dx.doi.org/10.14203/STIPM.2015.37>
- Lang Kenneth (2004) An Education Curriculum for Space Science in Developing Countries. *Space Policy*. Volume (20) 297-302
- Langit Selatan (2017) Astronomi, gerbang Edukasi Sains dan Wisata Langit Timor Barat. Diakses melalui: <https://langitselatan.com/2017/11/10/astronomi-gerbang-edukasi-wisata-langit-timor-barat/>
- Orari (2021) Tak Ada Sinyal, SD N 4 Kalisat Kidul Gunakan Satelit LAPAN A2/ORARI Untuk Pembelajaran, download: <https://orari.or.id/index.php/2021/04/06/tak-ada-sinyal-sd-n-4-kalisat-kidul-gunakan-satelit-lapan-a2-orari-untuk-pembelajaran/>
- Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (6 Agustus, 2021) Layanan Akademik, diakses melalui :

<https://puskkpa.lapan.go.id/index.php/subblog/pages/2018/16/Layanan-Akademik>

Zakaria, Norul R., et.all (2011) The Advantages, Potentials And Safety Of Vtol Suborbital Space Tourism Operations. Presented at the 5th International Association for the Advancement of Space Safety conference on 17 – 19 October 2011, in Versailles, Paris, France. Download:

<http://www.spaceportmalaysia.com/v2/pdf/TheAdvantages,PotentialsandSafetyofVTOLSuborbitalSpaceTourismOperations.pdf>

Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2017 Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan tahun 2017-2045. LAPAN

UPAYA PENINGKATAN PENGGUNAAN KARTU TANI (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN WONOSOBO)

Prasetyo Ari Bowo; Avi Budi Setiawan

PENDAHULUAN

Subsidi pupuk di Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar Rp 4.627.112.390 dengan alokasi sebanyak 1.536.110 ton. Subsidi per Kg tertinggi ada pada pupuk NPK sebesar Rp 3.877/ Kg sedangkan alokasi subsidi terbesar ada pada pupuk UREA yang memiliki total subsidi sebesar Rp 2.268.267.622 dengan jumlah alokasi 679.347 ton. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan No S-1964/AG/2018 disebutkan bahwa presentase total anggaran subsidi pupuk untuk provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 15,68% dari total anggaran subsidi nasional. Dengan adanya alokasi subsidi pupuk yang telah dipersiapkan oleh pemerintah diharapkan mampu disalurkan secara tepat kepada masyarakat, khususnya petani, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pendistribusian supaya dapat tersalurkan secara tepat, maka diterapkan sistem distribusi tertutup. Sistem ini dilakukan dengan cara setiap daerah membuat rencana kebutuhan pupuk yang dibutuhkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah perkiraan jumlah pupuk dan biaya yang harus salurkan yang dikenal dengan istilah rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) (Zulaiha et al, 2018). Selain adanya sistem tertutup tersebut, masih diperlukan adanya upaya pengawasan dalam proses distribusi agar dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan sasaran. Terdapat enam ruang lingkup dalam pengawasan ini yang sering disebut dengan “enam tepat” yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat waktu.

Dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi, pemerintah provinsi Jawa Tengah mengusung sebuah inovasi baru yang dikenal dengan sebutan “Kartu Tani”. Kartu ini merupakan kartu yang digunakan oleh petani sebagai media untuk pennebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Tengah. Kartu tani berbentuk kartu debit yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selain dapat digunakan untuk melakukan transaksi, kartu ini juga dapat digunakan untuk mengetahui alokasi beserta transaksi pembayaran pupuk bersubsidi. melalui mesin

Electronic Data Capture (EDC) BRI di pengecer sebagai tempat petani membeli pupuk bersubsidi.

Rendahnya realisasi penggunaan kartu tani di Kabupaten Wonosobo mengindikasikan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambatnya. Menurut Ashari dan Hariani (2019) beberapa faktor yang menjadi penghambat program kartu tani diantaranya kondisi lingkungan yang tidak mendukung pemerataan kartu tani, sumber daya yang belum maksimal, dan rendahnya kesadaran petani dan kemampuan agen pelaksana.

Kondisi di lapangan banyak ditemukan masalah yang menjadi penghambat efektivitas penggunaan kartu tani. Diantaranya terdapat beberapa petani mengeluh malas menggunakannya karena kurang mengetahui tata cara penggunaannya. Hal lain yang ditemukan juga terdapat beberapa petani yang menggunakan kartu tani yang dimiliki teman petani lainnya. Sehingga hal tersebut dapat berefek terhadap pemerataan distribusi pupuk bersubsidi. Selain kedua temuan yang telah disebutkan terdapat juga temuan bahwa subsidi pupuk datang tidak sesuai dengan waktunya. Disaat petani membutuhkan pupuk ketika masa tanam namun stok pupuk yang tersedia terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan mengenai perubahan atau pembaharuan data RDKK bagi penerima kuota yang salah merupakan prioritas utama dalam kriteria sumber daya manusia. Melakukan penyuluhan mengenai perubahan atau pembaharuan data RDKK bagi penerima kuota yang salah menjadi penting dilakukan. Alternatif pada prioritas kedua dalam kriteria sumber daya manusia adalah Penyuluhan mengenai kegunaan atau manfaat kartu tani. Setelah kartu tani dibagikan dan diterima tepat sasaran kepada petani yang berhak menerimanya, maka sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan dan penyerapan pupuk bersubsidi perlu dilakukan penyuluhan mengenai kegunaan atau manfaat kartu tani. Prioritas alternatif ketiga pada kriteria sumber daya manusia adalah Meningkatkan kesadaran petani akan sistem perbankan dan manfaat kartu tani. Karena dalam hal ini, program kartu tani tidak terlepas dari sistem perbankan. Dengan meningkatnya wawasan dan pengetahuan para petani mengenai kelebihan, kegunaan, cara menggunakan, dan bagaimana mendapatkan keuntungan dari kartu tani secara keseluruhan maka diharapkan petani tidak ragu dan bingung lagi dalam menggunakan kartu tani sehingga peningkatan penggunaan kartu tani serta penyerapan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dapat tercapai.

Di sisi lain upaya diatas perlu didukung dengan adanya upaya peningkatan koordinasi bagi para KPL atau pengecer resmi dan distributor untuk pengadaan barang tepat waktu. Tepat waktu yang dimaksud adalah ketika

petani sedang dalam masa tanam dan membutuhkan pupuk untuk tanamannya maka pupuk yang dibutuhkan telah tersedia dengan artian tidak ada keterlambatan dalam proses distribusi. Pengadaan barang yang tepat waktu akan meningkatkan kegunaan dan manfaat dari adanya program kartu tani.

Kriteria Perbankan menjadi kriteria prioritas ketiga dalam upaya peningkatan penggunaan akrtu tani di kabupaten Wonosobo. Kemudian alternatif yang menjadi prioritas kedua pada perbankan yaitu Percepatan percetakan dan pembagian kartu tani dan alternatif prioritas ketiga adalah Memperbanyak agen Brilink.

Alternatif yang paling diprioritaskan pada kriteria perbankan adalah sosialisai manfaat penggunaan kartu tani. Sosialisasi manfaat penggunaan kartu tani menjadi penting sebelum melakukan hal lain seperti percetakan kartu tani dan memperbanyak agen BRllink. Alternatif prioritas kedua pada kriteria perbankan adalah percepatan percetakan dan pembagian kartu tani. Setelah minat petani dalam menggunakan kartu tani meningkat yang diharapkan dari adanya sosialisasi manfaat penggunaan kartu tani, maka langkah yang dapat dilakukan selanjutnya pada kriteria perbankan adalah mempercepat percetakan dan pembagian kartu tani. Alternatif memperbanyak agen BRllink menempati prioritas ketiga pada kriteria perbankan. Memperbanyak agen BRllink merupakan hal penting dan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan penggunaan kartu tani. Seringkali petani mengalami hambatan dalam melakukan transaksi karena terbatasnya jumlah agen BRllink yang ada. Dengan adanya peningkatan jumlah agen BRllink diharapkan dapat mempermudah petani dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tani yang mereka miliki.

Penelitian yang dilakukan oleh Moko, Suwarto, dan Utami, (2017) tentang perbedaan persepsi petani terhadap program kartu tani di kecamatan Kalijambe kabupaten Sragen memperoleh hasil bahwa persepsi petani yang akses jarak dekat dengan Kantor Kecamatan dan Bank BRI lebih baik dibandingkan persepsi petani yang akses jarak jauh dari Kantor Kecamatan dan Bank BRI. Hal ini mengindikasikan perlu adanya upaya untuk memperbanyak agen Brilink. Dengan agen BRllink yang bertambah diharapkan akses petani dalam melakukan transaksi semakin mudah sehingga pemanfaatan kartu tani akan semakin efektif.

Prioritas utama dalam meningkatkan penggunaan kartu tani di kabupaten Wonosobo yaitu Penyuluhan mengenai perubahan atau pembaharuan data RDKK bagi penerima kuota yang salah. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa alternatif lainnya seperti Penyuluhan mengenai kegunaan atau manfaat kartu tani; Sosialisasi penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan; Sosialisasi peningkatan koordinasi bagi para KPL atau pengecer resmi dan distributor untuk pengadaan barang tepat waktu; Meningkatkan kesadaran

petani akan sistem perbankan dan manfaat kartu tani; Sosialisai manfaat penggunaan kartu tani; Percepatan percetakan dan pembagian kartu tani; dan Memperbanyak agen Brilink. Berikut ini adalah urutan secara lengkap urutan prioritas alternatif dalam upaya peningkatan penggunaan kartu tani di kabupaten Wonosobo.

Besarnya peranan sektor pertanian yang ada di Kabupaten Wonosobo diketahui masih belum mampu dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Wonosobo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Wonosobo adalah Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 dengan presentase penduduk miskin sebanyak 17,58 persen. Subsidi pupuk merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sehingga kemiskinan akan berkurang. Namun kenyataan dilapangan subsidi pupuk yang disediakan oleh pemerintah masih belum dimanfaatkan petani di Kabupaten Wonosobo secara maksimal yang dikarenakan respon petani Kabupaten Wonosobo terhadap penggunaan kartu tani masih rendah. Hal ini menjadi sebuah ironi, dengan peranan sector pertanian yang begitu besar di Kabupaten Wonosobo berbanding terbalik dengan penyerapan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu tani yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Wonosobo.

Rendahnya realisasi penggunaan kartu tani di Kabupaten Wonosobo mengindikasikan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambatnya. Menurut Ashari dan Hariani (2019) beberapa faktor yang menjadi penghambat program kartu tani diantaranya kondisi lingkungan yang tidak mendukung pemerataan kartu tani, sumber daya yang belum maksimal, dan rendahnya kesadaran petani dan kemampuan agen pelaksana.

Kondisi di lapangan banyak ditemukan masalah yang menjadi penghambat efektivitas penggunaan kartu tani. Diantaranya terdapat beberapa petani mengeluh malas menggunakannya karena kurang mengetahui tata cara penggunaannya. Hal lain yang ditemukan juga terdapat beberapa petani yang menggunakan kartu tani yang dimiliki teman petani lainnya. Sehingga hal tersebut dapat berefek terhadap pemerataan distribusi pupuk bersubsidi. Selain kedua temuan yang telah disebutkan terdapat juga temuan bahwa subsidi pupuk datang tidak sesuai dengan waktunya. Disaat petani membutuhkan pupuk ketika masa tanam namun stok pupuk yang tersedia terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan adanya upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penggunaan kartu tani sehingga pupuk subsidi yang ada dapat terserap dengan tepat sasaran.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, urutan prioritas alternatif/ upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penggunaan kartu tani di kabupaten Wonosobo sebagai berikut: 1) Penyuluhan mengenai perubahan

atau pembaharuan data RDKK bagi penerima kuota yang salah; 2) Penyuluhan mengenai kegunaan atau manfaat kartu tani; 3) Sosialisasi penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan; 4) Sosialisasi peningkatan koordinasi bagi para KPL atau pengecer resmi dan distributor untuk pengadaan barang tepat waktu; 5) Meningkatkan kesadaran petani akan sistem perbankan dan manfaat kartu tani; 6) Sosialisasi manfaat penggunaan kartu tani; 7) Percepatan percetakan dan pembagian kartu tani; dan 8) Memperbanyak agen Brilink.

Melakukan penyuluhan mengenai perubahan atau pembaharuan data RDKK bagi penerima kuota yang salah menjadi penting dilakukan karena dengan adanya penyuluhan ini masyarakat menjadi tahu siapa yang akan menerima bantuan dan masyarakat juga dapat ikut serta mengawasi dalam penyaluran dan pembagian kartu tani sehingga kartu tani yang dibagikan akan tepat sasaran. Tepat sasaran berarti kartu tani diterima oleh masyarakat/petani yang benar-benar membutuhkan sehingga penggunaan kartu tani akan semakin efektif yang akan mendorong dalam peningkatan penggunaan kartu tani guna mendorong serapan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran di kabupaten Wonosobo.

Alternatif prioritas yang kedua adalah Penyuluhan mengenai kegunaan atau manfaat kartu tani. Setelah kartu tani dibagikan dan diterima tepat sasaran kepada petani yang berhak menerimanya, maka sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan dan penyerapan pupuk bersubsidi perlu dilakukan penyuluhan mengenai kegunaan atau manfaat kartu tani. Adanya penyuluhan mengenai kegunaan atau manfaat kartu tani maka para penerima kartu tani (petani) akan semakin memahami bagaimana seharusnya menggunakan kartu tani yang telah mereka. Berbekal pemahaman ini maka intensitas petani dalam menggunakan dan memanfaatkan kartu tani diharapkan dapat meningkat.

Alternatif yang masuk dalam prioritas ketiga adalah Sosialisasi penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan. Sosialisasi penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan merupakan langkah yang penting. Adanya sosialisasi penggunaan pupuk sesuai kebutuhan diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk secara berlebihan oleh petani sehingga pemerataan penerimaan dapat terlaksana. Selain itu penggunaan pupuk sesuai kebutuhan juga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh petani.

Kemudian alternatif prioritas keempat yaitu peningkatan koordinasi bagi para KPL atau pengecer resmi dan distributor untuk pengadaan barang tepat waktu. Tepat waktu yang dimaksud adalah ketika petani sedang dalam masa tanam dan membutuhkan pupuk untuk tanamannya maka pupuk yang dibutuhkan telah tersedia dengan artian tidak ada keterlambatan dalam proses distribusi. Pengadaan barang yang tepat waktu akan meningkatkan kegunaan dan manfaat dari adanya program kartu tani.

SIMPULAN

Hasil pengujian alternatif secara keseluruhan memperlihatkan alternatif yang menjadi prioritas utama dalam meningkatkan penggunaan akrtu tani di kabupaten Wonosobo yaitu Penyuluhan mengenai perubahan atau pembaharuan data RDKK bagi penerima kuota yg salah. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa alternatif lainnya seperti Penyuluhan mengenai kegunaan atau manfaat kartu tani; Sosialisasi penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan; Sosialisasi peningkatan koordinasi bagi para KPL atau pengecer resmi dan distributor untuk pengadaan barang tepat waktu; Meningkatkan kesadaran petani akan sistem perbankan dan manfaat kartu tani; Sosialisai manfaat penggunaan kartu tani; Percepatan percetakan dan pembagian kartu tani; dan Memperbanyak agen Brilink.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, M. L., & Hariani, D. (2019). Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 574-594.
- George, R., & Goodman, D. J. (2012). Teori Sosiologi. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Gilboa, I. (2010). Rational Choice. London: MIT Press.
- Henry, F. N. (2007). Ekonomi Manajerial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irham, F. (2012). Manajemen Produksi dan Operasi. Bandung: Alfabeta.
- Jorgi, R. S., Gayatri, S., & Dalmiyatun, T. (2020). Relationship Between the Level of Farmer Knowledge and the Effectiveness of Farmer Card Program (Program Kartu Tani) Implementation in Semarang Regency. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 5(2), 88-98.
- Kasper, W. & Streit, M. E. (1998). Institutional Economics: Social Order and Public Policy. Cheltenham, U.K. & Northampton, Mass.: Edwar Elgar.
- Kurniawati, E., & Kurniawan, A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Pati (Kasus di Desa Wotan dan Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo). *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(2).
- Mehra, M. R. (2018). Human Resource management and its importance for today's organizations. *Journal of HR, Organizational Behaviour & Entrepreneurship Development*, 2(2), 15-20.
- Moko, K. W. (2017). Persepsi petani terhadap program kartu tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Skripsi. Universitas Sebelas Maret
- Nugroho, A. D., Siregar, A. P., Andanari, E., Shafiyudin, Y., & Christie, J. I. (2018). Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Agrisocionomics*, 2(1), 70-82.
- Pardiyanto, M. A. (2021). Kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan wabah Covid 19. *SPEKTRUM*, 17(2).

- Pasaribu, S. (2020). Persepsi Petani dan Permasalahan Program Kartu Tani Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(2).
- Priyono (2008). Metode Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Zifatama Publishing
- Soeharno. (2009). Teori Mikro Ekonomi. (Yogyakarta): Andi Offset
- Subandi, S. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia Journal of Arts Research and Education*, 11(2), 62082.
- Syahrum, & Salim. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Medan: Cita-pustaka Media
- Zulaiha, A. R., Nurmalina, R., & Sanim, B. (2018). Kinerja Subsidi Pupuk di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 4(2), 271-271.

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN

Asep Ferry Bastian, Faisal Tomi Saputra, Khusaini Khusaini

PENDAHULUAN

Upaya pemberdayaan UMKM merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang menyatakan bahwa UMKM merupakan integrasi pembangunan ekonomi nasional yang diharapkan mampu meningkatkan dan melaksanakan pemerataan pendapatan serta menciptakan lapangan kerja. Ini dapat diartikan bahwa keberadaan UMKM diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Budiyanto & Effendy, 2020). Mengingat UMKM memiliki kemampuan daya serap tenaga kerja yang cukup besar, memiliki etos kerja, penyumbang ekspor produk non migas, serta potensi yang besar untuk dikembangkan (Prasetyo, 2010; Mulyono, 2010; Nuraini et. al; 2016; Munandar, 2016; Agyapong et al., 2017), serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi global dan benteng tangguh perekonomian (Cosenz & Noto, 2015; Peter et al., 2019; Rapih, 2015). Kontribusi UMKM terhadap pemerataan ekonomi Indonesia ditunjukkan dengan kontribusi terhadap PDB yang mencapai 56% (Layyinaturrobianyah & Muizu, 2017).

UMKM sebagai salah satu mesin perekonomian Nasional. Bagi daerah, eksistensi UMKM juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah, yakni upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan pendapatan di daerah (Blakely, 1994). Pemerintah Kota Tangerang berekepentingan untuk menjaga agar perekonomian daerah tetap tumbuh dan berkembang dengan kontribusi UMKM yang ada.

Peran pemerintah dibutuhkan karena saat ini UMKM Kota Tangerang menghadapi berbagai permasalahan akibat Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, yakni menyebabkan UMKM di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian (OECD, 2020). Bahkan hasil survey terhadap pelaku UMKM di Kota Tangerang pada akhir tahun 2020 menunjukkan bahwa pelaku UMKM tidak dapat melakukan pembayaran angsuran mencapai 54.5%, hanya membayar pokok pinjaman sebanyak 9.1%, hanya membayar beban bunga sebanyak 6.1%, dan menjadwalkan ulang selama 6 bulan sebanyak 9.1%. Sedangkan

sebanyak 21.2% pelaku UMKM tidak mengalami kendala dengan kredit yang dialaminya. Permasalahan lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kurang lebih 45% pelaku UMKM di Kota Tangerang terkendala dengan penggunaan teknologi komputer dalam memproduksi barang dan distribusi barang (Bastian & Khusaini, 2020).

Bentuk nyata yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM saat selain pemberian dana stimulan, yakni program pemberdayaan oleh pemerintah daerah. Program pemberdayaan UMKM merupakan program yang berkesinambungan untuk disediakan oleh pemerintah daerah berupa pelatihan dan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan dapat meningkatkan omset penjualan dan kesejahteraan masyarakat (Budiyanto & Effendy, 2020; Jamaluddin, 2019). Studi lain juga menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui pendampingan dapat meningkatkan pemahaman, dan nilai tambah sehingga meningkatkan pendapatan (Handayani et al., 2020). Dari aspek teknologi informasi, pelaku UMKM diberikan pendampingan tentang pemasaran secara online. Hasil studi menunjukkan bahwa program pendampingan ini sangat penting dalam meningkatkan penjualan pada masa pandemic Covid-19 (Muzdalifah et al., 2020). Penggunaan pemasaran online tidaklah cukup untuk mengdongkrak penjualan hasil produksi UMKM, namun dibutuhkan juga dibutuhkan pemahalan digitilaisasi hukum dan ekonomi (Arrizal & Sofyantoro, 2020).

Program pemberdayaan UMKM melalui pendampingan sangat dibutuhkan pada masa sulit, keterbatasan aktivitas, serta penurunan pendapatan masyarakat. Hal ini ditujukan, agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kompetensi dan kapasitas dalam menghadapi ketatnya persaingan, krisis, dan kondisi pandemi. Disamping itu, pelaku UMKM diharapkan mampu menguasai dan memperluas pasar. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka dibutuhkan program pemberdayaan UMKM, berupa pendampingan yang efektif, tepat sasaran, dan integratif. Program tersebut dapat berjalan dengan baik, jika ada keterlibatan pemangku kepentingan, yakni pemerintah, perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya. Karena, kegiatan pendampingan UMKM berupa pelatihan yang kurang tepat sasaran terbukti kuat tidak optimal dalam meningkatkan pendapatannya (Sari, et al., 2019).

Studi ini berfokus pada identifikasi kebutuhan personel pendamping dan model pemberdayaan melalui program pendampingan UMKM di Kota Tangerang oleh pemerintah daerah. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan kebijakan pemerintah Kota Tangerang tentang pentingnya program pendampingan bagi UMKM selama masa pandemic Covid-19, sehingga pelaku usaha UMKM dapat bertahan dan meningkatkan produktivitasnya. Peneliti menggunakan studi kepustakaan (dokumentasi) berupa hasil publikasi jurnal, dokumen yang dipublikasikan oleh pemangku

kepentingan, dan dokumen lainnya. Rancangan penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menafsirkan makna data sehingga peneliti memperoleh gambaran yang holistik tentang kondisi yang apa adanya (Sugiyono, 2017)..

PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan pemingkatan peran aktif dari masyarakat dalam sebuah aktivitas (Mustikarini & Santi, 2020). Pemberdayaan juga didefinisikan sebagai proses dimana individu memiliki keinginan kuat untuk berpartisipasi kontrol, peristiwa, pengaruh, serta instistusi yang mengubah kehidupannya (Mardikanto & Soebiato, 2013; Soleh, 2014). Dalam pemberdayaan, sorang individu, kelompok, dan atau masyarakat berupaya untuk mengendalikan kehidupannya dan bekerja untuk kepentingan masa depannya (Faisal, 2020). Pendapat lain dinyatakan oleh (Zubaedi, 2007) yang menyatakan bahwa kemampuan penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan melalui paritisipasi dalam kehidupan guna menentukan masa depannya juga disebut sebagai pemebrdayaan.

Bertitik tolak pada pendapat tersebut, maka pemberdayaan dapat dikatakan sebagai bentuk keterlibatan seseorang atau kelompok masyarakat dalam sebuah kegiatan untuk meningkatkan manfaat yang diperoleh guna menentukan masa depan yang lebih baik. Pemberdayaan dibutuhkan semua elemen masyarakat sesuai dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing dalam kehidupannya. Pemberdayaan mengidikasikan pada otonomi pengambilan keputusan oleh individu atau sekelompok masyarakat yang berdasar pada aspek demokrasi. Isu-isu lokal dapat diangkat sebagai fokus pemberdayaan, jika masyarakat telah siap (Bebbington, 2000). Dimensi pemberdayaan meliputi peciptaan masyarakat untuk berkembang, memperkuat potensi masyarakat, serta membentengi diri dari kekuatan yang melemahkan.

Pranaka & Priyono (1996) menyatakan bahwa proses pemberdayaan harus memlalui tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap partisipasi, dan tahap pemebebasan. Pada tahap awal, semua proses pemberdayaan bersumber dari pemerintah, diinisiasi oleh pemerintah, dan menghadapi masyarakat. Pada tahap partisipasi, proses pemberdayaan bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Sedangkan pada tahap pembebasan, proses pemberdayaan bermuara dari masyarakat/komunitas yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan untuk membangun kemandirian. Masyarakat telah menemukan potensi dan kekuatan sendiri sehingga dapat mewujudkan pembahuruan realisasi diri. Keberhasilan proses pemberdayaan tersebut harus mempedomani prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, serta berkelanjutan (Fitriani, 2021).

2. Pendampingan

Pendampingan merupakan aktivitas membberikan konsultasi terhadap pihak yang didamping. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Singgih (2003) yang menyatakan bahwa pendampingan sebagai kegiatan konsultasi. Orientasi dari pendampingan diarahkan pada hubungan antara seorang ahli dengan yang tidak ahli. Orang yang diampingi dianggap/diasumsikan sebagai pihak kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan, serta memiliki potensi untuk berkembang. Sedangkan pendamping mempunyai keahlian dalam memahami seluk beluk permasalahan dan memecahkannya. Tujuan dari pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan, mengembangkan kemampuan, kekuatan, potensi, dan sumber daya agar dapat memperkuat dirinya sendiri. Wiryasaputra (2006) menyatakan bahwa fungsi pendampingan adalah penyembuhan, penompang, pembimbing, penjaga hubungan, dan pemberdayaan.

Terkait dengan UMKM, tujuan program pendampingan adalah agar pelaku UMKM mampu mengelola usaha lebih baik lagi dengan meminimalisasi permasalahan yang dialaminya. Artinya, pelaku usaha mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikannya dengan baik. Sedangkan pendampingan UMKM harus terintegrasi yang lebih menekankan pada peningkatan sistem kelembagaan dan aspek manajerial. Kegiatan pendampingan dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan melibatkan konsultan ahli yang profesional (Wahyudi, 2009). Konsultan ahli ini memberikan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan operasionalisasi usaha. Keunggulan pendampingan UMKM terpadu lainnya adalah menggunakan pendekatan yang lebih proaktif dan intensif, serta pendekatan yang lebih personal. Namun model pendampingan integratif memiliki kelemahan, yaitu (1) banyak lembaga belum tersedia konsultan ahli; dan (2) kegiatan pendampingan lebih bersifat proyek (Wahyudi, 2009).

Sedangkan model pendampingan UMKM terpadu yang dapat dirumuskan dengan cara: (a) berfokus pada pembuatan produk sampai dengan pemasaran; (b) melakukan dokumentasi yang baik; (c) lembaga menyediakan tenaga ahli/konsultan guna memberikan edukasi. Terdapat indikator tahapan UMKM dalam setiap tahapan perkembangan pembangunan. Namun, rumusan indikator perkembangan UMKM masih belum tersedia, sehingga tidak memungkinkan untuk memahami tahapan dan kondisi UMKM yang membutuhkan perlakuan tertentu. Dengan *treatment* tersebut, UMKM mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan (Sari, 2019).

3. Keadaan UMKM di Kota Tangerang

UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang “Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

pasal 1 menyatakan bahwa “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil”. Besar kecilnya usaha UMKM ditentukan dengan jumlah kekayaan bersih dan jumlah karyawan yang dimilikinya. Semakin besar kekayaan bersih, maka kriteria usaha tersebut semakin naik kelas dari usaha mikro ke usaha kecil, dari usaha kecil ke usaha menengah dan usaha besar.

Menurut data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil dan menengah di Kota Tangerang adalah semakin meningkat, namun pertumbuhannya masih fluktuatif (Badan Pusat Statistik, 2020). Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Perkembangan Jumlah UKM di Kota Tangerang, 2016 - 2020

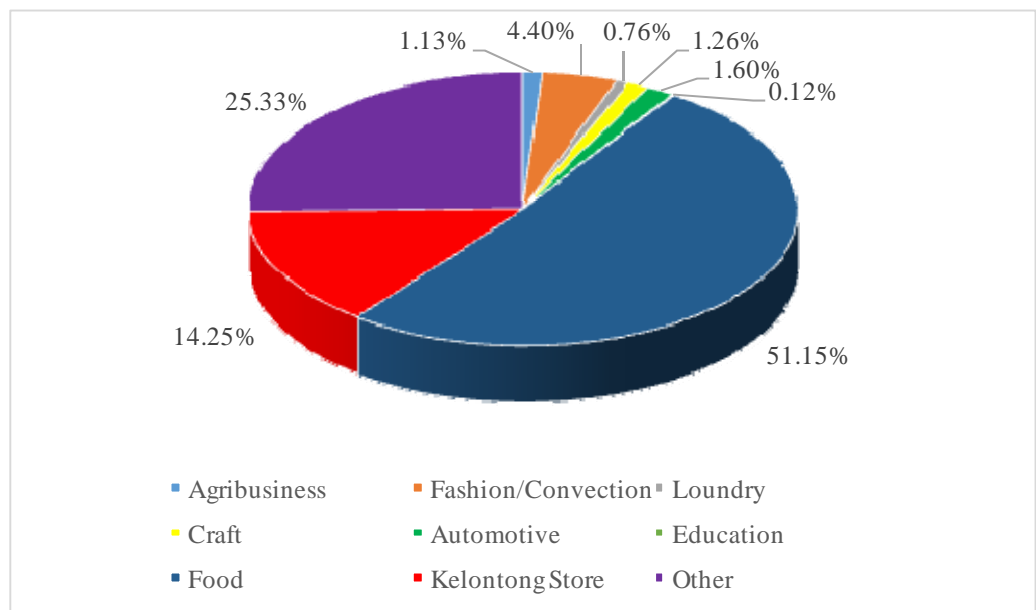
Tahun	Jumlah	Pertumbuhan
2016	10.533	-
2017	10.675	1.35%
2018	11.746	10.30%
2019	12.508	6.48%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Berdasarkan tabel 1 diatas, tahun 2016 jumlah UKM di Kota Tangerang sebanyak 10,533 unit, kemudian naik sebesar 1,35% menjadi 10,675 unit pada 2017. Pada 2018, tingkat peningkatannya cukup signifikan, yakni mencapai 10,03% atau sebanyak 11,746 unit. Peningkatan tersebut tak lepas dari upaya pemerintah daerah yang mendorong pengembangannya, diantaranya Tangerang LIVE, bahwa Kota Tangerang merupakan tempat yang layak investasi. Selanjutnya, pada 2019 jumlah UMKM meningkat lagi sebesar 6,48% sehingga menjadi 12,508 unit. Jadi dalam kurun waktu 4 tahun, tingkat peningkatannya mencapai 17,75%.

Sebuah sektor mengacu pada pembagian terperinci dari sistem struktur organisasi unit bisnis atau individu yang terlibat dalam produksi homogen dalam ekonomi nasional (Phan et al., 2015). Sektor UMKM di Kota Tangerang meliputi sub sektor agrobisnis, fashion konveksi, jasa laundry, kerajinan, otomotif, pangan (termasuk minuman), pendidikan, toko warung kelontong, dan lainnya sebanyak 62.248 unit UMKM. Dari ke 9 sub sektor tersebut, UMKM yang paling tinggi bergerak pada sub sektor makanan dan minuman, yakni

mencapai 51.16% atau sebanyak 31.287 unit UMKM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM (2020), data diolah

Gambar 1 Jumlah UMKM Kota Tangerang (Persentase), 2020

Dari gambar 1 juga menjelaskan bahwa jumlah UMKM yang bergerak pada subsektor jasa lainnya dan warung kelontong masing-masing sebanyak 25.29% atau 15.735 unit UMKM dan warung kelontong sebanyak 14.27% atau 8.879 unit UMKM. Adapun jumlah UMKM yang bergerak pada sub sektor jasa pendidikan dan jasa laundry adalah paling sedikit yakni masing-masing sebanyak 0.12% atau 77 unit UMKM dan 0.76% atau 473 unit UMKM.

Jumlah UMKM sebanyak 62.248 tersebar di seluruh kecamatan Kota Tangerang. Adapun jumlah UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2020, seperti terlihat pada tabel 2 berikut.

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang paling tinggi berlokasi di Kecamatan Pinang sebanyak 13.80% atau 8.592 unit UMKM dan di Kecamatan Karawaci yakni sebanyak 11.39%. Sedangkan yang paling sedikit UMKM berlokasi di Kecamatan Batuceper sebanyak 5.17% atau 3219 unit UMKM dan di Kecamatan Jatiuwung sebanyak 4.33% atau 2.693 unit UMKM.

Tabel 2 Jumlah UMKM per Kecamatan Berdasarkan 9 Sektor

Kecamatan/ Jenis Usaha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah
Tangerang	24	153	30	41	88	3336	5	857	946	5480
Cipondoh	54	240	42	70	92	1865	12	695	1282	4352
Pinang	156	322	73	121	144	3188	8	1364	3216	8592
Larangan	36	722	39	71	67	1944	7	628	820	4334
Ciledug	111	278	82	48	94	2200	3	802	984	4602
Karang Tengah	159	179	31	60	49	1622	7	647	998	3752
Batuceper	8	78	13	32	42	1996	3	334	713	3219
Benda	43	82	32	71	67	1980	6	591	535	3407
Neglasari	16	56	21	42	84	2829	2	478	1723	5251
Periuk	29	225	59	64	87	2592	3	727	1728	5514
Jatiuwung	8	83	9	33	42	1652	0	426	440	2693
Cibodas	21	114	12	45	33	1983	5	572	1176	3961
Karawaci	38	210	30	86	107	4640	16	758	1206	7091
Jumlah	703	2742	473	784	996	31827	77	8879	15767	62248

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM (2020)

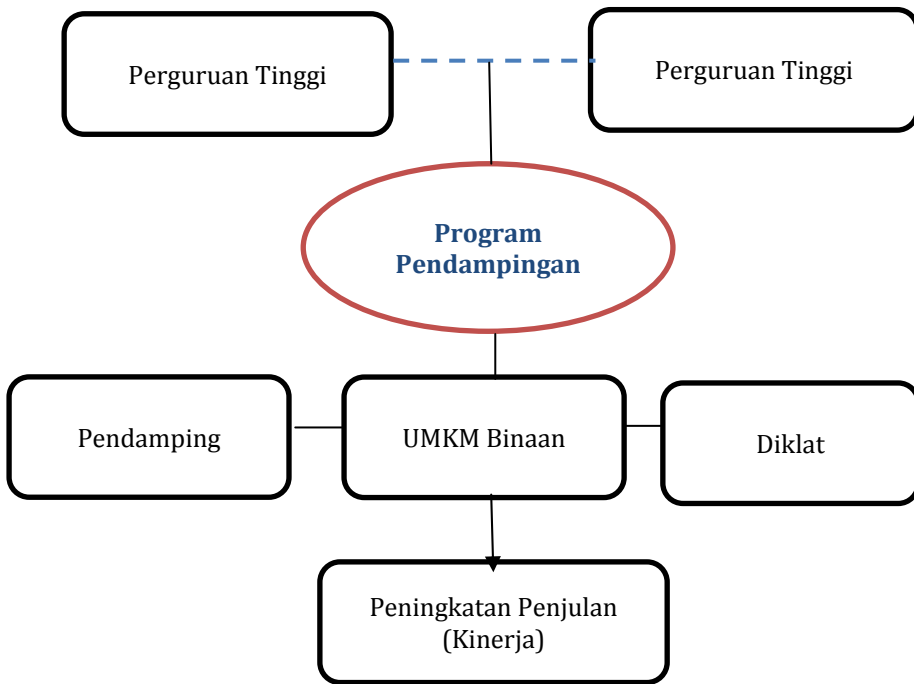
Catatan: (1) agrobisnis, (2) fashion konveksi, (3) jasa laundry, (4) kerajinan, (5) otomotif, (6) pangan (termasuk minuman), (7) pendidikan, (8) toko warung kelontong, (9) lainnya

4. Pendampingan UMKM di Kota Tangerang

UMKM berbeda dari usaha yang lebih besar karena rentang skala dan ruang lingkup dan sumber daya manusia yang lebih terbatas, sehingga membatasi jangkauan pengetahuan dan pengalaman khusus organisasi (Amankwah-Amoah et al., 2020), serta ada keterbatasan dalam hal kemampuan mengelola risiko dan mitigasi dari kesulitan. Oleh karena salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pendampingan UMKM, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19, agar UMKM tetap eksis. Dalam kajian ini, model pendampingan sebagai berikut pada Gambar 2.

Gambar 2 di bawah menjelaskan bahwa kerja sama antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah merupakan hal penting untuk melakukan program pemberdayaan UMKM berupa pendampingan. Bentuk kegiatan pendampingan UMKM berupa program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan yang berfokus pada pemahaman pengetahuan tentang entrepreneurship, pengelolaan karyawan, model pemasaran, pengelolaan keuangan, hukum, dan sebagainya. Dukungan dari pemerintah, seperti pendanaan, sarpras kerja pendampingan, fasilitas display galeri produk, dan pembiayaan. Keterlibatan dosen sebagai pendamping (konselor) dari ahli yang tersedia di perguruan tinggi Kota Tangerang sangat dibutuhkan serta didukung oleh pemangku kepentingan diantaranya Kadin, Konsultan, PT. Telekomunikasi Indonesia, dan sebagainya. Mereka melakukan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan panduan, kurikulum, kegiatan, dan instrumen evaluasinya agar tujuan

peningkatan kinerja UMKM dapat tercapai. Bentuk metode kegiatan pendampingan yang disepakati oleh para pemangku kepentingan berupa konseling dan pelatihan.



Gambar 2 Model Pendampingan UMKM

Kegiatan konseling dari dosen untuk mendiagnosis bisnis melalui *SWOT Analysis* yang digunakan dalam Studi Kelayakan Bisnis, sehingga dapat ditentukan solusi dan rekomendasinya. Kemudian dilakukan proses konseling berkaitan dengan permodalan, Sumber Daya Manusia, produksi, kemampuan teknologi informasi (TI) dan pasar serta manajerialnya yang menjadi rencana program pendampingan UMKM. Sedangkan metode pelatihan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola usaha baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Ada beberapa metode pendampingan yang bisa digunakan dalam program ini. Misalnya dengan menggunakan Metode Pelatihan CEFE (Competency Based Economies Throug Formation of Enterprise) yang biasa digunakan dalam program kewirausahaan. Metode Pelatihan CEFE, metode yang dikembangkan oleh CTZ (Ekonomi Berbasis Kompetensi Melalui Pembentukan Wirausaha).

Pendekatan CEFE memiliki keunggulan dibandingkan metode lainnya, yaitu bahwa wirausahawan harus selalu sadar akan kemampuan yang dimilikinya dan kondisi lingkungannya, jika ingin sukses. Dengan kemampuan yang

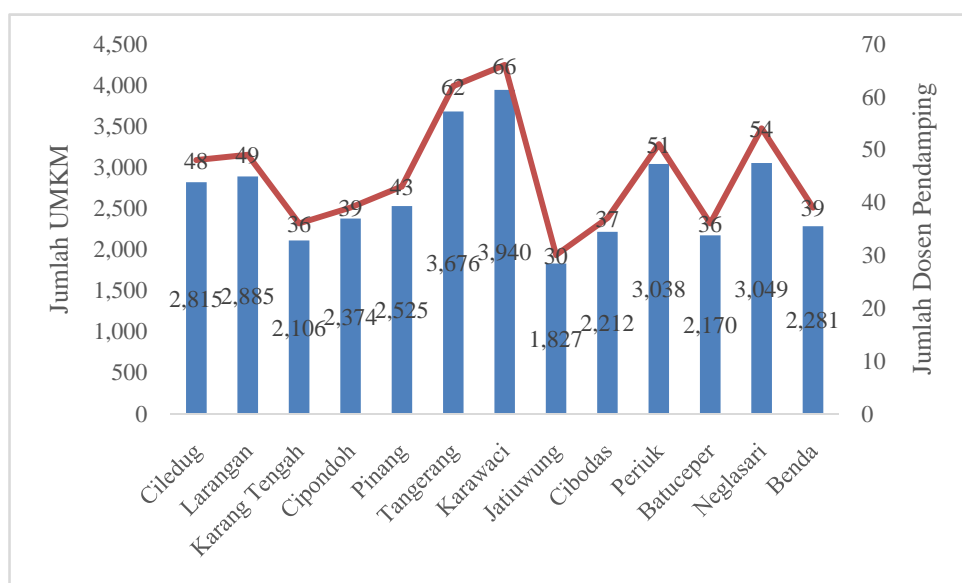
dimiliki oleh pengusaha, seorang pelaku usaha mampu mengidentifikasi dan merefleksikan proyeknya sendiri jika telah dinyatakan layak, sehingga mampu mengoperasionalkannya. Pengusaha harus belajar sendiri, harus menguji ide-ide mereka, mempertimbangkan kelayakan proyeknya dan menyiapkan rencana bisnis yang baik. Pengusaha dapat menentukan solusi permanen, berinovasi, mengurangi ketergantungan, serta meningkatkan daya saing. Bagi pengusaha pemula, mereka memiliki kepercayaan diri tinggi dalam mengerjakan proyek yang didukung oleh keuangan dan bantuan lainnya. Sedangkan bagi calon pengusaha, pada awal hanya diberikan masukan saat kondisi tertentu, misalnya terkait dengan intruksi atau operasional kerja. Adapun wirausahawan yang telah berhasil memiliki pengalaman wirausaha yang nyata. Perluasan dan pengembangan usaha telah sesuai dengan operasional yang seharusnya. Mereka mampu merencanakan dan mengelola pertumbuhan, ekspansi, dan diversifikasi bisnis mereka dengan lebih baik.

Salah satu elemen yang memiliki peran penting dalam program pemberdayaan masyarakat kolaboratif adalah universitas. Universitas memiliki laboratorium inkubasi bisnis, bertindak sebagai penasehat sekaligus pendamping bagi pelaku UMKM di Kota Tangerang. Untuk mengetahui jumlah rasio pendamping yang ideal dan jumlah UMKM yang perlu dibina berdasarkan kesesuaian disiplin ilmu yang dikuasai, maka dilakukan inventarisasi data dari sumber daya yang ada. Program studi yang dapat dilibatkan dalam program pendampingan ini antara lain: Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Komunikasi dan Bisnis Digital. Jumlah dosen pendamping yang tersedia di Kota Tangerang sebanyak 590 dosen dari 5 universitas.

Sementara itu, jumlah UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang pada Tahun 2020 sebanyak 62.248 UMKM yang terdiri atas 9 sektor di antaranya: agrobisnis, *fashion* konveksi, jasa *laundry*, kerajinan, otomotif, pangan (termasuk minuman), pendidikan, toko warung kelontong, dan lainnya. Akan tetapi agar lebih fokus terhadap pelatihan pendampingan berkaitan tentang permodalan, SDM, produksi, kemampuan teknologi informasi (TI) dan pasar serta manajerial, maka ditentukan tujuh sektor yang diprioritaskan dalam pemberdayaan pendampingan UMKM di Kota Tangerang. Jumlah dosen pendamping dan jumlah UMKM yang ditetapkan memperoleh pendampingan terdistribusi pada setiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah UMKM dari tujuh sektor yang telah ditentukan sebanyak 34.898 dibagi dengan jumlah dosen (pendamping) sebanyak 590 orang, sehingga rasio yang dihasil adalah 1 : 59 yang berarti 1 dosen pendamping membina sebanyak 59 pelaku UMKM. Hasil ini dapat memberikan gambaran bahwa program pemberdayaan UMKM melalui program pendampingan sangat terbuka untuk dilaksanakan dengan melibatkan

perguruan tinggi. Pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan pendampingan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Universitas juga mendukung dalam aspek penelitian, laboratorium inkubasi bisnis dan pendampingan UMKM. Pihak swasta yang memberikan dukungan dalam bentuk *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) ataupun pinjaman lunak bagi UMKM. Media massa, memeberikan informasi yang edukatif dalam sosialisasi program pendampingan UMKM. Serta peran aktif masyarakat yang juga membantu dalam partisipasi guna memberdayakan pelaku UMKM yang pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yakni peningkatan kinerja dan pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang.



Gambar 3 Perbandingan Antara Jumlah UMKM dan Dosen Pendamping

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah pendapatan yang menurun, sulitnya akses permodalan, hambatan produksi, dan bahan baku yang mahal. Pelaksanaan pendampingan peningkatan produksi menjadi penting dalam mengembangkan usaha UMKM. Pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha agar mampu menggali dan mengolah potensi daerah, sehingga menjadi produk unggulan, serta melakukan inovasi terhadap produk yang sudah ada. Pelaksanaan pendampingan peningkatan penjualan (marketing) produk UMKM, penyusunan laporan keuangan, manajemen dan mitigasi risiko, digitalisasi penjualan akan berdampak baik dalam meningkatkan penjualan di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka program pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu dilaksanakan dalam meningkatkan pengembangan UMKM terutama pada masa pandemi Covid-19 sehingga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat mendorong keterlibatan melibatkan secara nyata universitas, bahkan swasta, media, dan masyarakat dalam menjalankan program pendampingan pemberdayaan UMKM di Kota Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amankwah-Amoah, J., Khan, Z., & Wood, G. (2020). COVID-19 and Business Failures: The Paradoxes of Experience, Scale, and Scope for Theory and Practice. *European Management Journal*, 39(2), 179–184.
<https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.09.002>
- Amri, A. (2021). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130.
- Andayani, I., Roesminingsih, M. V., & Yulianingsih, W. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1), 12–20.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/JPN/article/view/20221>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Provinsi Banten Dalam Angka 2020* (Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (ed.). BPS Provinsi Banten.
- Bastian, A. F., & Khusaini. (2020). Analisis Pengembangan UMKM dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Tangerang. *Bappeda Kota Tangerang*.
- Budiyanto, A., & Effendy, A. A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Mandiri*, 4(1), 80–93. <https://doi.org/10.33753/mandiri.v4i1.77>
- Faisal, M. (2020). Empowerment Model for the Poor Communities in Urban Areas: A Study on Low-Income Households in Makassar. *Society*, 8(2), 517–528. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.180>
- Fitriani, L. (2021). *Efektivitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Handayani, T., Rahmi, M., & Fathoni, A. (2020). Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Usaha Mikro Terdampak Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Jati Jakarta Selatan. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(2).
<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/975/765>
- Jamaluddin, F. (2019). *Program Pemberdayaan Petani Landless Sebagai Upaya*

Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petanu Landless: Essay (pp. 1–5). IPB University.

Kemenkop-UKM. (2020). *Menkop dan UKM Paparkan Skema Pemulihan Ekonomi KUKM di Masa dan Pasca COVID-19*.

Layyinaturrobaniyah, & Muizu, W. O. Z. (2017). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikrodi Desa Purwadadi Barat dan Pasirbungur Kabupaten Subang. *Pekbis Jurnal*, 09(02), 91–103.

Muzdalifah, L., Novie, M., & Zaqiyah, S. (2020). Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju UMKM Go-Digital di Era Pandemi Covid 19 dan Era New Normal Bagi Pelaku UMKM Sidoarjo. *Seminar Nasional Sistem ...*, 2200–2208. <https://www.jurnalfiti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/296>

OECD. (2020). *SME Policy Responses: Tackling Coronavirus (Covid-19) Contributing to A Global Effort*.

Phan, D. H. B., Sharma, S. S., & Narayan, P. K. (2015). Stock Return Forecasting: Some New Evidence. *International Review of Financial Analysis*, 40, 38–51. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.05.002>

Sari, Y. P. (2019). Model Pendampingan UMKM Pengolahan Hasil Laut dengan Metode Pendekatan Pendampingan Terintegrasi. *Jurnal Monex*, 8(1), 293–302.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Wahyudi, I. (2009). *Program Pendampingan Terintegrasi Alternatif Solusi Kendala Non-Modal bagi UKM*.

Zubaedi. (2007). *Pemberdayaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222).

ANALISIS KEBERLANJUTAN UTANG UNTUK MENDORONG AKSELERASI EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA

Yozi Aulia Rahman, Dwi Rahmayani, Bayu Bagas Hapsoro

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melakukan utang luar negeri dari proses transisi dari masa orde baru ke masa orde baru dan diperparah dengan buruknya kondisi perekonomian setelah terjadinya krisis moneter 1998 (Purwanto, 2005). Menurut Patria & Nur (2015), negara-negara berkembang terjadi kesenjangan modal sehingga membutuhkan utang dari luar negeri untuk menutupi kesenjangan antara tabungan domestik dengan kebutuhan investasinya karena jumlah modal dalam negeri tidak mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi. Kemudian utang dari luar negeri untuk menutup kesenjangan antara ekspor dan impornya. Menurut Azis (2011), alasan suatu negara mengajukan utang luar negeri untuk menutup defisit anggaran dimana terjadi selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara sehingga negara berusaha mencari sumber-sumber pembiayaan untuk melakukan pembangunan negara. Menurut penelitian Suharno (2008), defisit anggaran memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap meningkatnya utang luar negeri Indonesia.

Rusyidi (2014) menjelaskan tiga faktor utama alasan pemerintah melakukan utang luar negeri; (1) *kesenjangan anggaran*, kondisi ini disebabkan karena belanja pemerintah lebih dari penerimaan pemerintah, (2) *kesenjangan investasi dan tabungan*, kondisi ini terjadi karena rendahnya jumlah tabungan dan investasi dari dalam negeri. (3) *kesenjangan transaksi berjalan*, kondisi tersebut terjadinya karena kesenjangan pembiayaan antara impor dan ekspor barang atau jasa. Modal atau investasi asing asing dalam bentuk pinjaman luar negeri terdiri dari hibah (*grant*), pinjaman lunak (*soft loan*), dan pinjaman dengan syarat (*hard loan*) telah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan proyek-proyek pembangunan negara atau investasi pemerintah di sektor publik (Atmadja, 2000; Rangkuty & sari, 2005).

Dalam perkembangannya, utang luar negeri tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga oleh pihak swasta, baik Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan defisit fiskal karena tingginya belanja pemerintah dan rendahnya penerimaan pajak (Ncanywa & Masoga, 2018; Chatterjee et al, 2019). Tujuan pihak swasta mencari pembiayaan utang adalah untuk memperluas kapasitas bisnis mereka, seperti perluasan usaha dengan membuat pabrik atau cabang-cabang baru dan termasuk investasi yang sangat besar untuk mendorong penggunaan teknologi canggih dalam aktivitas bisnis mereka. Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan utang Indonesia baik yang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak swasta tahun 2016-2020.

Tabel 1. Jumlah Utang Luar Negeri Pemerintah dan Swasta Tahun 2016-2020 (dalam juta USD)

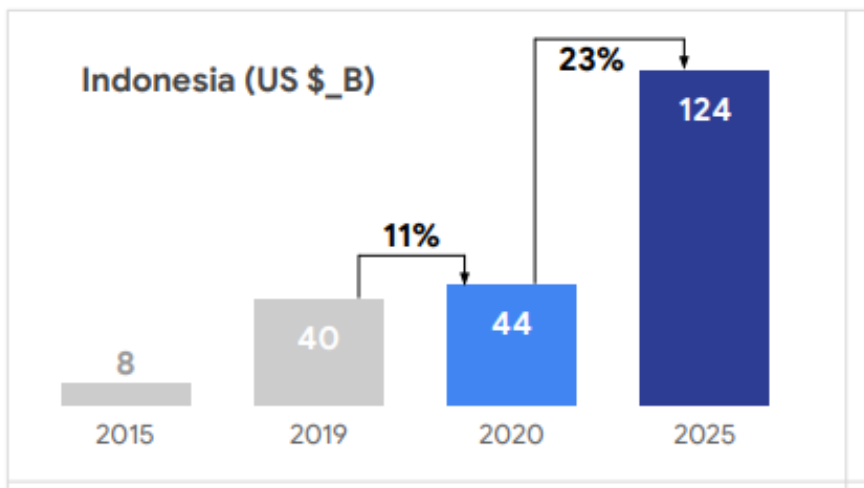
Jenis Utang	2016	2017	2018	2019	2020
Pemerintah & Bank Sentral	158.283	180.662	186.275	202.872	209.246
Swasta	161.722	171.847	189.155	206.690	208.235
Total	320.005	352.509	375.430	409.562	417.481

Sumber: Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Bank Indonesia, (2021)

Berdasarkan tabel 1 di atas, total utang luar negeri Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah utang luar negeri sebesar USD 320 miliar kemudian meningkat drastis selama 5 tahun menjadi USD 417 miliar pada tahun 2020. Jika dilihat porsi antara utang luar negeri pemerintah dan swasta tidak jauh berbeda, antara 52%-48% setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan investasi atau modal swasta juga besar untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan kemampuan pemerintah maupun swasta dalam membayarkan cicilan utang baik cicilan pokok maupun bunganya. Menurut Basten et al (2021), akumulasi pinjaman luar negeri dalam jumlah besar menimbulkan kewajiban pokok serta bunga, menyebabkan nominal pembayaran utang menjadi lebih besar dari jumlah atau nominal peminjamannya. Dengan demikian prioritas pengeluaran negara bukan lagi untuk peningkatan produktivitas nasional, melainkan untuk pembiayaan beban fiskal negara, termasuk jika utang swasta termasuk menjadi jaminan oleh pemerintah.

Dalam Ekonomi digital, proses produksi suatu barang maupun jasa perusahaan dibantu oleh teknologi informasi (ICT) untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Kelebihan ekonomi digital salah satunya adalah memberikan efisiensi dan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menambah nilai suatu produk. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur ICT untuk mendukung ekonomi digital, seperti jaringan internet dan listrik. Termasuk di dalamnya penggunaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Oleh

karena itu, Presiden Joko Widodo sangat berusaha untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia, termasuk pengembangan infrastruktur digital untuk menunjang aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Data menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia meningkat setiap tahunnya dan bahkan diprediksi bisa tumbuh signifikan pada tahun 2025. Indonesia memiliki peluang dalam meningkatkan nilai ekonomi digital karena sudah banyak masyarakat yang memiliki literasi digital yang tinggi termasuk penggunaan transaksi ekonomi secara digital. Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan dan proyek nilai ekonomi digital Indonesia dari tahun 2015-2025.



Sumber : SEA Internet Economy Report, 2020.

Gambar 1 Perkembangan dan proyek nilai ekonomi digital Indonesia dari tahun 2015-2025.

Berdasarkan gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD 8 miliar. Kemudian pada tahun 2019, nilai ekonomi digital tumbuh signifikan mencapai 400% menjadi USD 40 miliar. Pada tahun 2020, ekonomi digital tumbuh 11%. Kemudian pada tahun 2025, nilai ekonomi digital diprediksi mencapai USD 124 miliar. Menurut del Aquila et al (2003), beberapa subsektor ekonomi digital, seperti pengembangan sarana peralatan komunikasi dan informasi, jasa kirim uang secara elektronik pada jasa perbankan, penjualan barang melalui internet, produksi barang yang membutuhkan kontrol ICT. Peningkatan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam membantu transaksi bisnisnya, seperti pembayaran non-tunai, pemesanan dan juga pemesanan barang atau jasa menggunakan aplikasi.

Namun yang harus diperhatikan adalah mengenai kemampuan dalam membayar utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai peningkatan infrastruktur ekonomi digital. Oleh karena itu, keberlanjutan utang luar negeri patut diperhatikan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Menurut Hakura (2020), utang yang berkelanjutan terjadi jika pemerintah atau debitur memiliki kemampuan untuk kewajiban pembayaran yang ada saat ini dan kewajiban pembayaran di masa depan tanpa bantuan keuangan yang luar biasa atau terjadinya gagal bayar atau *default*. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis keberlanjutan utang untuk perluasan ekonomi digital di Indonesia yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Utang Indonesia

Kebutuhan pendanaan untuk peningkatan program-program pemerintah maupun perluasan usaha sektor swasta tidak cukup hanya didanai dari Lembaga keuangan atau investor domestik saja. Lewis dan Woodward (2010) berpendapat bahwa utang pemerintah merupakan metode yang umum digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan merangsang pembangunan ekonomi. Tabel 2 menunjukkan perkembangan total utang luar negeri Indonesia baik utang pemerintah dan swasta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2010-2020.

Tabel 2. Perkembangan Total Utang Luar Negeri Pemerintah dan Swasta terhadap PDB Indonesia, 2010-2020 (persen)

Tahun	Total Utang Luar Negeri/ PDB	Utang Luar Negeri Pemerintah/PDB	Utang Luar Negeri Swasta/PDB
2010	28,55	16,73	11,82
2011	26,64	14,02	12,62
2012	26,95	13,47	13,48
2013	27,24	12,65	14,60
2014	32,27	14,27	18,00
2015	36,06	16,55	19,51
2016	34,82	17,22	17,60
2017	34,50	17,68	16,82
2018	33,91	16,82	17,08
2019	36,59	18,39	18,19
2020	38,97	19,52	19,45

Sumber : Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (2010-2020), diolah.

Selama 11 tahun, utang luar negeri Indonesia terhadap PDB selalu meningkat. Pada tahun 2010, total utang luar negeri terhadap PDB sebesar

28,55%. Kemudian pada akhir tahun 2020, posisi utang luar negeri berada pada angka 38,97%. Untuk utang luar negeri pemerintah terhadap PDB Indonesia angkanya hampir sama dengan utang luar negeri swasta terhadap PDB di kisaran angka belasan persen. Kondisi ini Indonesia masih jauh lebih baik dari kondisi di sebagian besar negara Asia, menurut penelitian Ferrarini dan Ramayandi (2012) menyatakan bahwa Asia Selatan memiliki rasio utang tertinggi di Asia, rata-rata hampir 67%. Kemudian untuk rasio utang di Asia Tengah, Pasifik, dan Asia Tenggara adalah 40-50% dari PDB.

Dampak pandemic covid-19 telah membuat belanja pemerintah meningkat karena harus menjalankan program pemulihan nasional atau PEN yang nilainya mencapai Rp 226 triliun pada pertengahan tahun 2021. Namun di sisi lain, penerimaan negara mengalami penurunan signifikan sehingga membuat defisit pemerintah semakin melebar. Oleh karena itu, Langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan utang luar negeri untuk menutup defisit anggaran. Sementara pihak swasta mencari pendanaan luar negeri karena mengejar beban bunga yang lebih rendah jika dibandingkan dengan mencari pendanaan di dalam negeri. Dampak Pandemi juga dirasakan juga oleh pihak swasta, banyak aktivitas bisnis terhenti karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun program pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), akibatnya utang luar negeri semakin membengkak karena kebutuhan untuk operasional perusahaan. Jika dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maksimal utang dibatasi 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika melihat data di tabel 2, dapat disimpulkan bahwa utang masih dalam batas aman karena masih di bawah aturan. Namun, peningkatan rasio utang juga perlu diwaspadai dengan melakukan pengelolaan utang yang baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Utang Luar Negeri Indonesia berdasarkan Sektor Ekonomi

Alasan pemerintah maupun pihak swasta melakukan utang baik dari dalam negeri maupun luar negeri tentunya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Utang luar negeri dialokasikan untuk membiayai program atau proyek penguatan di masing-masing 17 sektor pembentuk PDB Indonesia; yaitu (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan, (2) Pertambangan & Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara, (5) Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi, (6) Konstruksi, (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (8) Transportasi dan Pergudangan, (9) Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi, (12) Real Estate, (13) Jasa Perusahaan, (14) Administrasi

Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, (15) Jasa Pendidikan, (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (17) Jasa Lainnya.

Tabel 3. Perkembangan Utang Luar Negeri berdasarkan Sektor Ekonomi, 2016-2020 (juta dolar)

Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian	16.829	17.044	16.871	16.997	17.817
Pertambangan & Penggalian	23.759	23.584	29.478	33.632	37.026
Industri Pengolahan	34.818	36.456	36.094	35.664	36.518
Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara	23.691	28.545	34.984	41.591	44.956
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah,	2.620	3.420	4.023	4.653	5.264
Konstruksi	23.842	31.604	33.180	35.055	36.543
Perdagangan Besar dan Eceran	8.742	9.621	9.677	8.859	8.793
Transportasi dan Pergudangan	13.495	15.781	18.606	20.838	22.589
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	416	530	550	531	587
Informasi dan Komunikasi	8.677	9.045	8.182	6.018	6.565
Jasa Keuangan dan Asuransi	66.889	68.346	75.871	78.538	72.300
Real Estate	5.343	6.084	5.864	6.973	6.872
Jasa Perusahaan	1.950	2.403	3.069	3.852	5.020
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	24.129	24.491	25.561	30.791	24.603
Jasa Pendidikan	23.301	27.866	28.714	32.346	34.392
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29.166	35.032	34.419	38.547	49.535
Jasa Lainnya	12.337	12.617	10.286	8.677	8.353
Total	320.006	352.469	375.430	403.563	417.733

Sumber : Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (2010-2020)

Berdasarkan tabel 3, utang luar negeri Indonesia paling banyak didominasi oleh sektor Jasa keuangan dengan rata-rata nilai utang sebesar USD 72 miliar dolar per tahunnya. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial berkontribusi terhadap utang luar negeri Indonesia sebanyak USD 37,4 miliar dolar per tahunnya. Adanya pandemik covid-19 membuat pembiayaan untuk sektor tersebut meningkat tajam selama kurun waktu setahun terakhir. Kemudian berikutnya utang luar negeri yang diperuntukkan untuk sektor industri pengolahan rata-rata USD 35,9 miliar dolar per tahunnya. Kebutuhan sektor industri sangat besar karena struktur ekonomi Indonesia telah bergeser dari sektor pertanian menuju ke sektor industri. Banyak wilayah telah

membangun Kawasan ekonomi khusus atau Kawasan industri yang dapat menunjang perekonomian antar daerah.

Dengan masifnya pembangunan infrastruktur membuat nilai utang luar negeri meningkat karena tidak mungkin proyek-proyek infrastruktur dibiayai semua oleh anggaran negara. Oleh karena itu, utang luar negeri untuk Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara meningkat selama kurun tiga tahun terakhir dengan rata-rata utang sebesar USD 34,75 miliar dolar per tahunnya. Proyek-proyek yang dilaksanakan seperti pembangkit listrik di berbagai daerah, proyek infrastruktur gas dan juga proyek panas bumi. Kemudian pembiayaan yang besar juga dilakukan di sektor konstruksi dengan rata-rata uang sebesar USD 32 miliar dolar per tahunnya. Proyek-proyek yang diprioritaskan seperti pembangunan jalan tol, jembatan, bendungan, saluran irigasi, bandara, Pelabuhan dan proyek-proyek besar lainnya serta rencana untuk membangun ibu kota baru di Pulau Kalimantan.

Untuk meningkatkan penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam, maka pembiayaan sektor pertambangan & penggalian semakin meningkat. Kontribusi sektor tersebut terhadap total utang luar negeri sebesar rata-rata USD 29,4 miliar. Sektor jasa pendidikan juga dibiayai utang dengan jumlah yang cukup banyak dengan rata-rata nilai utang sebesar USD 29,2 miliar dolar per tahunnya. Apalagi amanat Undang-Undang Dasar, anggaran sektor pendidikan harus minimal 20 persen dari total APBN. Kemudian untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pembiayaan untuk sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib cukup besar dengan angka rata-rata USD 25,9 miliar. Kemudian utang luar negeri untuk sektor pertanian di bawah USD 20 miliar setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan sektor pertanian tidak lagi sebagai kontributor terbesar dalam PDB Indonesia.

Hilton (2021) merekomendasikan bahwa pemerintah harus pemerintah harus memastikan disiplin fiskal yang tinggi sebagai langkah awal untuk penggunaan pinjaman dengan secara efektif dan efisien. Distribusi utang tersebut harus digunakan untuk proyek-proyek yang sangat diprioritaskan (sebaiknya belanja infrastruktur atau investasi) yang dievaluasi dengan baik dan mandiri untuk menambah positif PDB. Sektor-sektor ekonomi yang memberikan dorongan besar kepada perekonomian, dapat diprioritaskan untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih banyak.

3. Utang Luar Negeri Indonesia untuk Pengembangan Ekonomi Digital

Sektor ekonomi digital belum diklasifikasikan secara spesifik baik oleh pemerintah, namun beberapa sektor-sektor ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari ekonomi digital, diantaranya adalah, (1) informasi & komunikasi, (2) konstruksi, (3) jasa keuangan dan asuransi, dan (4) pengadaan

listrik, gas, uap/air dan udara (5) perdagangan besar dan eceran, dan (6) transportasi dan pergudangan. Sektor-sektor tersebut juga memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan teknologi informasi, seperti energi listrik dan konstruksi. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada teknologi digital maupun internet seperti jasa keuangan dan asuransi, dan Perdagangan Besar dan Eceran serta transportasi dan pergudangan. Tabel 4 menunjukkan perbandingan kontribusi sektor ekonomi digital dengan sektor lainnya dalam pembiayaan utang luar Indonesia tahun 2016-2020.

Tabel 3. Presentase Pembiayaan Utang Per Sektor Ekonomi 2016-2020 (persen)

Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi Digital	45,42	46,22	48,08	47,31	45,9
Pertanian	5,26	4,84	4,49	4,21	4,27
Pertambangan & Penggalian	7,42	6,69	7,85	8,33	8,86
Industri Pengolahan	10,88	10,34	9,61	8,84	8,74
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	0,82	0,97	1,07	1,15	1,26
Real Estate	0,13	0,15	0,15	0,13	0,14
Jasa Perusahaan	1,67	1,73	1,56	1,73	1,65
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,61	0,68	0,82	0,95	1,2
Jasa Pendidikan	7,54	6,95	6,81	7,63	5,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,28	7,91	7,65	8,02	8,23
Jasa Lainnya	9,11	9,94	9,17	9,55	11,86
	3,86	3,58	2,74	2,15	2

Sumber : Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (2010-2020),

Berdasarkan tabel 3, pembiayaan sektor ekonomi digital mencapai antara USD 45 miliar - USD 48 miliar setiap tahunnya. Dengan semakin meningkatnya pembiayaan tersebut, diharapkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia. Dalam sektor informasi dan komunikasi, pembangunan jaringan telekomunikasi dan inter harus benar-benar diprioritaskan karena wilayah Indonesia sangat luas sehingga semua wilayah dapat dijangkau oleh internet. Sektor jasa keuangan juga melakukan ekspansi dalam layanan perbankan dan keuangan. Pada saat sekarang ini kebutuhan transaksi non tunai semakin besar sehingga ketersediaan dan kestabilan jaringan telekomunikasi dan informasi sangat dibutuhkan. Aplikasi dompet digital (*e-wallet*) pun semakin banyak digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran, seperti Dana, Gopay, dan OVO.

Perkembangan ekonomi digital didorong oleh munculnya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi belanja *on-line*

(*marketplace*) seperti Tokopedia, Bulapak, dan Blibi. Kemudian ada aplikasi GO-JEK yang menawarkan banyak layanan, seperti pesan antar, pesan makanan, dan layanan lainnya yang memudahkan masyarakat. Apalagi dalam masa pandemic covid-19 ini, dimana banyak masyarakat yang melakukan Sebagian aktivitasnya di rumah, membuat transaksi on-line semakin besar nilainya. Bahkan perusahaan seperti GO-JEK dan Tokopedia nilai valuasi usahanya sudah melebihi USD 1 miliar atau Rp 14 triliun atau disebut sebagai *Unicorn*. Bahkan di tahun 2021, Valuasi GO-JEK sudah lebih dari USD 10 miliar atau Rp 140 triliun atau disebut sebagai *Decacorn*.

4. Analisis Keberlanjutan Utang untuk Utang Luar Negeri Indonesia untuk Pengembangan Ekonomi Digital

Dana Moneter Internasional atau IMF (2011) menjelaskan bahwa konsep utang berkelanjutan jika negara di masa depan tidak mengalami gagal bayar (*default*) sehingga tidak perlu untuk menegosiasikan ulang, atau merestrukturisasi hutangnya, atau melakukan penyesuaian kebijakan besar yang tidak masuk akal. Dalam mengukur keberlanjutan utang untuk penguatan sektor ekonomi digital di Indonesia dapat diukur dengan *public debt to revenue ratio* dengan rumus berikut (Adams, 2010) :

$$\text{Public Debt to Revenue Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Revenue}} \times 100\%$$

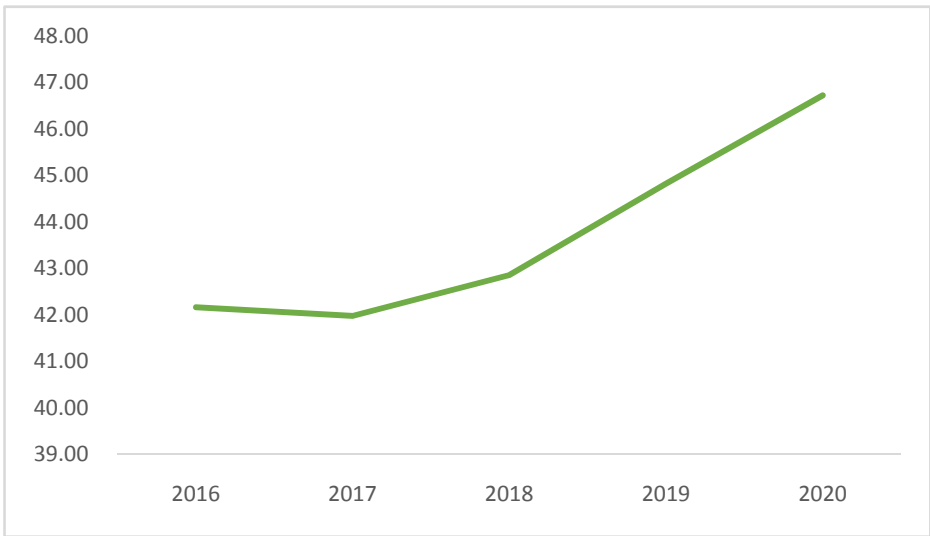
Data yang dibutuhkan untuk menghitung rasio utang publik sektor ekonomi digital terhadap pendapatan, yaitu (1) perkembangan utang dari sektor ekonomi digital (gabungan utang luar negeri pemerintah dan swasta), (2) pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto dari sektor ekonomi digital. Semakin meningkat *public debt to revenue ratio* mengindikasikan bahwa semakin tinggi risiko kegagalan dalam membayar utang dan dalam jangka panjang tidak dapat terjadi keberlanjutan utang (*debt sustainability*). Tabel 4 menunjukkan kontribusi sektor ekonomi digital terhadap PDB Indonesia selama tahun 2016-2020. Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB pada rentang 37,5% - 38,75%. Walaupun masih di bawah 50%, namun angka tersebut membuktikan bahwa perkembangan ekonomi digital sudah meningkat jika dibandingkan dengan satu dekade yang lalu. Salah satu sektor yang masih bertahan di tengah pandemi covid-19 adalah sektor ekonomi digital karena terjadi pergeseran secara besar-besaran aktivitas ekonomi dari aktivitas secara fisik menjadi secara *on-line*.

Tabel 4. Kontribusi sektor ekonomi digital terhadap PDB Indonesia selama tahun 2016-2020 (dalam triliun)

Tahun	Nilai PDB Ekonomi Digital	Kontribusi thd PDB(%)
2016	4.653	37,5
2017	5.162,1	37,99
2018	5.643,3	38,03
2019	6.132,5	38,73
2020	5.909,5	38,29

sumber : BPS, 2016-2020 (diolah)

Pada gambar 2 ditunjukkan hasil perhitungan *public debt to revenue ratio* dari sektor ekonomi digital di Indonesia.



Sumber : BPS dan BI, (diolah)

Gambar 2. *Public debt to revenue ratio* dari sektor ekonomi digital di Indonesia, 2016-2020

Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa *public debt to revenue ratio* dari sektor ekonomi digital di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, rasio utang sektor digital sebanyak 42% kemudian meningkat hingga tahun 2021 dengan rasio 46,72%. Hal ini dikarenakan agresifnya pemerintah maupun pihak swasta membangun infrastruktur informasi dan komunikasi untuk menunjang ekonomi digital dalam lima tahun terakhir ini. Salah satu sektor yang tidak terlalu terdampak pandemi covid-19 adalah sektor ekonomi digital karena semua transaksi usaha dan bisnis dapat dilakukan secara on-line. Kondisi tersebut bisa jadi momentum kebangkitan bagi perekonomian Indonesia. Namun, utang yang semakin tinggi juga perlu

diwaspadai karena bisa saja terjadi potensi gagal bayar, jika utang tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.

PENUTUP

Perkembangan utang luar negeri Indonesia terhadap PDB selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, total utang luar negeri terhadap PDB sebesar 28,55% dan meningkat hingga 38,97% pada tahun 2020. Rasio utang luar negeri terhadap PDB masih di bawah 60% terhadap PDB baik utang pemerintah maupun utang swasta. Kemudian untuk pembiayaan sektor ekonomi digital mencapai rata-rata USD 45,6 miliar setiap tahunnya. Tujuan pembiayaan tersebut untuk mendorong dan memfasilitasi kegiatan dan infrastruktur kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi informasi. Perkembangan ekonomi digital didorong oleh munculnya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi informasi. Untuk keberlanjutan utang menggunakan perhitungan dengan *public debt to revenue ratio*. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio utang sektor digital meningkat setiap tahunnya dan harus diwaspadai resiko gagal utang di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C; Ferrarini, B; and Donghyun, P. (2010). Fiscal Sustainability in Developing Asia. *ADB Economics Working Paper Series* No. 205.
- Atmadja, A.S. (2000). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Perkembangan dan Dampaknya. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol.2 No.1 hal 83-94.
- Aziz, A. (2011). Analisis Urgensitas Pinjaman Luar Negeri Indonesia Dalam Rangka Pembiayaan Defisit APBN. *Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol 15 No 1.
- Chatterjee, B., Bhattacharya, S., Taylor, G., and West, B. (2019). Political competition and debt: evidence from New Zealand local governments. *Accounting Research Journal*, 32(3), 344–361.
<https://doi.org/10.1108/arj-11-2016-0146>.
- Del Aguila, A.R; Padilla, A; Seresols, C; and Veciana, J.M. 2003. Digital Economy and Management in Spain. *Internet Research : Electronic Networking Application and Policy* Volume 13 No. 1 pp 6-16.
- Ferrarini, B and Ramayandi, A. (2012). “ Public Debt Sustainability Assessment for Developing Asia “ in Ferrarini, B; Jha, B; Ramayandi, (eds). *Public Debt Sustainability in Developing Asia*. New York: Routledge, pp 47-109.
- Hakura, D.,(2020). What Is Debt Sustainability? *Finance and Development*. International Monetary Fund.

- Hilton, S.K. (2021). Public Debt and Economic Growth: Contemporary Evidence from a Developing Economy. *Asian Journal Economics and Banking* 2615-9821. <https://doi.org/10.1108/AJEB-11-2020-0096>
- Rangkuty, D.M., Sari, M.M.,(2019). Analisis Utang Luar Negeri dan Inflasi di Indonesia. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol.19 No.1 hal. 57-66.
- Rusydi, B.U. (2014). Analisis Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah. *Economics, Sosial and Development Studies* Vol 1 no 1 hal 41-57.
- Suharno. (2008). Analisis Kausalitas dengan Pendekatan *Error Correction model*: Studi Empiris Hutang Luar Negeri dengan Defisit Anggaran APBN di Indonesia. *Jurnal Eko-Regional*, Vol.3, No.1.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Purwanto, DA. 2005. Bisnis dan Ekonomi Politik dan Manajemen Utang Luar Negeri dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Bisnis dan Ekonomi Politik : Quarterly Review of the Indonesian Economy* Vol.(6) No.(1).
- Van Basten, E., Hudayah, S., Gani, I.. 2020. Pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya pada Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Forum Ekonomi* Vol 23 No 1 hal 340-350.

PAKUNCEN BUDAYA (PAKUDAYA) CULINARY: PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELUARGA SASARAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19

Sri Wahyuni, Puspita Wulandari

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 membawa dampak perubahan yang sangat besar terhadap pola kehidupan sosial masyarakat. Di Indonesia perubahan yang terjadi bahkan hampir melingkupi semua aspek kehidupan mulai dari pendidikan, sosial dan terlebih lagi dalam bidang ekonomi. Perubahan ini kemudian memaksa pemerintah untuk bertindak aktif menemukan berbagai solusi guna menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang diakibatkan oleh pandemik Covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, Joharudin menyatakan bahwa Covid-19 bisa dikatakan merupakan ancaman berskala global sehingga keputusan-keputusan efektif dari pemerintah sangat dibutuhkan guna mencegah perkembangan virus yang makin meluas (Joharudin et al., 2020). Oleh karenanya berbagai keputusan yang secara langsung diadopsi oleh pemerintah yang dikemas dalam berbagai desain dan konten kebijakan makin beragam dan makin gencar diterapkan.

Upaya mengatasi lonjakan kasus covid-19 mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar atau sering disebut dengan PSBB hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM merupakan salah satu upaya besar pemerintah yang dicanangkan dalam upaya mengatasi lonjakan kasus pandemik Covid-19. Aturan ini dilaksanakan mulai dari peraturan pemerintah dalam skala pusat dan daerah. Kegiatan berkerumun mulai diminimalisir keberadaanya. Oleh karenanya kegiatan secara offline seperti bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah mulai gencar-gencarnya dicanangkan. Namun disisi lain kegiatan ini berdampak pada pelemahan kehidupan sehari-hari yang memacu adanya kerugian pada sektor ekonomi akibat melemahnya kegiatan perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya. Bahkan pemerintah secara besar-besaran mengucurkan dana untuk mencukupi kebutuhan masyarakat serta melakukan rekonstruksi pada fasilitas kesehatan (Thorik, 2020).

Dampak kebijakan pemerintah terlebih lagi sangat dirasakan oleh keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS). Di kota Yogyakarta sendiri terjadi peningkatan cukup besar akibat pandemi covid-19 pada jumlah warga miskin yang terdata pada program kelompok sasaran jaminan perlindungan sosial sebesar 8,53% pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020 (Eka Arifa Rusqiati, 2021). Pandemi covid-19 mematikan hampir seluruh pekerjaan keluarga KSJPS yang mayoritas bergerak dalam bidang non-formal, seperti tukang parkir, pedagang asongan, pedagang makanan keliling, dan lain sebagainya. Tanpa adanya penghasilan dalam keluarga, keluarga KSJPS yang sudah miskin, tentunya dimasa pandemi ini akan semakin mengalami kesulitan bahkan walaupun hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Keluarga yang terkategori dalam KSJPS ini perlu dirangkul dalam pemberdayaan agar mampu tetap berdaya dan terjaring dalam pengaman sosial. Pemerintah kota Yogyakarta meluncurkan program *gandeng gendong* sebagai bentuk usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UPPK. *Gandeng gendong* tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta no 23 tahun 2018 tentang program *gandeng gendong* kota Yogyakarta. Bergerak dalam bidang boga, budaya dan kreatifitas serta diharapkan *gandeng gendong* ini mampu menggerakkan forum CSR (*corporate social responsibility*) juga menjadi opsi guna mengentaskan kemiskinan (Setyowati & Ibty, 2020). Salah satu syarat wajib keanggotaan kelompok *gandeng gendong* harus melibatkan anggota dari KSJPS. Dengan adanya syarat tersebut mau tidak mau dalam sebuah kelompok setidaknya harus memiliki anggota pemegang kartu PKH, KMS ataupun jenis bantuan sosial lainnya.

Sejak diluncurkan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 220 kelompok kuliner yang sudah terdaftar dalam program *gandeng gendong* (Yusuf Assidiq, 2021). Di Kelurahan Pakuncen, kelompok kuliner ini dinamai dengan pakudaya culinary atau pakuncen budaya culinary. Kelompok kuliner yang dibentuk pada September 2018 sudah banyak berkiprah dalam rangka pemberdayaan masyarakat di seputar lingkungan kelurahan Pakuncen, kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Terlebih pada masa pandemic covid-19, keberadaan pakudaya culinary menjadi angin sejuk dan wadah untuk peningkatan kesejahteraan, baik anggota kelompok pakudaya culinary maupun masyarakat sekitar, terutama warga RW 07 Kelurahan Pakuncen yang menjadi tempat penelitian dalam tulisan ini.

Program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pakudaya Culinary sejak didirikan pada September 2018 dirasakan mampu untuk mensejahterakan masyarakat sejalan dengan tujuan dari program *gandeng gendong* pemerintah kota Yogyakarta. Tulisan ini berupaya untuk menggambarkan peranan dan program-program pakudaya culinary dalam upaya pember-

dayaan masyarakat terutama masyarakat yang tergolong dalam kelompok sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) yang tergabung dalam kenggotaan kelompok kuliner tersebut.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan pada Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS)

Pemberdayaan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan (Dedeh Maryani, 2019). Sejatinnya pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan guna memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya (Suharto, 2014). Pemberdayaan sebagai sebuah tujuan merupakan indikator keberhasilan dari proses pemberdayaan itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan menjadi hal yang penting untuk dilakukan dengan maksud memberdayakan individu ataupun kelompok yang secara mandiri sulit untuk berdaya. Masyarakat yang tingkat kesejahteraannya tergolong ke dalam kelas bawah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar bisa hidup layak, masih harus mendapatkan bantuan dari pihak lain, seperti pemerintah, para dermawan maupun kelompok masyarakat lainnya. Bantuan dari pemerintah umumnya adalah berupa bantuan sosial atau jaminan sosial. Kelompok masyarakat yang masuk ke dalam target bantuan sosial ataupun jaminan sosial dikategorikan sebagai keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) yakni pemegang kartu PKH atau Program Keluarga Harapan dan keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS).

Semenjak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. PKH sendiri mempunyai tujuan universal untuk meningkatkan aksesibilitas pada pelayanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial dalam menunjang tercapainya mutu hidup keluarga miskin (Risna Resnawaty, 2017). Dengan adanya bantuan sosial tunai diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran keluarga miskin, terutama pengeluaran terkait biaya pendidikan dan kesehatan. Keluarga miskin tidak lagi dipersulit untuk menempuh pendidikan, sehingga dengan perbaikan dibidang pendidikan, akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kartu Menuju Sehat (KMS) menjadi kartu wajib sebagai identitas diri siswa dari keluarga miskin untuk mengakses program jaminan pendidikan daerah (JPD). KMS berperan sebagai bukti diri atau identitas untuk penyaluran

beasiswa pada siswa miskin serta layanan jaminan kesehatan ataupun memudahkan membagikan berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah daerah (Yoga & Pradana, 2014). Dapat disimpulkan bahwa siswa miskin tanpa KMS maka tidak akan bisa mengakses bantuan dari program JPD. Siswa pemegang KMS dibebaskan dari biaya pendidikan mulai dari SPP, buku, seragam dan biaya pendidikan lainnya. Mereka mendapatkan hak mengikuti pendidikan secara gratis walaupun terdaftar sebagai siswa di sekolah-sekolah milik pihak swasta.

Gandeng Gendong: Program Pemberdayaan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) Kota Yogyakarta

Program Gandeng Gendong yang telah dijalankan pemerintah Yogyakarta selama 3 tahun ini untuk pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan masih terus berkembang. Gandeng Gendong merupakan gerakan bersama yang mengaitkan semua elemen pembangunan di dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan ekonomi warga khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan (Arida Oetami, 2018). Lebih menekankan pada pemberdayaan warga dengan memandang kemampuan pengembangan kebersamaan serta kepedulian semua *stakeholder* sesuai kapasitasnya. Artinya disini semua warga masyarakat diberdayakan dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki. Seluruh *stakeholder* bahu membahu dan saling memberdayakan kelompok-kelompok khusus sehingga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta. Pemberdayaan masyarakat tidak kemudian dilakukan dengan memberdayakan masyarakat khusus dengan sesuatu yang “baru” namun justru mengembangkan apa yang sudah kelompok khusus ini miliki.

Gandeng gendong terdiri dari dua kata yakni *gandeng* dan *gendong*. Kata *gandeng* memiliki arti bahwa seluruh elemen masyarakat saling bergandengan tangan berdasarkan niat yang satu untuk saling membantu sehingga seluruh pihak bisa maju bersama. Sedangkan kata *gendong* mengandung makna bahwa warga masyarakat membantu warga lain yang tidak mampu berjalan (Han, 2018). Dua kata tersebut bersumber dari nilai-nilai kegotongroyongan budaya Jawa yang kemudian dikemas ke dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang menarik dan inovatif. Secara gamblangnya melalui program *gandeng gendong* para pengusaha dan pemerintah mampu bergandengan tangan untuk menggendong warga masyarakat kota yang membutuhkan bantuan. Terutamanya adalah warga masyarakat yang tergolong dalam Keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial.

Stakeholder yang tergabung dalam *gandeng gendong* terdiri dari lima unsur yaitu Kota (pemerintah), Kampung, Komunitas, Korporasi dan Kampus (Arida Oetami, 2018). Kelima elemen ini saling mengisi, berkolaborasi dan

bekerjasama karena kekuatan akan muncul jika semua unsur masyarakat dalam kebersamaan. Pemerintah kota memfasilitasi, mengkoordinasi, dan membangun sinergi antar unsur-unsur tersebut demi suksesnya program gandeng gendong. Selain itu pemerintahpun mengeluarkan kebijakan terkait konsumsi pada saat kegiatan harus menggendong usaha kuliner masyarakat (kampung dan komunitas). Kampung dan komunitas menjadi basis usaha, karena gandeng gendong basisnya adalah kelurahan. Demikian pula halnya dengan korporasi, pemerintah mendorong hotel, resto atau corporate untuk beraliansi bisnis ke kampung-kampung untuk mengangkat mereka. Inilah yang dimaksud dengan istilah gandeng gendong yang merupakan wujud kegotong-royongan seluruh stakeholder untuk mengentaskan kemiskinan di kota Yogyakarta.

Pakudaya Culinary: Kelompok Kuliner Berbasis Kelurahan

Program gandeng gendong menysasar ke berbagai lapisan masyarakat kota karena basisnya adalah kelurahan yang ada di kota Yogyakarta. Termasuk salah satunya pada Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dengan pakudaya culinary atau pakuncen budaya culinary. Pakudaya culinary berdiri pada September 2018 dengan Ibu Asri Mikatsih sebagai koordinator utamanya. Tujuan utama dibentuknya Pakudaya Culinary adalah sebagai suatu usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diinisiasi pemerintah kota dan merupakan satu pemberdayaan masyarakat wilayah Pakuncen. Pakudaya culinary sebagai bagian dari gandeng gendong memiliki scope pemberdayaan masyarakat dalam bidang kuliner, karena sebagian besar warga wilayah pakuncen memiliki usaha dibidang kuliner. Fokus pakudaya culinary sebagai penyedia jasa kuliner dalam hal penyedia jamuan rapat snack, makanan kecil dan makanan berat. Hal ini sesuai dengan potensi wilayahnya dan pengembangan lokal di wilayah Pakuncen.

Susunan kepengurusan Pakudaya Culinary digambarkan dalam Gambar 1 bagan berikut di bawah.

Anggota kelompok yang tergabung dalam pakudaya culinary di seluruh wilayah kelurahan Pakuncen terdaftar sebanyak 36 orang penyedia jasa produk kuliner. Khusus untuk wilayah 3 dan 4 melibatkan 16 anggota, dimana 4 diantaranya adalah pemegang kartu jaminan sosial baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Menuju Sejahtera (KMS). Hal ini berkaitan dengan syarat diwajibkannya mendirikan kelompok yang tergabung dalam gandeng gendong adalah mengikutsertakan warga Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Data pada 2019, dari 166 kelompok kuliner dengan sekitar 1.700 anggota, sebanyak 400 diantaranya adalah warga miskin yang masuk dalam data kelompok sasaran jaminan perlindungan sosial (Eka Arifa Rusqiati, 2019).



Gambar 1. Kepengurusan Pakudaya Culinary

Pada awal pembentukan Pakudaya Culinary dimulai dengan tanpa modal sama sekali. Pertama memperoleh pesanan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2018. Bermula darisanalah Pakudaya Culinary mulai berkembang secara bertahap, ini terlihat dari Omzet setiap bulan yang mengalami kenaikan. Hingga 2021, Pakudaya berhasil bekerjasama dengan beberapa kantor dinas provinsi, kampus, hotel dan pihak swasta. Perkembangan kelompok Pakudaya Culinary sudah bisa disebut lumayan cukup berhasil sejak dari awal didirikan hingga sekarang. Keberhasilan berdampak pada ekonomi kalangan ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, diajak bergabung bersama membangun pakudaya culinary mulai rutin menerima pesanan makanan. Ibu-ibu yang tidak memiliki keahlian dalam bidang kuliner, beberapa yang memang tidak memiliki pekerjaan tetap diberi pekerjaan oleh Asri Mikatsih untuk ikut serta terlibat dalam proses pengemasan pesanan-pesanan dari OPD dan menerima penghasilan harian yang jumlahnya menyesuaikan dengan banyak sedikitnya pesanan.

Sesuai dengan visi Pakudaya Culinary sebagai suatu wadah usaha kuliner untuk pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama warga masyarakat Kelurahan Pakuncen. Dengan adanya wadah tersebut, diharapkan tumbuh usaha-usaha baru dibidang kuliner yang mandiri dan mampu meningkatkan usahanya dengan menggandeng masyarakat sekitar. Usaha-usaha baru tersebut tentunya juga akan meningkatkan ekonomi keluarga dan menjadi tumpuan penghidupan bagi warga masyarakat. Bersinergi dengan TP PKK kelurahan pakuncen dalam upaya pengentasan

keluarga miskin, mengurangi angka warga penerima KMS dan PKH di tingkat kelurahan melalui pemberdayaan keluarga.



Gambar 2. Kegiatan Pakudaya Culinary

Program-Program Pemberdayaan Masyarakat Pakudaya Culinary

Semboyan “maju bersama pemberdayaan masyarakat pakuncen budaya (pakudaya) culinary” menjadi jalan lahirnya program-program pemberdayaan masyarakat di Pakudaya Culinary. Tulisan ini mencakup program-program pemberdayaan yang dilakukan baik sebelum pandemi covid-19 ataupun ketika pandemi covid-19. Pelatihan di bidang kuliner dan jumat berkah merupakan program yang sudah ada dan masih berlangsung sebelum ada pandemic covid-19. Cantelan, angkringan wista dan pemenuhan jatah hidup warga isolasi mandiri muncul sebagai bentuk kepedulian sosial sesama warga RW 07 kelurahan Pakuncen ketika pandemi covid-19 mulai meradang di wilayah Yogyakarta.

1. Pelatihan Kuliner

Dari segi rasa, masakan kampung tidak kalah dengan masakan dari juru masak atau chef. Bahkan mungkin kelebihanannya adalah cita rasa yang ditawarkan benar-benar berasal dari resep turun temurun. Namun sayangnya, ciri khas makanan dari kampung adalah ukurannya yang bisa dikatakan cukup besar untuk dikonsumsi. Ukuran ini mengakibatkan makanan tidak terlihat menarik ketika disajikan, sehingga perlu dilakukan pelatihan bagaimana packaging yang baik suatu produk untuk meningkatkan nilai jualnya. Salah satu hal sederhana ini pun menjadi titik perhatian pemerintah kota Yogyakarta dalam memajukan kelompok-kelompok kuliner yang tergabung dalam program gendeng gendong. Maka dari itu, pemerintah pun melakukan berbagai pelatihan yang diikuti oleh kelompok-kelompok kuliner dengan basis kelurahan tersebut. Pelatihan yang diberikan berbeda-beda disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan masing-masing kelompok.

Pakudaya culinary yang juga turut andil sebagai peserta dalam pelatihan kuliner. Pelatihan kuliner karena basis potensi lokal wilayah kelurahan pakuncen terutamanya untuk wilayah 3 dan wilayah 4 adalah snack, makanan ringan maupun makanan berat. Pelatihan kuliner yang dibiayai oleh LSM dari Jakarta melalui BAPPEDA, DPMPPA, P3ADK, Dinas Koperasi & UMKM yang bekerjasama dengan Generasi Baru Dapur Indonesia (GBDI). Pelatihan dilakukan sebanyak 2 angkatan dengan total 20 orang anggota pakudaya culinary berpartisipasi dalam pelatihan tersebut. Berikut gambar-gambar ketika pakudaya culinary berpartisipasi dalam pelatihan.



Gambar 3. Pelatihan Memasak dengan kerjasama GBDI

Tidak hanya pelatihan kuliner saja, pemerintah juga menghibahkan peralatan masak yang kemudian menjadi inventaris bagi Pakudaya Culinary. Apa yang dilakukan pemerintah ini turut serta menyumbang majunya kelompok kuliner, karena selain diberikan ilmu, disokong peralatan dan diberikan pasar dalam penjualan makanan. Disini terlihat program gendong tersebut, bukan hanya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan setengah hati, namun benar-benar dikelola dengan baik sehingga mampu mengentaskan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

2. Cantelan

Pandemi covid-19 turut memberi dampak terhadap *income* atau pendapatan dari Pakudaya culinary. Kebijakan *Work From Home* atau WFH menurunkan tingkat pemesanan dari Organisasi Pemerintah Daerah yang menjadi pelanggan tetap Pakudaya Culinary. Hal ini dikarenakan rapat-rapat dinas yang dilakukan secara daring tentunya tidak membutuhkan konsumsi bagi peserta rapat. Pada awal masuknya covid-19 membuat pakudaya culinary sempat mati suri dalam beberapa bulan. Tentunya ini menjadi beban tersendiri bagi anggota-anggota kelompok pakudaya culinary. Berdasarkan inisiatif warga, dibantu dengan pemuda desa bersama pakudaya culinary menelurkan sebuah program baru yang diberi nama cantelan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cantelan diartikan sebagai sangkutan (KBBI, 2021). Program ini

berlangsung setiap hari sabtu dari pukul 08.00 WIB hingga seluruh bahan kebutuhan pokok yang dicantelkan habis.

Mekanisme dari program cantelan ini adalah warga yang memiliki kemampuan lebih untuk menyokong secara materi memberikan sejumlah dana kepada Pakudaya Culinary, yang kemudian dikoordinir oleh pemuda desa menjadi berbagai bahan kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak sayur, gula pasir, mie, telur dan lain-lain. Bahan kebutuhan pokok ini dibeli langsung dari salah satu warga yang berprofesi sebagai penjual sayur mentah sebagai bentuk “nglarisi tetangga” kemudian bahan-bahan tersebut dikemas dan dicantelkan di lapangan fasum pendopo pakudaya RW 07. Semua warga RW 07 yang membutuhkan bahan makanan ini dipersilahkan untuk mengambil seperlunya secara gratis.



Gambar 4. Cantelan

Terlihat sederhana memang, namun cantelan ini mampu meningkatkan sensitivitas sosial warga yang terdampak covid-19 terutama bagi kelompok sasaran jaminan perlindungan sosial. Minusnya pendapatan bahkan hampir sama sekali tidak memperoleh pendapatan yang mencukupi selama pandemi, sedikit terbantu melalui program cantelan ini. Ditambah dengan mekanisme pelaksanaan yang dari warga untuk warga secara bergotong royong saling memberdayakan sesama.

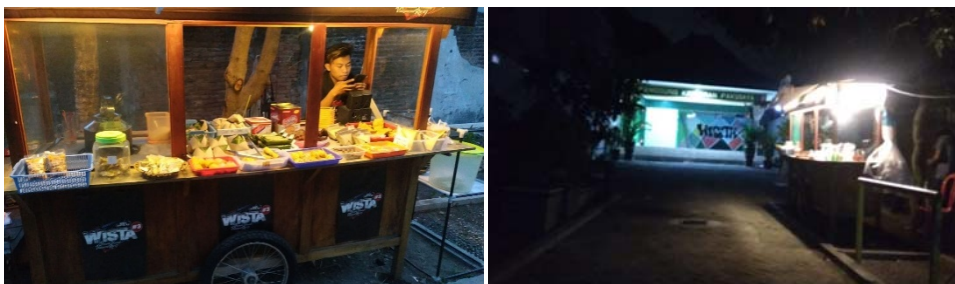
3. Angkringan Wista

Angkringan sudah tidak asing di kota Yogyakarta ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kebersahajaan warga masyarakat. Bisnis informal dalam bidang kuliner di daerah perkotaan yang dibungkus dengan unsur-unsur tradisional, menjual beraneka ragam nasi bungkus (nasi kucing),

gorengan, dan minum dengan harga yang ramah dikantong. Inilah yang menjadi latarbelakang dibentuknya angkringan wista di RW 07 Kelurahan Pakuncen. Angkringan yang dibuka pada Juli 2020 ini bermula dari kegalauan pemuda kampung di tengah pandemi covid-19. Dengan tujuan saling memberdayakan warga RW 07, angkringan yang dari masyarakat untuk masyarakat ini, sengaja di buka untuk memberikan peluang bagi warga RW 07 meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Warga RW 07 di izinkan untuk menitipkan barang dagangan berupa makanan jadi di angkringan wista yang dikelola oleh pemuda kampung RW 07. Warga sekitar pun dimudahkan dalam akses untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dengan langsung membeli ke angkringan wista karena lokasinya yang berada di dalam lingkungan RW yakni pendopo RW 07. Hal ini sengaja dilakukan mengingat covid-19 yang melanda kota Yogyakarta, sehingga selama pandemi, angkringan wista ini diperuntukkan khusus untuk seluruh warga RW 07.

Anggota yang tergabung dalam Pakudaya Culinary pun turut terbantu dengan adanya angkringan ini, yakni mampu menambah masukan pendapatan karena menurunnya permintaan pesanan pada pakudaya culinary selama pandemi. Peran Pakudaya Culinary, melalui ibu Asri Mikatsih adalah dengan mencari bantuan berupa gerobak angkringan dan modal membuka angkringan, yang kemudian dikelola oleh pemuda kampung dibawah bimbingan koordinator utama Pakudaya Culinary tersebut. Berikut kegiatan angkringan wista di RW 07 ditunjukkan dengan gambar dibawah ini.



Gambar 5. Angkringan Wista

Nama angkringan wista, berasal dari kata wira sapta aji dalam Bahasa Jawa, yang kemudian diidentikkan menjadi nama Pemuda Pemudi RW 07. Pemuda sebagai penerus pemberdayaan masyarakat kedepannya diharapkan mulai peka terhadap isu-isu kesejahteraan sosial di lingkungan RW 07. Selain melatih sensitivitas sosial pemuda, angkringan wista ini juga memiliki manfaat lain, khususnya bagi pemuda itu sendiri yakni membuka lowongan pekerjaan. Pemuda yang ditugaskan untuk menjaga dan melayani di angkringan wista juga menerima gaji sebesar Rp. 35.000/hari. Menjadi berkah tersendiri bagi

pemuda maupun masyarakat lingkungan RW 07 dengan adanya angkringan wista ini. Jiwa kegotongroyongan semakin terpupuk dengan apik, diharapkan bersama-sama mampu saling menopang kesejahteraan ekonomi di masa pandemi covid-19.

4. Pemenuhan Jatah Hidup Warga Isolasi Mandiri oleh Pakudaya Culinary

Dampak lonjakan covid-19 mengakibatkan penuhnya Rumah Sakit yang menangani covid-19. Mau tidak mau warga masyarakat yang dinyatakan positif terpapar covid-19 banyak yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari terhitung dari hasil swab dinyatakan positif covid-19. Artinya selama 14 hari, keluarga yang melakukan isolasi mandiri tidak bisa beraktivitas keluar rumah. Padahal segala keperluan dan kebutuhan sehari-hari masih terus berlanjut. Bantuan pengadaan logistik makanan perlu penanganan yang serius karena ini menyangkut kesejahteraan hidup warga yang melakukan isolasi mandiri. Pada Januari 2021, bantuan logistik untuk pasien isolasi mandiri di rumah diberikan dalam bentuk bahan pangan mentah. Namun, pada Februari 2021, bantuan diberikan dalam bentuk pemberian makanan siap saji.

Perubahan pola bantuan logistik makanan ini bekerjasama dengan pelaku gandeng gendong. Kelompok-kelompok kuliner mengemban tugas untuk membantu pengadaan logistik makanan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Program gandeng gendong yang berbasis kelurahan lebih efisien dan efektif dalam pengadaan bantuan makanan, karena berada di tiap-tiap wilayah kelurahan akan memudahkan distribusi bantuan sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dengan alasan jarak yang jauh. Terlebih lagi, dengan basis kelurahan, warga sudah saling mengenal sehingga tidak ada warga yang isolasi mandiri kemudian terlewat dari data tim for covid.

Seperti halnya Pakudaya culinary yang menjadi basis pengadaan bantuan jatah hidup makanan warga yang menjalani isolasi mandiri di kelurahan Pakuncen. Mekanisme klaim jatah hidup dari Dinas Sosial beralur dari kelurahan yang meminta persyaratan dari puskesmas terkait, kemudian setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak kelurahan akan mengajukan ke Dinas Sosial kota Yogyakarta. Hasil finalisasi di Dinas Sosial yang kemudian akan menjadi instruksi dari kelurahan untuk menunjuk kelompok gandeng gendong dalam pengadaan jatah hidup warga isolasi mandiri.

Pemberian jatah hidup ini dalam sehari mendapatkan tiga kali makan siap saji selama 14 hari. Pada bulan Juli 2021, setiap harinya menyediakan 50 sampai dengan 60 bungkus makanan untuk warga yang menjalankan isolasi mandiri. Keterlibatan pelaku gandeng gendong ini memberikan manfaat tidak hanya bagi warga yang menjalankan isolasi mandiri saja namun juga

membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan berjalannya kembali kelompok gandeng gendong melalui pesanan logistic makanan siap saji untuk jatah hidup warga isolasi mandiri, perekonomian warga yang terga-bung ke dalam kelompok gandeng gendong juga ikut terangkat.

Kendala yang dihadapi oleh pakudaya culinary dalam pemberian logistik makanan adalah lambatnya pencairan dana dalam mengklaim pembayaran dari Dinas Sosial. Kendala ini mempengaruhi arus keluar masuk keuangan pakudaya culinary. Dengan modal yang minim, dan uang yang menumpuk pada pemerintah karena pengklaiman tidak bisa langsung dicairkan. Padahal ketika kelompok Pakudaya Culinary memesan makanan ke anggota-anggota kelompok yang tergabung dalam Pakudaya Culinary harus langsung dibayar dengan lunas, jika tidak, pelaku usaha kecil tersebut akan langsung gulung tikar. Pelaku usaha kecil akan bisa terus berproduksi dengan cara memutar modal yang mereka miliki. Asri mikatsih selaku koordinator utama pakudaya culinary harus benar-benar pandai dalam arus keluar masuk keuangan agar pakudaya culinary dapat terus berjalan dan terus memberdayakan warga masyarakat.

PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikutserta dalam berpartisipasi. Ada rasa kegotongroyongan, saling menyokong satu dengan lainnya. Bergandengan tangan menuju tujuan yang sama, tidak segan untuk menggendong mereka yang tidak mampu mengikuti ritme. Inilah bentuk pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta dalam mengentaskan kemiskinan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) yang dikenal dengan gandeng gendong. Sebagaimana satu *quotes* suku jawa yang menyatakan bahwa *urip iku urup* yang berarti bahwa hidup itu nyala. Hidup hendaknya memberikan manfaat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Membantu masyarakat yang kurang mampu untuk lebih berdaya melalui pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arida Oetami. (2018). *Buku Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Segoro Amarto*. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
- Dedeh Maryani, R. R. E. N. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat (Pertama)*. deepublish.
- Eka Arifa Rusqiati. (2019). *Pembayaran telat, kelompok kuliner Gandeng Gendong Yogyakarta meradang*. Antaranews.Com.
<https://www.antaranews.com/berita/1181480/pembayaran-telat-kelompok-kuliner-gandeng-gendong-yogyakarta-meradang>

- Eka Arifa Rusqiati. (2021). *Warga miskin Yogyakarta masuk data KSJPS 2021 meningkat 8,53 persen*. Antaranews.Com.
<https://www.antaranews.com/berita/1953292/warga-miskin-yogyakarta-masuk-data-ksjps-2021-meningkat-853-persen>
- Han. (2018). *Pemkot Terus Lakukan Sosialisasi Program Gandeng Gendong*. Warta.Jogjakota.Go.Id. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/6289>
- Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). Panic Syndrom Covid-19 : Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 44–53.
- KBBI. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kbbi.Web.Id.
<https://kbbi.web.id/cantel-2>
- Risna Resnawaty, S. A. S. (2017). Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial. *Prosiding Ks: Riset & Pkm*, 4(1), 1–140.
- Setyowati, D., & Ibty, I. (2020). Kajian Partisipasi Masyarakat Pada Program Pengentasan Kemiskinan Study Kasus Kegiatan Lele Cendol Dalam Kerangka Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. *Jurnal Enersia Publika*, 4(1), 212–221.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (A. Gunarsa (ed.)). Refika Aditama.
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 115–120.
- Yoga, I. P., & Pradana, B. (2014). Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sehat (KMS) Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(2), 105–118.
<https://doi.org/10.22146/jkap.7512>
- Yusuf Assidiq. (2021). *Yogya Susun Masterplan Gandeng Gendong Berbasis Kelurahan*. Republika.Co.Id.
<https://www.republika.co.id/berita/qs08f6399/yogya-susun-masterplan-gandeng-gendong-berbasis-kelurahan>

ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI PADA UMKM DI BANDUNGAN KOTA SEMARANG

Phany Ineke Putri, Karsinah, Nurjannah Rahayu K

PENDAHULUAN

Alat pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu alat pembayaran tunai dan non tunai. Masyarakat Indonesia dewasa ini diarahkan untuk memanfaatkan alat pembayaran non-tunai, selain lebih efisien, alat pembayaran non tunai dianggap lebih aman dan higienis karena minimnya kontak langsung saat bertransaksi jual beli. Perkembangan alat pembayaran di Indonesia menjadi ketakutan sendiri bagi para pelaku UMKM, hal ini dikarenakan masih minimnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM.

Tabel 1 Tingkat Literasi Keuangan per Provinsi Pulau Jawa

No	Provinsi	2019
1	DKI Jakarta	59,16%
2	Jawa Tengah	47,38%
3	Jawa Barat	37,43%
4	DI Yogyakarta	58,53%
5	Jawa Timur	48,95%
6	Banten	39,27%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2020, data diolah

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat literasi di Provinsi Jawa Tengah masih rendah yaitu sebesar 47,38% menyusul Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat literasi terendah.

Alat pembayaran non-tunai yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi cek, giro, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan uang elektronik. Bank Indonesia telah menerapkan instrumen pembayaran mikro. Instrumen pembayaran mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang sangat kecil namun volume yang tinggi serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relatif sangat cepat. Pada saat ini, alat/instrumen pembayaran dalam bidang pemba-

ayaran mikro yang fitur-fiturnya dianggap paling cocok untuk dikembangkan adalah berupa *electronic money (e-money)*.

Kota Semarang sebagai salah satu kota perdagangan di Indonesia sangat berpengaruh terhadap perkembangan instrumen pembayaran mikro yaitu *e-money*. Salah satu kabupaten yang memiliki potensi mikro yang cukup pesat adalah Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Bandungan

Dari data kita dapat mengetahui bahwa Kelurahan Sidomukti memiliki jumlah lapangan usaha di bidang pertanian paling banyak di Kecamatan Bandungan, yaitu sebesar 2083 usaha. Dan sektor perdagangan sebanyak 148 usaha, 3 sektor perikanan. 683 karyawan swasta, dan 428 wiraswasta.

Selain itu Kelurahan Sidomukti memiliki lapangan usaha sektor jasa terbanyak yaitu 352 usaha. Hal ini cukup membuktikan bahwa instrumen pembayaran mikro perlu diperkenalkan dan dikembangkan di Kecamatan Bandungan.

PEMBAHASAN

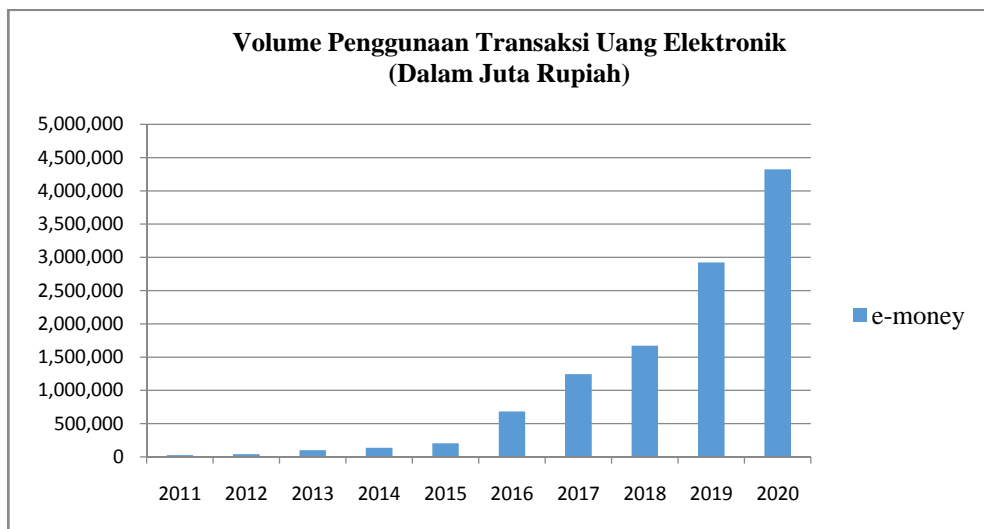
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan ataupun badan usaha dan sesuai dengan kriteria usaha dalam lingkup kecil atau mikro. Para pelaku UMKM masih memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah, sehingga penggunaan alat pembayaran non tunai memiliki tantangan tersendiri.

E-money merupakan alat pembayaran non-tunai yang baru dikenal di Indonesia, adapun demikian kebutuhan uang tunai di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap tinggi. Hal ini membuat penggunaan *e-money* di Indonesia menjadi relatif sedikit daripada negara-negara di kawasan ASEAN. Selain itu semenjak tahun 2011 Indonesia telah mengalami kenaikan jumlah transaksi *e-money* yang juga diikuti dengan pertumbuhan uang tunai di Indonesia. Berikut data pertumbuhan jumlah transaksi *e-money* dan pertumbuhan uang tunai di Indonesia hingga tahun 2019.

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa volume penggunaan transaksi uang elektronik/*e-money* selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi uang elektronik di Indonesia sudah mulai mendominasi serta memiliki potensi untuk menggeser peran uang tunai dalam pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro.

Kebijakan penggunaan *e-money* sudah diterapkan di Kota Semarang sejak tahun 2017. Alat pembayaran non-tunai ini pertama kali diterapkan pada transaksi pembayaran dalam penggunaan jasa tol dan hingga saat ini sudah dapat digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Menurut Benyamin (2019) yang terlihat dari sisi penerimaan teknologi di masyarakat, perkem-

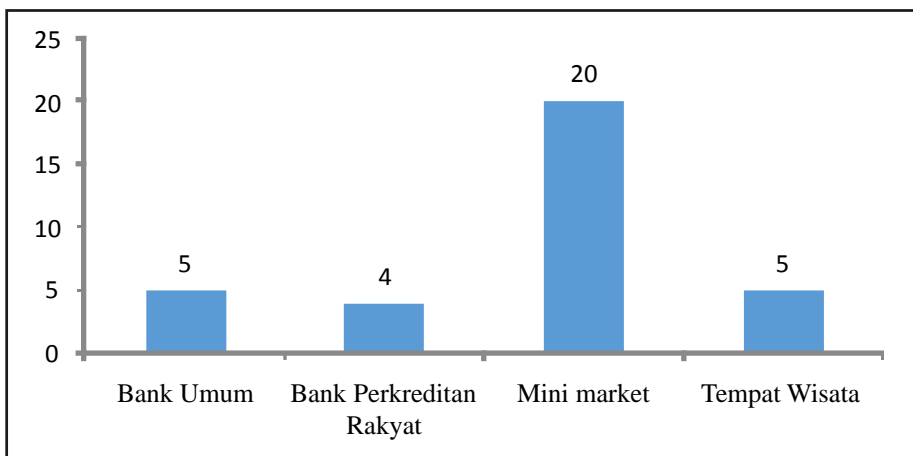
bangunan sistem pembayaran *e-money* hingga saat ini masih terkendala dengan kesiapan dan kesadaran masyarakat saat menghadapi era *cashless society*.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1. Volume Penggunaan Transaksi Uang Elektronik (Dalam Juta Rupiah)

Kecamatan Bandungan memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian, karena sebanyak 2083 usaha tumbuh di Kecamatan Bandungan. Selain itu Kelurahan Sidomukti memiliki lapangan usaha sektor jasa terbanyak yaitu 352 usaha. Pengenalan alat pembayaran non tunai perlu dilakukan kepada pelaku UMKM khususnya di Desa Sidomukti.



Sumber : Kecamatan Bandungan Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 2. Sarana-Prasarana dan Jumlah Tempat Wisata Kecamatan Bandungan Tahun 2019

Pada Gambar 2 menunjukkan data bahwa di Kecamatan Bandungan memiliki 4 bank umum pemerintah, 4 bank perkreditan rakyat, 20 minimarket, dan 5 tempat wisata. Selain itu tercatat bahwa di Kecamatan Bandungan memiliki 557 warung kelontong. Hal ini menjadikan penguat bahwa pengenalan terhadap uang elektronik perlu dilakukan kepada para pelaku UMKM agar Gerakan Nasional Non-Tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia dapat tercapai. Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) ini merupakan kebijakan program yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia agar masyarakat beralih dari instrumen alat pembayaran tunai menuju instrumen alat pembayaran non-tunai, dalam hal ini contohnya adalah uang elektronik atau *e-money*.

1. Pengenalan Uang Elektronik

Kegiatan pengenalan diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari pedagang UMKM di Kecamatan Bandungan. Peserta mendapatkan tiga materi kegiatan yaitu (1) Sosialisasi penggunaan instrumen pembayaran non-tunai, (2) Penggunaan teknis *e-money*, (3) Pengenalan toko elektronik atau *e-commerce*. Penyampaian materi tentang penggunaan pembayaran non-tunai dengan adanya instrumen pembayaran mikro khususnya *e-money*, dapat mendorong terwujudnya perekonomian yang lebih efisien, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna *e-money* dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman. Namun terdapat beberapa kendala dalam kegiatan sosialisasi ini karena sebagian besar pedagang masih belum melek literasi keuangan, sehingga penyampaian materi *e-money* belum dapat dipahami oleh seluruh peserta.



Gambar 3. Pengenalan Uang Elektronik kepada Para Pelaku UMKM Kecamatan Bandungan

Para peserta menilai bahwa penggunaan *e-money* memiliki efek yang positif seperti mudah, cepat, dan efisien. Terdapat beberapa keluhan dalam penggunaan *e-money* yaitu terdapat biaya administrasi saat *top-up* saldo, dan pengisian saldo hanya bisa dilakukan pada mini market tertentu dan aplikasi online banking yang tidak semua dimiliki oleh masyarakat. Namun, mereka percaya bahwa dengan menggunakan *e-money* membuat aktivitas mereka menjadi lebih mudah dan mereka yakin *e-money* lebih efisien dibandingkan menggunakan tunai.

Selama pengenalan uang elektronik, peserta yang berasal dari kalangan UMKM sangat antusias mengikuti walaupun ada beberapa yang masih belum mengetahui sama sekali mengenai *e-money* tersebut. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini mereka dapat menggunakan *e-money* dalam transaksi jual beli mereka, dan mengenalkan *e-money* kepada keluarga dan rekan mereka.

2. Pembagian Uang Elektronik atau *e-money*

Pelaku UMKM dibagikan masing-masing uang elektronik beserta saldo kurang lebih Rp 100.000,-, hal ini diharapkan agar para pelaku UMKM memiliki ketertarikan untuk menggunakan *e-money* secara langsung untuk melakukan transaksi pembelian di mini market terdekat di desa mereka. Penggunaan *e-money* bertujuan agar transaksi yang dilakukan lebih aman dan efisien. Selain itu, dinilai lebih higienis karena minim kontak secara langsung antara penjual dan pembeli.

3. Pengenalan Toko Elektronik atau *e-commerce*

E-Commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*). (Fahmi, 2016).

Pelaku UMKM harus melakukan berbagai inovasi dalam menciptakan produk-produk yang berkualitas dan dapat pasarkan melalui *e-Commerce*. (Saswiana, 2020). Otomatis kalau suatu produk berkualitas maka akan mendorong minat beli konsumen melalui *e-Commerce* sehingga pembayaran secara elektronik dari waktu ke waktu akan menjadi kebiasaan dan dapat mewujudkan GNNT yang sebelumnya dengan sistem pembayaran tunai yang mana memiliki kendala efisiensi, karena biaya pengadaan dan pengelolaannya tergolong mahal, memiliki risiko mudah hilang, dicuri atau dipalsukan.

Pada kegiatan ini, pelaku UMKM dikenalkan cara membuat akun di *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia. Pelaku UMKM diarahkan untuk membuat akun email pribadi mereka, sebagai syarat untuk membuka akun di

e-commerce. *E-commerce* berguna sebagai wadah bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, sehingga barang produk yang dijual dapat diketahui dan dijangkau oleh para seluruh *pengguna e-commerce*. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan pendapatan dari para pelaku UMKM, dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

PENUTUP

Alat pembayaran non-tunai yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi cek, giro, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan uang elektronik. Bank Indonesia telah menerapkan instrumen pembayaran mikro. Instrumen pembayaran mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang sangat kecil namun volume yang tinggi serta membutuhkan waktu proses transaksi yang relatif sangat cepat. Pada saat ini, alat/instrumen pembayaran dalam bidang pembayaran mikro yang fitur-fiturnya dianggap paling cocok untuk dikembangkan adalah berupa *electronic money (e-money)*.

Kecamatan Bandungan memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian, karena sebanyak 2083 usaha tumbuh di Kecamatan Bandungan. Selain itu Kelurahan Sidomukti memiliki lapangan usaha sektor jasa terbanyak yaitu 352 usaha. Pengenalan alat pembayaran non tunai perlu dilakukan kepada pelaku UMKM khususnya di Desa Sidomukti. Diharapkan pada kegiatan ini dapat meningkatkan penggunaan alat pembayaran non-tunai pada masyarakat, selain itu pengenalan *e-commerce* dapat meningkatkan pendapatan bagi para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS Kabupaten Semarang. 2020. *Kecamatan Bandungan Dalam Angka*. Semarang : BPS Kabupaten Semarang.
- Fahmi. 2016. *Perilaku Konsumen*. Bandung: Alfabeta.
- Helmalia. 2018. *Pengaruh E-commerce terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padang*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 3 No 2.
- Langgu, Benyamin. 2019. *Analisis Kesiapan UMKM dalam Menggunakan E-money*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta:
<https://e-journal.uaaj.ac.id/18475/>
- Saswiana. 2020. *Pengaruh E-Commerce terhadap Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian Produk Online Shop*. FEB UPI: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol 5 No 1.

PEKERJA PEREMPUAN DI TENGAH PANDEMI: MASALAH DAN SOLUSI

Nury Ariani W, Rudatin W

PENDAHULUAN

Sejak WHO menyatakan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat pada 30 Januari 2020 setelah awal virus diidentifikasi dari Wuhan, Cina, pada Desember 2019, pandemi saat ini masih menjadi tantangan dan isu utama bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Permasalahan pandemi ini telah berkelindan dengan semua aspek dan bidang, merambah mulai dari isu ekonomi, politik, budaya, birokrasi, budaya, sains dan bidang-bidang lain. Dari semua aspek tersebut, salah satu yang menarik untuk dikupas lebih dalam adalah bagaimana dampak pandemi ini terhadap salah satu pihak yang paling rentan, yaitu perempuan.

Kondisi perempuan di Indonesia sebelum pandemi dapat tergambarkan melalui berbagai macam indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta indikator-indikator dalam Profil Perempuan Indonesia. Dalam berbagai indikator tersebut terlihat bahwa sebenarnya kesenjangan pembangunan laki-laki dan perempuan Indonesia semakin menipis atau dengan kata lain semakin banyak perempuan yang menjadi tenaga ahli/professional, bertambahnya lama pendidikan perempuan serta meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam perekonomian nasional dengan ditunjukkan lebih dari 50% pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah perempuan (Umi Kulsum, 2021). Pemberdayaan perempuan di Indonesia yang ditunjukkan dengan IDG telah menunjukkan adanya peningkatan dari waktu ke waktu. IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan IPM Laki-laki. IDG pada tahun 2010 sebesar 68,15 persen dan pada tahun 2020 berada di angka 75,57 persen (BPS, 2020). Hal ini menunjukkan kesenjangan yang semakin mengecil sebesar 0,7 setiap tahunnya. Atau dengan kata lain, terdapat peningkatan tenaga profesional perempuan terhadap tenaga laki-laki.

Akan tetapi dengan adanya pandemi yang telah berlangsung selama satu setengah tahun ini tentu saja akan menghambat laju perbaikan tidak hanya IDG, tetapi juga indikator-indikator yang lain seperti Indeks Pembangunan

Gender (IPG) serta indikator-indikator dalam Profil Perempuan Indonesia. Perempuan menerima dampak pandemik yang lebih berat ketimbang lelaki karena mendapat beban kerja dan sekaligus aktivitas domestik yang berganda. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh United Nation-Women (2020) dengan topik “Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” terlihat bahwa kaum perempuan banyak terdampak secara sosial dan mental. Pembatasan sosial membuat 69 persen perempuan menghabiskan lebih banyak waktu di rumah akibat kebijakan bekerja dari rumah atau penghentian kerja secara temporer maupun permanen. Tidak hanya itu, selain beban kerja, beban domestik di mana perempuan memikul beban berat karena sebanyak 61 persen perempuan ikut mengasuh dan mendampingi anak dibandingkan laki-laki yang hanya 48 persen. Sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari pandemi, 57 persen perempuan mengalami peningkatan stres dan kecemasan akibat bertambahnya beban pekerjaan rumah tangga. Proporsi tersebut lebih besar daripada laki-laki yang mengalami hal serupa, yakni 48 persen. Bidang

Survei yang dilakukan oleh WHO (World Health Organization) dari Juni hingga Agustus 2020 di antara 130 negara menyebutkan adanya tekanan yang tinggi terhadap layanan kesehatan mental; yaitu lebih dari 60% melaporkan adanya gangguan terhadap layanan kesehatan mental bagi orang-orang yang rentan, termasuk anak-anak dan remaja (72%), orang dewasa yang lebih tua (70%), dan wanita (61%) (WHO, 2020). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pandemi semakin mempersulit akses terhadap layanan kesehatan mental secara global, tidak hanya di Indonesia. Survey METER (Suriastini, Sikoki, & Listiono, 2020) yang dilaksanakan di Indonesia (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan) pada akhir Mei 2020, menunjukkan bahwa tingkat kecemasan dan depresi berkorelasi dengan perubahan status bekerja serta perubahan pendapatan selama pandemi COVID-19. Lebih menariknya lagi, survey di Indonesia ini memperlihatkan bahwa perempuan mengalami tingkat kecemasan lebih tinggi dari pada laki-laki (57% berbanding 53%).

Dari aspek ekonomi, data dari Kemnaker pada Webinar Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021, Quo Vadis Perempuan Indonesia (CNN, 2021a) menunjukkan bahwa 36 persen perempuan pekerja informal harus mengurangi waktu kerja berbayar mereka dibandingkan laki-laki yang hanya 30 persen mengalaminya. Terlebih lagi terdapat 394.158 perempuan atau 34% dari 1.155.630 pekerja yang kehilangan pekerjaan adalah perempuan. Selain itu, sejumlah 92.215 usaha dari 633.421 usaha informal, usaha kecil, mikro yang terdampak pandemi adalah usaha milik perempuan. Situasi tersebut sangat memukul ekonomi perempuan UMKM, mengingat perempuan adalah pelaku atas lebih dari 50 persen UMKM di

Indonesia. Sedangkan, total usaha UMKM sendiri menempati 99 persen dari usaha di Indonesia (2014-2018). Sektor lain yang terdampak antara lain misalnya restoran, perhotelan, akomodasi, dan asisten rumah tangga, di mana tercatat 54 persen dari total 75 juta pekerja di bisnis restoran dan akomodasi merupakan perempuan (CNN, 2021b).

Dari sudut pandang pemberdayaan ekonomi perempuan, maka terlihat bahwa peran keseimbangan dalam pekerjaan dan keluarga sangat menentukan kesejahteraan psikologis pekerja perempuan. Tulisan ini akan mengeksplorasi mengenai ragam permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan di tengah kondisi pandemi serta solusi yang ditawarkan dari berbagai macam perspektif sehingga melahirkan pemahaman yang lebih komprehensif dalam menyikapi fenomena dinamika kehidupan pekerja perempuan.

PEMBAHASAN

Dari uraian latar belakang diatas, dapat lebih difokuskan pada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan semakin tingginya tantangan yang dihadapi pekerja perempuan di tengah kondisi pandemi ini. Pembahasan ini akan meliputi dua kajian utama, yaitu pada aspek permasalahan dan solusi yang coba ditawarkan penulis dengan mendasarkan dari hasil pengamatan lapangan dan penelusuran hasil penelitian.

Masalah yang Dihadapi Pekerja Perempuan di Tengah Pandemi:

1. Pemerasan Waktu (*Time Squeeze*)

Sumber utama permasalahan pekerja perempuan di tengah pandemi adalah jam kerja yang panjang dan laju kehidupan kerja sehari-hari yang terasa semakin cepat. Pandemi bukan berarti menurunnya tuntutan kerja. Baik sistem bekerja dari rumah (BDR) maupun bekerja dari kantor (BDK) atau yang tempat kerjanya membuat sistem BDR-BDK secara bergantian maka justru meningkatkan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Pekerjaan yang biasanya bisa diselesaikan bersama tim atau kelompok kerja menjadi terhambat koordinasinya, belum lagi dengan pendapatan perusahaan yang menurun drastis akan membuat perusahaan melakukan berbagai macam penyesuaian pada target dan strategi baru yang justru lebih menyita perhatian dan pikiran. Pada akhirnya, batas waktu jam kerja menjadi kabur terutama jika pekerja perempuan bekerja dari rumah atau ketika mereka sudah sampai di rumah hanya punya sedikit waktu untuk melakukan pekerjaan rumah. Kondisi pandemi ini mengakibatkan jam kerja yang tidak ramah dan ditambah dengan tekanan kerja yang intensif.

Kebijakan pemerintah (PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level, dll) mengharuskan perempuan yang bekerja untuk tidak hanya menyelesaikan

pekerjaan kantor atau formalnya saja, tetapi pada saat yang sama tugas rumah tangga masih menjadi beban sehari-hari. Menyelesaikan tuntutan dan target atasan sekaligus memasak, mencuci dan membersihkan rumah pada saat yang bersamaan.

Selain itu, masih ditambah lagi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pendidikan jarak jauh. Sistem pembelajaran ini membuat orang tua dan khususnya ibu atau perempuan bekerja mendapat tambahan untuk mendampingi dan sekaligus bertindak sebagai guru bagi anak-anak mereka. Menurut Akanji dkk. (2020) hal ini menimbulkan persepsi hari-hari yang dilalui bagaikan waktu yang diperas (*time squeeze*).

2. Budaya Patriarki (*Patriarchal Culture*)

Budaya patriarki yang sudah menjadi tradisi bahkan kadang diformalkan dalam sistem organisasi pada akhirnya akan melemahkan kondisi perempuan itu sendiri. Budaya patriarki menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal yang sentral. Sistem ini mengakibatkan kesenjangan dan ketidakadilan gender sehingga mempengaruhi aktivitas dalam kehidupan pada berbagai aspek secara psikologi, ekonomi, sosial, dan politik. Budaya patriarki menggambarkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang mutlak sedangkan perempuan memiliki tanggung jawab pada seluruh urusan domestik rumah tangga (mengurus rumah, anak dan orang tua). Berdasarkan pada asumsi supremasi maskulin memunculkan sebuah keprihatinan tentang kurangnya dukungan pasangan dalam membantu pekerjaan rumah tangga, sehingga hal itu semakin memperburuk kondisi perempuan pekerja. Tradisi patriarki selalu menjadi alasan dalam memperlakukan perempuan sebatas dari “belas kasihan” suami, atasan atau ayah mereka, sedangkan laki-laki selalu dibenarkan memiliki otoritas mutlak atas perempuan dan kehidupan profesional mereka (Adisa dkk., 2019).

Budaya patriarki ini mengakibatkan semakin tingginya intensitas keceemasan perempuan di tengah pandemi karena perempuan mempunyai beban yang lebih besar daripada lelaki. Bagi pekerja WFH, bekerja dari rumah membuatnya tidak bisa fokus karena masih harus ditambah dengan mengurus urusan domestik lainnya (melakukan pekerjaan rumah tangga, menemani anak belajar daring, dll) apalagi jika tidak memiliki asisten rumah tangga maka kelelahannya akan berlipat dibanding para suami yang masih berpersepsi bahwa urusan domestik adalah domain pekerjaan perempuan sehingga fokus suami adalah mencari nafkah saja sehingga cenderung kurang membantu istri untuk urusan domestik.

3. Tuntutan Ekonomi (*Financial Problem*)

Awalnya, perempuan memasuki pasar tenaga kerja adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi untuk membantu menambah pendapatan keluarga. Oleh karena itu, banyak perempuan yang memilih sektor informal dengan harapan masih bisa mengurus kepentingan domestik keluarganya. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan perempuan, banyak tenaga kerja perempuan yang berhasil memasuki sektor formal. Dengan demikian, alasan masuknya perempuan pada pasar tenaga kerja sudah tidak murni karena faktor tuntutan ekonomi semata. Emansipasi perempuan pada segala bidang mulai diperhitungkan. Kondisi terjadi sebaliknya selama pandemi ini, dimana justru perempuan yang terkena imbas PHK lebih besar (36%) dibanding laki-laki (30%) di sektor informal. Pada akhirnya, hal tersebut mengakibatkan perempuan merasa harus memutar otaknya untuk ikut menambah pendapatan keluarga atau setidaknya menjaga kestabilan antara pemasukan dan pengeluaran rumah tangga. Bahkan, UMKM yang dominasinya dikelola oleh perempuan ikut terkena dampak penurunan pendapatan sehingga ini semakin menambah pelik masalah dan tantangan yang dihadapi pekerja perempuan untuk tidak tinggal diam terhadap permasalahan ekonomi dan demi semakin membaiknya kualitas kehidupan (*quality of life*).

4. Kesehatan (*Health Problem*)

Dampak dari beban-beban selama pandemi tentu saja akan berakibat kepada kesehatan fisik dan mental seorang pekerja perempuan. Secara natural perempuan mengalami perubahan kadar hormon estrogen dan progesterone. Hal ini saja sudah mempengaruhi sistem saraf yang membuat suasana hati, terlebih lagi ditambah tekanan akibat pandemi akan semakin membuat mereka beresiko mengalami gangguan kesehatan mental. Multi peran yang diemban oleh perempuan, tuntutan pekerjaan dan penilaian dari lingkungan sosial turut mempengaruhi rentannya perempuan mengalami gangguan kesehatan mental.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) tentang ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19, dari 66% responden perempuan yang sudah menikah menunjukkan bahwa gangguan psikologis yang paling banyak dialami adalah mudah cemas dan gelisah 50,6%, mudah sedih 46,9%, dan sulit berkonsentrasi 35,5%. Selain itu penelitian Thibaut dkk (2020) juga mengindikasikan adanya peningkatan risiko kekerasan terhadap perempuan di rumah dan di tempat kerja, Sehingga masalah kesehatan mental selama pandemi Covid-19 terutama pada perempuan memerlukan sebuah kajian yang lebih serius untuk bisa melahirkan kebijakan dalam mengantisipasi dampak-dampak buruk yang mungkin ditimbulkan.

Solusi yang Ditawarkan

Berbagai permasalahan yang telah dieksplorasi tersebut membutuhkan solusi konkret yang dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi tantangan yang dihadapi perempuan selama pandemi. Penulis menawarkan solusi yang dianggap cukup komprehensif dengan melihat dari berbagai perspektif yang seharusnya saling mendukung untuk mengatasi permasalahan pekerja perempuan selama pandemi. Perspektif tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Lingkungan di tempat kerja (*Workplace Environment*)

Organisasi sebagai tempat kerja sangat memberikan pengaruh signifikan pada setiap kondisi yang dialami karyawannya. Lingkungan kerja yang tidak mendukung karyawannya akan menghasilkan banyak sikap kerja negatif diantaranya menurunnya kepuasan kerja, rendahnya kinerja, berkurangnya komitmen kerja, tingginya tingkat absensi dan bahkan melahirkan perilaku penyimpangan. Bagi pekerja perempuan, tempat kerja yang mendukung (*supportive workplace*) sangat membantunya dalam mewujudkan keseimbangan kehidupan kerja dan pribadinya. Hal ini juga didukung penelitian yang dilakukan Anand & Vohra (2019) yang menyatakan bahwa mekanisme tempat kerja yang mendukung kelompok pekerja saat ini menjadi faktor yang sangat menentukan produktivitas pekerja. Lingkungan kerja yang tidak memperhatikan kebutuhan karyawannya terhadap perubahan karakter demografi dan sosial-budaya akan menghambat laju kinerja organisasi sehingga pada akhirnya tidak mampu memenangkan persaingan pasar (Heerwagen dkk, 2016). Di satu sisi, perubahan karakter demografi kelompok pekerja saat ini membawa pada perubahan sikap kerja karyawan yang menuntut konsep baru sebuah lingkungan kerja (Dudovskiy, 2014). Saat ini, preferensi karyawan terhadap lingkungan kerja yang diinginkan telah berubah, dan orang-orang berusaha untuk pindah ke lingkungan kerja yang memberi mereka kesempatan untuk kemajuan karirnya. Konsep penekanan pada produktivitas dengan meningkatkan mobilitas antara karyawan dengan pekerjaannya menjadi relevan bagi organisasi untuk menyediakan lingkungan kerja yang holistik bagi karyawan. Hal ini membutuhkan perubahan signifikan dalam budaya kerja, serta kebijakan yang mengatur kualitas kehidupan kerja lebih baik. Bagi pekerja perempuan, lingkungan kerja yang mendukung ini menjadi prioritas pertama dalam memilih sebuah pekerjaan. Lingkungan kerja yang mendukung bagi pekerja perempuan ini diantaranya adalah: (1) dukungan rekan sekerja. Saat ini, hampir semua pekerjaan bersifat saling tergantung satu sama lain dengan rekan kerja dalam penyelesaiannya. Sehingga, memiliki rekan kerja yang mendukung sangat penting bagi pekerja perempuan. Dalam konsep mereka, hubungan kerja yang baik saja tidaklah cukup, saling mendukung diluar konteks pekerjaan akan meningkatkan hubungan personal diantara pekerjaan

perempuan sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan membantu produktivitas mereka. (2) Memiliki kualitas pertukaran hubungan yang baik dengan atasan menjadi faktor yang penting bagi pekerja perempuan. Diantara bentuk kualitas pertukaran tersebut adalah saling mengetahui ekspektasi pekerjaan satu sama lainnya, sikap saling mendukung dan membantu yang diberikan oleh atasan, bahkan tidak terbatas pada lini pekerjaan saja. Budaya kerja yang menuntut atasan untuk memberikan dukungan pada karyawan tidak terbatas pada kehidupan kerja saja sangat menentukan kualitas pertukaran hubungan atasan dan bawahan. Bagi seorang pekerja perempuan kondisi ini akan meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik lagi. (3) Praktik budaya yang mendukung kebijakan formal. Banyak organisasi memiliki kebijakan sistem kerja yang mendukung keseimbangan kehidupan bagi pekerja perempuan hanya di atas kertas saja, tetapi tidak banyak yang dapat menerjemahkannya dalam penerapan konkret di lapangan. Misalnya, ada peraturan pemerintah bahwa setiap organisasi harus menyediakan ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang masih menyusui anaknya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak banyak yang memanfaatkan ruangan ini karena praktik budaya yang kurang mendukung. Dukungan informal dari atasan dan rekan kerja yang kurang justru semakin menguatkan praktik budaya yang tidak mendukung. Dengan kata lain, untuk benar-benar mendukung pekerja perempuan organisasi tidak hanya memiliki kebijakan formal saja, akan tetapi praktik budaya dan iklim yang kondusif akan mendorong penerapan kebijakan ini.

2. Faktor individu (*individual factor*)

Faktor individu dapat menjadi solusi paling signifikan dalam mengatasi dinamika pekerja perempuan di tengah pandemi. Faktor tersebut diantaranya adalah (1) strategi penyesuaian (*coping strategy*) dan (2) strategi manajemen waktu (*time management strategy*). Berbagai peran yang harus dijalankan seorang pekerja perempuan menuntutnya untuk memiliki strategi penyesuaian yang tepat. Hal ini akan sangat membantu pekerja perempuan dalam mengelola tingkat stres dari berbagai tuntutan peran yang harus dijalannya. Terdapat dua jenis strategi penyesuaian yang umumnya dapat dipakai untuk menyeimbangkan tuntutan peran dalam kehidupan pekerja perempuan, yaitu integrasi dan segmentasi (Nippert-Eng, 2008; Sav dkk, 2014). Bagi pekerja perempuan yang memilih strategi integrasi antara peran kehidupan kerja dan keluarga maka akan berpandangan bahwa kedua peran ini akan saling mendukung satu sama lain ketika mereka coba mengintegrasikannya. Sehingga tidak jarang mereka tampak membawa pulang pekerjaan kantor ke rumah untuk menyelesaikannya kembali atau juga sebaliknya. Selama pandemi, mereka tidak mengenal batas jam kerja dan tidak keberatan jika mereka harus mengurus pekerjaan kantor sambil menyelesaikan urusan rumah tangga atau

juga sebaliknya. Akan tetapi, bagi pekerja perempuan yang memilih strategi segmentasi, mereka memandang bahwa ada batas antara domain kehidupan kerja dan keluarga. Sehingga mereka memilih untuk tidak mencampurkan keduanya untuk mengelola stres dan konflik kepentingan yang ditimbulkan dari tuntutan dua peran tersebut. Kedua jenis pilihan strategi penyesuaian ini tidak akan dapat berjalan dengan baik manakala tidak ada kemampuan dari individu dalam mengelola waktu. Manajemen waktu didefinisikan sebagai kemampuan dalam mengelola waktu untuk menyeimbangkan dengan berbagai tuntutan peran dan kepentingan (Sav dkk., 2014). Merencanakan dan mengevaluasi secara kritis metode terbaik untuk mengendalikan waktu adalah jenis manajemen waktu. Bagi seorang perempuan membuat daftar pekerjaan yang harus dilakukan dengan runtut dan detil setiap harinya sangat membantu mereka dalam memprioritaskan kegiatannya. Hal ini sangat penting untuk memenuhi tuntutan peran dalam kehidupan seorang pekerja perempuan.

3. Dukungan keluarga (*family support*)

Faktor dukungan keluarga tidak bisa diabaikan keberadaannya bagi pekerja perempuan. Praktik budaya patriarki yang lebih menguatkan posisi dan daya tawar laki-laki dalam kehidupan rumah tangga akan cenderung membuka celah perdebatan yang tidak ada selesainya. Sehingga, untuk mengurangi hal ini maka bagi seorang pekerja perempuan dukungan dari keluarga akan sangat membantunya dalam memenuhi semua peran baik di tempat kerja maupun keluarga. Diantara dukungan keluarga tersebut adalah: (1) dukungan dari suami, dimana suami sebagai pasangan dalam rumah tangga yang ikut mendukung pekerjaan istrinya atau ikut membantu dalam mengurus pekerjaan rumah tangga akan sangat membantu bagi pekerja perempuan. Tanggung jawab mengurus rumah dan anak-anak bukanlah berada pada bahu seorang perempuan saja, akan tetapi juga menjadi domain kerja sama pasangan suami istri. (2) Dukungan dari keluarga tidak hanya terbatas dari suami saja akan tetapi juga dari keluarga besar yang lain (*extended family*). Di Indonesia dengan budaya kolektivisme yang tinggi, masyarakatnya sudah terbiasa dengan konsep saling membantu antar saudara. Hal ini sebenarnya membawa keuntungan tersendiri bagi pekerja perempuan. Di lingkungan sekitar tempat tinggal penulis, banyak ditemui pekerja perempuan yang tidak mengalami kesulitan dalam pengasuhan anaknya ketika ditinggal bekerja karena mereka bisa meminta bantuan dari orang tua atau saudara yang tinggal dekat dengannya. Sedangkan bagi pekerja perempuan yang tidak memiliki saudara yang bisa membantunya dalam pengurusan rumah atau pengasuhan anaknya, maka mereka harus memilih untuk menyerahkan pengasuhan anaknya di tempat pengasuhan anak terdekat (*day care*) atau mereka bisa mempekerjakan asisten rumah tangga (*paid housekeeper*) yang dibayar untuk membantu mengurus pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Tentu saja dalam

hal ini, tambahan pengeluaran akan menjadi pos tersendiri yang harus diperhitungkan karena tidak banyak organisasi yang memberikan fasilitas tempat pengasuhan anak untuk karyawannya.

PENUTUP

Kondisi pandemi ini akan berpotensi mengakibatkan peningkatan stres, berdampak buruk pada psikologis perempuan dan bahkan menjadi pemicu ketegangan keluarga dan kehidupan pernikahan (Semlali & Hassi, 2016). Oleh karena itu, berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengusaha dan keluarga harus bekerja sama untuk memberikan dukungan yang signifikan pada pekerja perempuan yang tidak lagi dipandang sebelah mata keberadaannya. Pada gilirannya, dukungan tersebut dapat mencegah dampak negatif dari ketidakseimbangan pekerja perempuan dalam usahanya memenuhi berbagai tuntutan peran dalam hidupnya. Berbagai permasalahan telah diuraikan diatas mulai dari masalah waktu yang seakan diperas, budaya patriarki yang melemahkan posisi tawar perempuan, desakan faktor kebutuhan ekonomi sampai pada masalah kesehatan. Beberapa upaya pun harus dilakukan sebagai langkah konkret dalam mengurangi permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan selama pandemi ini mulai dari pentingnya dukungan di tempat kerja, keluarga dan faktor individu itu sendiri. Selain itu, beberapa upaya untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi dapat dilakukan dengan tetap beraktivitas secara aman. Aktivitas fisik seperti olahraga ringan di rumah sangat disarankan untuk menjaga kebugaran fisik yang pada akhirnya menjaga kesehatan mental di tengah sebanak tugas pekerjaan dan rumah tangga. Gerakan fisik bisa membantu tubuh memproduksi hormon endorphin yang bermanfaat untuk meredakan stres, memperbaiki mood, serta mengurangi rasa khawatir. Pekerja perempuan dapat melakukan aktivitas tersebut bersama dengan keluarganya (orang tua, suami, anak, saudara).

Selain itu, kontribusi dari pasangan atau anggota rumah tangga dalam berbagi peran dan beban akan sangat diharapkan sehingga seorang perempuan pekerja bisa berganti beristirahat atau berhenti sejenak dari rutinitas yang berat. Komunikasi yang baik di antara suami atau anggota keluarga di rumah akan memberikan suasana kerjasama yang hangat dalam berbagi tugas seperti mendampingi anak, membersihkan rumah, memasak dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pola pikir yang sehat dan produktif akan membuat seseorang selalu merasa optimis bahwa *"there is silver lining in every cloud"* akan ada hari yang cerah setelah awan gelap ataupun akan ada selalu ada harapan di balik setiap tantangan kehidupan ini.

Terakhir, menurut Kossek, Lewis, & Hammer (2010) dan Qu & Zhao (2012), salah satu intervensi penting yang bisa dilakukan adalah adanya upaya

terstruktur dan sistematis dari pemerintah mendorong terbitnya peraturan pemerintah dalam menciptakan integrasi pemberdayaan gender pada angkatan kerja dan kebijakan yang melindungi keluarga pekerja (*family-friendly policy*). Contoh dari kebijakan ini adalah tempat kerja atau pengusaha yang memungkinkan pekerja untuk lebih mudah menyeimbangkan kepentingan keluarga dan pekerjaan, dengan kata lain secara bersamaan memenuhi kewajiban keluarga dan pekerjaan mereka. Contoh utama dari program ramah keluarga adalah penitipan anak di kantor. Beberapa contoh yang lain, misalnya cuti hamil dan gaji yang sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak, cuti orang tua bersama, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisa, T.A., Abdulraheem, I. and Isiaka, S.B. (2019). Patriarchal hegemony: investigating the impact of patriarchy on women's work-life balance. *Gender in Management: An International Journal*, 34(1): 19-33
- Akanji, B., Mordi, C., & Ajonbadi, H. A. (2020). The experiences of work-life balance, stress, and coping lifestyles of female professionals: insights from a developing country. *Employee Relations: the International Journal*, 42(4): 999-1015.
- Anand, A., & Vohra, V. (2019). Alleviating employee work-family conflict: role of organizations. *International Journal of Organizational Analysis*, 28(2): 313-332.
- BPS. (2020). *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2019-2020*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>
- CNN. (2021a). 623.407 Pekerja Perempuan Terdampak Covid. Retrieved August 4, 2021, from: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210105062007-532-589453/623407-pekerja-perempuan-terdampak-covid>
- CNN. (2021b). Sri Mulyani: Dampak Pandemi Berat bagi Pekerja Perempuan. Retrieved August 4, 2021, from: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201118205542-532-571612/sri-mulyani-dampak-pandemi-berat-bagi-pekerja-perempuan>
- Dudovskiy, J. (2014). *Changing nature of work in 21st century*, Posted on Research_methodology.net on October 3, 2014.
- Heerwagen, J. Kelley, K. and Kampschorer, K. (2016). *The changing nature of organizations, Work and Workplaces*, available at: www.wbdg.org/resources
- Kossek, E. E., Lewis, S., & Hammer, L. B. (2010). *Work – life initiatives and organizational change: Overcoming mixed messages to move from the margin to the mainstream*.

<https://doi.org/10.1177/0018726709352385>

- Nippert-Eng, C.E. (2008). *Home and Work: Negotiating Boundaries through Everyday Life*. The University of Chicago Press, Chicago, IL.
- Qu, H., & Zhao, X. R. (2012). Employees' work-family conflict moderating life and job satisfaction. *Journal of Business Research*, 65(1), 22–28.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.07.010>
- Sav, A., Harris, N., & Sebar, B. (2014). Australian Muslim men balancing work, family and religion: A positive look at a negative issue. *Personnel Review*, 43(1): 2-18.
- Semlali, S., & Hassi, A. (2016). Work-life balance: how can we help women IT professionals in Morocco? *Journal of Global Responsibility*, 7(2), 210–225.
<https://doi.org/10.1108/jgr-07-2016-0017>
- Suriastini, W., Sikoki, B., & Listiono. (2020). Gangguan kesehatan mental meningkat tajam: Sebuah panggilan meluaskan layanan kesehatan jiwa. In *SurveyMETER* (Vol. 20). Yogyakarta.
- Umi Kulsum, K. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19. Retrieved August 4, 2021, from:
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-terhadap-perempuan-pada-masa-pandemi-covid-19>
- United Nation-Women. (2020). *Menilai Dampak Covid-19 Terhadap Gender Dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Retrieved from:
[https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Report_Counting the Costs of COVID-19_Bahasa.pdf](https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Report_Counting%20the%20Costs%20of%20COVID-19_Bahasa.pdf)
- WHO. (2020). COVID-19 disrupting mental health services in most countries, WHO survey. Retrieved August 4, 2021, from:
<https://www.who.int/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey>

PENDAMPINGAN USAHA KECIL MIKRO DI KOTA SEMARANG MENJADI BANKABLE GUNA MEMPERMUDAH AKSES KREDIT DI LEMBAGA KEUANGAN

Nurjannah Rahayu Kistanti, Andryan Setyadharma, Yozi Aulia Rahman, Phany Ineke Putri

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sangat berperan penting dalam perekonomian suatu negara. UMKM memiliki kontribusi secara sosial dan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan inovasi, sehingga mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan wilayah pedesaan maupun perkotaan (Fatoki dan Asah, 2011). Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di negara maju merupakan akselerator tenaga kerja, inovasi dan pertumbuhan ekonomi (Mura, 2012). Sedangkan di negara-negara berkembang, sektor UMKM telah mengkaryakan lebih dari 22% dari total tenaga kerja produktif (Kayanula, et al., 2000). Dengan adanya UMKM maka dapat mengatasi permasalahan pengangguran, karena dengan berdirinya suatu UMKM dapat menyerap tenaga kerja.

UMKM memiliki banyak permasalahan klasik yang seringkali menjadi faktor penghambat perkembangannya, antara lain minimnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya penguasaan teknologi, kurangnya informasi mengenai akses permodalan, pemasaran dan peningkatan kapabilitas. Faktor permodalan adalah bagian terpenting dalam operasional aktivitas bisnis, karena tanpa kemudahan akses permodalan justru akan mengakibatkan kerentanan terhadap keberlangsungan dan penumbuhan potensi usaha (Rahaman, 2011). Rahaman juga menyatakan bahwa usaha skala kecil dan menengah tidak pernah mudah memperoleh bantuan modal dan jasa perbankan lainnya dengan tingkat bunga dan persyaratan yang terjangkau. Aksesibilitas keuangan baik dari sumber formal maupun informal akan mengurangi permasalahan hambatan kredit yang akan digunakan untuk investasi awal maupun pengembangan usaha (Beck, et.al., 2015).

Lembaga keuangan berperan penting terhadap perkembangan UMKM di Indonesia karena masalah yang sering dihadapi oleh UMKM salah satunya adalah permodalan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut UMKM dapat melalui lembaga keuangan bank ataupun bukan bank. Dari hasil studi Rusdari (2018) menemukan bahwa terbatasnya akses pembiayaan industri kecil terhadap perbankan terutama masalah persyaratan administrasi perkreditan dimana pada umumnya industri kecil tidak bankable.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rusdarti (2017) dengan judul “Pemetaan UMKM Kota Semarang dan Need Assessment sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Usaha dalam Menghadapi MEA”. Hasil penelitian Rusdarti, UMKM di Kota Semarang mayoritas belum memiliki catatan administrasi dan keuangan. Selama ini mereka tidak pernah mencatat biaya produksi yang dikeluarkan, penghasilan dan produktivitas mereka dalam produksi. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan mereka yang minim mengenai pembukuan yang dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Hampir seluruh pelaku usaha UMKM di Kota Semarang berpendidikan rendah. Hal tersebut yang menjadikan pengelolaan usaha dan manajemen usaha mereka kurang baik. Masalah-masalah itulah yang sangat disayangkan, padahal potensi dari hasil produksi tersebut sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan dan dapat diharapkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

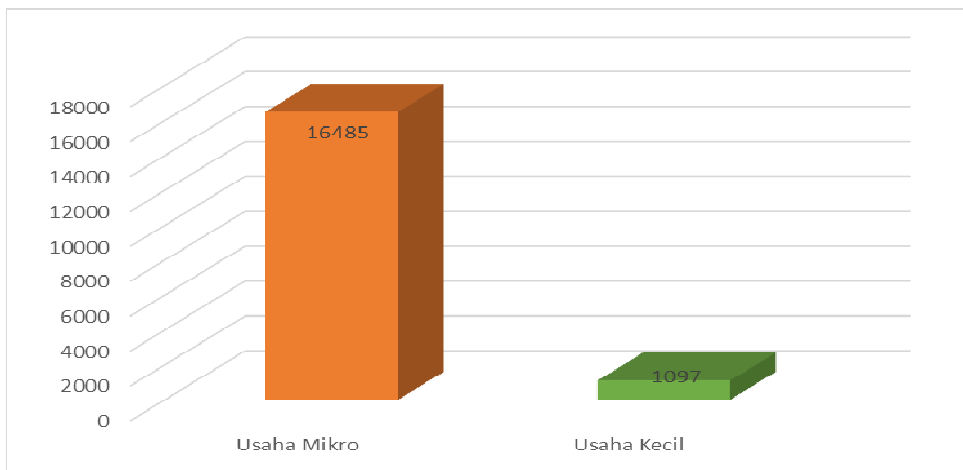
Deputi Pengembangan Kewirausahaan dan Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Taty Ariati menganggap, peran perbankan sejauh ini dalam memberikan akses pendanaan ke Usaha Kecil Menengah (UKM) saat ini dinilai kurang maksimal. Menurut Taty, hal tersebut dikarenakan masih banyak UKM yang kurang bankable atau memenuhi syarat-syarat perbankan. Salah satunya dalam membuat laporan keuangan dan bisnis plan kedepan. Tiga syarat itu adalah dokumentasi usaha yang jelas, *track record* yang positif, dan bisnis atau *cashflow* yang positif

Jika dilihat dari aspek pembukuan baik administrasi maupun keuangan, dari UMKM di Kota Semarang yang terbentuk semuanya belum memiliki catatan administrasi dan keuangan. Selama ini mereka tidak pernah mencatat biaya produksi yang dikeluarkan, penghasilan dan produktivitas mereka dalam produksi. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan mereka yang minim mengenai pembukuan yang dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Hampir seluruh pelaku usaha UMKM di Kota Semarang berpendidikan rendah. Hal tersebut yang menjadikan pengelolaan usaha dan manajemen usaha mereka kurang baik. Masalah-masalah itulah yang sangat disayangkan, padahal potensi dari hasil produksi tersebut sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan dan dapat diharapkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan penyusunan laporan pembukuan dapat mening-

katkan UMKM untuk memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka diperlukannya upaya peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, khususnya pelatihan pembukuan sebagai upaya penguasaan manajemen usaha yang baik guna dapat mengakses kredit di lembaga keuangan dan diperlukan pendampingan dalam implementasi penyusunan pembukuan usaha sampai para pelaku usaha UMKM dapat menguasai dengan baik.

PEMBAHASAN

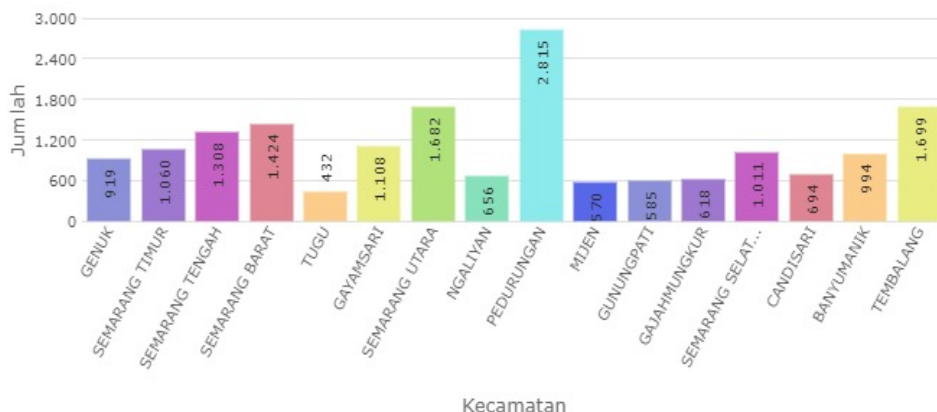
Perkembangan UMK di Kota Semarang sangat pesat. Jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Semarang tiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang produktif. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan mikro lebih resisten dibanding perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Jumlah UMK di Kota Semarang hingga bulan Juli 2021 mencapai sekitar 17.582 usaha dimana terbagi menjadi 2 skala usaha yaitu usaha kecil sebesar 1.097, dan usaha mikro sebesar 16.485.



Sumber: PPID Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2021

Gambar 1 Jumlah UMK di Kota Semarang Berdasarkan Skala Usaha

UMK tersebut pada gambar 2 tersebar diseluruh kecamatan di Kota Semarang. Adapun kecamatan dengan jumlah UMK terbesar yaitu berada di Kecamatan Pedurungan sebesar 2.815 usaha, kemudian disusul oleh Kecamatan Tembalang sebesar 1.699 usaha dan diposisi ketiga terbesar jumlah UMKnya berada di Kecamatan Semarang Utara sebesar 1.682 usaha. Untuk lebih detail persebaran UMK di tiap-tiap kecamatan di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber: PPID Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2021

Gambar 2 Persebaran UMKM Per Kecamatan di Kota Semarang

Dalam upaya pengembangan UKM, faktor modal merupakan salah satu faktor yang cukup penting. Pada tahun 2016 jumlah kredit yang disalurkan kepada UMKM sejumlah 11,70 persen dan yang tidak memperoleh kredit sejumlah 88,30 persen. (BPS, Sensus Ekonomi 2016). Rendahnya porsi kredit perbankan terhadap usaha kecil mikro diantaranya disebabkan oleh masih banyaknya kendala pada akses lembaga perbankan. Beberapa kendala aksesibilitas usaha kecil mikro terhadap kredit perbankan disebabkan oleh beberapa hal yaitu dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, usaha kecil mikro memiliki fenomena dimana pada umumnya usaha jenis ini tidak memiliki laporan keuangan yang baik dan terstandart, dimana hal tersebut menyebabkan pemberi kredit memiliki kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan usaha dari UMKM. Dari sisi penawaran kredit, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ali (2008) menyampaikan bahwa rendahnya perbankan memberikan kredit terhadap usaha kecil mikro terutama disebabkan oleh keterbatasan aset yang dapat dijadikan jaminan, ketidakpastian bisnis di masa depan, lemahnya manajemen keuangan, dan kurangnya *track record* bisnis.

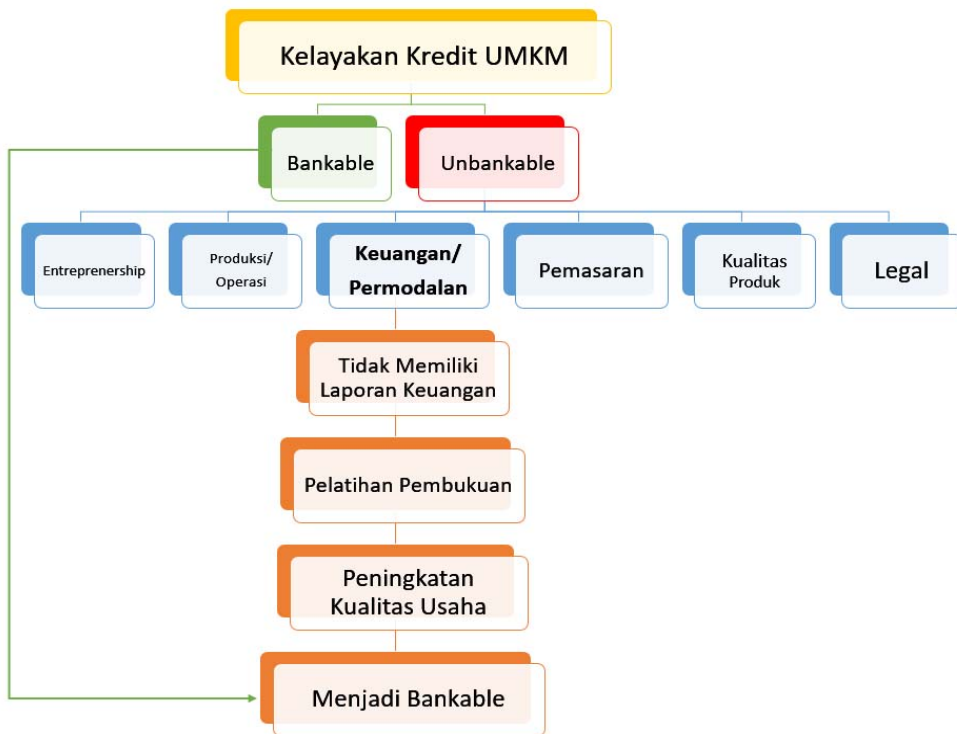
Kesulitan UKM terutama usaha kecil untuk mengakses lembaga keuangan Bank disebabkan pada umumnya UKM tidak dapat memenuhi persyaratan 5C yang diminta oleh Bank. Persyaratan 5C yang diminta oleh Bank terdiri dari faktor *Charakter*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Menurut *Credit Education Foundation*, analisis 5C oleh pihak Bank sebagai calon kreditur adalah untuk menentukan (1) Apakah seorang calon debitur berkeinginan untuk membayar? (***character or credit reputation***); (2) Apakah seorang calon debitur memiliki kemampuan untuk membayar? (***capacity***); (3) Apakah calon debitur mempunyai likuiditas yang cukup untuk membayar? (***capital***);

(4) Apakah calon kreditur mempunyai jaminan jika calon debitur tidak mampu membayar? (*collateral*); (5) Apakah terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan calon debitur untuk membayar? (*condition*). Menurut Suyatno (1997) dalam Hermanto (2006), termasuk ke dalam faktor *capacity* adalah kemampuan calon debitur dilihat dari maju mudurnya usaha serta manajemennya. Dilihat dari kelima persyaratan tadi, terlihat bahwa 4 persyaratan yaitu *character*, *capacity*, *capital*, dan *collateral* merupakan faktor yang berasal dari eksternal perusahaan. Dilihat dari faktor modal (*capital*), usaha kecil sering digambarkan sebagai kelompok dengan permodalan rendah. Rendahnya permodalan ini disebabkan akses UKM terhadap lembaga keuangan formal rendah, sehingga hanya 12% UKM akses terhadap kredit Bank. Kredit perbankan yang diselenggarakan atas dasar komersial, membuat UKM sulit memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama masalah agunan (*collateral*) dan manajemen yang tidak mendukung (*capacity*). Disisi lain, kebanyakan Usaha Kecil belum dikenal oleh Bank, sehingga belum mendapat *trust* dari pihak Bank, dalam hal ini *character* Usaha Kecil juga belum dikenal oleh Bank. Banyak Usaha Kecil yang sebenarnya mempunyai kinerja dan prospek usaha yang baik, tetapi disebabkan linkage antara pihak Bank dan Usaha Kecil belum terbentuk, maka *character* Usaha Kecil belum dikenal baik oleh pihak Bank sebagai calon debitur yang potensial. Peran perbankan dalam mendukung pemberdayaan UKM masih sangat terbatas dan terlalu berhati-hati. Idealnya semua kendala tersebut sejak lama sudah dapat diatasi melalui regulasi perbankan terutama undang-undang perbankan yang menjadi dasar kebijakan pemerataan pemilikan modal (*capital reform*). Namun ironisnya UU perbankan no. 14 tahun 1967 yang diperbaharui dengan UU perbankan no. 29 tahun 1992 cenderung dalam pemberian kredit yang masih mengutamakan unsur *capital* dan *collateral* dengan konsep *The Five C of Credit* yang sangat memberatkan UKM.

Adanya kesulitan dalam mengakses kredit, maka tim mendesain program untuk memberikan pelatihan manajemen usaha agar dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan baik pembukuan administrasi maupun pendampingan pembuatan proposal pengajuan kredit di lembaga keuangan.

Titik kajian dari upaya peningkatan kualitas usaha adalah pada pelatihan pembukuan usaha dan pelatihan tentang membuat proposal pengajuan kredit. Pelatihan pembukuan usaha meliputi segala bentuk pencatatan laporan keuangan dengan berbagai variasi laporan keuangan kemudian pelatihan pembuatan proposal pengajuan kredit. Pelatihan untuk kedua aspek ini dipandang sangat penting mengingat urgensi aspek pembukuan dan pengajuan kredit dalam profesionalisasi usaha. Dari metode pelatihan untuk kedua aspek

ini diharapkan akan tercapai peningkatan kualitas usaha berdasarkan sistem pengelolaan yang berbasis modernisasi sistem pembukuan dan pemasaran.



Gambar 3. Kerangka Pemecahan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan aksi. Pendekatan aksi penguatan ekonomi lokal yang dilakukan meliputi kegiatan pelatihan ketrampilan beberapa usaha ekonomi masyarakat lokal. Jenis ketrampilan yang dilatihkan di setiap daerah berusaha disesuaikan dengan permintaan masyarakat. Kemudian setelah pelaksanaan pelatihan, dilakukan kegiatan pendampingan dan supervisi untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi peserta pelatihan. Kegiatan lanjutannya adalah membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha ekonomi terutama dalam hal memberi solusi terhadap persoalan yang timbul berkaitan dengan kegiatan yang dilatihkan.

Langkah awal yang dilakukan oleh tim menggunakan pendekatan aksi ekonomi adalah mengidentifikasi berbagai aspirasi dan temuan di lapang yang relevan dengan empat prinsip EGPS (keberlanjutan, kemitraan, partisipasi, dan desentralisasi). Dengan memperhatikan potensi UMKM dan sumberdaya manusia yang ada, kemudian ditentukan jenis pelatihan yang dipandang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.



Gambar 3 Tim Pengabdi, Fasilitator dan Perwakilan Pelaku Usaha

Selain berorientasi ekonomi, jenis pelatihan yang diberikan juga menekankan aspek konservasi dan kegiatan yang ramah lingkungan. Langkah selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan pelatihan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Menghubungi instruktur tentang kesediaan, penyiapan modul/ panduan pelatihan, dan waktu pelatihan.
2. Menghubungi UKM yang akan diberikan pelatihan mengenai persetujuan waktu, tanggal, dan tempat, serta penjangkaran peserta pelatihan.
4. Menyiapkan alat dan bahan pelatihan antara lain editing dan perbanyak modul pelatihan; pengadaan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan setiap jenis pelatihan.
5. Peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan aksi ini berjumlah 20 pengusaha UKM di Kota Semarang.

Metode pelatihan yang digunakan berupa pemberian materi di kelas dan dilanjutkan dengan praktek bersama dan/atau peragaan oleh instruktur. Dalam pelaksanaan pelatihan personel yang terlibat antara lain pelatih atau instruktur lokal maupun yang didatangkan dan tenaga ahli tim ekonomi, asisten tim, asisten lokal, pendamping, panitia lokal, dan peserta pelatihan.

Dalam kegiatan pemberdayaan ini, tim memberikan 2 bentuk pelatihan yaitu pelatihan pembukuan dan pelatihan pembuatan proposal pengajuan kredit. *Pertama*, pelatihan pembukuan. Tim pengabdi memberikan pelatihan pembukuan usaha. Selama ini para pelaku usaha ini dalam pengaturan keuangannya belum menggunakan pembukuan. Karena tergolong usaha rumahan yang masih kecil, keuangan usaha ini masih belum dipisahkan

dengan keuangan rumah tangga. Sehingga jumlah pengeluaran dan penerimaan dari usaha tersebut sulit untuk diidentifikasi. Dalam pelatihan pembukuan ini tim mengajarkan teknik pembukuan sederhana yang dengan mudah akan dipahami oleh pelaku usaha karena mengingat mayoritas background pendidikan mereka yang tergolong rendah sehingga diharapkan teknik ini akan mudah dipahami.



Gambar 3 Pemberian Pelatihan Pembukuan

Kedua, Pelatihan pembuatan proposal pengajuan kredit. Tim memberikan pelatihan cara pembuatan proposal pengajuan kredit ke Lembaga keuangan. Tim juga turut memberikan simulasi kredit untuk pelaku usaha berdasarkan kemampuan dan kebutuhan pengembangan usaha para pelaku usaha. Hal ini menjadi penting agar pelaku usaha benar-benar meminjam sesuai dengan batas kemampuan dan kebutuhan ekspansi usahanya. Agar pelaku usaha tidak terbenani angsuran yang besar karena salah perhitungan dalam kredit yang diajukannya.

Setelah pemberian pelatihan kepada pelaku usaha dalam pembukuan usaha dan pembuatan proposal pengajuan kredit, selanjutnya tim pengabdian memberikan pendampingan usaha selama kurang lebih 4 minggu. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk membantu UMKM yang telah diberi pelatihan sebelumnya mengetahui sejauh mana implementasi hasil pelatihan yang diberikan. Selama pendampingan terhadap UMKM, metode yang dilakukan oleh pendamping antara lain melalui metode diskusi bersama anggota pelaku usaha. Melalui kegiatan diskusi tersebut diharapkan dapat ditangkap informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi ataupun faktor-faktor pendorong dalam implementasi kegiatan aksi penguatan ekonomi.



Gambar 4 Pemberian Pelatihan Proposal Pengajuan Kredit

Selama proses pendampingan, pendamping melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim pengabdian. Berbagai temuan atau masalah di lapangan dikonsultasikan untuk memberikan follow up selanjutnya. Secara berkala tim/tenaga ahli turun ke UKM guna meninjau secara langsung bagaimana perkembangan di lapangan sekaligus memonitor dan memberikan pengarahan terhadap kegiatan yang dilakukan pendamping. Setelah kegiatan pendampingan berakhir, supervisi tetap dilakukan untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan program yang dilakukan atas inisiatif pelaku UKM.



Gambar 5 Proses Pendampingan dan Supervisi

Dari hasil pendampingan tersebut diketahui, sebagian besar masyarakat pelaku usaha dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah diberikan oleh tim pada saat pelatihan. Perlu adanya media pendukung untuk mensupport kegiatan pengelolaan usaha melalui pembukuan yang baik diantaranya adalah buku akuntansi untuk pembukuan atau sistem yang sederhana yang bisa digunakan dalam komputer atau smartphone.

Para peserta pemberdayaan sangat berantusias dalam mengikuti berbagai kegiatan ini dari mulai kegiatan pelatihan sampai tahap pendampingan. Para peserta merasa mendapatkan banyak pengetahuan-pengetahuan baru terkait dengan pembukuan usaha dan diharapkan pengelolaan usaha akan termanage dengan baik sehingga mendukung kelancaran usaha.

PENUTUP

Dari hasil kegiatan pemberdayaan ini dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) kegiatan pemberdayaan ini meliputi kegiatan pelatihan pembukuan usaha, pembuatan proposal pengajuan kredit dan pendampingan. (2) Dalam pelatihan pembukuan tim mengajarkan teknik pembukuan sederhana yang dengan mudah akan dipahami oleh pelaku usaha. (3) Peserta antusias dalam pembuatan proposal pengajuan kredit ke perbankan dan melakukan simulasi kredit untuk pengembangan usahanya. (4) Tim pengabdian juga melakukan pendampingan usaha selama kurang lebih 4 minggu yang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap pelatihan, praktek pembukuan masing-masing usaha dan evaluasi. Dari hasil pendampingan tersebut diketahui, sebagian besar masyarakat pelaku usaha dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah diberikan oleh tim pada saat pelatihan.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: (1) Perlu adanya media pendukung untuk mensupport kegiatan pengelolaan usaha melalui pembukuan yang baik diantaranya adalah buku akuntansi untuk pembukuan atau sistem yang sederhana yang bisa digunakan dalam komputer atau smartphone. (2) Diperlukan sosialisasi produk layanan kredit perbankan yang dapat diakses oleh UKM

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Beck, T., Lu, L., Yang, R., 2015. Finance and Growth for Microenterprises: Evidence for Rural China. *World Development*, 67, 38-56.
- Biro Pusat Statistik, *Semarang Dalam Angka 2015*, BPS Kota Semarang.

- Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang. *Data Jumlah UMKM Kota Semarang Tahun 2015*.
- Fatoki O, Asah F. 2011. The Impact of Firm and Entrepreneurial Characteristics on Access to Debt Finance by SMEs in KingWilliams' Town, South Africa. *International Journal of Business and Management*. 6(8): 170-179.
- Kushi, Evis. 2010. Some Problems.
- Marijan, Kacung, 2005, *Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui Pendekatan Kluster*, INSAN Vol. 7 No. 3, Desember 2005.
- McCann, Joseph E. III; Leon-Guerrero, Anna Y; Haley, Jonathan D. Jr. 2001. Strategic Goals and Practices of Innovative Family Business, *Journal of Small Business Management*, 39 (1) : 50.
- Osotimehin, K.O. 2012. An Evaluation of the Challenges and Prospects of Micro and Small Scale Entreprises development in Nigeria. *American International Journal of Contemporary Research Vol. 2 No. 4; April 2012*.
- PPID Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. 2021. Data UMKM Kota Semarang. Available at:
<https://diskopumkm.semarangkota.go.id/informasi-publik/informasi-berkala/umkm>
- Rahaman, Mohammad M., Access to Financing and Firm Growth (June 11, 2010). *Journal of Banking and Finance*, Vol. 35, 2011. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1624006>
- Riyadi dan Deddy Supriady Brantakusumah, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rusdarti, Titik Haryati. 2017. *Pemetaan UMKM Kota Semarang dan Need Assessment Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Usaha dalam Menghadapi MEA*. Penelitian yang dibiayai oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Rusdarti, Rusdarti; Kistanti, Nurjanah Rahayu. How to Enhance MSMEs Readiness? an Empirical Study in Semarang Municipality. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 108-122, mar. 2018. ISSN 2460-5123. Available at:
<<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/13647>>. Date accessed: 15 mar. 2018.
doi:<https://doi.org/10.15294/jejak.v11i1.13647>.
- Singarimbun, Masri, Efendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survey*, Cetakan kedua, LP3ES, Jakarta.
- Sulistyastuti, Dyah Ratih, Muhammad Prayoga dan Nisa Agistian Rachman. 2014. Gearing up for ASEAN Economic Community: SME Response and Preparedness to Regional Market Integration. *Proceedings ICONAS Conference*.

- Tambunan, Tulus. 2013. ASEAN Economic Community 2015: Opportunities and Challenges for SMES Indonesia (*Policy Paper*).
- Todaro, Michael P., 2003, Economic Development, Eight Edition, Pearson Education Limited, United Kingdom.
- Umar, Husein. 1999. *Riset Strategi Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

PEMBERDAYAAN GURU PESANTREN MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS *FLIPPED CLASSROOM* UNTUK MENGEMBANGKAN PROFESIONALITAS GURU

Suci Nurpratiwi

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di sekolah. Lembaga pendidikan terlebih lagi sumber daya guru perlu dapat selalu beradaptasi dengan kemajuan sehingga mendorong berbagai usaha perubahan. Penggunaan alat-alat atau media pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Penggunaan media teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 10 menegaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Salah satu unsur kompetensi pedagogik adalah guru mampu mengembangkan dan memanfaatkan media dan sumber belajar. Hal ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa dalam pembelajaran, guru wajib menggunakan sumber belajar.

Di sisi lain, masih banyak guru yang belum terbiasa mengembangkan media pembelajaran. Pada saat ini guru-guru masih banyak mengalami kesulitan dalam menyusun, merancang atau membuat media pembelajaran. Kebanyakan guru hanya memanfaatkan buku ajar saja sebagai sumber dan media dalam mengajar. Padahal, penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dapat membantu siswa memahami materi pelajaran secara lebih efektif, serta dapat mengasah kreatifitas berpikirnya.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh pusat teknologi dan komunikasi (pustekkom) kementerian pendidikan dan kebudayaan, menyatakan bahwa hanya 40 persen guru di Indonesia yang siap dengan teknologi (Maharani, 2018). Guru berpendapat media pembelajaran sangat diperlukan dalam mendukung kualitas pembelajaran. Namun fakta yang terungkap

menunjukkan bahwa produktivitas guru dalam pengembangan media pembelajaran sangat rendah. Rendahnya produktivitas guru dalam pengembangan media pembelajaran diakibatkan antara lain (1) kurangnya kemampuan guru dalam pengembangan media pembelajaran dan ketersediaan waktu guru yang kurang (Isnarto et al., 2017).

Wina (Sanjaya, 2008) mengemukakan bahwa agar guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator, maka guru perlu memahami hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar. Sehingga guru dituntut untuk dapat menyediakan sumber dan media belajar yang beragam dalam setiap kegiatan pembelajaran.

Sistem pembelajaran elektronik adalah cara baru dalam proses belajar mengajar. E-learning merupakan konsekuensi logis dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Dengan memanfaatkan e-learning, pembelajaran akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Peran guru dalam pembelajaran menjadi faktor penentu keberhasilan belajar siswa. Guru selalu dituntut agar materi pembelajaran yang disampaikan dapat dikuasai siswa secara tuntas. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media pembelajaran sangat penting. Ketidadaan media sangat memengaruhi proses belajar mengajar, media pembelajaran dapat membantu mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru.

Berdasarkan hal tersebut, maka guru perlu memiliki kompetensi yang dapat mengakomodir tuntutan perubahan zaman, salah satunya yaitu kompetensi dalam penggunaan media pembelajaran di kelas. Upaya pemenuhan kompetensi tersebut tidak dapat berjalan dengan sendirinya, maka perlu dilakukan pendampingan kepada guru-guru dalam pembuatan media pembelajaran digital, yakni pembuatan media pembelajaran e-learning berbasis *flipped classroom*. Oleh karena itu pendampingan ini sangat penting dan diharapkan bermanfaat bagi guru dan lembaga Pendidikan pesantren yang dijadikan sebagai mitra.

Kegiatan pemberdayaan guru melalui pendampingan pembuatan media pembelajaran E-learning berbasis *flipped classroom* merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memaksimalkan perannya di kelas. Dengan meningkatkan kompetensi tersebut, diharapkan agar guru dapat menerapkan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga pembelajaran menjadi berkualitas dan berhasil.

Posisi pesantren sebagai pusat lembaga yang berbasis agama Islam seyogyanya pesantren mampu menempatkan dirinya menjadi agen perubahan masyarakat, bukan malah sebaliknya. Hal ini mengindikasikan Islam adalah

agama yang rahmatan lil'alamin, tidak anti terhadap perubahan dan perkembangan sepanjang perubahan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam (Iryana, 2015). Guru-guru di pondok pesantren perlu terbuka dengan perkembangan, terutama dalam modernisasi pembelajaran di kelas. Akan tetapi, saat ini terdapat kecenderungan bahwa guru-guru di pondok pesantren belum menggunakan media pembelajaran secara optimal. Pembelajaran masih didominasi dengan sistem klasikal. Dengan demikian perlunya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi didasarkan pada pertimbangan praktis-teoritik seperti efisiensi dan efektivitas pembelajaran, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas guru dalam penggunaan media pembelajaran untuk dapat memenuhi tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik.

PEMBAHASAN

A. Media Pembelajaran E-Learning

E-learning sangat potensial untuk membuat proses belajar lebih efektif sebab peluang siswa untuk berinteraksi dengan guru, teman, maupun bahan belajarnya terbuka lebih luas. Siswa dapat berkomunikasi dengan gurunya kapan saja, yaitu melalui e-mail. Demikian juga sebaliknya. Sifat komunikasinya bisa tertutup (*asynchronous*) antara satu siswa dengan guru atau bahkan secara langsung (*synchronous*) bersama-sama. Melalui e-learning, para siswa dimungkinkan untuk tetap dapat belajar sekalipun tidak hadir secara fisik di dalam kelas. Kegiatan belajar menjadi sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan ketersediaan waktu para siswa. Kegiatan pembelajaran terjadi melalui interaksi siswa dengan sumber belajar yang tersedia dan dapat diakses dari internet. Fleksibilitas kegiatan pembelajaran dimungkinkan terjadi melalui pemanfaatan teknologi komputer dan internet. Dalam kaitan ini, untuk dapat mengikuti kegiatan e-learning, tidak diperlukan adanya tambahan perangkat lunak tertentu di komputer yang akan digunakan, asal komputer tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas koneksi ke internet.

Saat ini e-learning merupakan istilah yang menekankan terhadap kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi jaringan komputer dan internet.

Model e-learning dapat dipilah menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah guru dan peserta didik dapat berinteraksi secara langsung melalui media komputer (pada waktu yang sama pada tempat berbeda). Artinya pada saat yang sama guru dapat langsung berkomunikasi pada waktu yang bersamaan meski jarak memisahkan mereka. Contoh dari kategori ini adalah chatting, video conference, dan sejenisnya. Sedangkan untuk skala yang lebih kecil (komputer yang tidak terhubung ke internet), seorang guru memanfaatkan aplikasi tutorial tertentu sehingga peserta didiknya dapat mengikuti

kegiatan secara aktif pada waktu bersamaan meski berada pada tempat (ruangan) terpisah.

Sedangkan untuk kategori kedua yaitu guru dan peserta didik tidak harus selalu saling berinteraksi secara langsung. Artinya bisa saja guru sekedar meninggalkan pesan (materi) yang harus dibaca/dikuasai. Peserta didik dapat mengakses materi tersebut kapan saja dan dimana saja (tentu saja dengan jadwal tertentu). Meski demikian mereka masih dapat berinteraksi meski tidak secara langsung. Contoh kategori ini adalah penggunaan e-mail dan website (blog).

Dalam pelaksanaannya, pada untuk situasi tertentu, sistem pembelajaran e-learning membutuhkan kolaborasi antar peserta didik. Kolaborasi antar peserta didik diharuskan terjadi terutama jika materi tersebut mengharuskan adanya kolaborasi. Dalam proses kolaborasi antar siswa, guru bisa saja terlibat didalamnya secara tidak langsung, dalam rangka membantu proses kolaborasi dengan cara memberikan arahan berupa message untuk memecahkan masalah. Sehingga diharapkan proses kolaborasi menjadi lebih lancar (Hadiana & Djaelani, 2002).

B. Model Pembelajaran *Flipped Classroom*

Pembelajaran dengan menggunakan model *flipped classroom* merupakan pengondisian kelas belajar yang dilaksanakan secara terbalik. Kelas konvensional biasanya pembelajaran di dalam kelas yaitu untuk mempelajari materi pelajaran kemudian didiskusikan selanjutnya pemberian tugas dikerjakan di rumah masing-masing siswa (Farhan, 2018). Adapun dalam model pembelajaran *flipped classroom*, materi pelajaran telah lebih dulu dipelajari oleh siswa di rumah, dengan tentunya guru memberikan bahan atau materi ajar kepada siswa untuk dipelajari, selanjutnya pembelajaran di kelas adalah untuk mengerjakan tugas-tugas ataupun diskusi mengenai hal-hal yang belum dapat dipahami ketika belajar secara mandiri di rumah. Biasanya materi pelajaran diberikan dalam bentuk video, bahan presentasi, atau ringkasan dari guru.

Pemberian materi pembelajaran dalam model *flipped classroom* merupakan bentuk pembelajaran asynchronous dengan tipe pembelajaran mandiri di rumah. Sedangkan pembahasan hal-hal yang perlu didiskusikan ataupun penugasan dilakukan dengan synchronous learning yang dapat berupa tatap muka maupun tatap maya.

Ketika pembelajaran di kelas berlangsung, guru dapat menanyakan terkait materi yang telah dikirimkan sebelumnya kepada siswa, bertanya mengenai pemahaman mereka, hal-hal yang belum dapat dipahami, hingga mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai materi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya guru untuk memastikan bahwa siswa benar-benar mempelajari

materi yang telah diberikan. Di kelas, siswa kemudian mencoba menerapkan apa yang sudah mereka pahami ketika belajar mandiri dengan berdiskusi dalam memecahkan masalah atau melakukan kerja praktek (Nurpratiwi et al., 2021).

Tugas guru di dalam kelas hanyalah sebagai pendamping atau fasilitator saja, yang memberikan dorongan kepada siswa untuk mengeksplor pemahamannya dan saling bertukar pendapat dengan siswa lainnya. Adapun upaya lebih lanjut siswa dapat diminta untuk melaksanakan tugas proyek secara berkelompok maupun melakukan sebuah penyelidikan studi kasus secara individu.

Ada banyak komponen opsional lainnya yang bisa dibilang mengoptimalkan struktur ini dan memberikan kesempatan belajar yang lebih baik kepada peserta didik. Format yang digunakan dalam pembelajaran *flipped classroom* beragam dan berevolusi dari slide, audio, podcast, atau presentasi yang diceritakan, hingga video gips yang mungkin juga menggabungkan animasi, tangkapan layar, dan konten multimedia lainnya. Sebenarnya, pendidik dapat menggunakan berbagai cara untuk mengajar dengan flip karena konteks pembelajaran dan tujuan menentukan cara mana yang paling berguna.

Penggunaan waktu belajar di kelas secara efektif dan efisien menjadi salah satu tuntutan dari kurikulum. Pada model pembelajaran *flipped classroom*, waktu belajar dikelas akan dapat digunakan secara maksimal dengan mengerjakan latihan-latihan soal maupun tugas lainnya yang akan lebih dapat mengasah kemampuan berpikir siswa.

Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran model *flipped classroom* adalah sebuah keniscayaan. Dengan berbantuan teknologi, guru dapat membuat bahan ajar digital yang dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun, contohnya adalah video pembelajaran dari guru.

Berubahnya orientasi pembelajaran dari konvensional dengan mengedepankan keaktifan peserta didik menjadi poin utama dalam pembelajaran *flipped classroom*. Dengan desain pembelajaran yang menarik, dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat terlibat lebih jauh dan lebih dalam dengan materi yang sedang dipelajari. Penggunaan waktu secara efektif dalam model *flipped classroom* ini dapat memberikan perbaikan yang potensial, di antaranya lebih banyak waktu untuk berinteraksi dan mengklarifikasi materi, lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi konsep secara mendalam, dan lebih banyak waktu untuk tujuan pembelajaran tambahan atau praktik dengan pembelajaran aktif.

Pada umumnya dalam pembelajaran konvensional, siswa lebih sering untuk mencatat apa yang disampaikan oleh guru, bukan justru memahami apa

yang disampaikan. Dampaknya adalah siswa tidak dapat menyimpulkan poin utama yang guru coba jelaskan kepada mereka. Pembelajaran *flipped classroom* dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut karena pembelajaran di kelas tidak lagi berupa penyampaian materi dengan ceramah dari guru, penjelasan guru telah ada pada materi yang sudah diberikan sebelumnya kepada siswa untuk dipelajari secara mandiri di rumah. Dengan begitu, siswa dapat mengulang-ulang membaca materi yang dianggap belum dapat dipahami secara utuh.

Karena pembelajaran di kelas lebih menekankan pada *applying the concept*, maka kesempatan guru untuk dapat mengidentifikasi kesalahan siswa dalam berpikir akan lebih besar. Terlebih apabila guru mendesain metode pembelajaran yang membuat siswa belajar secara bersama dalam suatu kelompok untuk memecahkan sebuah permasalahan. Di samping itu, interaksi sesama siswa dalam model pembelajaran *flipped classroom* lebih terlihat. Siswa dapat mempelajari cara berpikir siswa lainnya, dan dapat saling mendukung terhadap perbedaan kemampuan yang dimiliki diantara mereka.

Sebagaimana semboyan pendidikan "*Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*", dalam pembelajaran model *flipped classroom* guru tidak hanya berperan sebagai pemimpin kelas yang berada di depan, akan tetapi guru dapat berada selaras dengan siswa untuk memberikan semangat dalam pembelajaran yang kooperatif, dan berada di belakang untuk memberi dorongan dan motivasi agar siswa mampu memahami dan mengerjakan latihan dan tugas dengan baik dan benar.

Flipped classroom merupakan suatu cara yang dapat diberikan oleh pendidik dengan meminimalkan jumlah instruksi langsung dalam praktek mengajar di kelas sambil memaksimalkan interaksi peserta didik satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang menyediakan tambahan yang mendukung materi pembelajaran bagi peserta didik yang dapat diakses secara online. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat menjadikan waktu pembelajaran di kelas lebih efektif dan efisien, karena dalam pembelajaran konvensional biasanya waktu banyak tersita oleh ceramah pendidik, namun dalam *flipped classroom* waktu di kelas lebih banyak digunakan untuk aktivitas peserta didik. Sehingga waktu pembelajaran di kelas lebih bermutu (Johnson, 2013).

C. Metode

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah guru Pondok Pesantren Modern Nurul Huda Bekasi sejumlah 23 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipan, wawancara semistruktur, serta studi pustaka. Adapun realisasi pemecahan masalah dari metode yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilakukan dengan cara tim melakukan sosialisasi kepada Ketua Yayasan, Kepala Madrasah, dan guru-guru di Pondok pesantren Modern Nurul Huda Bekasi mengenai rencana adanya kegiatan pendampingan. Kegiatan sosialisasi disambut baik dengan respon yang positif dari para stake holder yang ada di pondok pesantren hal tersebut dikarenakan pendampingan pembuatan media dirasa sangat penting dalam membantu guru-guru untuk dapat aktif dalam penggunaan media *pembelajaran e-learning* terhadap siswa.

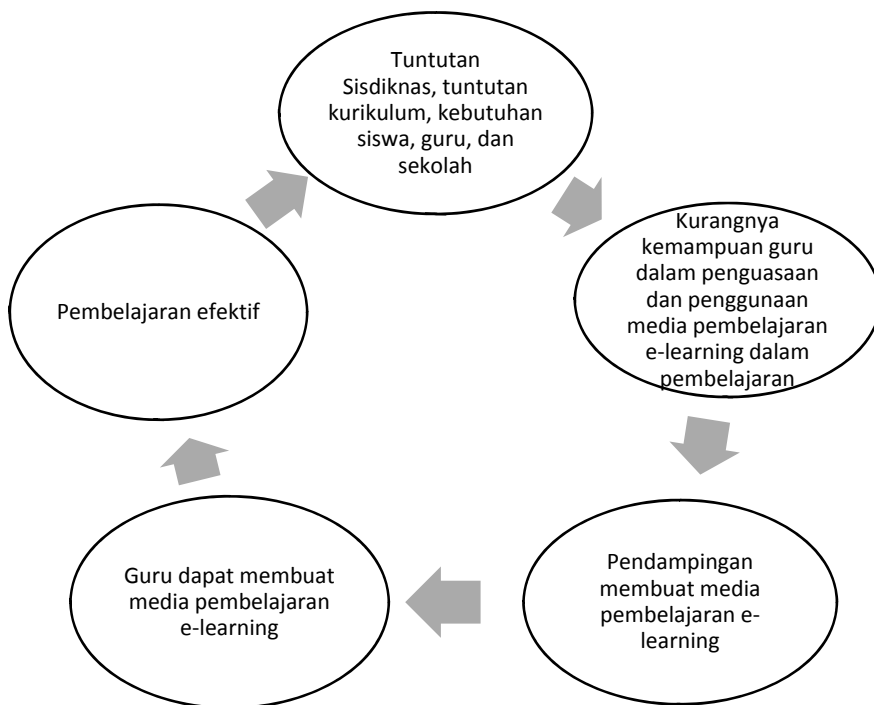
2. Tahap Pendataan Peserta Pelatihan

Setelah proses sosialisasi selesai, dilakukan pendataan bagi guru-guru yang akan mengikuti kegiatan pendampingan pembuatan media pembelajaran e-learning di Pondok Pesantren Modern Nurul Huda.

3. Tahap Penyusunan Jadwal pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini, tim menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pendampingan, yang diawali dengan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dalam rangka pemecahan masalah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemecahan masalah

D. Pemberdayaan Guru Pesantren Melalui Pendampingan Pembuatan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis *Flipped Classroom*

Meningkatnya mutu pendidikan terlihat dari perubahan pada peserta didik, baik hasil belajar, sikap, maupun keterampilannya (Nurpratiwi & Amaliyah, 2020). Guru pesantren diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dengan memiliki dan menguasai empat kompetensi guru sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Didalamnya, UU GDS menyebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, meliputi tugas, keterampilan, sikap, nilai, apresiasi diberikan dalam rangka keberhasilan hidup/penghasilan hidup (Finch & Crunkilton, 1992).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen terdapat beberapa butir penjelasan mengenai ketentuan yang perlu dipenuhi sebagai guru atau dosen. Ketentuan-ketentuan tersebut apabila disimpulkan dapat menjadi sebuah rangkaian ide pokok (main idea) yang bermakna bahwa profesi guru adalah pekerjaan yang didalamnya terdapat tugas dan tanggung jawab, baik terhadap Tuhan maupun sesama manusia yang harus diemban berdasarkan keahlian di bidang pekerjaan yang mampu mengembangkan kekaryaanya secara ilmiah serta mampu menekuni profesinya selama hidupnya. Pokok pikiran tersebut dapat pula disarikan menjadi tiga hal yang terkait dengan profesionalitas guru yaitu a) keahlian, b) komitmen, dan c) keterampilan (Salikin, 2011).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Standar kompetensi guru dipilah ke dalam tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu pengelolaan pembelajaran, pengembangan profesi, dan penguasaan akademik (Guru Pendidikan, 2021)

Kegiatan pendampingan pembuatan media pembelajaran e-learning berbasis *flipped classroom* ini merupakan dilaksanakan melalui tiga tahapan. Adapun realisasi pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Kegiatan

Kegiatan pendampingan bagi para guru-guru di pondok pesantren ini didahului dengan adanya studi pendahuluan, dimana dilakukan peninjauan dan pemetaan serta menganalisis kebutuhan guru-guru akan kompetensinya terhadap pembuatan media pembelajaran e-learning. Setelah mengetahui dan menganalisis kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh guru dalam mengajar, terutama perihal media pembelajaran, kemudian mengadakan komunikasi

langsung dengan pimpinan pondok pesantren terkait perizinan melaksanakan kegiatan. Setelah didapatkan izin, kemudian tim mendata jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan pendampingan. Tim selanjutnya merancang kegiatan yang akan dilaksanakan dan membuat bahan presentasi.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan terbagi ke dalam dua sesi, yaitu sesi pemberian materi dan sesi praktik. Tim berusaha memberikan materi secara menarik dan menyenangkan melalui pemberian materi secara manual mengenai media pembelajaran e-learning. Metode yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan tutorial singkat. Setelah materi selesai diberikan, tim memberikan pendampingan bagi para guru dengan praktik membuat media pembelajaran e-learning. Sesi praktek dilaksanakan dengan workshop yang memfasilitasi peserta untuk menyiapkan satu materi bahan ajar yang kemudian digunakan sebagai bahan desain rancangan media dalam melaksanakan pembelajaran *flipped classroom*.

Sesi	Metode	Kegiatan
Pertama	Ceramah, diskusi, tanya jawab, tutorial singkat	Memberikan penjelasan mengenai karakteristik media pembelajaran e-learning, macam dan jenisnya. Diharapkan peserta dapat mengikuti kegiatan pendampingan dengan antusias, dan mampu menyerap dengan cepat penjelasan yang disampaikan oleh fasilitator
Kedua	Praktik	Peserta praktik membuat media pembelajaran e-learning, menyiapkan bahan ajar dan tujuan pembelajaran. Hasil akhirnya adalah peserta dapat menghasilkan media pembelajaran e-learning

3. Evaluasi Kegiatan

Setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan, dilakukan evaluasi kegiatan yang tujuannya menganalisis kegiatan pendampingan yang telah dilakukan, melihat media pembelajaran e-learning yang telah dibuat oleh peserta, memberikan masukan, dan memberikan kuesioner mengenai kegiatan pengabdian kepada peserta untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Sehingga diperoleh masukan dan saran agar ke depannya program pendampingan dapat lebih baik dan ditingkatkan kualitasnya.

Untuk membantu memastikan bahwa kegiatan pendampingan telah berhasil, terdapat beberapa indikator yang digunakan, yaitu:

- Peserta mengikuti seluruh sesi pendampingan dengan antusias

- Peserta dengan cepat mampu menyerap materi yang disampaikan
- Peserta dapat menghasilkan media pembelajaran e-learning berbasis *flipped classroom* yang dapat digunakan dalam pembelajaran.

Implementasi Kegiatan Pendampingan Pembuatan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis *Flipped Classroom*. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan praktik. Tim berusaha untuk memberi materi secara menarik. Setelah memberi penjelasan mengenai materi, tim mengajak kepada guru untuk melakukan simulasi dan praktik membuat media pembelajaran e-learning.

Pelaksanaan dimulai dengan penyampaian penjelasan mengenai materi media pembelajaran e-learning berbasis *flipped classroom* kepada para guru. Tim menyampaikan pentingnya penggunaan media pembelajaran dalam mengajar, pentingnya e-learning dalam pembelajaran era digital ini, serta pentingnya model pembelajaran *flipped classroom*.

Kegiatan pendampingan pembuatan media pembelajaran e-learning berbasis *flipped classroom* dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern Nurul Huda Bekasi. Peserta yang mengikuti kegiatan merupakan guru-guru pondok pesantren sejumlah 23 orang. Kegiatan diawali dengan pengenalan kemudian dilanjutkan dengan sesi pertama yaitu penjelasan mengenai pengertian e-learning, karakteristik, manfaat, jenis, dan urgensinya dalam pembelajaran, yaitu bahwa guru perlu dapat menyesuaikan dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tuntutan perkembangan pendidikan di era teknologi informasi, salah satunya penggunaan media dalam pembelajaran perlu mengadaptasi perkembangan teknologi, sehingga media pembelajaran perlu berbasis e-learning.

Setelah menjelaskan mengenai e-learning, urgensi, macam, dan karakteristiknya, materi dilanjutkan dengan penjelasan mengenai model pembelajaran *flipped classroom*. *Flipped classroom* merupakan model pembelajaran kelas terbalik dimana siswa yang pada pembelajaran konvensional di kelas mempelajari materi pelajaran dan di rumah/ di asrama mengerjakan tugas, pada pembelajaran *flipped classroom* justru sebaliknya. Siswa di rumah/ di asrama mempelajari materi pembelajaran, lalu di kelas mengerjakan tugas-tugas latihan maupun diskusi untuk pemahaman lebih lanjut. Pembelajaran dengan model *flipped classroom* dianggap lebih efektif daripada pembelajaran konvensional, karena dapat mengubah pola pembelajaran konvensional yang bisa saja dapat membuat siswa bosan hanya mendengarkan ceramah dari guru, juga siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran akan terbantu, karena waktu di kelas lebih banyak digunakan untuk diskusi dan latihan.

Selanjutnya dipaparkan bahwa model pembelajaran *flipped classroom* merupakan model pembelajaran blended learning yang penekanannya adalah pada strategi, metode, dan media pembelajaran yang diberikan oleh guru. Agar siswa dapat mempelajari materi pelajaran lebih dulu di rumah atau di asrama, maka guru perlu memberikan media pembelajaran berbasis e-learning. Media pembelajaran e-learning yang dibuat oleh guru tidak harus selalu memanfaatkan jaringan internet, guru dapat mengemasnya melalui media yang menarik, bisa dengan e-book atau slide powerpoint, akan tetapi akan lebih menarik lagi apabila guru dapat membuat video pembelajaran dari powerpoint, ataupun membuat video pembelajaran dengan adanya gambar visual dan penjelasan materi langsung dari guru itu sendiri. Dengan demikian, maka kemampuan guru -dalam hal ini peserta- untuk penguasaan media pembelajaran e-learning perlu menjadi perhatian.

Dijelaskan juga beberapa tipe atau kuadran dalam setting pembelajaran, diantaranya yaitu tatap muka (*live synchronous*), tatap maya (*virtual synchronous*), asinkron mandiri (*self-paced asynchronous*), dan asinkron kolaboratif (*collaborative asynchronous*). Pembelajaran *flipped classroom* merupakan pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran asinkron mandiri. Kemudian dipaparkan bahwa pembelajaran *flipped classroom* dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi Learning Management System (LMS) untuk dapat membuat kelas secara online. Beberapa LMS yang dapat digunakan untuk mendukung berjalannya model pembelajaran *flipped classroom* yaitu diantaranya Google Classroom, Edmodo, Seesaw Class, Schoology, ataupun bisa juga aplikasi-aplikasi pada sosial media.

Setelah memberikan penjelasan mengenai pembelajaran *flipped classroom*, dan macam-macam media e-learning yang dapat digunakan, selanjutnya diberikan sedikit penjelasan mengenai tutorial dalam pembuatan media pembelajaran *e-learning*. Media pembelajaran yang disampaikan kepada peserta adalah pembuatan video pembelajaran. Dipaparkan bahwa membuat media pembelajaran berbasis video sangat beragam teknik pembuatannya. Apabila menggunakan laptop, peserta dapat membuat video pembelajaran dengan cara merekam layar laptop menggunakan aplikasi Camtasia, atau jika peserta menggunakan handphone dalam membuat video pembelajaran, peserta dapat menggunakan bantuan aplikasi Kinemaster. Keduanya sangat mudah untuk digunakan. Namun dari keduanya itu, dalam pendampingan ini tutorial pembuatan video pembelajaran yaitu membuat video pembelajaran yang sederhana, yakni pemanfaatan aplikasi powerpoint dengan mengaktifkan fitur-fitur perekaman audio visual yang ada didalamnya untuk dijadikan sebuah video pembelajaran.

Pembuatan video berbasis powerpoint dengan alasan bahwa peserta dapat mengoptimalkan aplikasi powerpoint yang prinsipnya aplikasi tersebut

sudah pasti dimiliki oleh peserta pada masing-masing laptopnya, sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk terlebih dahulu menginstal aplikasi baru, di sisi lain, keterbatasan waktu kegiatan yang ada, sehingga pendampingan perlu mengukur efektivitas dan efisiensi waktu namun tetap dapat tersampaikan esensinya. Video pembelajaran berbasis powerpoint dapat menampilkan audio dan visual. Audio yaitu dalam bentuk penjelasan dari guru dalam video tersebut, dan visual yaitu adanya tayangan penjelasan pada powerpoint dan gambar guru ketika menjelaskan materi.

Sesi pertama selesai, dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu praktik membuat media pembelajaran e-learning dalam hal ini video pembelajaran berbasis powerpoint. Peserta diminta untuk menyiapkan alat yang perlu digunakan, yaitu laptop, headset, dan slide powerpoint yang akan dijadikan sebagai bahan pembuatan video. Setelah siap, berikutnya peserta diminta untuk mulai merecord penjelasan mengenai materi yang ada pada slide powerpoint dengan mengaktifkan fitur audio dan video pada taskbar powerpoint.

Para peserta lalu mulai merekam, dan memberikan penjelasan-penjelasan atas materi yang akan diberikan kepada siswa. Peserta merasa antusias dalam praktik pembuatan video pembelajaran berbasis powerpoint tersebut, karena hal tersebut dianggap sebagai hal yang baru dan mayoritas peserta belum mengetahui bahwa pada aplikasi powerpoint dapat dibuat menjadi video dengan adanya tampilan wajah dan suara.

Tahap akhir yaitu setelah proses recording masing-masing peserta selesai, peserta diminta untuk menyimpan file powerpoint tersebut ke dalam format file video, setelah di simpan dalam format video, maka file akan otomatis me-render, dan peserta diminta untuk menunggu beberapa saat hingga proses render selesai. Setelah file render selesai, maka video pembelajaran berbasis powerpoint sebagai bentuk media pembelajaran e-learning pun dapat ditayangkan dan dapat diberikan kepada siswa untuk dipelajari di rumah atau di asrama.

Tim melaksanakan kegiatan pemantauan pada saat pelaksanaan pelatihan berlangsung (pemantauan tahap I) dan pasca kegiatan pendampingan (pemantauan tahap II). Kegiatan pemantauan tahap I dilakukan tim kepada peserta saat pendampingan berlangsung, mengamati antusias peserta, dan motivasi peserta dalam mengikuti kegiatan pendampingan. Pada saat simulasi praktik pembuatan media pembelajaran e-learning, seluruh tim melakukan pemantauan, memberi perhatian kepada peserta dan memfasilitasi apabila peserta menemukan kesulitan dalam praktik membuat media pembelajaran e-learning tersebut. Produk hasil yang belum selesai, selanjutnya dikerjakan oleh peserta di rumah masing-masing dan dikumpulkan kepada tim dalam waktu satu minggu setelah kegiatan selesai.

Pemantauan tahap II dilakukan setelah satu minggu kegiatan pendampingan selesai. Tim melakukan pemantauan terhadap produk media pembelajaran yang telah selesai dibuat oleh peserta. Produk hasil disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru. Produk hasil media pembelajaran yang telah dibuat sebagai sebuah indikator ketercapaian terhadap keberhasilan kegiatan pendampingan ini.

Respon positif ditunjukkan oleh para peserta yang mengikuti kegiatan pendampingan pembuatan media pembelajaran ini. Peserta antusias dan ingin mengetahui bagaimana tahapan pembuatan media pembelajaran e-learning tersebut. Banyak dari peserta yang mengajukan pertanyaan mengenai tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, banyak pula diantara peserta yang mempraktikkan tanpa hambatan. Media pembelajaran yang dibuat peserta adalah pembuatan video pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa dalam pembelajaran e-learning. Bentuk-bentuk video pembelajaran tersebut diantaranya, peserta dapat membuat rekaman videonya sendiri dalam menjelaskan materi pembelajaran, peserta dapat melakukan perekaman layar laptop untuk menjelaskan materi, perekaman dapat pula dilakukan melalui handphone. Pada video pembelajaran tersebut, diupayakan agar peserta atau guru dapat tampil dalam video. Jadi video berbasis audio visual.

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah rata-rata dari setiap item questioner yang dibagikan, para peserta kegiatan P2M setuju pada kegiatan tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah rata-rata peserta yang memilih option setuju dengan jumlah akumulasi sebesar 2,91 dari 23 orang yang hadir.

Berdasarkan hasil angket respon peserta, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Respon mengenai materi: peserta mengharapkan untuk penyelenggaraan kegiatan pendampingan ini lebih sering diadakan dan dengan materi-materi yang semakin update dengan perkembangan teknologi
2. Respon mengenai durasi: peserta mengharapkan durasi waktu yang lebih panjang karena praktek membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Kegiatan pendampingan pembuatan media pembelajaran e-learning berbasis *flipped classroom* dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan persiapan yang baik. Pada akhir kegiatan tim melakukan evaluasi agar kegiatan pengabdian selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi.

Tabel 1: Kuesioner Kepuasan Peserta

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Saya merasa puas dengan kegiatan pendampingan pemberdayaan guru yang diselenggarakan oleh Dosen program studi PAI Fakultas Ilmu Sosial UNJ.	13	10	0	0
2	Kegiatan pendampingan pemberdayaan guru yang diselenggarakan oleh Dosen program studi PAI Fakultas Ilmu Sosial UNJ sesuai dengan harapan saya.	9	14	0	0
3	Personil/anggota yang terlibat dalam kegiatan pendampingan pemberdayaan guru memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman sesuai dengan kebutuhan saya.	9	14	0	0
4	Setiap keluhan/ pertanyaan/ permasalahan yang saya ajukan ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber/ anggota yang terlibat.	7	16	0	0
5	Jika kegiatan ini diselenggarakan kembali, saya bersedia untuk berpartisipasi/ terlibat.	12	11	0	0
Jumlah		50	65	0	0
Rata-rata		2,17	2,83	0	0

Tabel 1: Respon Peserta terhadap Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Guru

No	Peserta	Respon Peserta
1	A1	Ilmu yang dipaparkan sangat bermanfaat dan yang pasti menambah wawasan bagi semua anggota/peserta
2	A2	Kegiatan pendampingan pemberdayaan guru dilaksanakan dengan baik
3	A3	Sangat setuju dengan kegiatan yang dilakukan
4	A4	Kegiatannya bagus
5	A5	Sangat berkesan mendapatkan sharing ilmu dari dosen UNJ
6	A6	Sangat menarik untuk dicoba media pembelajaran tersebut, membuat kita semakin kreatif dengan berbagai macam media
7	A7	Menambah pengetahuan
8	A8	Alhamdulillah mendapatkan ilmu
9	A9	Alhamdulillah, dijelaskan cukup detail dan mudah dimengerti materi-materinya
10	A10	Kegiatannya sangat bagus
11	A11	Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk guru
12	A12	Sudah baik
13	A13	Sangat menarik dalam penyampaiannya
14	A14	Cukup menambah wawasan
15	A15	Kegiatan menarik
16	A16	Sangat bagus, menambah wawasan bagi masyarakat

17	A17	Sangat bermanfaat dan dapat menambah ilmu baru
18	A18	Saya senang sekali adanya pelatihan ini, karena bisa menambah wawasan dan pengalaman dari para dosen
19	A19	Senang sekali bisa mengikuti kegiatan ini dengan materi yang sangat bermanfaat untuk para guru
20	A20	Sangat senang, mudah-mudahan bisa berlanjut
21	A21	Sangat senang sekali karena menambah wawasan
22	A22	Alhamdulillah kegiatan pengabdian kepada masyarakat bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman
23	A23	Saya senang sekali dalam pembelajaran ini, menambah wawasan dalam bidang IT dan menambah semangat anak

PENUTUP

Hasil dari kegiatan pendampingan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ini adalah respon yang positif dari para guru peserta pendampingan. Peserta antusias dalam membuat media pembelajaran e-learning. Hal ini dapat dipahami karena pembelajaran di pesantren memiliki *'image'* yang konvensional sehingga pendampingan ini membantu guru mengenal media pembelajaran digital dalam mengajarkan materi kepada peserta didik. Kegiatan ini pun memberikan sebuah cara pandang baru bagi para guru, juga mengasah keterampilan para guru-guru pesantren dalam merancang pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan penggunaan media e-learning, kelas menjadi lebih aktif dan menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa agar dapat belajar secara mandiri dan fleksibel. Hal ini sebagaimana tuntutan pemenuhan pembelajaran abad 21.

Kegiatan pendampingan terdiri dari pemberian materi dan teori mengenai pembelajaran *flipped classroom*, membagi kelompok guru-guru, memetakan kesulitan guru dengan pembuatan media pembelajaran PAI di kelas, serta merancang kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran e-learning berbasis *flipped classroom*.

DAFTAR PUSTAKA

- Farhan, A. I. (2018). *Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom dengan Metode PBL Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Disposisi Matematis Ditinjau dari Kemampuan Awal Matematika Siswa di SMAN Kab. Tangerang*. Universitas Negeri Jakarta.
- Finch & Crunkilton. (1992). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education: Planning, Content and Implementation* (4th ed.). Polytechnic Institute and State University.
- Guru Pendidikan. (2021). *4 Standar Kompetensi Guru*.
<https://www.gurupendidikan.co.id/kompetensi-guru/>

- Hadiana, A., & Djaelani, E. (2002). *Sistem Pendukung E-Learning di Web*. LIPI.
- Iryana, W. (2015). Tantangan Pesantren Salaf di Era Modern. *Al-Murabbi*, 2(1), 65.
- Isnarto, Abdurrahman, & Sugianto. (2017). Pengembangan Laboratorium Media Pembelajaran Berbasis Kebutuhan Sekolah. *Jurnal Profesi Keguruan*, 3(2), 250.
- Johnson, G. B. (2013). *Student Perception of the Flipped Classroom*. The University of British Columbia.
- Maharani, E. (2018). *Kemendikbud: Hanya 40 Persen Guru Siap dengan Teknologi*. Republika.Co.Id.
<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/12/03/pj60ej335-kemendikbud-hanya-40-persen-guru-siap-dengan-teknologi>
- Nurpratiwi, S., & Amaliyah. (2020). Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Mengembangkan Kualitas Peserta Didik. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(2), 456.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i2.18164>
- Nurpratiwi, S., Effendi, M. R., & Amaliyah. (2021). Improving Religious Literacy Through Islamic Religious Education Based on the Flipped Classroom. *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 19.
<https://doi.org/10.24269/ijpi.v6i1.3107>
- Salikin, H. (2011). Profesionalitas Guru dan Pembelajaran Kontekstual. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 259.
<https://media.neliti.com/media/publications/210287-profesionalitas-guru-dan-pembelajaran-ko.pdf>
- Sanjaya, W. (2008). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Kencana Prenada Media Group.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EYL TEACHERS IN 21st CENTURY

Iwan Wijaya

INTRODUCTION

In teaching and learning process, there are some factors which may affect the learning process such as: intellectual factor, learning factor, physical factor, mental factor, emotional and social factors, teacher's personality and environment factors. According to Vygotsky's theory of cognitive development, children learn through social interaction that includes collaborative and cooperative dialogue with someone who is more skilled in tasks they are trying to learn. Teachers, parents, tutors, and even peers could be among them.

The teacher must be qualified Standard of Academic Qualification and Teacher Competence (SAQTC). A teacher must hold at least a Diploma-IV or a S1 degree certificate form a formal education consists of four main competences: pedagogy, personality, social-interaction and academy or professional (Ministry of National Education, 2007). The number of teachers in Indonesia is relatively large. But, it is still not enough to educate students in schools to remote areas. From the data in the Ministry of Education and Culture, there are currently 3,017,296 teachers in Indonesia. A total of 2,114,765 are in public schools and 902,531 are in private schools. 1, 174,377 civil servant teachers in both public and private are certified. Then, as many as 217,778 non-civil servant teachers have been certified.

When people think of "professional development," they usually think of a formal process like a conference, seminar, or workshop; and collaborative learning among members of a work team; or a course at a college or university. However, professional development can also occur in informal contexts such as discussions among work colleagues, independent reading and research, observations of a colleague's work, or other learning from a peer (Mizell, 2010). In line with this, professional development is the lifeblood of teaching. Educators are constantly experimenting with new methods, approaches, techniques, and materials. They attend regional and international conferences, participate in in-service workshops, read and submit articles to professional magazines and journals, and seek other ways to exchange ideas with and learn from colleagues (Warschauer, et.al, 2000). Teacher professional development

(TPD) are activities that develop an individual's skills, knowledge, expertise and other characteristics as a teacher (OECD, 2009). The best (and happiest) teachers continue to learn and discover new things all through their teaching careers. Development activity is just as important for teachers as it is for students (Harmer, 2012).

Information and Communication Technology (ICT) can help with universal access to education, equity in education, quality learning and teaching, teacher professional development, and more efficient education management, governance and administration (UNESCO, 2016). This paper will discuss about teachers professional development in using of technology, the benefit and the drawback of using ICT in teachers professional development, the characteristic of EYL teachers and teachers in 21st century.

DISCUSSION

Teacher professional development is very important for developing teachers' competence. Murray (2010) states one of the reason to pursue professional development is to be empower- to have the opportunity and the confidence to act upon ideas as well as to influence the way to perform in profession. In fact, the number of the teachers who take part in the training held by the government is limited. As teachers, we have the capacity to empower ourselves if we keep in mind the following precepts: a) Be positive. b) Believe in what you are doing and in yourself. c) Be proactive, not reactive. d) Be assertive, not aggressive. Feeling empowered can also manifest leadership skills, and teacher empowerment leads to improvement in student performance and attitude (Murray, 2010).

There are some aspects of being professional should be developed. According to Husein (2014), the professional development along with personal and social competences contributed much to the teachers' pedagogical competences. Professional Development should aim to develop teachers' professional thinking and practice, and enhance the quality of teaching and learning (OECD, 2009, p.49). Effective professional development involves teachers both as learners and as teachers and allows them to struggle with the uncertainties that accompany each role (Hammond & McLaughlin, 1995). It has a number of characteristics: a) It must engage teachers in concrete tasks of teaching, assessment, observation, and reflection that illuminate the processes of learning and development. b) It must be grounded in inquiry, reflection, and experimentation that are participant-driven. c) It must be collaborative, involving a sharing of knowledge among educators and a focus on teachers' communities of practice rather than on individual teachers. d) It must be connected to and derived from teachers' work with their students. e) It must be sustained, ongoing, intensive, and supported by modelling, coaching, and

the collective solving of specific problems of practice. f) It must be connected to other aspects of school change.

For that reason, serious effort of how professional development of EYL teachers contribute the teacher's pedagogical competence that give effect on students' achievement. One of the most important influences on student achievement is the teacher's quality (Hattie, 2009). McAleavy, Chen, Horrocks and Riggall (2018) highlight ten characteristics of high impact professional development as follows: 1. Classroom-based expert coaching relationships can provide good opportunities for learning; 2. Teachers need collaborative opportunities to process new professional learning; 3. Professional learning takes time; 4. Approaches should be based on sound principles of adult learning; 5. Teachers should be encouraged to adapt guidance principles to suit context; 6. Teachers particularly benefit from subject-specific training opportunities; 7. Teachers benefit from exposure to models of effective practice; 8. Effective professional development recognises differences between individual teachers and their different starting points; 9. School leaders have an important role to play in professional learning; 10. Teacher 'buy-in' is a key determinant of the success of professional development interventions.

The Use of Technology in Teacher Professional Development

Technology has changed rapidly. This phenomenon affects almost in every aspect of living including education especially the teacher professional development. The advances of technology must be seen as a supporting factor for teachers to develop professionally. There are some strengths of technology use in teacher professional development such as a) the flexibility of time in terms of that teachers can learn and elaborate with other teachers without the limitation of time and, b) the unlimited space meaning that teachers may experience learning anywhere.

Improving communication and presentation of resources through professional development will enhance the sustainability of resources and improve student achievement (Todorova & Osburg, 2010).

Effective professional development for teachers has several characteristics that are common across various subject matters (e.g, science education, math education), such as focus on content and engaging teachers in active learning opportunities related to their classroom practice (Vrasidas & Glass, 2019).

The issue of the importance of professional development on gaining new knowledge and in raising the quality of teaching is considered a necessity of time, because of the dynamic development of technology, and which should occur at any stage and throughout life (Bicaj, 2014).

The Benefit of Using ICT in Teachers Professional Development

An important dimension to technology-assisted professional development is its geographical reach and its potential to be accessed by teachers in remote areas. For example, mobile phone network coverage is rapidly expanding in most low-income countries, extending into communities that are difficult to reach via traditional face-to-face professional development (McAleavy, et.al., 2018). According to UNESCO, ICT (the Information Communication Technology) is the scientific technological and engineering discipline and management techniques used in information handling and processing, their application; computers and their interaction with people, interaction with machines and associated social, economic and cultural matters". In 1998, the UNESCO in its world education reports "teachers and teaching in a changing world" described the radical implications of ICT in the conventional teaching learning process. Nowadays, ICT has become an important and integral part of the curriculum of teacher education. By using ICT technology such as computer, laptop, digital camera, video, internet, websites, CD ROMs, DVDs, application of software such as word processing, spread sheet, e-mail, digital libraries, computer mediating conferencing, video conferencing, projectors, etc. We can overcome all limitation in communication and instruction. ICT be able to use as a tool for training and support of teachers, regardless of geographical dispersion.

According Thakral (2015), ICT is extremely useful for professional development of teachers and helps the teachers in the following ways: 1) the use of ICT as presentation tools (through overhead and LCD projectors, television, electronic whiteboards, guided "web-tours," in which students view the same resources on computer screens at the same time) are seen as having mixed results. While using ICTs in the classroom can help students understand and discuss difficult concepts (especially through the use of simulations), it can also reinforce traditional pedagogical practices focus from the content of what is being discussed of displayed to the tool being utilized. 2) The use of technology in everyday teaching and learning appears to be more important than specific instruction in "computer classes" in the OECD's experience, while the development of technology skills is seen as having a role in teaching and learning practices, and not too important in and of itself. School that report the highest levels of students ICT-related skills and experience are often not those with heavy computer course requirements, but rather ones that made use of ICTs on a regular basis throughout the teacher professional development and the teaching and learning process. 3) Effective ICT use in education increases teachers' training and professional development needs. ICTs, on the other hand, can help meet these increased needs by assisting in the provision of more and better educational content, assisting in routine administrative tasks,

providing models and simulations of effective teaching practices, and enabling learner support networks, both in face to face and distance learning environments, and in real time or asynchronously. 4) Effective teacher professional development should approximate the classroom environment as much as possible. Where ICTs are deemed to be critical components of the teaching and learning process, "hands-on" instruction on ICT use is required. Professional development activities should also model effective practices and behaviors, as well as encourage and support teacher collaboration. Continuous professional development at the school level, utilizing available ICT resources, is seen as a key driver for success, particularly when focusing on resources and skills that are directly relevant to teachers' everyday needs and practices. 5). ICT enriches teaching by enhancing the initial preparation by providing good teaching and training materials, simulators, recording and feedback mechanisms, and ICT has removed the barriers of space, time and place between teacher and learner. ICT provides lifelong professional development by providing courses in a virtual situation, training in demand, orientation and refresher courses through video conferencing and online. 6). It has established a healthy and interactive relationship between teachers, schools, institutions, and universities and enabled teachers to expertise rich resources in cyber space. 7). The most effective uses of ICT, according to research in OECD countries, are those in which the teacher, assisted by ICTs, challenges pupils' understanding and thinking, either through whole-class discussions or individual/small group work using ICTs. ICTs are seen as critical tools for facilitating and supporting the shift from traditional "teacher-centric" teaching styles to more "learner-centric" approaches. 8). Pedagogical practices of teachers using ICTs can range from only small enhancement of teaching practices, using what are essentially traditional methods, to more fundamental changes in their approach to teaching. ICTs can be used to both reinforce and change existing pedagogical practices, as well as the way teachers and students interact. 9). The cost of teacher training has been reduced by the deictic software and intelligent tutoring systems. 10). By the exchange of materials through virtual communities, sharing of ideas and experiences and collaborating on projects the ICT can revolutionize the whole teaching profession.

The Drawback of Using ICT in Teachers Professional Development

Many technical issues can undermine the application of technology. The potential return on investment in technology can be greatly reduced if hardware is not properly maintained ((McAleavy, et.al., 2018).

Although online professional development is widely used, there are many challenges to effective participation in such initiatives. One of these is

teachers' limited access to the Internet, which results in certain groups of teachers being disadvantaged and a greater gap between the "haves" and "have-nots" (Clark, 2000).

Teachers need more time to use ICT and gain the needed skills and competencies to integrate them successfully into their classroom. Studies have shown that teachers need 3- 6 years of sustained practice to integrate ICT fully into the classroom (Donnelly & colleagues, 2002).

ICT use in the classroom is not always transparent; instead, it is frequently "added on" to the curriculum. Another difficulty stems from the reality that teachers are often asked to learn to use technological tools become out-of-date with new development; as a result, the need for ongoing professional development never ends (Vrasidas and V Glass, 2007).

There are some reasons for teaching English for young learners. One main reason is the easiness of their age for language acquisition. Young learners are term for children age 4-6 years old which is known as golden age. The belief that "early age is better" and children learn much more quickly and efficiently is generally appreciated by many especially by the supporters of Critical Period Hypothesis. Another reason for the recognition of teaching English to young learners is because it is a lingua franca today, it means a common language used for communication between two people whose languages are different (Harmer, 2007:47).

Piaget (1970), kids were active learners and thinkers, kids construct knowledge from actively interacting with the physical environment in developmental stages. They learn through action and exploration. Vygotsky (1962) stated that kids are learning through social interaction between them and adults (teachers). Meanwhile, Bruner (1983) thought kids learning effectively through scaffolding by adults; the roles of adults (teachers) were affecting their passion in learning. However, Teacher has important roles in building students behavior towards learning especially in establishing their confidence in speaking the target language.

Teaching English for Young Learners are not the same as teaching adult because they have different characteristics and motivation. Young Learners are different from adults, so the methods of teaching must be different too. There are some general characteristics of the children in that group (a) they are competent user of mother language, (b) they can tell the difference between fact and fiction, (c) they love to play and learn best when they enjoy themselves seriously and like to think that what they are doing in real work, (d) they rely on the spoken as well as the physical words to convey and understanding meaning, (f) they are able to work with others and learn from others, (g) their own understanding comes through eyes, hand, ears, (h) they

have very short attention and concentration. If the teachers cannot teach the children properly, the children may not enjoy their learning. As a result, the teaching-learning process may be hampered.

Young Learner teachers need appropriate methods to teach the students. The materials for young learners differ from those for adults in terms of proportions. They have different motivation and characteristic in order it will be difficult when the teachers cannot motivate young learners intensively. It will be increased their interest through the teachers' motivation to learn better, so the students' interest in learning will be same as their interest in playing. Finding the best technique for teaching young learners necessitates a detailed study, particularly for the teacher. They have to create alternative of technique to teach young learners in order to make them interested to what they are going to learn and avoid boredom. Elementary teachers need appropriate methods to teach the students. They have to choose the best method, so that the aims of teaching and learning can be achieved.

Teachers In 21st Century

The teacher as an individual personality is an important element in learning environment of in the failures and success of the learner. In this global era where professional teachers are needed in education. The professional teachers of 21st century have to develop students with the 21st century learning skills. The 21st century professional teachers need teaching skills content mastery as well as integrating teaching with technology. McAleavy, Chen, Horrocks & Riggall (2018) state that professional development, mediated by technology, can engage teachers directly and circumvents the often-cited weaknesses of off-site workshops and the indirect cascade model. Face-to-face coaching models are effective but expensive; technology offers the possibility of much more cost-effective distance models of coaching. Due to the rapid advances of technology, the professional development of EYL teachers can be ready in teaching and learning of 21st century.

In 21st century of the world has changed in every aspects of life. People have been encouraged by technology development to change their habit until it can be said that human cannot life without help of technology. People can benefit from technology in areas of communication, transportation, and education. The use of technology in education is rapidly evolving, presenting a situation in which students can engage in new authentic and meaningful learning experiences by exerting effort and changing their behavior by providing more fun and effective learning atmosphere Furthermore, it allows students to collaborate and easily access information that will enhance their learning experience. The benefits become the central part of 21st century education which should be optimized in order to create sophisticated learning

immersion and maximize the quality of students in the future. Duhaney (2000) argues that the infusion and integration of technology in the education process have presented new avenues by which teachers can enrich and enhance teaching and learning activities.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

ICT is a complement, not a sole solution. What it cannot do is replace professional face-to-face contact, instil quality where none exists or solve the human and institutional issues that bedevil fragile contexts. The final result of professional development is the impact on classroom practice.

Some recommendations are proposed to teachers and the institution. For the teachers, it is much recommended to integrate their teaching and other professional development with technology.

REFERENCES

- Anderson, T. (2011). *The theory and practice of online learning*. Edmonton: AU Press, Athabasca University.
- Day, C. (1999). *Developing teachers: The challenges of lifelong learning*. London: Falmer Press.
- Duhaney, D. C. (2000). Technology and the educational process: Transforming classroom activities. *Int'l J of Instructional Media*. (27).
- Donnelly, M.B., Dove, T., Tiffannt-Morales, J., Adelman, N., & Zucker, A. (2002). Technology-related professional development in the context of educational reform: *A literature review*. Arlington, VA: SRI International.
- Glatthorn. (1995). Teacher development. In L. Anderson (Ed.), *International encyclopedia of teaching and teacher education* (2nded). London: Pergamon Press.
- Glass, V. C. (2019). *Teacher professional development and ICT:Strategies and models*. Yearbook of the National Society for the Study Education, 1-17.
- Hussein, R. (2014). A profile of exemplary teachers of English for young learners at the elementary school. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 2(4): 311- 321.
- Jovanova-Mitkovska, S. (2010). The need of continuous professional development.*Procedia Social and Behavioral Sciences*, 2.
- McAleavy, T., Hall-Chen, A., Horrocks, S.,& Riggall, A. (2018). Technology supported professional development for teachers: Lessons from developing countries. Education Development Trust, 1-64.

- Ministry of National Education (Menteri Pendidikan Nasional). (2007). Regulation of Minister of National Education of Republic of Indonesia number 16 in 2007 about Standard of Academic Qualification and Teacher Competence (Peraturan menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (SKAKG). Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).
- Mizell, H. (2010). *Why professional development matters*. Oxford: Learning Forward.
- Murray, A. (2010). Empowering teachers through professional development. *English Teaching Forum*, (1), 2-11.
- OECD. (2009). *Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS*. Retrieved from: www.oecd.org/edu/school/43023606.pdf.
- Pavione, C. S. N, Avelino, B. C., & de Suza Francisco, J.R. (2016). Factors that influence the teaching learning process from perspective of accountancy students: *Analysis of higher education institution in Minas Gerais*. REPeC, 10(2), 192-215.
- Thakral, P. (2015). Role of ICT in professional development of teachers. *Learning Community*, 6(1), 127- 133.
- Todorova, A., & Osburg, T. (2010). Professional development program for technology integration: Facilitators and barriers to sustainable implementation. *Literacy Information and Computer Education Journal*, 1(1), 59-66. doi:10.20533/licej.2040.2589.2010.0009
- Tsai, I.-C. (2012). Understanding social nature of an online community of practice for learning to teach. *Educational Technology & Society*, 15(2), 271-285.
- UNESCO. (2016). *ICT in education*. Retrieved from: <https://en.unesco.org/themes/ict-education>
- Warschauer, M., Shetzer, H., & Meloni, C. (2000). *Internet for English Teaching*. Alexandria, VA: TESOL, Inc.

BEST-PRACTICES

PEMBELAJARAN SIFAT KOLIGATIF LARUTAN MENGUNAKAN PENDEKATAN JET (JELAS ENTENG *full* TRIK) DI SMA NEGERI 1 PATIKRAJA

Sujatno

PENDAHULUAN

Materi pelajaran Kimia di SMA banyak berisi konsep-konsep yang cukup sulit untuk difahami siswa, karena menyangkut reaksi-reaksi kimia dan hitungan-hitungan serta menyangkut konsep-konsep yang bersifat abstrak dan dianggap oleh siswa merupakan materi yang relatif baru dan belum pernah diperolehnya ketika di SMP. Hasil pengamatan SMA menunjukkan bahwa penyampaian materi kimia SMA dengan metode demonstrasi dan diskusi nampaknya kurang optimal dalam meningkatkan aktivitas dan minat belajar siswa. Dalam proses pembelajaran kimia di beberapa sekolah selama ini terlihat kurang menarik, sehingga siswa merasa jenuh dan kurang memiliki minat pada pelajaran kimia, sehingga suasana kelas cenderung pasif, sedikit sekali siswa yang bertanya pada guru meskipun materi materi yang diajarkan belum dapat dipahami. Dalam pembelajaran seperti itu mereka akan merasa seolah-oleh dipaksa untuk belajar sehingga jiwanya tertekan. Keadaan demikian menimbulkan kejengkelan, kebosanan, sikap masa bodoh, sehingga perhatian, minat dan motivasi siswa menjadi rendah. Hal ini akan berdampak terhadap ketidaktercapaian tujuan pembelajaran kimia (Sunnyono dkk, 2009). Konsep yang komplek dan abstrak dalam ilmu kimia menjadikan siswa beranggapan bahwa pelajaran kimia merupakan pelajaran yang sulit (Marsita dkk, 2010). Minat peserta didik untuk masuk jurusan IPA cukup tinggi, namun pada kenyataannya masih terdengar keluhan sebagian besar peserta didik bahwa “Kimia itu sulit”. Dalam pembelajaran kimia, peserta didik kurang semangat dan kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, lebih senang mengobrol dengan temannya atau asyik dengan kegiatannya sendiri daripada memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru (Indira, 2014).

Salah satu materi yang dimungkinkan munculnya miskonsepsi pada pemahaman siswa adalah materi sifat koligatif larutan, sebagian besar sumber belajar yang dibaca oleh siswa. Konsep-konsep abstrak pada materi ini meliputi gaya antarpartikel, perubahan fase, dan syarat dimilikinya tekanan

uap oleh zat cair (Wulandari, 2019). Pembelajaran kimia bab sifat koligatif larutan adalah pembelajaran tentang fenomena sifat koligatif larutan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mengamati dengan teliti fenomena fisik larutan dimaksudkan untuk meningkatkan rasa empati peserta didik terhadap permasalahan di sekitar. Kepekaan terhadap fenomena fisik alamiah diharapkan dapat meningkatkan daya nalar peserta didik untuk menemukan solusi yang cerdas terhadap permasalahan yang muncul, sehingga dapat diatasi dengan biaya yang relatif murah dan waktu yang lebih cepat. Disamping itu pembelajaran sifat koligatif larutan adalah untuk memberikan penjelasan terkait analisis dan perhitungan dalam fenomena sifat koligatif larutan (Vinsiah, 2020).

Kesalahan konsep seringkali terjadi pada materi-materi kimia yang sarat dengan konsep-konsep abstrak, salah satunya adalah Sifat Koligatif Larutan. Konsep-konsep abstrak pada materi ini meliputi gaya antar partikel, perubahan fase, dan syarat dimilikinya tekanan uap oleh suatu zat cair. Untuk mengeliminasi kesalahan konsep, strategi yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik materi karena tidak ada strategi yang tunggal yang dapat memperbaiki semua kesalahan konsep. Teknik yang dapat memvisualisasikan gambaran pada tingkat partikulat antara lain model fisik/konkret, role-playing (bermain peran), model komputer tetap, model komputer dinamik (animasi), gambar/animasi yang dibuat siswa, dan model komputer interaktif. Strategi yang diperkirakan efektif untuk mengeliminasi kesalahan konsep pada materi Sifat Koligatif Larutan adalah menggunakan media visualisasi statik (Anugerah, 2015). Kesulitan pemahaman siswa pada materi sifat koligatif larutan yaitu karena siswa kurang memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran ketika proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, siswa juga tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai, siswa tidak serius mempelajari konsep yang menjadi syarat untuk mempelajari konsep selanjutnya, banyak siswa belajar dengan cara menghafal, dan kurangnya latihan soal (Auliyani, 2020). Hasil uji coba soal sifat koligatif larutan pada mahasiswa semester II program studi Pendidikan Kimia Universitas Tanjungpura tahun 2016 diperoleh sebagai berikut: 1) mahasiswa salah dalam mengartikan tekanan uap larutan (P) dan penurunan tekanan uap (ΔP); 2) mahasiswa salah mengartikan titik beku larutan (T_f) dan penurunan titik beku (ΔT_f); 3) mahasiswa masih menganggap titik beku larutan dengan penurunan titik beku larutan merupakan suatu hal yang sama; 4) mahasiswa salah menggunakan faktor Van't Hoff pada perhitungan, karena tidak mengetahui pada senyawa yang bagaimana faktor Van't Hoff digunakan; 5) mahasiswa salah menghitung M_r karena tidak memperhatikan jumlah partikel (ion atau molekul); dan 6) mahasiswa salah dalam mengartikan notasi ' n ' pada faktor Van't Hoff, mahasiswa menganggap bahwa ' n ' tersebut merupakan mol, padahal

sebenarnya 'n' adalah jumlah kation dan anion. Kesalahan-kesalahan yang ditemukan di atas mengindikasikan pemahaman konsep mahasiswa tersebut masih belum utuh (Sartika, 2018).

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. Kompetensi guru harus selalu ditingkatkan, sebab guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik (Devi, 2016). Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk menyampaikan pengalaman terbaik penulis sebagai guru kimia di SMA N 1 Patikraja dalam bentuk best practice yang berjudul Pembelajaran Sifat Koligatif Larutan Menggunakan Pendekatan JET (Jelas Enteng full Trik) di SMA N 1 Patikraja. Harapan penulis semoga best practice ini bermanfaat untuk menambah khasanah pembaca tentang pembelajaran kimia khususnya materi sifat koligatif kimia, sehingga akan menimbulkan kesan bahwa belajar kimia itu mudah, ringan dan menyenangkan.

PEMBAHASAN

1. Konsep Pendekatan JET

Pendekatan JET kepanjangannya adalah Jelas Enteng full Trik. Pendekatan ini dibuat oleh penulis yang bernama Sujatno dan memiliki nama panggilan Pak Jet atau Mr. Jet. Penulis sudah melakukan pengajaran kimia terhadap siswa SMA sejak tahun 1993. SMA N 1 Patikraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah adalah tempat mengajar penulis sebagai ASN Guru Kimia. Ketua MGMP Kimia Kabupaten Banyumas (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan Koordinator Sie Pengembangan Program di MGMP Kimia Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi profesi yang diikuti oleh penulis.

"Jelas" dimaksudkan bahwa pembelajaran disampaikan secara jelas oleh pendidik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pelajar untuk berpartisipasi aktif, serta memberi kesempatan yang cukup untuk mengembangkan ide, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa (Syabrus, 2015).

"Enteng" dimaksudkan pembelajaran disajikan secara ringan yaitu bahwa pembelajaran dirancang dari perencanaan hingga evaluasi dengan cara yang lebih sederhana, lebih kreatif dan efektif. Peserta didik dapat mengakses materi dan sumber pembelajaran tanpa batasan waktu dan tempat, dan

mempermudah dalam penyebaran materi kepada peserta didik. Pembelajaran disajikan dengan menarik, sehingga setiap tahap pembelajaran peserta didik dapat memahami materi dengan baik (Kurniasari, 2020).

“Trik” dimaksudkan pembelajaran penuh dengan inovatif yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada penyampaian materi pembelajaran kepada siswa, yang berupa ekspositori, inkuiri, pembelajaran berbasis masalah, peningkatan kemampuan berpikir, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, pembelajaran afektif, dan pendekatan ilmiah (Purwadhi, 2019).

Jadi pembelajaran dengan pendekatan JET atau pembelajaran yang bersifat efektif dengan maksud suatu penerapan pembelajaran yang memfokuskan pada model, metode, pendekatan, strategi, trik, teknik dan media, dan memiliki lima indikator yaitu: (1) pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, (2) proses komunikatif, (3) respon peserta didik, (4) aktivitas belajar, (5) hasil belajar (Yusuf, 2018).

2. Tujuan Pelaksanaan

Best practice pembelajaran kimia materi sifat koligatif larutan menggunakan pendekatan JET bertujuan memperkenalkan pengalaman terbaik penulis dengan harapan bermanfaat bagi semua pembaca. Pendekatan dalam pembelajaran ini dimaksudkan bahwa penyampaian secara jelas oleh pendidik sehingga proses pembelajaran berlangsung interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pelajar untuk berpartisipasi aktif, memberi kesempatan yang cukup untuk mengembangkan ide, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Pembelajaran disajikan secara ringan yang dirancang pada semua tahap secara lebih sederhana, lebih kreatif dan efektif, pengaksesan materi dan sumber belajar oleh peserta didik tanpa batasan waktu dan tempat, disajikan secara menarik sehingga setiap tahap pembelajaran peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Puncaknya pembelajaran penuh dengan trik dan inovatif yang penyampaian materi menekankan berupa ekspositori, inkuiri, pembelajaran berbasis masalah, peningkatan kemampuan berpikir, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, pembelajaran afektif, dan pendekatan ilmiah. Jadi secara ringkas tujuan pelaksanaan pada best practice ini adalah memperkenalkan pembelajaran kimia materi sifat koligatif menggunakan pendekatan Jet yang bersifat efektif dengan memfokuskan pada model, metode, pendekatan, strategi, trik, teknik dan media, dan memiliki lima indikator yaitu: pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, proses komunikatif, respon peserta didik, aktivitas belajar, dan hasil belajar.

3. Tahap Pelaksanaan

a. Sifat koligatif larutan

Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut (JPZT) dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut (Vinsiah., 2020). Partikel zat terlarut dalam pembahasan sifat koligatif larutan ini ada dua jenis yaitu: 1) molekul, diterapkan pada larutan non elektrolit; 2) ion, diterapkan pada larutan elektrolit.

Cara menentukan JPZT contohnya adalah sebagai berikut: 1) JPZT larutan NaCl 0,2 M = $2 \times 0,2 = 0,4$ M ion; 2) JPZT larutan $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ atau urea 0,3 M = $1 \times 0,3 = 0,3$ M molekul; 3) JPZT larutan CaBr_2 0,2M = $3 \times 0,2 = 0,6$ M ion; 4) JPZT larutan $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ atau gula 0,2 M = $1 \times 0,2 = 0,2$ M molekul; 5) JPZT larutan Ag_2SO_4 0,2 M = $3 \times 0,2 = 0,6$ M ion; 6) JPZT larutan $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,2 M = $5 \times 0,2 = 1$ M ion; 7) JPZT larutan NH_4NO_3 0,2 M = $2 \times 0,2 = 0,4$ M ion; 8) JPZT larutan $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 0,2 M = $3 \times 0,2 = 0,6$ M ion; 9) JPZT larutan $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ atau glikol 0,4 M = $1 \times 0,4 = 0,4$ M molekul; 10) JPZT larutan NaOH 0,2 M = $2 \times 0,2 = 0,4$ M ion; 11) JPZT larutan $\text{Al}(\text{OH})_3$ 0,2 M = $4 \times 0,2 = 0,8$ M ion; JPZT larutan KCH_3COO atau CH_3COOK 0,2 M = $2 \times 0,2 = 0,4$ M ion; 12) JPZT larutan $\text{Mg}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ atau $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Mg}$ 0,2 M = $3 \times 0,2 = 0,6$ M ion.

Penentuan JPZT ini sangat penting, karena sangat menentukan harga sifat koligatif larutan, dan untuk membandingkan sifat koligatif suatu larutan dengan larutan yang lain, sehingga harus benar-benar dikuasai. Untuk larutan non elektrolit angka pengali terhadap konsentrasi (M) adalah 1 dan satuannya M molekul. Untuk larutan elektrolit angka pengali terhadap konsentrasi (M) adalah jumlah ion senyawa tersebut, dan satuannya M ion.

b. Membandingkan sifat koligatif beberapa larutan

Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan meliputi empat jenis yaitu sebagai berikut: 1) Kenaikan titik didih (ΔT_b); 2) penurunan titik beku (ΔT_f); 3) penurunan tekanan uap (ΔP); 4) Tekanan osmotik (Π) (Sitanggang, 2019).

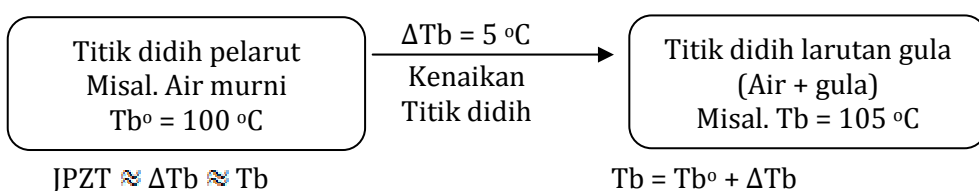
Semua sifat koligatif tersebut (ΔT_b , ΔT_f , ΔP , dan Π) sebanding dengan JPZT, artinya semakin besar JPZT suatu larutan maka semakin besar pula sifat koligatifnya. Sebagai contoh adalah terdapat lima larutan sebagai berikut: 1) JPZT larutan NaCl 0,2 M = $2 \times 0,2 = 0,4$ M ion; 2) JPZT larutan $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ atau urea 0,3 M = $1 \times 0,3 = 0,3$ M molekul; 3) JPZT larutan CaBr_2 0,2M = $3 \times 0,2 = 0,6$ M ion; 4) JPZT larutan $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ atau gula 0,2 M = $1 \times 0,2 = 0,2$ M molekul; dan 5) JPZT larutan $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,2 M = $5 \times 0,2 = 1$ M ion. Larutan yang memiliki sifat koligatif (ΔT_b , ΔT_f , ΔP , dan Π) tertinggi adalah larutan yang ke-5 yaitu larutan $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,2 M, karena memiliki JPZT tertinggi yaitu 1 M ion. Larutan yang memiliki sifat koligatif (ΔT_b , ΔT_f , ΔP , dan Π) terendah adalah larutan

yang ke-4 yaitu $C_{12}H_{22}O_{11}$ atau gula 0,2 M, karena memiliki JPZT terendah yaitu 0,2 M molekul.

Urutan sifat koligatif larutan (ΔT_b , ΔT_f , ΔP , dan Π) dari yang terendah sampai yang tertinggi untuk kelima contoh larutan pada alinea di atas sesuai dengan kenaikan JPZT yaitu: larutan 4) < larutan 2) < larutan 1) < larutan 3) < larutan 5) dengan menaikkan JPZT secara berurutan sebagai berikut: 0,2 M molekul < 0,3 M molekul < 0,4 M ion < 0,6 M ion < 1 M ion.

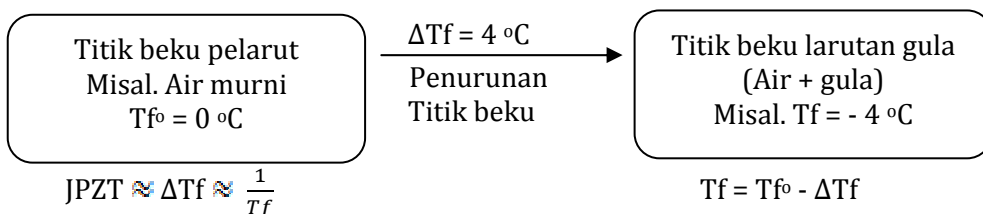
c. Pemahaman sifat koligatif larutan (ΔT_b , ΔT_f , ΔP , dan Π)

1) Kenaikan titik didih (ΔT_b)

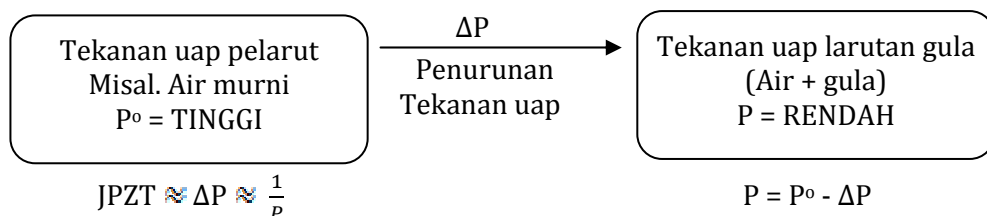


Zat terlarut (gula) akan mengikat molekul air, dan menghalangi air untuk mendidih (menjadi gas), sehingga titik didih larutan menjadi lebih tinggi daripada titik didih pelarut (terjadi kenaikan titik didih). Semakin banyak zat terlarut (gula = JPZT) yang ditambahkan, maka kenaikan titik didih semakin tinggi, dan titik didih larutan juga semakin tinggi (JPZT sebanding dengan ΔT_b dan sebanding dengan T_b).

2) Penurunan titik beku (ΔT_f)



Zat terlarut (gula) akan mengikat molekul air, dan menghalangi air untuk membeku (menjadi padat), sehingga titik beku larutan menjadi lebih rendah daripada titik beku pelarut (terjadi penurunan titik beku). Semakin banyak zat terlarut (gula = JPZT) yang ditambahkan, maka penurunan titik beku semakin tinggi, sebaliknya titik beku larutan semakin rendah (JPZT sebanding dengan ΔT_f tetapi berbanding terbalik dengan T_f).

3) Penurunan tekanan uap (ΔP)

Pelarut murni (air) memiliki tekanan uap tinggi, sebab tidak ada zat terlarut (gula) yang mengikat. Zat terlarut (gula) akan mengikat molekul air, dan menghalangi air untuk menguap (menjadi gas), sehingga tekanan uap larutan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap pelarut (terjadi penurunan tekanan uap). Semakin banyak zat terlarut (gula = JPZT) yang ditambahkan, maka penurunan tekanan uap semakin tinggi, sebaliknya tekanan uap larutan semakin rendah (JPZT sebanding dengan ΔP tetapi berbanding terbalik dengan P).

4) Tekanan osmosis (Π) JPZT $\propto \Pi$

Tekanan osmosis adalah tekanan akibat berpindahnya pelarut dari larutan encer ke larutan lebih pekat melewati membran semipermeabel. Jika perbedaan kepekatan besar karena JPZT yang besar maka tekanan osmosis menjadi besar.

d. Rumus-rumus penting sifat koligatif larutan

$$\begin{aligned} \Delta T_b &= m \cdot K_b \cdot i \quad (\text{"Anteb makin Kebal iii..."}) & T_b &= T_b^\circ + \Delta T_b \\ \Delta T_f &= m \cdot K_f \cdot i \quad (\text{"Aktif makin Kreatif iii..."}) & T_f &= T_f^\circ - \Delta T_f \\ \Delta P &= X_{\text{ter}} \cdot P^\circ \cdot i \quad (\text{"Apik Xenter Pokoknya iii..."}) & P &= P^\circ - \Delta P \\ \Pi &= M \cdot R \cdot T \cdot i \quad (\text{"Ping-gompang-gamping Makin Ramping Tenan iii ..."}) \\ m &= \frac{\text{jumlah mol zat terlarut}}{1000 \text{ gram pelarut}} = \frac{g \cdot 1000}{Mr \cdot p} \quad (\text{"mami yang gaul 1000 sampai menor pisan"}) \\ M &= \frac{\text{jumlah mol zat terlarut}}{1000 \text{ ml larutan}} = \frac{g \cdot 1000}{Mr \cdot ml} \quad (\text{"Mama yang gaul 1000 sampai marah melulu"}) \end{aligned}$$

e. Faktor Van't Hoff (i)

1) Untuk larutan elektrolit kuat, $i = n$ = jumlah ion

Asam kuat: HCl, HBr, HI, HNO₃, HClO₄ ($i = 2$); H₂SO₄ ($i = 3$)

Basa kuat: LiOH, NaOH, KOH, CsOH ($i = 2$); Ca(OH)₂, Sr(OH)₂, Ba(OH)₂ ($i = 3$)

Garam mudah larut: NaCl ($i = 2$), Ca(NO₃)₂ ($i = 3$); AlBr₃ ($i = 4$); Fe₂(SO₄)₃ ($i = 5$).

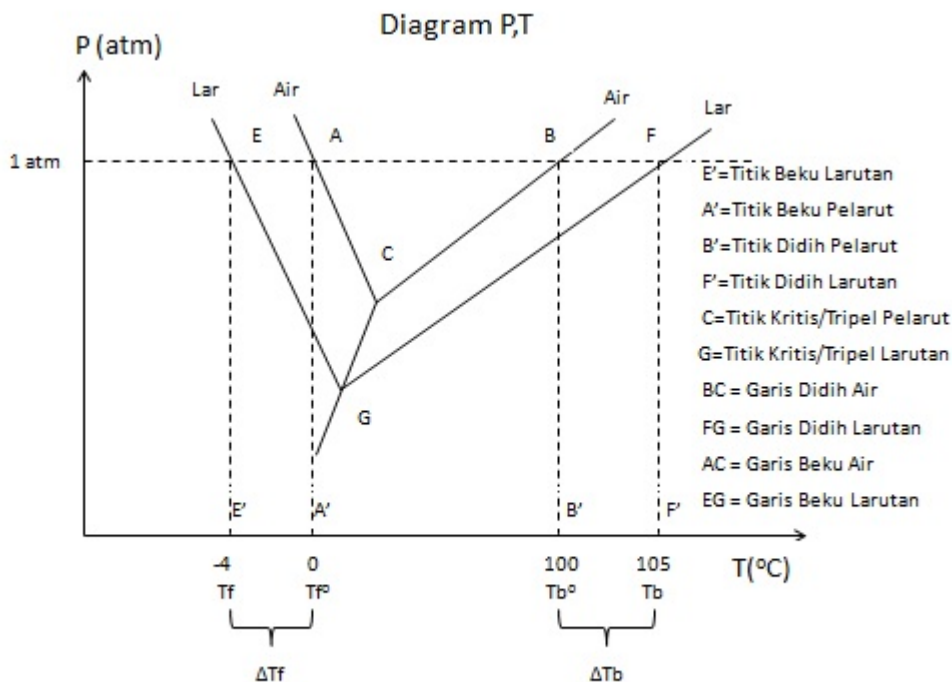
2) Untuk larutan elektrolit lemah, $i = \{1 + (n-1)\alpha\}$

Misal. Asam lemah H_3PO_4 , $n=4$, derajat ionisasi $\alpha = 20\% = 0,2$

$$i = \{1 + (4-1)0,2\} = 1 + 0,6 = 1,6$$

3) Untuk larutan non elektrolit, $i = 1 = \text{satu}$

f. Membaca diagram P, T



Ket: P=Tekanan Udara Luar, T=Suhu

4. Hambatan dan Solusi

Hambatan pembelajaran sifat koligatif biasanya adalah sebagai berikut: (1) di awal pembelajaran peserta didik langsung disuguhkan hitungan konsentrasi yang sulit sehingga kurang menarik; (2) penanaman pemahaman JPZT tidak diawali dengan yang mudah dipahami; (3) penekanan pemahaman hubungan antar ZPZT, ΔT_b , ΔT_f , ΔP , Π , T_b , T_f , dan P masih kurang; (4) Penanaman pemahaman ΔT_b , ΔT_f , ΔP , dan Π dipisah-pisah dan tanpa diilustrasikan dengan bagan yang nyata; (5) Tidak menerapkan faktor Van't Hoff pada semua jenis larutan baik elektrolit maupun non elektrolit; (6) Diagram P,T tidak menampilkan dua atau lebih jenis larutan yang memiliki JPZT berbeda.

Solusi pembelajaran sifat koligatif pendekatan JET adalah sebagai berikut: (1) di awal pembelajaran peserta didik diberi pemahaman yang ringan

dahulu misalnya pengertian sifat koligatif, menentukan jumlah partikel berupa molekul dan ion pada satu molekul senyawa, untuk hitungan konsentrasi langsung diterapkan ke dalam hitungan sifat koligatif secara ringan dan aplikatif; (2) penanaman pemahaman JPZT yang sederhana dahulu misalnya: larutan NaCl 0,2 M berarti JPZT $2 \times 0,2 = 0,4$ M ion, larutan gula 0,2 M berarti JPZT $1 \times 0,2 = 0,2$ M molekul; (3) penekanan pemahaman hubungan ZPZT, ΔT_b , ΔT_f , ΔP , Π , T_b , T_f , dan P yang berbanding lurus dan terbalik dan diterapkan dalam beberapa larutan dengan JPZT berbeda; (4) Penanaman pemahaman ΔT_b , ΔT_f , ΔP , dan Π tidak dipisah dan diilustrasikan dengan bagan yang nyata misalnya titik didih atau titik beku pelarut air dan larutannya; (5) Faktor Van't Hoff diterapkan untuk semua larutan baik larutan elektrolit maupun non elektrolit, agar setiap mengerjakan soal sifat koligatif selalu memikirkannya, tidak sampai lupa; (6) Diagram sebaiknya ada 3 garis yaitu misalnya garis untuk pelarut, larutan gula 0,1 M, dan larutan NaCl 0,1 M (JPZT NaCl = 2 x JPZT gula).

5. Indikator Keberhasilan

Peserta didik belajar dengan lebih semangat, lebih aktif, lebih ceria, lebih antusias, dan penuh perhatian mengikuti pembelajaran dikelas, karena pembelajaran yang jelas disampaikannya, ringan (enteng) diterima peserta didik, dan penuh inovasi. Guru lebih bersemangat membimbing pembelajaran karena sikap-sikap positif dari peserta didik. Hal itu dibuktikan dengan foto-foto saat pembelajaran sebagai berikut:



6. Program Pengembangan

Program pengembangan untuk pembelajaran sifat koligatif kimia yaitu sebagai berikut: (1) Buku sumber pembelajaran sifat koligatif kimia desain urutan materi penyampaian diubah dari yang ringan atau mudah terlebih dahulu; (2) hitungan-hitungan sifat koligatif kimia disampaikan dengan kemasan yang mudah sehingga menimbulkan kesan yang mudah bagi peserta didik; (3) keempat sifat koligatif disampaikan secara bersamaan karena saling

berkaitan, misalnya saat menerangkan pengertiannya, saat menyampaikan rumus-rumusnya, saat menggunakan Faktor Van't Hoff semua jenis larutan menggunakannya, saat mengkaitkan dengan JPZT; (4) sifat koligatif larutan yang menggunakan beberapa jenis zat terlarut yang tidak saling bereaksi; (5) sifat koligatif larutan yang pelarutnya bukan air; (6) pembuatan diagram P,T yang mengandung minimal 2 jenis larutan yang memiliki JPZT berbeda.

PENUTUP

Simpulan best practic ini adalah sebagai berikut: (1) pembelajaran sifat koligatif larutan perlu disampaikan secara runtut dari yang mudah; (2) pembelajaran dikemas dengan sederhana dan berkesan ringan; (3) disampaikan secara sistematis dan terkombinasi antar sifat koligatif larutan; (4) dikembangkan ke arah pembelajaran yang HOTS.

Saran disampaikan kepada penulis buku kimia khususnya materi sifat koligatif kimia, untuk dikemas kembali agar runtut, sistematis, sehingga memudahkan pembaca khususnya peserta didik memahami. Kepada para pendidik, penulis berharap tulisan ini bisa bermanfaat dan menambah profesionalitas serta memberi saran untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Kepada peserta didik, agar terus mengembangkan bakat dan minat dengan mengaju pada berbagai sumber belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, S.,H., Effendi, Suharti, 2015. Analisis Kesalahan Konsep Sifat Koligatif Larutan pada Mahasiswa Kimia Universitas Negeri Malang dan Eliminasi Menggunakan Media Visualisasi Statik. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 21(2): 178-184.
- Auliyani, A., Hanum, L., Khaldun, I., 2020. Analisis Kesulitan Pemahaman Siswa Pada Materi Sifat Koligatif Larutan dengan Menggunakan Three-Tier Multiple Choice Diagnostic Test di Kelas XII IPA 2 SMA Negeri 5 Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kimia (JIMPK)*, 2(1): 55-64.
- Devi, P., K., Supriatna, M., 2016. Modul Guru Pembelajar Mata Pelajaran Kimia SMA Kelompok Kompetensi G, Pedagogik Pengembangan Instrumen Penilaian Pembelajaran, Profesional Sifat Koligatif, Kimia Unsur Periode 3, Benzen dan Turunannya. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Indira, C., 2014. *Best-Practices Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Kimia di SMA Negeri 4 Sampit*. *Jurnal Kaunia*, 10(2): 141-151.

- Kurniasari, A., Pribowo, F., S., P., Putra, D., A., 2020. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) Selama Pandemi. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 6(3): 11-18.
- Marsita, R.S., Priatmoko, S., Kusuma, E., 2010. Analisis Kesulitan Belajar Kimia Siswa SMA dalam Memahami Materi Larutan Penyangga dengan Menggunakan Two-Tier Multiple Choice Diagnostic Instrument. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia*, 4(1): 512-520.
- Purwadhi, 2019. Pembelajaran Inovatif dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Mimbar Pendidikan Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, 4(1): 21-
- Sartika, R., P., 2018. Peranan Model Siklus Belajar 5E dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Sifat Koligatif Larutan. *Educhemia Jurnal Kimia dan Pendidikan*, 3(2): 157-171.
- Sunyono, Wirya, I., W., Suyanto, E., Suyadi, G., 2009. Identifikasi Masalah Kesulitan dalam Pembelajaran Kimia SMA Kelas X di Propinsi Lampung. *Jurnal Pendidikan MIPA (JPMIPA)*, 10(2): 9-18.
- Sitanggang, S., 2019. e-Modul Kimia Sifat Koligatif Larutan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Jakarta.
- Syabrus, H., 2015. Kesiapan dalam Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Kota Pekanbaru. *Pekbis Jurnal*, 7(1): 24-30.
- Vinsiah, R., 2020. Modul Pembelajaran SMA Fenomena Sifat Koligatif Larutan Kimia Kelas XII. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas, Jakarta.
- Wulandari, S., W., Fatah, A., H., Anggraeni, M., E., 2019. Analisis Materi Ajar Kimia SMA/MA Kelas XII Pada Konsep Sifat Koligatif Larutan. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 10(2): 300-320.
- Yusuf, B., B., 2018. Konsep dan Indikator Pembelajaran Efektif. *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan*, 1(2): 13-20.

COMMUNITY BASED TOURISM BERBASIS MEDIA DIGITAL SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI DESA DITENGAH PANDEMI COVID 19

Prima Yustitia Nurul Islami

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Berdasarkan data daya saing pariwisata di Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, Indonesia berada di posisi 40 dunia berdasarkan hasil laporan dari *World Economic Forum* dengan empat indikator utama yaitu ekosistem (lingkungan dan bisnis), kebijakan, infrastruktur serta sumberdaya alam dan budaya¹. Berdasarkan data realisasi investasi di sektor pariwisata pada tahun 2018, Bali merupakan provinsi dengan realisasi investasi tertinggi yang mencapai 9,18 triliun². Secara umum, Indonesia menempati posisi ke-4 sebagai destinasi pariwisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara di Asia Tenggara pada tahun 2016 dengan jumlah pengunjung mencapai 10 juta wisatawan³.

Potensi pariwisata sudah diakui oleh berbagai organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia dan *World Tourism Organization* (WTO) sebagai salah satu industri yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam kaitannya dengan persoalan sosial dan ekonomi (The ASEAN Secretariat, 2016). Sejarah panjang industri pariwisata tidak terlepas dari kegiatan yang pada awalnya merupakan kegiatan individu untuk menikmati waktu senggangnya, namun dalam perkembangannya industri ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat tidak hanya yang ada di negara maju namun juga di negara berkembang. Di Indonesia, industri pariwisata mengalami perkembangan yang signifikan dimana potensi pariwisata tidak hanya dikembangkan pada level Kabupaten/Kota di setiap daerah namun juga pengembangan kawasan

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/18/daya-saing-pariwisata-indonesia-alami-peningkatan>

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/12/ini-10-provinsi-dengan-realisasi-tertinggi-investasi-di-sektor-pariwisata>

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/23/indonesia-posisi-4-destinasi-pariwisata-asean>

pedesaan dengan berbagai potensi wisata desa yang memunculkan berbagai desa wisata (Taba, 2018).

Perkembangan pariwisata berbasis desa merupakan salah satu kritik masyarakat pada level desa akibat ketimpangan yang muncul pasca menggeliatnya industri pariwisata di berbagai daerah di Indonesia. Perkembangan pariwisata yang pesat tidak beriringan dengan keterlibatan masyarakat pada level yang paling kecil yaitu desa sehingga peningkatan ekonomi yang merupakan dampak dari peningkatan pariwisata tidak berdampak pada masyarakat di level desa. Hal tersebut mendorong munculnya bentuk pengelolaan pariwisata masyarakat berbasis komunitas atau yang disebut sebagai *community based tourism* (CBT). Pengelolaan pariwisata berbasis komunitas menekankan partisipasi masyarakat dengan pendekatan *bottom up* dengan partisipasi aktif masyarakat menjadi satu hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan baik lingkungan, kondisi sosial maupun budaya dan kearifan lokal masyarakat (Poncokusumo et al., 2016).

Pengelolaan pariwisata konvensional tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal karena prioritas utama adalah jumlah pengunjung, namun seiring dengan perubahan pemahaman dan pengelolaan maka model pengelolaan pariwisata menekankan pada dua pendekatan yaitu pendekatan *bottom up* berbasis pariwisata masyarakat lokal dan *top down* yang mengedepankan pariwisata berkelanjutan dengan inisiatif berasal dari pemerintah (Baskoro & Rukendi, 2008). Integrasi kedua pendekatan tersebut bertujuan agar pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat tidak hanya menekankan pada sektor pendapatan tapi kesejahteraan masyarakat lokal serta perlindungan berbagai aspek lokalitas didalamnya. Pengelolaan berbasis masyarakat meningkatkan inisiatif loka serta membuka berbagai potensi lapangan pekerjaan terutama di kawasan pedesaan dan sekitarnya.

Perkembangan desa wisata mengalami peningkatan signifikan. Sejak dibuka pada tahun 2009 berdasarkan data dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata terdapat 987 desa wisata yang dibuka dengan model pengelolaan berbasis masyarakat atau komunitas. Konsep utama yang dibangun oleh desa wisata adalah konsep ekowisata maupun *ecoedutourism* dengan potensi utama adalah potensi alam dan kearifan lokal masyarakat. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha yang menitikberatkan peran aktif komunitas dalam sektor pariwisata berbasis ekologi (CIFOR, 2004). Ekowisata mengandung beberapa unsur utama seperti penghargaan (*rewarding*), pengkayaan (*enriching*), petualangan (*adventourism*) dan proses belajar (*learning*) dari berbagai objek wisata yang dikunjungi (Wibowo, 2004). Keberadaan pariwisata desa menjadi salah satu solusi terutama untuk menjaga kelestarian budaya asli masyarakat lokal (N et al., 2015).

Model pengelolaan wisata berbasis masyarakat tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat lokal sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan tersebut. Kelembagaan merupakan salah satu penting dalam pengelolaan wisata tersebut. Pendekatan kerjasama antar pihak baik pemerintah, masyarakat, unit usaha pariwisata, lembaga swadaya masyarakat, insitusi pendidikan dan lembaga penelitian penting dilakukan untuk dapat mencapai tujuan pengelolaan wisata yang baik dan mencegah terjadinya ketimpangan akibat pembangunan (Hayati, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa, model pengelolaan wisata berbasis masyarakat juga menjadi pendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat di pedesaan dengan tujuan untuk mengelola potensi wisata desa yang ada. Pemberdayaan masyarakat desa dalam berbagai kegiatan pengelolaan mulai dari melaakukan pemetaan potensi desa, merancang model wisata desa, mempromosikan wisata desa sampai pada pengelolaan terpadau potensi desa menjadi satu program pemberdayaan masyarakat yang penting dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan potensi wisata desa berbasis masyarakat. Pengembangan wisata desa berbasis masyarakat merupakan salah satu kebijakan resmi pemerintah yang tertuang dalam prinsip kepariwisataan Indonesia antara lain : 1) Masyarakat sebagai kekuatan dasar; 2) Pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat; dan 3)Pariwisata merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah merupakan fasilitator dari kegiatan pariwisata ((Departemen & Indonesia, 2009).

Pasca terjadinya pandemi covid 19 sejak awal tahun 2019, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak sangat besar. Data sektor pariwisata pada tahun 2019 menunjukkan terjadi penurunan hingga 27% diseluruh kawasan, sedangkan di Indonesia data menunjukkan pada tahun 2020 awal (kuartal 1) terjadi pertumbuhan negatif ekonomi Bali sebesar 1,14% akibat covid 19⁴. Kondisi yang sama terjadi pada sektor wisata di Jakarta yang mengalami penurunan mencapai 85,47% pada tahun 2020⁵. Sektor pariwisata alam di kawasan lain seperti Taman Nasional Komodo pun tidak berbeda jauh mengalami penurunan mencapai 76% pada tahun 2020⁶. Pada tahun 2021, kondisi pariwisata di hampir seluruh kawasan di Indonesia masih tidak berubah. Pada tahun 2021 tercatat wisatawan mancanegara hanya

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/06/ekonomi-bali-tumbuh-negatif-114-imbas-covid-19>

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/04/kunjungan-ke-obyek-wisata-unggulan-jakarta-merosot-85-pada-2020>

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/03/pengunjung-taman-nasional-komodo-turun-76-persen-pada-2020>

1 orang yang mengunjungi Bali namun sudah terjadi peningkatan hunian kamar dari wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali⁷.

Penurunan di sektor pariwisata juga berdampak pada masyarakat desa yang melakukan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 diberbagai skala termasuk didalamnya adalah karantina wilayah. Kondisi tersebut meyebabkan berkurangnya mobilitas wisatawan dan berhentinya kegiatan pariwisata. Pandemi juga membuat berbagai pelayanan pariwisata melakukan adaptasi selama era pandemi. Penurunan jumlah kunjungan wisata berdampak pada pendapatan pelaku wisata dan unsur unsur didalamnya. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada swadaya masyarakat dalam mengelola potensi wisata. Pengelolaan tersebut memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat lokal, namun pasca pandemi kondisi tersebut mengalami perubahan signifikan yaitu masyarakat kembali kehilangan sumber mata pencaharian alternatif dari pariwisata desa.

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu model pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi desa. Ditengah pandemi Covid-19 masyarakat dipaksa untuk melakukan adaptasi dengan cepat untuk dapat bertahan ditengah situasi dan kondisi pariwisata yang belum membaik. Pengelolaan wisata berbasis komunitas menjadi salah satu model pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya memberikan peningkatan kompetensi masyarakat desa juga sekaligus langsung mempraktekan apa yang dipelajari melalui pelatihan pelatihan dalam berbagai program pemberdayaan. Kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan pada alternatif pendapatan masyarakat memaksa masyarakat mulai meningkatkan kemampuannya menggunakan media digital sebagai upaya pariwisata berbasis online. Model pengelolaan pariwisata dengan media digital ini dapat menjadi salah satu alternatif model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas sebagai solusi dari pariwisata desa yang terhenti akibat pembatasan sosial untuk mengurangi dampak Covid-19.

PEMBAHASAN

Indonesia memiliki berbagai potensi baik sumber daya alam maupun potensi budaya dan kearifan lokal masyarakat. Berdasarkan data potensi desa tahun 2014 menunjukkan bahwa pemetaan potensi desa sangat penting untuk membangun desa yang mandiri, makmur dan sejahtera (Rahman & Idajati,

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/03/hanya-satu-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-bali-pada-juni-2021>

2017). Potensi desa dapat berupa potensi alam maupun non alam seperti tempat wisata, perkebunan, tambang, tempat rekreasi, situs dan cagar budaya serta kawasan perlindungan maupun konservasi. Berdasarkan definisi potensi desa merupakan kemampuan, kekuatan maupun sumberdaya yang dimiliki oleh suatu daerah namun belum dioptimalkan oleh masyarakat. Tujuan dari pengelolaan potensi desa salah satunya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Mayoritas masyarakat desa memiliki tingkat kelayakan hidup yang rendah dan dengan adanya potensi desa maka masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup dan membentuk suatu desa yang mandiri.

Berdasarkan data potensi desa pada tahun 2014 menunjukkan potensi alam di bidang pertanian sebesar 82,7 persen dan dapat berkembang jika dikelola sebagai sumber pangan sendiri. Selain itu terdapat potensi pertanian dan potensi energi terbarukan yang mencapai 86,4 persen (Taba, 2018). Selain potensi pertanian juga terdapat juga potensi laut dan perikanan sebesar 12.827 ribu dan potensi objek wisata bagi masyarakat yang besar sebesar 1.902 desa wisata yang dapat dikelola (Taba, 2018). Selain potensi wisata, masyarakat desa juga bisa meningkatkan pendapatan melalui berbagai aktivitas ekonomi melalui berbagai usaha kreatif masyarakat untuk menghasilkan berbagai produk unggulan yang diproduksi menggunakan bahan baku lokal berbasis kearifan masyarakat setempat (Suriyany, 2019).

Potensi desa dibagi menjadi tiga bagian utama (Taba, 2018) antara lain sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer merupakan sektor utama potensi desa yang umumnya terdiri dari perkebunan, pertanian dan perikanan. Sektor sekunder merupakan potensi yang diolah oleh masyarakat menjadi sebuah produk atau kerajinan unggulan hasil olahan dan industri. Pada sektor sekunder, umumnya masyarakat memiliki usaha kecil (mikro) maupun usaha rumahan (*home industry*) seperti kerajinan tangan, usaha pengolahan makanan dan minuman untuk membantu pendapatan utama. Pada sektor ketiga yaitu sektor tersier masyarakat memiliki kemampuan mulai dari melakukan perdagangan, memberikan jasa, membuat infrastruktur wisata seperti hotel maupun penginapan. Ketiga potensi tersebut umumnya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes, Pasar Desa, Lumbung Pangan Desa dan Wisata Desa.

Desa Wisata Berbasis Komunitas : Pengelolaan Wisata Kabola oleh FKNK

Pariwisata berbasis komunitas (*community based tourism*) merupakan salah satu model pengelolaan wisata desa yang menekankan peran serta masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata melalui pemetaan potensi wisata dan pelatihan sumber daya manusia di kawasan tersebut. *Community based tourism* (CBT) dapat didefinisikan sebagai kesempatan yang diberikan kepada masyarakat lokal dari sektor pariwisata

untuk melakukan kontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam berbagai usaha pariwisata dan mendapatkan keuntungan, melakukan proses pemberdayaan secara demokratis dengan model distribusi keuntungan kepada komunitas secara adil melalui sistem dan mekanisme yang dibangun oleh komunitas (Garrod, 2001). Model pengelolaan wisata berbasis komunitas umumnya tidak hanya memperhitungkan aspek keuntungan namun keberlanjutan. Keberlanjutan sektor pariwisata tidak hanya dilihat dari aspek kunjungan dan bagaimana mekanisme wisata tersebut dibangun namun dari aspek keberlanjutan lingkungan, kondisi sosial dan budaya, serta melestarikan kearifan lokal masyarakat. Model pengelolaan wisata berbasis komunitas merupakan model pembangunan yang tidak hanya bertujuan untuk membangun komunitas dan desa namun juga menjaga kawasan dan nilai konservasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa wisata desa berbasis komunitas merupakan model pembangunan pariwisata yang *sustainable* dan *holistic*.

Pariwisata dengan model pengelolaan berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) memiliki ciri khusus terkait dengan manfaat yang diperoleh, perencanaan pendampingan dan ketertarikan, kontrol masyarakat yang lebih besar dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan (Timothy, 1999). Konsep pariwisata berbasis masyarakat diterapkan melalui pengembangan desa wisata. Masyarakat desa memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya alam, budaya maupun meningkatkan kapasitas masyarakat setempat. Pengembangan desa wisata memberikan dampak positif bagi masyarakat desa yang disebabkan oleh munculnya alternatif mata pencaharian baru bagi masyarakat. Pengembangan desa wisata dengan konsep ekowisata juga dapat meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan kelestarian alam serta budaya. Dalam aspek yang lebih luas desa wisata juga dapat membuat desa menjadi lebih mandiri karena membangun sumber daya manusia yang dapat mengelola potensi desa secara mandiri (Murphy, 1985).

Salah satu model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dilakukan oleh Komunitas Nelayan Kabola yang dikenal sebagai Forum Komunikasi Nelayan Kabola (FKNK) untuk mengelola wisata Kabola. Kawasan Kabola memiliki kawasan suaka alam perairan (SAP) Selat Pantar dengan luas mencapai 276.693,38 Hektar yang juga merupakan kawasan konservasi laut. Keberadaan FKNK sebagai komunitas lokal yang menginisiasi pengelolaan wisata Kabola bertujuan untuk mengembangkan usaha pariwisata desa berbasis komunitas melalui pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan usaha ekowisata. Usaha Ekowisata yang dilakukan masyarakat desa Kabola melalui FKNK mencakup pengantar kapal, pemandu wisata, usaha kuliner serta konservasi yang terdiri dari Pokmaswas dan pembibitan mangrove di sekitar kawasan wisata Kabola.



Sumber : WWF Indonesia

Gambar 1. Potensi Wisata Kabola (Wisata Mali dan Wisata Pulau)

Model pengelolaan wisata desa yang dilakukan masyarakat Kabola adalah model pengelolaan ekowisata. Terdapat dua paket wisata mencakup “Jelajah Pulau Sika” dan “Konservasi Mangrove”. Konsep ekowisata merupakan model pengelolaan wisata berbasis desa yang menggabungkan pelestarian ekologi dan mengembangkan potensi wisata. Selain itu terdapat beberapa informasi yang ditawarkan mencakup wisata tentang adat dan budaya setempat berupa wisata religi yaitu ziarah ke Makam Sultan Alamudin, wisata desa dengan tinggal di homestay dan berkunjung ke rumah mama marta untuk mempelajari tentang mangrove. Secara umum, model pengelolaan wisata desa Kabola menekankan aspek ekologi, ekonomi dan keberlanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan menurut (Amerta, 2017) merupakan salah satu model pembangunan alternatif yang bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat berdasarkan asas demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. (Amerta, 2017) menjelaskan pemberdayaan sebagai konsep pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai nilai sosial di masyarakat. Terdapat beberapa sifat dalam konsep pembangunan berbasis pemberdayaan antara lain *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Pemberdayaan menekankan pada dua aspek pertama adalah kecenderungan proses yang melakukan alih kekuasaan, kekuatan dan kemampuan (power) kepada masyarakat agar lebih berdaya. Kedua, pemberdayaan menekankan pada proses untuk memberikan dorongan, motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan dalam suatu proses dialog (Wijaya & Sudarmawan, 2019).

Pemberdayaan menekankan pada peningkatan keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan. Pemberdayaan tidak dapat terlepas dari siklus pemberdayaan itu sendiri dengan tujuan akhir adalah pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan tidak hanya dilakukan dalam satu siklus saja namun harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah menjadi mandiri untuk dapat meningkatkan kualitas dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Rahman & Idajati, 2017). Menurut *World Bank* tahun 2002, menjelaskan bahwa pemberdayaan pada dasarnya terdiri dari empat elemen utama antara lain: 1) *Access to information* (akses terhadap komunikasi) sebab informasi merupakan modal utama dalam pengembangan kemandirian; 2) *Inclusion* atau *Participation* (penyertaan/partisipasi) yaitu kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan wisata mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemanfaatan hasil yang penting bagi masyarakat lokal; 3) *Accountability* (akuntabilitas) merupakan pengembangan pelaksanaan kebijakan di lapangan termasuk didalamnya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya pendanaan; 4) *Local Organizational Capacity* (kapasitas organisasi lokal) yang merupakan peningkatan kemampuan masyarakat untuk melakukan kerjasama dan memperkuat organisasi lokal serta melakukan mobilisasi untuk mengatasi berbagai persoalan; 5) Bentuk pariwisata yang dapat memberikan manfaat bagi penduduk lokal berbasis masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat Desa Kabola dilakukan melalui pendampingan dengan WWF sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dan komunitas lokal untuk memiliki kemampuan dalam mengelola potensi wisata di kawasan Kabola. Terdapat beberapa pelatihan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan yang diterima oleh masyarakat Desa Kabola melalui Forum Komunikasi Nelayan Kabola antara lain :

- a. Penguatan kelembagaan untuk mengembangkan ekowisata Kabola;
- b. Pelatihan untuk membangun sistem komunikasi antar anggota;
- c. Pelatihan dokumentasi kegiatan;
- d. Pelatihan Pelayanan Wisata Desa;
- e. Pelatihan peningkatan produk ekowisata.

Selain pelatihan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk membangun wisata desa adalah dengan pendampingan masyarakat secara intensif mulai dari pemetaan kawasan wisata, pembuatan peta wisata, merancang model ekowisata dan lokasi mana saja yang akan dijadikan spot kunjungan dan merancang media promosi wisata tersebut. Secara umum, wisata desa berbasis masyarakat tidak terlepas dari peran kelembagaan untuk mendukung berjalannya wisata tersebut mulai dari perizinan, ketetapan hukum, dukungan lembaga mulai dari level desa sampai level provinsi dan juga

dukungan stakeholder lain untuk meningkatkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam mengelola desa wisata tersebut.

Model pengelolaan wisata berbasis masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang mendorong masyarakat untuk mampu mengembangkan diri, adaptif, dan mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alam di wilayahnya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa pengelolaan wisata berbasis masyarakat mengharuskan masyarakat untuk terus berkembang dan belajar sebab perubahan dari berbagai sistem maupun aspek pelayanan serta tuntutan wisatawan menjadi satu hal yang perlu dipelajari secara terus menerus. Hal tersebut menyebabkan pendampingan kelompok masyarakat inisiator desa wisata umumnya dilakukan secara berkelanjutan sampai pada satu indikator yang dapat menjelaskan bahwa kelompok tersebut telah mampu untuk dilepas dan mengelola desa wisata secara mandiri. Pada beberapa desa wisata pengelolaan wisata dilakukan atas inisiatif lembaga lokal melalui BUMDes namun pada beberapa lokasi lain salah satunya di Desa Kabola, pengelolaan wisata desa dilakukan oleh komunitas masyarakat dan koordinasi secara aktif dengan pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pariwisata Berbasis Digital Sebagai Model Alternatif Pengelolaan Wisata Desa Di Tengah Pandemi Covid 19

Sektor pariwisata merupakan sektor yang mengalami dampak paling besar akibat dari Covid 19, tidak terkecuali pada pengelolaan desa berbasis masyarakat melalui Desa Wisata. Data kunjungan wisata desa mengalami penurunan signifikan akibat pembatasan sosial untuk mengurangi intensitas pertemuan orang termasuk kerumunan di dalamnya. Namun ditengah menu-runnya sektor pariwisata, desa wisata memiliki keunggulan tersendiri salah satunya adalah target wisatawan domestik yang umumnya mendominasi kawasan desa wisata. Hal tersebut juga didorong oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui program pengembangan desa wisata yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yang menargetkan sebanyak 244 desa wisata menjadi desa wisata mandiri sampai tahun 2024⁸.

Program Desa Wisata merupakan salah satu unggulan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebab model pengembangan desa wisata memberikan dampak bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat desa dan menekan lajut urbanisasi dari desa ke kota. Selain itu Kemenparekraf yang bekerja sama dengan Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi) membuat suatu pelombaan yang ditujukan bagi desa wisata di Indonesia melalui

⁸ <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2655/desa-wisata-jadi-pengungkit-ekonomi>

Anugerah Desa Wisata 2021⁹. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengelola desa wisata lebih kreatif dan inovatif beradaptasi ditengah pandemi covid 19. Terdapat tujuh kategori penilaian dalam penghargaan ini antara lain :1)penerapan CHSE (Cleanliness, Health, Safety dan Environmental Sustainability); Desa Digital; Souvernir (kuliner, fashion, kriya); daya tarik wisata (alam, budaya, buatan); konten kreatif; homestay dan toilet.

Kebertahanan pariwisata desa ditengah pandemi covid memaksa masyarakat lokal untuk cepat beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi, termasuk didalamnya berkurangnya pengunjung di kawasan wisata desa. Berkurangnya pengunjung berdampak signifikan pada pendapatan alternatif masyarakat lokal. Hal tersebut disebabkan sektor pariwisata memiliki jejaring kerjasama yang sangat luas dan mempengaruhi berbagai sektor untuk mendukung berjalannya suatu kawasan menjadi kawasan wisata. Beberapa aspek yang terdampak dari tidak adanya kunjungan antara lain : pengelola wisata desa, homestay, penyedia jasa dan kuliner serta jejaring lainnya yang muncul seperti penjual asongan, guide, penyewaan kapal maupun alat selam dan berbagai kegiatan lainnya.

Penelitian bentuk adaptasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata di Dataran Tinggi Dieng yaotu dengan kembali ke mata pencaharian utama dan memperkuat brand CHSE yaitu menambahkan infrastuktur pendukung seperti pengukur suhu dan menjalankan protokol kesehatan (Afriana & Widiyanto, 2021). Pada penelitian yang lain menjelaskan proses adaptasi pelaku usaha wisata di Bali melalui diversifikasi jenis usaha terutama usaha bahan pangan dan di sektor wisata meningkatkan aspek CSHE juga dilakukan untuk menjaga wisatawan merasa aman dan nyaman selama berwisata diwaktu pandemi (Subadra, 2021). Berbeda halnya dengan pemulihan kawasan wisata di Bandung yang melalu beberapa strategi perencanaan mulai dari pemetaan sampai pada penyusunan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk pemulihan pariwisata di Kota Bandung dengan tetap menerapkan aturan utama selama pandemi covid 19 yaitu menjaga protokol kesehatan (Herdiana, 2020).

Salah satu peluang agar desa wisata dapat bertahan di tengah pandemi covid adalah dengan melakukan inovasi wisata desa berbasis digital dan media online. Keberadaan desa wisata memberikan dampak signifikan selain membuka lapangan pekerjaan, peluang usaha namun juga meningkatkan keterampilan masyarakat. Perkembangan media digital selama pandemi covid mengalami peningkatan yang luar biasa. Hal tersebut menjadi alternatif bagi pengelola wisata untuk mengintegrasikan model pengelolaan konvensional

⁹ <https://travel.kompas.com/read/2021/08/01/180600927/berapa-jumlah-desa-wisata-di-indonesia-?page=all>

menjadi berbasis digital, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait kawasan wisata dan unsur pendukung didalamnya seperti kuliner dan souvenir. Selain itu media digital juga dapat membantu proses jual beli untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor kuliner dan souvenir dapat ditawarkan melalui berbagai platform media sosial sehingga masyarakat dapat menikmati wisata digital dan juga membeli makanan serta souvenir.

Peningkatan keterampilan pengelola menjadi satu hal yang penting untuk dapat membuat konten wisata desa berbasis digital sehingga masyarakat dapat menikmati wisata desa dalam ruang ruang virtual. Selain itu, pariwisata berbasis digital juga dapat dibuat dalam bentuk edukasi wisata virtual atau *virtual edutourism* yang dapat ditawarkan kepada sekolah untuk dapat melihat pariwisata desa di seluruh Indonesia secara virtual. Digitalisasi pariwisata ini dapat didukung dengan jejaring kuliner dan souvenir yang dapat ditawarkan untuk dibeli selama proses wisata virtual berlangsung. Pengembangan wisata virtual tidak dapat terjadi tanpa adanya pendampingan dan pelatihan serta dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah terkait infrastruktur dan jaringan telekomunikasi yang merata di semua daerah. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan menjadi satu hal yang wajib dilakukan oleh berbagai pihak dalam mendukung keberlanjutan wisata desa terutama di masa pandemi. Adaptasi dan inovasi merupakan kunci keberhasilan bertahan di era pandemi.

PENUTUP

Indonesia memiliki berbagai potensi baik sumber daya alam maupun potensi budaya dan kearifan lokal masyarakat. Potensi tersebut menjadi salah satu modal pariwisata yang ada di Indonesia. Salah satu model pengelolaan pariwisata adalah model pengelolaan berbasis masyarakat / *community based tourism* (CBT) yang menekankan pada aspek masyarakat lokal sebagai pengelola kawasan wisata. Wisata Desa berbasis komunitas merupakan salah satu model penerapan dari CBT. Pengelolaan wisata berbasis komunitas tidak terlepas dari kebutuhan akan pemberdayaan masyarakat lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pengelola wisata desa. Pesatnya pertumbuhan pariwisata menyebabkan potensi pertumbuhan wisata desa pun semakin meningkat.

Pesatnya pertumbuhan pariwisata ditingkat nasional maupun lokal mengalami persoalan akibat pandemi covid 19. Sektor pariwisata menjadi sektor yang terdampak sangat besar akibat pembatasan sosial sehingga tidak ada lagi wisatawan yang datang ke kawasan wisata. Kondisi tersebut pun dialami oleh wisata desa, yang mengalami penurunan signifikan selama pandemi covid 19. Wisata desa berbasis masyarakat memiliki keunggulan tersendiri salah satunya adalah karena target wisatawan yang utama adalah

wisatawan lokal. Namun hal tersebut tidak lantas menyebabkan wisata desa keluar dari persoalan akibat pandemi sebab jejaring sektor wisata desa pun mengalami persoalan selama pandemi akibat penurunan jumlah wisatawan.

Kondisi tersebut dapat diatasi melalui inovasi dan adaptasi yang dilakukan oleh pengelola wisata desa berbasis masyarakat salah satunya adalah dengan memanfaatkan media digital sebagai alternatif dan sarana wisata desa. Ide tentang wisata virtual dapat menjadi solusi selama pandemi berlangsung. Selain itu penjualan makanan dan souvenir juga dapat dilakukan lewat media online. Sehingga digitalisasi pariwisata desa berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan pendapatan masyarakat selama pandemi terutama pengelola wisata. Proses tersebut dapat terjadi jika pemberdayaan masyarakat tetap dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan untuk dapat mengoptimalkan kemampuan masyarakat, membangun kesadaran digital dan mampu mendapatkan manfaat secara ekonomi dari media digital tersebut. Pelatihan digitalisasi wisata desa berbasis komunitas perlu dilaksanakan terutama bagi pengelola wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, F. N., & Widiyanto, N. (2021). Pandemi Covid-19 Dan Adaptasi Pelaku Pariwisata Di Dataran Tinggi Dieng. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 15(01). <https://doi.org/10.47256/kepariwisataan.v15i01.152>
- Amerta, I. M. S. (2017). Community based tourism development. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 97–107. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v1n3.60>
- Baskoro, & Rukendi, C. (2008). Membangun Kota Pariwisata Berbasis Komunitas : Suatu Kajian Teoritis. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, III (1) :
- CIFOR. (2004). *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*.
- Departemen, D. J. P. D. P., & Indonesia, K. dan P. dan W. (2009). *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat. Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia*.
- Garrod, B. (2001). *Local Participation in The Planning and Managemetn of Eco-Tourism A Revised Model Approach*. University of the West of England.
- Hayati, N. (2014). Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Desa Tompobulu Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. *Info Teknis Eboni*, 11(1), 45–52.
- Herdiana, D. (2020). Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7, 1. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p01>

- Murphy, P. (1985). *Tourism : A Community Approach*. Methuen.
- N, F. A., Krisnani, H., & Darwis, R. S. (2015). Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 341–346.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13581>
- Poncokusumo, K., Malang, K., Purmada, D. K., & Hakim, L. (2016). PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF COMMUNITY BASED TOURISM (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah ., *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 32(2), 15–22.
- Rahman, C. N. A., & Idajati, H. (2017). Karakteristik Kawasan Wisata di Desa Ngunut Kabupaten Bojonegoro dengan Konsep Community Based Tourism. *Jurnal Teknik ITS*, 6(1), 1–4.
<https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i1.22202>
- Subadra, I. N. (2021). Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 11(1), 1.
<https://doi.org/10.24843/jkb.2021.v11.i01.p01>
- Suriany, L. (2019). *dengan Konsep Community Based Tourism*. 25–40.
- Taba, M. I. (2018). Ekonomi Desa. In *Harian Fajar*.
- The ASEAN Secretariat. (2016). *Asean Community Based*.
- Timothy, D. . (1999). Participatory Planning a View Of Tourism in Indonesia. *Annual Review of Tourism Research*, XXVI (2).
- Wibowo, S. (2004). *Analisis Hubungan Preferensi Pengunjung Dengan Nilai Jasa Lingkungan Ekowisata Studi di TNGP*. IPB.
- Wijaya, N. S., & Sudarmawan, I. W. E. (2019). Community Based Tourism (Cbt) Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Dtw Ceking Desa Pekraman Tegallalang. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(1), 77–98. <https://doi.org/10.22334/jihm.v10i1.162>

THE EMPOWERMENT OF WRITING ABILITY THROUGH GRAPHIC ORGANIZERS

Mega Mulianing Maharani, Rima Zahrotul Muniroh, Ambar Asyhari

INTRODUCTION

For many Indonesian people, English is their foreign language. For a certain case, English is no more as a foreign language rather than as a second language. For students of English Education Study Program, English is their essential language. They use English in and out of classroom. They are treated to be the master of English during the study. They are forced to speak, write, listen and read English sources. They are forced to have those skills during their study. However, in reality, the students are facing serious problems. Their daily habit is not about to fulfill the requirements of being good English user. One of the example is that they have difficulties in writing.

Writing is a fundamental component of language learning. In writing, new meaning is the result of idea and knowledge blending. Blending them into a good meaning is difficult if the students do not have enough vocabularies. The additional factor is that the students need more time to process their idea. It is because producing a well-thought-out piece of writing takes grammatical structure understanding and vocabulary mastery. More time should be devoted to contributing those two abilities in their writing.

The second semester students are the students who do not have good brave to start to write. The majority of them usually refuse to write, not only because they do not know what to write but also how to write. It is such a depressing time for them. It is reasonable if they face a very terrible situation because their previous background is not English. Then the researchers decided to have a certain strategy to be intervened during their writing activities. The researchers chose graphic organizers as the solution to help them. The focus of graphic organizers usage in this research is to know how graphic organizers help the students in guiding their writing. The researchers want to know in what items of writing they encountered and what criteria of writing they have.

Graphic organizers introduces the concept of mapping (Styati & Irawati, 2020). In their study, they introduced graphic organizers in descriptive writing. Through the study, it was mentioned that there was a significant

difference between the students in control and experimental groups. In different study, graphic organizers is the choice for helping learners to decide their picture from their writing (Rahmat, 2020). The use of graphic organizers can be the solution for learning strategy. The survey of his case study was used to know students' perspective about the use of graphic organizers as part of their activities. Knowing the students' perspective can be the right solution of a betterment in the next activities. Moreover, graphic organizers can be used to know the English learners' confidence and motivation (Kalmamatova et al., 2020). According to their result of study, graphic organizers which were part of critical thinking approaches could be used to show the students' intrinsic motivation. The collaboration between creativity and teamwork during the graphic organizers implementation improved the students' thinking and practical language skills. From the three studies, it can be mentioned that graphic organizers gave many beneficial for English teaching.

Graphic organizers as educational application originated on the students' learning material understanding. Graphic organizers figure out the students' difficulty about certain perspective into the easiest one. Graphic organizers propose relationship between one concept to the next concepts. Through graphic organizers, students can elaborate their concept mapping freely without any intervention from teacher. The use of graphic organizers helps them to memorize ideas. The popularity of graphic organizer still works nowadays. Graphic organizers offer students' responsibility of being able to negotiate meaning and share information appropriately (Mackinnon & Keppell, 2005). Graphic organizers help students to focus more on their tasks, particularly about details and specific order of their imagination (Miller, 2011).

In university level, writing is part of the academic success for students which have to be included in the syllabus. Therefore, without saying that the ability to create a basic unit of writing is their demand. In other perspective, (Kellogg, 2008) proposes some reasons behind the academic success of writing as it helps to reinforce the grammatical structure, enhance the students' vocabulary, and assist other language skills such as reading, listening and speaking. As a developmental process, writing can be observed and encouraged. As a result, students cannot stop their writing in a very short time. It takes a long time because it covers a long process which is not only non-linear and exploratory but also generative process whereby, they have to reformulate their written thinking into the best result. However, writing is a complex process which needs various classroom activities. By contributing those various classroom activities then it can develop the language use skill.

In order to facilitate the students' problem then the researchers used graphic organizers. Graphic organizers as representative diagram that shows relationship between facts, ideas, and concepts (Scott & Dreher, 2016). They

argue that they come in many forms, including flowcharts, webbing, concept mapping, and matrixes. Graphic organizers have flexibility to adapt for different purposes, patterns and concepts in different ideas. The theory underlying graphic organizers is connectives. It is the core of the learning process based on the point of view of connectionist (Level, 2014). Graphic organizers propose concepts and their relationship. Hence, it helps students to focus on the main information to develop it in the text. The ability to interpret what has been written in graphic organizers to a good writing is suggested as successful writer. In other words, the students are said to be good graphic organizers users if they can really connect the idea. There are series of guidelines: 1) verbalize relationships, 2) provide opportunity for student input, 3) connect new information to past learning, and 4) seize opportunities to reinforce decoding and structural analysis.

The researchers wanted to know the writing process did by the third semester students when they implemented graphic organizers. Graphic organizers were used as the concept arrangement for their better writing construction. Knowing the process of the students' writing in a paragraph-based writing subject is really important for lecturers. Lecturers can accommodate their students' writing difficulty during the process. Finally, the students can handle their obstacles for further writing activities.

Action research was used as the research design of the research. Action research design represents deep inquiry into one's professional practice. The characteristics of action research are systematic and reflective study of empirical evidence (Norton, 2019). The empirical evidence in this research was graphic organizers to guide students' writing. At the end of the research, graphic organizers could contribute the students' writing into a betterment. It is in line with the major concern of action research which is to bring improvement. The researchers adopted the spiral design which consisted of three phases as *look*, *think*, and *act*. The *look* phase meant gather data, define and describe the problem. The *think* phase meant explore and analyze the problem and findings. The *Act* phase meant plan, implement and evaluate. In other words, the researchers followed that spiral structure to identify the situation, think the reality after the classroom activities and make a plan for next activities based on students' performances. The researchers implemented two cycles in the study. It was because the researchers did not find any progress in their first writing.

The participants of this research were the second semester students of English education department who learned to write paragraph. There were 22 students in a class. The choosing of the participants based on the concept of purposive sampling technique. I took them as the participants because some of them needed special attention in order to help them to improve their writing

ability. One of the reasons because they have different English ability. Most of them had learned English for several years since they were in the junior high school. However, it does not help them a lot to write in English. In that class, the researchers observed that there were five students who were able to write well. It showed that they had good ability in writing. Meanwhile, the rest of them were not good in writing. They had different difficulties. The researchers described their difficulties into vocabulary, tenses, and supporting ideas difficulties. In addition, the researchers took a deep analysis on those problems.

During gathering the data, the researchers looked at the students' problem. The researchers found that the students' problem was on writing idea into a good arrangement. This situation made the researchers decided to have the writing test as the instrument in order to know their improvement. This writing test was given during the *act* phase after they created graphic organizers. Moreover, the students' writing was scored into four items of scoring, namely, content, organization, accuracy, and range and complexity. Its scales were 9-10, 7-8, 5-6, 3-4, and 1-2. The highest level was 9-10 and the lowest level was 1-2. By considering those scales, then the researchers decided to have the classical scale of that level for all students is 5-6. It was used to know whether the students were in that standard level or not. The researchers had several steps in analyzing the data: preparing and organizing, exploring and coding, describing findings and forming themes, representing and reporting findings, interpreting the meaning and validating the accuracy.

FINDINGS AND DISCUSSIONS

Based on the previous decision about the students' classical scale, in cycle one the researchers found that in the aspect of *content*, there were 20.45% of the students who could have good *content*. There were 19 students who were in or above the classical scale of the succeed that is 5-6. The *content* criteria in the scale of 5-6 is that the treatment of the assignment minimally fulfills the task expectation; some of the task may be slighted; some evidence for generalizations and supporting ideas is provided; and ideas from source text are included but may not be explicitly acknowledge as such. In addition, the scale of the students in this cycle especially in *content*, the researchers found that all the students who passed in providing good *content* were above the scale of 5-6. They were in the scale of 7-8 approximately 15 students which were in the categories that they could have the treatment of the assignment fulfills the task expectation completely and the topic is addressed clearly; evidence for generalizations and supporting ideas is provided in a relevant and credible way; and ideas from source text used to support thesis. On the other hand, there were three students in the scale of 9-10. The characteristics of that

scale is that the treatment of the assignment completely fulfills the task expectations and the topic is addressed; fully developed range evidence for generalizations and supporting ideas is provided in a relevant and credible way; and uses ideas from source text well to support thesis. Unluckily, the researchers found three students failed to have good *content*.

For the second item, *organization*, there were 19.31% of the students who could organize their writing well. The researchers found 17 students who were in the scale of 7-8. The characteristics in that scale is that clear organization plan; satisfactory introduction and conclusion; and satisfactory connections between and within paragraphs using transitions and other cohesive devices. There were 5 students below the scale of 5-6. Moreover, there was no student in the scale of 9-10.

Similar with the second item, in the third item the researchers also found the same percentage, 19.31%. For *accuracy*, the researchers found 12 students who were in the scale of 7-8. The criteria of that scale are that the essay is clearly written but contains some errors which do not interfere with comprehension; the essay may contain some errors in word choice, word form, verb tenses, and comprehension. In the scale of 5-6, the researchers found 5 students. The criteria are that their essay is generally comprehensible but contains some errors that distract the reader; at most a few errors interfere with comprehension; the essay may contain some errors in word choice, word form, verb tenses, and comprehension. Then, the researchers found 5 students below the scale of 5-6.

As the last item, the researchers found 18.18% of the students had good *range and complexity*. For language range and complexity, the researchers found 9 students in the scale of 7-8 with the criteria as uses a variety of sentence types; good range of vocabulary used with at most a few lapses in register; and some language from the source text may be present but is generally well incorporated into writer's own words. In the scale of 5-6, there were 7 students could have somewhat limited range of sentence types, may avoid complex structures; somewhat limited range of vocabulary; and extensive language from source texts with an attempt to incorporate text own language. However, there were 6 students below the standard scale.

In short, in the cycle 1 the students who were in the classical scale approximately 5 to 6 students. It means that the students were capable of writing good paragraph by using graphic organizers. The lowest classical percentage is *range and complexity*. The students' difficulties were about in producing a variety of sentences types accurately, a wide range of academic vocabulary, and source text language accurately. For detail elaboration, the researchers spread the classical scale percentage of every item into 25%. Then the researchers got a brief illustration as follows:

Table 1. result of the writing aspect in cycle 1

Item	Result Percentage	Percentage Of Classical Distribution
content	20.45%	25%
organization	19.31%	25%
accuracy	19.31%	25%
range and complexity	18.18%	25%
Total	77.25%	100%

The researchers also made the classical class into 85% to be said that the result of the total percentage is successfully done. Hence, by having 14 students who capable of producing good writing then the result of the classical class in the first cycle is 63% which is lower than 85%. This result is used as the data gathered for the second cycle.

In cycle two, the researchers found that in the aspect of *content*, there were 22.72% of the students had good *content*. There were 8 students in the scale of 9-10; 14 students in the scale of 7-8; and no one in the scale of 5-6 or below it. The students failed in the first cycle were capable of passing the standard scale. All of them were in the scale of 7-8. It means that everyone is better in *content*.

For the second item, *organization*, there were 22.72% of the students who could organize their writing well. There were 4 students in the scale of 9-10. The researchers found 17 students who were in the scale of 7-8. There was one student in the scale of 5-6. The researchers did not find any students below the scale of 5-6. Meanwhile, the students failed in the first cycle were capable of providing better *organization*. All of them were in the scale of 7-8.

For the third item, *accuracy*, there were 22.72% of the students had good *accuracy*. There were 4 students in the scale of 9-10; 13 students in the scale of 7-8; 5 students in the scale of 5-6 and no one below the scale of 5-6. The researcher can say that the students were better in the second cycle. Most of them were in the criteria of writing clearly essay with few errors and the errors do not interfere with comprehension; including consistently accurate word forms and verb tenses; writing word choices accurately and appropriately.

For the last item, there were 20.45% of the students had good language range and complexity. There were 13 students were in the scale of 7-8; 6 students in the scale of 5-6 and 3 students below the scale of 5-6. This is the only item that the researchers paid attention about the result because there were 3 students were below the scale of 5-6. They belong to the students who had limited numbers of sentence types, and little integration between extensive use of source text language and the writer's words.

In short, the researchers can say that the students were good in the second cycle. They could pass the criteria of being good writers. They improved their writing ability in the second cycle. During the process of creating content, organization, accuracy and language range and complexity, they did it well. Then, the researchers figured out the percentage improvement in every item as in the following table.

Table 2. result of the writing aspect in cycle 2

Item	Result Percentage	Percentage Of Classical Distribution
content	22.72%	25%
organization	22.72%	25%
accuracy	22.72%	25%
range and complexity	20.45%	25%
Total	88.61%	100%

In the second cycle, there were 19 students who were able to produce good writing. Then, the classical is 88.18% which is higher than 85%. By applying the second cycle, the researchers found a very good improvement on the students’ writing ability. On the other hand, the researchers had to pay attention to the students who were still in problems of writing. There were three students who were under the consideration to receive more attention for further learning. They were the ones who were really in problems of writing since the first meeting.

Finally, by having the results of the students’ writing in two cycles above, the writer summarized that graphic organizers guided the students to write. The students accomplished level by level of their ability to write when they were guided to use graphic organizers. The students could follow the criteria of good writing as described as content, organization, accuracy, range and complexity. During the process of adopting their draft which was written in graphic organizers, they could elaborate their writing even the writers found that there were certain students should have pay attention more about their ability to write.

There were studies that talked about graphic organizers to improve students’ reading skill such as a study done by (Praveen Sam & Rajan, 2013) and (Torres, 2015). There was also study implemented graphic organizers for disruptive behavior (McDaniel & Flower, 2015). On the other hand, there were studies investigated graphic organizers for students with disabilities (Hall et al., 2016) and (Evmenova & Regan, 2019). On the other hand, the implementation of graphic organizers of this study was focused on university students’ writing. The result of this study proved that graphic organizers could be

applied not only for reading skill but also writing skill. In addition, in higher level of education, university level, graphic organizers were well received as the intervention to guide students to write. Supported by several results of the previous studies, through this discussion, the writers tried to prove it. After having the result of the students' writing by using graphic organizers, then the writer discussed the connection of this research and the previous research which had similar topic.

The finding of this research mentioned that graphic organizers could guide students to write. It is in line with the previous research which talked about graphic organizers to increase students' writing performance (Miller, 2011) in which the result clarified that the three observed students could have a good writing. The writing was actually arranged well by inserting a topic sentence, introduction as the body of writing and also conclusion. On the other hand, research which was about the use of graphic organizers charts in improving students' writing (Delrose, 2011) also proved that it improved the students' writing because it was used as the tool to increase syntactic complexity and discourse structure. The students were able to write complex sentences as well as to organize sentences into discourse. The writer could say that this research finding had similar result with that research in which the students had better improvement in the content and organization after they passed the second cycle.

Other research (Khatib & Faruji, 2012) proved that graphic organizers helped students to understand the organization of the story. They could organize the event into a good order by filling out the graphic organizers provided during the writing process. In accordance with this study, the result of this study guided the students to be good organizers of story by which they were able to follow the criteria in creating good writing as stated in the finding of this research: content, organization, accuracy, range and complexity.

In general, the students' writing ability was better after the implementation of graphic organizers as what the writers found in (Owolabi & Adaramati, 2015). In their study, they stated that the teaching writing by using graphic organizer could give a significant influence towards the students' writing ability. They shared that the students contributed their ideas actively during the teaching and learning process using graphic organizers. The reason was that the students understood the concept of relating ideas and content. Hence through this result, the writers could say that this research result was in line with that research in terms of all the criteria of good writing. However, in terms of the EFL setting, this research was in line with the finding of (Level, 2014) who mentioned that graphic organizers were effective invention to teach writing to students in a foreign language setting. The finding showed that the students were more likely adopt graphic organizers because they were

offered in exciting and creative form. Hence, graphic organizers were as the set of tools to open up their imagination.

CONCLUSION

The present study has a purpose to know how graphic organizers helps the second semester students in guiding their writing. The second semester students are the students who still need more assistant in producing good writing especially for argumentative writing. For them, to be able to write good or even very good argumentative writing is hard. They have many problems for being consistent with the rules of paragraph writing such as focusing on the topic, relating sentence to sentences in all paragraphs and also contributing complex arguments into the right way. In accordance with those problems then graphic organizers are the choice to help them to guide them in the rules of writing an argumentative text. Giving an argument is just like sharing idea about certain topic of discussion. From the very serious problem of sharing argument into the very trained of sharing it become the finding of the present study. The action research helps the researchers to come up with something joyful for students. Graphic organizers are the right solution for the students' writing problem. Graphic organizers which are implemented in the present study can guide students in writing argumentative text. After applying it in their writing process, the students got understanding of being good argumentative writers. However, the researchers still have three students who are in the same writing ability as the previous process before graphic organizers are implemented. It is the challenge for the researchers to show and use further spectacular graphic organizers presented to the students, then it is able to help them to solve their problem.

Graphic organizers may be something new for researchers who focus on writing since there have been so many studies focusing on reading. However, by reading this research, other researchers can elaborate more evidences to prove that graphic organizers are able to be used in helping students' writing problems. Contributing the most interesting graphic organizers such as implemented in computer or online devices can be a very good idea for further discussion because such research is rarely found in the writing implementation.

REFERENCES

- Barrantes Torres, D. (2015). Effectiveness of the Use of Graphic Organizers and Summaries: A Case Study of Adult EFL Students in a Reading Comprehension Course. *Revista de Linguas Modernas*, 22.
<https://doi.org/10.15517/rlm.v0i22.19685>
- Delrose, L. (2011). *Investigating the Use of Graphic Organizers for Writing*.

- Evmenova, A. S., & Regan, K. (2019). Supporting the Writing Process with Technology for Students with Disabilities. *Intervention in School and Clinic, 55*(2), 78–85. <https://doi.org/10.1177/1053451219837636>
- Hall, C., McCulley, L., Wanzek, J., Kent, S. C., & Davis, A. (2016). A New Look at Mnemonics and Graphic Organizers in the Secondary Social Studies Classroom. *TEACHING Exceptional Children, 46*(1), 47–55. <https://doi.org/10.1177/004005991304600106>
- Kalmamatova, Z., Shamurzaev, A., Ysmailova, R., Belekova, K., Ahmadaliev, D., Sartbaeva, N., Bekmuratova, N., Moldoeva, Y., Kidiraliev, N., & Abdullaeva, Z. (2020). Graphic Organizers as Effective Methods in Teaching Classroom English. *Open Journal of Modern Linguistics, 10*(05), 459–467. <https://doi.org/10.4236/ojml.2020.105027>
- Kellogg, R. T. (2008). Training writing skills: A cognitive developmental perspective. *Journal of Writing Research, 1*(1), 1–26. <https://doi.org/10.17239/jowr-2008.01.01.1>
- Khatib, M., & Faruji, L. F. (2012). The Impact of Using Story Maps as Graphic Organizers on Development of Vocabulary Learning of EFL Learners. *Journal of Language Teaching and Research, 3*(6), 1114–1121. <https://doi.org/10.4304/jltr.3.6.1114-1121>
- Level, D. K. (2014). *ORGANIZERS: Advance Organizers Graphic Organizers Advance Organizers Instructional Strategies*. <https://www.ecu.edu/cs-edu/TQP/upload/ISLES-S-Organizers-Declarative-Aug2014.pdf>
- Mackinnon, G. R., & Keppell, M. (2005). Concept Mapping: A Unique Means for Negotiating Meaning in Professional Studies. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 14*(3), 291–315.
- McDaniel, S. C., & Flower, A. (2015). Use of a Behavioral Graphic Organizer to Reduce Disruptive Behavior. *Education and Treatment of Children, 38*(4), 505–522. <https://doi.org/10.1353/etc.2015.0016>
- Miller, S. A. (2011). *Using graphic organizers to increase writing performance*. December. <http://hdl.handle.net/1951/57455>
- Norton, L. (2019). Action Research in Teaching and Learning. In *Action Research in Teaching and Learning*. <https://doi.org/10.4324/9781315147581>
- Owolabi, J., & Adaramati, T. F. (2015). Effects of graphic organiser on students' achievement in algebraic word problems. *Journal of Education and Practice, 6*(5), 39–45.
- Praveen Sam, D., & Rajan, P. (2013). Using graphic organizers to improve reading comprehension skills for the middle school ESL students. *English Language Teaching, 6*(2), 155–170. <https://doi.org/10.5539/elt.v6n2p155>
- Rahmat, N. H. (2020). Information Processing As Learning Strategy: the Case of

- Graphic Organisers. *European Journal of Education Studies*, 7(4), 1–15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3762575>
- Scott, D. B., & Dreher, M. J. (2016). Student Thinking Processes While Constructing Graphic Representations of Textbook Content: What Insights Do Think-Alouds Provide? *Reading Psychology*, 37(2), 286–317. <https://doi.org/10.1080/02702711.2015.1052602>
- Styati, E. W., & Irawati, L. (2020). The Effect of Graphic Organizers on ELT Students' Writing Quality. *Indonesian Journal of EFL and Linguistics*, 5(2), 279. <https://doi.org/10.21462/ijefl.v5i2.283>

BUDAYA LITERASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SOFTSKILL GENERASI MUDA

Dyah Maya Nihayah, Amin Pujiati, Fafurida, Avi Budi Setyawan

PENDAHULUAN

Pemerataan kualitas dan sarana prasarana pendidikan merupakan masalah pokok di dunia pendidikan nasional, khususnya pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah wahana pertama bagi anak-anak untuk memulai proses pembelajaran. Namun, banyak fakta menunjukkan bahwa daerah-daerah terpencil di pelosok bumi pertiwi belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Padahal, Pendidikan Dasar dilindungi di dalam UUD 1945, Pasal 41 ayat (2). Itulah sebabnya, literasi perlu diberikan sedini mungkin (*early literacy*) (Aisyah, 2021); (Nuraeni, 2016). Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN), arti penting literasi ini ditetapkan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Hasanah et al., 2019). Literasi merupakan proses yang kompleks, yang melibatkan pembentukan pengetahuan sebelumnya, budaya dan pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih mendalam (Syofyan & Amir, 2019);. Keterbatasan sarana dan prasaran ini sebenarnya tidak hanya disebabkan karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah. Terpencilnya lokasi dan lemahnya jaringan infrastruktur fisik dianggap menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, kondisi bentang alam Indonesia juga menyebabkan aksesibilitas akan sarana pendidikan menjadi terhambat.

Desa Sidomukti merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Ketinggian desa ini adalah 1200 m di atas permukaan laut. Jarak pemerintahan desa menuju kecamatan adalah 4 km, jarak dari pusat pemerintahan desa menuju kabupaten adalah 15 km. Sedangkan jarak pusat pemerintahan desa menuju ibukota propinsi adalah 26 km. Desa Sidomukti terbagi menjadi 6 dusun, yaitu Dukuh Sidomukti, Dukuh Krandegan, Dukuh Geblog, Dukuh Kluwihan, Dukuh Tegalsari dan Dukuh Gerpetung. Data monografi terakhir yang diperoleh, tercatat ada lebih dari 30% penduduk di Desa Sidomukti merupakan usia sekolah. Lihat tabel 1

Tabel 1. Kategori Penduduk berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Jiwa
1	0 < 1	152
2	1 > 5	330
3	6 – 10	698
4	11 – 15	696
5	16 – 20	957
6	21 – 25	460
7	26 – 30	433
8	31 – 40	410
9	41 – 50	618
10	51 – 60	484
11	> 60	351
Jumlah		5589

Sumber: Monografi Desa Sidomukti Bulan Januari Tahun 2013

Pada tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 2013 saja usia sekolah dari 6-25 tahun mencapai 2811 jiwa atau lebih dari 50% merupakan potensi sumber daya manusia di Desa Sidomukti yang harus dikelola dengan baik kualitasnya. Namun pada tahun 2018, jumlah sekolah- sekolah untuk anak usia dini sangat sedikit. (lihat Tabel 2)

Tabel 2. Banyaknya Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) Di Kecamatan Bandungan Tahun 2018

No	Desa/ Kelurahan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Sekolah Dasar (SD)		Madrasah Ibtidaiyah (MI)	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Mlilir	0	4	2	0	0	1
2	Duren	0	4	1	0	0	1
3	Jetis	0	7	2	1	0	2
4	Bandungan	0	7	3	1	0	1
5	Kenteng	0	4	2	0	0	1
6	Candi	0	7	3	0	0	1
7	Banyukuning	0	8	1	1	0	3
8	Jimbaran	0	5	1	2	0	1
9	Pakopen	0	2	2	0	0	0
10	Sidomukti	0	3	3	0	0	0

Sumber : (BPS, 2020)

Dari tabel 2 terlihat bahwa di Desa Sidomukti, hanya memiliki 5% sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 15% Sekolah Dasar (SD). Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dasar di daerah terpencil khususnya di Desa Sidomukti masih jauh dari harapan. Ketiadaan fasilitas pendidikan

yang memadai, keterbatasan jumlah pengajar dan kompetensinya juga turut memperburuk keadaan. Kondisi tadi juga pasti akan melahirkan nuansa belajar yang sangat konvensional. Hampir tidak ada ilmu dan ketrampilan baru yang diperoleh oleh siswa selain dari buku pelajaran serta dari guru itu sendiri.

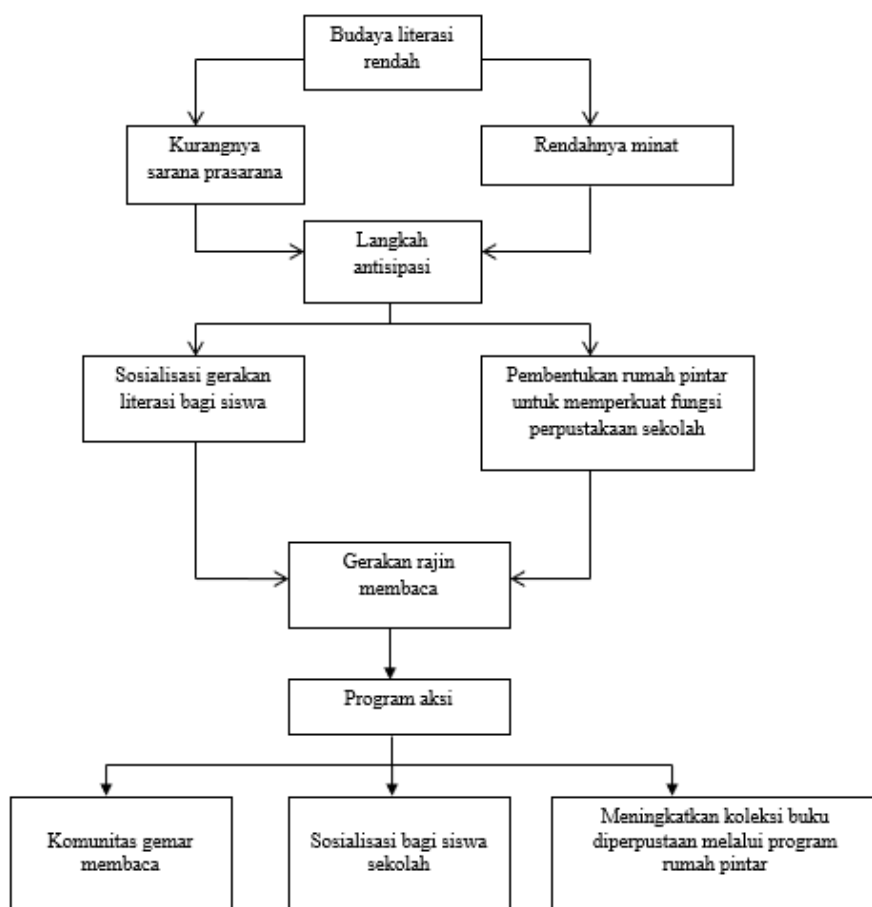
Sebenarnya potensi wisata di Desa Sidomukti cukup besar karena di Kecamatan Bandungan hanya ada 2 destinasi wisata yaitu di Desa Bandungan sendiri dan satu lagi di Desa Bandungan. Potensi ini tidak akan dapat dioptimalkan apabila masyarakat sebagai pelaku utama tidak memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Padahal untuk bisa melakukan pengembangan potensi daerah diperlukan tidak hanya pendidikan, namun ketrampilan yang bisa didapatkan tidak hanya dari pendidikan formal namun juga pendidikan non formal.

Dengan mengacu pada rendahnya akses pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana edukasi, kurangnya media sosial edukasi, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggerakkan budaya literasi sebagai upaya untuk peningkatan *softskill* masyarakat Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan mengadopsi metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA adalah salah satu metode penelitian aksi yang dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Hudayana et al., 2019). Metode ini muncul sebagai kritik bahwa selama ini masyarakat diperlakukan sebagai obyek, bukan subyek sehingga pada PRA, masyarakat didorong untuk melakukan kegiatan menggali informasi tentang permasalahan mereka, kemudian menganalisis dan menentukan cara terbaik dalam mengatasi masalah (Wahyuni, 2012).

Tim Pengabdian dari Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unnes selaku fasilitator, pendamping atau petugas lapangan memberikan bantuan dalam menganalisis kondisi kehidupan yang meliputi potensi dan permasalahan yang ada di Desa Sidomukti. Adapun pengambilan keputusan mengenai kebutuhan yang diinginkan ada pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat difasilitasi untuk membuat rencana kegiatan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di desa/kelurahan maupun di luar lingkungannya. Hasil dari identifikasi dan kebutuhan masyarakat Desa Sidomukti dapat dibuat kerangka alur kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut



Gambar 1 Kerangka Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Literasi Jurusan Ekonomi Pembangunan Unnes

Dalam pelaksanaan PRA tim Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Ekonomi Pembangunan Unnes memperhatikan unsur-unsur utama yang terkandung dalam PRA yaitu proses belajar dengan saling tukar pengetahuan dan pengalaman dengan masyarakat desa. Tahapan pelaksanaan pengabdian diawali dari identifikasi permasalahan yang memperlihatkan rendahnya budaya literasi di Desa Sidomukti. Hal ini diperkuat dari kutipan hasil wawancara dengan penggerak Pemuda di Desa Sidomukti di awal 2019:

"Di Desa Sidomukti hanya ada 1 TK dan tiga Sekolah Dasar Negeri. Memang sudah kami akui bersama bahwa budaya literasi masyarakat masih sangat rendah., bahkan di kalangan siswa sekalipun. Oleh karena itu, kami memandang kampanye membaca dan pengembangan perpustakaan desa menjadi penting untuk mengingatkan kembali dan membudayakan membaca"

Oleh karena itu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya membudayakan gerakan literasi bagi masyarakat terutama generasi muda sebagai upaya untuk menumbuhkan keinginan dan minat untuk membaca.



Gambar 2. Sosialisasi tentang pentingnya Gerakan Literasi Desa

Pada sosialisasi tersebut disampaikan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan yakni Gerakan Literasi Desa. Gerakan Literasi Desa merupakan salah satu aktifitas penting dalam hidup masyarakat desa. Seperti diketahui bahwa sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Itulah alasan mengapa literasi perlu dilakukan sejak dini. Literasi dini menekankan segala sesuatu yang dilakukan anak berlangsung secara alamiah, seperti halnya menikmati buku tanpa dipaksa oleh orang tua dan guru (Cahyani, 2016).

Budaya literasi tidak hanya untuk siswa atau anak sekolah saja, tetapi berlaku untuk semua usia karena dengan literasi berarti melek teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar (Irianto & Lifia, 2017). Membaca dan menulis tidak harus dilakukan lama. Cukup 30 menit, tetapi rutin dilakukan setiap hari. Jenis bacaannya pun tidak harus bacaan ilmiah, dapat berupa fiksi dan nonfiksi. Bacaan fiksi seperti dongeng, legenda, biografi, sejarah, dan novel, sangat bagus diperkenalkan kepada sejak dini kepada generasi muda. Ini perlu dilakukan karena penting bagi perkembangan awal anak sebagai pondasi dasar pengembangan kemampuan fisik, kecerdasan dan pembentukan karakter serta kepribadian anak dalam berinteraksi dan bersosialisasi serta memahami hal-hal baru di luar (Riady, 2013). Disinilah

pentingnya peran orang tua untuk mendampingi proses literasi tersebut (Aulinda, 2020); (Cahyani, 2016); (Shohibah, 2017). Harapannya mereka akan mencoba, meniru maupun mengadopsi perilaku positif serta menghindari hal-hal negatif yang dilihatnya dalam aktivitas sehari-hari, intinya sebagai salah satu dari bagian yang hidup di keluarga, masyarakat dan lingkungan



Gambar 3. Interaksi tim pengabdian dengan masyarakat

Sementara untuk bacaan nonfiksi contohnya; berita- berita, ilmiah populer, ilmiah. Untuk yang tingkat pendidikan lanjut jenis bacaanya dapat ditambahkan yang bersifat substansi seperti ekonomi, budaya, teknologi, sains, sosial, alam, politik, bisnis, dan sebagainya.

Pada saat kegiatan berlangsung ada pertanyaan yang kritis terkait dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya budaya literasi di Desa Sidomukti. Mereka beranggapan bahwa dengan bisa membaca dan menulis saja sudah cukup, kenapa harus membaca setiap hari. Pemahaman tersebut tidak tepat karena dengan membiasakan budaya membaca setiap 30 menit per hari maka seseorang akan menjadi sosok yang “melek buku, melek kearifan lokal, melek kesantunan dan yang terpenting adalah melek keilmiahan”. Apabila itu semua tercapai maka kita akan menjadi sosok yang bijak terhadap berita tidak benar, bangkit untuk bekerja dan berkarya, bangkit untuk tidak miskin (miskin budi pekerti, miskin ilmu, miskin ibadah, dan miskin harta) serta bangkit untuk berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif karena dengan membaca seseorang akan menjadi terbuka cakrawala berpikir dan cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Dengan kata lain dengan budaya literasi maka

generasi muda akan menjadi cerdas, dapat memiliki wawasan yang luas, mampu bersikap analitis, kritis dan logis (Aulinda, 2020).

Berdasarkan identifikasi PRA juga disepakati untuk pembentukan Rumah Pintar melalui perpustakaan desa. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNNES bersama dengan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan pengembangan budaya literasi di Desa Sidomukti dengan membuat Rumah Pintar.



Gambar 4. Pembentukan Rumah Pintar serta penyerahan buku- buku untuk perpustakaan desa kepada Kepala Kesa Sidomukti

Pada sesi ini sebagai salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat Desa Sidomukti, Kepala Desa Sidomukti selaku perwakilan dari pemerintah desa adalah menyediakan 1 ruangan khusus yang digunakan untuk pengembangan perpustakaan desa. Setelah dilakukan sosialisasi dilanjutkan penyerahan buku dan rak sebagai bagian dan upaya mewujudkan Rumah Pintar di Desa Sidomukti.



Gambar 5 Kebersamaan di akhir acara antara tim pengabdian bersama masyarakat di Desa Sidomukti

Rangkaian kegiatan membudayakan literasi di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan diakhiri dengan pemahaman bahwa janganlah memiliki keyakinan bahwa membaca itu adalah sebuah kewajiban, namun jadikan membaca sebagai sebuah kebutuhan. Bukan kebutuhan untuk menjadi sempurna, namun menjadi lebih baik dengan tambahan pengetahuan yang selalu ter *up date*. Partisipasi masyarakat di dalam menggiatkan budaya literasi tersebut dapat dipahami sebagai kesadaran akan pentingnya kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Penguasaan literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan (Irianto & Lifia, 2017) dan memiliki wawasan yang luas, serta bersikap analitis, kritis dan logis dalam mensikapi perkembangan jaman (Aulinda, 2020).

PENUTUP

Pendidikan dasar adalah wahana pertama bagi anak-anak untuk memulai proses pembelajaran. Namun, banyak fakta menunjukkan bahwa daerah-daerah terpencil di pelosok bumi pertiwi belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Keterbatasan sarana dan prasaran ini sebenarnya tidak hanya disebabkan karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah. Terpencilnya lokasi dan lemahnya jaringan infrastruktur fisik dianggap menjadi salah satu kendala utama.

Namun hal itu dapat dipupus oleh masyarakat di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang memiliki keinginan untuk mengembangkan budaya literasi serta menghidupkan Rumah Pintar. Dengan mengingat peranan perpustakaan di dalam pendidikan amatlah penting, maka masyarakat Desa Sidomukti yang diwakili oleh perangkat desa setempat menyediakan 1 ruangan tersendiri untuk perpustakaan desa. Harapannya dapat memudahkan masyarakat setempat untuk mengakses buku- buku. Dengan demikian melalui budaya literasi, masyarakat akan menjadi komunitas yang “melek” segala hal sehingga dapat menggali potensi diri dan potensi sosial lingkungannya serta meningkatkan kreatifitas dan inovasi diri dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2021). Peran Orang Tua dalam Pengembangan Literasi Awal Anak Usia Dini di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. In *UIN Jambi*. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Aulinda, I. F. (2020). Menanamkan Budaya Literasi Pada Anak Usia Dini di Era Digital. *Tematik, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 88–93.
- BPS, K. S. (2020). *Kecamatan Bandungan Dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten

Semarang.

- Cahyani, I. R. (2016). Peran Orang Tua dan Guru dalam Mengembangkan Literasi Dini (Early Literacy) di Kabupaten Sidoarjo. *Libri-Net*, 5(3), 68–70.
- Hasanah, U., Edwita, & Januar, A. (2019). Literasi Matematika, Gaya Kognitif Dengan High Order Thingking Skill□: Studi Korelasional Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(2), 11–23.
- Hudayana, B., Kutanegara, P. M., Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M. D. F., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2(2), 3.
<https://doi.org/10.22146/bb.50890>
- Irianto, P. O., & Lifia, Y. F. (2017). Pentingnya Penguasaan Literasi bagi Generasi Muda dalam Menghadapi Mea. *The 1st Education and Language International Conference Proceedings Center for International Language Development of Unissula*, 640–647.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/view/1282>
- Nuraeni, A. (2016). *Peran Orang Tua dalam Pengembangan Literasi Dini Anak Kelompok B di Gugus 7 Mangunan, Kecamatan Dlingo, Bantul* (Issue April). UNY Yogyakarta.
- Riady, Y. (2013). Literasi Informasi Sejak Dini: Pengetahuan Baru Bagi Anak Usia Dini. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 8(2), 159–165.
<https://doi.org/10.21009/jiv.0802.10>
- Shohibah, R. (2017). Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan Budaya Literasi Pada Anak Usia Sekolah Dasar. *The 1st International Conference on Language, Literature and Teaching*, 03(2), 528–522.
- Syofyan, H., & Amir, T. L. (2019). Penerapan Literasi Sains dalam Pembelajaran IPA untuk Calon Guru SD. *Journal Pendidikan Dasar*, 10(2), 35–43.
- Wahyuni, S. (2012). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian: perlunya implementasi “pra”, pendekatan kultural dan struktural. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 4, 1–16.

KAJIAN DAMPAK EKSTERNALITAS GALIAN LIAR TAMBANG C TERHADAP LINGKUNGAN: STUDI KASUS DESA GOMBANG, KECAMATAN BOGOREJO, KABUPATEN BLORA

**Mochamad Syaiful Anwar, Dwi Rahmayani, Rizka Yuliani,
Aristawidya Dwi Putri, Hilmy Yunus Firmansyah**

PENDAHULUAN

Pertambangan menjadi aktivitas penting dalam suatu kegiatan ekonomi sebagai penyumbang devisa negara sekaligus sebagai sarana penyerapan lapangan kerja bagi masyarakat (Apriyanto, 2012). Tidak ayal, aktivitas pertambangan menjadi suatu motor penggerak pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Banyak negara berlomba memacu pertumbuhan ekonomi dengan melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Pranadji (2005) memandang bahwa terjadi dua masalah besar dalam “kedok proses pembangunan”. *Pertama*, aktivitas berporos pertumbuhan ekonomi memacu kerusakan atau penghancuran sumberdaya alam dan lingkungan. Serta *kedua*, bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi menjadikan pemiskinan pada masyarakat agraris.

Pembangunan berkelanjutan menjadi arah baru dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pembangunan berkelanjutan tidak hanya aspek sosial ekonomi semata tetapi juga memandang aspek lingkungan turut memberikan kontribusi dalam keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pembangunan dikatakan memberikan manfaat jika dalam prosesnya memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan (Rosana, 2018).

Kabupaten Blora yang terletak dalam gugus Pegunungan Kendeng Utara banyak menyimpan potensi tambang, salah satunya pada jenis Galian C. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 membagi bahan galian menjadi 3 bagian: A (galian strategis), B (galian vital), dan C (galian yang tidak termasuk A dan B). Galian C mencakup banyak hal seperti pasir, marmer, kaolin, grafit, tanah, batu pasir (tanah timbun), serta masih banyak lainnya. Tanah merah dan tanah urug menjadi salah satu bagian penting dalam pembuatan batu bata, genteng, hingga campuran bahan bangunan. Potensinya di Kabupaten Blora sangatlah besar, terdapat 9.741 Ha luas pertambangan

tanah lempung serta memiliki potensi sebesar 25.975.000 M³ serta pada tanah urug luas tambang mencapai 650 Ha serta potensinya sebesar 69.000.000 M³ (Alfiyah, 2014). Pada Kecamatan Bogorejo, wilayah ini sangat kaya akan sumber galian C yang mampu dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan skala ekonominya. Berdasarkan penelitian dari Widiarso et, al. (2017) menyatakan bahwa wilayah Bogorejo menjadi wilayah strategis dengan 4 batuan penyusun: batuan lempung, batu gamping, batu pasir kuarsa, serta kristalin.

Atas dasar tingginya potensi pertambangan terutama pada galian C serta manfaatnya yang tinggi dalam berbagai kebutuhan industri dan pembangunan menyebabkan banyak muncul pertambangan ilegal. Salah satunya yang terletak di Desa Gombang, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. Tidak adanya perda yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, menyebabkan wilayah Blora menjadi surga bagi penambang liar (Alifiyah, 2014). Pola aktivitas pertambangan tanah lempung di Kecamatan Bogorejo nampak begitu kontras dengan pola lahan pertanian atau lahan pemukiman penduduk di sekitarnya. Hal ini mampu diamati pada citra satelit melalui Google Maps pada koordinat -6.947880,111.491845, pola pertambangan tanah lempung mampu diamati pada Gambar 1, dimana tanah pertambangan memiliki corak putih tulang serta struktur tanah yang tidak rata akibat aktivitas galian.



Sumber: Google Maps, 2021

Gambar 1 Pola Citra Satelit Wilayah Tambang Tanah Lempung pada Koordinat 6.947880,111.491845

Adanya UU Minerba No. 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka seharusnya segala aktivitas ekonomi perlu memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutannya.

PEMBAHASAN

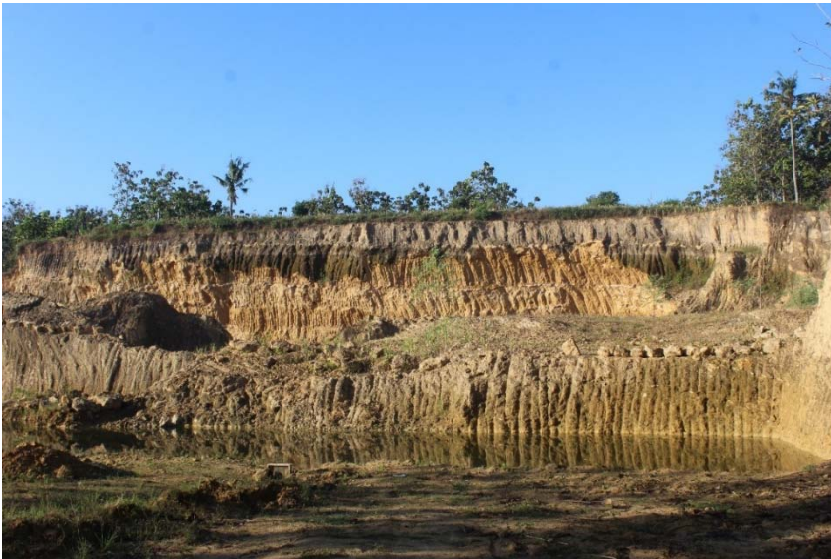
Desa Gombang merupakan salah satu desa di Kabupaten Blora yang berada pada ketinggian tanah setinggi 111 mdpl dengan luas wilayah 2.17 km². Mulanya mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Akan tetapi semenjak adanya penambangan lahan pertanian ikut terkeruk, dan beralih bekerja di penambangan. Sayangnya aktivitas penambangan tanah merah di Gombang ini masih bersifat ilegal dan memberikan banyak dampak negatif terhadap lingkungan.

1. Dampak terhadap Bentuk Morfologi Tanah

Pertambangan tanah merah atau tanah lempung di Desa Gombang telah memberikan dampak yang serius terhadap bentuk morfologi tanah. Galian-galian yang masif terus dilakukan memberikan corak terhadap bentuk tanah. Hal yang paling dikhawatirkan adanya pola pertambangan ini adalah terjadinya longsor yang berbahaya bagi penduduk dan pekerja yang ada di sekitar lokasi. Lokasi pertambangan merupakan lokasi strategis bagi para petani, peternak, dan warga dalam menjalankan aktivitasnya. Pertanian sendiri memiliki fungsi strategis berkaitan dengan tanah diantaranya sebagai pengendali erosi, penambat karbon, pemelihara sumber daya hayati, dan mitigasi banjir (Agus dan Hussen, 2005).

Bekas penambangan yang tidak teratur menyebabkan rusaknya lapisan tanah dan komposisi tanah. Menurut Alamprabu (2007) penambangan yang demikian selain merusak tata air, terkeruknya lapisan *top soil* yang subur dan menyisakan lapisan bawahnya yang kurang subur sehingga menjadikan lahan pertanian tersebut tidak produktif.

Gambar 2 di bawah menunjukkan bahwa bekas galian tanah merah dibiarkan begitu saja tanpa tindak lanjut. Lubang-lubang yang cukup dalam serta tidak adanya papan peringatan pada aktivitas penambangan liar menyebabkan area ini berbahaya untuk dimasuki oleh warga sekitar. Selain itu genangan-genangan air yang ada berpotensi menjadi sarang nyamuk terutama saat musim hujan volume air yang semakin meningkat. Dampak adanya pertambangan ilegal lainnya mampu diamati pada bekas lahan galian yang juga terletak tidak jauh dari lokasi tambang ini.



Sumber: Data Primer, 2021

Gambar 2 Struktur Morfologi Tanah Galian Tambang



Sumber: Data Primer, 2021

Gambar 2 Bekas Lahan Galian

Gambar 2 di atas merupakan penampakan tebing bekas galian yang sangat rawan longsor. Teknik pemotongan tebing secara vertikal memicu terjadinya kerusakan tanah dan ketidakstabilan lereng yang menyebabkan terjadinya longsor. Keadaan tersebut sangat membahayakan penambang maupun petani atau masyarakat yang berada di sekitar penambangan.

2. Dampak terhadap Polusi Udara

Hadirnya aktivitas pertambangan liar turut mempengaruhi polusi udara sekitar Desa Gombang. Aktivitas pengangkutan hasil tambang dengan kendaraan-kendaraan besar turut meningkatkan adanya polusi udara yang ditimbulkan dari jenis karbon CO² (pembakaran bahan bakar kendaraan) maupun yang berupa partikel. Jenis partikel menjadi salah satu pencemar udara akibat dari aktivitas manusia, seperti debu yang dibawa angin akibat aktivitas ekonomi (Prabowo & Muslim, 2014).

Gambar 4 di atas menunjukkan bagaimana kendaraan besar meningkatkan polusi lingkungan di Desa Gombang. Polusi udara memberikan dampak yang berbahaya bagi tubuh manusia. Mukono (2019) membagi efek dari polusi udara menjadi dua, yaitu efek akut dan efek kronis. Efek akut mampu diamati seperti: alergen, asma, mengi, serta penyakit pernapasan lainnya. Sedangkan efek kronis menjadi berbahaya terkhusus bagi balita dan lansia karena efeknya mampu menyebabkan kematian seperti perlambatan pertumbuhan serta penyakit yang berhubungan dengan paru.



Sumber: Data Primer, 2021

Gambar 4 Polusi Udara berupa Partikel dan Karbon yang dibawa Proses Pengangkutan

3. Dampak terhadap Flora dan Fauna

Flora dan fauna sebagai penyeimbang ekosistem hakikatnya perlu untuk dilestarikan sebagai bagian dari kampanye hijau. Aktivitas pertambangan tidak hanya berakibat pada kesehatan manusia saja, tetapi juga kesehatan tumbuhan dan hewan.



Sumber: Data Primer, 2021

Gambar 5 Tertutupinya Permukaan Daun Akibat Aktivitas Pertambangan

Budiyono (2001) menjelaskan bahwa adanya aktivitas pencemar udara menyebabkan terganggunya sistem kesehatan pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan terdapat dua efek, yaitu secara primer dan sekunder. Gangguan secara primer mencakup adanya pencemar udara baik gas dan partikel menyebabkan permukaan daun tertutupi yang menghalangi defusi gas masuk ke dalamnya. Sedangkan pada gangguan sekunder, adanya polutan menyebabkan terhalangnya proses alterasi yang menghalangi masuk ke tanah. Sedangkan pada fauna, hampir sama seperti akibat pada manusia, adanya pencemar udara akan menyebabkan penyakit pernapasan pada hewan. Maka, jika kondisi ini terus terjadi akan menyebabkan matinya atau punahnya flora dan fauna sekitar tambang. Di lokasi penelitian juga ditemui bahwa daerah yang dulunya merupakan lahan pertanian, hutan jati, dan perkebunan kini semakin berkurang akibat alih fungsi menjadi penambangan tanah merah.

4. Dampak terhadap Rusaknya Infrastruktur

Kerusakan infrastuktur yang paling nampak adalah kerusakan jalan yang dilalui kendaraan besar pengangkut hasil tambang yang semakin meningkat. Akibat lalu lintas kendaran besar yang bermuatan *overload* menyebabkan kerusakan jalan seperti yang ditunjukkan gambar di atas. Truk-truk pengangkut tanah yang melewati jalan desa menimbulkan berbagai lubang yang ketika hujan terisi oleh air. Sementara dari pihak pertambangan tidak menghiraukan adanya kondisi tersebut. Warga desalah yang menanggung akibat kerusakan tersebut mengingat jalanan tersebut sebagai akses utama. Tentunya akan sangat mengganggu mobilitas masyarakat yang melintas.



Sumber: Data Primer, 2021

Gambar 6. Kerusakan Jalan

Sejauh ini penambangan tanah merah masih terjadi di Desa Gombang, dan warga tidak banyak melakukan aksi atas apa yang terjadi terhadap lingkungan mereka. Hal tersebut karena penambangan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat sekitar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan di antaranya terjadinya perubahan kondisi fisik lingkungan hidup di daerah penambangan Desa Gombang. Selain kondisi fisik, perubahan kimia dan hayati juga terjadi yang terlihat dari morfologi, komposisi dan kualitas tanah dan

vegetasi di Desa Gombang. Polusi udara dan kerusakan infrastruktur seperti jalan juga meningkat akibat aktivitas dan mobilisasi penambangan. Dari eskternalitas negatif yang dipaparkan di atas akibat penambangan ilegal belum mendapatkan perhatian dari masyarakat maupun pemerintah sekitar. Hal tersebut terjadi karena masyarakat. oleh sebab itu penulis menyarankan pentingnya kajian mengenai suatu proyek seperti adanya penambangan ini. Pemerintah juga hendaknya bertindak tegas dan melakukan negosiasi dengan pihak pertambangan. Sedangkan upaya pemulihan kualitas lingkungan dapat dilakukan dengan rehabilitasi, remediasi, restorasi lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F., & Husen, E. (2005, October). Tinjauan umum multifungsi pertanian. In *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Pertanian dan Ketahanan Pangan. Bogor* (Vol. 12, pp. 1-16).
- Alamprabu, D. (2007). Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Dengan Pertanian Organik. *Direktorat perlindungan perkebunan*.
- Alifiyah, U. (2014). Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Blora). *Skripsi*, Universitas Brawijaya.
- Apriyanto, D. (2012). Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Bara terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai Kartanegara, 1(3), 289-298.
- Besley, T. J., & Rosen, H. S. (1998). Vertical externalities in tax setting: evidence from gasoline and cigarettes. *Journal of Public Economics*, 70(3), 383-398.
- Fisher, R.C. (1996). *State and Local Public Finance*. NewYork: Irwin
- Pranadji, Tri. (2005). Kesenakahan, Kemiskinan, dan Kerusakan Lingkungan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 3(4), 313-325.
- Rosana, Mira. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 148-163.

DAMPAK SAMPAH PADA HASIL TANGKAPAN NELAYAN (STUDI KASUS NELAYAN JARING ARAD PANTAI PENGARADAN, BANTEN)

Hastarini Dwi Atmanti, Evi Yulia Purwanti

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan luas perairannya yang lebih besar dari daratannya yaitu sebesar 6.400.000 km². Perairan di Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan pesisir dan laut Indonesia akan berjalan dengan baik, manakala tidak terkendala dengan pencemaran lingkungan. Menurut Jambeck et al. (2015) laut di Indonesia penuh dengan sampah plastik. Indonesia menduduki peringkat kedua sampah plastik yang dibuang ke laut.

Sampah yang dibuang ke laut akan merusak pemandangan laut dan mengganggu ekosistem laut (Gall & Thompson, 2015). Sampah yang mengotori laut berasal dari aktivitas manusia di darat. Hal ini sesuai pendapat Sheavly and Register (2007) bahwa polusi di perairan didominasi oleh kegiatan di darat. Sampah tersebut kemudian tidak di kelola dengan baik. Menurut BPS (2015) bahwa rumah tangga yang membuang sampahnya ke got/saluran air/laut sekitar 8,1%.

Sampah yang dibuang ke saluran air akan bermuara ke laut, dan mayoritas adalah sampah plastik (Agamuthu et al., 2019). Sampah yang masuk ke lautan akan berpeluang menjadi pencemar biota laut (Naidoo & Rajkaran, 2020). Khusus untuk sampah plastik yang mudah terfragmentasi akan menjadi partikel plastik dan dikonsumsi oleh biota laut (Engler, 2012). Bahkan pada 9 November 2018, ikan paus sperma di Wakatobi ditemukan mati penuh dengan sampah. Menurut Ocean Conservancy, bahwa 28% ikan di Indonesia mengandung plastik. Selain itu, 26 bagian per 100 m² lautan Indonesia, terumbu karangnya rusak oleh sampah plastik (Prasetiawan, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Georgia terhadap 192 negara yang memiliki garis pantai, menyebutkan bahwa sebanyak 2,5 miliar metrik ton sampah di hasilkan oleh negara tersebut. Sampah sebanyak itu, sebanyak 10% nya merupakan sampah plastik. Dari 10% sampah tersebut, 8 juta metrik

tonnya telah mencemari laut (Jambeck et al., 2015). Satu diantara 192 negara yang diteliti, adalah Indonesia.

Adanya sampah menyebabkan biota laut berkurang, sehingga dapat menyebabkan pendapatan nelayan menurun. Sampah mengganggu aktivitas penangkapan ikan. Selain biota laut berkurang, sampah dapat merusak alat tangkap (Abalansa et al., 2020). Keberadaan sampah di laut menimbulkan biaya. Biaya tersebut antara lain biaya untuk perbaikan alat tangkap jika alat tangkapnya rusak karena sampah, biaya perbekalan menjadi naik, karena nelayan akan mencari ikan pada area yang bersih dari sampah dan area tersebut jauh. Biaya ini menyebabkan pendapatan nelayan menurun (Waileruny et al., 2021).

Salah satu pantai di Indonesia dengan kondisi yang penuh sampah adalah Pantai Mengarad, Kab. Anyer, Jawa Barat. Sampah akan menyebabkan tangkapan nelayan berkurang. Ikan serta biota laut seperti terumbu karang ada yang mati karena tercemar sampah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis mengkaji dampak sampah terhadap pendapatan nelayan jaring arad di Pantai Pengaradan, Kab. Anyer, Jawa Barat.

PEMBAHASAN

Sampah

Sampah menurut UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis sampah berdasarkan sifatnya adalah:

1. Sampah organik yaitu sampah yang mudah diurai dan dapat dijadikan kompos seperti sampah sisa makanan, sampah dari daun kering, sampah buah dan sayur.
2. Sampah anorganik yaitu sampah yang sulit membusuk dan tidak mudah diurai, seperti sampah plastik, sampah kaca, dan lain-lain.

Sampah Laut

Menurut Peraturan Presiden No. 83 /2018 tentang Penanganan Sampah Laut, Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Sampah plastik ini merupakan komponen terbesar sampah laut (*marine debris*).

Jenis Sampah Laut

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, jenis sampah laut terdiri dari:

1. Plastik.
2. Kaleng dan logam.
3. Beling termasuk botol, bolam lampu.
4. Kayu termasuk ranting pohon, papan kayu.
5. Kertas dan kardus.
6. Karet termasuk ban bekas, balon, sarung tangan.
7. Kain

Ukuran Sampah Laut

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, ukuran sampah laut adalah:

1. Mega-debris adalah sampah yang panjangnya lebih dari 1 m, biasanya ditemukan di laut lepas.
2. Macro-debris adalah ampah yang ukurannya antara $>2,5$ cm - < 1 m, biasanya ditemukan di dasar laut atau di permukaan laut.
3. Meso-debris adalah sampah yang ukurannya antara >5 mm - $< 2,5$ cm, biasanya ditemukan di permukaan laut bahkan ada yang tercampur dengan endapan lumpur.
4. Micro-debris, adalah sampah dengan ukuran yang kecil yaitu antara 0,33 cm - 5 mm. Sampah yang dengan ukuran kecil akan mudah hanyut terbawa oleh arus, sehingga dapat dengan mudah masuk ke organ tubuh biota laut.
5. Nano-debris, adalah jenis sampah laut yang ukurannya sangat kecil dibawah Micro-debris. Sampah jenis ini membahayakan biota laut. Biota laut dapat tercemar oleh sampah jenis micro debis maupun nano debris (Naidoo & Rajkaran, 2020).

Jaring Arad (Pukat Pantai)

Alat tangkap ikan dengan bentuk bersayap dan berkantong serta salah satu ujungnya diikat di pantai. Alat tangkap ini ditebarkan oleh nelayan dengan menggunakan perahu. Setelah jaring ditebarkan dengan melingkar, perahu kembali ke pantai. Saat hasil sudah terjaring, maka jaring ini akan ditarik beramai-ramai ke daratan (Sudirman & Mallawa, 2004).

Metode

Studi ini menggunakan analisis kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi atau mengungkap suatu kejadian atau fenomena sosial yang terkait dengan aktivitas ataupun peristiwa tertentu (Creswell & Poth, 2016).

Penelitian ini bersifat studi kasus yaitu penelitian yang mendalam tentang pada suatu kasus yang terjadi dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh deskripsi yang menyeluruh dan mendalam. Penelitian ini berusaha menggali informasi dari nelayan jaring arad di Pantai Pengaradan, Kab. Anjer, Jawa Barat. Nelayan yang dipilih untuk informan adalah nelayan yang sudah berpengalaman menjadi nelayan jaring arad lebih dari 10 tahun. Wawancara dilakukan pada bulan Februari 2021. Nelayan jaring arad adalah nelayan yang menebar jaring arad atau pukat pantai.

Hasil Wawancara

Sampah banyak dijumpai di Pantai Pengaradan. Menurut informan, sampah banyak dijumpai mulai dari garis pantai hingga ke tengah laut. Nelayan yang diwawancara ini menyatakan bahwa berdasarkan pengalamannya, sampah yang dijumpai semakin banyak. Sampah yang dijumpai mayoritas sampah plastik (Lambert et al., 2020), meskipun terkadang ada sampah lain seperti pecahan botol yang berbahan kaca atau beling, kayu, ranting, kain. Sampah padat banyak yang berakhir di laut (Jambeck et al., 2015; Mensah, 2021).

Informan menyatakan bahwa selama menjadi nelayan sekitar 20-30 tahun, sampah menumpuk di sekitar pantai, seperti tersaji pada Gambar 1. Sampah tersebut akan terbawa sampai ke tengah laut saat gelombang tinggi, saat air pasang ataupun saat musim penghujan tiba. Sampah bertebaran di laut dan terkadang ikut terjaring bersama tangkapan ikan, seperti pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 1. Sampah di Pinggir Pantai yang Berpotensi Terbawa Arus ke Tengah Laut

Hal ini menunjukkan bahwa kurang pedulinya masyarakat terhadap sampah. Laut masih dianggap sebagai tempat untuk membuang sampah. Masyarakat tidak mengelola sampah lebih lanjut, terutama masyarakat di negara berkembang (Ferronato & Torretta, 2019). Masyarakat yang membuang sampah ke laut tidak memedulikan keberlanjutan ekosistem laut.



Gambar 2. Sampah Plastik yang Ikut Terjaring



Gambar 3. Sampah Pecahan Botol Beling Ikut Terjaring



Gambar 4. Sampah yang Kadang Ikut Terjaring Diletakkan Sembarangan

Sampah yang ikut terjaring, dibuang begitu saja oleh nelayan seperti tersaji pada Gambar 4. Sampah yang terjaring dan kemudian dibuang sembarangan juga berpotensi untuk menambah tumpukan sampah di sekitar pantai. Sampah inipun juga dapat terbawa arus kembali ke laut.

Biasanya nelayan jaring arad beraktivitas menangkap ikan sebanyak tiga kali dalam seminggu. Nelayan menebar jaring dengan perahu yang biasanya berisi 1-2 orang nelayan (Gambar 5).



Gambar 5. Jenis Perahu yang Sering Digunakan Nelayan

Nelayan jaring arad akan menebar jaring sekitar jam 16.00 WIB, kemudian jaring (arad) ditebarkan dengan ujung talinya terikat di pantai kemudian ditunggu sekitar satu jam untuk ditarik. Jarak nelayan untuk menebar jaring adalah sekitar 200 – 300 meter dari garis pantai. Jika jaring ini sudah terisi ikan, maka secara beramai-ramai nelayan dan dibantu oleh buruh nelayan untuk menarik jaringnya ke daratan. Banyak sedikitnya buruh nelayan yang membantu menarik jaring tergantung pada banyak dan sedikitnya hasil tangkapan ikan yang terjaring.

Dalam satu tahun, waktu efektif untuk melaut hanya sekitar 6 bulan saja, mengingat mereka adalah nelayan tangkap yang aktivitasnya tergantung pada kondisi cuaca. Ada bulan-bulan tertentu di mana nelayan sangat berhati-hari saat akan menebar jaring yaitu pada bulan September-Februari. Pada bulan-bulan tersebut, gelombang laut cukup tinggi dan angin kencang. Nelayan sangat memperhatikan cuaca demi keamanan dan keselamatan mereka.

Tangkapan ikan yang diperoleh saat cuaca bersahabat kurang lebih sebanyak 100 kg. Sedangkan hasil tangkapan ikan yang dipeoleh saat cuaca buruk sekitar 10-20 kg. Hasil tangkapan tersebut dibagi rata setiap nelayan yang ikut melaut dan buruh nelayan. Jenis ikan yang ditangkap bermacam-macam. Jenis ikan laut yang sering diperoleh saat menjaring ikan adalah ikan tongkol, ikan teri, ikan kerapu hitam, ikan kuning, ikan layur, ikan kapasan, ikan kuwe seperti tersaji pada Gambar 6.



Gambar 6. Hasil Tangkapan Ikan Nelayan jaring arad

Namun saat ini, tangkapan ikan tidak menentu. Salah satu penyebabnya adalah adanya limbah dan sampah yang dibuang ke laut. Hal ini seperti dikemukakan oleh Apriliani et al. (2019), bahwa terdapat sampah sebagai tangkapan sampingan selain ikan. Nelayan menemui adanya ikan yang mati. Ikan mati yang ditemui di dekat pantai disebabkan oleh tercemarnya air laut

oleh limbah cair. Sedangkan ikan mati yang ditemui nelayan di tengah laut adalah karena terdapat ikan yang memakan sampah, biasanya sampah plastik. Di samping itu, ekosistem laut menjadi rusak karena sampah-sampah tersebut. Biota laut mati, sehingga ekosistem laut menjadi tidak seimbang.

Nelayan menemui biota laut yang berada di antara tumpukan sampah. Ada yang mampu bertahan hidup, namun ada pula yang rusak karena sampah. Sampah plastik ini yang biasanya mendominasi. Terumbu karang rusak salah satunya juga diakibatkan oleh sampah. Sampah plastik yang sering ditemui nelayan adalah sampah yang berasal dari botol air mineral, tas kresek, serta kemasan yang berbahan plastik. Sampah lain yang ditemui adalah kayu-kayu dari ranting pohon maupun palet kayu. Sampah tersebut dapat merusak jaring jika sampahnya terlalu banyak dan memperberat jaring saat ditarik.

Kehadiran sampah sebagai salah satu penyebab penurunan pendapatan yang diperoleh nelayan. Kondisi saat ini, pendapatan bersih yang diterima setiap nelayan saat melaut dengan cuaca baik adalah rata-rata sebesar Rp 200.000,00 dan pendapatan yang diperoleh saat melaut dengan kondisi cuaca buruk adalah rata-rata sebesar Rp 100.000,00. Pendapatan nelayan ini semakin menurun mana kala tangkapannya sedikit meskipun jaring ditebar dalam waktu yang agak lama dari biasanya. Pendapatan kotor yang diperoleh sebagian digunakan untuk membeli BBM dan perbelakannya selama melaut.

Nelayan jaring arad tidak menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan. Hasil tangkapan nelayan biasanya sudah ditunggu oleh pembeli yang menginginkan ikan segar langsung dari laut. Pembeli ada dua kriteria, ada yang membeli untuk dikonsumsi sendiri, namun ada juga pembeli yang merupakan pedagang. Ikan yang dibeli langsung dari nelayan jaring arad selain lebih segar, harganya juga lebih murah.

Saat ini karena cuaca tidak menentu dan jumlah sampah yang semakin banyak, tangkapan nelayan jaring arad pun sedikit. Terkadang nelayan hanya memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp 50.000,00. Ikan semakin jarang ditemui karena rusaknya ekosistem laut yang disebabkan oleh tumpukan sampah. Pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tangkapan laut kadang hanya memperoleh kurang dari 10 kg. Itupun beraneka jenis jangkapan laut, sehingga saat harus dijual kepada pembeli, hasil tangkapan nelayan menjadi kurang bernilai.

Pendapatan dari hasil menebar jaring arad dibagi antara nelayan dan buruh nelayan yang membantu menarik jaring. Saat hasil tangkapan banyak, maka buruh nelayan akan memperoleh upah kurang lebih sebesar Rp 50.000 dan mendapat sedikit hasil tangkapan untuk dikonsumsi bersama keluarga, tetapi jika hasil tangkapan ikan sedikit, buruh nelayan hanya mendapatkan

upah sekedar untuk membeli rokok dan tidak mendapatkan bagian ikan hasil tangkapan.

Saat ini nelayan jaring arad dan buruh nelayan melakukan kegiatan lain untuk mencukupi beban hidup yang semakin bertambah. Nelayan ini ada yang menjual ikan asin. Ikan asin diolah sendiri oleh nelayan, manakala ada ikan yang tidak laku dijual. Aktivitas lainnya yang dilakukan nelayan adalah terdapat nelayan yang menjual klomang di sekitar pantai, ada juga yang memiliki warung sederhana serta ada yang mencari pakan ternak.

PENUTUP

Sampah yang bertebaran di laut telah menyebabkan banyak kerugian. Tidak hanya merusak ekosistem laut, namun berdampak pada pendapatan nelayan. Hasil tangkap yang kurang memadai karena kehadiran sampah. Kehadiran sampah juga dapat merusak alat tangkap. Pendapatan yang diterima berkurang dan terkadang tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abalansa, S., El Mahrab, B., Vondolia, G. K., Icely, J., & Newton, A. (2020). The marine plastic litter issue: a social-economic analysis. *Sustainability*, 12(20), 8677.
- Agamuthu, P., Mehran, S., Norkhairah, A., & Norkhairiyah, A. (2019). Marine debris: A review of impacts and global initiatives. *Waste Management & Research*, 37(10), 987-1002.
- Apriliani, I. M., Nurruhwati, I., & Rizal, A. (2019). Laju tangkap unit pukot pantai di Kabupaten Pangandaran. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 3(2), 229-234.
- BPS. (2015). *Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014*. Jakarta: BPS.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*: Sage publications.
- Engler, R. E. (2012). The complex interaction between marine debris and toxic chemicals in the ocean. *Environmental science & technology*, 46(22), 12302-12315.
- Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. *International journal of environmental research and public health*, 16(6), 1060.
- Gall, S. C., & Thompson, R. C. (2015). The impact of debris on marine life. *Marine pollution bulletin*, 92(1-2), 170-179.

- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., . . . Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.
- Lambert, C., Authier, M., Dorémus, G., Laran, S., Panigada, S., Spitz, J., . . . Ridoux, V. (2020). Setting the scene for Mediterranean litterscape management: The first basin-scale quantification and mapping of floating marine debris. *Environmental Pollution*, 263, 114430.
- Mensah, J. (2021). Fisherfolk's Perception of and Attitude to Solid Waste Disposal: Implications for Health, Aquatic Resources, and Sustainable Development. *Journal of Environmental and Public Health*, 2021.
- Naidoo, T., & Rajkaran, A. (2020). Impacts of plastic debris on biota and implications for human health: A South African perspective. *South African Journal of Science*, 116(5-6), 1-8.
- Prasetiawan, T. (2018). Upaya mengatasi sampah plastik di laut. *Info Singkat*, 10(II/Mei), 13-18.
- Sheavly, S., & Register, K. (2007). Marine debris & plastics: environmental concerns, sources, impacts and solutions. *Journal of Polymers and the Environment*, 15(4), 301-305.
- Sudirman, H., & Mallawa, A. (2004). *Teknik penangkapan ikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waileruny, W., Siahainenina, S., Noiija, D., Lainsamputty, H., & Matrutty, D. (2021). *Type of capture based fisheries and its related problems faced by the fishermen in Ambon Bay*. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

PASAR JATEN PINGGIR KALI SEBAGAI POTENSI EKOWISATA DI SEMARANG

Dewi Isma Aryani

PENDAHULUAN

The Ecotourism Society (1990) merumuskan tentang pengertian ekowisata sebagai bentuk perjalanan wisata ke daerah alam (*nature*) yang bertujuan untuk konservasi dan pelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Sejak lima tahun terakhir di Indonesia, geliat ekowisata muncul ke permukaan dan cukup mampu menarik perhatian, salah satunya berupa konsep desa wisata yang cukup digemari oleh para kaum muda. Konsep wisata buatan seperti taman hiburan pun tidak lagi menjadi target tempat berlibur bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya Pasar Papringan di Dusun Ngadiprono, Desa Ngadimulyo, Kabupaten Temanggung yang dibuka pertama kali pada pertengahan tahun 2017 silam (Dewanti & Gustaman, 2021). Pasar rakyat yang diselenggarakan tiap tanggal pasaran masyarakat Jawa, Minggu Wage dan Minggu Pon ini berlokasi di kebun bambu seluas kurang lebih 1.200 meter persegi. Kesuksesan pengadaan Pasar Papringan di Temanggung tersebut menjadi salah satu tindakan inisiasi kegiatan sejenis di daerah lain, salah satunya adalah di Kota Semarang dengan nama Pasar Jaten Pinggir Kali yang diadakan di Kampung Jawi Sukorejo yang juga didukung penuh oleh Walikota Semarang, Hendar Prihadi sebagai salah satu upaya melestarikan kebudayaan Jawa di Semarang.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menginterpretasi temuan data di lapangan. Interpretasi data tersebut untuk menganalisis fenomena yang ditemukan di Kampung Jawi, tempat pelaksanaan Pasar Jaten Pinggir Kali supaya dapat diketahui lebih dalam tentang pembahasan elemen estetika/ desain yang ada di dalamnya, serta potensi-potensi apa saja yang perlu dikembangkan di masa mendatang.

PEMBAHASAN

Kampung Jawi Sukorejo berlokasi di Jalan Kalialang Lama, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Saat memasuki wilayah Kampung Jawi, pengunjung akan merasakan nuansa kebudayaan Jawa yang

cukup kental dari adanya bunyi gamelan, karawitan, *tek-tek*, dan *jathilan* dari beberapa sanggar seni. Selain suara-suara merdu dari alat musik tradisional, juga banyak dijumpai mural yang menghiasi tembok pembatas yang ada di Kampung Jawi. Menurut Walikota Semarang, transformasi Kampung Jawi di Semarang saat ini memang ditujukan bagi masyarakat yang tertarik untuk mengenal maupun belajar tentang kebudayaan Jawa lebih dalam lagi. Bahkan setiap hari Minggu diadakan pelatihan tentang *pranotocoro* yakni pembawa acara dengan menggunakan Bahasa Jawa sebagai komunikasi pengantarnya. Selain aktivitas kesenian dari kebudayaan Jawa yang rutin diadakan di Kampung Jawi, secara temporer di kampung ini juga diadakan pasar rakyat atau pasar wisata untuk umum bernama Pasar Jaten Pinggir Kali. Sesuai dengan nama acaranya, pasar ini diadakan di sebuah area yang terletak di pinggir kali atau sungai yang banyak ditumbuhi pohon jati. Oleh karena itu, jika siang hari terik tak akan terasa panas menyengat karena udara yang ada di lokasi Pasar Jaten sangat sejuk dan teduh.



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019

Gambar 1. Gapura gerbang masuk Kampung Jawi



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019

Gambar 2. Akses masuk utama Pasar Jaten di dalam wilayah Kampung Jawi



Gambar 3. Jalan utama menuju Pasar Jaten dan suasana Pasar Jaten

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019

Pada gambar 1-3 di atas tampak foto berupa gerbang masuk ke wilayah Kampung Jawi Sukorejo, gapura/ gerbang masuk lokasi Pasar Jaten, dan jalan utama yang dapat diakses oleh pengunjung saat di dalam lokasi Pasar Jaten. Pasar Jaten Pinggir Kali yang diadakan di kawasan Kampung Jawi Sukorejo, Kota Semarang memang belum sepopuler Pasar Papringan yang ada di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut tampak dari informasi berupa poster kegiatan (gambar 4) yang terkesan ala kadarnya, kurang memikirkan estetika/ desain dan menampilkan banyak tulisan atau informasi yang saling tumpang tindih (*overlapping*) sehingga besar kemungkinan menimbulkan mispersepsi bagi orang yang membacanya.



Gambar 4. Poster digital Pasar Jaten berisi informasi kegiatan

Sumber: Instagram Kampung Jawi, 2019

Tinjauan Elemen Estetika/ Desain pada Pasar Jaten

Pada bab ini akan dipaparkan lebih mendalam mengenai elemen estetika/ desain yang ada pada Pasar Jaten berupa:

A. Poster Kegiatan

Pada poster digital Pasar Jaten di atas diadakan pada Minggu Legi yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini tanggal 21 April 2019. Dari kedua poster di atas dapat diamati bahwa ada dua hal/kegiatan penting yang ingin disampaikan oleh penyelenggara yakni adanya kegiatan Pasar Jaten sekaligus peringatan Hari Kartini. Definisi poster sendiri menurut keilmuan desain komunikasi visual adalah kertas bergambar dengan tulisan/kata-kata yang memuat tentang informasi tertentu, ditempatkan di tempat umum dengan tujuan untuk dilihat dan atau dibaca banyak orang. Adapun jenis poster sendiri dapat digolongkan ke dalam dua bagian yakni berdasarkan isi dan tujuan. Pada gambar 4 di atas dari segi isi tergolong ke dalam poster kegiatan, sedangkan dari segi tujuan dapat digolongkan ke jenis poster propaganda sekaligus afirmasi karena menampilkan kalimat/kata-kata yang cenderung untuk mempengaruhi orang lain maupun mengajak kepada sesuatu hal.

Dalam keilmuan desain komunikasi visual, suatu kegiatan yang hendak diadakan sebaiknya disusun berdasarkan prinsip dan perencanaan yang matang supaya *target audience* maupun tujuan (*goal*) yang hendak dicapai dapat terwujud secara optimal. Seperti halnya di bidang periklanan modern, terdapat tahapan perencanaan yang perlu dijalankan demi kesuksesan suatu kegiatan. Bidang desain komunikasi visual mengenal dua metode yakni AIDA dan AISAS. Metode AIDA adalah singkatan dari beberapa tahapan (*Attention, Interest, Desire* dan *Action*) yang dilakukan secara bertahap (efek hierarki) untuk mempromosikan suatu produk barang maupun jasa terhadap pangsa pasar potensial. Sedangkan metode AISAS juga merupakan singkatan dari beberapa tahapan *Attention, Interest, Search, Action*, dan *Share*. Kedua metode dalam periklanan tersebut memiliki persamaan di tahapan *Attention, Interest*, dan *Action* sedangkan tahapan sisanya (*Desire, Search*, dan *Share*) terdapat beberapa perbedaan mendasar yang ditampilkan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Untuk kegiatan seperti Pasar Jaten yang merupakan agenda rutin Pemkot Semarang, sebaiknya metode yang digunakan adalah AISAS karena ada tahapan *Share* yang dapat memperluas informasi Pasar Jaten yang akan datang berdasarkan testimoni dari pengunjung yang telah datang. Dengan demikian, setiap tahapan dalam AISAS yakni *Attention, Interest, Search, Action*, dan *Share* perlu direncanakan dengan matang melalui timeline kegiatan supaya poster kegiatan yang disusun pun sesuai dengan tahapan dan juga target audience yang ada.

Tabel 1. Komparasi Metode AIDA dan AISAS

No	Metode		Keterangan
	AIDA	AISAS	
1	<i>Attention</i>	<i>Attention</i>	Tahapan paling awal yakni untuk menarik perhatian target <i>audience</i> . Dalam AIDA, tahap ini dilakukan melalui kegiatan komunikasi <i>marketing</i> dan <i>public relation</i> secara langsung. Sedangkan dalam AISAS, tahap ini hampir sama dengan AIDA hanya saja ditambah dengan media lain yakni <i>website</i> maupun media <i>online</i> berbasis internet lainnya.
2	<i>Interest</i>	<i>Interest</i>	Tahapan saat target <i>audience</i> tertarik dengan produk/jasa yang ditawarkan. Dalam AIDA, tahap ini dapat berupa komunikasi atau respon dari calon konsumen dengan penyedia barang/jasa. Sedangkan dalam AISAS diperlihatkan melalui intensitas kunjungan calon konsumen ke <i>website</i> maupun aktivitas <i>online</i> lainnya (email, Whatsapp, <i>private message</i> media sosial, dan sebagainya).
3	<i>Desire</i>	<i>Search</i>	Pada tahap ke-3 ini dapat dianggap sebagai kegiatan yang sama yakni target <i>audience</i> memiliki keinginan lebih untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai media sebelum akhirnya mengambil keputusan. Dapat disimpulkan bahwa dalam AIDA, respons calon konsumen cenderung linear tahapannya. Sedangkan AISAS, variabelnya cenderung bebas/ tidak linear.
4	<i>Action</i>	<i>Action</i>	Tahapan ini merupakan tindakan nyata dari <i>real experience</i> calon konsumen menjadi konsumen, terjadi proses transaksi, konsumsi, hingga pascatransaksi antara penyedia barang/jasa dengan konsumen. Di tahap ini, AIDA dianggap telah selesai, konsumen akan melanjutkan transaksi kembali maupun tidak, sudah berada di luar kapasitas pengaruh metode ini. Sedangkan AISAS, tahap ini belum tahapan akhir karena masih melibatkan sisi emosional/keterikatan konsumen untuk terus berinteraksi. (pascatransaksi).
5		<i>Share</i>	Tahapan ini adalah tahap terakhir AISAS berupa penilaian konsumen terhadap pengalaman yang diperoleh terhadap produk/jasa, kesediaan/keikhlasan konsumen untuk memberikan testimony/penilaian dan menjadi <i>audience marketer</i> melalui teknik WoM (<i>word of mouth</i>) kepada orang lain.

B. Signage atau Wayfinding

Yang dimaksud dengan *signage* atau *wayfinding* adalah rambu atau tanda penunjuk yang biasanya bertujuan menyampaikan suatu informasi. Rambu penunjuk biasanya dapat ditemukan di ruang publik seperti taman, jalan raya, terminal, tempat perbelanjaan, dan sebagainya. *Signage* atau *wayfinding*

sendiri memiliki dua fungsi utama yakni promosional dan instruksional. Fungsi promosional digunakan untuk mempromosikan produk/ jasa tertentu. Fungsi instruksional digunakan untuk mengarahkan atau menunjukkan arah maupun menginformasikan adanya bahaya. Sedangkan *signage* yang bersifat *custom* biasanya dirancang khusus untuk kegiatan maupun menyampaikan layanan promosi tertentu. Pada Pasar Jaten, *signage* atau *wayfinding* yang digunakan adalah jenis *custom* karena ada dua fungsi yang disasar sekaligus yakni promosional dan instruksional. Selain itu, *signage custom* ini diasumsikan lebih dikenal oleh *target audience* karena lokasi Pasar Jaten yang berada di luar ruangan (*outdoor*), serta memiliki kesempatan sebagai *event branding*.

Signage yang ditemukan pada Pasar Jaten dapat dilihat pada gambar 2 yakni tulisan petunjuk informasi di bagian gapura atau gerbang masuk Pasar Jaten. Selain papan informasi bertuliskan “Pasar Jaten Pinggir Kali” berwarna merah di atas papan kayu, gapura masuk Pasar Jaten pun termasuk ke dalam *signage* promosional. Gapura Pasar Jaten tersebut dibuat dengan material bambu dan daun kelapa yang dikeringkan serta bersifat temporer/ non-permanen. Hal tersebut dimaksudkan bahwa fungsi gapura memang disesuaikan dengan pengadaan kegiatan Pasar Jaten saja, dan apabila telah selesai atau tidak digunakan lagi maka gapura dapat dibongkar. Lokasi pengadaan Pasar Jaten sendiri terletak di pinggir sungai di dalam kawasan Kampung Jawi (seperti terlihat pada gambar 5 dan 6). Lokasi tersebut merupakan area yang cukup luas dan seringkali digunakan untuk acara-acara rakyat lain seperti peringatan kemerdekaan RI pada 17 Agustus, peringatan maupun acara-acara keagamaan, dan lain sebagainya. Area tersebut juga di sekelilingnya ditumbuhi pohon jati sehingga memberikan suasana yang rindang dan sejuk, dan hal tersebut pulalah yang menjadi dasar dari penamaan pasar rakyat di Kampung Jawi yakni Pasar Jaten. Walaupun pohon jati identik sebagai tanaman khas dijumpai di hutan yang ada di daerah Jawa Tengah karena manfaatnya sebagai bahan baku utama usaha mebel menggunakan kayu dari batang pohonnya. Sebagaimana telah diketahui, kayu yang dihasilkan pohon jati memiliki kualitas tinggi dan memiliki daya ketahanan/kekuatan sangat baik. Selain diambil kayunya, ternyata bagian daun dari pohon jati juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Kampung Jawi yakni sebagai obat herbal seperti mengurangi penyakit asma, cacingan, diuretik dan laksatif, serta penyembuhan luka luar. Selain untuk obat herbal, daun jati juga dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan, pengganti daun pisang, karena daun jati yang sudah tua berukuran besar/lebar, tebal, dan cukup kuat sehingga tidak mudah sobek.



Gambar 5. Lokasi diadakannya Pasar Jaten (bagian 1)
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2021



Gambar 6. Lokasi diadakannya Pasar Jaten (bagian 2)
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2021

Pada gambar 7, tampak *signage* bertulisan huruf yang membentuk kalimat “Kampung Jawi” di atas sebuah tampah bambu. Tampah bambu bertulisan Kampung Jawi tersebut sebagai penanda informasi dari Pasar Jaten. Tampah bambu sendiri bagi masyarakat Jawa merupakan bagian dari kehidupan karena tampah sering digunakan untuk menampi atau membersihkan beras supaya terpisah dari sekam dan kotoran lainnya. Tampah bambu berbentuk bulat dan lebar seperti piring dengan diameter kisaran 65-80 sentimeter. *Signage* lainnya adalah adanya jembatan bambu yang berada tepat di bawah *signage* tampah bambu Kampung Jawi. Apabila diperhatikan lebih detail, bambu menjadi material utama dari beberapa *signage* maupun furnitur yang berada di lokasi Pasar Jaten.



Gambar 7. *Signage* di bagian depan area masuk Pasar Jaten
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019

Beberapa *signage* yang ditemukan adalah tudung lampu di sepanjang akses jalan masuk ke lokasi Pasar Jaten (gambar 3, kiri). Tudung atau kap lampu bambu tersebut dibuat menyerupai seperti bentuk caping, topi tradisional dari bambu yang biasa digunakan oleh petani saat beraktivitas di sawah. Kap lampu bambu tersebut digantungkan di sebatang bambu yang di kedua ujungnya disangga oleh tiang bambu juga. Setelah sampai di ujung akses masuk, terdapat pendopo tempat untuk menukar *kepeng* atau mata uang yang digunakan di Pasar Jaten. Pendopo tersebut juga memiliki konstruksi bangunan dari bambu, beratapkan daun kelapa yang dikeringkan, serta memiliki papan informasi yang digantungkan bertulisan “*Ijol Kepeng*” atau berarti Penukaran Uang pada selembur pipih kayu sebagai *signage*. Adapun material *kepeng* terbuat dari potongan kayu berukuran 3 x 5 cm dengan ukiran bertulisan Kampung Jawi Sukorejo, Pasar Jaten. Satu *kepeng* kayu tersebut dapat ditukar dengan uang senilai Rp 2.000, 00.





Gambar 8. Pondok penukaran mata uang di bagian depan area masuk Pasar Jaten (kiri); *kepeng* kayu, mata uang di Pasar Jaten (kanan)

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019



Gambar 9. Suasana yang ada di Pasar Jaten

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019

Pengunjung Pasar Jaten yang akan bertransaksi jual beli harus menukarkan uang terlebih dahulu di pendopo penukaran uang. Dengan demikian, saat transaksi berlangsung antara pengunjung dengan penjual dapat dikatakan melakukan sistem jual beli tradisional seperti masa lampau saat mata uang Rupiah belum ditetapkan sebagai alat penukaran resmi di wilayah Indonesia. Dari beberapa kios atau pendopo yang ada di Pasar Jaten, sebagian besar didominasi oleh penjual makanan dan minuman khas Semarang seperti: es gempol, sate kolang-kaling, soto gerabah, gendar pecel, es tape, serta menu tradisional Jawa lainnya semacam gudeg, kopi tubruk, wedang jahe, aneka gorengan, jajanan pasar, dan lain sebagainya. Keunikan lain yang ada di Pasar

Jaten terlihat pada gambar 10 dan 11 adalah pedagang yang menjajakan produknya di Pasar Jaten diwajibkan mengenakan busana tradisional yakni berkebaya dan berkain jarit. Selain itu, dari segi kemasan makanan tidak diperbolehkan penggunaan material sintetis seperti plastik maupun sterofoam. Dengan demikian, peralatan yang digunakan oleh para pedagang di Pasar Jaten merupakan material yang ramah lingkungan seperti gerabah (keramik tanah liat), tas bambu, piring daun pisang, piring daun jati, batok kelapa maupun piring rotan. Penggunaan material kertas masih diperbolehkan, selama tidak ada campuran plastik dan tidak diperkenankan dibuang di sekitar lokasi Pasar Jaten selain pada tempat sampah bambu yang sudah disediakan di beberapa sudut pasar. Secara keseluruhan elemen estetis/ desain yang ada di Pasar Jaten terbuat dari material alam/ natural yakni bambu, kayu, daun, tanah liat, dan batok kelapa dianggap sudah sesuai serta menampilkan kesan *vintage* dari Pasar Jaten sebagai pasar rakyat zaman dahulu. Kostum yang dikenakan oleh panitia atau pihak penyelenggara, para pedagang, dan pihak keamanan di Pasar Jaten pun berhasil memunculkan kesan tradisional khas masyarakat Jawa Tengah.



Gambar 10. Pendopo penjual makanan di Pasar Jaten (bagian 1)
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019



Gambar 11. Pendopo penjual makanan di Pasar Jaten (bagian 2)
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019



Gambar 12. Kemasan pembungkus makanan dari bamboo (*krongso*)

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019

C. Potensi Pengembangan Pasar Jaten

Berdasarkan pemaparan dalam subbab pembahasan di atas, Penulis berasumsi bahwa Pasar Jaten memiliki potensi untuk dapat lebih dikembangkan lagi di masa mendatang dengan diikuti perencanaan dan media promosi yang tepat. Walaupun Pasar Jaten tergolong masih baru dan belum sepopuler Pasar Papringan Temanggung, namun Pemkot Semarang dapat mengajak komunitas tertentu untuk bekerja sama menggarap Pasar Jaten. Hal-hal yang Penulis temukan saat berkunjung ke Pasar Jaten tahun 2019 adalah sulitnya akses menuju lokasi, terutama jika ditempuh menggunakan kendaraan roda empat. Jalan yang sempit dan masuk ke dalam pemukiman padat penduduk cukup menyulitkan kendaraan untuk dapat melewati jalan yang cukup sempit. Perlu dilakukan peninjauan ulang oleh pihak Pemkot Semarang terkait lokasi Pasar Jaten, mengingat lokasi dari Desa Sukorejo termasuk ke dalam Kecamatan Gunungpati yang dapat dialihkan ke lokasi yang lebih mudah untuk diakses, memiliki lahan parkir untuk kendaraan yang cukup lapang, dan pemasangan *signage* sudah ditempatkan di pinggir jalan raya.

Dari segi poster kegiatan, pihak penyelenggara bersama Pemkot Semarang sebaiknya melakukan metode AISAS yang disebar lebih intensif menjelang pelaksanaan kegiatan melalui media sosial. Penggunaan media konvensional berupa spanduk maupun umbul-umbul dianggap tidak terlalu efektif menarik target *audience*, terutama dari kalangan anak muda, sehingga kemeriahan Pasar Jaten dirasakan kurang populer dibandingkan kegiatan sejenis lainnya (Pasar Papringan Temanggung). Poster kegiatan dapat dibagi ke dalam tiga tahapan yakni pra-kegiatan, menjelang kegiatan, dan saat kegiatan berlangsung yang disebar melalui media sosial khusus Pasar Jaten, tidak lagi menginduk pada media sosial Kampung Jawi, supaya informasi dan segala hal

yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasar Jaten dapat lebih mudah diakses oleh target *audience*.

PENUTUP

Upaya Pemkot Semarang untuk membangun dan mengembangkan potensi desa wisata yakni Kampung Jawi sudah sangat baik, didukung dengan kegiatan pasar rakyat setiap Minggu Legi yakni Pasar Jaten. Namun, masih terdapat beberapa hal yang dirasakan belum optimal saat penyelenggaraan Pasar Jaten yakni akses ke lokasi yang cukup menyulitkan, lahan parkir kendaraan yang tidak memadai, waktu pelaksanaan pasar yang relatif singkat sehingga pengunjung kurang dapat mengoptimalkan waktu berkunjung, informasi kegiatan melalui poster tidak tersampaikan secara luas dan menyeleruh karena masih mengandalkan media konvensional dan metode *word of mouth*, serta belum maksimalnya pemanfaatan media sosial oleh pihak penyelenggara.

DAFTAR REFERENSI

- Aryani, D. I. (2019). Tinjauan Sensory Branding dan Psikologi Desain Kedai Kopi Kekinian Terhadap Perilaku Konsumen. *Waca Cipta Ruang*, Vol. 5 No.1, pp.330-336.
- Calori, C., Vanden-Eynden, D. (2015). *Signage and Wayfinding Design: A Complete Guide to Creating Environmental Graphic Design Systems (2nd Edition)*. UK: Wiley.
- Claus, K. E., Claus, R. J. (1974). *Visual Communication Through Signage (1st Edition)*. UK: Signs of the Times Pub.Co
- Dewanti, R.A; Gustaman, F.A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pasar Wisata Papringan di Dusun Ngadiprono Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. *SOLIDARITY* Vol.10 No.1, pp.86-95.
- Dewi, I. A. P. M. (2016). Efektivitas Iklan dengan Analisis AIDA (Attention, Interest, Desire dan Action) Studi pada Pengguna Sepeda Motor Merek Yamaha di Kota Singaraja. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, Vol.8 No.3, pp.1-10.
- Humaira, N. (2021). AISAS (Attention, Interest, Search, Action, Share) Model of Cosmetics Marketing Communication on Online Beauty Forum (Case Study: Avoskin Marketing on Sociolla). *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.4 No.1, pp.186-200.
- Iskandar, J. (2020). Analisis Pengaruh Model AISAS (Attention, Interest, Search, Action & Share) Terhadap Tingkat Literasi Keuangan Syariah (Studi Kasus Followers Instagram Perbankan Syariah), *Islamic Banking*, Vol.5 No.2, pp.33-53.

Istianah, D.A. (2020). Intervensi Komunitas Spedagi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Pasar Papringan Temanggung. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, Vol.1 No.2, pp.159-171.

Sugiyama, K., Andree, T. (2010). *The Dentsu Way: Secrets of Cross Switch Marketing from the World's Most Innovative Advertising Agency (1st Edition)*. UK: McGraw-Hill Education.

Sumber lain:

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-poster/>, diakses Minggu, 25 Juli 2021 pukul 19.45 WIB.

MODEL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA GUNUNG LURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

Sodik Dwi Purnomo, Minadi Wijaya, Ady Achadi

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal akan kekayaan alam yang luar biasa melimpah, salah satunya air. Secara nasional Indonesia memiliki ketersediaan air mencapai 694 milyar meter kubik per tahunnya, dan jumlah ini adalah potensi yang dapat dimanfaatkan. Menurut Kodoatie & Sjarief (2008) air merupakan sumber daya alam yang terbaharui, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat. Namun potensi sumber daya alam tersebut belum bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat. Saat ini, baru sekitar 23 persen yang sudah termanfaatkan, dimana sekitar 20 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kota dan industri, dan 80 persen lainnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi (Hartoyo, 2010). Di sisi lain, ada pengaruh negatif bila pemanfaatan air hanya sedikit, akan ada risiko yang membahayakan, diantaranya dapat mengakibatkan banjir dan longsor pada saat musim hujan serta kekeringan saat terjadi musim kemarau (Hadimuljono 2017; Hartoyo 2010).

Sumberdaya air merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Sumber daya air di pedesaan memiliki ketersediaan yang melimpah, dan biasanya berasal dari mata air pegunungan. Keberadaan air dapat berperan multiguna, dapat digunakan sebagai air minum, kebutuhan rumah tangga, mengairi lahan pertanian, perikanan, relijius (mendukung pelaksanaan ibadah), dan ekonomi (Aulia & Dharmawan, 2010). Apabila dikelola dengan baik sumber daya air tersebut dapat menjadi sebuah potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sutikno (2014), pengelolaan sumber daya air merupakan suatu aktivitas yang di dalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan evaluasi mengenai pelestarian sumber daya air. Namun, ketersediaan sumber daya air masih belum bisa mempengaruhi kinerja

perekonomian di pedesaan. Kurangnya kemampuan dalam pengelolaan sumber daya air di pedesaan membuat masyarakat belum bisa memanfaatkan dengan baik. Maka diperlukan adanya suatu pengelolaan terhadap sumberdaya air agar keberadaannya tetap bermanfaat dan berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan presentase penduduk miskin 2019-2020 menurut wilayah kota dan desa mengalami kenaikan dari 9,22 persen menjadi 10,9 persen. Hal ini memberikan tugas kepada pemerintah, akademisi, serta lembaga yang terkait untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya daerah pedesaan. Kesejahteraan merupakan tata kehidupan setiap warga negara yang memiliki rasa aman, sentosa, makmur, dan selamat lahir batin. Kesejahteraan tersebut meliputi kehidupan yang layak dan bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, serta kekawatiran (Husna, 2014).

Kabupaten Banyumas berada di kawasan Gunung Slamet membuat potensi sumber daya alam yang melimpah. Seperti halnya di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas merupakan daerah pegunungan yang memiliki sumber daya alam yang baik, salah satunya memiliki potensi sumber daya alam berupa air yang cukup melimpah. Jika dilihat dari cara pengelolaannya masyarakat di Desa Gunung Lurah belum mengembangkan manfaat sumber daya air tersebut yang dimana apabila dikembangkan lagi akan menghasilkan perekonomian yang cukup bagus dan juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat. Salah satu pengelolaan yang digunakan oleh masyarakat Desa Gunung Lurah yaitu untuk pertanian dan sektor rumah tangga. Apabila masyarakat mengembangkan lagi pada sektor perikanan, sektor pariwisata dan masih banyak lagi jelas akan lebih bagus dan akan meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan mengenai pengelolaan sumber daya air di Desa Gunung Lurah yang belum optimal tersebut. Karya tulis ini memberikan gagasan mengenai Model Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Model pengelolaan sumber daya air bertujuan memberikan masukan dalam peningkatan pemanfaatan sumber daya air di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, pembangkit listrik, dan rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Mengidentifikasi Potensi dari Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang melimpah dimanfaatkan untuk meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya tersebut dilakukan melalui beberapa sektor seperti :

- a. Sektor Pertanian dan Perikanan. Melimpahnya sumber daya air sangat mendukung kegiatan ekonomi. Beberapa faktor lain yang mendukung proses pemanfaatan ini antara lain:
 - 1) Lahan persawahan yang cukup luas. Lahan luas yang merupakan salah satu modal dari potensi yang baik untuk pengembangan di sektor pertanian, masyarakat bisa memanfaatkan untuk kegiatan bertani seperti bertani padi, singkong, ubi jalar, dan sebagainya. Kegiatan tersebut membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat di desa Gunung Lurah.
 - 2) Penduduk yang bekerja di sektor pertanian cukup banyak. Mayoritas masyarakat pedesaan biasanya sebagai petani, sehingga menguntungkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.
 - 3) Permintaan pangan beras yang semakin meningkat. Hasil padi yang melimpah, maka akan semakin meningkat juga permintaan kebutuhan pangan di masyarakat. Biasanya hasil tersebut dikonsumsi, selain itu diperjual belikan untuk membantu perekonomian masyarakat lokal.
 - 4) Permintaan protein hewani khususnya ikan semakin meningkat. Semakin banyak orang yang menyukai produk olahan ikan, karena memiliki kandungan proteinnya yang banyak. Sehingga permintaan ikan semakin meningkat.
 - 5) Lahan untuk kegiatan perikanan cukup memadai. Banyak lahan yang masih kosong dan sumber daya air yang melimpah memberikan peluang kepada masyarakat di desa tersebut untuk mengembangkan sebagai kegiatan usaha.
- b. Sektor Pariwisata. Ada beberapa potensi sumber daya air yang terdapat pada sektor tersebut diantaranya :
 - 1) Kondisi alam yang masih baik. Alam yang dirawat dengan baik oleh masyarakat sekitar membuat keindahan alam di desa tersebut terjaga. apalagi dengan bantuan dari akademisi, lembaga, dan peran masyarakat lokal yang saling gotong royong.
 - 2) Permintaan destinasi obyek wisata berorientasi alam yang meningkat. Letak tempat tersebut yang strategis dan memiliki keindahan alam membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi.
 - 3) Jumlah wisatawan semakin meningkat. Semakin meningkat jumlah wisatawan, akan berdampak baik pada objek wisata. Salah satunya semakin dikenal oleh masyarakat luas.
 - 4) Kegiatan usaha yang semakin berkembang. Dengan adanya objek wisata tersebut, akan meningkatkan jumlah pelaku usaha seperti pelaku UMKM.

c. Sektor Pembangkit Listrik. Ada beberapa potensi sumber daya air yang terdapat pada sektor pembangkit listrik diantaranya :

- 1) Kebutuhan listrik semakin meningkat. Sumber daya manusia yang semakin meningkat, akan berpengaruh juga terhadap kebutuhan listrik di desa tersebut. Karena setiap rumah pasti akan membutuhkan listrik untuk kegiatan sehari-hari seperti penerangan
- 2) Terjadi pola hidup masyarakat semakin modern. semakin berkembangnya zaman, maka semakin canggih juga teknologi yang digunakan. Hal ini membuat kebutuhan listrik semakin meningkat.

2. Mengidentifikasi Faktor Pendorong Dan Penghambat

a. Pendorong :

- 1) Sumber daya air yang melimpah. Desa Gunung Lurah memiliki potensi sumber daya air yang baik, dan juga letak geografis desa tersebut berada di kaki Gunung Slamet. sehingga potensi tersebut berasal dari mata air pegunungan.
- 2) Kondisi alam yang masih baik. Membantu laju pertumbuhan perekonomian masyarakat terutama di sektor pariwisata.
- 3) Adanya gotong royong antar masyarakat sekitar. Kegiatan gotong royong yang masih sangat kental membuat memudahkan segala urusan pekerjaan. Selain itu akan terciptanya rasa kekeluargaan antara masyarakat sekitar.
- 4) Kualitas SDM yang cukup baik. Sumber daya manusia yang cukup baik terutama di wilayah pedesaan membuat memudahkan dalam segala kegiatan, serta memiliki kesadaran akan kepentingan bersama maupun diri sendiri

b. Penghambat :

- 1) Infrastruktur jalan yang masih kurang memadai. Jalan menuju lokasi penelitian belum memadai karena hanya terdapat satu jalan untuk keluar masuk, dan kondisi jalan yang rusak,
- 2) Infrastruktur pendukung untuk pembangkit listrik kurang memadai. Pastinya keterbatasan tersebut membuat arus listrik untuk kebutuhan rumah tangga tidak stabil.
- 3) Kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya air. Masyarakat masih mengelola sumber daya air dengan kemampuan seadanya, sehingga pemanfaatannya kurang maksimal
- 4) Branding pemerintah daerah. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat untuk memperkenalkan pariwisata ke masyarakat luas.
- 5) Peran akademisi yang kurang. Peran serta akademisi sangat dibutuhkan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya air.

3. Mengidentifikasi Stakeholder

Untuk mewujudkan pengelolaan air dalam mendukung pengembangan, terutama di sektor pertanian dan perikanan, pariwisata, serta pembangkit listrik. Maka perlu mengidentifikasi peran dan *stakeholders* yang mendukung. Berikut adalah peran dan stake holders yang terkait:

a. Sektor Pertanian dan Perikanan.

- 1) Dinas Pertanian. Memberikan penyuluhan terhadap petani maupun memberikan subsidi benih yang berkualitas baik. Pada sektor perikanan memberikan penyuluhan terhadap para nelayan, dan memberikan benih ikan, pada sektor pariwisata memberikan tata kelolaan.
- 2) Dinas perikanan. Melaksanakan urusan dalam bidang perikanan, memberikan penyuluhan mengenai pengelolaan ikan, tata kelola kolam serta memberikan bibit benih ikan.
- 3) Pemerintah Desa. Ikut serta dalam pemberian penyuluhan maupun subsidi benih kepada kelompok tani atau masyarakat lokal. Selain itu, memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan seperti memeberikan dorongan untuk berkembang, motivasi, bimbingan serta pendampingan di sektor tersebut.
- 4) Kelompok Tani. Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan di sektor pertanian dan perikanan (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga). Selain itu, sebagai penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/pinjaman kepada para petani yang memerlukan.
- 5) Perusahaan Swasta. Salah satu peluang yang memungkinkan dalam rangka meningkatkan peran swasta dalam pembangunan pertanian dan perikanan adalah melalui implementasi Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (corporate social responsibility), atau lebih dikenal dengan singkatan “CSR”.
- 6) PUPR. Penyediaan infrastruktur di sektor pertanian dan perikanan berupa saluran irigasi.

b. Sektor Pariwisata.

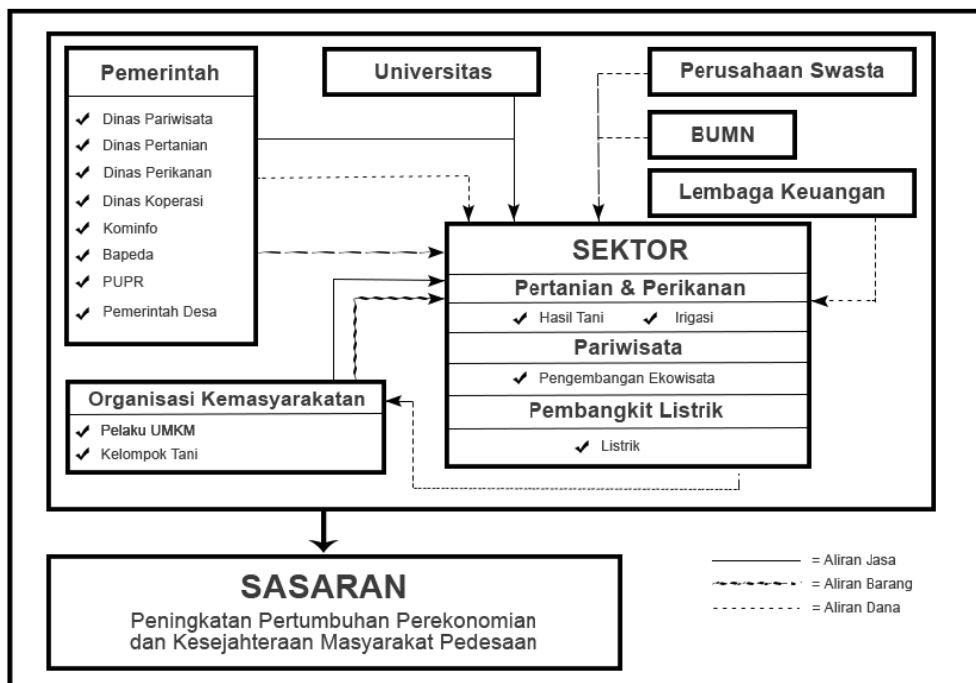
- 1) Dinas Pariwisata. Memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan pada bidang pariwisata. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- 2) PUPR. Penataan kawasan, penyediaan fasilitas dan sanitasi penunjang objek wisata.
- 3) UMKM. Sebagai penyedia layanan dan produk pendukung pariwisata. Layanan dan kualitas produk pendukung yang ditawarkan UMKM akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor pariwisata.
- 4) Pemerintah Desa. Pemerintah desa sebagai penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pada bidang pariwisata perannya melakukan

pengaturan sumber daya dengan membentuk badan pariwisata desa yang memiliki peran salah satunya mengadakan pelatihan kepada para pelaku wisata. Pengembangan desa wisata berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat lokal, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

- 5) Dinas Koperasi dan Industri. Sebagai pengembangan koperasi wisata seperti tata kelola koperasi yang baik dan pelaksanaan fasilitas kemitraan, promosi, sarana serta prasarana.
 - 6) Dinas Kominfo. Sebagai media promosi untuk mengenalkan objek wisata kepada masyarakat luas.
 - 7) Bappeda. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi wisata, serta sumber daya manusia sebagai pelaku pengelolaan wisata.
 - 8) Akademisi. Melakukan berbasis riset dan pengabdian masyarakat berkaitan dengan pengembangan pariwisata, agar berbasis penelitian.
- c. Sektor Pembangkit Listrik.
- 1) BUMN. Mendistribusikan tenaga listrik pada masyarakat.
 - 2) PUPR. Membantu menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang usaha pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
 - 3) Pemerintah Desa. Memberikan perizinan terkait dengan pembangunan pembangkit listrik.
 - 4) Organisasi Kemasyarakatan. Bergotong royong dalam proses pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.
 - 5) Perusahaan Swasta. Memberikan dukungan dengan menyumbangkan dana yang nantinya digunakan untuk menyediakan peralatan dan penunjang infrastruktur lainnya.
 - 6) Akademisi. Memberikan edukasi mengenai pengelolaan sumber daya air melalui pembangkit listrik.

4. Model Pengelolaan Sumber Daya Air

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, dapat dirumuskan model pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Model Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui berbagai sektor yaitu pertanian & perikanan, pariwisata, dan pembangkit listrik. Upaya pengelolaan ini didukung oleh beberapa *stakeholders* yang memiliki perannya masing-masing, yaitu: 1) Pemerintahan memberikan dukungan jasa, barang dan dana kepada semua sektor; 2) Organisasi kemasyarakatan memberikan dukungan jasa kepada semua sektor dan memberikan dukungan barang kepada sektor pertanian dan perikanan berupa benih ikan, bibit padi dan sebagainya; 3) Universitas memberikan dukungan jasa kepada semua sektor; 4) Perusahaan Swasta memberikan bantuan dana melalui *Corporate social responsibility*; 5) BUMN melalui PLN memberikan dukungan jasa ke sektor pembangkit listrik; 6) Lembaga keuangan memberikan bantuan aliran dana kepada semua sektor. Salah satu outputnya adalah sektor pembangkit listrik memberikan aliran barang berupa listrik kepada organisasi kemasyarakatan. Hasil dari upaya pengelolaan sumber daya alam oleh masing-masing sektor ini akan mendukung upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Potensi sumber daya air di Desa Gunung Lurah yang melimpah dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya air tersebut dilakukan melalui beberapa sektor seperti pertanian & perikanan, pariwisata, dan pembangkit listrik. Dalam pengelolaan sumber daya air terdapat faktor pendorong yaitu 1) Sumber daya air yang melimpah, mata air yang berasal dari pegunungan memiliki ketersediaan sumber daya air yang banyak; 2) Kondisi alam yang masih baik; 3) Adanya gotong royong antar masyarakat sekitar; 4) Kualitas SDM yang cukup baik. Sementara itu faktor penghambatnya ialah 1) Infrastruktur jalan yang masih kurang memadai; 2) Infrastruktur pendukung untuk pembangkit listrik kurang memadai; 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; 4) Peran akademisi yang kurang.

Stakeholders yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air di Desa Gunung Lurah di sektori Pertanian dan Perikanan yaitu 1) Dinas Pertanian; 2) Dinas perikanan; 3) Pemerintah Desa; 4) Kelompok Tani; 5) Perusahaan Swasta; 6) dinas PUPR. *Stakeholders* yang terkait dalam penelolan sumber daya air disektor pariwisata adalah 1) Dinas Pariwisata; 2) Dinas PUPR; 3) UMKM; 4) Pemerintah Desa; 5) Dinas Koperasi dan Industri; 6) Dinas Kominfo; 7) Bappeda; 8) Akademisi. Sementara itu, *Stakeholders* yang terkait dalam penelolan sumber daya air disektor pembangkit listrik adalah 1) BUMN; 2) Dinas PUPR; 3) Pemerintah Desa; 4) Organisasi Kemasyarakatan; 5) Perusahaan Swasta; dan 6) Akademisi.

Model Pengelolaan sumber daya air dibuat untuk menggambarkan keterkaitan antara sektor dan *stakeholders* yang mendukung agar upaya ini tepat pada sasaran dilaksanakannya penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, T. O. S., & Dharmawan, A. H. (2010). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 4(3), 345-355.
- Hadimuljono B. 2017. 830 Embung Dibangun Pemerintah di Seluruh Indonesia. Detik Finance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-3506129/830-embung-dibangun-pemerintahdi-seluruh-indonesia>. Diunduh tgl 15 Juli 2021.
- Hartoyo. 2010. *Program Pengembangan Penyediaan Air Untuk Menjamin Ketahanan Pangan Nasional. Seminar Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Ketahanan Pangan*. Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum.

- Husna, N. (2014). Ilmu Kesehatan Sosial dan Pekerja Sosial. *Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*. 20(29): 1-27.
- Kodoatie, R., & Sjarief, R. P. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sutikno, S. (2014). Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (Integrated Water Resourch Management, IWRM). *Mesa Fakultas Teknik Universitas Subang*.

DESAIN DERMAGA APUNG BERBASIS *ECOBRIK* DI KAWASAN PANTAI BULAKSETRA PANGANDARAN

Anas Noor Firdaus, Yuni Ari Wibowo, Arif Baswantara, Ahmad Maulana

PENDAHULUAN

Pantai Bulaksetra terletak dalam kawasan pelabuhan Cikidang, Pangandaran, lokasi ini merupakan area konservasi yang berhadapan dengan laut di sebelah Selatan dan anak sungai Putra Pinggan di sebelah Utara. Keberadaan mangrove dan sungai serta laut disekitarnya menjadikan area ini cocok sebagai tempat edukasi sekaligus wisata ekologi. Perahu dipergunakan untuk menyusuri sungai berarus tenang ini, orang yang hendak ke area konservasi seringkali kesulitan untuk menaik-turunkan penumpang dari dan ke area konservasi, dermaga apung di area tersebut sangatlah dibutuhkan keberadaannya. Selain area konservasi di lokasi ini juga sering dibuat aktivitas penangkapan pukat pantai, aktivitas penangkapan ikan sering sekali meninggalkan sampah plastik dan salah satunya adalah botol air mineral.

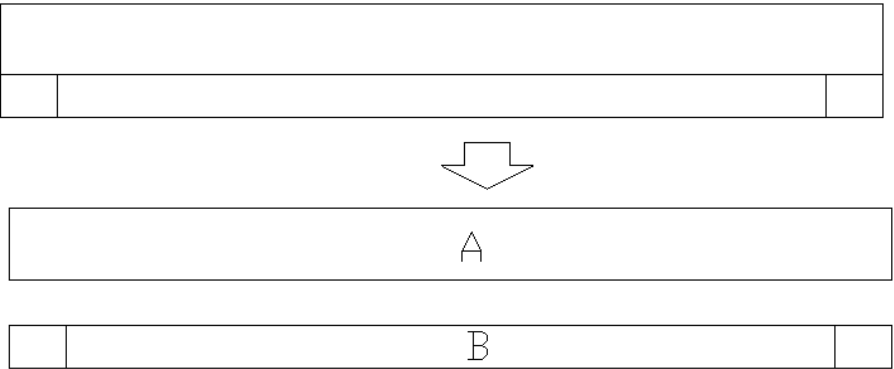
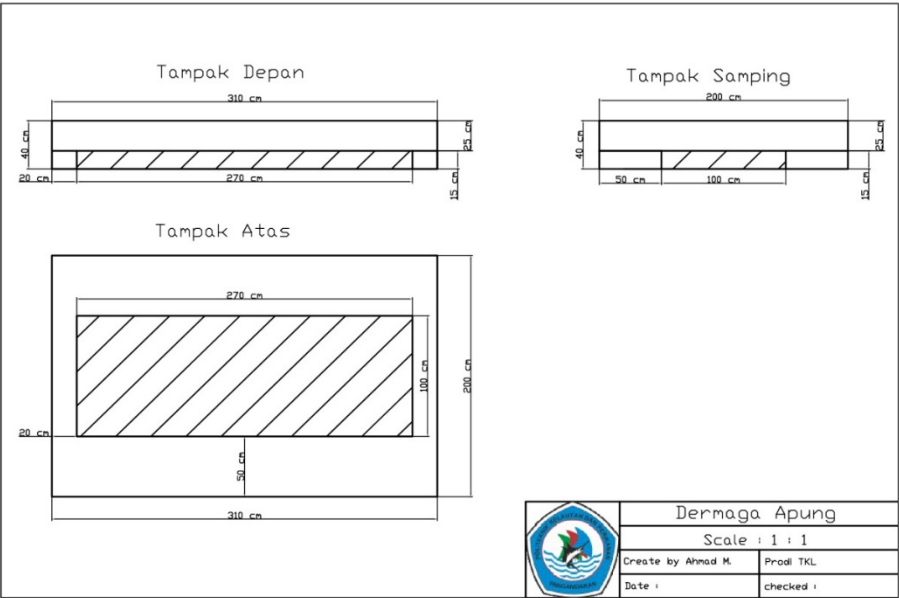
Kebutuhan akan dermaga apung dan pemanfaatan sampah plastik (*ecobrick*) memunculkan ide desain sebagai alternatif yang menarik. Dermaga pada umumnya dibangun secara permanen dan menggunakan material pasir, semen, batu, kerikil, dan lain sebagainya. Desain dermaga ini dibuat sederhana dan ringan tetapi kuat serta dapat berpindah tempat sesuai kebutuhan dengan material utamanya menggunakan sampah plastik. Desain ini dikhususkan untuk perairan yang tenang dan arus relatif kecil sekitar 0 - 5 km/jam, sarana menaik turunkan penumpang satu per satu dari dan ke perahu, kayak atau sampan, terdapat sarana *mooring* untuk pengikatan tali tambat dari dermaga apung ke daratan.

PEMBAHASAN

1. Desain Dermaga Apung

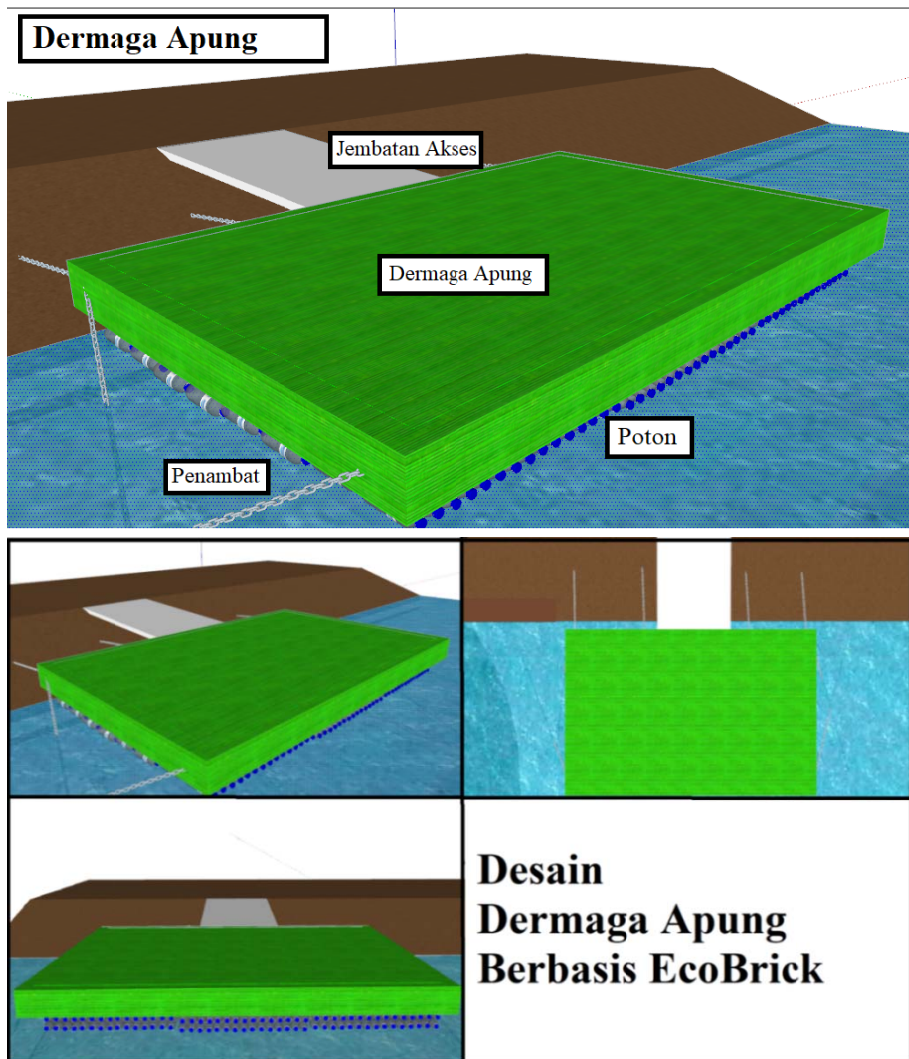
Dermaga apung ini didesain secara keseluruhan dengan ukuran Panjang 3,10 meter, lebar 2,00 meter, dan tinggi 0,40 meter. Dermaga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas (tinggi 0,25 meter) dan bawah (0,15 meter), bagian bawah berbentuk persegi Panjang yang pada bagian tengahnya diberi ruang kosong dengan ukuran Panjang 2,70 meter dan lebar 1,00 meter. Tampak

depan berdimensi lebar 3,10 meter dan tampak samping berdimensi lebar 2,00 meter (gambar 1).



Gambar 1 Desain 2 Dimensi Dermaga Apung

Desain dermaga apung memanfaatkan ponton dan berbahan dasar *ecobrick*. Ponton digunakan agar dermaga dapat terapung dengan baik. Alasan penggunaan *ecobrick* ini adalah untuk pemanfaatan sampah berbahan plastik, ramah lingkungan dan didesain dengan kerapatan yang padat agar tetap memiliki kekuatan pada saat digunakan. Tampilan secara 3 dimensi dapat dilihat pada Gambar 2.



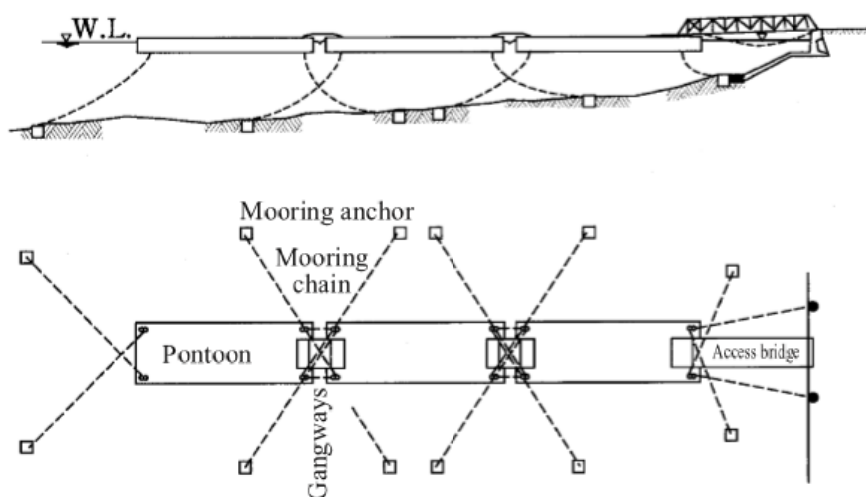
Gambar 2. Desain 3 Dimensi Dermaga Apung

Material *ecobrick* yang digunakan adalah botol air mineral dalam kemasan 600 ml karena sangat banyak dijumpai menjadi sampah dan mencemari lingkungan. Pada desain terlihat tali tambat dihubungkan ke daratan dan juga ke dasar air dengan bantuan pemberat, hal ini agar dermaga apung tidak berpindah dari posisi yang diinginkan.

2. Sistem Tambatan (*Mooring*)

Mengacu kepada buku *Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan* (OCDI, 2002), dijelaskan bahwa umumnya dermaga terapung mempunyai susunan berupa modul-modul apung tertambat (*mooring*), ada juga berupa susunan ponton-ponton yang dihubungkan ke

daratan melalui akses jembatan. Menurut Sufyan (2017) dermaga terapung yang dikenal dengan *floating jetty* merupakan dermaga dengan fungsi sebagai tempat tambat perahu/kapal di ponton terapung. Dermaga apung memiliki kelebihan yaitu lebih fleksibel, dapat menyesuaikan dengan posisi air dan kapal pada saat pasang atau surut, kelebihan lainnya yaitu berupa kemudahan proses pembuatan dengan biaya jauh lebih murah dibanding dermaga konvensional. Dermaga apung juga tahan terhadap gempa karena struktur utama tidak bersandar pada daratan, cocok juga digunakan pada daerah dengan perbedaan pasang surut ekstrim (Kadir, 2019). Contoh desain sistem penambatan / *mooring* yang cocok digunakan dermaga apung *ecobrick*.



Sumber: OCDI, 2002

Gambar 3. *Mooring Dermaga Apung*

Ada beberapa alasan pemilihan desain sistem *mooring*:

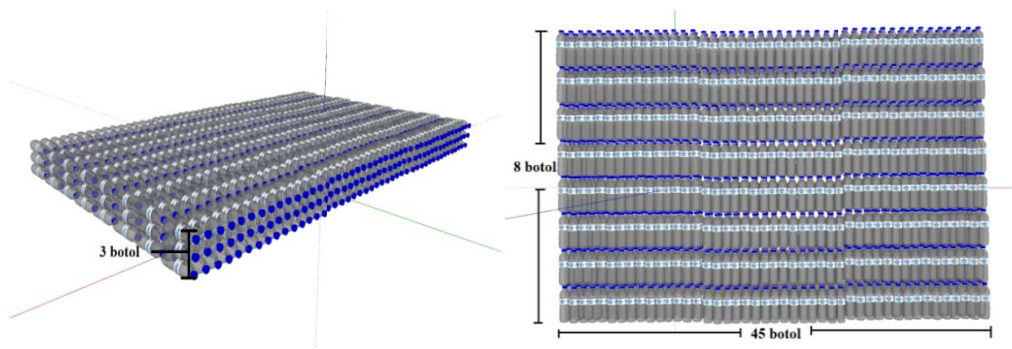
- Perairan di muara sungai Bulaksetra merupakan jenis perairan yang arusnya relatif tenang yaitu dibawah 1 km/jam dan memiliki perbedaan pasang yang tidak terlalu jauh sehingga penggunaan sistem *catenary mooring* merupakan salah satu pilihan terbaik.
- Terdapat juga alternatif pemilihan sistem *mooring* selain dari *catenary mooring* yaitu dengan menggunakan sistem taut *mooring*, yaitu membuat dermaga apung agar tetap diam pada posisinya dengan membuat tali/rantai kaku.
- untuk jenis *anchors* (jangkar/pemberat) dapat menggunakan jenis *caisson gravity anchor*, atau jenis *multi-slab gravity anchor*, alasannya adalah karena jenis ini ada tambahan pemberat agar struktur terapung tetap diam diposisi, selain itu dermaga apung ini memiliki ukuran yang kecil sehingga jenis jangkar yang sederhana sudah cukup.

- d. Untuk jenis *soft soil anchors*, dan *suction pile anchor* dapat juga digunakan hanya saja membutuhkan *jet air* untuk dapat memasangnya sehingga menyebabkan adanya biaya tambahan.
- e. Untuk jenis Pile Anchors tidak dapat digunakan diperairan Bulaksetra dikarena struktur tanah yang lembut sehingga tidak cocok jika menggunakan jenis ini.

3. Pemanfaatan Sampah (*Ecobrick*)

Sampah plastik yang tidak termanfaatkan diambil dan dibersihkan untuk kemudian disusun menjadi bentuk struktur daya apung terhadap dermaga. Alasan pemilihan *ecobrick* menurut Setyanto (2019) adalah:

- a. Ramah lingkungan dan mengurangi sampah;
- b. Biaya murah karena memanfaatkan barang tidak terpakai;
- c. Pembuatan mudah dan praktis, dibuat *hand made*, tanpa keterampilan khusus;
- d. Bahan plastik tahan terhadap korosi dan sulit terurai (tahan lama), dan
- e. Berat ringan dengan rata-rata sekitar 250-280 gram (Andriastuti, 2019).



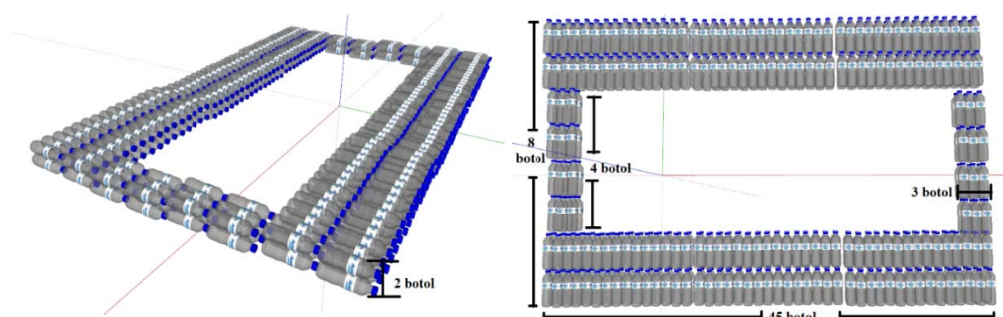
Gambar 4. Pemanfaatan *Ecobrick* Botol Plastik (Bagian Atas)

Dermaga bagian atas (Gambar 4.) menggunakan 45 buah botol pada bagian panjangnya, 8 buah pada bagian lebar, dan 3 buah pada bagian tinggi, sehingga:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah Botol} &= \text{jumlah botol pada panjang} \times \text{lebar} \times \text{tinggi} \\
 &= 45 \times 8 \times 3 \\
 &= 1080
 \end{aligned}$$

jumlah botol yang digunakan untuk bagian atas adalah 1080 buah botol. Jika berat rata-rata sekitar 250 gram (Andriastuti, 2019), maka:

$$\begin{aligned}
 \text{Berat Dermaga Atas} &= \text{jumlah botol} \times \text{berat rata-rata} \\
 &= 1080 \times 250 \text{ gr} \\
 &= 270.000 \text{ gr} = 270 \text{ kg}
 \end{aligned}$$



Gambar 5. Pemanfaatan *Ecobrick* Botol Plastik (Bagian Bawah)

Dermaga bagian bawah (Gambar 5) Panjang, lebar, dan tingginya sama seperti bagian atas, tetapi terdapat ruang kosong dibagian tengah sebanyak 312 buah botol dan tersisa 48 buah, sehingga:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah Botol} &= (\text{jumlah botol pada panjang} \times \text{lebar} \times \text{tinggi}) + \text{sisia botol} \\
 &= (45 \times 4 \times 2) + 48 \\
 &= 360 + 48 \\
 &= 408
 \end{aligned}$$

jumlah botol yang digunakan untuk bagian bawah adalah 408 buah botol, maka (Andriastuti, 2019):

$$\begin{aligned}
 \text{Berat Dermaga Bawah} &= \text{jumlah botol} \times \text{berat rata-rata} \\
 &= 408 \times 250 \text{ gr} \\
 &= 102.000 \text{ gr} = 102 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

Berat total dermaga dari bagian atas dan bawah adalah penjumlahan dari 270 kg dan 102 kg, yaitu sebesar 372 kg sampah plastik termanfaatkan dari 1 buah dermaga *ecobrick* ini.

4. Volume Dermaga Apung

Untuk menghitung volume dari dermaga apung, dapat menggunakan rumus:

$$V = p \times l \times t$$

Dimana V : Volume benda (m^3)

p : Panjang benda (m)

l : Lebar benda (m)

t : Tinggi benda (m)

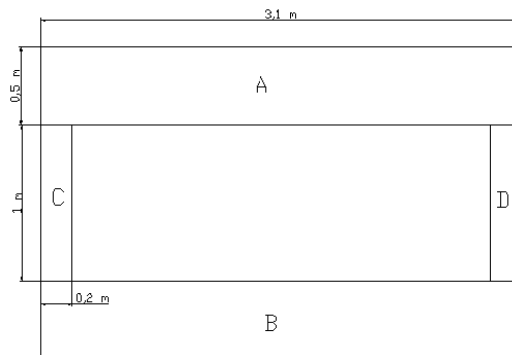
Kemudian untuk mempermudah perhitungan, dermaga ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Bagian atas

Pada bagian atas memiliki panjang 3,10 m, lebar 2,00 m, dan ketinggian 0,25 m. Didapat nilai volume adalah $1,55 \text{ m}^3$ (V_1)

b. Bagian bawah

Pada bagian bawah dibagi lagi menjadi 4 bagian (Gambar 6)



Gambar 6. Bagian Bawah Dermaga Apung

Bagian A dan B memiliki bentuk (volume) yang sama, masing-masing memiliki panjang 3,10 m, lebar 0,50 m, dan tinggi 0,15 m. Didapat nilai volume adalah $0,2325 \text{ m}^3$ dan dikalikan dua, nilai volume A dan B adalah $0,465 \text{ m}^3$ (V_2)

Bagian C dan D juga memiliki bentuk (volume) yang sama, masing-masing memiliki panjang 1,00 m, lebar 0,20 m, dan tinggi 0,15 m. Didapat nilai volume adalah $0,03 \text{ m}^3$ dan dikalikan dua, nilai volume C dan D adalah $0,06 \text{ m}^3$ (V_3)

$$\begin{aligned} V_{\text{total}} &= V_1 + V_2 + V_3 \\ &= 1,55 + 0,465 + 0,06 \\ &= 2,075 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Dengan demikian didapatkan volume dari dermaga apung adalah $2,075 \text{ m}^3$.

5. Massa Jenis *Ecobrick*

Untuk menghitung daya apung dari dermaga apung, dapat melalui pengamatan dan perhitungan. Berdasarkan pengamatan *ecobrick* yang dicelupkan kedalam air terlihat bahwa 1/10 bagiannya tercelup kedalam air, sehingga dapat dihitung sebagai berikut

$$\begin{aligned} \rho_f \cdot V_{bf} &= \rho_b \cdot V_b \\ 1000 \cdot \frac{1}{10} V_b &= \rho_b \cdot V_b \\ \rho_b &= 1000 \cdot \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\rho_b = 100 \text{ kg/m}^3$$

Dengan demikian didapatkan hasil bahwa massa jenis dari *ecobrick* adalah 100 kg/m^3 , dimana ini membuktikan bahwa massa jenis *ecobrick* lebih ringan dibandingkan massa jenis air.

6. Daya Apung dan Displacement

Untuk menghitung daya apung atau berat pemindahan air (*displacement*) dari dermaga apung, dapat menggunakan rumus F_a . *Displacement* dengan volume 2,075 dan percepatan gravitasi standar yaitu $9,8 \text{ m/s}^2$ yaitu :

$$\begin{aligned} F_a &= \rho \cdot v \cdot g \\ &= 1.000 \times 2,075 \times 9,8 \\ &= 20.335 \text{ N} \end{aligned}$$

Dengan demikian didapatkan hasil bahwa daya apung dan *displacement* dari dermaga apung adalah 20.335 N.

7. Kapasitas Maksimum

Untuk menghitung kapasitas maksimum dermaga apung, dapat menggunakan rumus F_a . Sebelumnya telah didapatkan hasil berupa massa dermaga sebesar 372 kg, dan volume $2,075 \text{ m}^3$. Untuk keamanan badan dermaga yang berada diatas air adalah $2/3$ bagian. Kemudian untuk massa rata-rata penumpang adalah 60 kg. Berikut ini adalah perhitungan dari kapasitas maksimum dermaga apung :

$$\begin{aligned} V_{\text{tercelup}} &= 1/3 \times 2,075 \\ &= 0,692 \text{ m}^3 \\ F_a &= w \\ w &= \rho \cdot v \cdot g \\ &= 1000 \times 0,692 \times 9,8 \\ &= 6.781,6 \text{ N} \\ m_{\text{dermaga total}} &= w/g \\ &= 6.781,6 / 10 \\ &= 678,16 \text{ kg} \\ m_{\text{penumpang}} &= m_{\text{dermaga total}} - m_{\text{dermaga}} \\ &= 678,16 - 372 \\ &= 306,16 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah penumpang} = 306,16 / 60 = 5 \text{ orang}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas maksimum dermaga apung ini adalah 306,16 kg atau sekitar 5 orang penumpang.

PENUTUP

Desain *ecobrick* bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pengembangan teknologi dermaga apung berbasis *ecobrick*. Dermaga apung berbasis *Ecobrick* ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan material dalam pembuatan dermaga apung selain dari material yang sudah ada saat ini. Sebelum menerapkannya kedalam sebuah produk diperlukan analisi desain terlebih dahulu, yaitu analisa desain, jumlah sampah termanfaatkan, volume, massa jenis *ecobrick*, daya apung, *displacement* dan juga kapasitas maksimum dermaga apung berbasis *ecobrick*, diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan dermaga apung.

Hasil dari analisa desain dermaga apung ini nantinya secara keseluruhan akan memiliki ukuran panjang 3,10 m lebar 2,00 m dan tinggi 0,40 m, dengan volume dari dermaga apung adalah 2,075 m³, massa jenis dari *ecobrick* sebesar 100 kg/ m³, daya apung dan *displacement* dari dermaga apung sebesar 20.335 N, dan kapasitas maksimum dermaga apung ini adalah 306,16 kg atau sekitar 5 orang penumpang. Terakhir jumlah sampah yang termanfaatkan berdasarkan desain dapat mencapai 372 kg sampah plastik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriastuti, Tri, B, Arifin, & Fitria, L.. (2019). Potensi *Ecobrick* Dalam Mengurangi Sampah Plastik Rumah Tangga di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, Vol. 07, No. 2, 2019: 055 – 063.
- Kadir, Abdul, & Soegeng Hardjono. (2019). Analisis Kekuatan Struktur Dermaga Apung untuk Pelabuhan Perintis. *Warta Penelitian Perhubungan* 2019, 31 (1): 47-54.
- OCDI. (2002). *Technical Standards And Commentaries For Port And Harbour Facilities In Japan*. Tokyo: Daikousha Printing Co., Ltd.
- Saleh, A. H. (2010). *Mega Floating Concrete Bridges*. Master Thesis, Delft.
- Setyanto, D.W., & Bernardus, A.P.A. (2019). Perancangan Infografis Instruksional Kampanye R3 (Reduce, Reuse, Recycle) *Ecobrick*. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019*, ISSN (P) : 2615 – 2584.
- Sufyan, Agus, Rudhy A., Johan R., & Nurfitri S. (2017). Analisa Hidro Oseanografi Pulau Liwungan Untuk Studi Kelayakan Struktur Dermaga Apung. *JURNAL KELAUTAN NASIONAL*, Vol. 12, No 3, Desember 2017, Hal. 127-139

PENGARUH PEMBERIAN MAGOT SEBAGAI PAKAN ALAMI TERHADAP PERTUMBUHAN IKAN NILA (*Oreochromis niloticus*)

Wahyu Puji Astiyani, Ega Aditya Prama, Khairunnisa Makbul

PENDAHULUAN

Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) adalah ikan yang sangat banyak diminati oleh pembudidaya ikan diberbagai kalangan baik masyarakat lokal maupun mancanegara (Yanti et al., 2013; Fadri et al., 2016). Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*), salah satu hasil perikanan darat yang banyak diminati masyarakat karena sumber protein hewani tinggi.

Ikan nila menempati urutan kedua yang banyak dibudidayakan, setelah ikan mas. Ikan nila adalah ikan budidaya air tawar yang banyak diminati oleh para pembudidaya ikan air tawar di seluruh dunia dengan jumlah produksi global tahun 2012 mencapai 3.2 million MT (Lee et al., 2016). Ikan nila memiliki rasa dagingnya yang enak dan memiliki daging tebal dengan kandungan gizi daging ikan nila yang tinggi sehingga sangat digemari oleh masyarakat Indonesia (Putra et al., 2017).

Pakan mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan. Pakan menjadi indikator keberhasilan usaha budidaya karena penyediaan pakan yang berkualitas akan mempengaruhi pertumbuhan ikan. Pakan saat ini belum dimanfaatkan dengan baik dengan artian kompetisi pangan dan pakan masih berlanjut terutama pakan dari sumber protein, sehingga menjadi permasalahan bagi pembudidaya ikan (Djissou et. al., 2016).

Permasalahan yang dihadapi oleh para pembudidaya saat ini tentang pakan yaitu harga bahan pakan sumber protein sangat tinggi dan tentu menjadi perhatian lebih bagi para pembudidaya karena biaya pakan merupakan komponen terbesar dalam kegiatan usaha budidaya yaitu 50- 70%. Banyak cara yang dilakukan oleh oleh pembudidaya untuk meningkatkan produksi budidaya, seperti melakukan penelitian dibidang pakan yang menghasilkan pakan ekonomis dengan kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ikan (Katayane dkk, 2014).

Maggot *H. illucens* yang mudah ditemukan di sampah organik merupakan jenis organisme yang potensial untuk dimanfaatkan antara lain sebagai agen pengurai limbah organik dan sebagai pakan tambahan bagi ikan. Kandungan nutrisi dari magot sangat tinggi dan ketersediaan di alam masih sangat melimpah, sehingga jika dimanfaatkan sebagai pakan ikan tidak akan bersaing dengan manusia. Hal ini menjadi salah satu alasan penggunaan magot dapat diaplikasikan sebagai pengganti pakan pelet ikan atau sebagai alternatif kombinasi pakan ikan.

Black Soldier Fly (BSF), adalah salah satu insekta yang mulai banyak dipelajari karakteristiknya dan kandungan nutriennya. Lalat ini berasal dari Amerika dan selanjutnya tersebar ke wilayah subtropis dan tropis di dunia (Čičková, 2015)

Kandungan nutrisi larva (*Hermetia Illucen*, Diptera: Stratiomyidae) memiliki kandungan protein yang cukup tinggi yaitu 44,26% dan kandungan lemak 29,65%. Nilai asam lemak, asam amino dan mineral yang terkandung dalam larva ini juga tidak kalah dengan sumber protein lainnya, sehingga larva ini dapat dijadikan bahan baku untuk pakan ternak (Fahmi, 2015).

PEMBAHASAN

Pemberian magot sebagai pakan alami terhadap pertumbuhan nila tentunya harus ada beberapa parameter yang harus diamati diantaranya yaitu pertumbuhan bobot dan pertumbuhan panjang. Perlakuan pada penelitian ini yaitu pemberian magot sebanyak 100%, pemberian magot 50% + Pelet 50% dan pemberian pelet 100%.

Pemberian pakan ikan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya ikan. Pakan merupakan unsur terpenting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Manfaat dalam pemilihan pakan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas budidaya perikanan. Pakan yang baik memiliki komposisi zat gizi yang lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Pemberian pakan yang nilai nutrisinya kurang baik dapat menurunkan kelangsungan hidup ikan dan perumbuhannya akan lambat bahkan dapat menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi (malnutrition) (Lucas et al., 2015).

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pakan yang digunakan yaitu pakan Benih ikan nila dipelihara selama 28 hari dengan perlakuan pemberian pakan yang dilakukan setiap hari sebanyak dua kali pada pukul 08.00 dan 16.00 WIB dengan feeding rate (FR) 15% dari bobot tubuh ikan. Feeding Rate adalah jumlah pakan yang diberikan setiap hari pada ikan dan dihitung berdasarkan biomassa (Savitri et al., 2015). Persentase pakan (feeding rate) yang cukup, berkualitas tinggi, dan tidak berlebihan merupakan salah satu faktor yang

menentukan tingkat keberhasilan usaha budidaya ikan. Untuk menjaga kondisi Container box tetap bersih, dilakukannya penyiponan pada pagi dan sore hari.

Penebaran benih ikan nila menggunakan ukuran 7 cm. Penebaran dilakukan pada pagi hari pukul 08.00 WIB - selesai. Hal ini dilakukan untuk menghindari fluktuasi suhu yang akan membuat benih menjadi stress. Benih ditebar pada bak yang telah di siapkan terlebih dahulu dengan aerasi. Ikan direndam selama 15 menit untuk diaklimatisasi terlebih dahulu agar ikan tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Setelah itu ikan di tebar dengan padat tebar 15 ekor/box dan dilakukannya pengukuran kualitas air setiap hari untuk memastikan sesuai atau tidaknya yang dikehendaki.

Jumlah padat tebar yang optimal sangatlah diperlukan untuk keberhasilan kegiatan penebaran. Jumlah padat penebaran yang tinggi atau terlalu rendah dapat berpengaruh pada proses fisiologi dan tingkah laku sehingga dapat menurunkan produksi (Sudiarto, 2013).

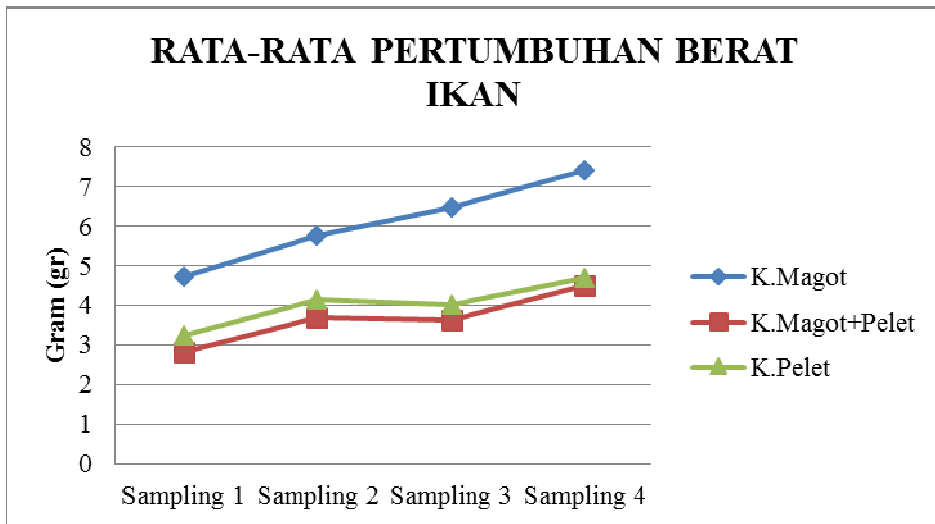
1. Pertumbuhan Berat Harian (*Grow Rate*)

Pengamatan parameter pengukuran berat ikan nila menggunakan timbangan digital agar angka yang dihasilkan lebih akurat, untuk pengamatan berat setiap sampling diambil keseluruhan (100%) dari jumlah padat tebar ikan dan ditimbang satu persatu untuk mengetahui nilai rata-rata berat ikan per setiap minggunya.

Peningkatan berat ikan nila selama 28 hari pemeliharaan menunjukkan bahwa pakan yang diberikan mengandung cukup energi dan memenuhi kebutuhan ikan untuk tumbuh. Dengan kebutuhan nutrisi yang terukupi, maka kebutuhan energi untuk kegiatan metabolisme ikan juga terpenuhi. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemberian pakan magot sebagai pakan alami terhadap pertumbuhan ikan nila (*Oreochromis niloticus*), maka diperoleh hasil pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1. Dapat dilihat bahwa penambahan berat ikan mengalami peningkatan selama masa pemeliharaan. Setiap perlakuan menunjukkan pertambahan berat ikan dengan selisih yang tidak jauh berbeda, pada perlakuan kolam yang di beri pakan magot 100% mengalami petambahan berat yang paling tinggi di antara perlakuan lainnya. Pada gambar grafik di atas menunjukan bahwa laju pertumbuhan ikan nila meningkat seiring dengan meningkatnya kadar protein pakan. Protein pada pakan digunakan untuk pemeliharaan tubuh, pertumbuhan jaringan dan penggantian jaringan yang rusak. Berdasarkan Gambar 6. Dapat dilihat bahwa penambahan berat ikan mengalami peningkatan selama masa pemeliharaan. Setiap perlakuan menunjukkan pertambahan berat ikan dengan selisih yang tidak jauh berbeda, pada perlakuan kolam yang di beri pakan magot 100% mengalami petambahan berat yang paling tinggi di antara perlakuan lainnya. Kandungan protein yang

terdapat pada magot relatif tinggi ini sangat potensial sebagai pakan tambahan untuk pembesaran ikan konsumsi. Rata-rata berat pada perlakuan kolam yang di beri pakan magot 100% yaitu sebesar 7,41 gram dan perlakuan kolam yang di beri pakan magot + pelet mengalami pertumbuhan yang paling kecil yaitu 4,49 gram. Untuk perlakuan kolam yang di beri pakan pelet mengalami peningkatan dibandingkan dengan perlakuan kolam yang di beri pakan magot + pelet tetapi tidak lebih besar dari pada perlakuan kolam yang diberi pakan magot 100%.



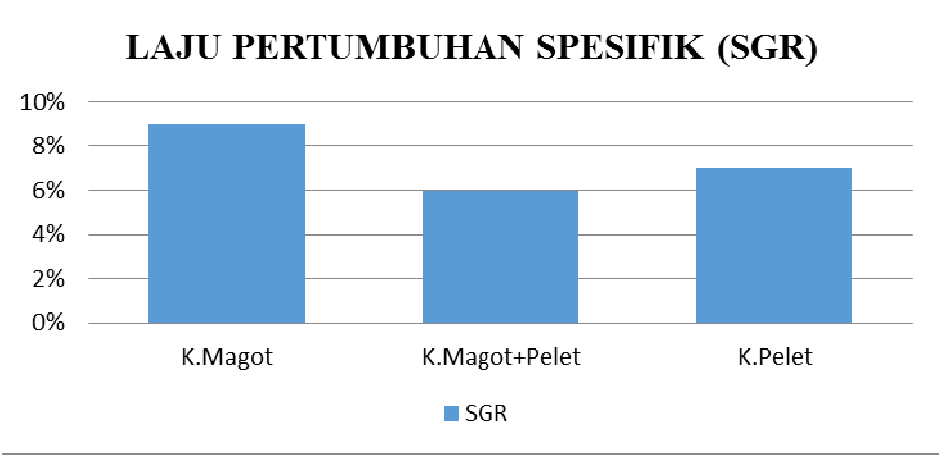
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan berat ikan

Berdasarkan hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fahmi, 2008) yang menyebutkan bahwa maggots merupakan salah satu sumber protein hewani yang mengandung kisaran protein 30-45%.

2. Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR)

Penghitungan laju pertumbuhan spesifik (SGR) diukur dengan melakukan pengambilan dan pengukuran ikan pada saat awal dan akhir melakukan sampling. Hasil pengamatan pada pertumbuhan ikan nila selama 28 hari perlakuan dapat dilihat pada Gambar 3.

Berdasarkan pada Gambar 2. Nilai sampling menunjukkan pertumbuhan berat ikan nila selama 28 hari memiliki nilai berat yang berbeda-beda, nilai yang tertinggi terdapat pada perlakuan kolam yang di beri pakan Magot 9% dan nilai terendah terdapat pada kolam magot + pelet 6%.



Gambar 3. Grafik Pertumbuhan (SGR)

3. Pertumbuhan Panjang

Pengukuran pertumbuhan panjang ikan dilakukan dengan menggunakan penggaris, dikarenakan tidak ada milimeter block untuk mengukur panjang ikan. Sampling diambil keseluruhan (100%) dari jumlah padat tebar ikan dan di ambil satu persatu untuk mengetahui nilai rata-rata panjang ikan per setiap minggunya.

Pertambahan panjang mutlak merupakan selisih antara ujung kepala hingga ujung ekor tubuh pada akhir pengamatan dengan panjang tubuh pada awal pengamatan. Hasil pengamatan panjang mutlak selama 28 hari dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan Panjang Mutlak

Perlakuan	TL 1 (Panjang awal) (cm)	TL 0 (Panjang Akhir) (cm)	LM (cm)
K.Magot	9,39	8,17	1,29
K.Magot+Pelet	7,44	7,77	0,32
K.Pelet	7,32	7,74	0,41

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa setiap perlakuan memiliki nilai panjang mutlak yang berbeda-beda, nilai tertinggi terdapat pada perlakuan kolam yang di beri Magot 100% yaitu 1,29 cm dan nilai terendah terdapat pada perlakuan kolam magot + pelet yaitu 0,32 cm.

4. Pengaruh Pemberian Magot Untuk Pakan Ikan

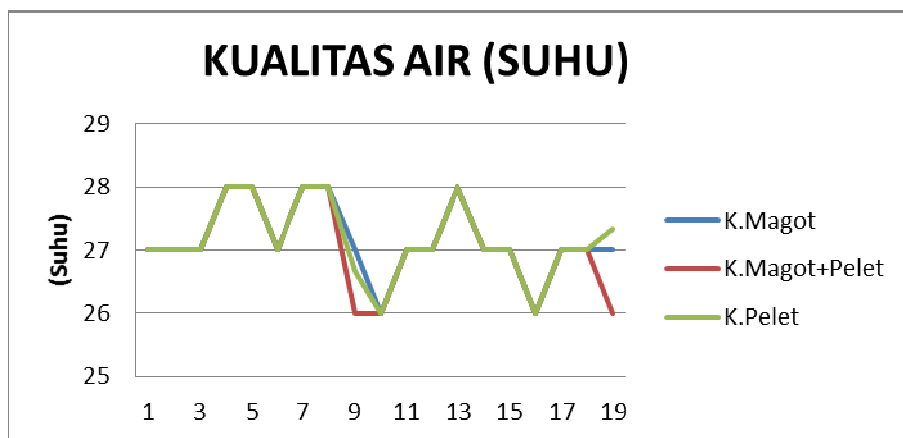
Efisiensi pakan yang tinggi menunjukkan penggunaan pakan yang efisien, sehingga hanya sedikit zat makanan yang dirombak untuk memenuhi

kebutuhan energi dan selebihnya digunakan untuk pertumbuhan (Rosadi, 2010). Efisiensi pakan merupakan ratio antara pertambahan bobot dengan jumlah pakan yang diberikan selama penelitian. Pemberian pakan pada setiap kolamnya berbeda-beda. Perlakuan kolam yang di beri pakan magot 100% di beri pakan setiap harinya sebanyak 22,5 gram, untuk kolam perlakuan yang di beri pakan magot + pelet sebanyak (11,25 gram untuk magot + 11,25 gram pelet) dan untuk perlakuan kolam pelet 100% sebanyak 22,5 gram.

Efisiensi pakan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yaitu kualitas pakan. Pakan yang dimakan ikan akan diproses dalam tubuh dan unsur-unsur nutrisi atau gizinya akan diserap untuk dimanfaatkan membangun jaringan sehingga terjadi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ikan sangat dipengaruhi oleh jenis dan kualitas pakan yang diberikan.

5. Kualitas Air

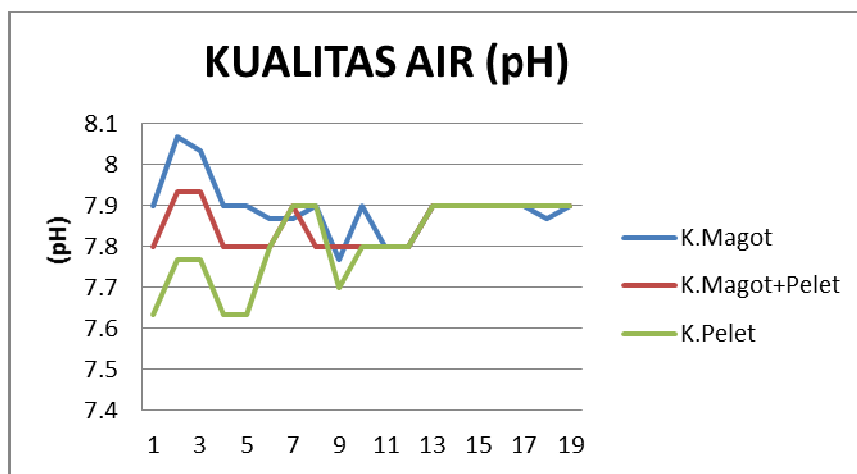
Kualitas air merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan suatu budidaya ikan nila. Penurunan kualitas air menyebabkan timbulnya penyakit, gangguan reproduksi pada ikan, pertumbuhan ikan terhambat, pengurangan rasio konversi pakan bahkan dapat menyebabkan kematian. Parameter kualitas air akan mempengaruhi proses metabolisme ikan, seperti keaktifan mencari pakan, proses pencernaan dan pertumbuhan pada ikan. Pengukuran kualitas air yang diamati pada penelitian ini yaitu meliputi suhu dan pH. Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan termometer dengan cara dimasukan kedalam container box tunggu beberapa saat kemudian dilihat nilainya.



Gambar 4. Grafik Suhu Air

Suhu merupakan salah satu faktor yang penting dalam kegiatan budidaya perikanan. Semakin tinggi suhu maka semakin aktif metabolisme ikan. Pada suhu rendah, ikan akan kehilangan nafsu makan dan menjadi lebih rentan

terhadap penyakit. Sebaliknya jika suhu terlalu tinggi maka ikan akan mengalami stress pernapasan dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada insang (Suriyansyah, 2014). Berdasarkan hasil pengukuran suhu air media pemeliharaan benih ikan nila selama pengamatan diperoleh suhu pada setiap perlakuan berkisar antara 26-28°C. Kisaran suhu yang optimal untuk budidaya ikan nila yaitu berkisar antara 28-32°C. Hal ini menunjukkan bahwa suhu didalam wadah pemeliharaan tersebut masih dalam kondisi yang optimal.



Gambar 5. Grafik pH Air

Menurut Setijaningsih dan Gunadi (2016), menyatakan bahwa sebagian besar organisme akuatik sensitif terhadap perubahan pH, ikan lebih menyukai pH netral yaitu antara 7-8,5. Dalam pengamatan ini, hasil pengukuran pH di dalam wadah pemeliharaan berkisar antara 7,6-8. Hal ini menunjukkan bahwa pH didalam wadah pemeliharaan masih dalam kondisi yang optimal.

Sedangkan kandungan DO yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan nila sebesar 3 mg/l. Adanya oksigen terlarut dalam air secara mutlak terutama dalam air permukaan (Pujiastuti dkk, 2015).

PENUTUP

Pemberian pakan magot untuk ikan nila berpengaruh pada pertumbuhan. Hasil terbaik dari penelitian yaitu dengan pemberian magot sebesar 100%. Magot dapat dijadikan sebagai pakan alternatif bagi pembudidaya ikan karena magot mempunyai nutrisi yang sangat tinggi, ketersediaan yang melimpah sehingga pemanfaatannya tidak bersaing dengan manusia dengan media tumbuhnya yang mudah dibuat sehingga potensi sebagai alternatif kombinasi pakan ikan. Harga dari telur magot yang akan dibudidakan sebagai magot juga relative murah dibandingkan dengan pakan komersil. Sehingga manfaat yang

diberikan dapat membantu pembudidaya ikan khususnya ikan nila dalam menekan pengeluaran di pakan komersil. Magot dapat digunakan sebagai pengganti pakan komersil atau tambahan pakan alternatif bagi ikan air tawar.

DAFTAR PUSTAKA

- Čičková H, Newton GL, Lacy RC, Kozánek M. 2015. The use of fly larvae for organic waste treatment. *Waste Manag.* 35:68-80.
- Djissou ASM, Adjahouinou DC, Koshio S, Fiogbe ED. 2016. Complete replacement of fish meal by other animal protein sources on growth performance of *Clarias gariepinus* fingerlings. *Int Aquat Res* 8:333-341.
- Thomas-Hunt, M. C., Ogden, T. Y., & Neale, M. A. (2003). Who's really Sharing? effects of social and expert status on knowledge exchange within groups. *Management Science*, 49(4), 464-477. doi: 10.2307/4133951.
- Fahmi MR, Hem S, Subamia IW. 2009a. Potensi maggot untuk peningkatan pertumbuhan dan status kesehatan ikan. *Jurnal Riset Akuakultur*. 4 (2): 221-232.
- Katayane, Falicia A, Bagau B, Wolayan FR, Imbar MR. Mei 2014. Produksi dan Kandungan Protein Maggot (*Hermetia illucens*) Dengan Menggunakan Media Budidaya Berbeda. *Jurnal zootek* Vol. 34:27-33
- Pujiastuti P, Ismail B, Pranoto. 2013. Kualitas dan Beban Pencernaan Perairan Waduk Gajah Mungkur.
- Putra. 2010. Kajian Probiotik dan Sinbiotik untuk Meningkatkan Kinerja Perumbuhan Ikan Nila. TESIS. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Rosadi, T., S. Amir dan Z. Abidin. 2010. Pengaruh Pembatasan Konsumsi Pakan Terhadap Bobot Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*). *Jurnal Perikanan Unram* 1 (1): 8-13.
- Sudiarto. A, Mustahal dan Putra AN. 2013. Aplikasi Probiotik Pada Pakan Komersial untuk Meningkatkan Kinerja Pertumbuhan Pada Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*). *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 4 (4):229-234.
- Suriansyah. 2014. Pengaruh padat tebar yang berbeda terhadap pertumbuhan ikan Nila Gift (*Oreochromis niloticus*) yang dipelihara dalam baskom plastik [skripsi]. Pangkalan Bun: Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Antakusuma.
- Yanti, Z., Z. Muchlisin dan Sugito. 2013. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila (*Oreochromis niloticus*) pada beberapa konsentrasi tepung daun jalloh (*Salix tetrasperma*) dalam pakan. *Depik*, 2(1): 16-19.

KONTRIBUTOR PENYUMBANG ARTIKEL BUKU BUNGA RAMPAI

ARTIKEL 1



Retnoningrum Hidayah, S.E., M.Si., MSc

Lahir di Semarang, Jawa Tengah. Ia bekerja sebagai dosen jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Retnoningrum Hidayah lulus dengan gelar sarjana dari Universitas Negeri Semarang. Lulus dari University of Huddersfield, United Kingdom, pada *Master of Science in Accounting*. Ia juga berhasil lulus dari Program Magister dengan fokus Akuntansi Forensik, di Universitas Diponegoro, Indonesia. Selain itu, beliau telah memiliki sertifikasi pada bidang manajemen risiko dan audit internal yaitu *Certified Risk Management Professional* (CRMP) dan *Qualified Internal Auditor* (QIA). Minat penelitiannya pada topik tata kelola perusahaan, audit, keuangan, manajemen risiko, akuntansi, dan laporan keberlanjutan. Lebih lanjut, ia menjadi anggota auditor internal di Universitas Negeri Semarang sejak 2015 hingga sekarang. Beberapa penelitiannya telah ia presentasikan di forum ilmiah internasional di berbagai negara seperti Hongkong, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Kemudian, ia pun telah mempublikasikan artikel penelitiannya pada berbagai jurnal nasional dan internasional.

ARTIKEL 2



Sodik Dwi Purnomo, S.E., M.E., CIQnR.

Lahir di Madiun 25 Januari 1995. Lulus Strata 1 pada program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Jenderal Soedirman tahun 2017 dan melanjutkan Strata 2 di Universitas yang sama pada program studi Magister Ilmu Ekonomi lulus tahun 2020. Pada tahun 2020 pernah mengikuti Lokakarya Nasional Penelitian Kuantitatif dan Sertifikasi Peneliti Kuantitatif Internasional Bersertifikat (CIQnR). Saat ini menjadi dosen di prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijayakusuma Purwokerto mengajar matematika ekonomi, metode penelitian, ekonomi mikro, evaluasi

proyek. Selama tahun 2019 sampai sekrang sudah menerbitkan 22 artikel di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi. Saat ini menjadi *vice of chief editor* di jurnal Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis dan menjadi *reviwer* di beberapa jurnal nasional.

ARTIKEL 3



Erni Panca Kurniasih

Lulus S-1 di Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Tanjungpura, Pontianak tahun 1996, lulus S-2 Magister Sains di Pascasarjana Universitas Gadjahmada, Yogyakarta tahun 2003, dan lulus S-3 Program Doktor Ekonomi Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2012. Saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Tanjungpura dan Chief Editor Jurnal Ekonomi Bisnis Kewirausahaan (JEBIK). Pernah menjabat sebagai sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB Universitas Tanjungpura tahun 2017. Beberapa tulisan pernah terbit di beberapa jurnal internasional dan nasional terakreditasi serta aktif menjadi pembicara pada konferensi nasional dan internasional baik di Malaysia, Vietnam, Jepang dan Saudi Arabia.

ARTIKEL 4



Dian Ayunita Nugraheni Nurmala Dewi, S.Pi., M.Si..

Adalah Staf Pengajar pada Laboratorium Sosial Ekonomi Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Bidang penelitian yang ditekuni adalah Ekonomi Perikanan. Aktif menulis artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional. Berbagai pelatihan pengembangan pembelajaran telah diikuti. Seperti Pelatihan *Teaching Skill and Methodology: Content and Language Integrated Learning (CLIL)* kerjasama LP2MP dan IALF (Indonesia Australia Language Foundation) Bali dengan sertifikat *Teacher Training* dari University of Cambridge-UK (2011). Selain itu juga menulis buku sebagai pengembangan materi bahan ajar. Buku yang telah diterbitkan adalah Statistika Dasar untuk Bidang Perikanan dan Kelautan yang terbit tahun 2019. Penulis juga aktif dalam kegiatan pertemuan ilmiah di tingkat nasional dan internasional baik sebagai pembicara maupun reviewer. Saat ini sedang menempuh studi doktoral di Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro dengan beasiswa

dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pembaca dapat menghubungi penulis pada alamat surel: dianayunita_nnd@live.undip.ac.id.

ARTIKEL 5



Dr. Lilis Siti Badriah, S.E., M.Si

Adalah Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, sejak tahun 1998. Ia Lahir di Ciamis, 13 April 1972. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), dan menyelesaikan pendidikan Magister dan Doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung, Program Studi Ilmu Ekonomi. Dengan latar belakang pendidikan bidang ilmu ekonomi, ia aktif melakukan berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta aktif menulis berbagai artikel ilmiah pada jurnal nasional dan jurnal internasional sesuai dengan bidang ilmunya tersebut. Ia juga menjadi salah satu kontributor artikel buku Bunga Rampai dengan judul “Dinamika Pembangunan Berkelanjutan Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19” pada Tahun 2020 dan menjadi salah satu kontributor artikel di media *online* kuasakata.com. Alamat email yang dapat dihubungi: lilissitibadriah@gmail.com.

ARTIKEL 6



Widya Pangestika, S.ST, M.T.

Lulus Program D-IV di Program Studi Teknokimia Nuklir, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir pada tahun 2015. Lulus Program S-2 di Program Studi Teknik Kimia, Universitas Indonesia pada tahun 2018. Sejak tahun 2019 sampai saat ini, sedang menjabat sebagai Dosen sekaligus Sekretaris pada Program Studi Pengolahan Hasil Laut, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Telah memiliki sertifikat kompetensi pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan oleh BNSP, dan aktif berperan sebagai asesor kompetensi. Pernah menjabat sebagai staf *Production Planning and Inventory Control* PT Agungtex pada Agustus 2015-Januari 2016, dan staf pengelola IJTech (*International Journal of Technology/ Terindeks Scopus Q2*) pada Agustus 2018-Januari 2019. Aktif menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah nasional maupun jurnal internasional bereputasi. Pernah tampil sebagai pembicara pada 2 konferensi internasional, dan 1 konferensi nasional. Selain itu, juga pernah menjadi narasumber pada webinar

bertema “Penerapan Teknologi Nuklir untuk Pengawetan Bahan Pangan” pada tahun 2020. Sering berdiskusi dengan beberapa praktisi yang berhubungan dengan bidang pengolahan hasil laut dan bidang lain yang sejenis.

ARTIKEL 7



Saifudin Zuhri, M.Si

Lulus S1 di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (FE Unnes), Lulus S2 Program Magister ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (MIESP) Universitas Diponegoro. Saat ini penulis sedang menyelesaikan studinya pada Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) Universitas Diponegoro.

Penulis tercatat sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, dan pernah menjadi dosen terbang di Universitas Trilogi, Jakarta. Selain itu, penulis aktif Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), *Center for Economic Studies and Development Policies (CESDEP)* FEBI IAIN Salatiga, Pusat Studi Ekonomi Inklusif dan Ekonomi Syariah (Pukees) Indonesia dan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Jawa Tengah. Dibidang jurnal ilmiah penulis pernah aktif sebagai editor pada Jurnal Muqtasid dan Reviewer pada *Indonesian Journal of Islamic Economics Research (IJIER)*. Beberapa karya tulis yang dihasilkan telah diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, majalah dan buletin. berkorespondensi dengan penulis di: saifudinzuhri10@gmail.com.

ARTIKEL 8



Dr. Triana Lidona Aprilani, ST., M.Ak

Kelahiran Ampenan 2 April 1980 merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Gelar Sarjana S-1 diperoleh dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2005, Gelar Magister Akuntansi di Universitas Mataram Tahun 2013 dan menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Udayana Denpasar Bali Tahun 2021. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah dan pernah mengikuti Article Coaching Clinic on International Journal di Kuala Lumpur, Malaysia Tahun 2019. Saat ini fokus mengajar mata kuliah Dasar Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, Perekonomian Indonesia dan Ekonomi Pariwisata.

ARTIKEL 9**Kusuma Arumsari**

Lahir di Yogyakarta, 19 Juni 1988. Lulus S1 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Jurusan Perikanan UGM tahun 2011, dan lulus s2 dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian UGM tahun 2015. Pengalaman mengajar di Universitas Alma Ata Yogyakarta (2015-2016) sebagai dosen tidak tetap, selanjutnya di Universitas Widya Dharma Klaten (2016-2017), dan sejak 2017 bergabung dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran sebagai staf pengajar di prodi Pengolahan Hasil Laut bidang keahlian Pengolahan Produk Konsumsi. Telah mengikuti beberapa pelatihan yang menunjang kinerja, diantaranya Pelatihan Asesor Kompetensi yang diselenggarakan LSP KP bekerjasama dgn Poltek KP Pangandaran, Kuliah Halal Angkatan 3 Tahun 2020 yang diselenggarakan Halal Research Centre Fakultas Peternakan UGM, dan beberapa pelatihan teknis yang diselenggarakan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Kelautan dan Perikanan, serta memperoleh Sertifikat Asesor Kompetensi bidang Pengolahan Hasil Perikanan yang dikeluarkan oleh BNSP.

ARTIKEL 10**Ir. Sugeng Nugroho Hadi, MM.**

Lahir di Jogjakarta pada tanggal 18 Mei 1961. Riwayat pendidikan tinggi: (1) Diploma 3 di Jurusan Teknik Elektro Akademi Teknologi Nasional (ATNAS) Yogyakarta lulus 1984; (2) S1 di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang lulus 1989; (3) S2 Magister Management di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) lulus tahun 2012. Pengalaman mengajar: (1) AMIK Wira Setya Mulya Yogyakarta tahun 1990-2000; (2) Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta-SEM Institut tahun 2000-2005; (3) STEI Hamfara Yogyakarta tahun 2006-sekarang. Mengampu dan menekuni keilmuan: Perilaku Organisasi, Manajemen Operasi, Sistem Informasi Manajemen, Riset Pemasaran. Beberapa karya terpublikasikan: (1) Manajemen Persediaan Industri Kuliner Perspektif Syariah (Studi Kasus Waroeng SS Indonesia); (2) Perilaku Etika Bisnis Islam Petugas Pembiayaan Lembaga Mikro Syariah BMT Dalam Persepsi Pedagang Pasar Beringharjo; (3) Analisis Product Knowledge Pembiayaan Wadiah Pada Karyawan Bank Muamalat Indonesia; (4) Preferensi Pedagang Pasar Tradisional Bantul

Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Masa Pandemi; (5) Religiusitas Bauran Pemasaran Pada Lembaga Keruangan Mikro Syariah BMT Binamas Purworejo; (6) lain-lain.

ARTIKEL 11



Grace Natalia Marpaung, S.E., M.Si.

Adalah seorang staf pengajar di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Ia juga rajin menulis di Media Massa, Jurnal Penelitian. Alumni S2 dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro ini selalu bersahaja, bersikap rendah hati, dan bersahabat dengan siapapun. Jika ada pembaca yang mau mengenal lebih lagi dapat berkenalan: gracenataliam@gmail.com

ARTIKEL 12



Fafurida, S.E., M.Sc.

Merupakan salah satu staf pengajar di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang. Lulus Pendidikan S1 Jurusan Ekonomi Pembangunan di UPN "Veteran" Yogyakarta pada tahun 2005 dan berhasil menyelesaikan studi S2 Ilmu Ekonomi di UGM pada tahun 2008. Ia aktif melakukan kegiatan tridharma untuk memenuhi kinerjanya sebagai dosen. Fokus penelitiannya di bidang ekonomi regional, perencanaan pembangunan dan ekonomi pariwisata. Banyak artikel karyanya telah dimuat pada jurnal-jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional.

ARTIKEL 13



Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si.

Staf pengajar di jurusan Ekonomi Pembangunan dan saat ini menjabat sebagai wakil dekan bidang umum dan keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Menyelesaikan Pendidikan S1 dari Universitas Diponegoro, S2 dari Universitas Gajah Mada, dan gelar Doktor diraih dari Univesitas Sebelas Maret. Aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

dan menulis pada publikasi ilmiah nasional maupun internasional. Selain itu terlibat dalam pengelolaan beberapa jurnal ilmiah nasional maupun reviewer jurnal pada beberapa Jurnal ilmiah bidang ekonomi di Indonesia.

ARTIKEL 14



Asep Ferry Bastian

Lahir di Garut 20 Desember 1977. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Pagelaran, Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut, Jawa Barat, lulus 1990. Melanjutkan ke tingkat SLTP di SMPN 1 Garut, lulus 1993, dan menamatkan SLTA di STM Gilang Kencana Garut, lulus 1996. Pendidikan tinggi (S1) dari Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, lulus 2003. Kemudian melanjutkan (S2) Magister Manajemen, di Universitas Mercu Buana, Jakarta, lulus 2007. Selanjutnya, melanjutkan (S3) Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, dan lulus 2019. Akhir 2018, menempuh studi (S3) untuk kedua kalinya pada Program Doktor (Ph.D) di *Faculty Of Technology Management And Technopreneurship*, Universiti Teknikal Malaysia (UTeM), Melaka. Pengalaman kerja, sejak 2008 hingga sekarang bekerja sebagai dosen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNIS Tangerang dan menjabat sebagai Kepala UPT. Humas dan Marketing sejak 2014 hingga sekarang. Sebelumnya, 2004-2008 pernah bekerja sebagai wartawan dan manajer pemasaran Harian Satelit News/Rakyat Merdeka Group, Tangerang. Kemudian, pada 2008 hingga sekarang menjadi staf pribadi H. Arief R. Wismansyah (Walikota Tangerang) dan staf direktur utama Rumah Sakit Sari Asih Group, Tangerang, Banten. Pada 2021 menjabat sebagai direktur utama PT. Salamaka Media Tama. Selain dosen, penulis juga bekerja sebagai konsultan dan peneliti. Menjadi pembicara di forum akademik dan umum. Aktif menulis opini di media massa. Berbagai artikel karya ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Kontak penulis HP. 081311410081 dan email a.ferry.bastian@unis.ac.id.

Website: <http://asepferrybastian.unis.ac.id/>

ARTIKEL 15**Karsinah, S.E., M.Si**

Email UNNES: iinkarsinah@mail.unnes.ac.id Latar Belakang Pendidikan: S1: Univ. Jenderal Soedirman Tahun: 1990 s/d 1995. S2: UGM Tahun: 2004 s/d 2007 Bidang pengajaran: Ekonomi Syariah, Matematika Ekonomi, Ekonomi Moneter. Minat Penelitian: Bidang Moneter/Perbankan, Bidang Syariah, Bidang UMKM

ARTIKEL 16**Dr. Mahmud Yunus, S.Pd., M.Pd**

Lahir di Tegal 18 Mei 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal pada tahun 2013, kemudian menyelesaikan pendidikan S2 Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung pada tahun 2016 dan menyelesaikan pendidikan S3 Program Studi Pendidikan IPS di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020, sekaligus sebagai lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang. Pada tahun 2012 s.d 2017 penulis bekerja sebagai guru di SMP dan SMK. Pada tahun 2017 menjadi dosen Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang. Selain berprofesi sebagai dosen, penulis aktif sebagai pembicara seminar, penulis artikel, editor jurnal dan reviewer baik di jurnal terakreditasi nasional maupun jurnal internasional bereputasi. Buku yang telah diterbitkan penulis berjudul "Profesionalitas *Driver* Transportasi *Online*".

ARTIKEL 17**Sri Wahyuni, S.Pd., M.A**

Lulusan Sarjana dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011 dan Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Saat ini adalah dosen tetap di Program Studi Pendidikan Sosiologi, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia. Mendedikasikan diri dalam bidang pendidikan, pernah mengajar di SMA Yayasan Abdi Karya di Lubuklinggau, juga di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Ketertarikan dalam penulisan pada bidang Sosiologi Pendidikan, Metode Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat

ARTIKEL 18

Nina Farliana, S.Pd., M.Pd
(ID Sinta: 6124088, ID Scopus: 57211883969).

Perempuan kelahiran Kendal, 10 September 1989 ini menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Negeri Semarang tahun 2012, dan magisternya di Universitas Negeri Malang tahun 2015 dengan program keilmuan Pendidikan Ekonomi. Penulis saat ini tercatat sebagai dosen aktif di Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Beliau adalah penulis buku berjudul Praktik Perkoperasian (Pendirian, Manajemen, Pertanggungjawaban dan Rapat Anggota, 2019), Strategi Penelitian Tindakan Kelas (2020), Green Leadership (2020), dan Aspek Hukum Dalam Bisnis (2021), juga penulis di jurnal internasional bereputasi dan memiliki faktor dampak terindeks Scopus dan Web of Science (WoS), serta jurnal nasional terakreditasi. Fokus riset beliau adalah pembelajaran ekonomi, koperasi dan UMKM, serta ekonomi sumber daya manusia. Saat ini beliau diamanahi sebagai Ketua Bidang Pengembangan IPTEK, Mahasiswa dan Inovasi Bisnis Pusat Studi Pendidikan dan Kewirausahaan Universitas Negeri Semarang. Untuk menghubungi atau berdiskusi dengan beliau dapat mengirimkan di email: ninafarliana@mail.unnes.ac.id

ARTIKEL 19

Rr. Retno Sugiharti, S.E., M. Si,

Lahir di Semarang, 5 Maret 1986, mulai menempuh pendidikan Sarjana di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro pada tahun 2005. Penulis adalah penerima Program Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga sejak bulan September 2012 penulis mulai aktif mengikuti program kuliah magister di Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (MIESP) Universitas Diponegoro, sembari aktif sebagai staff di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Dalam dunia akademik, sejak kuliah S1 penulis aktif menjadi instruktur pelatihan-pelatihan *software* dan analisis statistik. Kini penulis sedang memulai karir sebagai staff pengajar di Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar terhitung sejak bulan April 2018.

ARTIKEL 20**Qristin Violinda S.Psi,MM,Ph.D**

Lahir di Manado 17 Oktober 1980, menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Psikologi UNDIP tahun 2005 kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister manajemen UNDIP dan Menyelesaikan pendidikan S3 pada program studi Manajemen SMEs di HZAU Wuhan, China pada tahun 2016. Pada tahun 2010-2013 penulis merupakan Dosen di fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri

Semarang kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan karirnya sebagai dosen di Universitas PGRI Semarang pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain berprofesi sebagai Dosen penulis aktif sebagai chief in editor dan juga aktif sebagai reviewer. Menulis merupakan salah satu kegemaran sehingga banyak tulisan penulis yang sudah dimuat dalam buku dan jurnal terakreditasi serta bahkan sampai jurnal internasional bereputasi.

ARTIKEL 21**Dr. Kusmuriyanto, M.Si.**

Lulus S1 dari Program Studi Pendidikan Dunia Usaha dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, lulus S2 Program Studi Ilmu Manajemen dari Universitas Padjajaran dan lulus S3 Program Studi Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Saat ini sebagai dosen PNS sekaligus menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah yang diampu meliputi: Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjut, dan Akuntansi Pajak.

ARTIKEL 22**Maylia Pramono Sari, SE, M.Si, Akt, CA, ACPA**

Lahir di Ngawi, 03 Mei 1980. Lulus Sarjana Ekonomi (SE) dari STIE YKPN Yogyakarta Tahun 2002; Magister of Sains I (M.Si) Universitas Gadjah Mada Tahun 2004 dan Program Profesi Akuntansi (PPA) Universitas Diponegoro Tahun 2010. Bekerja sebagai Dosen di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2005 hingga sekarang. Pernah mengikuti Pendidikan

Profesi berupa Diklat Auditor Internal pada Yayasan Pendidikan Internal Audit

(YPIA) Tahun 2010; Associated Certified of Public Accountant (ACPA) pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tahun 2018 dan Sertifikasi Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun 2019.

ARTIKEL 23



Novi Theresia Kiak, SE.M.SE.

Lahir di Kupang, tanggal 01 November 1985. Telah menyelesaikan SI (Strata I) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tahun 2009, dan magister Ilmu Ekonomi di Universitas Airlangga tahun 2015. Dosen tetap di Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, dan sejak saat itu mendalami dan mengajar mata kuliah ekonomi publik, analisis kebijakan Publik. Pengurus ISEI Regional Kota Kupang, dan aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah.

ARTIKEL 24



Intan Perwitasari, SE, ME.

Penulis merupakan peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) (2009-2021), dan sekarang bekerja di bawah Badan Riset Nasional (BRIN). Latar belakang pendidikan terakhir adalah Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Diponegoro (lulus tahun 2018). Kepakaran penelitian saat ini adalah terkait kebijakan kedirgantaraan. Beberapa topik penelitian sebelumnya yang telah dilakukan adalah terkait topik ekonomi keantariksaan (*space economy*), *space education* dan kebijakan antariksa (*space policy*).

ARTIKEL 25



Prasetyo Ari Bowo, S.E., M.Si

Lahir di Tangerang. Saya adalah Dosen PNS di Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya Tidak sedang studi lanjut. Saya bergabung di Universitas Negeri Semarang sebagai Dosen PNS sejak 01 April 2006. Pendidikan terakhir yang saya tempuh adalah pada jenjang Strata 2 (S2) - (Lulus 08 Desember 2004), dan lulus pada 08 Desember 2004. Sebagai seorang Dosen PNS dengan jabatan Lektor (Kepala

Laboratorium), saya mengampu mata kuliah pokok. Jika membutuhkan beberapa pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui email prasabe@mail.unnes.ac.id

ARTIKEL 26



Khusaini

Penulis kelahiran Jember, 6 April 1970 ini memiliki nama lengkap **Khusaini**. Penulis alumnus Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIS Tangerang tahun 1996. Tahun 2004, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Ekonomi FEB-UI. Tahun 2021, penulis juga menyelesaikan Magister Akuntansi di FEB-Universitas Budi Luhur Jakarta. Gelar Doktor Ilmu Ekonomi diraih oleh penulis tahun 2017 dari FEB-Unpad Bandung. Saat ini penulis menjadi guru PNS di SMAN 7 Kota Tangerang sejak dan menjadi guru honor di SMK Lab Business School Kota Tangerang dari tahun 2007 hingga sekarang. Penulis juga menjadi dosen dengan perjanjian kerja di FKIP UNIS Tangerang mulai 1997 – hingga sekarang. Di sela-sela kesibukan mengajar, penulis aktif di beberapa organisasi diantaranya sebagai Wakil Ketua MGMP Kota Tangerang 2015- sekarang dan aktif di organisasi Banom NU dan membantu berdirinya PMII Komisariat UNIS Tangerang. Buku yang pernah dihasilkan adalah Profesi Keguruan (Konsep, Profil, Permasalahan, dan Solusinya) dan Book Chapter tentang Pendidikan dan Human Capital. Hasil karya ilmiah penulis yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional dan jurnal internasional, yang terbaru antara lain: 1) Measuring the Inequality in Education: Educational Kuznets Curve [JEM, Volume 54 (3), 2020], dan 2) Education Equality and Economic Growth in Indonesia [JEJAK, Volume 14 (1), 2021].

ARTIKEL 27



Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Si

Lahir di Brebes. Saya adalah Dosen PNS di Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya Tidak sedang studi lanjut. Saya bergabung di Universitas Negeri Semarang sebagai Dosen PNS sejak 01 April 2014. Pendidikan terakhir yang saya tempuh adalah pada jenjang Strata 2 (S2) - (Lulus 24 Oktober 2012), dan lulus pada 24 Oktober 2012. Sebagai seorang Dosen PNS dengan jabatan Lektor, saya mengampu mata kuliah pokok Ekonomi Publik. Jika membutuhkan beberapa pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui email yoziaulia@mail.unnes.ac.id.

ARTIKEL 28**Sri Wahyuni, S.Pd., M.A**

Lulusan Sarjana dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011 dan Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Saat ini adalah dosen tetap di Program Studi Pendidikan Sosiologi, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia. Mendedikasikan diri dalam bidang pendidikan, pernah mengajar di SMA Yayasan Abdi Karya di Lubuklinggau, juga di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Ketertarikan dalam penulisan pada bidang Sosiologi Pendidikan, Metode Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat

ARTIKEL 29**Phany Ineke Putri, S.E., M.Si**

Lahir di Jakarta. Saya adalah Dosen PNS di Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya Tidak sedang studi lanjut. Saya bergabung di Universitas Negeri Semarang sebagai Dosen PNS sejak 01 April 2015. Pendidikan terakhir yang saya tempuh adalah pada jenjang Strata 2 (S2) - (Lulus 11 Juli 2013), dan lulus pada 11 Juli 2013. Sebagai seorang Dosen PNS dengan jabatan Asisten Ahli, saya mengampu mata kuliah pokok. Jika membutuhkan beberapa pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui email phany@mail.unnes.ac.id.

ARTIKEL 30**Nury Ariani Wulansari, SE., M.Sc**

Lahir di Pati, 08 Januari 1985 lulusan S1 dari Jurusan Manajemen FE UNS dan S2 dari Program Magister Sains Ilmu Manajemen UGM tahun 2009. Saat ini mengabdikan sebagai staf pendidik pada Jurusan Manajemen FE UNNES dengan peminatan ilmu MSDM. Selama masa kerja 11 tahun ini, penulis telah aktif terlibat dalam kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat dan penulisan artikel ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional. Selain aktivitas akademis, penulis juga aktif terlibat dalam kegiatan profesional asosiasi profesi MSDM sebagai salah satu asesor yang menguji skema kompetensi teknis pada profesi MSDM. Beberapa buku yang pernah ditulis bersama dengan kolega diantaranya mengenai Green HRM, praktik MSDM pada konteks

perguruan tinggi dan modul pembelajaran untuk kelas kepemimpinan. Saat ini, penulis lebih *concern* pada bidang peran gender dan fenomenanya di tempat kerja serta ke depan ingin lebih aktif mengkaji hal ini supaya dapat memberikan masukan pada pemerintah terkait dinamika pekerja perempuan.

ARTIKEL 31



Nurjannah Rahayu Kistanti, S.E., M.Si

Merupakan salah satu staf pengajar di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang. Pendidikan terakhir S2 yang ditempuh di Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Ia aktif melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Fokus penelitiannya di bidang ekonomi moneter, ekonomi makro dan ekonomi pembangunan. Telah banyak publikasi artikel yang diterbitkan di jurnal baik nasional maupun internasional.

ARTIKEL 32



Suci Nurpratiwi, S.Pd.I., M.Pd.

Merupakan seorang dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Lahir di Tangerang, 1 November 1991. Telah menyelesaikan studi S1 dan S2 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 dan 2017. Suci memiliki minat pada kajian kependidikan, pendidikan Islam, dan teknologi pendidikan. Saat ini Suci aktif mengajar sebagai dosen PAI, menjabat sebagai Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, dan menjadi Asesor Mutu Internal (AMI) Universitas Negeri Jakarta.

ARTIKEL 33



Iwan Wijaya, M.Pd.

Adalah guru SMPN 48 Palembang, dilahirkan di Palembang, Sumsel 8 Oktober 1981. Menempuh pendidikan dasar hingga strata 2 di Palembang. S-1 FKIP Universitas PGRI Palembang 2004. S-2 BKU Pendidikan Bahasa Inggris, di Universitas Sriwijaya, Palembang pada 2021. Ia meraih *the 2017 Professional Development Scholarship* dari RELO, U.S. Embassy Jakarta, dan *the Most Impactful Teacher* pada

Indonesia Teaching Fellowship, Ruang Guru di tahun 2019. Mengikuti berbagai pertemuan ilmiah seperti, 1) Pembekalan Instruktur Nasional Program Guru Pembelajar Bahasa Inggris SMP 2016, 2) Mentor Program Guru Pembelajar PPPPTK Bahasa di SMP Negeri 9 Palembang 2016, 3) Pemakalah pada *SRS TEFLIN Seminar*, 4) Peserta *The 15th TEFLIN and 64th Asia TEFL International Conference* di Yogyakarta, 5) Pemrasaran Seminar Nasional Guru Dikdas Berprestasi Kesharlindungdikdas di Jakarta, 2017, & 6) Peserta *Workshop Perlindungan Guru*, Kesharlindungdikdas di Bogor, 2018. Pembaca dapat menghubunginya melalui **WhatsApps**: 085789241700 dan surat elektronik di: iwanwijaya1548@gmail.com

ARTIKEL 34



Sujatno, S.Pd., M.Si.

Guru Kimia SMA N 1 Patikraja Kabupaten Banyumas RT 7 RW 1 Panusupan Cilongok Banyumas. Channel Youtube: Mr JET Kimia. Juara 2 Inovasi Pembelajaran Guru SMA se Jawa Tengah.

ARTIKEL 35



Prima Yustitia Nurul Islami, S.KPm., M.Si,

Lahir di Malang, pada 23 Januari 1989. Perjalanan pendidikan diawali dari jenjang Pendidikan Dasar di SD Angkasa Bogor (1994-2000). Pendidikan Menengah di SMPN 6 Bogor (2000-2003) dan Pendidikan Menengah Atas di SMAN 5 Bogor (2003-2006). Pada tahun 2010 menyelesaikan studi S1 di bidang Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 2015 meraih gelar Magister Sains dari Program Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Penulis memiliki pengalaman sebagai riset asisten pada bidang sosial ekonomi perubahan iklim di pusat studi perubahan iklim di IPB. Saat ini penulis aktif sebagai pengajar di Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Konsentrasi minat kajiannya meliputi Sosiologi Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat, Sosiologi Lingkungan, Sosiologi Pedesaan dan Kajian Gender. Beliau dapat dihubungi di primayustitia@gmail.com.

ARTIKEL 36**Mega Mulianing Maharani, S.Pd., M.Pd**

Mega Mulianing Maharani adalah dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FBlK UNISSULA. Demak adalah kota kelahiran dan Semarang adalah kota tempat tinggal. Gelar S.Pd diperoleh pada tahun 2009 dan M.Pd pada tahun 2012. Saat ini Program Doktor sedang dijalani. UNNES adalah tempat menimba ilmu untuk memperoleh semua gelar tersebut. Bidang Keahlian yang dimiliki adalah pengajaran Bahasa Inggris. Artikel yang ditulis bertopik "*writing, reading dan language teaching*". Pada tahun 2020 bergabung sebagai penulis dalam Bunga Rampai yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UNNES. Belajar dan terus belajar adalah semboyan hidup.

ARTIKEL 37**Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si.**

Salah satu staf pengajar di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang. Kelahiran Klaten, 2 Mei ini memiliki menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2001 dan berhasil menyelesaikan studi lanjut jenjang S2 Ilmu Ekonomi di universitas yang sama pada tahun 2005. Banyak melakukan penelitian di bidang Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Perkotaan, Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Transportasi. Artikel artikel karya pemikirannya telah banyak dimuat di jurnal-jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional.

ARTIKEL 38**Dwi Rahmayani, S.E., M.Si.**

Lahir di Kudus, saya adalah Dosen PNS di Universitas Negeri Semarang. Saya bergabung di Universitas Negeri Semarang sebagai Dosen PNS sejak 01 Maret 2019. Pendidikan terakhir yang saya tempuh adalah pada jenjang Strata 2 (S2) - Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, lulus 29 Juni 2016 (Lulusan terbaik dan Cumlaude). Sebagai seorang Dosen PNS dengan jabatan Tenaga Pengajar, saya mengampu mata kuliah pokok

Mikroekonomi dan Ekonomi Pembangunan. Kunjungi profil google scholar saya melalui link berikut:

[https://scholar.google.com/citations?user=vDh63L8AAAAJ&hl=id&authuser=](https://scholar.google.com/citations?user=vDh63L8AAAAJ&hl=id&authuser=1)

[1](#) Atau jika membutuhkan beberapa pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui email dwirahmayani@mail.unnes.ac.id.

ARTIKEL 39



Dr. Hastarini Dwi Atmanti, SE, MSi.

Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi tahun 1998 dari Universitas Diponegoro dan Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada tahun 2002 juga dari Universitas Diponegoro. Sedangkan studi Doktoralnya diselesaikan pada tahun 2018 dari Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga. Penulis sebagai staf pengajar di FEB Universitas Diponegoro sejak 2002 sampai dengan sekarang. Penulis aktif menulis di jurnal nasional maupun internasional. Penulis menjadi pengelola jurnal di Departemen Ilmu Ekonomi UNDIP dan menjadi reviewer beberapa jurnal nasional. Saat ini penulis sebagai anggota tim TPMF FEB UNDIP.

ARTIKEL 40



Dewi Isma Aryani, S.Ds., M.Ds.

Lahir di Semarang, 24 Januari 1983. Lulus dari Program Sarjana Desain Produk Institut Teknologi Bandung tahun 2005, dan sempat menjadi praktisi sebagai desainer produk di sebuah perusahaan eksportir di bidang kerajinan tangan berbahan alam. Pada tahun 2007, memulai karir akademik sebagai dosen di Universitas Kristen Maranatha dan menjadi bagian dari Fakultas Seni Rupa dan Desain hingga sekarang. Tahun 2010 melanjutkan studi magister ke Institut Teknologi Bandung dan berhasil lulus dengan mempertahankan tesisnya yang berjudul "Kajian Transformasi Visual Desain Karakter Eevee pada Game Pokémon Series Generasi I-V" pada 2012. Memiliki ketertarikan dalam bidang seni dan desain kontemporer, desain produk, desain dan gaya hidup tertuang dalam beberapa karya seni dan juga artikel-artikelnya di beberapa jurnal nasional. Riset yang saat ini sedang digarap adalah tentang Batik Semarang dan telah memasuki tahun kedua dari *roadmap* penelitian. Beberapa karya seni yang dibuat dapat dilihat di akun Instagram

@dewi_isma2001 dan publikasi ilmiah dapat dilihat di Google Scholar: h30NuscAAAAJ.

ARTIKEL 41



Sodik Dwi Purnomo, S.E., M.E., CIQnR.

Lahir di Madiun 25 Januari 1995. Lulus Strata 1 pada program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Jenderal Soedirman tahun 2017 dan melanjutkan Strata 2 di Universitas yang sama pada program studi Magister Ilmu Ekonomi lulus tahun 2020. Pada tahun 2020 pernah mengikuti Lokakarya Nasional Penelitian Kuantitatif dan Sertifikasi Peneliti Kuantitatif Internasional Bersertifikat (CIQnR). Saat ini menjadi dosen di prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijayakusuma Purwokerto mengajar matematika ekonomi, metode penelitian, ekonomi mikro, evaluasi proyek. Selama tahun 2019 sampai sekarang sudah menerbitkan 22 artikel di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi. Saat ini menjadi *vice of chief editor* di jurnal Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis dan menjadi *reviwer* di beberapa jurnal nasional.

ARTIKEL 42



Anas Noor Firdaus, S.T., M.Si.

Lulusan S-1 Program Studi Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang pada tahun 2010. Kuliah S-2 di Program Magister Ilmu Kelautan Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada tahun 2015. Dosen Tetap pada Program Studi D-3 Teknologi Kelautan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran yang merupakan sekolah kedinasan dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mata kuliah yang diampu antara lain: Hukum Kelautan, Fisika Terapan, Pengantar Rekayasa Desain Kelautan, Dasar-Dasar Menggambar Teknik, Hidrodinamika, Dinamika Struktur Terapung, Pengenalan Energi Gelombang Laut, Mekanika Fluida, Mekanika Fluida Terapan, Termodinamika, dan Elektronika Dasar. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi D-3 Teknologi Kelautan dan sekaligus Kepala Unit Laboratorium Fabrikasi yang kedepannya lebih difokuskan pada rekayasa wahana Kelautan (kapal dan benda apung lainnya). Pada Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP-KP), memiliki sertifikat Ahli Kelautan, kompeten pada bidang

asesmen/uji kompetensi dengan kualifikasi Asesor Kompetensi (*Assessor of Competency*).

ARTIKEL 43



Wahyu Puji Astiyani, S.Pi., M.Sc.

Lulus S1 di Program Studi Budidaya Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada tahun 2014, lulus S2 di Program *Master of Science in Aquaculture*, National Taiwan Ocean University (NTOU) tahun 2017. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Budidaya Ikan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Mengampu mata kuliah Hama dan Penyakit Ikan, Bioteknologi Perikanan, Produksi Pakan Buatan Ikan dan Manajemen Usaha Budidaya Perikanan. Pernah menjadi dosen di Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang, Aktif menulis berbagai jurnal ilmiah nasional dan Internasional. Pernah tampil sebagai pembicara di 3 koneferensi International, 1 kali di Jepang, 1 kali di Taiwan dan 1 kali di Surabaya. Telah mengikuti pelatihan Asesor Kompetensi Ahli Budidaya Perikanan, pelatihan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), *Training of Trainers Developing Inclusive and Creative Economics* (DICE) oleh British Council, dan *Coaching* Kewirausahaan.

